



**TERUS BERLAYAR  
MENGEJAR PERTUMBUHAN**

Sailing Forward to Pursue the Growth

# Terus Berlayar Mengejar Pertumbuhan

## Sailing Forward to Pursue the Growth

Perjalanan DJAKARTA LLOYD mengarungi industri pelayaran selama tujuh dekade tidak terlepas dari pasang surut dan dinamika persaingan bisnis. Walau demikian, Perseroan senantiasa berkomitmen menghadirkan solusi layanan perkapalan dan logistik terpadu bagi para pelanggan, sekaligus berperan aktif membangun negeri melalui peningkatan konektivitas barang antarpulau.

Di tengah dinamika ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas sepanjang 2019, Perseroan berhasil mencetak peningkatan kinerja keuangan, baik dari sisi pendapatan usaha maupun laba bersih. Pencapaian tersebut merupakan buah dari restrukturisasi finansial dan revitalisasi proses bisnis secara berkelanjutan, didukung praktik tata kelola perusahaan yang baik serta penguatan sinergi dengan mitra usaha. Di sisi lain, Perseroan juga membuktikan kemampuannya dalam mempertahankan tren pertumbuhan positif selama enam tahun terakhir, setelah hampir dinyatakan pailit pada 2012.

Meraih pertumbuhan kinerja yang berkualitas menjadi aspirasi Perseroan untuk mewujudkan visi sebagai perusahaan pelayaran dan *logistic provider* yang bertaraf internasional, handal, efisien, inovatif, dan berdaya tahan kuat. Karena itu, Laporan Tahunan 2019 ini mengangkat tema “Terus Berlayar Mengejar Pertumbuhan”, yang juga selaras dengan langkah Perseroan menuju penawaran saham perdana dalam jangka menengah, serta mencapai target kapitalisasi pasar senilai Rp14 triliun pada 2024 mendatang.

The seven-decade journey of DJAKARTA LLOYD in the shipping industry is colored by the ups and downs and dynamics of business competition. Nevertheless, the Company is always committed to providing integrated shipping and logistics service solutions for customers, as well as playing an active role in developing the country by enhancing the inter-island connectivity for commodity movements.

Amid the global economic dynamics and commodity price fluctuations throughout 2019, the Company managed to score an increase in financial performance, both in terms of operating revenue and net profit. This achievement is the result of financial restructuring and revitalization of business processes sustainably, supported by good corporate governance practices and strengthening of the synergies with business partners. On the other hand, the Company has also proven its ability to maintain positive growth over the past six years, after it was almost declared bankrupt in 2012.

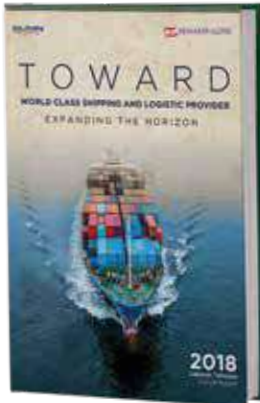
Achieving quality performance growth is the Company's aspirations to realize its vision of being a shipping line and logistics service provider that is of international standard, reliable, efficient, innovative, and resilient. Therefore, the 2019 Annual Report raises the theme “Sailing Forward to Pursue the Growth”, which is also in line with the Company's move towards an initial public offering in the medium term, and to reach a market capitalization target of Rp14 trillion by 2024.



# KESINAMBUNGAN TEMA

## Theme Continuity

Laporan Tahunan 2018  
2018 Annual Report



### Menuju Penyedia Jasa Pelayaran dan Logistik Kelas Dunia – Mengembangkan Cakrawala

#### Toward World Class Shipping and Logistic Provider – Expanding the Horizon

DJAKARTA LLOYD memiliki visi menjadi perusahaan pelayaran dan *logistic provider* yang bertaraf internasional, handal, efisien, inovatif, dan berdaya tahan kuat. Keberhasilan dalam membukukan laba, melakukan restrukturisasi di semua aspek, serta membuka potensi bisnis baru menunjukkan bahwa DJAKARTA LLOYD sudah bergerak ke arah yang tepat untuk mewujudkan visi tersebut.

DJAKARTA LLOYD carries the vision to be a shipping line and logistics service provider that is of international standard, reliable, efficient, innovative, and resilient. The success in securing a profit and restructuring of all aspects, and opening new business opportunities sails DJAKARTA LLOYD in the right direction to embody the mission.

#### Peringatan dan Batasan Tanggung Jawab

Di dalam Laporan Tahunan ini, tercantum kata “DJAKARTA LLOYD”, “Perseroan”, dan “Perusahaan” yang merujuk kepada PT DJAKARTA LLOYD (Persero) selaku entitas bisnis di bidang jasa pelayaran dan logistik.

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Seluruh pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material yang berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang Perseroan, serta lingkungan bisnis terkait usaha Perseroan. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

#### Disclaimer

This annual report contains the words “DJAKARTA LLOYD” and “Company” which hereinafter refers to PT DJAKARTA LLOYD (Persero) as a company that runs a business in the field of shipping line and logistics service.

This annual report contains financial conditions, operation results, projections, plans, strategies, policies, as well as objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the implementation of the applicable laws and regulations, excluding historical matters. Such forward-looking statements are subject to prospective risks, uncertainties, and other factors that can cause the actual results to differ materially from the expected results.

Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions, future events of the Company, and the business environment where the Company conducts its business. The Company shall have no obligation to guarantee that all the valid documents presented will bring specific results as expected.

# DAFTAR ISI

## Table of Contents



01

### 8 KILAS KINERJA PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- 10 Ringkasan Kinerja  
Performance Summary
- 12 Ikhtisar Keuangan  
Financial Highlights
- 17 Ikhtisar Saham  
Stock Highlights
- 17 Ikhtisar Efek Lainnya  
Other Securities Highlights
- 17 Aksi Korporasi  
Corporate Action
- 17 Informasi Sumber Pendanaan  
Lainnya  
Information on Other Funding  
Sources
- 18 Peristiwa Penting 2019  
2019 Event Highlights



02

### 20 LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT

- 22 Laporan Dewan Komisaris  
Board of Commissioners' Report
- 30 Laporan Direksi  
Board of Directors' Report
- 38 Surat Pernyataan Dewan Komisaris  
Statement Letter of the Board of  
Commissioners
- 39 Surat Pernyataan Direksi  
Statement Letter of the Board of  
Directors



03

### 40 PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

- 42 Identitas Perseroan  
Company Identity
- 44 Riwayat Singkat Perseroan  
Company's History in Brief
- 46 Jejak Langkah  
Milestones
- 48 Bidang Usaha  
Business Fields
- 51 Segmen Usaha  
Business Segment
- 54 Wilayah Operasional  
Operational Coverage
- 56 Struktur Organisasi  
Organizational Structure
- 58 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan  
Vision, Mission, and Corporate  
Culture
- 60 Profil Dewan Komisaris  
Board of Commissioners' Profile
- 65 Profil Direksi  
Board of Directors' Profile
- 70 Demografi Karyawan  
Employee Demographics
- 74 Komposisi Pemegang Saham  
Shareholder Composition
- 77 Struktur Perusahaan  
Corporate Structure
- 78 Entitas Anak  
Subsidiary
- 81 Kronologi Pencatatan Saham dan  
Penerbitan Efek Lain  
Chronology of Stock Listing and  
Issuance of Other Securities
- 81 Lembaga Profesi Penunjang  
Supporting Professional  
Institutions

- 82 Penghargaan dan Sertifikasi  
Awards and Certifications
- 85 Alamat Kantor Cabang dan  
Entitas Anak  
Addresses of Branch Offices and  
Subsidiary
- 86 Informasi pada Website  
Perusahaan  
Information on the Company  
Website
- 87 Pengembangan Kompetensi  
Competency Development



04

### 92 ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

- 94 Tinjauan Ekonomi dan Industri  
Economic and Industrial Review
- 104 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha  
Operating Overview per Business  
Segment
- 116 Kinerja Keuangan Perusahaan  
Company's Financial Performance
- 139 Kemampuan Membayar Utang dan  
Tingkat Kolektibilitas Piutang  
Solvency and Receivables  
Collectability Rate
- 141 Struktur Modal  
Capital Structure
- 142 Ikatan Material Investasi Barang  
Modal  
Material Commitments of Capital  
Goods Investment
- 144 Pencapaian Target dan Target RKAP  
2020  
Target Achievement and 2020 RKAP  
Targets
- 153 Kebijakan Strategis Perusahaan  
Company's Strategic Policy

- 157 Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan  
Material Information and Facts After Accounting Report Date
- 158 Aspek Marketing  
Marketing Aspect
- 159 Kebijakan Dividen  
Dividend Policy
- 159 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum  
Realization of the Use of Public Offering Proceeds
- 160 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen  
Employee and/or Management Stock Ownership Program
- 160 Pengungkapan Informasi Transaksi Material  
Disclosure of Material Transaction Information
- 162 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan  
Amendments to the Laws and Regulations
- 162 Perubahan Kebijakan Akuntansi  
Changes in Accounting Policy
- 162 Informasi Kelangsungan Usaha  
Information on Business Continuity



**164 TATA KELOLA PERUSAHAAN**  
**GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

- 166 Penerapan GCG  
GCG Implementation
- 172 Rapat Umum Pemegang Saham  
General Meeting of Shareholders
- 180 Dewan Komisaris  
Board of Commissioners
- 209 Komisaris Independen  
Independent Commissioner

- 210 Direksi  
Board of Directors
- 226 Mekanisme Remuenerasi Dewan Komisaris dan Direksi  
Remuneration Mechanism for the Board of Commissioners and Board of Directors
- 227 Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi  
Meeting Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners and Board of Directors
- 237 Pengungkapan Hubungan Afiliasi  
Affiliation Relationship Disclosure
- 238 Pengelolaan Benturan Kepentingan  
Conflict of Interest Management
- 238 Organ Pendukung Dewan Komisaris  
Supporting Organs of the Board of Commissioners
- 249 Komite Lain di Bawah Dewan Komisaris  
Other Committees Under the Board of Commissioners
- 250 Sekretaris Perusahaan  
Corporate Secretary
- 256 Satuan Pengawas Internal  
Internal Audit Unit
- 264 Akuntan Publik  
Public Accountant
- 266 Sistem Manajemen Risiko  
Risk Management System
- 281 Sistem Pengendalian Internal  
Internal Control System
- 284 Tata Kelola Teknologi Informasi  
Information Technology Governance
- 286 Perkara Penting  
Legal Issues
- 291 Akses Informasi dan Data Perusahaan  
Access to the Company Data and Information
- 294 Kode Etik  
Code of Conduct
- 297 Sistem Pelaporan Pelanggaran  
Whistleblowing System

- 304 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi  
Board of Commissioners and Board of Directors Diversity
- 306 Dukungan Antikorupsi  
Anti-Corruption Support



**308 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**  
**CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY**

- 310 Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial  
Social Responsibility Governance
- 315 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Pengembangan Sosial Kemasyarakatan  
Corporate Social Responsibility for Community Social Development
- 319 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan  
Corporate Social Responsibility for the Environment
- 321 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Ketenagakerjaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja  
Corporate Social Responsibility for the Employment, Occupational Health and Safety
- 329 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait dengan Operasi yang Adil  
Corporate Social Responsibility Related to Fair Operations
- 336 Pengelolaan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan  
Stakeholders Relationship Management

**342 LAPORAN KEUANGAN**  
**FINANCIAL REPORTS**





# **KILAS KINERJA**

## Performance Highlights

Pada 2019, DJAKARTA LLOYD mengantongi pendapatan usaha senilai Rp625,81 miliar atau meningkat 11,41 persen dibandingkan 2018, dengan laba bersih sebesar Rp64,68 miliar atau tumbuh 5,50 persen dibandingkan 2018.

In 2019, DJAKARTA LLOYD recorded operating revenue of Rp625.81 billion, an increase of 11.41 percent year-on-year (yoy), with a net profit of Rp64.68 billion or a growth of 5.50 percent yoy.



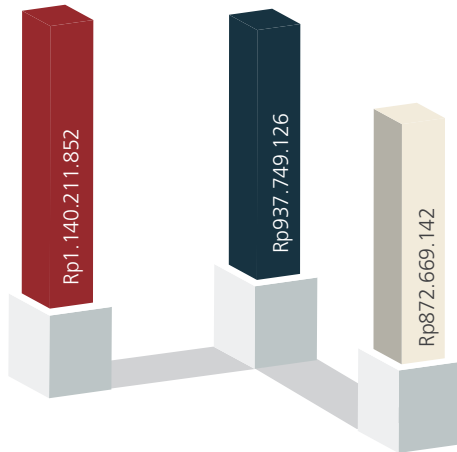
# RINGKASAN KINERJA

## Performance Summary

**KINERJA KEUANGAN** (dalam ribuan rupiah)  
FINANCIAL PERFORMANCES (in thousand rupiah)

● 2019 ● 2018 ● 2017

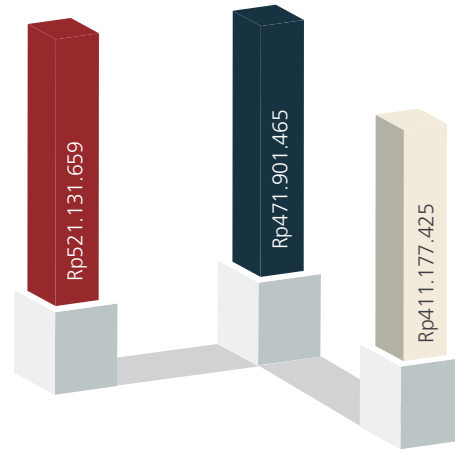
Kilas Kinerja  
Performance Highlights



### Aset Assets

Aset tumbuh 21,59% menjadi Rp1,14 triliun pada 2019 dari Rp937,74 miliar pada 2018.

Assets increased by 21.59% to Rp1.14 trillion in 2019 from Rp937.74 billion in 2018.

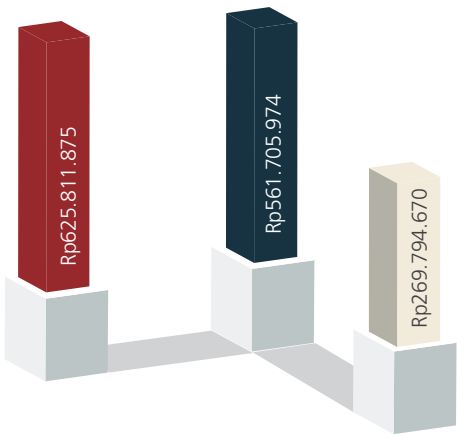


### Ekuitas Equity

Ekuitas tumbuh sebesar 10,43% menjadi Rp521,13 miliar pada 2019 dari Rp471,90 miliar pada 2018.

Equity rose by 10.43% to Rp521.13 billion in 2019 from Rp471.90 billion in 2018.

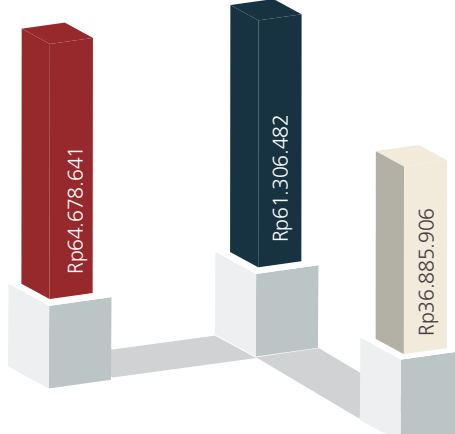
Laporan Manajemen  
Management Report



### Pendapatan Usaha Operating Revenues

Pendapatan Usaha tumbuh 11,41% menjadi Rp625,8 miliar pada 2019 dari Rp561,71 miliar pada 2018.

Operating Revenues increased by 11.41% to Rp625.81 billion in 2019 from Rp561.71 billion in 2018.



### Laba Bersih Net Profit

Laba Bersih tumbuh 5,50% menjadi Rp64,68 miliar pada 2019 dari Rp61,31 miliar pada 2018.

Net Profit increased by 5.50% to Rp64.68 billion in 2019 from Rp61.31 billion in 2018.

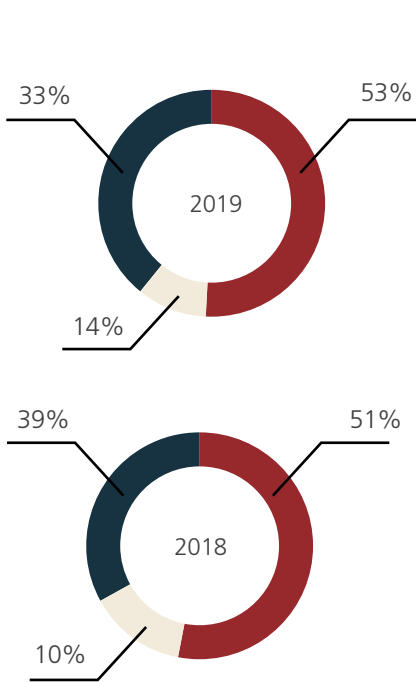
Profil Perusahaan  
Company Profile



**KINERJA OPERASIONAL**

**OPERATIONAL PERFORMANCES**

**Volume Angkutan Curah Berdasarkan Jenis Kapal**  
Bulk Shipment Volume Based on Type of Vessel



- Kapal Time Charter Time Charter Vessel
- Kapal Kerja Sama Operasi (KSO) Joint Operation Vessel
- Kapal Milik Company-Owned Vessel

Volume Angkutan Curah menurun 4,32% menjadi 2.518.780 MT pada 2019 dari 2.632.390 MT pada 2018.

Bulk Shipment Volume dropped by 4.32% to 2,518,780 MT in 2019 from 2,632,390 MT in 2018.

Volume Angkutan Curah pada Kapal Time Charter menurun 0,4% menjadi 1.339.512 MT pada 2019 dari 1.344.796 MT pada 2018.

Bulk Shipment Volume on Time Charter Vessel dropped by 0.4% to 1,339,512 MT in 2019 from 1,344,796 MT in 2018.

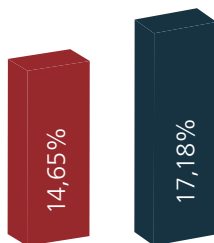
Volume Angkutan Curah pada Kapal Milik meningkat 33,7% menjadi 352.162 MT pada 2019 dari 263.295 MT pada 2018.

Bulk Shipment Volume on Company-Owned Vessel increased by 33.7% to 352,162 MT in 2019 from 263,295 MT in 2018.

Volume Angkutan Curah pada Kapal KSO menurun 19,2% menjadi 827.106 MT pada 2019 dari 1.024.229 MT pada 2018.

Bulk Shipment Volume on Joint Operation Vessel decreased by 19.2% to 827,106 MT in 2019 from 1,024,229 MT in 2018.

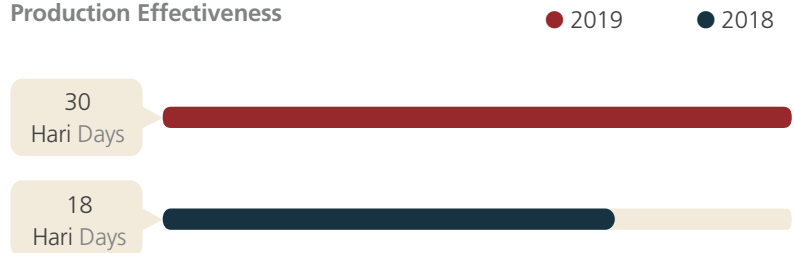
**Efisiensi Operasional Kapal**  
Ship Operational Efficiency



Efisiensi Operasional Kapal meningkat 14,73% menjadi 14,65% pada 2019 dari 17,18% pada 2018.

Ship Operational Efficiency increased by 14.73% to 14.65% in 2019 from 17.18% in 2018.

**Efektivitas Produksi**  
Production Effectiveness



Efektivitas Produksi (*Out of Commission Day*) meningkat 66,6% menjadi 30 hari pada 2019 dari 18 hari pada 2018.

Production Effectiveness (*Out of Commission Day*) rose by 66.6% to 30 days in 2019 from 18 days in 2018.

# IKHTISAR KEUANGAN

## Financial Highlights

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan rupiah)

### CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

(in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
Pendapatan Usaha Operating Revenues	625.811.875	561.705.974	269.794.670	392.659.902	377.464.470
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	503.485.444	436.186.546	216.186.725	326.102.457	343.617.777
<b>Laba Bruto Gross Profit</b>	<b>122.326.432</b>	<b>125.519.429</b>	<b>53.607.945</b>	<b>66.557.445</b>	<b>33.846.692</b>
Beban Usaha Operating Expenses	72.941.408	49.991.411	37.626.354	41.117.582	36.091.507
<b>Laba (Rugi) Usaha Operating Income (Loss)</b>	<b>49.385.024</b>	<b>75.528.018</b>	<b>15.981.591</b>	<b>25.439.863</b>	<b>(2.244.814)</b>
Pendapatan Lain-Lain Other Revenues	58.597.510	32.109.768	70.613.965	33.285.770	47.440.852
Beban Keuangan Finance Costs	21.147.164	18.419.080	8.058.839	-	-
Beban Lain-Lain Other Expenses	19.818.647	28.064.496	37.542.987	24.840.930	18.368.239
<b>Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax</b>	<b>67.016.723</b>	<b>61.154.210</b>	<b>40.993.730</b>	<b>33.884.702</b>	<b>26.827.798</b>
Beban Pajak Tax Expenses	2.338.081	152.272	4.107.824	3.948.789	4.535.260
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lainnya Other Comprehensive Income (Expenses)	59.975	(582.443)	(221.378)	(157.791)	-
<b>Laba yang Dapat Diatribusikan kepada Profit for the Year Attributable to</b>					
Pemilik entitas induk Owners of parent entity	64.677.344	61.303.919	36.882.671	29.933.957	22.291.906
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	1.297	2.564	3.235	1.957	633
<b>Laba Tahun Berjalan Profit for the Current Year</b>	<b>64.678.641</b>	<b>61.306.482</b>	<b>36.885.906</b>	<b>29.935.914</b>	<b>22.292.539</b>
<b>Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada Comprehensive Profit for the Year Attributable to</b>					
Pemilik entitas induk Owners of parent entity	64.737.319	60.721.476	36.661.499	29.776.391	22.291.906
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	1.297	2.564	3.030	1.732	633
<b>Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Profit for the Current Year</b>	<b>64.738.616</b>	<b>60.724.040</b>	<b>36.664.528</b>	<b>29.778.123</b>	<b>22.292.539</b>

**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

(dalam ribuan rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL  
POSITION**

(in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
<b>ASET Assets</b>					
<b>Aset Lancar Current Assets</b>					
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	41.991.869	145.112.280	382.131.537	399.016.100	362.145.056
Piutang usaha pihak ketiga Trade receivables of third parties	134.843.076	111.297.163	20.210.994	16.595.352	12.915.591
Piutang usaha pihak berelasi Trade receivables of related parties	80.380.569	101.520.526	86.487.866	12.090.186	123.057.185
Aset keuangan lancar lainnya Other current assets	7.885.096	22.326.185	11.252.385	5.599.640	15.308.234
Persediaan Inventories	25.904.119	11.806.206	199.037	186.013	291.096
Biaya dibayar di muka dan uang muka Prepaid expenses and advances	33.931.816	17.395.673	20.227.657	12.557.924	6.414.558
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	25.211.341	2.388.399	2.878.384	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar Total Current Assets</b>	<b>350.147.885</b>	<b>411.846.432</b>	<b>523.387.860</b>	<b>446.045.216</b>	<b>520.131.720</b>
<b>Aset Tidak Lancar Non-Current Assets</b>					
Investasi pada entitas asosiasi (Induk saja) Investment in associates (Parent entity only)	6.010.000	7.009.500	7.009.500	7.009.500	7.009.500
Aset tetap Fixed assets	578.366.461	302.925.315	121.221.277	55.314.699	58.761.774
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	139.679.959	141.324.910	139.595.838	142.917.401	145.951.481
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	72.017.547	81.652.469	88.464.166	97.331.673	107.072.955
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets</b>	<b>790.063.967</b>	<b>525.902.694</b>	<b>349.281.282</b>	<b>295.563.772</b>	<b>311.786.210</b>
<b>Jumlah Aset Total Assets</b>	<b>1.140.211.852</b>	<b>937.749.126</b>	<b>872.669.142</b>	<b>741.608.988</b>	<b>831.917.930</b>



# IKHTISAR KEUANGAN

## Financial Highlights

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam ribuan rupiah)

### CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

(in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
<b>LIABILITAS Liabilities</b>					
<b>Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities</b>					
Utang usaha Trade payables	154.959.774	139.071.223	83.996.487	27.677.655	124.275.452
Utang pajak Tax payables	1.043.066	1.490.812	541.048	153.745.906	154.504.746
Utang lain-lain Other payables	1.984.963	1.726.923	4.671.051	6.126.036	29.728.453
Beban akrual Accrued expenses	6.387.199	6.379.248	2.938.510	4.839.678	237.770
Pendapatan diterima di muka Prepaid income	11.675.587	2.606.575	5.441.046	1.250.000	4.450.000
<b>Bagian utang jatuh tempo satu tahun Current maturity of long-term liabilities</b>					
Pinjaman bank Bank loans	20.075.251	19.846.981	152.783.679	-	157.500
Sewa pembiayaan Finance leases	174.399	256.051	-	-	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities</b>	<b>196.300.238</b>	<b>171.377.812</b>	<b>250.371.821</b>	<b>193.639.275</b>	<b>313.353.921</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities</b>					
Utang sewa pembiayaan Obligation under finance leases	-	90.400	-	-	-
Utang bank Bank loans	252.670.788	121.526.757	37.334.000	174.375	174.375
Rekening dana investasi Investment fund accounts	168.361.692	171.578.794	171.578.794	171.578.794	171.578.794
Liabilitas imbalan pascakerja Post-employment benefit liabilities	1.747.474	1.273.898	2.207.102	3.130.647	3.503.066
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities</b>	<b>422.779.955</b>	<b>294.469.849</b>	<b>211.119.896</b>	<b>174.883.816</b>	<b>175.256.235</b>
<b>Jumlah Liabilitas Total Liabilities</b>	<b>619.080.193</b>	<b>465.847.661</b>	<b>461.491.717</b>	<b>368.523.091</b>	<b>488.610.156</b>

**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

(dalam ribuan rupiah)

**CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL  
POSITION**

(in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	2017	2016	2015
<b>EKUITAS Equity</b>					
<b>Modal Saham (Saham Seri A dan B) Share Capital (Capital Series A and B)</b>	<b>1.999.472.669</b>	<b>1.635.663.000</b>	<b>1.635.663.000</b>	<b>180.640.000</b>	<b>180.640.000</b>
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	1.427.000	1.427.000	1.427.000	-	-
Cadangan umum General reserve	62.952	62.952	62.952	143	143
Penyertaan modal negara State capital participation	-	379.318.091	379.318.091	1.017.188.771	350.000.000
Konversi utang menjadi modal Debt to equity swap	-	-	-	437.897.037	437.897.037
Bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya (BPYBDS) Undefined status government aid	-	-	-	-	667.188.771
SLA - Shipset	-	-	-	379.318.091	379.318.091
Saldo rugi (defisit) Loss balance (deficit)	(1.478.939.799)	(1.543.617.143)	(1.604.921.062)	(1.641.803.733)	(1.671.740.320)
Komponen ekuitas lainnya Other equity components	(901.636)	(961.612)	(379.169)	(157.791)	-
<b>Jumlah Ekuitas yang Dapat Didistribusikan kepada Total Equity Attributable to</b>					
Pemilik entitas induk Parent entity	521.121.186	471.892.289	411.170.813	373.082.520	343.303.723
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	10.473	9.176	6.612	3.377	4.051
<b>Jumlah Ekuitas Total Equity</b>	<b>521.131.659</b>	<b>471.901.464</b>	<b>411.177.425</b>	<b>373.085.897</b>	<b>343.307.774</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity</b>	<b>1.140.211.852</b>	<b>937.749.126</b>	<b>872.669.142</b>	<b>741.608.988</b>	<b>831.917.931</b>

# IKHTISAR KEUANGAN

## Financial Highlights

### RASIO-RASIO KEUANGAN

### FINANCIAL RATIOS

Uraian Description	2019	2018	2017
<b>Rasio Likuiditas</b> <b>Liquidity Ratio</b>			
Rasio Lancar Current Ratio	178%	233%	214%
Rasio Kas Cash Ratio	21%	82%	156%
<b>Rasio Profitabilitas</b> <b>Profitability Ratio</b>			
Margin Laba Bruto Gross Profit Margin	20%	22%	20%
Margin Laba Bersih Net Profit Margin	10%	11%	14%
Margin Laba Usaha Operating Profit Margin	9%	13%	6%
Imbal Hasil Aset Return on Assets (ROA)	6%	7%	4%
Imbal Hasil Ekuitas Return on Equity (ROE)	16%	12%	12%
Imbal Hasil Investasi Return on Investment (ROI)	11%	9%	8%
Total Perputaran Aset Total Asset Turnover	58%	64%	43%
Total Modal Sendiri terhadap Total Aset Total Owned Capital to Total Asset	46%	50%	47%
<b>Rasio Solvabilitas</b> <b>Solvability Ratio</b>			
Rasio Utang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio (DER)	119%	100%	112%
Rasio Utang terhadap Aset Debt to Asset Ratio (DAR)	54%	50%	53%



## IKHTISAR SAHAM

### Stock Highlights

Hingga akhir 2019, DJAKARTA LLOYD tidak melakukan pencatatan saham di bursa efek. Dengan demikian, tidak ada informasi terkait jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah, harga saham penutupan, dan volume saham yang diperdagangkan.

Up to the end of 2019, DJAKARTA LLOYD did not list its shares on the stock exchange. Therefore, there is no information regarding the number of shares outstanding, market capitalization, highest share price, lowest share price, closing share price, and volume of shares traded.

## IKHTISAR EFEK LAINNYA

### Highlights of Other Securities

Hingga akhir 2019, DJAKARTA LLOYD tidak menerbitkan obligasi, sukuk, dan obligasi konversi. Dengan demikian, tidak ada informasi terkait jumlah obligasi, sukuk, dan obligasi konversi yang beredar; tingkat bunga atau imbalan; tanggal jatuh tempo; serta peringkat obligasi dan sukuk.

Until the end of 2019, DJAKARTA LLOYD did not issue any bonds, sharia bonds (sukuk), and convertible bonds. Therefore, there is no information about the number of bonds, sukuk, and convertible bonds outstanding; interest or rate of return; due date; and bond and sukuk ratings.

## AKSI KORPORASI

### Corporate Actions

Pada 2019, DJAKARTA LLOYD tidak melakukan aksi korporasi dalam bentuk penerbitan saham baru, pemecahan saham, ataupun penerbitan surat berharga lainnya.

In 2019, DJAKARTA LLOYD did not undertake any corporate actions related to issuing new shares, splitting shares, or issuing other securities.

## INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

### Information on Other Funding Sources

Pada 2019, DJAKARTA LLOYD tidak memiliki sumber pendanaan yang berasal dari efek lainnya. Namun demikian, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi senilai Rp152,5 miliar dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dipergunakan untuk pembelian dua armada kapal (*handymax* dan *tug & barge*).

In 2019, DJAKARTA LLOYD did not have funding sources that came from other securities. However, the Company obtained an investment credit facility of Rp152.5 billion from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk used to purchase two vessels (*handymax* and *tug & barge*).

# PERISTIWA PENTING 2019

## 2019 Event Highlights

### 2 FEBRUARI

Para karyawan muda menggelar “Millennials DJAKARTA LLOYD Peduli Banten” sebagai aksi kepedulian terhadap anak-anak penyintas tsunami di Desa Cikujang, Tanjung Lesung. Selain acara berbagi, kegiatan ini juga diisi dengan penyerahan bantuan berupa perlengkapan sekolah, kudapan, dan uang tunai.



FEBRUARY 2

The young employees held “DJAKARTA LLOYD Millennials Care of Banten” to show their concern for tsunami-survivor children in Cikujang Village, Tanjung Lesung. Besides sharing moments, the event was filled with giving school supplies, snacks, and cash.

### 15 FEBRUARI

Perseroan dan PT Pelindo Marine Service menandatangani perjanjian kesepahaman di Surabaya untuk memperkuat kerja sama terkait pemanfaatan dan pendayagunaan aset perusahaan.



FEBRUARY 15

The Company and PT Pelindo Marine Service signed a memorandum of understanding (MoU) in Surabaya to cooperate to use and utilize the company’s assets.

### 15 FEBRUARI

Perseroan menandatangani perjanjian kesepahaman dengan PT Bahana Securities dan PT Bahana TCW Investment Management di Kementerian BUMN, Jakarta untuk memperkuat kerja sama terkait pendanaan investasi kapal.



FEBRUARY 15

The Company signed an MoU with PT Bahana Securities and PT Bahana TCW Investment Management at the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs), Jakarta, to cooperate in funding investment for ships.

### 8 MEI

Perseroan menandatangani perjanjian kesepahaman dengan PT Pertamina Patra Niaga di Gedung Metropole, Jakarta perihal kerja sama pengadaan bahan bakar kapal untuk kebutuhan Perseroan dan pengadaan angkutan kapal untuk kebutuhan PT Pertamina Patra Niaga.



MAY 8

The Company signed an MoU with PT Pertamina Patra Niaga at the Metropole Building, Jakarta, regarding cooperation in the procurement of fuel for the Company’s ships and the provision of the vessels for PT Pertamina Patra Niaga’s needs.

### 31 MEI

Perseroan turut berpartisipasi dalam acara “Mudik Gratis Bareng BUMN” dengan memberangkatkan 600 pemudik dari Jakarta menuju Jawa Tengah menggunakan 11 armada bus.



MAY 31

The Company participated in the program of “Free Homecoming Trip with SOEs” program by sending off 600 travelers from Jakarta to Central Java on 11 buses.

**1 AGUSTUS**

Kapal kedua yang dimiliki Perseroan, yakni MV Dharma Lautan Ruby, siap beroperasi setelah melalui prosesi Protokol Pengiriman dan Penerimaan dengan pihak penjual, MV Aquakula, di Singapura. Pembelian kapal *handymax* berbobot mati 55.309 ton ini ditujukan untuk memenuhi kontrak pengangkutan batu bara dengan PT PLN (Persero).



**AUGUST 1**

The second ship owned by the Company, MV Dharma Lautan Ruby, is set to operate after passing through the Protocol of Delivery and Acceptance by the seller, MV Aquakula, in Singapore. The purchase of a handymax vessel weighing 55,309 DWT is intended to fulfill the coal transportation contract with PT PLN (Persero).

**13 AGUSTUS**

Perseroan menjadi Co-PIC kegiatan "Siswa Mengenal Nusantara" di Gorontalo yang mengirimkan 47 siswa SMA sederajat asal Jawa Timur ke Gorontalo selama delapan hari untuk mengemban misi kebudayaan daerah.



**AUGUST 13**

The Company became the Co-PIC of the event of "Students Getting to Know the Archipelago" in Gorontalo by sending off 47 high school students of East Java to Gorontalo for eight days in a mission to learn the local cultures.

**6 OKTOBER**

Perseroan selaku Co-PIC program "BUMN Hadir untuk Negeri (BHUN)" meraih predikat "Program BHUN Terbaik I" dan "Dokumentasi Program BHUN Terbaik I" dalam ajang BHUN Awards 2018 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.



**OCTOBER 6**

The Company as the Co-PIC of the "SOEs Present for the Nation (BHUN)" program won the title of "First Best BHUN Program" and "First Best Documentation of BHUN Program" at the 2018 BHUN Awards in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara.

**25 OKTOBER**

Perseroan menerima dua penghargaan dalam "Infobank The Best State-Owned Enterprise (SOE) Awards 2019" di Jakarta untuk kategori "Indonesia SOE with Predicate Excellent in Financial Performance Throughout 2018" dan "The Best CEO of SOE - Well Management in Crisis 2019".



**OCTOBER 25**

The Company earned two awards at the 2019 Infobank The Best State-Owned Enterprise (SOE) Awards in Jakarta, in the category of "Indonesia SOE with Predicate Excellent in Financial Performance Throughout 2018" and "The Best CEO of SOE - Well Management in Crisis 2019".





# LAPORAN MANAJEMEN

## Management Report

Perseroan gencar meningkatkan kinerja bisnis melalui sinergi BUMN, serta memperluas cakupan lini usaha dan titik layanan untuk menjangkau ceruk pasar yang potensial.

The Company is steadily improving business performance through the SOEs synergy program, as well as expanding the scope of business lines and service points to reach potential niche markets.



# LAPORAN DEWAN KOMISARIS

## Board of Commissioners' Report



### **LAMBONAR O. SILITONGA**

**Komisaris Utama**

President Commissioner

Selain mempertahankan tren pertumbuhan positif, Perseroan mencatat peningkatan total aset konsolidasi sebesar 21,59% menjadi Rp1,14 triliun melalui penambahan dua armada kapal pengangkut batu bara.

In addition to maintaining the positive growth trend, the Company also recorded an increase in total consolidated assets of 21.59% to Rp1.14 trillion at the end of 2019 by adding two coal carriers.

**PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,**

Kami memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkat serta anugerah-Nya, DJAKARTA LLOYD dapat mengarungi tahun 2019 dengan capaian kinerja yang baik. Indikasi utamanya adalah keberhasilan Perseroan mempertahankan pertumbuhan positif di tengah turbulensi perekonomian global dan ketatnya iklim persaingan industri pelayaran.

Fluktuasi kinerja mewarnai eksistensi DJAKARTA LLOYD selama tujuh dekade terakhir, bahkan tidak dapat dipungkiri sempat nyaris menyentuh titik nadir. Namun, sebagai warisan para veteran, Perseroan sepertinya ditakdirkan untuk tidak berhenti berjuang dan gigih merengkuh kembali masa kejayaan melalui restrukturisasi di berbagai bidang yang mulai berlangsung pada pertengahan tahun 2012. Kinerja Perseroan terus membaik sejak saat itu, antara lain ditandai dengan pertumbuhan pendapatan usaha dan laba bersih yang solid.

Dewan Komisaris memandang bahwa pencapaian kinerja positif tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk di antaranya mitra kerja dan pelanggan. Hal tersebut menjadi fondasi bagi DJAKARTA LLOYD untuk meraih pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Karena itu, sebagai perusahaan jasa, Perseroan akan terus berupaya menjawab kebutuhan pasar melalui penyediaan solusi layanan pelayaran dan logistik terpadu dengan harga kompetitif.

**DEAR HONORABLE STAKEHOLDERS,**

We say the praise and gratitude to God Almighty for all the blessings and graces so that DJAKARTA LLOYD could properly sail through 2019 with good performance achievements. The main indication is the Company's success in maintaining positive growth amid the turbulence of the global economy and the fierce competition in the shipping industry.

Performance fluctuations have colored the existence of DJAKARTA LLOYD over the past seven decades, in fact it had almost gone into bankruptcy. However, as a legacy of veterans, the Company seems destined not to stop fighting and persevering to regain its heyday through restructuring in various fields that began to take place in mid-2012. Since then, the Company's performance has been continuing to improve, among others, is marked by the steady growth in operating revenue and net profit.

The Board of Commissioners views that achieving positive performance cannot be separated from the support and trust of all stakeholders, including business partners and customers. This has become the foundation for DJAKARTA LLOYD to achieve sustainable business growth. Therefore, as a service company, DJAKARTA LLOYD will continue to strive to meet the market demands through the provision of integrated shipping and logistics service solutions at competitive prices.



# LAPORAN DEWAN KOMISARIS

## Board of Commissioners' Report

Pada 2019, pencapaian indikator kinerja kunci yang ditentukan dalam kontrak manajemen antara Pemegang Saham dengan Dewan Komisaris menunjukkan skor 96,83. Capaian tersebut mencerminkan bahwa Dewan Komisaris telah memenuhi target kinerja yang diharapkan dalam aspek-aspek penilaian, meliputi aspek perencanaan, aspek pengawasan dan pemberian nasihat, aspek pelaporan, serta aspek dinamis.

### PENILAIAN ATAS KINERJA DIREKSI

Sepanjang 2019, Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan menjunjung tinggi integritas dan independensi, serta tanpa menimbulkan benturan kepentingan. Sejumlah hal pun menjadi pertimbangan Dewan Komisaris dalam melaksanakan penilaian kinerja Direksi, di antaranya pencapaian KPI dan realisasi atas target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Evaluasi ini turut memerhatikan faktor eksternal, seperti kondisi perekonomian makro dan dinamika pasar.

Pada 2019, Dewan Komisaris menyampaikan 22 tanggapan dan persetujuan yang ditujukan kepada Direktur Utama, Menteri BUMN, dan Komite Audit Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga melaksanakan empat kali kunjungan kerja; menyelenggarakan dan mengikuti 21 rapat yang terdiri atas 10 rapat internal dan 11 rapat gabungan bersama Direksi; serta memberikan nasihat kepada Direksi yang disampaikan melalui 12 surat/risalah.

Di tengah perlambatan ekonomi global yang turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik pada 2019, Perseroan mampu merealisasikan peningkatan pendapatan sebesar 11,41 persen dari Rp561,71 miliar menjadi Rp625,81 miliar serta kenaikan laba bersih sebesar 5,50 persen dari Rp61,31 miliar menjadi Rp64,68 miliar. Kinerja *bottom line* tersebut mencapai 70 persen dari target RKAP 2019 senilai Rp92,51 miliar.

In 2019, the key performance indicators (KPI) set in the management contract between the Shareholders and the Board of Commissioners achieved a score of 96.83. This achievement reflected that the Board of Commissioners have met the expected performance targets in the assessment aspects, which included planning, supervision and giving advice, reporting, and dynamics.

### ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE

During 2019, the Board of Commissioners has performed its supervisory and advisory functions to the Board of Directors by upholding integrity and independence, and without creating conflicts of interest. A number of aspects were considered by the Board of Commissioners in carrying out the assessment of the Board of Directors' performance, including the achievement of KPIs and the realization of targets set in the Corporate Work Plan and Budget (RKAP). The evaluation also considered external factors, such as macroeconomic conditions and market dynamics.

In 2019, the Board of Commissioners submitted 22 responses and approvals addressed to the President Director, the Minister of SOEs, and the Audit Committee. In addition, the Board of Commissioners also conducted four work visits; held and participated in 21 meetings consisting of 10 internal meetings and 11 joint meetings with the Board of Directors; also providing advice to the Board of Directors through 12 letters or minutes.

Amid a global economic slowdown that also affected domestic economic growth in 2019, the Company was able to realize an increase in revenue of 11.41 percent from Rp561.71 billion to Rp625.81 billion and an increase in net profit by 5.50 percent from Rp61.31 billion to Rp64.68 billion. The bottom line performance reached 70 percent of the 2019 RKAP target of Rp92.51 billion.



## 250,16%

Pertumbuhan kinerja SBU Tol Laut yang telah mengoperasikan empat trayek di wilayah Indonesia Timur sepanjang 2019.

Performance growth of the Sea Toll Strategic Business Unit (SBU) which has served four routes in Eastern Indonesia throughout 2019.

Di sisi lain, aset konsolidasian Perseroan pada 2019 tercatat mengalami kenaikan 21,59 persen dari Rp937,75 miliar menjadi Rp1,14 triliun. Peningkatan signifikan terjadi pada jumlah aset tetap berkat adanya penambahan dua armada kapal pengangkut batu bara, terdiri atas satu unit *tug & barge* (TB Daya Lautan II) senilai Rp17,39 miliar dan satu unit *handymax* (MV Dharma Lautan Ruby) senilai Rp175,88 miliar. Angkutan batu bara sendiri merupakan bagian dari segmen pengangkutan curah kering yang menjadi fokus bisnis utama Perseroan.

Dewan Komisaris mengapresiasi kinerja Direksi yang mampu mengatasi tantangan makro dengan baik, di antaranya melalui pelaksanaan restrukturisasi secara konsisten dan penguatan sinergi BUMN, sehingga performa bisnis Perseroan tetap terjaga positif. Penugasan dari Kementerian Perhubungan untuk mengoperasikan empat trayek tol laut pun dapat berjalan lancar, bahkan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan usaha dengan pertumbuhan kinerja hingga 250,16 persen.

Berdasarkan hasil penilaian atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik tahun 2019, Perseroan memperoleh skor keseluruhan sebesar 68,00 atau meningkat dari tahun 2018 sebesar 67,02, dan termasuk dalam klasifikasi kualitas "Cukup Baik". Ke depan, Dewan Komisaris berharap kedisiplinan dan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi dalam pengambilan keputusan, serta keterbukaan informasi kepada publik dapat terus ditingkatkan agar implementasi GCG Perseroan bertambah baik.

Similarly, the Company's consolidated assets in 2019 recorded an increase of 21.59 percent from Rp937.75 billion to Rp1.14 trillion. A significant increase was in the number of fixed assets due to the addition of two coal carriers, consisting of one unit of tug & barge (TB Daya Lautan II) valued at Rp17.39 billion and one unit of handymax (MV Dharma Lautan Ruby) valued at Rp175.88 billion. Coal transportation itself is part of the dry bulk shipment which is the Company's core business.

The Board of Commissioners appreciates the performance of the Board of Directors who were able to overcome the macro challenges well, through consistent restructuring and strengthening the synergy with SOEs, so that the Company's business performance was maintained positive. The assignment from the Ministry of Transportation to serve four sea toll routes was executed smoothly, even contributed significantly to operating revenue with the growth of up to 250.16 percent.

Based on the results of the assessment of the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in 2019, the Company obtained an overall score of 68.00 or an increase from 67.02 in 2018, classified as "Good Enough". The Board of Commissioners hopes that in the future the discipline and compliance with regulations, transparency in decision making, and disclosure of information to the public can continue to be improved so that the implementation of the Company's GCG will enhance.

# LAPORAN DEWAN KOMISARIS

## Board of Commissioners' Report

Dalam melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial, Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan telah berkontribusi aktif sesuai kapasitas. Adapun pada 2019, DJAKARTA LLOYD kembali terlibat dalam program BUMN Hadir untuk Negeri melalui kegiatan "Mudik Gratis BUMN" yang telah memberangkatkan 600 pemudik dari Jakarta menuju Jawa Tengah, dan "Siswa Mengenal Nusantara" yang mengemban misi pertukaran budaya daerah antarpelajar tingkat SMA.

### PROSPEK USAHA

Dewan Komisaris memandang bisnis pelayaran niaga masih memiliki prospek cerah pada 2020, seiring adanya sejumlah katalis positif yang berpotensi mendongkrak permintaan jasa pelayaran, seperti:

1. pemberlakuan kewajiban penggunaan angkutan laut berbendera Indonesia (perusahaan angkutan laut nasional) bagi eksportir dan importir komoditas, seperti batu bara dan minyak kelapa sawit mentah;
2. penerapan kebijakan program Mandatori Biodiesel 30% (B30) yang memunculkan kebutuhan baru berupa pengangkutan pasokan *fatty acid methyl ester* (FAME) untuk keperluan distribusi; serta
3. pemberlakuan regulasi larangan ekspor nikel yang diprediksi dapat meningkatkan volume angkutan laut dalam negeri dari lokasi tambang ke *smelter*.

Perseroan diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik sehingga ketika katalis mulai direalisasikan, potensi permintaan tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan bisnis, baik dari sisi volume pengangkutan maupun pangsa pasar. Di sisi lain, pengembangan usaha juga dilakukan dengan tetap mengutamakan fokus pada bisnis inti Perseroan sebagai penyedia layanan jasa pelayaran dan logistik untuk komoditas batu bara, minyak, gas, nikel, dan bauksit bagi pelanggan BUMN dan swasta yang umumnya terjalin sinergis dalam kontrak pekerjaan jangka panjang.

In carrying out corporate social responsibility (CSR) obligations, the Board of Commissioners considers that the Company has actively contributed according to its capacity. In 2019, DJAKARTA LLOYD was once again involved in the "SOEs Present for the Nation" program by organizing "Homecoming Free Trip with SOEs" event which sent off 600 homecoming travelers from Jakarta to Central Java, and "Students Getting to Know the Archipelago" with a mission of local cultural exchange between high school students.

### BUSINESS PROSPECTS

The Board of Commissioners views the commercial shipping business still has a bright prospect in 2020, as several positive catalysts have the potential to boost the demands for shipping services, such as:

1. the enforcement of the obligation to use Indonesian-flagged sea transport fleets (national sea transportation companies) for exporters and importers of commodities, such as coal and crude palm oil;
2. the implementation of the policy of 30% Biodiesel Mandatory (B30) that has led to new needs in the form of transporting the supply of fatty acid methyl ester (FAME) for later distribution; and
3. the implementation of regulation to ban nickel exports which is predicted to increase the volume of domestic sea transportation from the mine site to the smelter.

The Company is expected to prepare well so that when the catalysts starts to enforce, the potential demands can be captured to push the business growth, both in terms of throughput volume and market share. On the other side, business development shall also be done while prioritizing the focus of the Company's core business as a provider of shipping line & logistics services for coal, oil, gas, nickel, and bauxite commodities for SOEs and private sector, which is generally synergized in long-term work contracts.

## PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

Dewan Komisaris selalu menekankan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik harus diterapkan secara efektif, antara lain dalam bentuk pengendalian internal dan pencegahan pelanggaran melalui penerapan pelaporan pelanggaran (WBS). Terkait tugas dalam pengelolaan dan tindak lanjut WBS, Dewan Komisaris bertindak sebagai Dewan Pengarah bersama Pemegang Saham dan Direksi dalam Tim Pengelola WBS (TPWBS).

Sosialisasi WBS terus digalakkan melalui situs resmi Perusahaan dan media internal. Selain itu, Dewan Komisaris juga senantiasa memberikan arahan agar efektivitas sosialisasi dan penerapannya berjalan lebih baik, sehingga para pemangku kepentingan lebih termotivasi dalam menyampaikan pelanggaran yang dapat merugikan Perseroan.

## KINERJA ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dalam melaksanakan tugas kepengurusannya. Sejauh ini, Komite Audit telah menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik, di antaranya melakukan peninjauan dan pemantauan yang efektif menyangkut aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan; menjamin proses pelaporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum; meyakinkan proses audit internal dan eksternal berlangsung independen dan objektif; mengevaluasi kecukupan pengendalian intern; serta mendorong praktik tata kelola perusahaan yang sehat.

## WHISTLEBLOWING SYSTEM IMPLEMENTATION

The Board of Commissioners always emphasizes that the principles of GCG must be applied effectively, including internal control and prevention of violations through the whistleblowing system (WBS) implementation. Related to the tasks in managing and following up on WBS, the Board of Commissioners acts as a Steering Board with Shareholders and Directors in the WBS Management Team (TPWBS).

WBS socialization continues to be promoted through the Company's official website and internal media. The Board of Commissioners also actively provide directives to make the effectiveness of WBS socialization and its implementation goes better, so that stakeholders are more motivated in submitting violations that can harm the Company.

## PERFORMANCE OF SUPPORTING ORGANS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee in performing its management duties. So far, the Audit Committee has carried out its functions and responsibilities well, including conducting an effective review and monitoring in the aspects of transparency, accountability, and compliance; guarantee that the financial reporting process is in accordance with generally accepted accounting standards; ensure that internal and external audit processes are independent and objective; evaluate the adequacy of internal control; and encourage healthy corporate governance practices.

**Dewan Komisaris memandang bisnis pelayaran niaga masih memiliki prospek yang cerah pada 2020, seiring penerapan sejumlah katalis positif yang berpotensi mendorong permintaan jasa pelayaran.**

The Board of Commissioners views that the commercial shipping business still has bright prospects in 2020 with the implementation of several positive catalysts that can boost demand for shipping services.



# LAPORAN DEWAN KOMISARIS

## Board of Commissioners' Report

Pada 2019, Komite Audit telah menyampaikan masukan dan arahan kepada Direksi mengenai hal-hal terkait berikut ini.

1. Telaahan Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan hingga Mei 2019 dan laporan hasil audit tahun buku 2017-2018 dari Auditor Eksternal.
2. Surat Direksi Nomor A.011.1/TU.805.01/DIRUT/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 perihal Perubahan RKAP PT Djakarta Lloyd (Persero).
3. Rencana penerbitan surat utang jangka menengah (MTN).
4. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
5. Perbaikan kinerja untuk memenuhi target RKAP 2019.

### PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Susunan Dewan Komisaris Perseroan mengalami perubahan pada 2019, yakni Sdr. Anhar Adel ditunjuk untuk menggantikan Sdr. Maryono Maulus Atmadja sebagai Komisaris Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-117/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 01 tanggal 17 Juni 2019.

Selain itu, Sdr. Lambonar O. Silitonga ditunjuk untuk menggantikan Sdr. Syahril Japarin sebagai Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-117/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 01 tanggal 17 Juni 2019.

Setelah tahun buku 2019 berakhir, susunan Dewan Komisaris DJAKARTA LLOYD kembali mengalami perubahan dengan diangkatnya Sdr. Lambonar O. Silitonga sebagai Komisaris Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-19/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020. Sementara itu, Sdr. M. Yusuf Permana ditunjuk sebagai Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Kementerian BUMN Nomor SK-19/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020.

In 2019, the Audit Committee submitted input and direction to the Board of Directors regarding the following matters.

1. Review of the Board of Commissioners on the Company's performance up to May 2019 and the audit report for the 2017-2018 fiscal year from the External Auditor.
2. Board of Directors Letter Number A.011.1/TU.805.01/DIRUT/VII/2019 dated July 24, 2019 concerning Amendments to the RKAP of PT Djakarta Lloyd (Persero).
3. Plan to issue medium term notes (MTN).
4. Preparation of the Company's Long Term Plan (RJPP).
5. Performance improvement to meet the 2019 RKAP targets.

### CHANGES IN COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The composition of the Company's Board of Commissioners changed in 2019, including the appointment of Anhar Adel as President Commissioner to replace Maryono Maulus Atmadja based on the Minister of SOEs Decree Number SK-117/MBU/05/2019 dated May 29, 2019 and Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Number 01 dated June 17, 2019.

In addition, Lambonar O. Silitonga was appointed as Commissioner to replace Syahril Japarin based on the Minister of SOEs Decree Number SK-117/MBU/05/2019 dated May 29, 2019 and Deed of Notary Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Number 01 dated June 17, 2019.

After the end of the 2019 fiscal year, the Board of Commissioners' composition again changed with the appointment of Lambonar O. Silitonga as President Commissioner based on the Minister of SOEs Decree Number SK-19/MBU/01/2020 dated January 9, 2020. Meanwhile, M. Yusuf Permana was appointed as Commissioner based on the Ministry of SOEs Decree Number SK-19/MBU/01/2020 dated January 9, 2020.

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada Sdr. Maryono Maulus Atmadja, Sdr. Syahril Japarin, serta Sdr. Anhar Adel atas kinerja dan dedikasinya dalam memajukan Perseroan selama masa jabatan masing-masing. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris DJAKARTA LLOYD setelah 31 Desember 2019 terdiri atas Sdr. Lambonar O. Silitonga (Komisaris Utama) dan Sdr. M. Yusuf Permana (Komisaris) dengan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PENUTUP

Sebagai penutup, perkenankan Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham, pelanggan, mitra kerja, dan seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada DJAKARTA LLOYD. Tidak ketinggalan, terima kasih pula untuk Pemerintah RI atas segala dukungan yang tiada henti, sehingga Perseroan berhasil keluar dari segala kesulitan yang dihadapi.

Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi beserta seluruh pegawai atas kontribusi dan kerja kerasnya dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja Perseroan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu mengiringi langkah kita semua untuk membawa DJAKARTA LLOYD ke arah yang lebih baik. Selain itu, kami berharap tren pertumbuhan positif dapat terus berlanjut pada tahun 2020 dan sebagai BUMN pelayaran kebanggaan Indonesia, Perseroan senantiasa berperan aktif untuk membangun konektivitas logistik di wilayah Nusantara.

Atas nama Dewan Komisaris,  
On behalf of the Board of Commissioners,



**LAMBONAR O. SILITONGA**

Komisaris Utama PT DJAKARTA LLOYD (Persero)  
President Commissioner of PT DJAKARTA LLOYD (Persero)

The Board of Commissioners expresses its appreciation and gratitude to Maryono Maulus Atmadja, Syahril Japarin, and Anhar Adel for their performance and dedication in advancing the Company during each term of office. Therefore, the Board of Commissioners' composition of DJAKARTA LLOYD after December 31, 2019 consists of Lambonar O. Silitonga (President Commissioner) and M. Yusuf Permana (Commissioner) with duties and authority under applicable laws and regulations.

## CLOSING

In closing, allow us, the Board of Commissioners, to thank the shareholders, customers, business partners, and all stakeholders who have been giving trust to DJAKARTA LLOYD. Also, thank you to the Government of Indonesia for all the ongoing support, so that the Company managed to get out of all difficulties encountered.

We express our highest appreciation to the Board of Directors and all employees for their contribution and hard work in optimizing the achievement of the Company's performance. May Almighty God always accompany all of us to take DJAKARTA LLOYD in a better direction. We hope that the positive growth trend can continue in 2020 and as a proud Indonesian shipping SOE, the Company always plays an active role in building logistics connectivity in the archipelago.

## LAPORAN DIREKSI

Board Of Directors' Report



**SUYOTO**

**Direktur Utama**  
President Director

Restrukturisasi keuangan, operasional, dan organisasi menjadi landasan strategis bagi Perseroan untuk mengakselerasi pertumbuhan kinerja.

Financial, operational, and organizational restructuring forms a strategic foundation for the Company to accelerate performance growth.

**PARA PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERHORMAT,**

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya, DJAKARTA LLOYD berhasil melanjutkan momentum pertumbuhan pada 2019. Melalui penerbitan Laporan Tahunan ini, Perseroan berupaya memenuhi komitmen terkait keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan menyangkut pencapaian kinerja keuangan dan operasional, serta penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Perseroan menyadari bahwa pencapaian kinerja bisnis tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal. Karena itu, seluruh lini organisasi dipersiapkan untuk senantiasa adaptif terhadap perubahan, antara lain ditunjukkan dengan melanjutkan program restrukturisasi di berbagai bidang secara konsisten, sehingga pada akhirnya dapat mendukung realisasi visi Perseroan sebagai perusahaan pelayaran dan *logistic provider* yang bertaraf internasional, handal, efisien, inovatif, dan berdaya tahan kuat.

**KINERJA PERUSAHAAN**

Kondisi ekonomi dunia sepanjang 2019 tercatat masih belum kondusif, ditandai dengan perlambatan ekonomi di sejumlah negara maju serta eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Imbasnya, perekonomian nasional hanya mampu tumbuh moderat sebesar 5,02 persen. Namun demikian, kinerja keuangan Perusahaan pada 2019 secara umum tercatat positif dengan peningkatan

**DEAR HONORABLE STAKEHOLDERS,**

Our profound gratitude to God Almighty for His abundant blessing bestowed upon DJAKARTA LLOYD to successfully continued the momentum of growth in 2019. Through this Annual Report, the Company seeks to fulfill commitments related to information disclosure to all stakeholders regarding the achievement of financial and operational performance, as well as the application of Good Corporate Governance (GCG).

The Company realizes that the achievement of business performance is inseparable from the internal and external factors. Therefore, all organizational lines are prepared to be constantly adaptive to change, among others, shown by continuing the restructuring program in various fields consistently, so that it can ultimately support the realization of the Company's vision as a shipping line and logistics service provider that is of international standard, reliable, efficient, innovative, and resilient.

**COMPANY PERFORMANCE**

World economic conditions throughout 2019 were considered to still uncondusive, marked by the economic slowdown in many developed countries and the escalation of trade war between the United States and China. As a result, the national economy was only able to grow moderately by 5.02 percent. However, the Company's financial performance in 2019 was generally positive with an increase in



## LAPORAN DIREKSI

### Board Of Directors' Report

pendapatan usaha dan laba bersih, meski masing-masing hanya memenuhi 67 persen dan 70 persen dari target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019.

Adapun berdasarkan lini bisnis, segmen angkutan curah (*breakbulk* batu bara) masih mendominasi pendapatan Perseroan sebesar 78,7 persen; diikuti jasa pemanduan (8,7 persen), angkutan kontainer/tol laut (7,3 persen), bongkar muat dan usaha keagenan (5 persen), serta pendapatan sewa (0,3 persen).

Pada segmen angkutan curah, angkutan curah kering menjadi andalan pendapatan Perseroan karena angkutan curah cair dan angkutan curah lainnya belum menghasilkan *revenue* pada 2019. Pendapatan angkutan curah kering (*breakbulk* batu bara) naik 2,3 persen dari Rp477,91 miliar menjadi Rp488,97 miliar, meskipun dari sisi volume pengangkutan mengalami penurunan 4,3 persen, yakni dari 2.632.390 metrik ton (MT) pada 2018 menjadi 2.518.780 MT pada 2019. Capaian volume tersebut memenuhi 44 persen dari target angkutan curah keseluruhan sebesar 5.765.012 MT dan 53 persen dari target angkutan curah kering sebesar 4.715.000 MT.

Direksi mengidentifikasi sejumlah faktor eksternal dan internal yang menjadi penyebab ketidakcapaian target pendapatan dan volume angkutan curah, yakni:

1. area pertambangan batu bara mengalami bencana banjir, sehingga aktivitas produksi ditiadakan;
2. pengurangan produksi nikel berdampak pada kelebihan armada kapal (*fleet oversupply*);
3. penurunan harga angkutan batu bara pada kontrak baru 2019;
4. beberapa kapal mengalami proses *maintenance*, sehingga pengoperasian armada kurang optimal; serta
5. keterlambatan realisasi pengadaan satu unit kapal *handymax* yang semula direncanakan beroperasi pada akhir triwulan I, berubah menjadi triwulan III (Agustus 2019).

operating revenue and net profit, even though they respectively only met 67 percent and 70 percent of the targets set in the 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).

Based on business lines, the bulk shipment (coal *breakbulk*) still dominates the Company's revenue by 78.7 percent; followed by the harbor tug (8.7 percent), container/sea toll (7.3 percent), stevedoring and agency business (5 percent), and rental proceeds (0.3 percent).

In the bulk shipment segment, dry bulk shipment is the mainstay of the Company's revenue because liquid bulk shipment and other bulk shipment have not yet generated revenue in 2019. Revenue from the dry bulk shipment (coal *breakbulk*) increased 2.3 percent from Rp477.91 billion to Rp488.97 billion, although its shipment volume declined by 4.3 percent, from 2,632,390 metric tons (MT) in 2018 to 2,518,780 MT in 2019. This volume achievement fulfilled 44 percent of the total bulk shipment target of 5,765,012 MT and 53 percent of the dry bulk shipment target of 4,715,000 MT.

The Board of Directors identified several external and internal factors that were causing the targets could not be achieved, namely:

1. the coal mining area hit by a flood, so that production activities were stopped;
2. reduction in nickel production impacted on the oversupply of fleet;
3. price decline of coal transport service in the 2019 new contract;
4. some ships underwent maintenance processes, so that fleet operations were less than optimal; and
5. the delay in realizing the procurement of one unit of *handymax* initially planned to operate at the end of the first quarter, changed to the third quarter (August 2019).



# 78,7%

Dominasi segmen angkutan curah (*breakbulk* batu bara) terhadap pendapatan Perseroan; diikuti segmen jasa pemanduan (8,7%), angkutan kontainer/tol laut (7,3%), bongkar muat dan usaha keagenan (5%), serta pendapatan sewa (0,3%).

Domination of the bulk shipment (coal breakbulk) segment over the Company's revenue; followed by the harbor tug (8.7%), container/sea toll (7.3%), stevedoring and agency business (5%), and rental proceeds (0.3%).

Namun demikian, Perseroan berhasil menghimpun pendapatan sebesar Rp45,63 miliar dari penugasan program Tol Laut atau tumbuh hingga 250,16 persen. Selain itu, segmen jasa pemanduan juga mencatat pertumbuhan pendapatan *triple-digit* sebesar 140,34 persen, dari Rp22,76 miliar pada 2018 menjadi 54,69 miliar pada 2019.

However, the Company managed to book revenue of Rp45.63 billion from the assignment of the Sea Toll program or grew significantly by 250.16 percent. In addition, the harbor tug service also scored a triple-digit revenue growth of 140.34 percent, from Rp22.76 billion in 2018 to Rp54.69 billion in 2019.

Sebagai entitas yang baru bertumbuh kembali setelah sempat mengalami stagnasi bisnis, Perseroan terus melanjutkan restrukturisasi di bidang keuangan, operasional, dan organisasi sehingga dapat menopang pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan. Berikut restrukturisasi yang dilaksanakan pada 2019.

As an entity that has just grown back after experiencing business stagnation, the Company continues to restructure in the financial, operational, and organizational sectors to maintain sustainable performance growth. The following are the restructuring carried out in 2019.

<p><b>Restrukturisasi Bidang Keuangan</b></p> <p>Restructuring in Financial Sector</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melanjutkan pelaksanaan komitmen perjanjian perdamaian (homologasi) mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) melalui konversi utang <i>subsidiary loan agreement</i> (SLA) menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 01 Tahun 2018. Committed to implement the peace agreement (homologation) regarding the postponement of debt payment obligations through the conversion of a subsidiary loan agreement to State Capital Participation as stated in the Deed of Notary Lenny Janis Ishak, S.H. Number 01 of 2018.</li> <li>Melaksanakan pembelian kembali saham eks PKPU (<i>debt to equity swap</i>) sesuai keputusan PKPU dengan pembayaran Triwulan I pada Maret 2019. Conducting debt to equity swap based on the peace agreement with the payment of Quarter I in March 2019.</li> <li>Melakukan investasi pada aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP) sehingga pengelolaan bisnis dapat terintegrasi dengan pengolahan data secara <i>real-time</i>. Investing in the Enterprise Resource Planning (ERP) application so that business management can be integrated with real-time data processing.</li> </ol>
--	--

# LAPORAN DIREKSI

## Board Of Directors' Report

<b>Restrukturisasi Bidang Keuangan</b> Restructuring in Financial Sector	4. Menyerahkan pembayaran uang muka sebesar 30 persen untuk pembangunan kapal tanker LTTC Small II - WO 6.500 LTDW di PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Making a down payment of 30 percent for the construction of the LTTC Small II tanker - WO 6,500 LTDW at PT Dok dan Perkapalan Surabaya.
	5. Memantapkan rencana penerbitan surat utang jangka menengah (MTN) sebagai alternatif pendanaan untuk menambah alat produksi ataupun melakukan ekspansi pasar. Strengthening the plan to issue medium term notes (MTN) as an alternative funding to add production equipment or expand the market.
<b>Restrukturisasi Bidang Operasional</b> Restructuring in Bidang Operasional	1. Menambah alat produksi berupa satu unit <i>tug &amp; barge</i> (KT Daya Lautan II) dan kapal curah jenis <i>handymax</i> (MV Dharma Lautan Ruby) untuk memenuhi kontrak kerja dengan PT PLN (Persero). Adding production equipment in the form of one unit of tug & barge (KT Daya Lautan II) and handymax bulk ship (MV Dharma Lautan Ruby) to facilitate the work contract with PT PLN (Persero).
	2. Meningkatkan volume pengangkutan dengan mengoptimalkan penggunaan kapal milik, kapal <i>time charter</i> , dan kapal kerja sama operasi. Pada 2019, kenaikan volume pengangkutan tercatat pada kapal milik sebesar 33,7 persen, sedangkan kapal <i>time charter</i> dan kapal KSO mengalami penurunan, masing-masing 0,4 persen dan 19,2 persen. Increasing the bulk shipment volume by optimizing owned vessels, time charter, and joint operation ones. In 2019, the bulk shipment volume on owned vessels has recorded an increase of 33.7 percent, while time charter vessels and joint operation vessels experienced a decrease, respectively 0.4 percent and 19.2 percent.
	3. Melaksanakan penugasan dari Kementerian Perhubungan untuk mengoperasikan tol laut di empat trayek wilayah Indonesia Timur. Executing the assignment from the Ministry of Transportation to serve four routes of sea toll program in Eastern Indonesia.
	4. Meningkatkan sinergi BUMN dan pihak swasta untuk kerja sama operasi, antara lain dengan PT Antam Resourcindo, PT Pertamina (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya, serta PT Pelindo Marina Service. Improving the synergy with SOEs and private sector for joint operations, including PT Antam Resourcindo, PT Pertamina (Persero), PT Dok dan Perkapalan Surabaya, and PT Pelindo Marina Service.
<b>Restrukturisasi Bidang Organisasi</b> Restructuring in Bidang Organisasi	1. Mengubah paradigma pengelolaan sumber daya manusia menjadi modal insani. Shifting the paradigm of human resource management into a human capital approach.
	2. Merumuskan "KTKDPT" sebagai budaya baru Perusahaan. Formulating the "KTKDPT" as the Company's new culture.
	3. Menetapkan sistem remunerasi yang lebih baik sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama. Establishing a better remuneration system following the Collective Labor Agreement.

## PROSPEK USAHA

Seiring kebutuhan pasar yang semakin kompleks, DJAKARTA LLOYD berupaya menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan lini bisnis yang cukup komprehensif. Hingga tahun buku 2019 berakhir, Perseroan memiliki sembilan segmen usaha dengan beragam kontrak kerja sama yang melibatkan pemerintah, BUMN, maupun swasta. Ke depan, peningkatan volume pengangkutan dan pangsa pasar dalam segmen angkutan curah yang menjadi *core business* Perseroan akan terus diperkuat melalui sinergi BUMN dan pihak swasta.

Perseroan juga berencana melakukan penerbitan surat utang jangka menengah (MTN) sebagai upaya restrukturisasi keuangan. Pendanaan melalui MTN dapat dimanfaatkan untuk menambah alat produksi berupa kapal dan melakukan ekspansi pasar, terutama di segmen pengangkutan curah cair, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan margin dan berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis. Hingga akhir 2019, Perseroan masih menganalisis penerbitan MTN bersama PT Bahana Securities selaku pihak *arranger* dan PT Askrindo (Persero) selaku pihak penjamin *letter of credit*.

Selain itu, berdasarkan kontrak perjanjian novasi antara Perseroan dengan PT Odyssey Shipping Line dan PT Pertamina (Persero), Perseroan akan melakukan diversifikasi pasar melalui pengoperasian armada Small Tanker II 6500 LTDW untuk mengangkut curah cair yang direncanakan mulai berlangsung pada triwulan IV 2020.

## BUSINESS PROSPECTS

As market needs are increasingly complex, DJAKARTA LLOYD seeks to answer these challenges by presenting a reasonably comprehensive business line. Until the end of the 2019 fiscal year, the Company has nine business segments with various contracts involving the government, SOEs, and the private sector. In the future, the increase in the shipment volume and market share in the bulk shipment services, which is the Company's core business, will continue to be strengthened through the synergy with SOEs and the private sector.

The Company also plans to issue medium term notes (MTN) or debt securities as a financial restructuring effort. The MTN proceeds can be utilized to add production equipment in the form of ships and to expand the markets, especially in the liquid bulk shipment segment, so that it can increase the margins and contribute to business growth. Until the end of 2019, the Company was still analyzing the issuance of MTN together with PT Bahana Securities as the arranger and PT Askrindo (Persero) as the credit guarantor.

Aside from that, based on a novation agreement between the Company and PT Odyssey Shipping Line and PT Pertamina (Persero), the Company will diversify its markets through the operation of Small Tanker II 6500 LTDW fleet for liquid bulk shipment, planned to start in the fourth quarter of 2020.

**Perseroan berencana melakukan penerbitan surat utang jangka menengah (MTN) sebagai upaya memperoleh pendanaan guna menambah alat produksi dan melakukan ekspansi pasar.**

The Company plans to issue medium term notes (MTN) as an effort to obtain funding to increase production equipment and expand the markets.



# LAPORAN DIREKSI

## Board Of Directors' Report

### PENERAPAN GCG

Pada 2019, Perseroan mewujudkan komitmen pelaksanaan GCG sebagai berikut.

1. Penyampaian Laporan Tahunan 2018.
2. Pelaksanaan penilaian mandiri GCG tahun 2019
3. *Board Manual* Perusahaan.
4. Pedoman benturan kepentingan.
5. Penyediaan sarana pelaporan sistem pelaporan pelanggaran.
6. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh pejabat struktural satu tingkat di bawah Direksi dan pejabat setingkat Senior Manager di perusahaan afiliasi dan perusahaan patungan sebagai bentuk dukungan antikorupsi.
7. Kebijakan pengendalian informasi Perusahaan.
8. Pemutakhiran informasi Perusahaan terkini melalui kanal situs web dan media sosial.

Adapun berdasarkan hasil pengukuran penerapan GCG, Perseroan memperoleh skor 68,00 yang termasuk dalam klasifikasi kualitas "Cukup Baik", sekaligus meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 67,02. Dari lima aspek pengujian, Perseroan mencatat kenaikan skor pada aspek Dewan Komisaris dan Direksi. Ke depan, Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan berbagai upaya perbaikan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

### PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

Selama 2019, Perseroan mengalami perubahan anggota Direksi sebanyak satu kali, yakni Sdr. Ofan Sofwan ditunjuk untuk menggantikan Sdri. Tunggul Pusphita Dani sebagai Direktur Keuangan dan SDM berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-15/D7.MBU.4/1/2019 tanggal 24 Januari 2019 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 06 tanggal 13 Februari 2019. Adapun nomenklatur jabatan Direktur Keuangan dan SDM kini berubah menjadi Direktur Finance, Human Capital Management (HCM) & General Affair (GA).

### GCG IMPLEMENTATION

In 2019, the Company realized its commitment to implement GCG in the form of:

1. Submission of the 2018 Annual Report.
2. Implementation of the 2019 GCG self-assessment.
3. Company's Board Manual.
4. Conflict of interest guidelines.
5. Provision of reporting facilities in the whistleblowing system.
6. Submission of State Officials Assets Report (LHKPN) by down to the structural officials one level below the Board of Directors and Senior Manager level in affiliated and joint venture companies as a form of anti-corruption support.
7. Company information control policies.
8. Updating the latest Company information on the website and social media channels.

Based on the measurement results of the GCG implementation, the Company obtained a score of 68.00 which is classified as "Good Enough", increasing from the previous year of 67.02. Of the five aspects of measurement, the Company recorded an increase in scores on aspect of the Board of Commissioners and Board of Directors. The Company is committed to continuously improving all the aspects of GCG principles in the future.

### CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

In 2019, the Company experienced a change in the Board of Directors' members due to the appointment of Ofan Sofwan as Director of Finance and HR replacing Tunggul Pusphita Dani, based on the Minister of SOEs Decree Number SK-15/D7.MBU.4/1/2019 dated January 24, 2019 and Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH, Jakarta, Number 06 dated February 13, 2019. As for the position nomenclature of Director of Finance and HR has now changed to Director of Finance, Human Capital Management (HCM) & General Affair (GA).

Direksi mengucapkan terima kasih kepada Sdri. Tunggul Pusphita Dani atas kinerja dan dedikasinya selama menjabat sebagai Direktur Keuangan dan SDM sejak 20 Juli 2017 hingga 24 Januari 2019. Dengan demikian, komposisi Direksi DJAKARTA LLOYD hingga akhir 2019 terdiri atas Suyoto (Direktur Utama) dan Ofan Sofwan (Direktur Finance, HCM & GA) yang memiliki tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pada 2020, direncanakan adanya penunjukan Direktur Operasi sehingga kinerja operasional Perseroan dapat meningkat selaras dengan pertumbuhan profitabilitas.

## PENUTUP

Direksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemangku kepentingan yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap eksistensi Perseroan. Kami juga berterima kasih kepada mitra kerja dan pelanggan atas kepercayaan serta kerja sama yang telah terjalin dengan baik. Semoga sinergi tersebut terus berlanjut dan semakin kukuh pada masa mendatang.

Tidak ketinggalan, terima kasih pula kami ucapkan untuk Dewan Komisaris atas fungsi pengawasan dan pemberian nasihat yang menuntun Direksi dalam menyikapi berbagai kondisi, serta kepada seluruh insan DJAKARTA LLOYD atas kontribusi dan kerja kerasnya dalam memajukan Perseroan. Marilah kita bekerja lebih keras dan cerdas demi merealisasikan misi meraih kapitalisasi pasar senilai Rp14 triliun pada 2024 mendatang.

The Board of Directors would like to thank Tunggul Pusphita Dani for her performance and dedication while serving as Director of Finance and HR from July 20, 2017 to January 24, 2019. Thus, the composition of the DJAKARTA LLOYD's Board Directors until the end of 2019 consisted of Suyoto (President Director) and Ofan Sofwan (Director of Finance, HCM & GA) with the duties and authority under applicable laws and regulations. As for 2020, it is planned to appoint a Director of Operations so that the Company's operational performance can increase in line with the profitability growth.

## CLOSING

The Board of Directors expresses its most profound appreciation and gratitude to all stakeholders who have supporting the Company's existence. We also thank our partners and customers for their trust and good cooperation. Hopefully the synergy will continue and become stronger in the future.

Last but not least, we also thank the Board of Commissioners for their supervisory and advisory functions that guide the Board of Directors in responding to various conditions, and all DJAKARTA LLOYD personnel for their contributions and hard work in advancing the Company. Let us work harder and smarter to realize the mission of achieving a market capitalization worth Rp14 trillion in 2024.

Atas nama Direksi,  
On behalf of the Board of Directors,



**SUYOTO**

Direktur Utama PT DJAKARTA LLOYD (Persero)  
President Director of PT DJAKARTA LLOYD (Persero)

**SURAT PERNYATAAN  
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN TAHUNAN 2019 PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)**

STATEMENT LETTER

MEMBER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ON RESPONSIBILITY FOR  
2019 ANNUAL REPORT OF PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT DJAKARTA LLOYD (Persero) tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, declare that all information in the 2019 Annual Report of PT DJAKARTA LLOYD (Persero) is complete and solely responsible for the accuracy of the Company's Annual Report content.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made truthfully.

Jakarta, Juni 2020

Jakarta, June 2020

**DEWAN KOMISARIS  
BOARD OF COMMISSIONERS**



**M. YUSUF PERMANA**  
Komisaris  
Commissioner



**LAMBONAR O. SILITONGA**  
Komisaris Utama  
President Commissioner

**SURAT PERNYATAAN  
ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN TAHUNAN 2019 PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)**

STATEMENT LETTER  
MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS ON RESPONSIBILITY FOR  
2019 ANNUAL REPORT OF PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT DJAKARTA LLOYD (Persero) tahun 2019 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Juni 2020

We, the undersigned, declare that all information in the 2019 Annual Report of PT DJAKARTA LLOYD (Persero) is complete and solely responsible for the accuracy of the Company's Annual Report content.

This statement is hereby made truthfully.

Jakarta, June 2020

**DIREKSI**  
BOARD OF DIRECTORS



**OFAN SOFWAN**

Direktur Finance, HCM & GA  
Director of Finance, HCM & GA



**SUYOTO**

Direktur Utama  
President Director





**BUKU HARIAN KAPAL UNTUK DECK**  
DECK LOG BOOK

NAMA KAPAL: **MV. DHARMA LANTAR**



# PROFIL PERUSAHAAN

## Company Profile

Sebagai bentuk kontribusi turut membangun negeri, Perseroan terus meningkatkan konektivitas logistik antarpulau dengan mengoperasikan 17 armada kapal melalui sepuluh cabang yang tersebar di pelabuhan-pelabuhan strategis Indonesia.

As a contribution in developing the country, the Company continues to improve inter-island logistics connectivity by operating a fleet of 17 ships through its ten branches spreading in the strategic ports of Indonesia.



# IDENTITAS PERUSAHAAN

## Corporate Identity

### NAMA PERUSAHAAN

COMPANY NAME

PT DJAKARTA LLOYD (Persero)

### KEPEMILIKAN

SHAREHOLDERS

Saham Seri A Series A Shares:

Pemerintah Republik Indonesia (78,88%)

The Government of Republic of Indonesia (78.88%)

Saham Seri B Series B Shares:

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Kreditor

Konkuren (21,12%)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and Concurrent

Creditors (21,12%)

### STATUS PERUSAHAAN

COMPANY'S STATUS

Perusahaan tertutup

Private Company

### SEGMENT USAHA

BUSINESS SEGMENT

Jasa pelayaran dan logistik

Shipping and logistics services

### TANGGAL PENDIRIAN

ESTABLISHMENT DATE

18 Agustus 1950

August 18, 1950

### JUMLAH KARYAWAN

NUMBER OF EMPLOYEES

153 orang employees

### MODAL DASAR

AUTHORIZED CAPITAL

Rp3.000.000.000.000

### MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH PER 31 DESEMBER 2019

ISSUED AND FULLY PAID CAPITAL AS OF  
DECEMBER 31, 2019

Rp1.999.472.669.450

### LANDASAN HUKUM PENDIRIAN

LEGAL FOUNDATION OF ESTABLISHMENT

Akta Pendirian PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor 192 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 99 tanggal 10 Desember 1976, diubah dengan Akta Notaris Haji Zawir Simon, S.H. Nomor 123 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 75 tanggal 16 September 1988, diubah dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 50 tanggal 16 Maret 1998 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 85 tanggal 22 Oktober 1999, diubah dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 96 tanggal 14 Agustus 2008, diubah dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 9 tanggal 07 Mei 2009, diubah dengan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Nomor 1, Maret 2018 mengenai Penambahan Modal Disetor dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan serta telah disetujuinya utang SLA menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN).

Deed of Establishment of PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Number 192 Additional State Gazette of the Republic of Indonesia Number 99 dated December 10, 1976; amended by Deed of Notary Haji Zawir Simon, S.H. Number 123 Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 75 dated September 16, 1988; amended by Deed of Notary Imas Fatimah, S.H. Number 50 dated March 16, 1998, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 85 dated October 22, 1999; amended by Deed of Notary Imas Fatimah, S.H. Number 96 dated August 14, 2008; amended by Deed of Notary Imas Fatimah, S.H. Number 9 dated May 7, 2009; amended by Deed of Notary Lenny Janis Ishak, S.H. Number 1, March 2018 regarding the Additional Paid-in Capital and Amendment to the Company's Articles of Association, and the SLA debt has been approved to become State Capital Participation (PMN).

### ALAMAT DAN KONTAK PERUSAHAAN

COMPANY ADDRESS AND CONTACTS

D'Lloyd Building

Jl. Raden Saleh No. 51, Jakarta Pusat 10330, Indonesia

T. (62-21) 29619724

F. (62-21) 29619725

E. info@djakartalloyd.co.id

www.djakartalloyd.co.id

### MEDIA SOSIAL

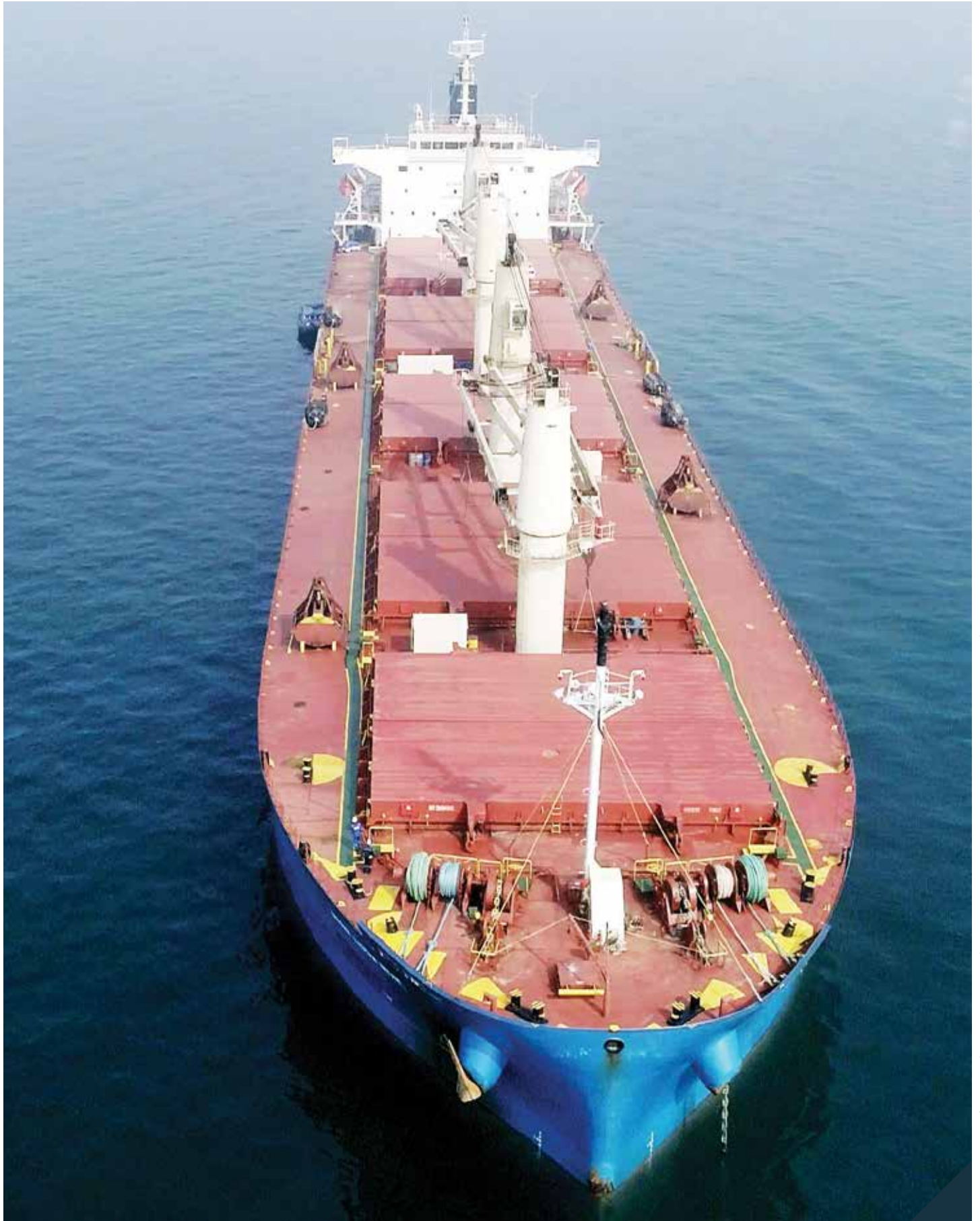
SOCIAL MEDIA

 PTDJAKARTALLOYD

 PT Djakarta Lloyd - Persero

 djakartalloyd

 Djakarta Lloyd





## RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Company's History in Brief



Untuk mewujudkan cita-cita membangun perusahaan pelayaran samudra yang berjaya di negeri sendiri, beberapa pejuang kemerdekaan sekaligus anggota TNI Angkatan Laut Pangkalan IV di Tegal, Jawa Tengah memprakarsai berdirinya NV DJAKARTA LLOYD pada 18 Agustus 1950. Perusahaan mengandalkan dua armada kapal uap saat awal beroperasi, yakni SS Jakarta Raya 1952 dan SS Djatinegara 1952.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 1961, status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) DJAKARTA LLOYD pada 1961. Selanjutnya pada 22 April 1974, Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1974 melandasi peralihan status menjadi Perusahaan (Persero). Semenjak itu, bisnis Perseroan kian menggeliat hingga berhasil mengoperasikan 20 unit kapal, serta memiliki 3.174 pegawai dan 31 kantor cabang yang tersebar di empat benua.

To realize their dream of developing an ocean shipping company that thrives in their own country, several freedom fighters and members of the Navy Base IV in Tegal, Central Java, initiated the establishment of NV DJAKARTA LLOYD on August 18, 1950. The Company relied on two ships as its fleet as a starter to operate, namely SS Jakarta Raya 1952 and SS Djatinegara 1952.

Based on the Republic of Indonesia Government Regulation Number 108 of 1961, the Company's status was changed to the State Company (PN) DJAKARTA LLOYD in 1961. Furthermore, on April 22, 1974, the Republic of Indonesia Government Regulation Number 20 of 1974 underlies the transition to the status of Company (Persero). Since then, the Company's business has snowballed to the point of operating 20 ships and employing 3,174 people with 31 branch offices spreading across four continents.



Menginjak akhir 1990-an, pertumbuhan bisnis Perseroan melandai sampai akhirnya mengalami kesulitan keuangan dan stagnasi operasional pada 2008 karena alat produksi tidak dapat diutilisasi. Kondisi krisis tersebut berlangsung selama empat tahun dan membuat DJAKARTA LLOYD berada di tepi jurang likuidasi dengan utang mencapai triliunan rupiah.

Kementerian Badan Usaha Milk Negara (BUMN) melakukan upaya penyelamatan melalui penerapan sinergi BUMN. Perseroan kemudian memperoleh kontrak pengangkutan 1 juta metrik ton (MT) batu bara dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sembari giat menjalankan pembenahan organisasi secara menyeluruh, termasuk mengganti fokus utama bisnis dari semula pengangkutan kontainer menjadi pengangkutan komoditas curah. Adapun sebagian besar utang direstrukturisasi dengan skema konversi utang menjadi saham.

Pembenahan tersebut membuahkan sejumlah kesepakatan kontrak baru dengan pihak BUMN dan swasta, diikuti peningkatan kinerja keuangan. DJAKARTA LLOYD kini tumbuh menjadi perusahaan sehat dengan total 153 pegawai di sepuluh kantor cabang seluruh Indonesia. Hingga akhir 2019, Perseroan mengoperasikan 17 armada terdiri atas dua unit kapal curah kering (*bulk carrier*), tiga unit kapal tunda pelabuhan (*harbour tug*), satu unit tongkang (*tug & barge*), lima unit kapal berjangka (*time charter*), dua unit kapal kerja sama operasi (KSO), dan empat unit kapal *general cargo* dari penugasan Kementerian Perhubungan RI terkait program Tol Laut.

By the late 1990s, the Company's business had been slowing down to the point of experiencing financial difficulties and operational stagnation because the production means could not be utilized. The crisis lasted for four years and left DJAKARTA LLOYD on the brink of liquidation with debts reaching trillions rupiah.

The Ministry of State Owned Enterprises (SOEs) tried to rescue it by applying of SOEs synergy program. The Company then obtained a contract to transport 1 million metric tons (MT) of coal from PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), while actively undertaking overall organizational reform, including changing the core business from transporting containers to bulk commodities. The majority of debts were restructured under a debt equity swap scheme.

The improvement resulted in a number of new contract agreements with other SOEs and the private companies, followed by an increase in financial performance. DJAKARTA LLOYD is now growing into a healthy company with a total of 153 employees in ten branch offices throughout Indonesia. Until the end of 2019, the Company operated 17 ships consisting of two bulk carriers, three harbor tugs, one unit of tug and barge, five units of time charter vessel, two units of joint operational ship, and four units of general cargo ship assigned by the Ministry of Transportation for the Sea Toll program.

## JEJAK LANGKAH Milestones

### 1950

Berdiri dengan nama NV DJAKARTA LLOYD pada 18 Agustus 1950.

Founded under the name NV DJAKARTA LLOYD on August 18, 1950.

### 1961

Status hukum perusahaan berubah menjadi Perusahaan Negara.

The legal status of the Company was changed to a State Enterprise.

### 1974

Status hukum perusahaan berubah menjadi Perusahaan (Persero).

The legal status of the Company was changed to a Company (Persero).

### 1970s-1990s

Memasuki masa keemasan dengan mengoperasikan 20 kapal di empat benua, yakni Asia, Amerika, Australia, dan Eropa.

Entering its glorious years by operating 20 ships on four continents, namely Asia, America, Australia and Europe.

### 2012

Memperoleh kontrak pengangkutan batu bara dari PT PLN (Persero) pada Mei 2012 yang menjadi titik balik untuk bangkit dari keterpurukan.

Sealing a coal transportation contract from PT PLN (Persero) in May 2012 which was a turning point to rise from adversity.

### 2014

Mulai kembali menghasilkan laba operasi senilai Rp12 miliar setelah melakukan restrukturisasi manajemen, keuangan, dan operasional.

Starting to generate operating profit of Rp12 billion after restructuring the management, finance, and operations.

### 2015

Menuntaskan proses restrukturisasi utang sebesar Rp1,2 triliun kepada kreditor melalui program Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan skema konversi utang menjadi saham.

Completing the debt restructuring process of Rp1.2 trillion to creditors through the Deferral of Debt Payment Obligations program with a scheme of debt-to-equity swap.

Mendapat suntikan modal dari pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp350 miliar.

Getting capital injection from the government in the form of State Capital Participation worth Rp350 billion.

**1986**

Mendirikan anak perusahaan bernama PT Dharma Lautan Nusantara pada 1 April 1986.

Establishing a subsidiary named PT Dharma Lautan Nusantara on April 1, 1986.

**1990s- 2007**

Pertumbuhan bisnis melandai hingga membukukan kerugian selama bertahun-tahun akibat berbagai kendala internal dan eksternal.

Business growth had been slowing down to record losses for years due to various internal and external obstacles.

**2008-2011**

Mengalami fase kesulitan keuangan dan stagnasi operasional karena alat produksi tidak dapat diutilisasi, bahkan hampir dinyatakan pailit.

Experiencing a phase of financial hardship and operational stagnation given the production means could not be utilized, even was almost declared bankrupt.

**2017**

Perubahan komposisi jenis saham pada modal dasar Perusahaan sebesar Rp722.000.000.000 yang terdiri atas 284.103 lembar saham seri A dan 437.897 lembar saham seri B.

A change in share composition in the authorized capital of the Company amounting to Rp722,000,000,000 consisting of 284,103 Series A shares and 437,897 Series B shares.

Melakukan serah terima KT Daya Lautan I dengan PT Pelindo Marine Services untuk kebutuhan jasa pemanduan pada 5 Desember 2017.

Handing over KT Daya Laut I to PT Pelindo Marine Services for scouting services on December 5, 2017.

**2018**

Menyelesaikan pengadaan MV Dharma Lautan Intan pada 11 April 2018 untuk menunjang operasional pengangkutan batu bara.

Completing the procurement of MV Dharma Lautan Intan bulk ship on April 11, 2018 to support the operations of coal transportation.

Mendirikan Strategic Business Unit (SBU) Tol Laut pada 21 September 2018 untuk memenuhi penugasan pemerintah mengenai penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.

Establishing the Sea Toll Strategic Business Unit (SBU) on September 21, 2018 to perform the government's assignment regarding the public service obligations in the logistics transport at sea.

**2019**

Menyelesaikan pengadaan kapal curah untuk memenuhi kontrak pengangkutan batu bara, yakni TB Daya Lautan II pada Januari 2019 dan MV Dharma Lautan Ruby pada 1 Agustus 2019.

Completing the procurement of bulk ships to fulfill the coal transportation contract, namely TB Daya Lautan II in January 2019 and MV Dharma Lautan Ruby on August 1, 2019.

Merekstrukturasikan organisasi dengan pendekatan modal insani dan menetapkan The Djakarta Lloyd Way pada 15 Maret 2019.

Restructuring the organization using human capital approach and establishing The Djakarta Lloyd Way on March 15, 2019.

## BIDANG USAHA Business Fields



Berdasarkan Anggaran Dasar yang termaktub dalam Keputusan Pemegang Saham PT DJAKARTA LLOYD (Persero) di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor Kp-96/MBU/2009 tanggal 17 April 2009 yang disusun di hadapan Notaris Nelfi Mutiara Simanjuntak, S.H. di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-39197.A.H.0102 Tahun 2009 tanggal 13 Agustus 2009, berikut adalah kegiatan usaha Perseroan.

1. Usaha di bidang angkutan laut dan penunjangnya.
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama berikut.

Based on the Articles of Association stipulated in the Shareholders' Resolution of PT DJAKARTA LLOYD (Persero) Without General Meeting of Shareholders (GMS) Number Kp-96/MBU/2009 dated April 17, 2009 prepared before the Notary Nelfi Mutiara Simanjuntak, S.H. in Jakarta and approved by the Minister of Law and Human Rights Number AHU-39197.A.H.0102 of 2009 dated August 13, 2009, the following are the Company's business activities.

1. Running business in the sea transportation and its supporting businesses.
2. Optimizing the utilization of resources owned by the Company to produce high-quality goods and/or services that are highly competitive in order to gain profit to increase the value of the Company.

Based on Article 3 of the Articles of Association, the Company can carry out these main business activities.



1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pelayaran angkutan laut, baik pelayaran samudra, pengumpan, serta kegiatan angkutan penunjang usaha pelayaran samudra dan khususnya pengangkutan kontainer dari tempat pengirim sampai tempat penerima.
2. Menjalankan kegiatan sebagai pemilik kapal.
3. Menjalankan kegiatan keagenan kapal-kapal dan/ atau perusahaan pelayaran.
4. Melakukan kegiatan terminal di berbagai pelabuhan di dalam negeri.
5. Melakukan kegiatan pergudangan dan ekspedisi untuk keperluan kapal yang diageni.
6. Melakukan kegiatan reparasi dan pemeliharaan serta galangan yang dimungkinkan oleh fasilitas yang tersedia.
7. Menjalankan kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan pokok pelayaran berupa *charter* kapal, *broker* kapal, dan *forwarding*.

Selain itu, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki terkait jasa penyewaan dan pengusahaan sarana dan prasarana milik Perseroan. Adapun secara garis besar, DJAKARTA LLOYD menjalankan empat kegiatan usaha, yakni pelayaran, logistik, keagenan, dan bongkar muat.

### KEGIATAN USAHA PELAYARAN

Industri pelayaran di Indonesia kian berkembang seiring tingginya kebutuhan pengiriman barang tanpa keterbatasan volume. Hal ini turut mendorong peningkatan kinerja operasional DJAKARTA LLOYD sebagai penyedia jasa pelayaran dan logistik yang telah memiliki kompetensi dan pengalaman selama puluhan tahun, sehingga dapat menawarkan solusi layanan dengan harga kompetitif. Saat ini, Perseroan menjalankan kegiatan usaha pelayaran berikut.

- Penyewaan Kapal: menjalankan kegiatan kepemilikan kapal untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, disewakan kepada pihak ketiga, ataupun kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

1. Running business in sea transportation, both ocean shipping, feeder, and transport activities that support ocean shipping business and specifically serving container transportation from the sending place to the receiving location.
2. Performing business activities as a ship owner.
3. Performing business activities as a shipping agency and/or shipping company.
4. Performing business activities at the terminals in various ports of the country.
5. Performing business activities in warehousing and expedition for the ships under its agency.
6. Performing business activities in repairs and maintenance at the shipyards according to the available facilities.
7. Performing activities that support the main business activities of shipping such as ship charters, ship brokerage, and forwarding.

In addition, the Company can carry out business activities to optimize the utilization of its resources related to the leasing and commercial services of its facilities and infrastructure. In general, DJAKARTA LLOYD runs four business activities, namely shipping, logistics, agency, and stevedoring.

### SHIPPING BUSINESS ACTIVITIES

The shipping industry in Indonesia is growing along with the high demand for goods shipment without volume limitations. This has also led to an increase in operational performance of DJAKARTA LLOYD as a shipping and logistics services provider with decades of competence and experience, so that it can offer service solutions at competitive prices. At present, the Company runs shipping business activities as follows.

- Ship Rental: purchasing ships to be leased to third parties or to be used for other activities according to the Company's needs.

## BIDANG USAHA

### Business Fields

- **Transportasi Barang:** melayani pengiriman angkutan komoditas jenis curah padat, cair, ataupun gas dalam jangkauan domestik dan internasional dengan menggunakan kapal kontainer, *general cargo*, atau *bulk carrier*.
- **Pengelolaan Kapal:** memiliki tenaga ahli terampil untuk membantu pelanggan dalam mengelola kapal yang meliputi penanganan kru, *bunker*, dan *fresh water*.
- **Kerja Sama Operasi:** melakukan kolaborasi operasi yang saling menguntungkan dan sesuai dengan kegiatan usaha yang menjadi kompetensi Perseroan.
- **Transportation of Goods:** providing services in transportation of commodities either solid, liquid, or gas for domestic and international routes using container ships, general cargo ships, or bulk carriers.
- **Ship Management:** providing services of skilled experts to assist customers in managing ships that includes handling the crew, bunkers, and fresh water.
- **Joint Operations:** collaborating in joint operations that is mutually beneficial and in accordance with Company's business activities of its competence.

#### KEGIATAN USAHA LOGISTIK

Perseroan menyediakan jasa logistik umum untuk menangani pengiriman muatan berupa barang mentah, hasil produksi, atau barang apa pun yang berbentuk curah. Pengiriman barang dilakukan dengan beragam moda transportasi dalam jangkauan distribusi domestik dan internasional.

#### LOGISTICS BUSINESS ACTIVITIES

The Company provides general logistics services to handle the shipment of cargoes in the form of raw materials, end products, or any goods in bulk. The shipments are carried out in a variety of transport modes for domestic and international deliveries.

#### KEGIATAN USAHA KEAGENAN

DJAKARTA LLOYD memiliki sepuluh kantor cabang untuk menjalankan usaha keagenan yang tersebar strategis di penjuru Nusantara, yakni Tanjung Priok, Surabaya, Sibolga, Bitung, Semarang, Banyuwangi, Bena, Berau, Panjang, dan Pangkalan Susu.

#### AGENCY BUSINESS ACTIVITIES

DJAKARTA LLOYD has ten branch offices to perform its agency business, spreading strategically across the archipelago, namely Tanjung Priok, Surabaya, Sibolga, Bitung, Semarang, Banyuwangi, Bena, Berau, Panjang, and Pangkalan Susu.

Seluruh kantor cabang berdedikasi untuk memberikan pelayanan prima, efektif, dan efisien, serta didukung tenaga ahli yang terampil dan memahami kondisi pelabuhan lokal, komoditas barang, serta regulasi yang berlaku di Indonesia. Dalam kondisi tertentu, kantor cabang juga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menawarkan jasa bongkar muat (*stevedoring*) dan pergudangan (*warehousing*) yang dijalankan oleh PT Dharma Lautan Nusantara selaku entitas anak.

All branch offices are dedicated to provide excellent, effective and efficient services, and are supported by skilled experts who completely understand the various conditions of ports, commodities, and regulations that apply in Indonesia. Under certain conditions, the branch offices also make a cooperation with third parties to offer stevedoring and warehousing services run by PT Dharma Lautan Nusantara as a subsidiary.

#### KEGIATAN USAHA BONGKAR MUAT

Untuk memenuhi permintaan pasar terkait kebutuhan bongkar muat, Perseroan mendirikan anak perusahaan bernama PT Dharma Lautan Nusantara pada 1986. Sejauh ini, entitas tersebut

#### STEVEDORING BUSINESS ACTIVITIES

To meet the market demands for stevedoring services, the Company established a subsidiary named PT Dharma Lautan Nusantara in 1986. So far, it has become a superior partner in handling stevedoring business activities from and to ships

telah menjadi mitra kerja yang unggul dalam penanganan kegiatan usaha bongkar muat dari dan ke kapal laut untuk berbagai komoditas dan barang. Pengoperasiannya pun berjalan dengan baik karena Perseroan selalu mengutamakan komunikasi efektif antara perusahaan dan pemilik barang, didukung oleh tenaga kerja tersertifikasi, terampil, serta selalu memprioritaskan keselamatan dan keamanan dalam bekerja.

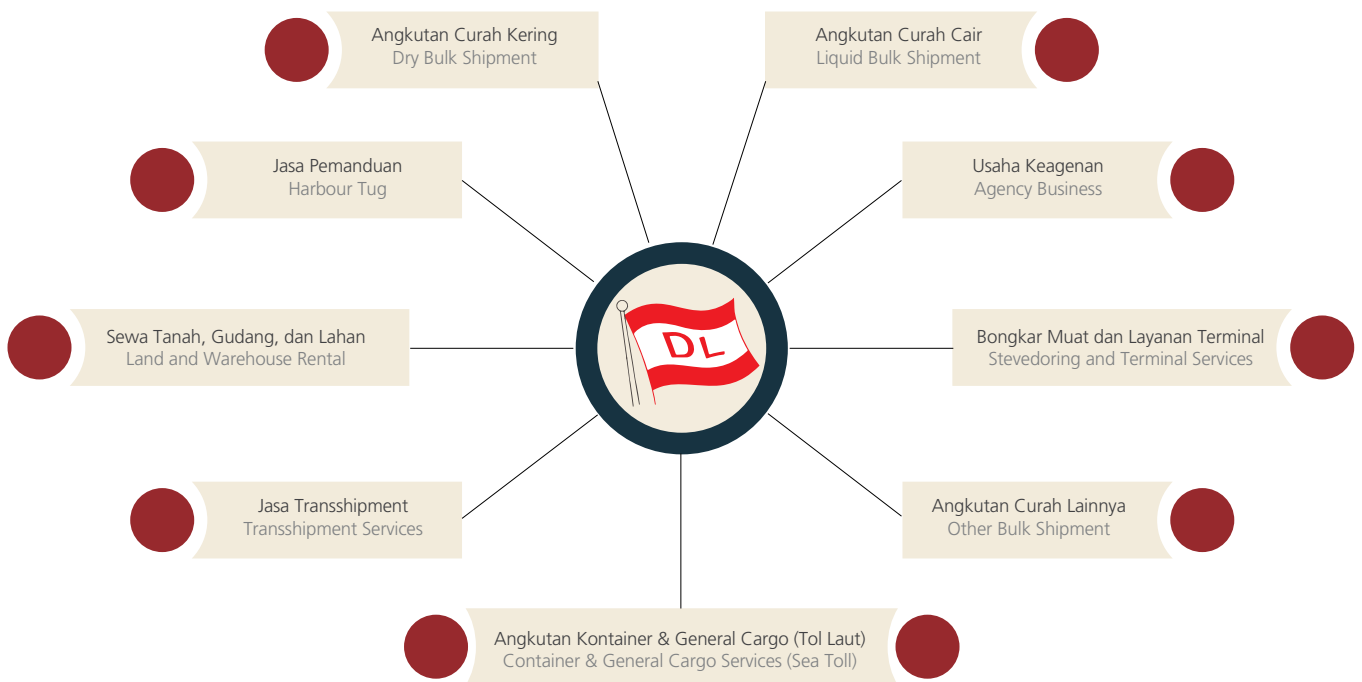
for various commodities and goods. The operations have been going well because the Company always prioritizes effective communication with the owners of the goods, supported by a certified, skilled workforce, and also puts safety and security first at work.

## SEGMENT USAHA

### Business Segments

Untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pasar yang semakin kompleks, DJAKARTA LLOYD terus mengembangkan cakupan layanan sehingga dapat menjadi pilihan utama para pelanggan. Berikut sembilan segmen layanan yang dimiliki Perseroan hingga akhir 2019.

To meet the increasingly complex needs and demands of the market, DJAKARTA LLOYD continues to develop service coverage so that it can become the customers' first choice. The following are nine service segments the Company offers as of the end of 2019.



## SEGMENT USAHA

### Business Segments

#### ANGKUTAN CURAH KERING

Dalam layanan pengangkutan batu bara ke berbagai wilayah ini, Perseroan memiliki sejumlah kontrak kerja dengan BUMN dan perusahaan swasta, salah satunya PLN. Armada yang digunakan tidak hanya kapal milik sendiri, tetapi turut mengoperasikan sejumlah kapal *time charter* dan kapal kerja sama operasi (KSO) dengan pihak ketiga.

#### JASA PEMANDUAN

Segmen ini menyediakan pemanduan navigasi bagi kapal yang hendak masuk ataupun keluar pelabuhan, sehingga dapat menjamin keselamatan kapal, muatan, dan lingkungan. Perseroan mengoperasikan tiga kapal tunda pelabuhan untuk melayani jasa pemanduan, terdiri atas satu unit milik sendiri serta dua kapal *time charter*.

#### ANGKUTAN KONTAINER DAN GENERAL CARGO (TOL LAUT)

Terkait program Tol Laut, Perseroan mendapat mandat dari Kementerian Perhubungan RI untuk mengoperasikan pengangkutan kontainer menggunakan empat unit kapal *general cargo* di empat trayek wilayah Indonesia Timur sejak November 2018, yakni rute H-4 (Tanjung Perak-Makassar-Kendari-Tanjung Perak), rute T-6 (Bitung-Pagimana-Bunta-Mantangisi-Parigi/Tinombo-Tilamuta-Bitung), rute T-7 (Makassar-Selayar-Jampea-Sikeli-Raha-Ereke-Pasar Wajo-Makassar), dan rute T-8 (Kendari-Bungku-Kolonodale-Luwuk-Kendari).

#### JASA TRANSSHIPMENT

Perseroan melayani alih muatan (*transshipment*) batu bara menggunakan dua kapal *time charter* melalui PT Dharma Lautan Nusantara selaku anak perusahaan.

#### ANGKUTAN CURAH CAIR

Untuk mengembangkan kompetensi bisnis, Perseroan menandatangani kontrak jangka panjang selama 10 tahun dengan PT Pertamina (Persero) terkait pengangkutan bahan bakar cair menggunakan dua unit tanker yang direncanakan beroperasi pada triwulan IV tahun 2020.

#### DRY BULK SHIPMENT

In this coal transportation services to various regions, the Company has a number of work contracts with SOEs and private companies, one of which is PLN. The fleet used is not only its own ships, but also a number of time charter and joint operation vessels belonging to third parties.

#### HARBOUR TUG

This segment provides navigation guidance for ships going to enter or exit a port to make sure the safety of the ships, the cargoes, and the environment. The Company operates three harbor tug vessels for its piloting services, consisting of one unit of owned ship and two units of time charter.

#### CONTAINER AND GENERAL CARGO SERVICES (SEA TOLL)

Related to the Sea Toll program, the Company has a mandate from the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia to serve container transportation by operating four units of general cargo ships in four routes in the Eastern Indonesia since November 2018. The routes are H-4 (Tanjung Perak-Makassar-Kendari-Tanjung Perak), T-6 (Bitung-Pagimana-Bunta-Mantangisi-Parigi/Tinombo-Tilamuta-Bitung), T-7 (Makassar-Selayar-Jampea-Sikeli-Raha-Ereke-Pasar Wajo-Makassar), and T-8 (Kendari-Bungku-Kolonodale-Luwuk-Kendari).

#### TRANSSHIPMENT SERVICES

The Company serves coal transshipment using two time-charter ships to PT Dharma Lautan Nusantara as a subsidiary.

#### LIQUID BULK SHIPMENT

To develop its business segments, the Company signed a 10-year long-term contract with PT Pertamina (Persero) related to the transportation of liquid fuels using two tankers planned to operate in the fourth quarter of 2020.



**ANGKUTAN CURAH LAINNYA**

Segmen bisnis yang mengangkut muatan curah kering, seperti nikel, pupuk, dan semen dengan kapal *time charter* ini terus dikembangkan oleh Perseroan, salah satunya melalui sinergi BUMN.

**USAHA KEAGENAN**

Perseroan memiliki sepuluh kantor cabang yang menjalankan bisnis keagenan kapal dan tersebar di titik-titik penting pelabuhan di Indonesia, yakni Tanjung Priok, Surabaya, Sibolga, Bitung, Semarang, Banyuwangi, Bena, Berau, Panjang, dan Pangkalan Susu.

**BONGKAR MUAT DAN LAYANAN TERMINAL**

Layanan pemindahan barang dari dan ke kapal pengangkut yang bersifat *door-to-door service* ini dijalankan oleh PT Dharma Lautan Nusantara selaku anak perusahaan.

**SEWA TANAH, GUDANG, DAN LAHAN**

Perseroan memiliki lahan seluas 10.000 m<sup>2</sup> di Kawasan Pelindo Tanjung Priok, Jakarta yang dapat disewakan untuk kebutuhan usaha, salah satunya lahan penyimpanan peti kemas.

**OTHER BULK SHIPMENT**

The business segment for transporting the dry bulk cargoes, such as nickel, fertilizer, and cement with time charter ships continues to be pursued by the Company, one of which is through the synergy with SOEs.

**AGENCY BUSINESS**

The Company has ten branch offices that run ship agency business, spreading in the major ports in Indonesia, namely Tanjung Priok, Surabaya, Sibolga, Bitung, Semarang, Banyuwangi, Bena, Berau, Panjang, and Pangkalan Susu.

**STEVEDORING AND TERMINAL SERVICES**

This door-to-door services for loading/offloading cargo from and to ship is carried out by PT Dharma Lautan Nusantara as a subsidiary.

**LAND AND WAREHOUSE RENTAL**

The Company owns 10,000 m<sup>2</sup> of land in the Pelindo Tanjung Priok Area, Jakarta, which can be leased for business needs, among others, as a container storage area.

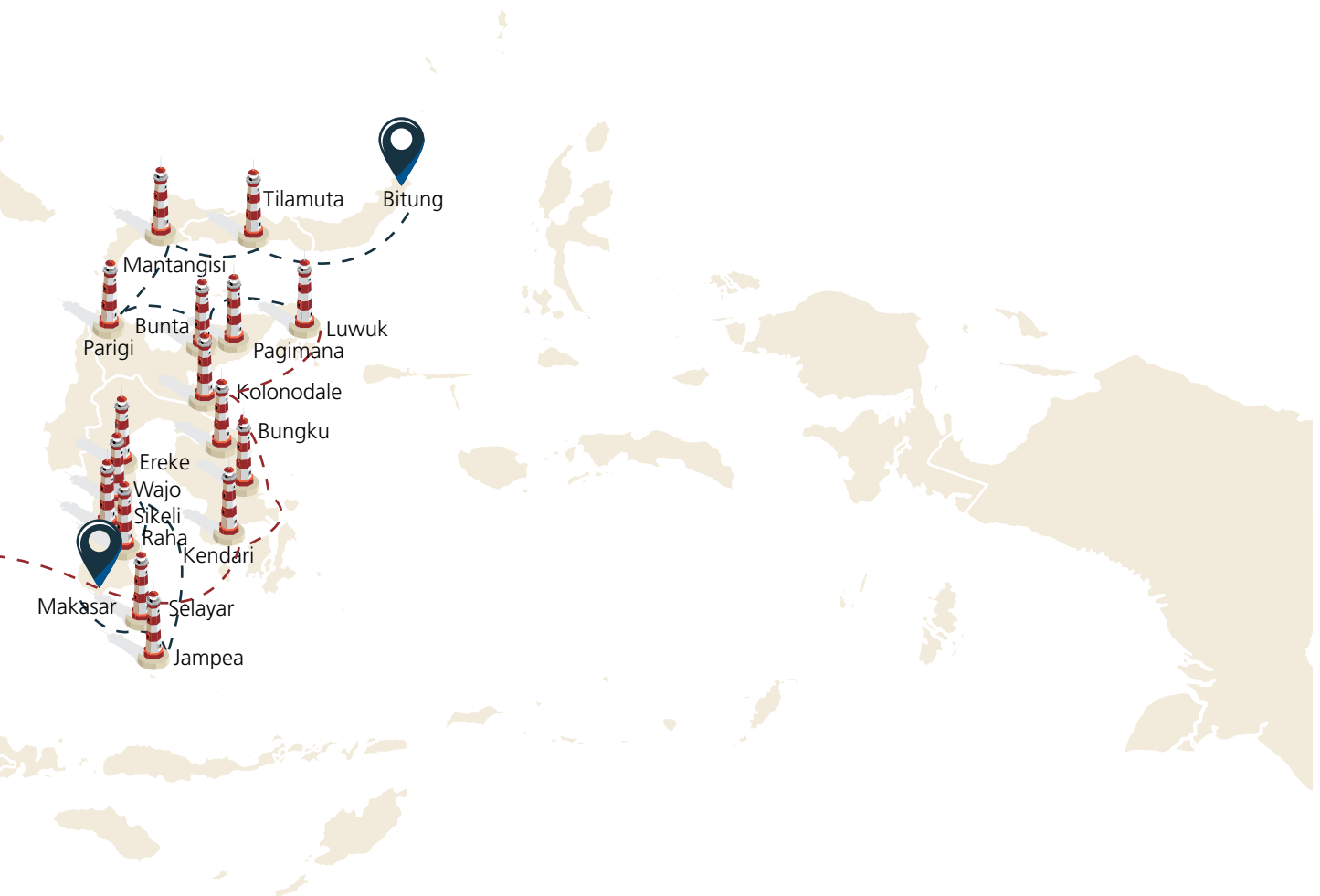
# WILAYAH OPERASIONAL

## Operational Coverage



### Kantor Cabang Branch Offices

1.	📍 Tanjung Priok (Jakarta)	7.	📍 Benoa (Bali)
2.	📍 Surabaya	8.	📍 Berau (Kalimantan Timur)
3.	📍 Sibolga (Medan)	9.	📍 Panjang (Lampung)
4.	📍 Bitung (Manado)	10.	📍 Pangkalan Susu (Sumatera Utara)
5.	📍 Semarang	11.	📍 SBU Tol Laut (Makassar)
6.	📍 Banyuwangi		



**Rute Tol Laut Sea Toll Routes**

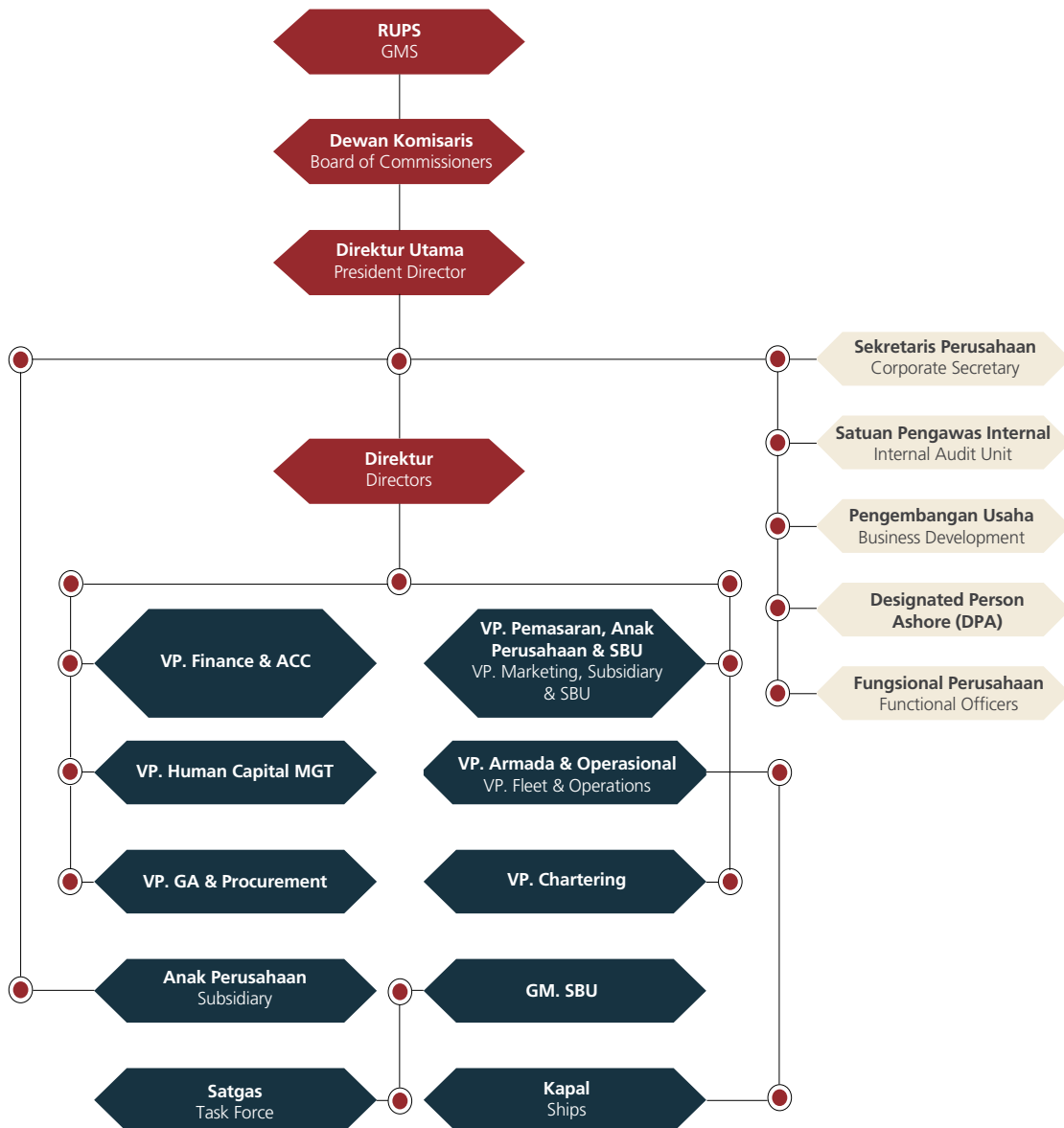
1.	Rute H-4 Route H-4	Tanjung Perak - Makassar - Kendari - Tanjung Perak
2.	Rute T-6 Route T-6	Bitung - Pagimana - Bunta - Mantangisi - Parigi/Tinombo - Tilamuta - Bitung
3.	Rute T-7 Route T-7	Makassar - Selayar - Jampea - Sikeli - Raha - Ereke - Pasar Wajo - Makassar
4.	Rute T-8 Route T-8	Kendari - Bungku - Kolonodale - Luwuk - Kendari

# STRUKTUR ORGANISASI

## Organizational Structure

Struktur organisasi Perusahaan yang berlaku pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

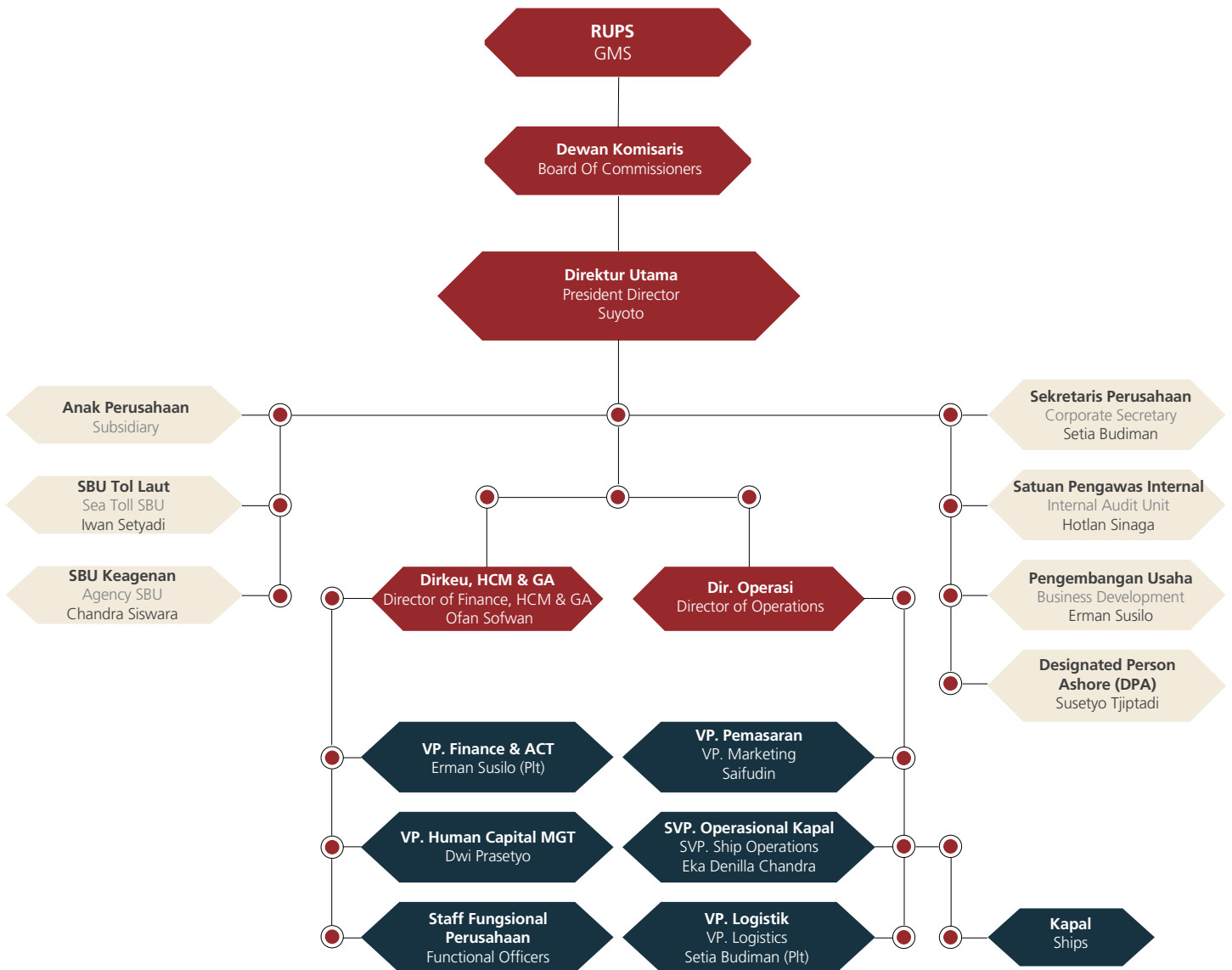
The Company's organizational structure until 2019 was as follows:





Struktur organisasi Perusahaan mengalami perubahan seiring adanya restrukturisasi organisasi dengan pendekatan modal insani pada 2019. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi DJAKARTA LLOYD Nomor 007/KEP/DIRUT/IV/2020, struktur organisasi Perusahaan saat ini adalah:

The Company's organizational structure has changed due to organizational restructuring using the human capital approach in 2019. Based on DJAKARTA LLOYD's Board of Directors Decree Number 007/KEP/DIRUT/IV/2020, the Company's current organizational structure is:



# VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Vision, Mission, and Corporate Culture



## DASAR PENGESAHAN VISI DAN MISI

Surat Keputusan Direksi Nomor 031/KEP/DIRUT/X/2018 tentang Penetapan Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai/Budaya, Motto, dan Tagline Perusahaan PT Djakarta Lloyd (Persero)

## VISI

Menjadikan DJAKARTA LLOYD perusahaan pelayaran dan *logistic provider* yang bertaraf internasional, handal, efisien, inovatif, dan berdaya tahan kuat.

## MISI

Memberikan solusi kepada pelanggan untuk mengurangi biaya logistik dalam maupun luar negeri dengan kecepatan, ketepatan, dan keamanan.

## BUDAYA PERUSAHAAN

Untuk menunjang pembentukan karakter *human capital* yang kompak, cerdas, dan cepat dalam diri pegawai, Perseroan menetapkan The Djakarta Lloyd Way sebagai budaya baru dengan filosofi "KTKDPT" (dibaca: KETIKA DAPAT).

## BASIS OF VISION AND MISSION APPROVAL

Board of Directors Decree Number 031/KEP/DIRUT/X/2018 concerning Determination of Company's Vision, Mission, Goals, Values/Culture, Motto, and Tagline of PT Djakarta Lloyd (Persero)

## VISION

To make DJAKARTA LLOYD a shipping company and logistics service provider that is of international standard, reliable, efficient, innovative, and resilient.

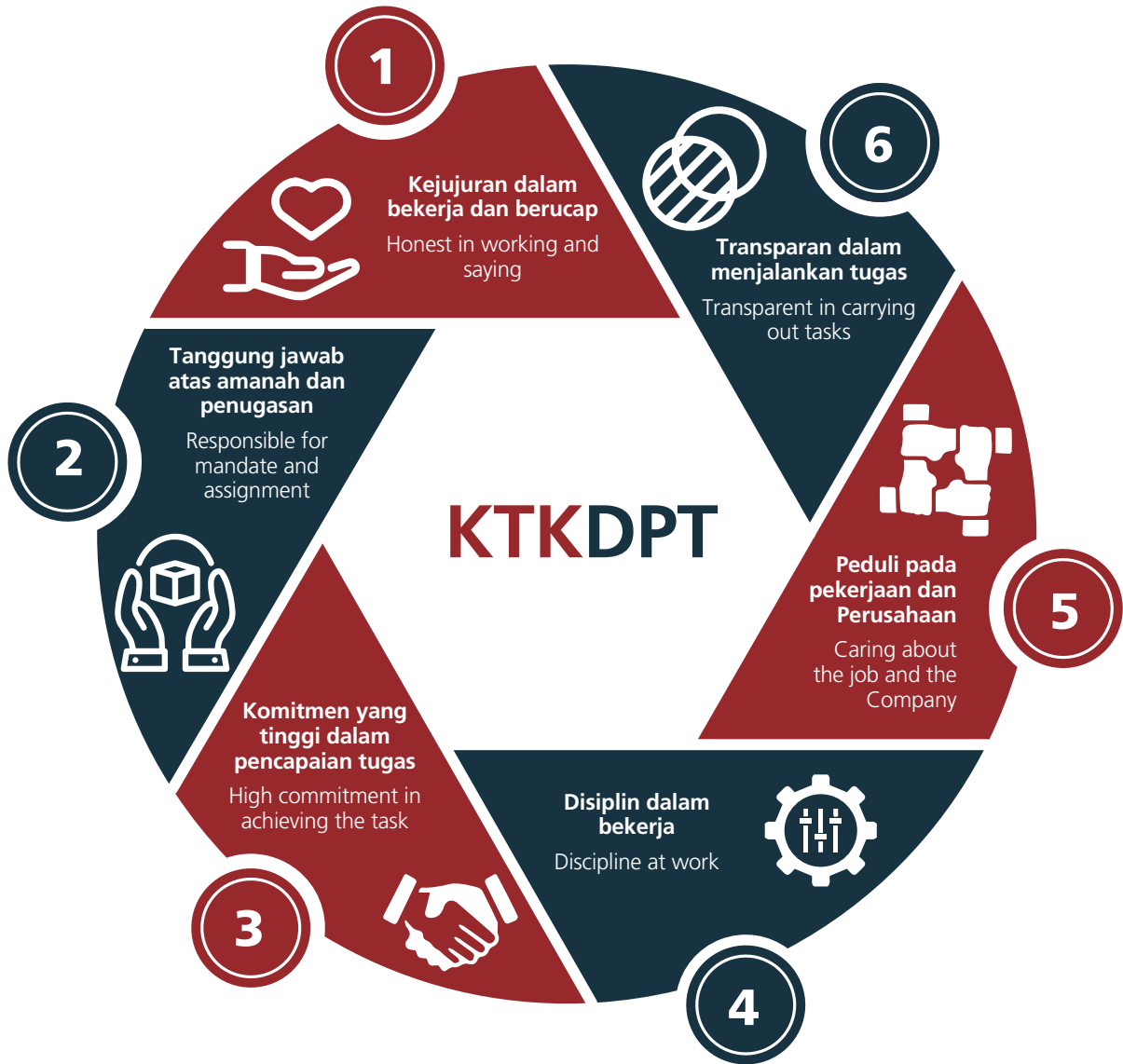
## MISION

To provide solutions to customers in reducing logistics costs at domestic and overseas with speed, accuracy, and security.

## CORPORATE CULTURE

To embed solid, intelligent, and agile characters in the employees as human capital, the Company established The Djakarta Lloyd Way as a new culture with the philosophy of "KTKDPT" (read: KETIKA DAPAT/WHENEVER CAN).

Nilai-nilai Perusahaan  
Corporate Values



# PROFIL DEWAN KOMISARIS

## Board of Commissioners' Profiles



### LAMBONAR OKTOBERTUAH SILITONGA

Komisaris Utama  
President Commissioner

#### Kewarganegaraan Citizenship

Indonesia Indonesian

#### Umur Age

51 tahun years old

#### Domisili Residency

DKI Jakarta

#### Pendidikan Education

Sarjana Teknik Pertambangan, Universitas Sriwijaya	Bachelor of Mining Engineering, Sriwijaya University	Magister Manajemen Keuangan, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	Master of Financial Management, Bhayangkara Jakarta Raya University
--	--	---	--

#### Riwayat Pekerjaan Work Experience

2019-2020	Komisaris PT Djakarta Lloyd (Persero)	Commissioner of PT Djakarta Lloyd (Persero)
2014-2019	Komisaris PT Bhandha Ghara Reksa	Commissioner of PT Bhandha Ghara Reksa
2015-2017	Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata IIb	Head of Energy, Logistics, Regional, and Tourism Business Field IIb
2016	Plt. Kepala Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Ila	Acting Head of Energy, Logistics, Regional, and Tourism Business Field Ila
2014-2015	Kepala Bidang Aneka Industri I, Asdep Pertanian, Perikanan, dan Aneka Industri, Kedeputian Industri Agro dan Industri Strategis	Assistant of Agriculture, Fisheries, and Various Industries, Deputy of Agro and Strategic Industries

#### Dasar Penunjukan Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Utama DJAKARTA LLOYD berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-19/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 25 tanggal 20 Januari 2020.

Appointed as President Commissioner of DJAKARTA LLOYD based on the Minister of SOEs Decree Number SK-19/MBU/01/2020 dated January 9, 2020 and Deed of Notary Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Number 25 dated January 20, 2020.

#### Rangkap Jabatan Concurrent Position

Kepala Bidang Analisis Data Kementerian BUMN RI (2017-Saat ini)  
Head of Data Analysis Division of the Ministry of SOEs (2017-Present)





**MOHAMAD YUSUF PERMANA**

Komisaris  
Commissioner

**Kewarganegaraan Citizenship**

Indonesia Indonesian

**Umur Age**

45 tahun years old

**Domisili Residency**

DKI Jakarta

**Pendidikan Education**

Sarjana Ekonomi, Universitas Gunadarma (1998)

Bachelor of Economics, Gunadarma University (1998)

**Riwayat Pekerjaan Work Experience**

2015-2016	Kepala Subbagian Penyiapan Acara Pendamping, Biro Protokol, Sekretariat Presiden	Head of Subsection for Preparing a Companion Event, Protocol Bureau, Presidential Secretariat
2007-2015	Kepala Subbagian Penyiapan Undangan, Biro Protokol, Sekretariat Presiden	Head of Subsection for Preparing Invitation, Protocol Bureau, Presidential Secretariat
2006-2007	Kepala Subbagian Pengadaan, Sekretariat Presiden	Head of Subsection for Procurement, Presidential Secretariat

**Dasar Penunjukan Basis of Appointment**

Diangkat sebagai Komisaris DJAKARTA LLOYD berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-19/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 25 tanggal 20 Januari 2020.

Appointed as Commissioner of DJAKARTA LLOYD based on the Minister of SOEs Decree Number SK-19/MBU/01/2020 dated January 9, 2020 and Deed of Notary Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Number 25 dated January 20, 2020.

**Rangkap Jabatan Concurrent Position**

Kepala Bagian Upacara, Biro Protokol, Sekretariat Presiden, Kementerian Sekretariat Negara RI (2016-Saat ini)

Head of Section for Ceremony, Protocol Bureau, Presidential Secretariat, Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia (2016-Present)

## PROFIL DEWAN KOMISARIS

### Board of Commissioners' Profiles



#### MARYONO MAULUS ATMADJA

Komisaris Utama  
President Commissioner

#### Kewarganegaraan Citizenship

Indonesia Indonesian

#### Umur Age

72 tahun years old

#### Domisili Residency

DKI Jakarta

#### Pendidikan Education

Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (1972)

Indonesian Armed Forces Academy (1972)

#### Riwayat Pekerjaan Work Experience

2005-2008	Direktur Keuangan PT Jala Bhakti Yasbhum	Finance Director of PT Jala Bhakti Yasbhum
2004-2005	Direktur Operasi PT Trimitra Adiyasa	Operation Director of PT Trimitra Adiyasa
2003	Pensiun dari TNI Angkatan Laut dengan jabatan Inspektur Umum/Inspektur Jenderal TNI/MABES TNI	Retired from the Indonesian Navy as General Inspector/Inspector General of the Navy Headquarters
2001-2003	Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung	Bandung Navy Base Commander

#### Dasar Penunjukan Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Utama DJAKARTA LLOYD berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-27/MBU/2014 tanggal 15 Februari 2014.

Appointed as President Commissioner of DJAKARTA LLOYD based on the Minister of SOEs Decree Number SK-27/MBU/2014 dated February 15, 2014.

#### Masa Jabatan Term of Office

1 Januari 2009 - 29 Mei 2019

January 1, 2009 - May 29, 2019



**SYAHRIL JAPARIN**

Komisaris Independen  
Independent Commissioner

**Kewarganegaraan Citizenship**

Indonesia Indonesian

**Umur Age**

54 tahun years old

**Domisili Residency**

DKI Jakarta

**Pendidikan Education**

Sarjana Teknik Mesin, Institut Teknologi Bandung (1991)

Bachelor of Mechanical Engineering, Bandung Institute of Technology (1991)

**Riwayat Pekerjaan Work Experience**

2016-2017	Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo)	President Director of Perum Perindo
2013-2014	Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia	President Director of PT Pelayaran Nasional Indonesia
2011-2013	Direktur Utama DJAKARTA LLOYD	President Director of DJAKARTA LLOYD
2008-2011	Direktur Utama PT Thames PAM Jaya (sekarang PT Aetra)	President Director of PT Thames PAM Jaya (now PT Aetra)

**Dasar Penunjukan Basis of Appointment**

Diangkat sebagai Komisaris Independen DJAKARTA LLOYD berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-122/MBU/05/2018 tanggal 8 Mei 2018.

Appointed as Independent Commissioner of DJAKARTA LLOYD based on the Minister of SOEs Decree Number SK-122/MBU/05/2018 dated May 8, 2018.

**Masa Jabatan Term of Office**

8 Mei 2018 - 29 Mei 2019

May 8, 2018 - May 29, 2019

# PROFIL DEWAN KOMISARIS

## Board of Commissioners' Profiles



### ANHAR ADEL

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen  
President Commissioner also Independent Commissioner

#### Kewarganegaraan Citizenship

Indonesia Indonesian

#### Umur Age

62 tahun years old

#### Domisili Residency

DKI Jakarta

#### Pendidikan Education

Sarjana Administrasi Negara, Universitas Padjadjaran  
(1982)

Bachelor of State Administration, Padjadjaran University  
(1982)

#### Riwayat Pekerjaan Work Experience

2007-2018	Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Secretary General of Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM)
2005-2007	Kepala Biro Umum Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Head of General Bureau of Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM)
2005	Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Head of Equipment and Household of Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM)

#### Dasar Penunjukan Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Utama DJAKARTA LLOYD berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-117/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019.

Appointed as President Commissioner of DJAKARTA LLOYD based on the Minister of SOEs Decree Number SK-117/MBU/05/2019 dated May 29, 2019.

#### Masa Jabatan Term of Office

29 Mei 2019 - 9 Januari 2020

May 29, 2019 - January 9, 2020



## PROFIL DIREKSI

### Board of Directors' Profiles



#### SUYOTO

Direktur Utama  
President Director

#### Kewarganegaraan Citizenship

Indonesia Indonesian

#### Umur Age

53 tahun years old

#### Domisili Residency

DKI Jakarta

#### Pendidikan Education

Master Marine Engineering Class 1, Indonesia Merchant Marine Academy (AIP) (2002)	Master of Marine Engineering Class 1, Indonesia Merchant Marine Academy (AIP) (2002)	Magister Manajemen Eksekutif Kekhasan Manajemen Risiko, PPM School of Management, Jakarta (2019)	Master of Executive Management in Specific Risk Management, PPM School of Management, Jakarta (2019)
---	--	--	--

#### Riwayat Pekerjaan Work Experiences

2016-2017	Direktur Operasional PT Djakarta Lloyd (Persero)	Operational Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)
2012-2015	Managing Director PT Ship Management Indonesia	Managing Director of PT Ship Management Indonesia
2009-2012	Technical Manager OSM Ship Management Pte. Ltd	Technical Manager of OSM Ship Management Pte. Ltd.
2008-2009	Technical Superintendent OSM Ship Management Pte. Ltd	Technical Superintendent of OSM Ship Management Pte. Ltd.

#### Dasar Penunjukan Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Utama DJAKARTA LLOYD berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-136MBU/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 dan Akta Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 3 tanggal 8 Agustus 2017.  
Appointed as President Director of DJAKARTA LLOYD based on the Minister of SOEs Decree Number SK-136MBU/07/2017 dated July 20, 2017 and Deed of Notary Lenny Janis Ishak, S.H. Number 3 dated August 8, 2017.

#### Rangkap Jabatan Concurrent Position

Managing Director PT Austen Maritime Indonesia (2015-Saat ini)  
Managing Director of PT Austen Maritime Indonesia (2015-Present)

# PROFIL DIREKSI

## Board of Directors' Profiles



### OFAN SOFWAN

Direktur Finance, HCM & GA  
Director of Finance, HCM & GA

#### Kewarganegaraan Citizenship

Indonesia Indonesian

#### Umur Age

54 tahun years old

#### Domisili Residency

DKI Jakarta

#### Pendidikan Education

Sarjana Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Pendidikan Keuangan dan Perbankan (STIE YPKP), Bandung (1988)	Bachelor of Economics, Institute of Economics, Financial and Banking Education Foundation (STIE YPKP), Bandung (1988)	Magister Manajemen (Finance), Universitas Padjadjaran (1999)	Master of Management (Finance), Padjadjaran University (1999)
--	---	--	---

#### Riwayat Pekerjaan Work Experience

2016-2018	Direktur Keuangan dan SDM PT Sang Hyang Seri (Persero)	Director of Finance and Human Resources of PT Sang Hyang Seri (Persero)
2012	Komisaris PT Eastkal, Telkom Group	Commissioner of PT Eastkal, Telkom Group
2011-2012	Komisaris PT Multimedia Nusantara (Telkom Metra)	Commissioner of PT Multimedia Nusantara (Telkom Metra)
2009-2011	Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin)	Commissioner of PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin)

#### Dasar Penunjukan Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Finance, Human Capital Management & General Affair DJAKARTA LLOYD berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-15/D7.MBU.4/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 dan Akta Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 6 tanggal 13 Februari 2019.

Appointed as Director of Finance, Human Capital Management & General Affairs of DJAKARTA LLOYD based on the Minister of SOEs Decree Number SK-15/D7.MBU.4/01/2019 dated January 24, 2019 and Deed of Notary Lenny Janis Ishak, S.H. Number 6 dated February 13, 2019.

#### Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak ada

None



**TUNGGUL PUSPHITA DANI**

Direktur Keuangan & SDM  
Director of Finance & HR

**Kewarganegaraan Citizenship**

Indonesia Indonesian

**Umur Age**

45 tahun years old

**Domisili Residency**

DKI Jakarta

**Pendidikan Education**

Sarjana Ekonomi Akuntansi, Universitas Pancasila (1997)

Bachelor of Accounting, Pancasila University (1997)

**Riwayat Pekerjaan Work Experience**

2016-2017	Plt. Direktur Utama PT Dharma Lautan Nusantara	Acting President Director of PT Dharma Lautan Nusantara
2015-2016	Direktur Keuangan dan Administrasi PT Dharma Lautan Nusantara	Director of Finance and Administration of PT Dharma Lautan Nusantara
2014-2015	Sekretaris Perusahaan DJAKARTA LLOYD	Corporate Secretary of DJAKARTA LLOYD
2013-2014	Manager Commercial PSO PT Pelayaran Nasional Indonesia	PSO Commercial Manager of PT Pelayaran Nasional Indonesia

**Dasar Penunjukan Basis of Appointment**

Diangkat sebagai Direktur Keuangan dan SDM DJAKARTA LLOYD berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-136/MBU/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 dan Akta Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 3 tanggal 8 Agustus 2017.

Appointed as Director of Finance, Human Capital Management & General Affairs of DJAKARTA LLOYD based on the Ministry of SOEs Decree Number SK-15/D7.MBU.4/01/2019 dated January 24, 2019 and Deed of Notary Lenny Janis Ishak, S.H. Number 3 dated August 8, 2017.

**Masa Jabatan Term of Office**

20 Juli 2017 - 24 Januari 2019

July 20, 2017 - January 24, 2019



Dari kiri ke kanan:  
M. Yusuf Permana (Komisioner), Lambonar O. Silitonga (Komisaris Utama),  
Ofan Sofwan (Direktur Finance, HCM & GA), dan Suyoto (Direktur Utama)





From left to right:  
M. Yusuf Permana (Commissioner), Lambonar O. Silitonga (President Commissioner),  
Ofan Sofwan (Director of Finance, HCM & GA), and Suyoto (President Director)

# DEMOGRAFI KARYAWAN

## Employee Demographics

Seiring pertumbuhan bisnis, DJAKARTA LLOYD menyadari bahwa sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu keunggulan kompetitif berkelanjutan sekaligus ujung tombak pencapaian kinerja. Karena itu, pada 15 Maret 2019, Perseroan melakukan restrukturisasi organisasi dan mengubah pendekatan sumber daya manusia menjadi modal insani dalam strategi pengelolaan SDM.

Pegawai kini dipandang sebagai aset Perusahaan yang harus dikelola secara baik agar dapat meningkatkan daya saing dan memajukan bisnis. Selain itu, pegawai mendapatkan kesempatan yang sama dan setara dalam pengembangan karier dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja, penilaian, dan kompetensi. Adapun program pengembangan karier dirancang sesuai kebutuhan organisasi.

Penerapan paradigma modal insani juga diselaraskan dengan pengenalan budaya baru bertajuk "The Djakarta Lloyd Way" yang memiliki enam nilai filosofis, yakni Kejujuran, Tanggung jawab, Komitmen, Disiplin, Peduli, serta Transparan atau disingkat "KTKDPT" (dibaca: KETIKA DAPAT).

Hingga akhir 2019, DJAKARTA LLOYD memiliki 153 pegawai, termasuk di antaranya 51 pegawai PT Dharma Lautan Nusantara.

As business grows, DJAKARTA LLOYD realizes that human resources (HR) is one of sustainable competitive advantages and also the spearhead to achieve performance. Therefore, on March 15, 2019, the Company restructured the organization and changed its human resources approach to human capital in its HR management strategy.

Employees are now seen as the Company's assets that must be managed properly in order to increase competitiveness and advance the business. In addition, employees get the same and equal opportunities in career development by considering the results of performance evaluation, assessment, and competence. The career development program is designed according to organizational needs.

The application of the human capital paradigm is also harmonized with the introduction of a new culture titled "The Djakarta Lloyd Way" which has six philosophical values, namely Honesty, Responsibility, Commitment, Discipline, Care, and Transparent abbreviated to "KTKDPT" (read: WHENEVER CAN).

As of the end of 2019, DJAKARTA LLOYD employed 153 people, including 51 employees of PT Dharma Lautan Nusantara.

### Komposisi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi Employee Composition Based on Organizational Levels

Level Organisasi Organizational Level	2018				2019			
	KP	SBU	KC	AP	KP	SBU	KC	AP
Senior Manager	7	0	0	3	9	1	0	4
Manager	7	0	11	9	9	3	1	11
Supervisor	10	0	2	1	8	3	9	6
Staff	26	0	24	31	33	5	21	30
<b>Subtotal</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>59</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>51</b>
<b>Total</b>	<b>131</b>				<b>153</b>			

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
Employee Composition Based on Education

Pendidikan Education		2018				2019			
		KP	SBU	KC	AP	KP	SBU	KC	AP
SMP	Junior High School	0	0	0	3	0	0	0	0
SMA	High School	12	0	6	23	17	1	6	26
D3	Diploma	1	0	6	3	2	1	8	3
D4/S1	Bachelor's Degree	32	0	24	13	35	8	17	18
S2	Master's Degree	4	0	1	2	5	2	0	4
S3	Doctoral Degree	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>59</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>51</b>
<b>Total</b>		<b>131</b>				<b>153</b>			

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia**  
Employee Composition Based on Age Groups

Usia Age Group		2018				2019			
		KP	SBU	KC	AP	KP	SBU	KC	AP
18-25 tahun years old		10	0	5	2	12	2	4	4
26-30 tahun years old		7	0	5	5	10	2	6	6
31-35 tahun years old		9	0	5	3	8	2	4	2
36-40 tahun years old		7	0	6	5	7	1	3	8
41-45 tahun years old		6	0	6	8	8	3	4	9
46-50 tahun years old		8	0	7	17	7	2	6	17
51-55 tahun years old		3		3	4	7	0	4	5
<b>Subtotal</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>59</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>51</b>
<b>Total</b>		<b>131</b>				<b>153</b>			

**Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian**  
Employee Composition Based on Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status		2018				2019			
		KP	SBU	KC	AP	KP	SBU	KC	AP
Organik	Organic	21	0	13	7	30	3	15	10
Kontrak	Contract	28	0	24	37	29	9	16	41
Honorar	Honorary	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>59</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>51</b>
<b>Total</b>		<b>131</b>				<b>153</b>			

## DEMOGRAFI KARYAWAN

### Employee Demographics

#### Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Employee Composition Based on Gender

Jenis Kelamin Gender		2018				2019			
		KP	SBU	KC	AP	KP	SBU	KC	AP
Laki-Laki	Male	38	0	29	5	44	9	23	43
Perempuan	Female	12	0	8	39	15	3	8	8
<b>Subtotal</b>		<b>50</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>44</b>	<b>59</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>51</b>
<b>Total</b>		<b>131</b>				<b>153</b>			

#### Keterangan:

- KP** Kantor Pusat di Jakarta, terdiri atas lima Divisi, satu Biro, Satuan Pengawasan Intern, dan Sekretaris Perusahaan.
- SBU** Strategic Business Unit Tol Laut, tersebar di Kantor Pusat, Makassar, Kendari, Surabaya, dan Bitung.
- KC** Kantor Cabang yang tersebar di sepuluh titik, yakni Tanjung Priok, Semarang, Surabaya, Banyuwangi, Benoa, Sibolga, Panjang, Bitung, Berau, dan Pangkalan Susu.
- AP** Anak Perusahaan, yakni PT Dharma Lautan Nusantara.

#### Note:

- KP** Headquarters in Jakarta, consisting of five Divisions, one Bureau, Internal Oversight Unit, and Corporate Secretary.
- SBU** Strategic Business Unit for Sea Toll Program, operating at Headquarters, Makassar, Kendari, Surabaya and Bitung.
- KC** Branch Offices spreading over ten points, namely Tanjung Priok, Semarang, Surabaya, Banyuwangi, Benoa, Sibolga, Panjang, Bitung, Berau, and Pangkalan Susu.
- AP** Subsidiary, PT Dharma Lautan Nusantara.

### PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Perseroan menyelenggarakan program peningkatan kompetensi pegawai yang ditujukan untuk pengembangan personal, peningkatan kinerja dan keberhasilan karier, serta pengembangan manajemen yang diarahkan kepada tiga aspek, yakni: sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Program Attitude bertujuan untuk melatih disiplin, komitmen, dan tanggung jawab dilaksanakan melalui pelatihan motivasi dan *soft skill* dalam bentuk kegiatan Character Building pada 8-9 Juli 2019 di Bandung dan Employee Gathering pada 15-16 Desember 2019 di Bandung. Sementara itu, Program Knowledge yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dilaksanakan rutin setiap satu minggu sekali melalui *sharing session* atau sosialisasi, baik dari Direksi kepada pegawai maupun dari atasan kepada staf di lingkungan kerja masing-masing.

### COMPETENCY TRAINING AND DEVELOPMENT

The Company holds employee competency improvement programs aimed at personal development, performance enhancement and career success, as well as management development which is directed at three aspects, namely attitude, knowledge, and skills.

The Attitude Program aims to train discipline, commitment and responsibility through motivation and soft skill training in the form of Character Building activities, such as ones held on July 8-9, 2019 in Bandung and Employee Gathering on December 15-16, 2019 in Bandung. Meanwhile, the Knowledge Program aims to increase knowledge, carried out routinely once a week through sharing sessions or outreach, either by the Directors to employees and superiors to staff in their respective work environments.

Adapun Program Skill dilaksanakan melalui pelatihan, salah satunya berupa *built in training* untuk memperoleh sertifikasi ataupun meningkatkan kompetensi profesional. Sejumlah pelatihan yang telah diikuti pegawai DJAKARTA LLOYD selama tahun 2019 di antaranya sebagai berikut.

1. Pelatihan Soft Skill Sekretaris, diikuti oleh dua staf dari Unit Sekretaris Perusahaan.
2. Pelatihan Internal Audit ISM Code, diikuti oleh satu staf dari Unit Chartering.
3. Pelatihan Leadership Endurance Test, diikuti oleh 16 pegawai dari berbagai unit.
4. Pelatihan Public Executive, dilakukan sebanyak tiga kali.
5. Pelatihan Humas BUMN yang Andal, diikuti oleh satu pegawai dari Unit Sekretaris Perusahaan.
6. Pelatihan Bimbingan Mental dan Kedisiplinan, diikuti oleh 22 pegawai.
7. Pelatihan Big Data, diikuti oleh satu staf dari Unit Human Capital Management.
8. Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang dan Jasa, diikuti oleh satu pegawai.
9. NEBOSH International General Certificate in Occupational Health & Safety, diikuti oleh dua staf dari Unit Chartering.
10. Pelatihan Behavioral Based Interview (BBI), diikuti oleh dua pegawai dari Unit Human Capital Management.
11. Pelatihan Human Resources, diikuti oleh satu pegawai dari Unit Human Capital Management.

#### BIAYA PENGEMBANGAN HUMAN CAPITAL

Selama tahun 2019, Perseroan mengalokasikan biaya pengembangan *human capital*, termasuk TI yang terkait kepegawaian sebesar Rp1.233.572.866.

The Skill Program is implemented through training, one of which is in the form of built in training to obtain certification or improve professional competence. A number of trainings that have been attended by DJAKARTA LLOYD staff during 2019 include:

1. Soft Skill Secretary Training, participated in by two staff of the Corporate Secretary Unit.
2. ISM Code Internal Audit Training, participated in by one staff of the Chartering Unit.
3. Leadership Endurance Test Training, participated in by 16 employees from various units.
4. Public Executive Training, conducted three times.
5. Reliable SOE Public Relations Training, participated in by one employee from the Corporate Secretary Unit.
6. Mental Guidance Training and Discipline, participated in by 22 employees.
7. Big Data Training, participated in by one staff of the Human Capital Management Unit.
8. Professional Certification of Goods and Services Procurement, participated in by one employee.
9. NEBOSH International General Certificate in Occupational Health & Safety, participated in by two staff of the Chartering Unit.
10. Behavioral Based Interview (BBI) Training, participated in by two employees of the Human Capital Management Unit.
11. Human Resources Training, participated in by one employee of the Human Capital Management Unit.

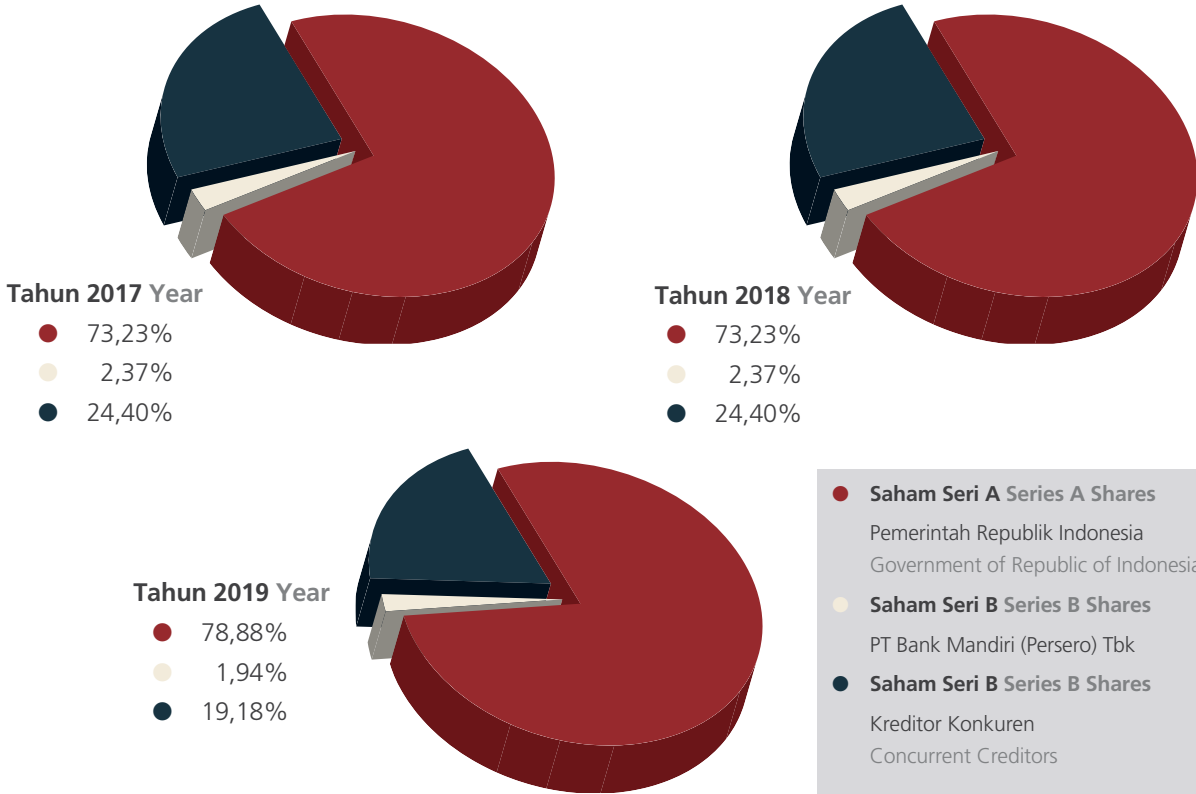
#### COST OF HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

During 2019, the Company spent Rp1,233,572,866 for human capital development, including IT related to staffing.



## KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

### Shareholders Composition



#### MODAL SAHAM

#### CAPITAL SHARES

Pemegang Saham Shareholder	Lembar Saham Number of Shares	Nilai Nominal Per Lembar Nominal Value Per Share	Persentase Kepemilikan Ownership Percentage	Jumlah Nilai Saham Total Value of Shares
<b>Modal Dasar Authorized Capital</b>				
Saham Seri A Series A Shares	2.562.103	1.000.000	85,40%	2.562.103.000.000
Saham Seri B Series B Shares	437.897	1.000.000	14,60%	437.897.000.000
<b>Jumlah Total</b>	<b>3.000.000</b>		<b>100,00%</b>	<b>3.000.000.000.000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital</b>				
<b>Saham Seri A Series A Shares</b> Negara Republik Indonesia Indonesian Government	1.577.147	1.000.000	78,88%	1.577.147.000.000
<b>Saham Seri B Series B Shares</b> PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	38.779	1.000.000	1,94%	38.779.000.000
Kreditor Konkuren Concurrent Creditors	383.547	1.000.000	19,18%	383.546.669.450
<b>Jumlah Total</b>	<b>1.999.473</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.999.472.669.450</b>

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-193-MBU/03/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang telah diaktakan melalui Akta Nomor 220 Notaris Netty Maria Machdar, S.H. tanggal 23 Maret 2017, terdapat sejumlah perubahan berikut:

1. Perubahan jenis saham modal dasar perusahaan semula tanpa seri menjadi saham seri A dan saham seri B, yakni:
  - a. Saham seri A adalah saham biasa yang mempunyai hak-hak mengeluarkan suara untuk pengambilan keputusan dalam RUPS.
  - b. Saham seri B adalah saham yang berasal dari konversi utang dan diambil bagian oleh kreditor konkuren. Saham ini tanpa hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak berhak atas dividen, dan dapat ditarik kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2015 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 6/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.
  - c. Perubahan komposisi jenis saham pada modal dasar Perusahaan sebesar Rp722.000.000.000 terdiri atas:
    - Saham seri A sebanyak 284.103 lembar saham masing-masing dengan nominal Rp1.000.000.
    - Saham seri B sebanyak 437.897 lembar saham masing-masing dengan nominal Rp1.000.000.
  - d. Menyetujui penempatan saham seri A sebanyak 180.640 lembar saham.
  - e. Menyetujui penempatan saham seri B sebanyak 38.779 lembar saham yang diambil bagian oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku kreditor konkuren pada Perusahaan.
2. Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-338-MBU/06/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang telah diaktakan melalui Akta Nomor 13 Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. tanggal 15 Juni 2017, terdapat hal-hal berikut:
  - a. Peningkatan modal dasar Perusahaan yang semula sebesar 722.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 menjadi sebesar

Based on the Minister of State-Owned Enterprises Letter Number S-193-MBU/03/2017 dated March 22, 2017 which has been notarized in the Deed Number 220 by Notary Netty Maria Machdar, S.H. on March 23, 2017, there were several changes as follows:

1. A change in types of the shares of the Company's initial authorized capital from without series to Series A and Series B with description as follows:
  - a. Series A shares are ordinary shares which have the rights to vote in decision making at the General Meeting of Shareholders (GMS).
  - b. Series B shares are shares originating from debt conversions and are taken part by concurrent creditors. These shares have no voting rights at the GMS, are not entitled to dividends, and can be withdrawn based on Government Regulation Number 126 Year 2015 and Central Jakarta Commercial Court Decision through Ratification of Peace Agreement (Homologation) Number 6/Pdt. Sus/PKPU/ 2013/PN.NIAGA.JKT.
  - c. A change in the composition of shares of the Company's authorized capital amounting to Rp722,000,000,000 consisting of:
    - Series A shares totaling 284,103 shares each with a nominal value of Rp1,000,000.
    - Series B shares totaling 437,897 shares each with a nominal value of Rp1,000,000.
  - d. Approved the placement of Series A shares totaling 180,640 shares.
  - e. Approved the placement of Series B shares totaling 38,779 shares to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk as a concurrent creditor of the Company.
2. Based on the Minister of State-Owned Enterprises Letter Number S-338-MBU/06/2017 dated June 6, 2017 which has been notarized in the Deed Number 13 by Notary Lenny Janis Ishak, S.H. on June 15, 2017, there are the following matters:
  - a. The Company's initial authorized capital of 722,000 shares with a nominal value of Rp1,000,000 increased to 3,000,000

## KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

### Shareholders Composition

3.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000; terdiri atas 2.562.103 saham seri A dan 437.897 saham seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham.

shares with a nominal value of Rp1,000,000; consisting of 2,562,103 Series A shares and 437,897 Series B shares with a nominal value of Rp1,000,000 per share.

b. Penempatan saham seri A sebanyak 1.017.188 lembar saham atau sebesar Rp1.017.188.000.000 yang berasal dari Penyertaan Modal Negara. Selisih sebesar Rp771.346 menjadi cadangan umum.

b. Placement of Series A shares totaling 1,017,188 shares or a total of Rp1,017,188,000,000 originating from the State Capital Participation. The difference of Rp777,346 becomes the general reserve.

3. Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-571-MBU/06/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang telah diaktakan melalui Akta Nomor 01 Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. tanggal 1 November 2017 mengenai penempatan saham seri B sebesar 399.056 lembar saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh kreditor konkuren Perusahaan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.JKT.

3. Based on the Minister of State-Owned Enterprises Letter Number S-571-MBU/06/2017 dated October 2, 2017, notarized in the Deed Number 01 by Notary Lenny Janis Ishak, S.H. on November 1, 2017 concerning the placement of Series B shares amounting to 399,056 shares, with a nominal value of Rp1,000,000 per share, entirely taken by the Company's concurrent creditors based on the Ratification of Peace Agreement (Homologation) Number 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.JKT.

4. Terdapat pembayaran terhadap PKPU sehingga Modal Ditempatkan dan Disetorkan Penuh pada saham seri B berkurang menjadi Rp422,326 miliar.

4. There was a payment to PKPU so that the Issued and Fully Paid Capital in Series B shares was reduced to Rp422,326 billion.

5. Berdasarkan Surat Menteri BUMN Nomor S-84/MBU/02/2018 tanggal 5 Februari 2018 yang telah diaktakan melalui Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 01 tanggal 1 Maret 2018 mengenai penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perseroan sebesar 379.319 lembar saham, masing-masing dengan nominal sebesar Rp1.000.000.

5. Based on the Minister of SOEs Letter Number S-84/MBU/02/2018 dated February 5, 2018, notarized in the Deed of Notary Lenny Janis Ishak, S.H. Number 01 on March 1, 2018 concerning the addition of the Republic of Indonesia capital investment into the Company's stock capital of 379,319 shares, each with a nominal value of Rp1,000,000.

Saham senilai Rp379.319.000.000 terdiri atas Rp379.318.092.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 melalui konversi piutang negara berupa *subsidiary loan agreement* (SLA) pada Perusahaan Perseroan PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero), Pinjaman Nomor SLA-1264/Eks-SLA-725/DSMI/2016 tanggal 29 Juni 2016; dan Rp908.000 berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero). Perubahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017.

The shares valued at Rp379,319,000,000 consisted of Rp379,318,092,000 coming from the 2017 State Budget through the conversion of state receivables in the form of a subsidiary loan agreement (SLA) in the Company of PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero), Loan Number SLA -1264/Ex-SLA-725 /DSMI/2016 dated 29 June 2016; and Rp908,000 coming from the partial capitalization of PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) reserves. This change was made based on Government Regulation Number 62 of 2017 dated December 29, 2017.

### KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KOMISARIS DAN DIREKSI

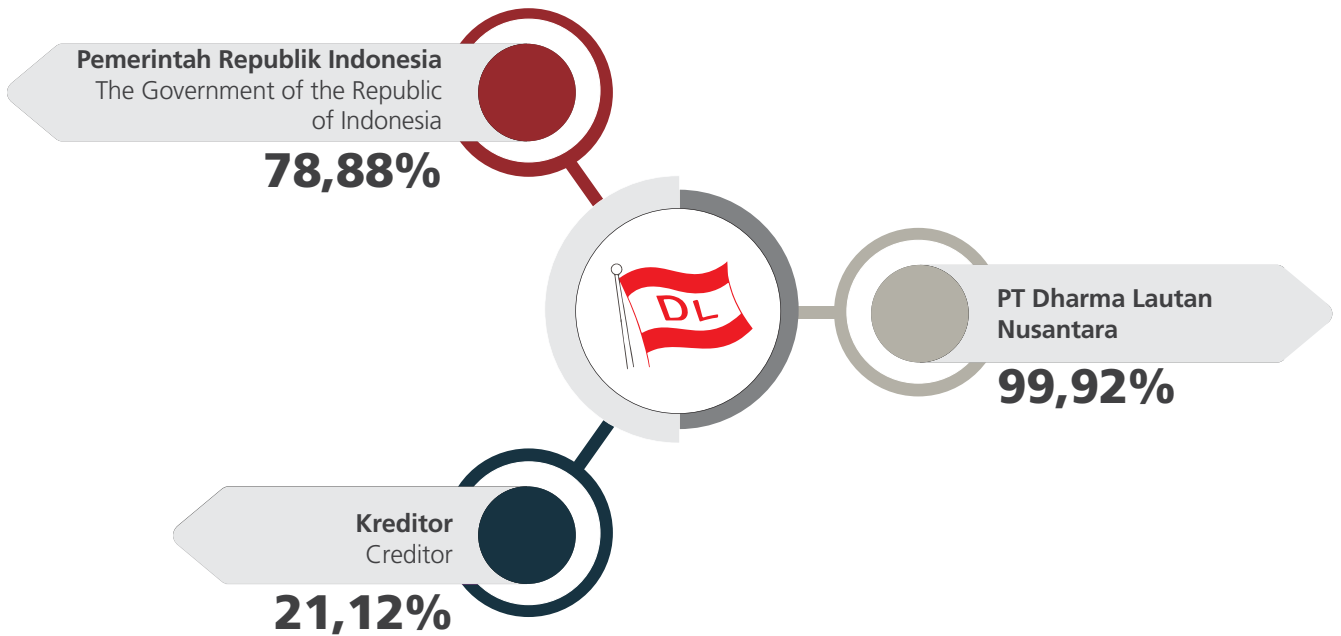
Tidak ada anggota Komisaris dan Direksi yang memiliki saham di Perusahaan.

### SHARE OWNERSHIP BY COMMISSIONERS AND DIRECTORS

There are no Commissioners and Directors who own shares in the Company.

## STRUKTUR PERUSAHAAN

Corporate Structure



## ENTITAS ANAK

Subsidiary



### PT DHARMA LAUTAN NUSANTARA

PT Dharma Lautan Nusantara melengkapi kompetensi bisnis Perseroan dengan menggeluti bisnis jasa bongkar muat. Anak perusahaan yang didirikan pada 1 April 1986 ini bertujuan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) IV Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi; Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor KM.88/AL.305/Phb.85 tentang Perusahaan Bongkar Muat; serta Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor S-333/MK.011/1986 tanggal 31 Maret 1986 tentang Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat.

Anggaran Dasar PT Dharma Lautan Nusantara telah mengalami beberapa kali perubahan. Pertama, berdasarkan Akta Notaris Soelaiman Arjasasmita, S.H. Nomor 57 pada tanggal 31 Maret 1986, kemudian diperbarui dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 27 tanggal 8 Juni 1998 sesuai Edaran Menteri Keuangan RI Nomor SE.398/MK/16/1997 tanggal 10 Oktober 1997 sebagai realisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

### PT DHARMA LAUTAN NUSANTARA

PT Dharma Lautan Nusantara complements the Company's business competencies by providing the stevedoring services. The subsidiary, which was established on April 1, 1986, aims to follow up the Presidential Instruction (Inpres) IV of 1985 concerning the Policy of Smooth Flow of Goods to Support Economic Activities; the Minister of Transportation RI Decree Number KM.88/AL.305/Phb.85 concerning stevedoring companies; and the Minister of Finance RI Decree Number S-333/MK.011/1986 dated March 31, 1986 concerning Business License for Stevedoring Services Companies.

The Articles of Association of PT Dharma Lautan Nusantara has been amended several times. First, based on the Deed of Notary Soelaiman Arjasasmita, S.H. Number 57 dated March 31, 1986, then updated with Notarial Deed of Imas Fatimah, S.H. Number 27 dated June 8, 1998 in accordance with the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Circular Number SE.398/MK/16/1997 dated October 10, 1997 as the realization of Law Number 1 of 1995 concerning Limited Liability Companies.

PT Djakarta Lloyd (Persero)



Anggaran Dasar yang berlaku saat ini berdasarkan Akta Notaris Rosita Rianauli Sianipar, S.H., M.Kn. Nomor 2 tanggal 10 Agustus 2009, yang telah disesuaikan dengan Akta sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-54550.AH.01.02 Tahun 2008. Adapun modal sebanyak Rp6.015.000.000 telah ditempatkan dan disetor penuh kepada PT Dharma Lautan Nusantara.

Selama lebih dari 30 tahun menjadi partner kerja Perseroan, PT Dharma Lautan Nusantara selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan dengan dukungan tenaga kerja yang terampil dan telah bersertifikasi. Cakupan layanannya meliputi bidang-bidang sebagai berikut.

- *Stevedoring*: Kegiatan bongkar muat barang dari dan ke sisi kapal ataupun menuju tempat penyimpanan sementara sebelum disimpan di gudang/lapangan, dan sebaliknya.
- *Cargodoring*: Kegiatan memindahkan barang dari sisi kapal ke gudang/lapangan, ataupun langsung dimuat di atas truk, dan sebaliknya.
- *Receiving* atau *Delivery*: Kegiatan menerima atau menyerahkan barang dari pemilik barang ke gudang/lapangan untuk kemudian dimuat di kapal, dan sebaliknya.
- *Jasa Lainnya*: Melayani pengoperasian depo atau warehouse, penyewaan alat bongkar muat mekanik dan non-mekanik, jasa supervisi, *tally*, *trucking*, dan *cleaning*.

Sejauh ini, PT Dharma Lautan Nusantara memiliki beragam pengalaman proyek bongkar muat, baik dengan BUMN maupun swasta. Beberapa di antaranya adalah bongkar muat suplai batu bara PLTU PT PLN (Persero) di seluruh Indonesia, bongkar muat tank dan panser di Pelabuhan Tanjung Priok, bongkar muat beras Perum BULOG, bongkar muat mata bor proyek MRT Jakarta, serta bongkar muat pupuk PT Pupuk Indonesia di Jakarta, Surabaya, dan Benoa.

The current Articles of Association are based on the Deed of Notary Rosita Rianauli Sianipar, S.H., M.Kn. Number 2 dated August 10, 2009, which has been adjusted to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Decree Number AHU-54550.AH.01.02 Year 2008. As much as Rp6,015,000,000 in capital has been placed and fully paid to PT Dharma Lautan Nusantara.

During more than 30 years as a partner of the Company, PT Dharma Lautan Nusantara has always prioritizes safety and security with the support of a skilled and certified workforce. The scope of its services includes the following fields.

- *Stevedoring*: The activities of loading and unloading of goods from and to the side of ship or to temporary storage area before being stored in a warehouse/field, and vice versa.
- *Cargodoring*: The activities of moving goods from the side of ship to the warehouse/field, or directly loaded into the truck, and vice versa.
- *Receiving* or *Delivery*: The activities of receiving or delivering goods from the owners to the warehouse/field for later loading on the ship, and vice versa.
- *Other Services*: Serving depot or warehouse operations, rental of mechanical and non-mechanical stevedoring equipment, supervision services, *tally*, *trucking*, and *cleaning*.

So far, PT Dharma Lautan Nusantara has various experiences in stevedoring projects, both serving SOEs and the private sector. Some of them are projects of coal supply at power plants of PT PLN (Persero) throughout Indonesia, tanks and armored vehicles at the Port of Tanjung Priok, rice belonging to BULOG, drill bits for the Jakarta MRT project, and fertilizer for PT Pupuk Indonesia in Jakarta, Surabaya and Benoa.

## ENTITAS ANAK

### Subsidiary

#### Kinerja Keuangan PT Dharma Lautan Nusantara (dalam ribuan rupiah)

#### Financial Performance of PT Dharma Lautan Nusantara (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	2017
Jumlah Aset Total Assets	27.848.169.063	28.534.231.043	24.388.606.157
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	14.463.355.499	17.828.856.108	15.414.083.697
Jumlah Ekuitas Total Equity	13.384.813.563	10.705.374.935	1.768.741.905
Pendapatan Usaha Operating Revenues	27.343.200.245	39.471.347.828	41.169.391.949
<b>Laba Bersih Net Profit</b>	<b>2.677.324.643</b>	<b>3.578.640.260</b>	<b>1.913.263.859</b>

#### PT DAYA LAUT UTAMA

Bergerak di bidang jasa perbaikan kapal, PT Daya Laut Utama mulai beroperasi komersial pada tahun 1997 berdasarkan Akta Pendirian Notaris Ny. Irnas Fatimah, S.H. Nomor 23 tanggal 18 Mei 1977. Akta tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dalam Surat Keputusan Nomor Y.A 5/348/22, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12 tanggal 8 Februari 1979.

Anggaran Dasar PT Daya Laut Utama telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang berlaku terakhir adalah berdasarkan Akta Notaris Ny. Rosita Rianauli Sianipar, S.H., M.Kn. Nomor 14 tanggal 10 April 2008 yang sudah disetujui dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Adapun modal sebesar Rp1.000.000.000 telah ditempatkan dan disetor penuh kepada PT Daya Laut Utama.

PT Daya Laut Utama mengalami beku operasi pada 2017. Para pemegang saham menyepakati untuk melikuidasi entitas ini pada 22 September 2017 melalui Surat Menteri BUMN Nomor S-533/MBU/09/2017. Proses likuidasi telah selesai per 31 Desember 2019, sehingga seluruh piutang ke Perseroan diakui dalam Laba (Rugi) Perusahaan.

#### PT DAYA LAUT UTAMA

Engaged in ship repair services, PT Daya Laut Utama began commercial operations in 1997 based on Establishment Deed of Notary Ny. Irnas Fatimah, S.H. Number 23 dated May 18, 1977. The deed was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decree Number Y.A 5/348/22, and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 12 on February 8, 1979.

PT Daya Laut Utama's Articles of Association have been amended several times and the latest ones are based on Notarial Deed of Ny. Rosita Rianauli Sianipar, S.H., M.Kn. Number 14 dated April 10, 2008 which was approved and ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The capital of Rp1,000,000,000 has been issued and fully paid to PT Daya Laut Utama.

PT Daya Laut Utama experienced freezing operations in 2017. The shareholders agreed to liquidate this entity on September 22, 2017 through the Minister of SOEs Letter Number S-533/MBU/09/2017. The liquidation process has been completed as of December 31, 2019, so that all receivables from the Company are recognized in the Company's Profit (Loss).

## KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM & PENERBITAN EFEK LAIN

### Chronology of Stock Listing and Issuance of Other Securities

Informasi mengenai kronologi pencatatan saham dan penerbitan efek lain tidak tersedia karena DJAKARTA LLOYD belum mencatatkan sahamnya di bursa efek mana pun, serta belum pernah menerbitkan obligasi.

Information regarding the chronology of listing the shares and issuing other securities is not available because DJAKARTA LLOYD has yet to list its shares on any stock exchanges, and has yet to issue bonds either.

## LEMBAGA PROFESI PENUNJANG

### Supporting Professional Institutions

#### NOTARIS

##### Kantor Notaris Lenny Janis Ishak, S.H.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-527.HT.03.02-Th.2001 tanggal 23 November 2001

##### Alamat Perusahaan:

Jl. Hang Lekir IX No. 1, Jakarta Selatan 12120  
T. (62-21) 7221077 / 7230749  
F. (62-21) 7233855

#### NOTARY

##### Notary Office of Lenny Janis Ishak, S.H.

The Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Decree Number C-527.HT.03.02-Th.2001 dated 23 November 2001.

##### Address:

Jl. Hang Lekir IX No. 1, South Jakarta 12120  
T. (62-21) 7221077 / 7230749  
F. (62-21) 7233855

#### KANTOR AKUNTAN PUBLIK

##### KAP Heliantono & Rekan (Parker Randall International)

NIU-KAP: KEP-093/KM.6/2001 tanggal 3 Mei 2001

##### Alamat Perusahaan:

Aminta Plaza 7th Floor Suite #704  
Jl. TB Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan 12310  
T. (62-21) 7661348 / 7661349 / 7661350  
F. (62-21) 7661351  
W. [www.heliantonorekan.com](http://www.heliantonorekan.com)  
E. [info@heliantonorekan.com](mailto:info@heliantonorekan.com)

#### PUBLIC ACCOUNTANT FIRM

##### KAP Heliantono & Rekan (Parker Randall International)

NIU-KAP: KEP-093/KM.6/2001 dated May 3, 2001

##### Address:

Aminta Plaza 7th Floor Suite #704  
Jl. TB Simatupang Kav. 10, South Jakarta 12310  
T. (62-21) 7661348 / 7661349 / 7661350  
F. (62-21) 7661351  
W. [www.heliantonorekan.com](http://www.heliantonorekan.com)  
E. [info@heliantonorekan.com](mailto:info@heliantonorekan.com)

## PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

### Awards and Certifications

#### PENGHARGAAN

#### AWARDS

No.	Nama Penghargaan Name of Award	Penyelenggara Organizer	Waktu & Tempat Date and Venue
1.	Indonesia State-Owned Enterprise with Predicate Excellent in Financial Performance Throughout 2018	Infobank The Best State-Owned Enterprises (SOE) Awards 2019	25 Oktober 2019 di Jakarta October 25, 2019 in Jakarta
	Indonesia State-Owned Enterprise with Predicate Excellent in Financial Performance Throughout 2018		
2.	The Best CEO of State-Owned Enterprise – Well Management in Crisis 2019 untuk Suyoto selaku Direktur Utama DJAKARTA LLOYD	Infobank The Best State-Owned Enterprises (SOE) Awards 2019	
	The Best CEO of State-Owned Enterprise – Well Management in Crisis 2019 for Suyoto as President Director of DJAKARTA LLOYD		
3.	Program BHUN Terbaik I First Best BHUN Program	BUMN Hadir untuk Negeri (BHUN) Awards 2018	6 Oktober 2019 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur
4.	Dokumentasi Program BHUN Terbaik I First Best Documentation of BHUN Program	SOEs Present for the Nation (BHUN) Awards 2018	October 6, 2019 in Labuan Bajo, East Nusa Tenggara
5.	Karyawan Inspiratif BUMN untuk Elsi Roslaeli selaku Staf Operasional DJAKARTA LLOYD Cabang Semarang	Kementerian BUMN Ministry of SOEs	7 April 2019 di Semarang April 7, 2019 in Semarang
	Inspirational Employee of SOEs for Elsi Roslaeli as Operational Staff of DJAKARTA LLOYD Semarang Branch		





**SERTIFIKASI**

Perusahaan telah melaksanakan inspeksi tahunan pada 10 Oktober 2019 untuk memperoleh Sertifikat Integrated ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan OHSAS 18001:2007 yang diterbitkan oleh PT Bureau Veritas Indonesia. Selain itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga telah mengeluarkan Sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal (Document of Compliance/DOC) untuk DJAKARTA LLOYD pada 29 Agustus 2019 yang mengacu pada Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 dan International Safety Management (ISM Code). Berikut sertifikasi-sertifikasi yang telah dimiliki Perseroan.

- **ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines**

Sertifikasi ini menekankan tujuan manajemen risiko, yaitu menciptakan dan melindungi nilai yang diwujudkan dengan meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Manajemen risiko adalah bagian dari tata kelola dan harus terintegrasi di dalam

**CERTIFICATIONS**

The Company has conducted an annual inspection on October 10, 2019 to obtain an Integrated Certificate of ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, and OHSAS 18001:2007 issued by PT Bureau Veritas Indonesia. In addition, the Directorate General of Sea Transportation has also issued a Certificate of Compliance (DOC) for DJAKARTA LLOYD on August 29, 2019 which refers to the 1974 Safety of Life at Sea (SOLAS) and International Safety Management (ISM Code). Following are the certifications that the Company earned.

- **ISO 31000:2018 Risk Management – Guidelines**

This certification emphasizes the objectives of risk management, namely creating and protecting the value that is realized by enhancing the performance, encouraging the innovation, and supporting the achievement of goals. Risk management is part of good



## PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

### Awards and Certifications

proses organisasi. Penerapan manajemen risiko memerlukan kepemimpinan dan komitmen dari manajemen puncak, serta keterlibatan aktif dari semua anggota organisasi.

corporate governance and must be integrated in organizational processes. The implementation of risk management requires leadership and commitment from top management, as well as the active involvement of all organization's members.

- **ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu**

Sertifikasi ini merupakan standar internasional di bidang sistem manajemen mutu. Perseroan telah mendapatkan akreditasi dari pihak independen yang menilai seluruh proses kerja agar kualitas sistem manajemen mutu dapat memenuhi persyaratan internasional.

- **ISO 9001:2015 Quality Management System**

This certification is an international standard of quality management system. The Company has obtained the accreditation from an independent party who had evaluated the entire work process to make sure the quality management system meet the international requirements.

- **ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan**

Sertifikasi ini menandakan bahwa Perusahaan telah merencanakan dan menerapkan pengendalian terhadap aspek-aspek lingkungan pada seluruh aktivitas organisasi yang berpotensi merugikan lingkungan. Organisasi juga harus memahami semua peraturan dan perundang-undangan lingkungan yang terkait dengan aktivitas-aktivitasnya, serta berupaya untuk memenuhi peraturan dan perundang-undangan tersebut.

- **ISO 14001:2015 Environmental Management System**

This certification signifies that the Company has planned and implemented controls on environmental aspects in all organizational activities that have the potential to harm the environment. The organization must also understand all environmental regulations and legislation related to its activities, and comply with these laws and regulations.

- **OHSAS 18001:2007 Sistem Penilaian Kesehatan dan Keselamatan Kerja**

Sertifikasi ini menunjukkan pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja yang berstandar internasional. Implementasi dari sertifikasi ini akan meningkatkan citra perusahaan, membuka akses pasar yang lebih luas, serta mendorong perusahaan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Sistem OHSAS 18001 juga dirancang selaras dengan standar mutu dan lingkungan dalam perusahaan (ISO 9001 dan ISO 14001).

- **OHSAS 18001:2007 Occupational Health and Safety Assessment System**

This certification shows that the management of occupational health and safety has met the international standards. The certification improves the Company's image, opens the market access wider, and encourages the Company to comply with legislation related to occupational health and safety. The OHSAS 18001 system is also designed in harmony with the Company's quality and environmental standards (ISO 9001 and ISO 14001).



## ALAMAT KANTOR CABANG DAN ENTITAS ANAK

### Addresses of Branch Offices and Subsidiary

#### KANTOR CABANG

##### BRANCH OFFICES

##### Tanjung Priok

Jl. Swasembada Timur XI No. 48,  
Kebon Bawang, Tanjung Priok,  
Jakarta 14320

T. (62-21) 4301053

F. (62-21) 4374635

E. dlpriok@jakartalloyd.co.id

##### Surabaya

Jl. Cendrawasih No. 28,  
Surabaya, Jawa Timur 60175

T. (62-31) 3570772

F. (62-31) 3570772

E. surabaya@jakartalloyd.co.id

##### Sibolga

Jl. M.H. Thamrin No.16, Medan,  
Sumatera Utara 20232

T. (62-631) 26218

F. (62-631) 26218

E. sibolga@jakartalloyd.co.id

##### Lampung

Jl. Selat Malaka II No.22, Panjang  
Selatan, Lampung 35243

T. (62-721) 341753

E. lampung@jakartalloyd.co.id

##### Semarang

Jl. Mpu Tantular No. 23,  
Semarang, Jawa Tengah 50129

T. (62-24) 3540864

F. (62-24) 3540701

E. semarang@jakartalloyd.co.id

##### Benoa/Bali

Jl. Raya Pelabuhan Benoa,  
Denpasar, Bali 80222

T. (62-361) 727374

F. (62-361) 723621

E. benoa@jakartalloyd.co.id

##### Banyuwangi

Jl. Raya Situbondo No.47,  
Pelabuhan Tanjung Wangi,  
Banyuwangi, Jawa Timur 68451

T. (62-333) 510464

F. (62-333) 510958

E. banyuwangi@jakartalloyd.  
co.id

##### Manado

Jl. Xaverius Dotulong No.145  
Bitung, Sulawesi Selatan 95515

T. (62-438) 34102, 33033

F. (62-438) 21378

E. bitung@jakartalloyd.co.id

##### Berau

2nd Floor Jl. Manggal II No. 8A,  
RT 35/RW 09, Berau, Kalimantan  
Timur 77311

T. (62) 82324281999, (62)  
8115370899

E. berau@jakartalloyd.co.id

##### Pangkalan Susu

Jl. Pangkalan Susu-Brandan No.  
434, Langkat, Sumatera Utara  
20858

E. pangkalansusu@ptdln.co.id

#### ENTITAS ANAK

##### SUBSIDIARY

##### PT Dharma Lautan Nusantara

Jl. Swasembada Timur XI No. 48,  
Kebon Bawang, Tanjung Priok,  
Jakarta 14320

T. (62-21) 4360800

F. (62-21) 4360801

E. info@ptdln.co.id

#### KANTOR CABANG ENTITAS ANAK

##### SUBSIDIARY'S BRANCH OFFICES

##### Pangkalan Susu

Jl. Pangkalan Susu-Brandan No.  
434, Langkat, Sumatera Utara  
20858

E. pangkalansusu@ptdln.co.id

##### Pekanbaru

Jl. Kuau No.3, RT 02 RW 01,  
Pekanbaru, Riau 28124

E. riau@ptdln.co.id

##### Banyuwangi

Ruko Bumi Ketapang Indah Blok  
A-1, Jl. Raya Situbondo-Tanjung  
Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur  
68241

T. (62-333) 510955/510466

F. (62-333) 510345

E. banyuwangi@ptdln.co.id

##### Nunukan

Jl. Liem Hie Djung RT 01,  
Nunukan Utara, Kalimantan  
Utara 77482

E. nunukan@ptdln.co.id

##### Berau

2nd Floor Jl. Mangga II RT 34  
RW 08 No. 8A, Tanjung Redeb,  
Berau 77311

E. berau@ptdln.co.id

##### Makassar

Jl. Korban 40.000 Jiwa No.124,  
Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan  
90217

E. makassar@ptdln.co.id

## INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

### Information on the Company Website

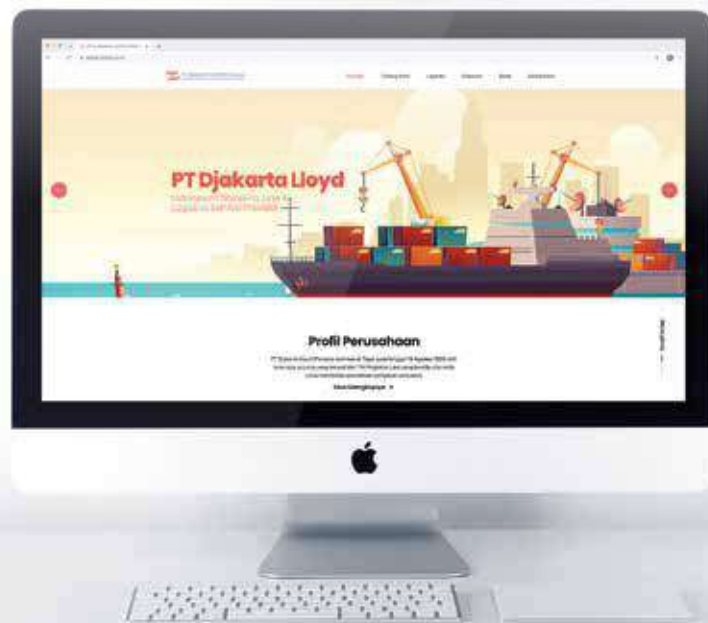
Berikut informasi mengenai Perusahaan yang dapat diakses melalui situs [www.djakartalloyd.co.id](http://www.djakartalloyd.co.id) dan diperbarui secara berkala.

- Informasi umum tentang DJAKARTA LLOYD meliputi profil perusahaan; profil Komisaris, Direksi, dan pejabat *Vice President*; visi dan misi; struktur organisasi; nilai-nilai perusahaan; serta daftar kontak.
- Informasi tentang kegiatan usaha Perusahaan meliputi pelayaran, logistik, keagenan kapal, dan bongkar muat.
- Publikasi berita perkembangan bisnis dan kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan; siaran pers; pengumuman penting; serta undangan pengadaan barang dan jasa.
- Alur permohonan informasi terkait layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
- Informasi tentang *Good Corporate Governance* (GCG) antara lain terkait penerapan prinsip-prinsip GCG, penilaian penerapan GCG, dan pedoman sistem pelaporan pelanggaran.
- Laporan tahunan dan ikhtisar keuangan.

The following are the Company's information that can be accessed through the website [www.djakartalloyd.co.id](http://www.djakartalloyd.co.id) and updated regularly.

- General information about DJAKARTA LLOYD, covering the company profile; profiles of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Vice President; vision and mission; organizational structure; company value; and contact directory.
- Information about the Company's business activities which includes shipping, ship agency, logistics, and stevedoring.
- Publication of corporate news related to business developments and corporate social responsibility activities; press releases; important announcements; and procurement invitations.
- The flow of information requests on the Public Information Disclosure (KIP) services.
- Information about Good Corporate Governance (GCG), including GCG implementation, GCG assessment, and whistleblowing system guidelines.
- Annual report and financial statement.

[www.djakartalloyd.co.id](http://www.djakartalloyd.co.id)



## PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### Competency Development

Sepanjang tahun 2019, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Sekretaris Perusahaan, dan Satuan Pengawas Internal telah mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi berupa pelatihan, lokakarya, konferensi, dan seminar.

Throughout 2019, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, the Corporate Secretary, and the Internal Audit Unit participated in various competency development program in the form of trainings, workshops, conferences, and seminars.

### PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

### BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT

Nama Name	Jabatan Position	Waktu dan Tempat Time and Venue	Nama Pelatihan/Workshop Name of Training/Workshop	Penyelenggara Organizer
Maryono M. Atmadja	Presiden Komisaris President Commissioner	Jakarta, 17 Januari 2019 January 17, 2019	Melanjutkan Konektivitas, Membuka Jalur Logistik dan Menekan Disparitas Harga Barang Expand the Connectivity, Open More Logistics Lines and Suppress Disparities in Goods Prices	Panitia Hari Pers Nasional Committee for National Press Day
Syahril Japarin	Komisaris Independen Independent Commissioner	Jakarta, 8 Mei 2019 May 8, 2019	Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN Performance Assessment and SOEs Talent Assessment	PPM Management
Anhar Adel	Presiden Komisaris President Commissioner	Jakarta, 29 Mei 2019 May 29, 2019	Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN Performance Assessment and SOEs Talent Assessment	PPM Management
Lambonar O. Silitonga	Komisaris Commissioner	Jakarta, 29 Mei 2019 May 29, 2019	Penilaian Kinerja dan Assessment Talenta BUMN Performance Assessment and SOEs Talent Assessment	PPM Management

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### Competency Development

#### PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

#### BOARD OF DIRECTORS COMPETENCY DEVELOPMENT

Nama Name	Jabatan Position	Waktu dan Tempat Time and Venue	Nama Pelatihan/Workshop Name of Training/Workshop	Penyelenggara Organizer
Suyoto	Direktur Utama President Director	Jakarta, 17 Januari 2019 January 17, 2019	Melanjutkan Konektivitas, Membuka Jalur Logistik dan Menekan Disparitas Harga Barang Expand the Connectivity, Open More Logistics Lines and Suppress Disparities in Goods Prices	Panitia Hari Pers Nasional Committee for National Press Day
		Jakarta, 1 Februari 2019 February 1, 2019	Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital The Press Strengthens Digital-Based People's Economy	Panitia Hari Pers Nasional Committee for National Press Day
		Bali, 21 Maret 2019 March 21, 2019	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi di BUMN Corporate Criminal Law Enforcement in SOEs	Indonesia Training Institute & Consulting Service
		Jakarta, 24 April 2019 April 24, 2019	Transformasi Budaya di Era VUCA & Revolusi Industri Cultural Transformation in the Era of VUCA & Industrial Revolution	QLM Training & Consultancy
		Jakarta, 19 Juni 2019 June 19, 2019	Konsep Pengembangan Integrated Port Network di Indonesia The Concept of Integrated Port Network Development in Indonesia	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI Coordinating Ministry for Maritime Affairs
		Bali, 23 Juni 2019 June 23, 2019	Coaltrans Conferences	Coaltrans Asia
		Jakarta, 29 Agustus 2019 August 29, 2019	Peran Djakarta Lloyd Dalam Industri Pelayaran dan Bisnis Transportasi Batu Bara The Role of Djakarta Lloyd in Shipping Industry and Coal Transportation Business	Forum Humas BUMN SOEs Public Relations Forum
		Jakarta, 19 September 2019 Jakarta, September 19, 2019	Konsultasi Publik dengan BUMN Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Public Consultation of SOEs on Formulation of Initial Draft of National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024	Kementerian PPN/ Bappenas Ministry/Agency of National Development Planning
		Jakarta, 23 September 2019 September 23, 2019	Tingkatkan Potensi Melalui Sinergi Increase the Potentials through Synergy	BUMN Marketeers





Analisis dan Pembahasan Manajemen  
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan  
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  
Corporate Social Responsibility

## PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### Competency Development

Nama Name	Jabatan Position	Waktu dan Tempat Time and Venue	Nama Pelatihan/Workshop Name of Training/Workshop	Penyelenggara Organizer
Suyoto	Direktur Utama President Director	Jakarta, 25 Oktober 2019 October 25, 2019	Focus Group Discussion Program Tol Laut Focus Group Discussion on Sea Toll Program	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation
		Jakarta, 1 November 2019 November 1, 2019	6th Annual Indonesian Advisory Committee	RINA RINA
		Jakarta, 19 November 2019 November 19, 2019	Dari Rugi Menjadi Untung, Dari Terpuruk Menjadi Bertumbuh From Loss to Profit, From Being Slumped to Growth	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Indonesian Banking Development Institute
		Jakarta, 2 Desember 2019 December 2, 2019	Focus Group Discussion Sinergi BP3AIP dengan Perusahaan Pelayaran Focus Group Discussion on BP3AIP Synergy with Shipping Companies	Kementerian Perhubungan Ministry of Transportation
		Jakarta, 3 Desember 2019 December 3, 2019	Lloyd's Register Digital	LR Digital
		Jakarta, 6 Desember 2019 December 6, 2019	Forum Group Discussion	Kementerian BUMN RI Ministry of SOEs
		Jakarta, 12 Desember 2019 December 12, 2019	Menilik Tantangan Bisnis Kapal Kargo Analyze the Challenges of Cargo Ship Business	CNBC Indonesia
Ofan Sofwan	Direktur Finance, HCM & GA Director of Finance, HCM & GA	Bali, 21-22 Maret 2019 March 21-22, 2019	Penegakan Hukum Korporasi BUMN Corporate Criminal Law Enforcement in SOEs	Intrinsic
		Jakarta, 24-25 April 2019 April 24-25, 2019	Transformasi Budaya di era VUCA Cultural Transformation in the VUCA Era	QLM Training & Consultancy
		Jakarta, 6 Mei 2019 May 6, 2019	Seminar Penguatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat BUMN Seminar on Strengthening of the SOEs' Certified Student Internship Program	FHCI
		Bangkok, 13-16 Agustus 2019 August 13-16, 2019	Leader Briefing Toward World Class Company	LMB FEBUI

**PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN**

**CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT**

<b>Nama Name</b>	<b>Jabatan Position</b>	<b>Waktu dan Tempat Time and Venue</b>	<b>Nama Pelatihan/Workshop Name of Training/Workshop</b>	<b>Penyelenggara Organizer</b>
Setia Budiman	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Jakarta, 15-16 Januari 2019 January 15-16, 2019	Pelatihan Leadership Endurance Test (LET) Leadership Endurance Test (LET) Training	PT Dirga Cahaya Abadi
		Jakarta, 21 Januari 2019 January 21, 2019	Assessment Test	PPM Management
		Bali, 21 Maret 2019 March 21, 2019	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korporasi di BUMN Corporate Criminal Law Enforcement in SOEs	Indonesia Training Institute & Consulting Service
		Jakarta, 24 April 2019 April 24, 2019	Transformasi Budaya di Era VUCA & Revolusi Industri Cultural Transformation in the Era of VUCA & Industrial Revolution	QLM Training & Consultancy
		Jakarta, 24 April 2019 April 24, 2019	QLM Training & Konsultasi QLM Training & Consultancy	QLM Training & Consultancy
Arika W. A.	Manager	Jakarta, 15-16 Januari 2019 January 15-16, 2019	Pelatihan Leadership Endurance Test (LET) Leadership Endurance Test (LET) Training	PT Dirga Cahaya Abadi
		Jakarta, 21 Januari 2019 January 21, 2019	Assessment Test	PPM Management
		Bali, 21 Maret 2019 March 21, 2019	Penegakan Hukum Korporasi di BUMN Corporate Law Enforcement in SOEs	Indonesia Training Institute & Consulting Service





mar.

feb.

jan.

dec.

nov.

sep.

aug.

470

360

410

400

280

# ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

## Management Discussion and Analysis

Seiring gencarnya pengembangan bisnis melalui diversifikasi, pendapatan segmen Tol Laut dan Jasa Pemanduan meningkat signifikan dengan pertumbuhan *triple-digit*, masing-masing sebesar 250,16% dan 140,34%.

As business development continues through diversification, the revenue of Sea Toll and Harbor Tug segments has increased significantly with triple-digit growth, respectively by 250.16% and 140.34%.



# TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

## Economic and Industrial Review

### TINJAUAN EKONOMI MAKRO

Sepanjang tahun 2019, laju ekonomi global mengalami perlambatan hingga 2,6 persen diikuti penurunan volume perdagangan dan harga komoditas sebagai dampak eskalasi konflik perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Ketidakpastian ini sempat mendorong penyusutan aliran modal asing ke negara-negara berkembang pada tiga kuartal pertama 2019, sebelum akhirnya kembali meningkat setelah dikeluarkan berbagai negara mengeluarkan sejumlah kebijakan stimulus fiskal dan moneter, termasuk di antaranya penurunan suku bunga The Fed.

Indonesia mampu menjaga resiliensi perekonomian nasional dengan pertumbuhan moderat 5,02 persen, walaupun menurun dari capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen dan tidak memenuhi target asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,3 persen. Kinerja tersebut ditopang oleh penguatan permintaan domestik, optimalisasi perdagangan antardaerah, dan sinergi di antara regulator dalam mengendalikan inflasi pangan. Alhasil, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2019 terkendali di angka 2,72 persen atau menurun dibandingkan capaian 2018 sebesar 3,13 persen, yang sekaligus menunjukkan konsistensi tingkat inflasi IHK di kisaran sasaran 3,5±1 persen dalam empat tahun terakhir.

Di tengah pelemahan beberapa mata uang negara berkembang, nilai tukar rupiah per dolar Amerika Serikat berada di level penutupan Rp13.901 pada akhir 2019, dengan penguatan 0,76 persen secara rerata dan 3,58 persen secara *point-to-point*. Stabilitas ini didukung struktur pasar valas yang semakin dalam dan efisien, salah satunya peningkatan pasar *domestic non-deliverable forward* (DNDF) yang kerap memengaruhi pembentukan harga secara psikologis di pasar spot.

Untuk memperbesar porsi pendapatan negara melalui penerimaan pajak, pemerintah berupaya meringankan beban wajib pajak dengan merilis sejumlah insentif perpajakan, di antaranya insentif fiskal, insentif *super deduction*, percepatan restitusi pajak, dan fasilitas bebas pajak pertambahan nilai bagi industri jasa yang melakukan kegiatan ekspor.

### MACROECONOMIC OUTLOOK

In 2019, the global economy experienced a slowdown with the growth only 2.6 percent followed by a plunge in trade volume and commodity prices as a result of the trade wars escalation between the United States and China. This created uncertainty leading to hampering of the foreign capital flows to emerging countries in the first three quarters of 2019, before eventually increased again after several countries issued several fiscal and monetary stimulus policies, including the Fed's interest rates reduction.

Indonesia was able to maintain national economic resilience with moderate growth of 5.02 percent, although it decreased slightly from 2018 achievement of 5.17 percent and did not meet the macroeconomic assumption target set in the State Budget (APBN) at 5.3 percent. The growth was supported by strengthening domestic demand, optimization of inter-regional trade, and synergy between regulators in controlling food inflation. As a result, the Consumer Price Index (CPI) inflation in 2019 was controlled at 2.72 percent or decreased compared to 2018 figure of 3.13 percent, which also shows the consistency of the CPI inflation rate in the target range of 3.5±1 percent in the last four years.

In the midst of weakening currencies of some emerging countries, the exchange rate of Rupiah against US dollar was at the closing level of Rp13,901 at the end of 2019, an appreciation of 0.76 percent on average and 3.58 percent on point-to-point basis. This performance thanks to the support of efficient foreign exchange market structure, one of which was an increase in the domestic non-deliverable forward (DNDF) market that often influences the psychological price formation on the spot market.

To increase the state revenue from taxes, the government issued several policies relating to tax incentives called fiscal incentive, super deduction, acceleration of tax restitution, and value-added tax-free facility for export-oriented service industries.

### Data Ekonomi Makro Indonesia Indonesian Macroeconomic Data

Indikator Indicator	2017	2018	2019
Produk Domestik Bruto (% perubahan tahunan) Gross Domestic Product (% annual growth)	5,07	5,17	5,02
Inflasi (% perubahan tahunan) Inflation (% annual growth)	3,61	3,13	2,72
Utang Pemerintah (% dari PDB) Government Debt (% of GDP)	28,5	31,5	30,2
Ekspor (dalam miliar USD) Export (in billion USD)	168,88	180,73	167,53
Impor (dalam miliar USD) Import (in billion USD)	150,07	181,16	170,72
Nilai Tukar (IDR/USD) Exchange Rate (IDR/USD)	13.616	14.481	13.901
Neraca Transaksi Berjalan (% dari PDB) Current Account (% of GDP)	(1,7)	(2,94)	(2,72)
Suku Bunga Acuan (%) Reference Interest Rate (%)	4,25	6,00	5,00
Penduduk (dalam juta jiwa) Population (in million people)	261,9	265,0	268,1
Tingkat Kemiskinan (% dari populasi) Poverty Rate (% of population)	10,6	9,8	9,4
Tingkat Pengangguran (% dari jumlah tenaga kerja) Unemployment Rate (% of total workforce)	5,5	5,3	5,3
Cadangan Devisa (dalam miliar USD) Foreign Exchange Reserves (in billion USD)	130,2	120,65	129,18
Indeks Harga Saham Gabungan (nilai riil) Composite Stock Price Index (real value)	6.356	6.194	6.299

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, dan International Monetary Fund  
Sources: Statistics Indonesia, Bank Indonesia, and International Monetary Fund

Dengan upaya tersebut, realisasi pendapatan negara pada 2019 tercatat Rp1.957,2 triliun atau tumbuh 0,7 persen dibandingkan tahun 2018, ditopang oleh penerimaan pajak yang agresif dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Dari sisi belanja negara, pemerintah meningkatkan kualitas belanja antara lain melalui optimalisasi anggaran belanja produktif, efisiensi belanja barang, reformasi belanja pegawai, serta sinergi belanja bantuan sosial dan subsidi perlindungan sosial. Adapun realisasi belanja pemerintah pusat pada APBN 2019 mencapai Rp1.489,9 triliun atau

This effort proved quite effective and the state revenue in 2019 reached Rp1,957.2 trillion, increasing 0.7 percent compared to 2018, supported mainly by the non-oil and gas income tax and value-added tax.

On state expenditure, the government enhanced the quality of spending, among others, through the budget optimization of productive expenditure, efficiency in goods procurement, employee spending reform, and synergy of spending on social assistance and social security subsidies. The realization of government spending in the 2019 State Budget

# TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

## Economic and Industrial Review

meningkat 3,0 persen dibandingkan tahun 2018. Defisit APBN juga tercatat tetap terkendali di angka 2,2 persen dari PDB.

reached Rp1,489.9 trillion, an increase of 3.0 percent compared to 2018. The State Budget deficit remained under control at 2.2 percent of GDP.

### PROYEKSI EKONOMI 2020

Pada akhir 2019, Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 masih dibayangi ketidakpastian global dengan capaian sebesar 5 persen atau lebih rendah dibanding tahun 2019. OECD menilai peningkatan tenaga kerja, perluasan bantuan sosial, dan penurunan suku bunga akan menjadi penyokong perekonomian Indonesia, didukung peningkatan investasi dan kinerja ekspor.

### 2020 ECONOMIC PROJECTION

At the end of 2019, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) estimated that Indonesia's economic growth in 2020 would still be overshadowed by global uncertainties with achievement of 5 percent or lower compared to 2019. The OECD assessed a rise in labor force, expanded targets of social assistance, and lower interest rates would become the backbone of the Indonesia's economy, supported by increased investment and export performance.

Di sisi lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh International Monetary Fund (IMF) dan World Bank sedikit lebih tinggi di angka 5,1 persen, sedangkan prediksi Bank Indonesia berada di kisaran 5,1-5,5 persen dengan titik tengah 5,3 persen.

On the other hand, the projection of International Monetary Fund (IMF) and World Bank on Indonesia's economic growth was slightly higher at 5.1 percent, while Bank Indonesia's prediction was in the range of 5.1-5.5 percent with a midpoint of 5.3 percent.

### Asumsi Makro APBN 2020 (Sebelum Pandemi COVID-19) Macro Assumption of 2020 APBN (Before COVID-19 Pandemic)

Asumsi Makro Macro Assumption	Proyeksi Projection
Pertumbuhan ekonomi (%) Economic growth (%)	5,3%
Inflasi (%) Inflation (%)	3,1
Nilai tukar rupiah (USD/IDR) Rupiah exchange rate (USD/IDR)	14.400
Suku bunga (Surat Perbendaharaan Negara/SPN tenor 3 bulan) Interest rate (State Treasury Bills/3-month tenor)	5,4
Harga minyak (USD/barrel) Oil price (USD/barrel)	63
Lifting minyak (barrel/hari) Oil lifting (barrel/day)	755
Lifting gas (barrel/hari) Gas lifting (barrel/day)	1.191

Namun demikian, basis perhitungan asumsi makro tersebut menjadi tidak relevan semenjak World Health Organization (WHO) mengumumkan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai

However, the basis for calculating the macro assumptions has become irrelevant since the WHO announced the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) as a pandemic on March 11, 2020.

pandemi pada 11 Maret 2020. Selain menjangkiti hampir seluruh negara di dunia, infeksi virus ini turut melumpuhkan sejumlah sektor industri. Imbasnya, proyeksi ekonomi dipangkas secara signifikan disertai antisipasi risiko resesi. IMF memperkirakan ekonomi global akan mengalami kontraksi mendalam hingga negatif 3 persen sepanjang tahun 2020, terlebih belum ada kepastian durasi mengenai akhir pandemi.

Pada April 2020, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Perkiraan penerimaan negara pun berubah dari Rp2.233,2 triliun menjadi Rp1.760,9 triliun; sedangkan pos belanja naik dari Rp2.540,4 triliun menjadi Rp2.613,8 triliun. Penyesuaian ini mengakibatkan proyeksi defisit anggaran melebar hingga Rp853 triliun atau setara 5,07 persen dari PDB, dari sebelumnya Rp307,2 triliun atau setara 1,76 persen terhadap PDB. Untuk meminimalisasi dampak pandemi dan mencegah terulangnya krisis ekonomi, pemerintah menambah anggaran dana APBN senilai Rp405,1 triliun yang ditujukan untuk empat bidang prioritas, yaitu: kesehatan (Rp75 triliun), perlindungan sosial (Rp110 triliun), dukungan kepada industri (Rp70,1 triliun), dan pemulihan ekonomi (Rp150 triliun).

Hingga April 2020, Bank Indonesia telah merevisi skenario pertumbuhan ekonomi 2020 sebanyak dua kali, yakni dari 5,3 persen menjadi 4,2-4,6 persen, lalu diturunkan menjadi 2,3 persen. Proyeksi tersebut lebih tinggi dibandingkan hasil *assessment* IMF terhadap Indonesia yang hanya sebesar 0,5 persen.

Adapun pemerintah memiliki dua skenario, yaitu skenario berat dengan proyeksi pertumbuhan 2,3 persen yang dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti pemberian stimulus fiskal, pelonggaran likuiditas, dan relaksasi kredit; serta skenario sangat berat dengan proyeksi pertumbuhan negatif 0,4 persen yang diprediksi tercapai tanpa intervensi.

Besides spreading in most countries in the world, this virus infection also paralyzed several industrial sectors. As a result, economic projections have been significantly cut along with anticipation of recession risks. The IMF has predicted that the global economy would experience a very deep contraction to negative 3 percent in 2020, especially since there is no certainty when the pandemic will last.

In April 2020, the government issued Presidential Regulation Number 54 of 2020 concerning Changes to the Posture and Details of the State Budget of 2020 Fiscal Year which is a derivative of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Pandemic COVID-19.

The estimated state revenue has changed from Rp2,233.2 trillion to Rp1,760.9 trillion; while expenditure items increased from Rp2,540.4 trillion to Rp2,613.8 trillion. This adjustment resulted in a projected budget deficit increasing to Rp853 trillion, or equivalent to 5.07 percent of GDP, from Rp307.2 trillion or 1.76 percent of GDP. To minimize the impact of the pandemic and prevent a recurrence of the economic crisis, the government added Rp405.1 trillion to the State Budget allocated to four priority areas, namely health (Rp75 trillion), social security (Rp110 trillion), support for industry (Rp70.1 trillion), and economic recovery (Rp150 trillion).

As of April 2020, Bank Indonesia had revised the 2020 economic growth estimation twice, namely from 5.3 percent to 4.2-4.6 percent, then lowered it to 2.3 percent. This projection is higher than the IMF's assessment of only 0.5 percent for Indonesia's economic growth.

The government views two scenarios, first a heavy scenario with a projected growth of 2.3 percent which can be achieved with various efforts, such as providing fiscal stimulus, easing liquidity, and relaxing credit; and second a very severe scenario with a projected growth of negative 0.4 percent which is estimated to happen without any efforts.

# TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

## Economic and Industrial Review

Dengan asumsi pandemi dapat teratasi pada semester kedua 2020, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami *rebound* mencapai 5,8 persen pada 2021, bahkan Indonesia diprediksikan tumbuh melesat hingga 8,2 persen. Pemerintah Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2021 berada di kisaran 4,5-5,5 persen dengan inflasi 2-4 persen. Sementara itu, Moody's Investors Service memprediksi pertumbuhan PDB riil Indonesia akan melambat menjadi 3 persen pada 2020 dan mulai pulih tahun 2021 di kisaran 4,3 persen.

Assuming the pandemic problems can be resolved in the second half of 2020, the IMF projects that world economic growth will rebound to 5.8 percent in 2021, even Indonesia is predicted to grow up to 8.2 percent. The Indonesian government estimates that national economic growth in 2021 will be in the range of 4.5-5.5 percent with inflation of 2-4 percent. Meanwhile, Moody's Investors Service projects that Indonesia's real GDP growth will slow to 3 percent in 2020 and begin to recover in 2021 at 4.3 percent.

### PROSPEK INDUSTRI PELAYARAN NASIONAL

Biaya logistik Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan Asia, yakni mencapai Rp1.820 triliun atau 24 persen dari total PDB. Beberapa penyebabnya antara lain ketidakseimbangan pergerakan arus barang antardaerah, ketidakefektifan pemberian subsidi, serta integrasi jaringan transportasi belum memadai.

### PROSPECTS OF NATIONAL SHIPPING INDUSTRY

Indonesia's logistics cost is the highest in the Asian region, reaching Rp1,820 trillion or 24 percent of total GDP. Some of the causes include the unbalanced flows of goods between regions, ineffective subsidies, and inadequate integration of transportation networks.

Beban tersebut tidak kompetitif bila dibandingkan dengan Jepang dan Singapura (8 persen dari total PDB), Tiongkok (14 persen), Malaysia (13 persen), Thailand (15 persen), serta Vietnam (20 persen). Selain itu, tingginya biaya logistik dapat melemahkan daya saing dan daya tarik investasi, sehingga memperkecil peluang Indonesia untuk disasar sebagai tujuan relokasi bisnis oleh perusahaan asing.

The figure was indeed less competitive than Japan and Singapore (8 percent of total GDP), China (14 percent), Malaysia (13 percent), Thailand (15 percent), and Vietnam (20 percent). Besides, the high logistics cost may weaken the investment's competitiveness and attractiveness, thus lowering the Indonesia's opportunities to become a destination for foreign investors to relocate or expand their businesses.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memprioritaskan pembangunan konektivitas laut yang terintegrasi untuk memperbaiki kinerja logistik nasional, sekaligus mengembalikan marwah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Salah satu program kerja terkait adalah pengoperasian tol laut sejak 2015 yang ditujukan untuk menekan disparitas harga komoditas di antara wilayah barat, tengah, dan timur.

President Joko Widodo's administration has prioritized the development of integrated marine connectivity to improve national logistics performance, while at the same time restoring Indonesia's pride as the world's maritime axis. One of the related work programs is the sea toll operation since 2015 aimed at reducing the disparity in commodity prices between the western, central, and eastern regions.

Sebanyak 20 trayek tol laut telah beroperasi pada 76 pelabuhan pada 2019, yang 80 persen di antaranya melayani rute Indonesia Timur dengan 13 trayek ditugaskan kepada BUMN, dan 7 trayek dilelang kepada pihak swasta. Volume muatan pun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, seiring peningkatan jumlah pelabuhan yang terkoneksi dengan tol laut. Distribusi melalui tol laut dapat menurunkan harga barang pokok hingga 10-30 persen.

A total of 20 sea toll routes have been operating involving 76 ports throughout 2019, of which 80 percent serve Eastern Indonesia destinations with 13 routes assigned to SOEs and 7 routes have been auctioned off to the private sectors. The volume of cargo has also increased from year to year, in line with the increase in number of the ports connected by the sea toll routes. The sea toll program has reduced the prices of basic goods by 10-30 percent.



**Perkembangan Tol Laut (2016-2019)****Sea Toll Progress (2016-2019)**

Tahun Year	Volume Pengangkutan Shipment Volume	Jumlah Pelabuhan yang Terkoneksi dengan Tol Laut Total Ports Connected to Sea Toll Routes
2016	81.404 ton tons	31 pelabuhan ports
2017	233.139 ton tons	43 pelabuhan ports
2018	239.875 ton tons	61 pelabuhan ports
<b>2019</b>	<b>245.378 ton tons</b>	<b>76 pelabuhan ports</b>

Dalam arah kebijakan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) periode 2020-2024, program kerja Kementerian Perhubungan masih berfokus pada isu infrastruktur, konektivitas, keselamatan, serta optimalisasi pembiayaan alternatif dalam pembangunan infrastruktur. Sesuai hal tersebut, penguatan konektivitas laut dilaksanakan melalui proyek pengembangan pelabuhan utama; pembangunan dan pengembangan pelabuhan pendukung tol laut; pembangunan dan pengembangan pelabuhan pendukung kawasan prioritas; penyelenggaraan subsidi tol laut dan angkutan laut perintis; pengadaan sarana dan prasarana transportasi laut; dan pengembangan teknologi informasi pelayaran.

Pemerintah mengembangkan jaringan tujuh pelabuhan utama terpadu sebagai titik konsolidasi (*hub*) angkutan barang domestik, yakni Kuala Tanjung (Sumatra Utara), Tanjung Priok (DKI Jakarta), Kijing (Kalimantan Barat), Tanjung Perak (Jawa Timur), Makassar New Port (Sulawesi Selatan), Bitung (Sulawesi Utara), dan Sorong (Papua Barat).

Jaringan terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelabuhan dengan *turnaround time* maksimum 24 jam; meningkatkan efisiensi rute jaringan pelayaran domestik yang saling terhubung (*loop*); serta menurunkan biaya operasional pelabuhan sebesar 15 persen, mengurangi defisit neraca jasa sebesar 10 persen, dan memangkas biaya logistik nasional sebesar 1,6 persen terhadap PDB. Adapun dari 132 layanan pelayaran komersial di Indonesia, *loop* yang terbentuk baru mencapai 23 persen pada 2019 dan ditargetkan menjadi 27 persen pada 2020.

In the 2020-2024 National Long-Term Development Plan (RPJMN), the Ministry of Transportation's work program still focuses on infrastructure, connectivity, safety, and optimization of alternative financing in infrastructure development. Accordingly, the strengthening of sea connectivity is done by the development of main ports; construction and development of sea toll supporting ports; construction and development of supporting ports in the priority areas; subsidies for sea toll operators and shipping pioneers; procurement of sea transportation facilities and infrastructure; and development of shipping information technology.

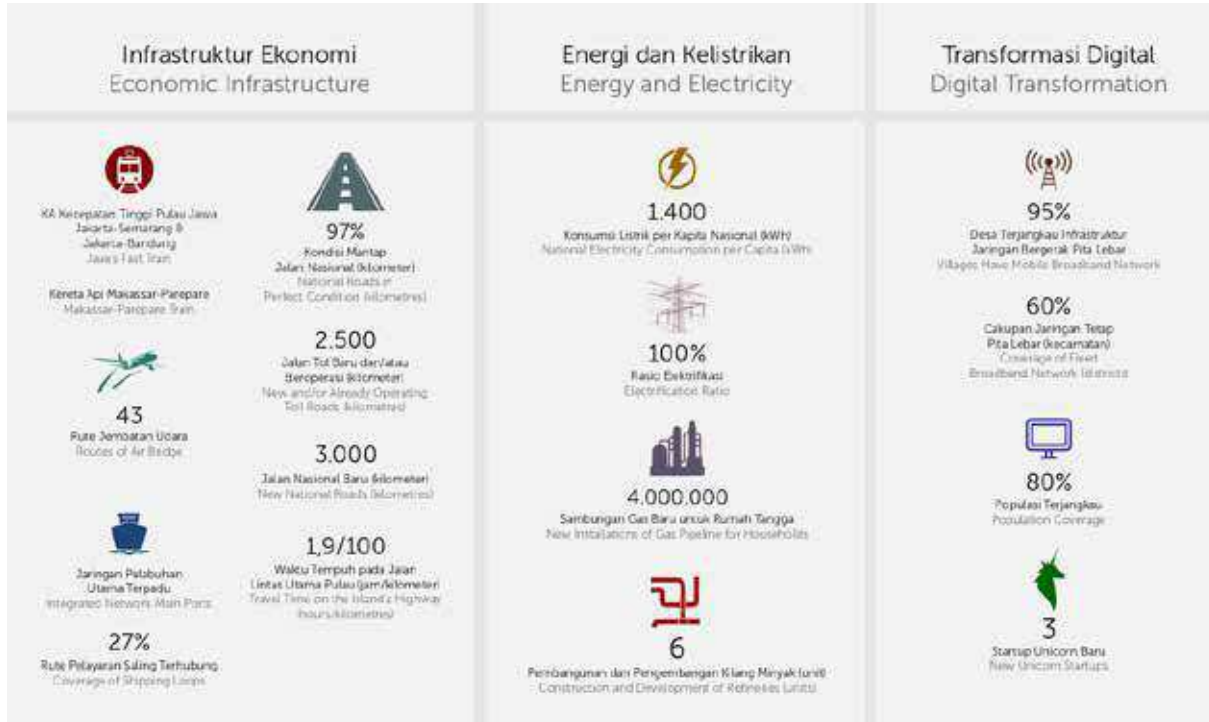
The government has developed a network of seven integrated main ports as a hub for domestic goods transportation, namely Kuala Tanjung (North Sumatra), Tanjung Priok (DKI Jakarta), Kijing (West Kalimantan), Tanjung Perak (East Java), Makassar New Port (Sulawesi South), Bitung (North Sulawesi), and Sorong (West Papua).

The integrated port network is expected to improve their performance with a maximum turnaround time of 24 hours; also increase the efficiency of domestic shipping loops; as well as reduce the port operating costs by 15 percent, lower the service account deficit by 10 percent, and cut national logistics costs by 1.6 percent of GDP. As for the 132 commercial shipping service providers in Indonesia, the loops formed only reached 23 percent in 2019 and is targeted to become 27 percent in 2020.

# TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

## Economic and Industrial Review

### Kebijakan Penguatan Infrastruktur Jangka Menengah Nasional (2020-2024) National Infrastructure Strengthening Policy for Medium-Term (2020-2024)



Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia 2019 (Bank Indonesia)  
Source: 2019 Indonesia Economic Report (Bank Indonesia)

Pembangunan konektivitas laut perlu diarahkan pada penguatan sinergi multimoda transportasi antara jalur darat, laut, dan udara, sehingga dapat menjamin kelancaran distribusi logistik, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selama ini, wilayah 3T belum optimal terlayani oleh moda angkutan laut karena fasilitas pelabuhannya belum memadai, termasuk ketersediaan alat bongkar muat.

The maritime connectivity development shall be directed to strengthen the multimodal transportation synergy, so that it can guarantee the smooth logistics distribution, especially in disadvantaged, frontier, and outermost (3T) regions. So far, the 3T regions have not been served optimally by sea transportation due to the inadequate port facilities, including the availability of stevedoring equipment.

Selain itu, peremajaan kapal niaga penting dilakukan secara berkala dengan memprioritaskan peran industri galangan kapal domestik, mengingat saat ini kapal niaga dalam negeri masih didominasi armada berumur di atas 25 tahun. Terkait hal ini, DJAKARTA LLOYD menjalin kerja sama dengan PT Dok dan Perkapalan Surabaya untuk pembangunan satu unit kapal tanker *long-term time charter* (LTTC) Small II - WO 6.500 LTDW yang memiliki nilai kontrak US\$13,97 juta. Kapal tersebut direncanakan siap beroperasi pada triwulan IV 2020 dan akan digunakan untuk mengoptimalkan potensi pasar angkutan curah cair, antara lain bahan bakar minyak.

In addition, it is important to rejuvenate the commercial fleets regularly by promoting the domestic shipbuilding industry, bearing in mind that currently domestic merchant vessels are still dominated by fleets aged over 25 years. In this regard, DJAKARTA LLOYD established a partnership with PT Dok and Surabaya Shipping for the construction of one unit long-term time charter (LTTC) tanker Small II - WO 6,500 LTDW under a contract value of US\$13.97 million. The vessel is planned to start operating in the last quarter of 2020 and will be used to optimize the market potential of liquid bulk transportation, among others, the fuels.

**Kinerja Infrastruktur Konektivitas Tol Laut**  
**Maritime Connectivity Infrastructure Performance**

<b>46</b> Peringkat Indonesia dalam Indeks Performa Logistik Tahun 2018 dengan Skor 3,15 Indonesia's ranking in the 2018 Logistics Performance Index with a Score of 3.15	<b>24</b> Jumlah Pembangunan Pelabuhan Penunjang Tol Laut (2015-2019) Total Sea Toll Supporting Ports Built (2015-2019)	<b>118</b> Jumlah Pembangunan Pelabuhan Non-Komersial (2015-2019) Total Non-Commercial Ports Developed (2015-2019)	<b>3,32</b> Lama Hari Rata-Rata untuk <i>Dwelling Time</i> (2019) Days of Average Dwell Time (2019)	<b>6,6%</b> Pertumbuhan Volume Angkutan Barang Sepanjang 2019 (yoy) Growth of Goods Shipment Volume in 2019 (yoy)
	<b>20</b> Jumlah Trayek Tol Laut (2019) Total Sea Toll Routes (2019)	<b>16</b> Jumlah Pelabuhan yang Telah Mengimplementasikan Aplikasi Inaportnet (2019) Total Ports that Have Implemented the Inaportnet Application (2019)	<b>295</b> Jumlah Pembangunan Kapal untuk Mendukung Program Tol Laut (2015-2019) Total Ships Built to Support Sea Toll Program (2015-2019)	

Meskipun ketidakpastian masih akan mewarnai perekonomian global tahun 2020, bisnis pelayaran di Indonesia diyakini tetap dapat tumbuh positif. Permintaan jasa pelayaran niaga, khususnya angkutan barang, diperkirakan dapat meningkat apabila sejumlah katalis positif berikut direalisasikan:

**1. Penerapan kebijakan program Mandatori Biodiesel 30% (B30)**

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, per Januari 2020, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberlakukan kebijakan Mandatori B30 dalam campuran bahan bakar solar, sehingga rasio antara solar murni dan minyak FAME menjadi 70:30. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan atas impor solar dan meningkatkan serapan sawit di dalam negeri. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kebutuhan pengangkutan pasokan *fatty acid methyl ester* (FAME) untuk keperluan distribusi.

Although uncertainty will still overshadow the global economy in 2020, the shipping business in Indonesia is believed to continue to grow positively. The commercial shipping services demand, in particular the goods transportation, is also expected to increase if several following positive catalysts are realized:

**1. Implementation of the policy on Biodiesel 30% (B30) Mandatory program**

Following the Minister of Energy and Mineral Resources RI Regulation Number 12 of 2015 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 32 of 2008 concerning Provision, Utilization and Business Administration of Biofuel as Other Fuel, as of January 2020, the government through the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) enforces the policy on the mandatory to mix the diesel oil with bio oil (FAME) in a ratio of 70:30 to get Biodiesel 30%. The objective is to reduce the dependence on diesel imports and increase domestic palm oil uptake. This policy has the potential to increase the demand for transporting supplies of fatty acid methyl esters (FAME) for distribution later.

# TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

## Economic and Industrial Review

### 2. Pemberlakuan regulasi larangan ekspor nikel

Sejalan dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Minerba mulai 1 Januari 2020, pemerintah melarang ekspor bijih nikel (*ore*) dan hanya mengizinkan ekspor *ore* yang telah diolah. Kebijakan ini diprediksi dapat meningkatkan volume angkutan laut domestik dari lokasi tambang ke pabrik pemurnian dan pengolahan.

Selain itu, pemerintah juga sempat mengeluarkan kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing nasional di tengah dominasi asing, khususnya dalam pengangkutan curah kering dan cair, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 82 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu.

Dalam hal ini, pemerintah mewajibkan para eksportir batu bara dan minyak kelapa sawit mentah serta importir beras dan barang pengadaan pemerintah untuk menggunakan angkutan kapal laut dan asuransi nasional per 1 Mei 2020. Namun, kebijakan tersebut dipandang kontraproduktif oleh Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) karena keterbatasan kapal nasional dalam mengakomodasi kebutuhan industri.

Data APBI dan Indonesian National Shipowners' Association (INSA) menunjukkan total pengapalan ekspor batu bara pada 2019 mencapai 7.645 unit, sedangkan ketersediaan kapal nasional hanya 182 unit. Adapun pengiriman batu bara selama ini menggunakan skema *Free on Board* (FoB), yaitu pengadaan kapal dan asuransi menjadi tanggung jawab importir.

Sebagai solusinya, pada April 2020, pemerintah menetapkan Permendag Nomor 40 Tahun 2020 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut Nasional dan Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu yang sekaligus menganulir dua Permendag sebelumnya. Perubahan kebijakan tersebut memungkinkan perusahaan angkutan laut asing untuk tetap berperan dalam kegiatan ekspor

### 2. Regulation enforcement on nickel export ban

Starting January 1, 2020, the government bans the export of nickel ore and only allows to export the processed products, enforcing the Minister of ESDM Regulation Number 11 of 2019 concerning the Second Amendment to the Regulation Number 25 of 2018 regarding Mineral and Coal Mining Businesses. This policy is predicted to increase the volume of domestic sea transportation from the mine site to the smelter.

In addition, the government also once issued a policy to improve the national competitiveness amid foreign domination, particularly in the dry and liquid bulk shipment, namely the Minister of Trade Regulation Number 80 Year 2018 concerning Second Amendment to the Regulation Number 82 of 2017 about Provisions on the Use of National Sea Transportation and Insurance for the Export and Import of Certain Goods.

In this policy, the government required exporters of coal and crude palm oil (CPO) as well as importers of rice and goods of state procurement to use domestic sea transport and national insurance as of May 1, 2020. However, the policy was seen as counterproductive by the Association of Indonesian Coal Mining (APBI) due to the limitations of national flag ships in accommodating industrial needs.

APBI and Indonesian National Shipowners' Association (INSA) data show total shipments of coal exports in 2019 amounted to 7,645 units, while the availability of national vessels is only 182 units. Coal shipments have so far used the *Free on Board* (FoB) scheme, in which ship procurement and insurance are the responsibility of the importer.

As a solution, in April 2020, the government enacted the Minister of Trade Regulation Number 40 of 2020 regarding Provisions on the Use of National Sea Transportation and Insurance for the Export and Import of Certain Goods which simultaneously annulled the two previous regulations. This policy allows the use of foreign sea transport companies in the export and import of certain commodities

dan impor komoditas tertentu (batu bara, CPO, dan beras), sedangkan kewajiban penggunaan armada laut nasional hanya berlaku untuk volume pengangkutan maksimum 15.000 DWT atau setara dengan jenis *mini-bulker* yang ekonomis pada jarak pendek atau antarregional.

Padahal, hanya 5,8 persen dari seluruh ekspor batu bara yang menggunakan kapal bermuatan di bawah 15.000 DWT karena umumnya rata-rata muatan pengangkutan mencapai lebih dari 50.000 DWT dengan menggunakan kapal *supramax*. Kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan ini membuat perusahaan-perusahaan pelayaran domestik belum sepenuhnya berjaya di negeri sendiri.

Terkait pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19. Pengendalian untuk angkutan logistik/ barang menjadi tanggung jawab operator sarana transportasi, pengelola operasional angkutan, serta pengirim dan pemilik barang.

Beberapa hal yang harus dilakukan oleh operator sarana transportasi adalah:

1. memastikan penerapan jaga jarak fisik dan penggunaan masker selama kegiatan operasional,
2. melakukan sterilisasi armada transportasi dan muatan melalui penyemprotan disinfektan,
3. melakukan pengecekan kesehatan personel sarana transportasi di lokasi keberangkatan dan kedatangan,
4. menyediakan kontak keadaan darurat (*emergency call*) di seluruh daerah yang dilewati untuk mengantisipasi keadaan darurat, dan
5. menugaskan personel untuk melaporkan perubahan kondisi kesehatan secara aktif.

Pembatasan pengangkutan penumpang menjadikan pengangkutan logistik/barang sebagai jangkar penyelamat bisnis transportasi untuk tetap beroperasi. Momentum ini dapat dimanfaatkan oleh Perseroan untuk meningkatkan pendapatan usaha dengan mengoptimalkan pemanfaatan muatan, terlebih kapal barang berperan dalam menjaga pasokan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah.

(coal, CPO, and rice), while the obligation to use the national fleet only applies to the maximum shipment volume of 15,000 DWT or equivalent to one mini-bulker which is economical at short distances or between regions.

In fact, it is only 5.8 percent of all coal exports use ships with a capacity below 15,000 DWT because generally the average cargo is more than 50,000 DWT which needs supramax vessels. This gap between demand and supply means the domestic shipping companies have not fully succeeded in their country.

Regarding the COVID-19 pandemic, the government issued the Ministry of Transportation Regulation Number PM 18 of 2020 on Transportation Control to Preventing the COVID-19 Spread. The protocol application for logistics/goods transports is the responsibility of the operators of transportation facilities, shipment management, as well as the senders and owners of the goods.

Steps must be done by the transportation facility operator are:

1. ensure the application of physical distancing and the use of masks during operations,
2. conduct sterilization of transportation fleets and cargo by spraying disinfectants,
3. check the health of personnel at the departure and arrival locations,
4. provide emergency call number in all areas traversed to anticipate if an emergency occurs, and
5. assign personnel to actively report changes in their health conditions.

The restrictions on passenger transportation make the logistics/goods shipment a 'lifesaver' for the transportation business to be able to keep operating. This momentum can be utilized by the Company to increase revenue by optimizing the operations of cargo ships to support the supply of goods needed by the people in various regions.



# TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

## Operating Overview per Business Segment



Pada 2019, kinerja pendapatan usaha Perseroan belum memenuhi prognosis yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019, di mana tercapai 66,8 persen dengan perolehan sebesar Rp625,81 miliar dari target Rp936,37 miliar pada RKAP 2019. Dari sisi laba bersih, tercapai 69,9 persen dengan perolehan Rp64,68 miliar dari Rp92,51 miliar pada RKAP 2019. Meski demikian, apabila dibandingkan secara tahun ke tahun, Perseroan membukukan kenaikan pendapatan usaha dan laba bersih masing-masing sebesar 11,4 persen dan 5,50 persen.

Segmen angkutan curah masih menjadi kontributor utama dalam pendapatan usaha sebesar 78,7 persen, disusul jasa pemanduan (8,7 persen), angkutan kontainer/tol laut (7,3 persen), bongkar muat dan usaha keagenan (5 persen), serta pendapatan sewa (0,3 persen).

In 2019, the Company's operating revenue did not meet the target set in the 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP), reaching only 66.8 percent amounting to Rp625.81 billion from Rp936.37 billion target in the 2019 RKAP. Meanwhile the net profit was achieved 69.9 percent amounting to Rp64.68 billion from Rp92.51 billion target in the 2019 RKAP. However, for year-on-year comparison, the Company posted an increase in operating revenue and net profit of 11.4 percent and 5.5 percent respectively.

Bulk shipment segment is still the main contributor to the operating revenue reaching 78.7 percent, followed by harbor tug (8.7 percent), container/sea toll transportation (7.3 percent), stevedoring and agency business (5 percent), and rental proceeds (0.3 percent).

## SEGMENT ANGKUTAN CURAH

### 1. Angkutan Curah Kering (*Breakbulk Batu Bara*)

Dalam layanan pengangkutan batu bara ini, Perseroan memiliki sejumlah kontrak dengan BUMN dan swasta. Selain menggunakan armada milik sendiri, Perseroan turut mengoperasikan sejumlah kapal *time charter* dan kapal kerja sama operasi (KSO) dengan pihak ketiga.

Realisasi pendapatan angkutan curah tahun 2019 sebesar Rp492,24 miliar atau naik 3 persen dari tahun 2018 sebesar Rp477,91 miliar. Kenaikan ini ditopang pendapatan angkutan batu bara, meskipun angkutan nikel dan angkutan tekstil tidak terealisasi karena adanya pengurangan produksi bijih nikel dari produsen. Adapun Perseroan mampu merealisasikan volume angkutan curah kering sebesar 2.518.780 MT atau 53 persen dari RKAP 2019 sebesar 4.715.000 MT, sekaligus menurun 4,3 persen dari realisasi tahun 2018 sebesar 2.632.390 MT. Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan sejumlah faktor berikut:

#### a. Faktor Eksternal

1. Terjadi bencana banjir di sejumlah area pertambangan batu bara, sehingga aktivitas produksi tidak dapat dilakukan dan jumlah produksi pun menurun.
2. Terjadi gangguan teknis di beberapa PLTU, antara lain PLTU Labuhan Angin dan PLTU Teluk Sirih.
3. Adanya pengurangan produksi nikel yang menyebabkan kondisi suplai armada dalam negeri berlebih.
4. Penurunan harga angkutan batu bara kontrak baru 2019.

#### b. Faktor Internal

1. *Docking* armada kapal milik (MV Dharma Lautan Intan) pada triwulan I 2019.
2. Beberapa kapal *time charter* mengalami *maintenance*, sehingga pengoperasian armada kurang optimal.
3. Keterlambatan realisasi pengadaan satu unit *handymax*, dari semula akhir triwulan I menjadi pertengahan triwulan III.
4. Pengoperasian kapal milik *tug & barge* belum optimal.

## BULK SHIPMENT SEGMENT

### 1. Dry Bulk Shipment (*Coal BreakBulk*)

In serving coal shipment, the Company has numerous contracts with SOEs and private companies. The fleet consists of owned ships, several time charter vessels, and the ships of joint operation (KSO) with third parties.

The realization of bulk shipment revenue in 2019 amounted to Rp492.24 billion, increasing by 3 percent from 2018 of Rp477.91 billion. This increase was contributed by growth in coal shipment revenue, although nickel ore and textile shipments were not fully realized due to reduced nickel ore production from the producers. The Company managed to reach dry bulk shipment volume of 2,518,780 MT or 53 percent of the 2019 RKAP target of 4,715,000 MT, and a decline of 4.3 percent from the previous year realization of 2,632,390 MT. The failure to achieve the goal was due to the following factors:

#### a. External Factors

1. The coal mining site was hit by a flood, stopping the production activities and reducing production output.
2. There were technical problems at several power plants, including PLTU Labuhan Angin and PLTU Teluk Sirih.
3. There was a reduction in nickel production which caused domestic fleet oversupply.
4. Lower coal price in the new contracts of 2019.

#### b. Internal Factors

1. Docking of one owned ship (MV Dharma Lautan Intan) in the Q1 2019.
2. Some time-charter vessels underwent maintenance, so the operation of the fleet was less than optimal.
3. Delay in the realization of one *handymax* procurement, from previously at the end of Q1 to the middle of the Q3.
4. The operation of owned tug & barge was not optimal.

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Operating Overview per Business Segment

Berikut pelanggan Perseroan di segmen angkutan curah (*breakbulk* batu bara) beserta realisasi produksinya.

#### a. PT PLN (Persero)

Kerja sama tertuang dalam Kontrak Perjanjian Pekerjaan Jasa Transportasi Laut Nomor 063. PJ/041/DIR/2012 tanggal 19 April 2012 untuk jangka waktu 15 tahun. Jenis muatan curah kering masih didominasi oleh batu bara untuk kebutuhan listrik unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), baik yang dimiliki PLN maupun yang dioperasikan pihak lain dalam bentuk *independent power producer* (IPP). Berikut performa DJAKARTA LLOYD dalam kontrak tersebut sampai dengan akhir 2019.

The following are the Company's customers in the bulk shipment segment (coal *breakbulk*) along with their production realization.

#### a. PT PLN (Persero)

The cooperation stated in the Maritime Transportation Service Work Agreement Number 063.PJ/041/DIR/2012 dated April 19, 2012 is valid for a period of 15 years. The dry bulk shipment is still dominated by coal for fueling the steam power plants (PLTU), either owned by PLN and other companies of independent power producer (IPP). Following is the performance of DJAKARTA LLOYD in the contract until the end of 2019.

No.	Tanggal Date	Nama Kapal Ship Name	POL	POD	Volume B/L
1	11-Jan-2019	MV Lumoso Harmoni	Asam-asam	Nagan Raya	53.600,00
2	9-Jan-2019	TB K IX/ BG Bulesko III	Asam-asam	Takalar	7.507,89
3	5-Feb-2019	MV Lumoso Karunia II	Asam-asam	Lontar	55.390,00
4	6-Mar-2019	TB Arabika 7012/BG Arabika 8021	Tarahan	Labuhan Angin	7.706,62
5	12-Mar-2019	MV Lumoso Karunia II	Asam-asam	Teluk Sirih	55.620,00
6	24-Mar-2019	TB Syukur 05/BG Syukur 11	Tarahan	Labuhan Angin	7.510,71
7	27-Mar-2019	TB Arabika 7012/BG Arabika 8021	Tarahan	Labuhan Angin	7.626,10
8	3-Apr-2019	TB Matano 005/BG Sentosa Jaya 3008	Tarahan	Labuhan Angin	7.505,29
9	13-Feb-2019	TB TMJ Power/BG TMJ 3001	Lontar (Trans)	Labuan	7.501,128
10	13-Apr-2019	TB Arabika 7016/ BG Arabika 8025	Tarahan	Labuhan Angin	7.733,71
11	19-Apr-2019	TB. Matano 005/BG Sentosa Jaya 3008	Tarahan	Labuhan Angin	7.517,40
12	12-Apr-2019	MV Dharma Lautan Intan	Asam-asam	Teluk Sirih	54.000,00
13	1-May-2019	TB Arabika 7016/BG Arabika 8025	Tarahan	Teluk Sirih	7.740,18
14	10-Jun-2019	TB Arabika 7016/BG Arabika 8025	Tarahan	Labuhan Angin	7.735,95
15	24-Jun-2019	TB Arabika 7016/BG Arabika 8025	Tarahan	Labuhan Angin	7.803,06
16	30-Jun-2019	TB Arabika 7012/BG Arabika 8021	Tarahan	Labuhan Angin	7.661,89
17	27-Jul-2019	TB Maiden Cendana/BG Sentana Abadi	Tarahan	Labuhan Angin	7.536,43
18	25-Jul-2019	MV Lumoso Hawari	Asam-asam	Pangkalan Susu	53.950,00

No.	Tanggal Date	Nama Kapal Ship Name	POL	POD	Volume B/L
19	14-Jul-2019	MV Manalagi Tysha	Tarahan	Nagan Raya	51.018,40
20	14-Aug-2019	MV Uniorder	Asam-asam	Adipala	35.000,00
21	8-Aug-2019	TB Arabika 7012/BG Arabika 8021	Tarahan	Labuhan Angin	7.528,17
22	27-Aug-2019	MV Lumoso Harmoni	Asam-asam	Pangkalan Susu	53.900,00
23	9-Sep-2019	MV Aurora Christine	Satui	Adipala	35.000,00
24	15-Sep-2019	MV Lumoso Lestari	Satui	Pangkalan Susu	56.000,00
25	4-Sep-2019	MV Lumoso Karunia II	Satui	Pangkalan Susu	55.420,00
26	23-Sep-2019	TB Arabika 7012/BG Arabika 8021	Tarahan	Labuhan Angin	7.447,40
27	26-Sep-2019	TB Matano 707 / BG Matano 808	Tarahan	Labuhan Angin	7.525,94
28	8-Oct-2019	MV Victoria I	Satui	Pangkalan Susu	55.000,00
29	10-Oct-2019	MV Aurora Christine	Satui	Adipala	35.000,00
30	9-Oct-2019	MV Uniorder	Tarahan	Nagan Raya	47.000,27
31	14-Oct-2019	TB Matano 707/BG Matano 808	Tarahan	Labuhan Angin	7.565,95
32	17-Oct-2019	TB Medelin Spirit/BG Sentana Jaya	Tarahan	Labuhan Angin	7.536,49
33	30-Oct-2019	TB Arabika 7012/BG Arabika 8021	Tarahan	Labuhan Angin	7.545,57
34	14-Nov-2019	MV Uniorder	Asam asam	Adipala	35.000,00
35	30-Nov-2019	MV Lumoso Berkat	Asam-asam	Pangkalan Susu	56.000,00
36	8-Dec-2019	MV Lumoso Permai	Tarahan	Nagan Raya	45.000,40
37	23-Dec-2019	MV Lumoso Lestari	Asam-asam	Pangkalan Susu	50.000,00
<b>Jumlah Total</b>					<b>1.026.134,94</b>

**b. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna**

Sebagai anak usaha PT PLN (Persero) yang memiliki bisnis inti serupa dengan Perseroan, PT Bahtera Adhiguna membutuhkan mitra pendukung seiring meningkatnya kebutuhan pengangkutan melalui laut. Kerja sama ini tertuang dalam Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL). Berikut performa DJAKARTA LLOYD dalam kontrak tersebut hingga akhir 2019.

**b. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna**

A subsidiary of PT PLN (Persero) with a core business similar to the Company, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna needs a supporting partner in line with the increasing demand for shipment by sea. This cooperation is legalized in the Sea Transportation Agreement (SPAL). Following are DJAKARTA LLOYD's performance in the contract until the end of 2019.

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Operating Overview per Business Segment

No.	Tanggal Date	Nama Kapal Ship Name	POL	POD	Volume B/L
1	12-Apr-2019	MV Asian Wisdom	Tarahan	Nagan Raya	48.700,37
2	15-May-2019	MV Lumoso Raya	Asam-asam	Pangkalan Susu	50.663,00
3	4-May-2019	MV Amethyst	Tarahan	Nagan Raya	47.000,12
4	3-Jul-2019	MV Dharma Lautan Intan	Asam-asam	Teluk Sirih	54.000,00
5	21-Sep-2019	MV Aurora Christine	Tarahan	Suralaya	40.000,00
<b>Jumlah Total</b>					<b>240.363,48</b>

#### c. PT Surya Mega Adiperkasa

Pemasok batu bara yang memiliki tambang di wilayah Kalimantan Selatan ini merupakan salah satu pemasok utama bagi PT PLN Batubara dan IPP PT Sumber Segara Primadaya (S2P) Cilacap. Kerja sama dengan Perseroan tertuang dalam kontrak Nomor 032A/OPS-SPK/MJB/IV/2018 tanggal 23 April 2018 untuk jangka waktu satu tahun, dan diperbarui dengan kontrak Nomor 041/OPS-PPB/STM/IX/2019 tanggal 19 Agustus 2019 untuk jangka waktu satu tahun. Berikut performa DJAKARTA LLOYD dalam kontrak tersebut hingga akhir 2019.

#### c. PT Surya Mega Adiperkasa

This coal miner operating in the South Kalimantan is one of the main coal suppliers for PT PLN Batubara and IPP PT Sumber Segara Primadaya (S2P) Cilacap. The cooperation with the Company is sealed with the contract Number 032A/OPS-SPK/MJB/IV/2018 dated April 23, 2018 for a period of one year, and renewed with the contract Number 041/OPS-PPB/STM/IX/2019 dated August 19, 2019 for a period of one year. Following is the performance of DJAKARTA LLOYD in the contract until the end of 2019.

No.	Tanggal Date	Nama Kapal Ship Name	POL	POD	Volume B/L
1	17-Jan-2019	MV Aurora Christine	IBT	S2P	40.000,00
2	11-Feb-2019	MV Aurora Christine	Satui	Nagan Raya	47.000,00
3	10-Mar-2019	MV Amethyst	Muara Satui	Nagan Raya	47.000,00
4	25-Jun-2019	MV Amethyst	IBT	Adipala	35.000,00
5	17-Jul-2019	MV Amethyst	Muara Satui	Adipala	35.000,00
6	7-Aug-2019	MV Asian Wisdom	Satui	Pangkalan Susu	50.000,00
7	10-Aug-2019	MV Amethyst	Muara Satui	Adipala	35.000,00
8	22-Aug-2019	MV Aurora Christine	Bunati	S2P	39.000,00
9	30-Aug-2019	MV Amethyst	Satui	Adipala	35.000,00
10	5-Sep-2019	MV Uniorder	Asam-asam	Adipala	35.000,00
11	17-Sep-2019	MV Asian Wisdom	Satui	Pangkalan Susu	50.000,00
12	22-Sep-2019	MV Uniorder	Asam-asam	Adipala	35.000,00



No.	Tanggal Date	Nama Kapal Ship Name	POL	POD	Volume B/L
13	17-Sep-2019	MV Dharma Lautan Ruby	Satui	Teluk Sirih	54.000,00
14	25-Oct-2019	MV Dharma Lautan Ruby	Satui	S2P	40.000,00
15	29-Oct-2019	MV Aurora Christine	Satui	Adipala	35.000,00
16	17-Nov-2019	MV Aurora Christine	Muara Satui	Pangkalan Susu	47.000,00
17	20-Nov-2019	MV Asian Wisdom	Tg. Pemancingan	Morosi	48.500,00
18	15-Nov-2019	MV Dharma Lautan Ruby	Tg. Pemancingan	Morosi	53.041,00
19	19-Dec-2019	MV Amethyst	Asam-asam	Pangkalan Susu	47.000,00
20	6-Dec-2019	MV Uniorder	Satui	Teluk Sirih	47.000,00
21	30-Dec-2019	MV Aurora Christine	Satui	Adipala	35.000,00
<b>Jumlah Total</b>					<b>889.541,00</b>

#### d. PT Kreasi Energi Alam

Kerja sama dengan Perseroan tertuang dalam kontrak Nomor 18/DL-KEA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 untuk jangka waktu dua tahun. Pemasok batu bara yang memiliki tambang di wilayah Taboneo, Kalimantan Selatan ini juga memiliki kontrak pekerjaan dengan PT PLN Batubara dan PT Sumber Segara Primadaya (S2P) Cilacap. Berikut performa DJAKARTA LLOYD dalam kontrak tersebut hingga akhir 2019.

#### d. PT Kreasi Energi Alam

The cooperation with the Company is legalized in the contract Number 18/DL-KEA/IX/2018 dated September 24, 2018 for a period of two years. This coal supplier and miner with its mining site in Taboneo, South Kalimantan, also has a work contract with PT PLN Batubara and PT Sumber Segara Primadaya (S2P) Cilacap. Following is the performance of DJAKARTA LLOYD in the contract until the end of 2019.

No.	Tanggal Date	Nama Kapal Ship Name	POL	POD	Volume B/L
1	19-Jan-2019	MV Srikandi Indonesia 19	Taboneo	S2P	40.083,00
2	17-Feb-2019	MV Srikandi Indonesia 19	Taboneo	S2P	40.093,00
3	26-Mar-2019	MV Aurora Christine	Taboneo	S2P	38.561,00
4	27-Apr-2019	MV Aurora Christine	Taboneo	S2P	39.025,00
5	30-May-2019	MV Aurora Christine	Taboneo	S2P	38.412,00
6	17-Jun-2019	MV Asian Wisdom	Muara Berau	S2P	40.015,00
7	2-Jun-2019	MV Dharma Lautan Intan	Taboneo	S2P	38.406,00
8	18-Jul-2019	MV Asian Wisdom	Taboneo	S2P	38.215,00
9	28-Sep-2019	MV Dharma Lautan Intan	Taboneo	S2P	40.846,00
<b>Jumlah Total</b>					<b>353.656,00</b>

# TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

## Operating Overview per Business Segment

### e. PT Energy Transporter Indonesia

Perseroan memiliki SPAL untuk setiap *shipment* batu bara di lingkup PLTU wilayah Jawa dari PT Energy Transporter Indonesia. Berikut performa DJAKARTA LLOYD dalam kontrak tersebut sampai dengan akhir 2019.

### e. PT Energy Transporter Indonesia

The Company has a SPAL for coal shipments to the steam power plants in Java from PT Energy Transporter Indonesia. Following is the performance of DJAKARTA LLOYD in the contract until the end of 2019.

No.	Tanggal Date	Nama Kapal Ship Name	POL	POD	Volume B/L
1	16-Nov-2019	MV Dharma Lautan Intan	Tanjung Bara	Lontar	51.214,00
Jumlah Total					51.214,00

### 2. Angkutan Curah Lainnya

Segmen bisnis yang mengangkut muatan curah kering, seperti nikel, pupuk, dan semen dengan kapal *time charter* ini terus dikembangkan oleh Perseroan, salah satunya melalui sinergi dengan BUMN. Pada 2019, Perusahaan telah mengikuti tender pengangkutan bijih nikel di rute Pomalaa yang diselenggarakan oleh PT Antam Tbk. Hasil perolehan menunjukkan Perseroan menempati posisi ketiga. Dengan demikian, belum ada pendapatan yang dapat direalisasikan dari segmen ini pada 2019.

### 2. Other Bulk Shipment

The business segment that transports dry bulk cargo, such as nickel, fertilizer and cement with time charter vessels, is continuously developed by the Company, one of which is through synergy with SOEs. In 2019, the Company has participated in a tender for the transportation of nickel ore on the Pomalaa route organized by PT Antam Tbk. The results show that the Company occupies the third position. Therefore, no revenue can be realized from this segment in 2019.

### 3. Angkutan Curah Cair

Untuk mengembangkan kompetensi bisnis, Perseroan menandatangani kontrak jangka panjang selama 10 tahun dengan PT Pertamina (Persero) terkait pengangkutan bahan bakar cair menggunakan dua unit tanker yang direncanakan beroperasi pada triwulan IV tahun 2020. Dengan demikian, belum ada pendapatan yang dapat direalisasikan dari segmen ini pada 2019.

### 3. Liquid Bulk Shipment

To develop business competencies, the Company signed a 10-year long-term contract with PT Pertamina (Persero) to transport fuels using two units of tanker planned to start operating in the fourth quarter of 2020. Thus, no revenue can be disclosed for this segment in 2019.

## SEGMENT JASA PEMANDUAN

Segmen ini menyediakan pemanduan navigasi bagi kapal yang hendak masuk ataupun keluar pelabuhan, sehingga dapat menjamin keselamatan kapal, muatan, dan lingkungan.

## HARBOUR TUG SEGMENT

This segment provides pilotage services for ships wishing to enter or exit the port, so as to ensure the safety of the ship, cargo and the environment.

Perseroan menjalin kerja sama dengan PT Kalimantan Prima Coal terkait penyediaan layanan kapal tunda yang tertuang pada surat *Letter of Intent* (LOI) KPC-

The Company has established cooperation with PT Kalimantan Prima Coal for the provision of tugboat services as stated in the Letter of Intent (LOI) KPC-

44-0231 dan berlaku selama 40 bulan, sejak 1 September 2018 hingga 31 Desember 2021. Dalam kerja sama ini, Perseroan membentuk *joint operation* dengan dua entitas lain untuk menyediakan tiga kapal tunda pelabuhan, terdiri atas satu unit milik sendiri (KT Daya Lautan I) dan dua unit *time charter*.

Performa Perseroan dalam segmen jasa pemanduan sepanjang 2019 tercatat senilai Rp54,69 miliar yang meningkat 58,4 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp22,8 miliar, sekaligus melampaui target RKAP 2019 senilai Rp12,6 miliar.

44-0231 and is valid for 40 months, starting from September 1, 2018 to December 31, 2021. In this partnership the Company formed a joint operation with two other companies to provide three harbor tugs, consisting of one unit of its own (KT Daya Lautan I) and two time-charter units.

The Company's performance in the segment of harbor tug services in 2019 was recorded at Rp54.69 billion, an increase of 58.4 percent from the previous year of Rp22.8 billion, and exceeding the 2019 RKAP target of Rp12.6 billion.

No.	Nama Kapal Tunda Name of Tug & Barge	Volume	Realisasi Pendapatan Realization of Revenue
1	TB Daya Lautan I	12	18.230.616
2	KT Jayanegara 307	12	18.230.616
3	KT Jayanegara 402	12	18.230.616
<b>Jumlah Total</b>		<b>36</b>	<b>54.691.848</b>

### SEGMENT ANGKUTAN KONTAINER DAN GENERAL CARGO (TOL LAUT)

Terkait program Tol Laut, Perseroan mendapat mandat dari Kementerian Perhubungan RI untuk mengoperasikan pengangkutan kontainer di empat trayek wilayah Indonesia Timur sejak November 2018. Adapun trayek yang dimaksud adalah rute H-4 (Tanjung Perak-Makassar-Kendari-Tanjung Perak), rute T-6 (Bitung-Pagimana-Bunta-Mantangisi-Parigi/Tinombo-Tilamuta-Bitung), rute T-7 (Makassar-Selayar-Jampea-Sikeli-Raha-Ereke-Pasar Wajo-Makassar), dan rute T-8 (Kendari-Bungku-Kolonodale-Luwuk-Kendari).

Realisasi pendapatan tol laut tahun 2019 sebesar Rp45,63 miliar atau meningkat 250,16 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp13,03 miliar, sekaligus melampaui target RKAP sebesar Rp35,16 miliar. Kenaikan ini disebabkan jumlah *voyage* yang terealisasi sepanjang 2019 mencapai 42 *voyage*, melebihi target RKAP sebanyak 36 *voyage*.

### CONTAINER SHIPPING AND GENERAL CARGO (SEA TOLL) SEGMENT

Under the Sea Toll Program, the Company is given a mandate by the Indonesian Ministry of Transportation to operate four routes for shipment of containers and general cargoes in Eastern Indonesia since November 2018. The routes are called H-4 (Tanjung Perak-Makassar-Kendari-Tanjung Perak), the T-6 (Bitung-Pagimana-Bunta-Mantangisi-Parigi/Tinombo-Tilamuta-Bitung), T-7 (Makassar-Selayar-Jampea-Sikeli-Raha-Ereke-Pasar Wajo-Makassar), and T-8 (Kendari-Bungku-Kolonodale-Luwuk-Kendari).

The realization of sea toll revenue in 2019 amounted to Rp45.63 billion, an increase of 250.16 percent from the previous year of Rp13.03 billion, also exceeding the RKAP target of Rp35.16 billion. This increase thanks to the higher number of voyages during 2019 reaching 42, exceeding the RKAP target of 36 voyages.

# TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

## Operating Overview per Business Segment

No.	Nama Kapal Ship Name	Pendapatan Revenue		Jumlah Voyage Total Voyage
		Muatan Kontainer Container Shipment	PSO	
1	KM. Kendhaga Nusantara 3	536.720.000	9.511.028.568	7
2	KM. Kendhaga Nusantara 15	410.721.000	9.701.169.598	8
3	KM. Kendhaga Nusantara 13	1.466.136.000	10.988.120.687	14
4	KM. Kendhaga Nusantara 4	938.243.501	12.080.790.327	13
<b>Subtotal</b>		<b>3.351.820.501</b>	<b>42.281.109.180</b>	<b>42</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>45.632.929.681</b>		

### Catatan:

- Pendapatan muatan kontainer adalah hasil muatan *freight* yang diangkut dari seluruh kapal, sekaligus menjadi pengurang subsidi *invoice reimbursement* dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- Pendapatan PSO adalah pendapatan dari hasil *reimbursement* beban pokok yang diajukan/disetujui Kementerian Perhubungan, ditambah dengan 10 persen dari hasil *approval* biaya tersebut.

### Note:

- The container shipment revenue is coming from the freight transported by all ships, which at the same time becomes a reduction of subsidy from the Directorate General of Sea Transportation in the invoice reimbursement.
- PSO is revenue from the reimbursement of the principal expense submitted/approved by the Ministry of Transportation, plus 10 percent of the approved expense.

## SEGMENT PENDAPATAN SEWA

Perseroan memiliki lahan seluas 10.003 m<sup>2</sup> di Kawasan Pelindo Tanjung Priok, Jakarta. Pada 2019, realisasi pendapatan dari segmen sewa tanah, gudang, dan lahan mencapai Rp1,98 miliar yang menurun 45,2 persen dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar Rp3,61 miliar, sedangkan target RKAP sebesar Rp3,52 miliar. Penurunan ini dikarenakan tidak terjadi perpanjangan sewa tanah dengan PT Buana Amanah Karya yang berakhir pada Juni 2019.

## RENTAL PROCEEDS SEGMENT

The Company owns a land area of 10,003 m<sup>2</sup> in the Pelindo Tanjung Priok Estate, Jakarta. In 2019, the realization of revenue from the land and warehouse rental segment reached Rp1.98 billion, down 45.2 percent compared to the previous year's achievement of Rp3.61 billion, while the RKAP target was set at Rp3.52 billion. This decrease was due to the termination of land lease by PT Buana Amanah Karya that ended in June 2019.

## SEGMENT BONGKAR MUAT DAN KEAGENAN

### 1. Usaha Keagenan

Pada 2019, realisasi pendapatan dari segmen usaha keagenan dan *sub-agent* mencapai Rp3,92 miliar yang memenuhi 54 persen target RKAP 2019 sebesar Rp7,27 miliar. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan realisasi kegiatan keagenan pada 2019 berjumlah 510 *calls* yang tidak memenuhi target 1.085 *calls*, sedangkan pada 2018 terealisasi sebanyak 950 *calls*.

## STEVEDORING AND AGENCY BUSINESS SEGMENT

### 1. Agency Business

In 2019, the realization of revenue from the agency and sub-agency business reached Rp3.92 billion, achieving 54 percent of the 2019 RKAP target of Rp7.27 billion. The non-achievement was due to the lower realization of agency activities in 2019 amounting to 510 calls that missed the target of 1,085 calls, while in 2018 there were 950 calls.

### Kegiatan Keagenan Kapal Selama 2019 Agency Business Activities in 2019

No.	Cabang Branch	Jumlah Call Total Call	
		2019	2018
1	Pusat	5	35
2	Banyuwangi	36	30
3	Benoa	107	50
4	Berau	158	582
5	Manado	79	115
6	Semarang	57	56
7	Tanjung Priok	28	35
8	Surabaya	27	11
9	Panjang	23	21
10	Meulaboh	17	15
<b>Jumlah Total</b>		<b>537</b>	<b>950</b>

### 2. Bongkar Muat dan Layanan Terminal

Layanan pemindahan barang dari dan ke kapal pengangkut yang bersifat *door-to-door service* ini dijalankan oleh PT Dharma Lautan Nusantara selaku anak perusahaan. Pada 2019, realisasi pendapatan dari segmen bongkar muat mencapai Rp27,34 miliar atau menurun 38,4 persen dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar Rp44,4 miliar, sedangkan target RKAP 2019 sebesar Rp51,67 miliar. Penurunan tersebut dikarenakan terdapat sejumlah kegiatan usaha bongkar muat yang tidak berjalan sesuai dengan RKAP, sehingga keseluruhan realisasi berada di bawah RKAP.

### 3. Transshipment

Perseroan melayani alih muatan (*transshipment*) batu bara menggunakan dua kapal *time charter* melalui PT Dharma Lautan Nusantara selaku anak perusahaan. Pada 2019, Perseroan merealisasikan pendapatan sebesar Rp337,6 juta dari segmen ini yang memenuhi 2,2 persen dari target RKAP 2019 sebesar Rp15 miliar.

### 2. Stevedoring and Terminal Services

This door-to-door service for moving goods from and to transport vessels is carried out by PT Dharma Lautan Nusantara as a subsidiary. In 2019, the revenue from the stevedoring segment reached Rp27.34 billion, down 38.4 percent compared to the previous year's achievement of Rp44.4 billion, while the 2019 RKAP target was set at Rp51.67 billion. The decrease was due to a number of stevedoring business activities that did not run in accordance with the RKAP, so that the overall realization was below the RKAP.

### 3. Transshipment

The Company serves coal transshipment using two time-charter vessels operated by PT Dharma Lautan Nusantara as its subsidiary. In 2019, the Company realized revenues of Rp337.6 million from this segment which reached 2.2 percent of the 2019 RKAP target of Rp15 billion.



# TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

## Operating Overview per Business Segment

### ARMADA OPERASIONAL

Perseroan mengelola kapal milik dan kapal *charter* (kapal *time charter* dan kapal kerja sama operasi/ KSO) sesuai dengan regulasi yang berlaku pada industri pelayaran kargo angkutan laut, di antaranya International Maritime Organization (IMO), International Safety Management (ISM) Code, International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code yang merupakan bagian dari Safety of Life at Sea (SOLAS), Marine Pollution, serta Standards of Training, Certification, and Watchkeeping (STCW).

Pada kapal *charter*, batas pengelolaan tercantum dalam perjanjian kontrak *time charter* dengan pihak *owner*. Sementara itu, pada kapal milik bergantung pada penerapan Planning Maintenance System (PMS) dan Safety Management System, serta ketersediaan atau distribusi *spare part*. Pengelolaan yang baik akan berdampak pada kelancaran setiap kegiatan operasi dengan memerhatikan aspek kesehatan, lingkungan, dan keselamatan kerja. *Monitoring* dilakukan selama kegiatan operasi, mulai dari *loading*, *sailing*, hingga *discharging*, dilengkapi dengan laporan *noon report* dan *additional report* pada setiap kapal.

Hingga akhir 2019, Perseroan mengoperasikan 17 armada terdiri atas dua unit kapal curah kering, tiga unit kapal tunda pelabuhan, satu unit tongkang, lima unit kapal berjangka (*time charter*), dua unit kapal kerja sama operasi (KSO), dan empat unit kapal *general cargo* dari penugasan Kementerian Perhubungan RI terkait program Tol Laut.

### Armada Operasional 2019 2019 Operational Fleet

No.	Armada Fleet	Status Kapal Ship Status	Bobot Mati Deadweight	Realisasi 2019 Realization		
				Keterangan Information	Volume Produksi Production Volume	Rp 000 In Thousand Rupiah
1	MV Dharma Lautan Intan	Kapal milik Owned ship	DWT: 55.000-57.000 MT	<ul style="list-style-type: none"> <li>10-12 knots</li> <li>5 hatch</li> <li>4 electric hydraulic with SWL 30 MT</li> </ul>	197.620 MT	37.877.023
2	MV Dharma Lautan Ruby	Kapal milik Owned ship	DWT: 55.000-58.000 MT	<ul style="list-style-type: none"> <li>10-12 knots</li> <li>5 hatch</li> <li>4 electric hydraulic with SWL 30 MT</li> </ul>	147.041 MT	29.277.247

### OPERATIONAL FLEET

The Company's fleet consists of own, time charter and joint operation ships managed in accordance with applicable regulations on sea cargo shipping industry, including the International Maritime Organization (IMO), International Safety Management (ISM) Code, International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code which is part of the Safety of Life at Sea (SOLAS), Marine Pollution, as well as Standards of Training, Certification, and Watchkeeping (STCW).

For the time charter ships, the management boundaries are stated in the contract agreed by the owner. Meanwhile, the own ships are managed based on the Planning Maintenance System (PMS) and Safety Management System, as well as the availability or distribution of spare parts. Good management is applied with due respect to health, environment and work safety to smoothen the ship operations. Monitoring is carried out along the operations, from loading, sailing to discharging, supplemented by noon reports and additional reports of each ship.

As of 2019, the Company operates a fleet of 17 ships consisting of two bulk carriers, three harbor tugs, one tug and barge, five time-charter units, two joint operation ships, and four general cargo ships from the Ministry of Transportation's assignment related to the Sea Toll program.

No.	Armada Fleet	Status Kapal Ship Status		Bobot Mati Deadweight	Realisasi 2019 Realization		
					Keterangan Information	Volume Produksi Production Volume	Rp 000 In Thousand Rupiah
3	TB Daya Lautan II/TB TMJ Power	Kapal milik Owned ship	Tug	DWT: 825 tons	<ul style="list-style-type: none"> <li>8 knots</li> <li>Main engine: Mitsubishi S12 A2/2x1.000HP; 2.000 RPM</li> <li>Max. draft: 4,2 meter</li> </ul>	-	-
			Barge TMJ 3001	GT: 3.060	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. draft: 4,2 meter</li> </ul>	7.501 MT	337.551
4	KT Daya Lautan I	Kapal milik Owned ship		GT: 322	<ul style="list-style-type: none"> <li>Main engine: Yanmar-6EY22AW (1.800 PS x 2 set)</li> <li>Towing capacity: 43,5 ton (TW Hook SWL Ton)</li> </ul>	12	18.230.616
5	MV Aurora Christine	Time charter		DWT: 46.000-47.000 MT	<ul style="list-style-type: none"> <li>10-11 knots</li> <li>5 hatch</li> <li>4 electric hydraulic with SWL 25 MT</li> </ul>	468.998 MT	66.792.532
6	MV Amethyst	Time charter		DWT: 47.000-48.500 MT	<ul style="list-style-type: none"> <li>10-11 knots</li> <li>5 hatch</li> <li>4 crane</li> </ul>	281.000 MT	55.378.831
7	MV Asian Wisdom	Time charter		DWT: 47.000-48.500 MT	<ul style="list-style-type: none"> <li>10-11 knots</li> <li>5 hatch</li> <li>4 crane</li> </ul>	275.430 MT	52.764.409
8	MV Uni Order	Time charter		DWT: 47.000-48.500 MT	<ul style="list-style-type: none"> <li>10-11 knots</li> <li>5 hatch</li> <li>4 crane</li> </ul>	234.000 MT	48.221.595
9	KT Jayanegara 301	Time charter		GT: 400	<ul style="list-style-type: none"> <li>Main engine: Yanmar-6EY22AW (1.800 PS x 2 set)</li> <li>Towing capacity: 43,5 ton (TW Hook SWL Ton)</li> </ul>	12	18.230.616
10	KT Jayanegara 302	Time charter		GT: 400	<ul style="list-style-type: none"> <li>Main engine: Yanmar-6EY22AW (1.800 PS x 2 set)</li> <li>Towing capacity: 43,5 ton (TW Hook SWL Ton)</li> </ul>	12	18.230.616
11	Kendhaga Nusantara 03	Kapal SBU Tol Laut Sea toll ship		DWT: 4.300 MT	<ul style="list-style-type: none"> <li>12 knots</li> <li>Container capacity: In hold (54 x 20 FT), On deck (51 x 20 FT)</li> </ul>	7 voyages	10.047.749

## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### Operating Overview per Business Segment

No.	Armada Fleet	Status Kapal Ship Status	Bobot Mati Deadweight	Realisasi 2019 Realization		
				Keterangan Information	Volume Produksi Production Volume	Rp 000 In Thousand Rupiah
12	Kendhaga Nusantara 04	Kapal SBU Tol Laut Sea toll ship	DWT: 2.031 MT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 knots</li> <li>• 1 cargo crane</li> </ul>	8 voyages	10.111.891
13	Kendhaga Nusantara 13	Kapal SBU Tol Laut Sea toll ship	DWT: 2.647,51 MT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 knots</li> <li>• 1 cargo crane</li> </ul>	14 voyages	12.454.257
14	Kendhaga Nusantara 15	Kapal SBU Tol Laut Sea toll ship	DWT: 1.766 MT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 knots</li> <li>• 1 cargo crane</li> </ul>	13 voyages	13.019.034
15	Voyage Charter	Kapal SBU Tol Laut Sea toll ship	DWT: 53.000-56.000 MT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10-11 knots</li> <li>• 5 hatch</li> <li>• 4 crane</li> </ul>	827.106 MT	193.590.320

## KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

### Company's Financial Performance

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Adapun Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan (Parker Randall International) dan mendapat opini wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian PT DJAKARTA LLOYD (Persero) dan entitas anak, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

#### ASET

Total aset Perseroan pada 2019 mencapai Rp1,14 triliun atau meningkat 21,59 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp937,75 miliar. Peningkatan aset terutama berasal dari kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp202,46 miliar.

The financial description below refers to the Financial Statements for the years ended December 31, 2019 and 2018 presented in this Annual Report. The Financial Statements have been audited by the Heliantono & Partners Public Accountant Office (Parker Randall International) and given a fair view in all material respects, relating to the consolidated financial statements of PT DJAKARTA LLOYD (Persero) and its subsidiary, financial performance and consolidated cash flow for the year ended December 31, 2019 in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

#### ASSETS

The Company's total assets in 2019 reached Rp1.14 trillion, an increase of 21.59 percent from the previous year of Rp937.75 billion. The major contributor to the growth was an increase in non-current assets of Rp202.46 billion.

**Aset (dalam ribuan rupiah)**  
**Assets (in thousand rupiah)**

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Aset Lancar Current Assets	350.147.885	411.846.432	(61.698.547)	(14,98%)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	790.063.967	525.902.694	264.161.273	50,23%
<b>Jumlah Total</b>	<b>1.140.211.852</b>	<b>937.749.126</b>	<b>202.462.726</b>	<b>21,59%</b>

**ASET LANCAR**

Aset lancar tahun 2019 mencapai Rp350,15 miliar, menurun 14,98 persen atau Rp61,69 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp411,85 miliar. Penurunan ini disebabkan nilai kas dan setara kas berkurang sebanyak Rp103,12 miliar.

**CURRENT ASSETS**

Current assets in 2019 reached Rp350.15 billion, a decrease of 14.98 percent or Rp61.69 billion from Rp411.85 billion in 2018. This decrease was due to reduced cash and cash equivalents by Rp103.12 billion.

**Aset Lancar (dalam ribuan rupiah)**  
**Current Assets (in thousand rupiah)**

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Kas dan setara kas Cash and cash equivalents	41.991.869	145.112.280	(103.120.411)	(71,06%)
Piutang usaha pihak ketiga Trade receivables of third parties	134.843.076	111.297.163	23.545.913	21,16%
Piutang usaha pihak berelasi Trade receivable of related parties	80.380.569	101.520.526	(21.139.957)	(20,82%)
Aset keuangan lancar lainnya Other current assets	7.885.096	22.326.185	(14.441.089)	(64,68%)
Persediaan Inventories	25.904.119	11.806.206	14.097.913	119,41%
Biaya dibayar di muka dan uang muka Prepaid expenses and advances	33.931.816	17.395.673	16.536.143	95,06%
Pajak dibayar di muka Prepaid taxes	25.211.341	2.388.399	22.822.942	955,57%
<b>Jumlah Total</b>	<b>350.147.885</b>	<b>411.846.432</b>	<b>(61.698.547)</b>	<b>(14,98%)</b>

# KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

## Company's Financial Performance

### KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas tahun 2019 mencapai Rp41,99 miliar, menurun 71,06 persen atau sebesar Rp103,12 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp145,11 miliar. Penurunan tersebut disebabkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) terserap 100 persen.

### CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash and cash equivalents in 2019 reached Rp41.99 billion, a decrease of 71.06 percent or Rp103.12 billion from the previous year of Rp145.11 billion. The decrease was due to 100 percent absorption of the State Capital Participation Fund (PMN).

#### Kas dan Setara Kas (dalam ribuan rupiah) Cash and Cash Equivalents (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Kas Cash on hand	803.783	2.218.571	(1.414.788)	(63,77%)
Bank Cash in banks	26.188.086	141.445.509	(115.257.423)	(81,49%)
Deposito Time deposits	15.000.000	1.448.200	13.551.800	935,77%
<b>Jumlah Total</b>	<b>41.991.869</b>	<b>145.112.280</b>	<b>(103.120.411)</b>	<b>71,06%</b>

### PIUTANG USAHA

Piutang usaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi mengalami kenaikan 1,13 persen dari Rp212,82 miliar pada 2018 menjadi Rp215,22 miliar pada 2019 yang diperoleh dari kegiatan pengangkutan batu bara dan optimalisasi aset.

### TRADE RECEIVABLES

Trade receivables of third parties and related parties increased 1.13 percent from Rp212.82 billion in 2018 to Rp215.22 billion in 2019, generated from coal transport and asset optimization.

#### Piutang Usaha (dalam ribuan rupiah) Trade Receivables (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Pihak Berelasi – Neto Related parties – Net	80.380.569	101.520.526	(21.139.957)	(20,82%)
Pihak Ketiga – Neto Third parties – Net	134.843.076	111.297.163	23.545.913	21,16%
<b>Jumlah Total</b>	<b>215.223.645</b>	<b>212.817.689</b>	<b>2.405.956</b>	<b>1,13%</b>



**Daftar Piutang**  
List of Receivables

No.	Nama Debitur Debtor Name	Kategori Category	Umur Piutang (Hari) Aging of Receivables (Days)	Saldo per 31 Desember 2019 (Ribuan Rupiah) Balance as of December 31, 2019 (Thousand Rupiah)	Jenis Piutang Types of Receivable
<b>Pihak Berelasi Related Party</b>					
1	PT PLN (Persero)	BUMN SOE	0-30	80.380.569	Piutang jasa angkutan batu bara Receivables from coal transport services
<b>Pihak Ketiga Third Party</b>					
2	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Anak BUMN SOE Subsidiary	31-120	8.751.965	Piutang jasa angkutan batu bara Receivables from coal transport services
3	PT Buana Amanah Karya	Non-BUMN Non-SOE	31-120	4.543.267	Piutang jasa sewa lahan Receivables from land rental services
4	PT Mentari Sejati Perkasa	Non-BUMN Non-SOE	>350	2.529.391	Piutang jasa sewa <i>container</i> Receivables from container rental services
5	PT Melco Jaya Bahari	Non-BUMN Non-SOE	31-120	67.171.877	Piutang jasa angkutan batu bara Receivables from coal transport services
6	PT Kaltim Prima Coal	Non-BUMN Non-SOE	31-120	8.190.000	Piutang jasa sewa kapal Receivables from ship rental services
7	PT PLN Batubara	Anak BUMN SOE Subsidiary	0-30	11.225.998	Piutang jasa angkutan batu bara Receivables from coal transport services
8	PT Kreasi Energi Alam Batubara	Non-BUMN Non-SOE	31-120	11.597.889	Piutang jasa angkutan batu bara Receivables from coal transport services
9	Piutang Lainnya dengan nilai rata- rata Rp1 miliar Other Receivables with an average value of Rp1 billion	Non-BUMN Non-SOE	-	27.163.047	-

# KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

## Company's Financial Performance

### ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

Aset keuangan lancar lainnya mengalami penurunan 64,68 persen dari Rp22,33 miliar pada 2018 menjadi Rp7,89 miliar pada 2019. Hal ini disebabkan adanya penurunan piutang lain-lain sebesar Rp12,93 miliar dan penurunan pendapatan yang masih harus diterima dari aktivitas bongkar muat pada entitas anak sebesar Rp1,51 miliar.

### OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS

Other current financial assets decreased by 64.68 percent from Rp22.33 billion in 2018 to Rp7.89 billion in 2019. This was due to a decrease in other receivables by Rp12.93 billion and a decrease of Rp1.51 billion in revenue from loading and unloading services run by the subsidiary.

#### Aset Keuangan Lancar Lainnya (dalam ribuan rupiah) Other Current Financial Assets (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Piutang lain-lain – Neto Other receivables – Net	7.328.800	20.263.421	(12.934.621)	(63,83%)
Pendapatan yang masih harus diterima Accrued revenue	556.296	2.062.764	(1.506.468)	(73,03%)
<b>Jumlah Total</b>	<b>7.885.096</b>	<b>22.326.185</b>	<b>(14.441.089)</b>	<b>(64,68%)</b>

### PERSEDIAAN

Persediaan mengalami peningkatan 119,41 persen dari Rp11,81 miliar pada 2018 menjadi Rp25,90 miliar pada 2019. Peningkatan tersebut berasal dari kenaikan persediaan bunker sebesar Rp14,23 miliar. Adapun Perseroan tidak memiliki persediaan yang digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya.

### INVENTORIES

Inventories jumped 119.41 percent from Rp11.81 billion in 2018 to Rp25.90 billion in 2019. The Rp14.23 billion increase in bunker inventory was the major contributor. The Company does not have inventories that are used as collateral for liabilities and other loans.

#### Persediaan (dalam ribuan rupiah) Inventories (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Persediaan bunker Bunker inventory	25.893.514	11.665.115	14.228.399	121,97%
Alat bongkar mekanik Mechanical unloading equipment	10.605	141.091	(130.486)	(92,48%)
<b>Jumlah Total</b>	<b>25.904.119</b>	<b>11.806.206</b>	<b>14.097.913</b>	<b>119,41%</b>

### BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA

Biaya dibayar di muka mengalami kenaikan 265,76 persen atau sebesar Rp15,21 miliar, dari Rp5,72 miliar pada 2018 menjadi Rp20,93 miliar pada 2019.

### PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

Prepaid expenses increased 265.76 percent or as much as Rp15.21 billion, from Rp5.72 billion in 2018 to Rp20.93 billion in 2019. This was due to an

Hal ini disebabkan adanya peningkatan asuransi dibayar di muka yang merupakan saldo asuransi MV Dharma Lautan Intan dan kenaikan bank garansi kepada PT Pertamina (Persero).

increase in prepaid insurance premium which was an insurance balance of MV Dharma Lautan Intan and an increase in bank guarantee from PT Pertamina (Persero).

Di sisi lain, uang muka juga mengalami peningkatan 11,36 persen atau sebesar Rp1,33 miliar, dari Rp11,67 miliar menjadi Rp13 miliar yang disebabkan kenaikan uang muka operasional (uang muka kerja dan uang muka usaha).

Similarly, the advances also increased by 11.36 percent or Rp1.33 billion, from Rp11.67 billion to Rp13 billion due to an increase in operating advance fee (working advances and business advances).

#### Biaya Dibayar di Muka dan Uang Muka (dalam ribuan rupiah) Prepaid Expenses and Advances (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Biaya dibayar di muka Prepaid expenses	20.933.232	5.723.264	15.209.968	265,76%
Uang muka Advances	12.998.583	11.672.409	1.326.174	11,36%
<b>Jumlah Total</b>	<b>33.931.816</b>	<b>17.395.673</b>	<b>16.536.143</b>	<b>95,06%</b>

#### PAJAK DIBAYAR DI MUKA

Pajak dibayar di muka tahun 2019 mencapai Rp25,21 miliar, meningkat 955,57 persen dari Rp2,39 miliar pada 2018. Kenaikan tersebut disebabkan peningkatan pada PPN masukan sebesar 699,13 persen atau Rp16,7 miliar, juga timbulnya pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 dan 22, serta klaim pajak.

#### PREPAID TAXES

Prepaid taxes in 2019 reached Rp25.21 billion, an increase of 955.57 percent from Rp2.39 billion in 2018. The increase was due to a rise in VAT revenue of 699.13 percent or Rp16.7 billion, also the incurred income tax (PPh) Articles 23 and 22, and tax claims.

#### Pajak Dibayar di Muka (dalam ribuan rupiah) Prepaid Taxes (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
PPN masukan VAT revenue	19.084.473	2.388.142	16.696.331	699,13%
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	1.077.615	-	1.077.615	100,00%
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	36.001	-	36.001	100,00%
PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	-	256.468	(256.468)	(100,00%)
Klaim pajak Tax claim	5.013.251	-	5.013.251	100,00%
<b>Jumlah Total</b>	<b>25.211.341</b>	<b>2.388.399</b>	<b>22.822.942</b>	<b>955,57%</b>

# KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

## Company's Financial Performance

### ASET TIDAK LANCAR

Aset tidak lancar tahun 2019 mencapai Rp790,06 miliar, meningkat 50,23 persen atau Rp264,16 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp525,90 miliar. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan dua unit armada kapal milik, serta pengakuan aset tetap berupa tanah dan bangunan.

### NON-CURRENT ASSETS

Non-current assets in 2019 reached Rp790.06 billion, an increase of 50.23 percent or Rp264.16 billion compared to 2018 of Rp525.90 billion. This increase was due to the addition of two units of the owned ship, as well as recognition of fixed assets in the form of land and buildings.

#### Aset Tidak Lancar (dalam ribuan rupiah) Non-Current Assets (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Aset tetap Fixed assets	578.366.461	302.925.315	275.441.146	90,93%
Aset dalam konstruksi ( <i>shipset</i> ) Fixed assets in construction ( <i>shipset</i> )	56.958.492	66.495.352	(9.536.860)	(14,34%)
Aset pajak tangguhan Deferred tax assets	139.679.959	141.324.910	(1.644.951)	(1,16%)
Aset tidak lancar lainnya Other non-current assets	15.059.055	15.157.118	(98.063)	(0,65%)
<b>Jumlah Total</b>	<b>790.063.967</b>	<b>525.902.694</b>	<b>264.161.273</b>	<b>50,23%</b>

### ASET TETAP

Aset tetap mengalami peningkatan 90,93 persen dari Rp302,93 miliar pada 2018 menjadi Rp578,37 miliar pada 2019 dikarenakan:

- Penambahan dua unit armada kapal milik, yaitu satu unit *tug & barge* (TB Daya Lautan II) senilai Rp17,39 miliar dan satu unit *handymax* (MV Dharma Lautan Ruby) senilai Rp175,88 miliar.
- Pengakuan aset tetap berupa tanah dan bangunan senilai Rp44,69 miliar di beberapa lokasi yang terdapat legalitas perusahaan (sertifikat tanah dengan status *clean and clear*).
- Penambahan aset tetap dalam konstruksi berupa pengakuan progres pekerjaan fisik sebesar 47,97 persen atas pekerjaan pembangunan satu unit kapal tanker 6.500 LTDW dengan pembiayaan senilai Rp294,47 miliar.

### FIXED ASSETS

Fixed assets increased 90.93 percent from Rp302.93 billion in 2018 to Rp578.37 billion in 2019 due to:

- Addition of two units of the owned ships, namely one unit of *tug & barge* (TB Daya Lautan II) worth Rp17.39 billion and one unit of *handymax* (MV Dharma Lautan Ruby) worth Rp175.88 billion.
- Recognition of fixed assets in the form of land and buildings valued at Rp44.69 billion in several locations where the Company has the legality (land certificates with clean and clear status).
- Addition of fixed assets in construction (*shipset*) in the form of recognition of the physical work progress of 47.97 percent over the construction work of a 6,500 LTDW tanker with the cost of Rp294.47 billion.

**Aset Tetap (dalam ribuan rupiah)**  
**Fixed Assets (in thousand rupiah)**

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Biaya Perolehan Cost of Revenue				
Aset tetap pelayaran Shipping fixed assets	735.647.798	542.382.928	193.264.870	35,63%
Aset tetap non-pelayaran Non-shipping fixed assets	81.334.461	32.955.742	48.378.719	146,80%
Aset tetap sewa pembiayaan Finance lease fixed assets	-	854.000	(854.000)	(100,00%)
Aset tetap dalam konstruksi Fixed assets in construction (shipset)	93.156.287	40.328.596	52.827.691	130,99%
Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai Accumulated depreciation and impairment	229.815.958	211.639.824	18.176.134	8,59%
Dikurangi penurunan nilai Deducted by impairment	-	101.956.127	(101.956.126)	(100,00%)
<b>Jumlah Total</b>	<b>578.366.461</b>	<b>302.925.315</b>	<b>275.441.146</b>	<b>90,93%</b>

**ASET DALAM KONSTRUKSI**

Aset dalam konstruksi (ADK) merupakan *shipset* atas pembangunan 24 Kapal Caraka Jaya Tahap III sesuai dengan perjanjian penerusan pinjaman Nomor SLA-725/DP3/1993 tanggal 27 September 1993 dan SLA-727/DP3/1993 tanggal 6 Oktober 1993. Hingga 31 Desember 2007, terdapat 14 *shipset* yang berada dalam konstruksi di sembilan galangan kapal berbeda, yakni PT PAL (Surabaya), PT Dok dan Perkapalan (Surabaya), PT Dumas Tanjung Perak Shipyard (Surabaya), PT Dok Kodja Bahari (Jakarta), PT Inggom Shipyard (Jakarta), PT Janata Marina Indah (Semarang), PT Industri Kapal Indonesia (Makassar), PT Intan Sengkunyit (Palembang), dan PT Noahtu Shipyard (Lampung).

ADK mengalami penurunan 14,34 persen dari Rp66,49 miliar pada 2018 menjadi Rp56,96 miliar pada 2019 yang disebabkan adanya provisi penurunan nilai sebesar Rp9,54 miliar.

**FIXED ASSETS IN CONSTRUCTION**

Fixed assets in construction are shipset in the construction of 24 ships of Caraka Jaya Phase III following the loan forwarding agreement Number SLA-725/DP3/1993 dated September 27, 1993 and SLA-727/DP3/1993 dated October 6, 1993. As of December 31, 2007, there were 14 ships under construction in nine different shipyards, namely PT PAL (Surabaya), PT Dok dan Perkapalan (Surabaya), PT Dumas Tanjung Perak Shipyard (Surabaya), PT Dok Kodja Bahari (Jakarta), PT Inggom Shipyard (Jakarta), PT Janata Marina Indah (Semarang), PT Industri Kapal Indonesia (Makassar), PT Intan Sengkunyit (Palembang), and PT Noahtu Shipyard (Lampung).

The shipset decreased 14.34 percent from Rp66.49 billion in 2018 to Rp56.96 billion in 2019 due to impairment provision of Rp9.54 billion.



# KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

## Company's Financial Performance

### Aset dalam Konstruksi (dalam ribuan rupiah)

#### Fixed Assets in Construction (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Biaya perolehan Cost of revenue	237.073.807	237.073.807	0	0,00%
Provisi penurunan nilai ADK Shipset Impairment provision of shipset	(180.115.315)	(170.578.455)	(9.536.860)	5,59%
<b>Jumlah Total</b>	<b>56.958.492</b>	<b>66.495.352</b>	<b>(9.536.860)</b>	<b>(14,34%)</b>

### ASET PAJAK TANGGUHAN

Aset pajak tangguhan pada 2019 sebesar Rp139,68 miliar, menurun 1,16 persen atau sebesar Rp1,64 miliar dibandingkan pada 2018 sebesar 141,32 miliar, yang disebabkan penurunan aset pajak tangguhan dari entitas anak.

### DEFERRED TAX ASSETS

Deferred tax assets in 2019 reached Rp139.68 billion, decreasing 1.16 percent or Rp1.64 billion compared to 2018 amounted to 141.32 billion, which was caused by a decrease in deferred tax assets of the subsidiary.

### Aset Pajak Tangguhan (dalam ribuan rupiah)

#### Deferred Tax Assets (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Perusahaan The Company	139.271.895	139.710.741	(438.846)	5,59%
Entitas anak Subsidiary	408.063	1.614.169	(1.206.106)	(74,72%)
<b>Jumlah Total</b>	<b>139.679.959</b>	<b>141.324.910</b>	<b>(1.644.951)</b>	<b>(1,16%)</b>

### ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

Aset tidak lancar lainnya mengalami penurunan 0,65 persen atau sebesar Rp98,06 juta, dari Rp15,16 miliar pada 2018 menjadi Rp15,06 miliar pada 2019. Hal ini disebabkan tidak terdapat penambahan rekening antar kantor (RAK) *joint account* antara Perseroan dengan PT Dharma Lautan Nusantara atas kegiatan operasional di Cabang Pangkalan Susu dan piutang pembelian aset tetap masih terus diupayakan penagihannya.

### OTHER NON-CURRENT ASSETS

Other non-current assets decreased by 0.65 percent or Rp98.06 million, from Rp15.16 billion in 2018 to Rp15.06 billion in 2019. This was due to the absence of additional inter-office joint account between the Company and PT Dharma Lautan Nusantara for operational activities at the Pangkalan Susu Branch and the receivables for the sale of fixed assets are still being collected.

**Aset Tidak Lancar Lainnya (dalam ribuan rupiah)**  
**Other Non-Current Assets (in thousand rupiah)**

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Biaya ditangguhkan angkutan batu bara Deferred charges for coal transportation	2.397.000	-	2.397.000	100,00%
Aset tak berwujud – Neto Intangible assets – Net	1.364.702	-	1.364.702	100,00%
Armada kapal Fleet of ships	39.320.954	39.320.954	0	0,00%
Uang jaminan Bail	2.529.055	2.709.732	(180.677)	(6,67%)
Joint account Pangkalan Susu Joint account of Pangkalan Susu	-	3.007.958	(3.007.958)	(100,00%)
Piutang pembelian aset tetap Receivables from fixed asset sales	-	2.900.000	(2.900.000)	(100,00%)
Lain-lain Others	13.645.168	11.416.297	2.228.871	19,52%
Dikurangi: Deducted:				
Provisi penurunan nilai armada kapal Impairment provision of fleet value	(39.320.954)	(39.320.954)	0	0,00%
Provisi penurunan nilai uang jaminan Impairment provision of bail value	(1.976.870)	(1.976.870)	0	0,00%
Provisi nilai piutang pembelian aset tetap Value provision of receivables from sale of fixed assets	(2.900.000)	(2.900.000)	0	0,00%
<b>Jumlah Total</b>	<b>15.059.055</b>	<b>15.157.118</b>	<b>(98.063)</b>	<b>(0,65%)</b>

**LIABILITAS**

Liabilitas Perseroan mengalami kenaikan 32,89 persen atau sebesar Rp153,23 miliar, dari Rp465,85 miliar pada 2018 menjadi Rp619,08 miliar pada 2019 yang mayoritas ditimbulkan dari peningkatan utang bank (liabilitas jangka panjang).

**Liabilitas (dalam ribuan rupiah)**  
**Liabilities (in thousand rupiah)**

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Liabilitas jangka pendek Current liabilities	196.300.238	171.377.813	24.922.425	14,54%
Liabilitas jangka panjang Non-Current liabilities	422.779.955	294.469.849	128.310.106	43,57%
<b>Jumlah Total</b>	<b>619.080.193</b>	<b>465.847.662</b>	<b>153.232.531</b>	<b>32,89%</b>

**LIABILITIES**

The Company's liabilities increased 32.89 percent or Rp153.23 billion, from Rp465.85 billion in 2018 to Rp619.08 billion in 2019, contributed mainly by an increase in bank loans (non-current liabilities).

# KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

## Company's Financial Performance

### LIABILITAS JANGKA PENDEK

Liabilitas jangka pendek tahun 2019 mencapai Rp196,30 miliar, meningkat 14,54 persen dari Rp171,38 miliar pada 2018, karena adanya peningkatan pendapatan diterima di muka.

### CURRENT LIABILITIES

Current liabilities in 2019 reached Rp196.30 billion, an increase of 14.54 percent from Rp171.38 billion in 2018, due to an increase in prepaid income.

#### Liabilitas Jangka Pendek (dalam ribuan rupiah) Current Liabilities (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Utang usaha Trade payables	154.959.774	139.071.223	15.888.551	11,42%
Utang pajak Tax payables	1.043.066	1.490.812	(447.746)	(30,03%)
Utang jangka pendek lainnya Other payables	1.984.963	1.726.923	258.040	14,94%
Beban akrual Accrued Expense	6.387.199	6.379.248	7.951	0,12%
Pendapatan diterima di muka Prepaid income	11.675.587	2.606.575	9.069.012	347,93%
Bagian utang jatuh tempo satu tahun Current maturity of long-term liabilities	20.249.649	20.103.032	146.617	0,73%
<b>Jumlah Total</b>	<b>196.300.238</b>	<b>171.377.813</b>	<b>24.922.425</b>	<b>14,54%</b>

### UTANG USAHA

Utang usaha meningkat 11,42 persen, dari Rp139,07 miliar pada 2018 menjadi Rp154,96 miliar pada 2019 karena kenaikan utang usaha pihak ketiga, yang mayoritas ditimbulkan dari kegiatan pengangkutan batu bara. Sebagian utang usaha merupakan utang kreditor konkruen sesuai Putusan Homologasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Nomor 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 Desember 2013

### TRADE PAYABLES

The trade payables grew 11.42 percent from Rp139.07 billion in 2018 to Rp154.96 billion in 2019 due to an increase in third party trade payables, generated mainly by coal transportation activities. Part of the trade payables are concurrent creditors' debt under the Homologation Decree Number 36/ Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST dated December 19, 2013 issued by the Commercial Court of the Central Jakarta District Court.

#### Utang Usaha (dalam ribuan rupiah) Trade Payables (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Pihak berelasi Related party	20.228.560	20.228.560	0	0,00%
Pihak ketiga Third party	134.731.214	118.842.663	15.888.551	13,37%
<b>Jumlah Total</b>	<b>154.959.774</b>	<b>139.071.223</b>	<b>15.888.551</b>	<b>11,42%</b>

**UTANG PAJAK**

Utang pajak pada 2019 mencapai Rp1,04 miliar, menurun 30,03 persen atau sebesar Rp447,74 juta dari tahun sebelumnya sebesar Rp1,49 miliar yang disebabkan berkurangnya PPh Pasal 29 (PPh kurang bayar) sebesar Rp1,03 miliar, meskipun PPh Pasal 21 (PPh atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain terkait pekerjaan) mengalami kenaikan 334,29 persen sebesar Rp350,74 juta.

**TAX PAYABLES**

Tax payables in 2019 reached Rp1.04 billion, a decrease of 30.03 percent or Rp444.74 million from 2018 amounting to Rp1.49 billion due to reduced Income Tax Article 29 (underpayment of Income Tax) of Rp1.03 billion, despite Income Tax Article 21 (Income tax on salaries, wages, honorarium, benefits, and other work-related payments) increased 334.29 percent of Rp350.74 million.

**Utang Pajak (dalam ribuan rupiah)**  
**Tax Payables (in thousand rupiah)**

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
PPh Pasal 21 Income Tax 21	455.666	104.922	350.744	334,29%
PPh Pasal 23/ Income Tax 23	89.567	74.312	15.255	20,53%
PPh Pasal 29 Income Tax 29	30.025	1.058.339	(1.028.314)	(97,16%)
Pajak Pertambahan Nilai Value-Added Tax	460.808	237.385	223.423	94,12%
PPh Pasal 4 Ayat (2) Income Tax Article 4 Verse (2)	7.000	15.854	(8.854)	(55,85%)
<b>Jumlah Total</b>	<b>1.043.066</b>	<b>1.490.812</b>	<b>(447.746)</b>	<b>(30,03%)</b>

**UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA**

Utang jangka pendek lainnya mengalami kenaikan 14,94 persen, dari Rp1,73 miliar pada 2018 menjadi Rp1,98 miliar pada 2019 yang disebabkan kenaikan pada bagian lain-lain sebesar Rp1,23 miliar.

**OTHER CURRENT PAYABLES**

Other current payables increased by 14.94 percent, from Rp1.73 billion in 2018 to Rp1.98 billion in 2019 due to an increase in the portion of others of Rp1.23 billion.

**Utang Lain-Lain (dalam ribuan rupiah)**  
**Other Payables (in thousand rupiah)**

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Utang pesangon dan pensiun Deferred severance and retirement payment	195.894	1.166.786	(970.892)	(83,21%)
Lain-lain Others	1.789.069	560.137	1.228.932	219,40%
<b>Jumlah Total</b>	<b>1.984.963</b>	<b>1.726.923</b>	<b>258.040</b>	<b>14,94%</b>

## KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

### Company's Financial Performance

#### BEBAN AKRUAL

Beban akrual tahun 2019 mencapai Rp6,39 miliar, meningkat 0,12 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp6,38 miliar yang disebabkan adanya kenaikan biaya kantor hingga 80,28 persen.

#### ACCRUED EXPENSES

The accrued expense in 2019 reached Rp6.39 billion, an increase of 0.12 percent from the previous year of Rp6.38 billion due to an increase in office expenses by 80.28 percent.

#### Beban Akrual (dalam ribuan rupiah) Accrued Expense (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Biaya kantor Office expenses	5.688.782	3.155.527	2.533.255	80,28%
Gaji dan upah Salary and wage	698.416	3.223.721	(2.525.305)	(78,34%)
<b>Jumlah Total</b>	<b>6.387.199</b>	<b>6.379.248</b>	<b>7.951</b>	<b>0,12%</b>

#### PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Pendapatan diterima di muka tahun 2019 meningkat 347,93 persen atau Rp9,06 miliar. Hal ini disebabkan adanya kenaikan pendapatan batu bara, dari nihil pada 2018 menjadi Rp11,68 miliar pada 2019.

#### PREPAID INCOME

The unearned revenue in 2019 grew 347.93 percent as much as Rp9.06 billion, due to an increase in coal revenue, from zero in 2018 to Rp11.68 billion in 2019.

#### Pendapatan Diterima di Muka (dalam ribuan rupiah) Prepaid Income (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Pendapatan batu bara Coal revenue	11.675.587	-	11.675.587	100,00%
Pendapatan sewa tanah Land rental revenue	-	1.837.015	(1.837.015)	(100,00%)
Pendapatan bongkar muat Stevedoring revenue	-	769.559	(769.559)	(100,00%)
<b>Jumlah Total</b>	<b>11.675.587</b>	<b>2.606.575</b>	<b>9.069.012</b>	<b>347,93%</b>

#### UTANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

Utang jatuh tempo dalam satu tahun meningkat 0,73 persen, dari Rp20,10 miliar pada 2018 menjadi Rp20,25 miliar pada 2019 yang disebabkan kenaikan pinjaman bank akibat *refinancing* yang dilakukan Perseroan.

#### CURRENT MATURITY OF LONG-TERM LIABILITIES

The debts that will due in one year increased 0.73 percent, from Rp20.10 billion in 2018 to Rp20.25 billion in 2019 due to an increase in bank loans used for refinancing by the Company.



**Utang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun (dalam ribuan rupiah)**  
**Current Maturity of Long-Term Liabilities (in thousand rupiah)**

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Pinjaman bank Bank loans	20.075.250	19.846.981	228.269	1,15%
Sewa pembiayaan Finance leases	174.399	256.051	(81.652)	(31,89%)
<b>Jumlah Total</b>	<b>20.249.649</b>	<b>20.103.032</b>	<b>146.617</b>	<b>0,73%</b>

**LIABILITAS JANGKA PANJANG**

Liabilitas jangka panjang tahun 2019 mencapai Rp422,78 miliar, meningkat 43,57 persen atau Rp128,31 miliar dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp294,47 miliar. Kenaikan ini ditimbulkan oleh peningkatan utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang yang merupakan utang atas *refinancing* pembelian kapal, kredit investasi kapal, serta utang bank atas modal kerja, sehingga saldo akhir utang bank per 31 Desember 2019 menjadi Rp252,67 miliar atau naik 107,91 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp121,53 miliar.

**Liabilitas Jangka Panjang (dalam ribuan rupiah)**  
**Non-Current Liabilities (in thousand rupiah)**

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Utang sewa pembiayaan Obligation under finance leases	-	90.400	(90.400)	(100,00%)
Utang bank Bank loans	252.670.788	121.526.757	131.144.031	107,91%
Rekening dana investasi Investment fund accounts	168.361.692	171.578.794	(3.217.102)	(1,87%)
Liabilitas imbalan pascakerja Post-employment benefit liabilities	1.747.474	1.273.898	473.576	37,18%
<b>Jumlah Total</b>	<b>422.779.954</b>	<b>294.469.849</b>	<b>128.310.105</b>	<b>43,57</b>

**UTANG SEWA PEMBIAYAAN**

Utang sewa pembiayaan jangka panjang tahun 2019 bersaldo nihil karena telah jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Utang tersebut merupakan sewa pembiayaan untuk dua unit kendaraan dinas merek Toyota antara Perseroan dan PT Maybank Indonesia Finance.

**NON-CURRENT LIABILITIES**

Non-current liabilities in 2019 reached Rp422.78 billion, an increase of 43.57 percent or Rp128.31 billion compared to 2018 of Rp294.47 billion. This was caused by an increase in long-term loans from banks and other financial institutions, used for refinancing the ship purchases, ship investment loans, and bank loans on working capital, so that the final balance of bank loan as of December 31, 2019, became Rp252.67 billion, up by 107.91 percent from the previous year amounted to Rp121.53 billion.

**OBLIGATION UNDER FINANCE LEASES**

The 2019 obligation under finance leases has zero balance because it has matured in one year. The debt is a finance lease for two units of official Toyota vehicles between the Company and PT Maybank Indonesia Finance.

# KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

## Company's Financial Performance

### Utang Sewa Pembiayaan (dalam ribuan rupiah)

#### Obligation Under Finance Leases (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun Debt due in one year	174.399	256.051	(81.652)	(31,89%)
Lebih dari satu tahun More than one year	-	128.079	(128.079)	(100,00%)
Dikurangi beban keuangan masa depan Deducted by future financial expense	-	(36.679)	36.679	100,00%
Dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun Deducted by debt due in one year	(174.399)	(256.051)	81.652	(31,89%)
<b>Jumlah Total</b>	<b>-</b>	<b>90.400</b>	<b>(90.400)</b>	<b>(100,00%)</b>

### UTANG BANK

Utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang meningkat 107,91 persen, dari Rp121,53 miliar pada 2018 menjadi Rp252,67 miliar pada 2019. Kenaikan tersebut ditimbulkan *refinancing* pembelian kapal tunda pelabuhan (KT Daya Lautan 1), *handymax* (MV Dharma Lautan Intan), *tug & barge* (TB Daya Lautan 2), kredit investasi kapal *handymax* (MV Dharma Lautan Ruby), serta utang bank atas modal kerja.

### BANK LOANS

The long-term loans from banks and financial institutions increased by 107.91 percent, from Rp121.53 billion in 2018 to Rp252.67 billion in 2019. This increase was due to *refinancing* for the purchase of a harbor tug (KT Daya Lautan 1), *handymax* (MV Dharma Lautan Intan), *tug & barge* (TB Daya Lautan 2), *handymax* ship investment credit (MV Dharma Lautan Ruby), and bank loans for working capital.

### Utang Bank (dalam ribuan rupiah)

#### Bank Loans (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Pihak berelasi Third parties	272.746.039	141.373.738	131.372.301	92,93%
Dikurangi pinjaman jatuh tempo kurang dari satu tahun Deducted by loans due less than one year	20.075.251	19.846.981	228.270	1,15%
<b>Jumlah Total</b>	<b>252.670.788</b>	<b>121.526.757</b>	<b>131.144.031</b>	<b>107,91%</b>

### REKENING DANA INVESTASI

Rekening dana investasi merupakan perjanjian pinjaman antara pemerintah Indonesia dan Perusahaan dengan Nomor RDI-019/DDI/1981 tanggal 9 Desember 1981 sebesar Rp2.888.989.949 dan Nomor RDI-323/DP3/1997 tanggal 9 Mei 1997 sebesar Rp83.584.904.293. Pada 6 Agustus 2007, dilaksanakan rapat yang dihadiri oleh Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Dirjen

### INVESTMENT FUND ACCOUNT

The investment fund account (RDI) is a loan agreement between the Government of Indonesia and the Company Number RDI-019/DDI/1981 dated December 9, 1981 amounting to Rp2,888,989,949 and Number RDI-323/DP3/1997 dated May 9, 1997 amounting to Rp83,584,904,293. On August 6, 2007, a meeting attended by the Directorate of Loan Forwarding, the Director General of Treasury

Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, dan DJAKARTA LLOYD mengenai *cut off* serta rekonsiliasi dengan hasil sesuai Laporan Keuangan 2018 (audited) senilai Rp171.578.794.404, terdiri atas pokok (Rp86.373.894.242) dan bunga (Rp85.204.900.162).

of the Ministry of Finance RI, and DJAKARTA LLOYD regarding the cut-off and reconciliation with outcome following the 2018 (audited) Financial Statements valued at Rp171,578,794,404, consisting of principal (Rp86,373,894,242) and interest (Rp85,204,900,162).

Berdasarkan perjanjian PKPU, Kementerian Keuangan membuat amandemen terhadap perjanjian RDI tersebut dengan Nomor AMA-172/RDI/019/DSMI/2015 dan AMA-173/RDI/323/DSMI/2015 tanggal 6 Januari 2015. Di dalam amandemen, dinyatakan bahwa pembayaran dijadwalkan ulang sampai dengan 31 Desember 2041 dengan masa tenggang hingga 30 Maret 2019. Perseroan telah membayar selama tiga triwulan sebesar Rp3,2 miliar, sehingga saldo akhir RDI tahun 2019 sebesar Rp168,36 miliar.

Based on the PKPU agreement, the Ministry of Finance made an amendment to the RDI agreement with number AMA-172/RDI/019/DSMI/2015 and AMA-173/RDI/323/DSMI/2015 dated January 6, 2015. The amendment states that payments were rescheduled until December 31, 2041 with a grace period until March 30, 2019. The Company has paid three quarters of Rp3.2 billion, so the final balance of RDI in 2019 amounted to Rp168.36 billion.

**Rekening Dana Investasi (dalam ribuan rupiah)**  
**Investment Fund Account (in thousand rupiah)**

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Pokok Principal	83.156.792	86.373.894	3.217.102	(3,72%)
Bunga Interest	85.204.900	85.204.900	0	0,00%
<b>Jumlah Total</b>	<b>168.361.692</b>	<b>171.578.794</b>	<b>(3.217.102)</b>	<b>(1,87%)</b>

**LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA**

Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti dilakukan oleh aktuaris independen dengan laporan nomor 119/PSAK/KKA.AB/MU/III/19 tanggal 14 Maret 2019 (entitas induk) dan nomor 111/PSAK/KKA.AB/MU/III/19 tanggal 6 Maret 2019 (entitas anak). Adapun liabilitas imbalan pascakerja pada 2019 meningkat 37,18 persen menjadi Rp1,75 miliar dari Rp1,27 miliar pada 2018.

**POST-EMPLOYMENT BENEFIT LIABILITIES**

The Present Value of Defined Benefit Liability is calculated by an independent actuary with report number 119/PSAK/KKA.AB/MU/III/19 dated March 14, 2019 (parent company) and number 111/PSAK/KKA.AB/MU/III/19 dated March 6, 2019 (subsidiary). The liability of post-employment benefits in 2019 increased 37.18 percent to Rp1.75 billion from Rp1.27 billion in 2018.

**Liabilitas Imbalan Pascakerja (dalam ribuan rupiah)**  
**Post-Employment Benefit Liabilities (in thousand rupiah)**

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Liabilitas imbalan kerja entitas induk Employee benefit liabilities in parent entity	1.661.829	1.273.898	387.931	30,45%

## KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

### Company's Financial Performance

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Saldo awal Initial balance	1.167.670	2.207.102	(1.039.432)	(47,09%)
Beban (pendapatan) Expense (revenue)	571.308	(1.396.259)	1.967.567	(140,92%)
Realisasi pembayaran manfaat Realization of benefits payment	-	(313.536)	313.536	(100,00%)
Iuran Perusahaan The Company's contribution	-	776.590	(776.590)	(100,00%)
Pendapatan komprehensif lainnya Other comprehensive revenue	(77.149)	1.273.898	(1.351.047)	(106,06%)
Liabilitas imbalan kerja entitas anak Employment benefits liability of subsidiary	85.645	-	85.645	100,00%
<b>Jumlah Total</b>	<b>1.747.474</b>	<b>1.273.898</b>	<b>473.576</b>	<b>37,18%</b>

#### EQUITY

Ekuitas Perseroan mencapai Rp521,13 miliar pada 2019, meningkat 10,43 persen atau sebesar Rp49,23 miliar dari Rp471,90 miliar pada 2018. Kenaikan tersebut disebabkan adanya peningkatan modal saham (Saham Seri A dan B) sebesar 22,24 persen atau Rp363,81 miliar. Di sisi lain, dana Penyertaan Modal Negara (PMN) menjadi nihil pada 2019 karena telah terserap 100 persen.

#### EQUITY

The Company's equity reached Rp521.13 billion in 2019, up by 10.43 percent or Rp49.23 billion compared to Rp471.90 billion in 2018. The increase mainly came from an increase in share capital (Series A and B Shares) by 22.24 percent or Rp363.81 billion. In addition, the Paid-in Capital of the Republic of Indonesia (PMN) became zero in 2019 because it has been absorbed by 100 percent.

#### Ekuitas (dalam ribuan rupiah)

#### Equity (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Modal saham (Saham Seri A dan B) Share capital (Series A and B Shares)	1.999.472.669	1.635.663.000	363.809.669	22,24%
Tambahan modal disetor Additional paid-in capital	1.427.000	1.427.000	0	0,00%
Cadangan umum General reserve	62.952	62.952	0	0,00%
Penyertaan modal negara Paid-in capital of the Republic of Indonesia	-	379.318.091	(397.318.091)	(100,00%)
Saldo rugi (defisit) Loss balance (deficit)	(1.478.939.799)	(1.543.617.143)	64.677.344	(4,19%)
Komponen ekuitas lainnya Other equity components	(901.636)	(961.611)	59.975	(6,24%)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Jumlah Ekuitas yang Dapat Didistribusikan kepada Total Equity Attributable to				
Pemilik entitas induk Parent entity	521.121.186	471.892.289	49.228.897	10,43%
Kepentingan non-pengendali Non-controlling interests	10.473	9.176	1.297	14,13%
<b>Jumlah Total</b>	<b>521.131.659</b>	<b>471.901.464</b>	<b>49.230.195</b>	<b>10,43%</b>

### PENDAPATAN USAHA

Perseroan mengantongi pendapatan usaha senilai Rp625,81 miliar pada 2019, meningkat 11,41 persen dari tahun sebelumnya sebesar 561,71 miliar. Capaian kinerja ini memenuhi 67 persen dari target RKAP 2019 sebesar Rp936,4 miliar. Peningkatan pendapatan usaha dikontribusikan oleh pertumbuhan segmen angkutan kontainer (tol laut) dan jasa pemanduan, masing-masing sebesar 250,16 persen dan 140,34 persen.

#### Pendapatan Usaha (dalam ribuan rupiah) Operating Revenue (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Angkutan Curah Bulk Shipment	491.910.258	477.908.580	14.001.678	2,93%
Jasa Pemanduan Harbor Tug	54.691.848	22.756.271	31.935.577	140,34%
Angkutan Kontainer (Tol Laut) Container Transport (Sea Toll)	45.632.930	13.031.892	32.601.038	250,16%
Transshipment	337.551	-	337.551	100,00%
Angkutan Curah Cair Liquid Bulk Shipment	-	-	-	0,00%
Angkutan Curah Lainnya Other Bulk Shipment	-	-	-	0,00%
Usaha Keagenan Agency Business	3.918.267	-	3.918.267	100,00%
Pendapatan Sewa Rental Proceeds	1.977.821	3.608.409	(1.630.588)	(45,19%)
Bongkar Muat dan Keagenan Stevedoring and Agency	27.343.200	44.400.822	(17.057.622)	(38,42%)
<b>Jumlah Total</b>	<b>625.811.875</b>	<b>561.705.974</b>	<b>64.105.901</b>	<b>11,41%</b>

### OPERATING REVENUES

The Company booked operating revenue of Rp625.81 billion in 2019, an increase of 11.41 percent from the previous year of Rp561.71 billion. This achievement met 67 percent of the 2019 target of Rp936.4 billion set in the Work Plan and Budget. The main contributors to the increase were the container transport (sea toll) and harbor tug segments, which grew 250.16 percent and 140.34 percent respectively.



# KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

## Company's Financial Performance

### BEBAN POKOK PENDAPATAN

Total beban pokok pendapatan Perusahaan pada 2019 mencapai Rp503,49 miliar atau naik 15,43 persen dari Rp436,19 miliar pada 2018. Usaha *freight* (angkutan batu bara) masih mendominasi kinerja Perseroan, sehingga beban pokok pendapatannya merupakan yang terbesar dengan kenaikan 4,64 persen dibanding tahun 2018. Adapun realisasi beban *harbour tug* dan angkutan kontainer (tol laut) mengalami peningkatan paling signifikan, tetapi sejalan dengan peningkatan pendapatan keduanya.

### COST OF REVENUE

The Company's total cost of revenue in 2019 reached Rp503.49 billion, up 15.43 percent from Rp436.19 billion in 2018. The coal transport (*freight*) still dominated the Company's performance, so that its cost of revenue was the largest with an increase of 4.64 percent compared to 2018. The costs of the harbor tug and container transport (*sea toll*) experienced the most significant increase, but in line with the increase in both revenues.

### Beban Pokok Pendapatan (dalam ribuan rupiah) Cost of Revenue (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Beban <i>Freight</i> Cost of Freight	403.200.687	385.321.780	17.878.907	4,64%
Beban <i>Harbour Tug</i> Cost of Harbor Tug	28.279.926	11.156.403	17.123.523	153,49%
Beban Angkutan Kontainer (Tol Laut) Cost of Container Transport (Sea Toll)	40.511.403	9.493.886	31.017.517	326,71%
Jasa <i>Transshipment</i> Transshipment Service	220.000	-	220.000	100,00%
Jasa Angkutan Curah Lainnya Other Bulk Shipment	-	-	-	0,00%
Angkutan Curah Cair Liquid Bulk Shipment	-	-	-	0,00%
Beban Penyusutan Kapal Operasi Depreciation Cost of Operating Ship	16.700.059	10.088.573	6.611.486	65,53%
Beban Sewa Rental Cost	-	2.543.517	(2.543.517)	(100,00%)
Beban Docking Docking Cost	-	-	-	0,00%
Beban Langsung Operasional Lain-Lain Direct Cost of Other Operations	-	832.257	(832.257)	(100,00%)
Beban Bongkar Muat dan Keagenan Cost of Stevedoring and Agency	14.573.368	16.750.130	(2.176.762)	(13,00%)
<b>Jumlah Total</b>	<b>503.485.444</b>	<b>436.186.546</b>	<b>67.298.898</b>	<b>15,43%</b>

### BEBAN USAHA

Perseroan mengalami kenaikan beban usaha sebesar 45,91 persen pada 2019 menjadi Rp72,94 miliar, dari Rp49,99 miliar pada 2018. Sejumlah beban tercatat

### OPERATING COST

The Company experienced an increase in operating expenses by 45.91 percent in 2019 to Rp72.94 billion, from Rp49.99 billion in 2018. A number

meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya, antara lain beban Direksi dan Komisaris sebesar 86,49 persen karena adanya kenaikan pembayaran gaji dan tunjangan; beban pegawai sebesar 64,75 persen karena adanya kenaikan pembayaran insentif kinerja dan gaji; beban transportasi sebesar 172,40 persen karena adanya beban transportasi atas perjalanan dinas pengadaan kapal; dan beban pemasaran sebesar 15,73 persen karena peningkatan beban promosi dan iklan.

of expenses were recorded to have significantly increased compared to 2018, including Directors and Commissioners expenses by 86.49 percent due to an increase payment of salaries and benefits; employee expenses by 64.75 percent due to an increase in payment of performance incentives and salaries; transportation expenses by 172.40 percent due to transportation costs for ship procurement business trips; and marketing expenses by 15.73 percent due to increased promotional and advertising expenses.

**Beban Usaha (dalam ribuan rupiah)**  
**Cost of Revenue (in thousand rupiah)**

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Beban Direksi & Komisaris Cost of Directors & Commissioners	5.783.362	3.101.150	2.682.212	86,49%
Beban Pegawai Cost of Employees	39.714.408	24.106.436	15.607.972	64,75%
Beban Umum Adm. Kantor Office Administration General Expenses	10.358.131	8.336.624	2.021.507	24,25%
Beban Pemeliharaan Cost of Maintenance	359.047	381.745	(22.698)	(5,95%)
Beban Penyusutan Cost of Depreciation	1.987.534	1.222.571	764.963	62,57%
Beban Jasa Profesional Professional Services Expense	3.250.756	2.230.435	1.020.321	45,75%
Beban Pemasaran Marketing Expenses	2.315.773	2.001.075	314.698	15,73%
Beban Pajak Final Final Tax Expense	5.589.980	7.296.244	(1.706.264)	(23,39%)
Beban Transportasi Transportation Expenses	3.582.418	1.315.131	2.267.287	172,40%
<b>Jumlah Total</b>	<b>72.941.408</b>	<b>49.991.410</b>	<b>22.949.998</b>	<b>45,91%</b>

**BEBAN LAIN-LAIN**

Beban lain-lain tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok Perusahaan, seperti beban kapal tidak beroperasi, beban bantuan sosial, dan beban pensiun. Pada 2019, beban lain-lain tercatat mengalami penurunan 29,38 persen menjadi Rp19,82 miliar dari Rp28,06 miliar pada 2018.

Beban kapal tidak beroperasi masih muncul karena adanya pembayaran gaji kru atau petugas penjaga

**OTHER EXPENSES**

Other expenses are not directly related to the Company’s main activities, such as ship operating costs, social assistance costs, and pension costs. In 2019, other expenses were recorded a decrease of 29.38 percent to Rp19.82 billion from Rp28.06 billion in 2018.

The expenses of non-operating ships still arise due to the payment of crew salaries or guard officers,

# KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

## Company's Financial Performance

kapal, adanya tuntutan klaim dari nelayan-nelayan yang tertabrak kapal milik Perusahaan saat cuaca buruk, juga terdapat permintaan bahan bakar kapal, air bersih, serta pengadaan barang-barang kapal lainnya, seperti genset dan jangkar.

Sementara itu, beban pensiun timbul dari hasil mediasi antara Perseroan dengan P3DL tentang penyelesaian permasalahan pensiunan di Ombudsman RI, di mana berdasarkan Berita Acara Nomor 001/0367.2013/LM/BA.Med/XI/2017 tanggal 30 November 2017, Perusahaan berkewajiban membayar sebanyak 60 kali uang pensiun.

claims from fishermen whose boats were hit by the Company's own ship during bad weather, also demand for ship fuel, freshwater, and procurement of other ship items, such as generator and anchor.

Meanwhile, the pension expense arises from the mediation between the Company and P3DL (Association of Djakarta LLOYD's Pensioners) regarding the resolution of retirement problems in the RI Ombudsman, where based on the Minutes Number 001/0367.2013/LM/BA.Med/XI/2017 dated November 30, 2017 the Company is obliged to pay 60 times the pension.

### Beban Lain-Lain (dalam ribuan rupiah) Other Expenses (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Beban di Luar Usaha Non-Operating Cost	5.397.490	1.098.337	4.299.153	391,42%
Beban Kapal Tidak Beroperasi Expenses of Non-Operating Ships	1.022.412	3.329.642	(2.307.230)	(69,29%)
Beban Penyusutan Kapal Tidak Beroperasi Depreciation Cost of Non-Operating Ships	-	151.101	(151.101)	(100,00%)
Beban CSR CSR Expenses	1.539.925	772.300	767.625	99,39%
Beban Pensiun Cost of Retirement	2.321.961	11.449.762	(9.127.801)	(79,72%)
Beban Penurunan Nilai Aset Lain-Lain Depreciation Cost of Other Assets	9.536.860	11.263.553	(1.726.693)	(15,33%)
<b>Jumlah Total</b>	<b>19.818.647</b>	<b>28.064.496</b>	<b>(8.245.849)</b>	<b>(29,38%)</b>

### LABA TAHUN BERJALAN

Laba tahun berjalan pada 2019 mencapai Rp64,68 miliar atau meningkat 5,50 persen dari Rp61,31 miliar pada 2018. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan laba sebelum pajak penghasilan badan.

### Laba Tahun Berjalan (dalam ribuan rupiah) Current Year Profit (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Laba Sebelum Pajak Profit before Tax	67.016.723	61.154.210	5.862.513	9,59%

### CURRENT YEAR PROFIT

Profit for the year 2019 reached Rp64.68 billion, an increase of 5.50 percent from 2018 of Rp61.31 billion. This was in line with the increase in profit before corporate income tax.

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Manfaat (Beban) Pajak Tax Benefit (Expense)				
Kini Current	(713.122)	(1.382.652)	669.530	(48,42%)
Tangguhan Deferred	(1.624.959)	1.534.924	(3.159.883)	(205,87%)
<b>Jumlah Total</b>	<b>64.678.641</b>	<b>61.306.482</b>	<b>3.372.159</b>	<b>5,50%</b>

### PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Penghasilan komprehensif lain tahun 2019 mencapai Rp59,97 juta atau menurun 110,30 persen dari tahun 2018 sebesar (Rp582,44 miliar). Hal ini disebabkan adanya penurunan di pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

### OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Other comprehensive income in 2019 reached Rp59.97 million or decreased 110.30 percent from 2018 of (Rp582.44 billion). This is due to decreases in items that will not be reclassified to profit (loss).

### Penghasilan Komprehensif Lainnya (dalam ribuan rupiah)

#### Other Comprehensive Income (in thousand rupiah)

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Items that will not be reclassified to profit (loss):				
Keuntungan (kerugian) aktuarial Actuarial gains (losses)	79.967	(776.590)	856.557	(110,30%)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Income tax related to items that will not be reclassified to profit (loss)	(19.992)	194.148	(214.140)	(110,30%)
<b>Jumlah Total</b>	<b>59.975</b>	<b>(582.443)</b>	<b>642.418</b>	<b>(110,30%)</b>

### ARUS KAS

Arus kas dari aktivitas operasi timbul dari keluar masuknya kas selama beroperasi, terutama berasal dari aktivitas penghasil utama pendapatan operasi. Sementara itu, arus kas dari aktivitas investasi berasal dari perolehan aset tetap, saham, dan instrumen keuangan lain. Pada 2019, arus kas investasi Perseroan terdiri atas pengadaan kapal *tug & barge* 300 feet sebesar Rp17,3 miliar, pengadaan kapal *handymax* 56.000 DWT sebesar Rp175,8 miliar, inventaris dan peralatan sebesar Rp805,1 juta, perolehan anak perusahaan sebesar Rp2,8 miliar, serta kapal dalam konstruksi sebesar Rp39,9 miliar.

### CASH FLOW

The cash flows from operating activities are generated from the cash inflows and outflows during operations, particularly from the activities of its main contributors. Meanwhile, the cash flows from investing activities originated from fixed assets, shares and other financial instruments. In 2019, the Company's investment cash flow consisted of procurement of 300 feet tug & barge vessel worth Rp17.3 billion, procurement of 56,000 DWT handymax worth Rp175.8 billion, inventory and equipment worth Rp805.1 million, subsidiary's contribution of Rp2.8 billion, and ships under construction worth Rp39.9 billion.

## KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

### Company's Financial Performance

Adapun arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari kas masuk maupun kas keluar dari/atau untuk lembaga perbankan dan lembaga non-perbankan, di mana pada 2019, Perseroan memperoleh kredit investasi dari Bank Negara Indonesia (BNI). Di sisi lain, Perseroan berencana menerbitkan surat utang jangka menengah (MTN) pada 2019, namun hingga akhir tahun buku masih dalam proses analisis bersama pihak *arranger* dan penjamin *letter of credit*.

The cash flows from funding activities come cash inflows and outflows from/for banking and non-banking institutions, of which in 2019 the Company obtained an investment credit from Bank Negara Indonesia (BNI). On the other hand, the Company planned to issue medium term notes (MTN) in 2019, but until the end of the financial year it was still in the process of analysis with the arranger and credit guarantor.

#### Arus Kas Cash Flow

Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities</b>				
Penerimaan dari Pelanggan Receipts from Customers	623.405.920	432.686.579	190.719.341	44,08%
Penerimaan (Pembayaran) Bunga dan Lain-Lain Receipts (Payments) of Interests and Others	(20.180.734)	(6.380.546)	(13.808.188)	216,29%
Pembayaran kepada Pemasok dan Beban Usaha Payments to Suppliers and for Operating Cost	(579.217.986)	(463.973.239)	115.244.747	24,84%
Pembayaran Pajak Tax Payments	(6.174.119)	(329.356.579)	323.182.460	(98,13%)
<b>Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi Total Cash Flows from Operating Activities</b>	<b>17.833.080</b>	<b>37.996.563</b>	<b>(20.163.483)</b>	<b>(53,07%)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investment Activities</b>				
Penjualan aset tetap Sales of Fixed Assets	-	27.371.896	(23.371.896)	(100,00%)
Perolehan aset tetap Revenue from Fixed Assets	(236.817.371)	(177.650.650)	(59.166.721)	33,31%
<b>Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi Total Cash Flow from Investment Activities</b>	<b>(236.817.371)</b>	<b>(150.278.754)</b>	<b>(86.538.617)</b>	<b>57,59%</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Funding Activities</b>				
Utang Obligasi/MTN Medium Term Notes	-	-	-	-
Pembayaran PKPU PKPU Payments	(15.508.422)	-	(15.508.422)	100,00%
Utang Bank Bank Loans	157.151.101	113.611.957	43.539.144	38,32%
Pembayaran RDI RDI Payments	-	-	-	-
Pembayaran Pinjaman Loan Repayments	(25.778.800)	(162.355.898)	136.577.098	(84,12%)
<b>Total Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Total Cash Flow from Funding Activities</b>	<b>115.863.879</b>	<b>(48.743.941)</b>	<b>164.607.820</b>	<b>(337,70%)</b>



Uraian Description	2019	2018	Pertumbuhan Growth	
			Rp	%
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Net Increase (Decrease)</b>				
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	(103.120.412)	(237.019.258)	133.898.846	(56,49%)
Saldo Awal Kas dan Setara Kas Awal Tahun Opening Balance of Cash and Cash Equivalents Early Year	145.112.280	382.131.537	(237.019.257)	(62,03%)
<b>Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 31 Desember 2019 Closing Balance of Cash and Cash Equivalents as of December 31, 2019</b>	<b>41.991.868</b>	<b>145.112.280</b>	<b>(103.120.412)</b>	<b>(71,06%)</b>

## KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

### Solvency and Receivables Collectibility Rate

#### KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memenuhi hak-hak kreditor melalui pembayaran pokok pinjaman dan bunga secara tepat waktu. Kemampuan ini dapat dilihat dari sejumlah indikator, seperti kondisi keuangan jangka pendek, kondisi keuangan jangka panjang, rasio aktivitas, dan rasio hasil usaha.

Kemampuan Perseroan dalam membayar kewajiban jangka pendek dapat tercermin dari rasio likuiditas yang terdiri atas rasio lancar dan rasio kas. Perseroan mencatat rasio lancar sebesar 1,78 kali pada 2019. Dengan kata lain, Perseroan memiliki aset lancar yang cukup untuk membiayai utang lancar. Adapun rasio kas Perseroan pada 2019 tercatat sebesar 0,21 (nilai aktiva dalam bentuk kas dan setara kas).

#### Rasio Likuiditas Liquidity Ratios

Uraian Description	2019	2018
Rasio Lancar Current Ratio	178%	233%
Rasio Kas Cash Ratio	21%	82%

#### SOLVENCY

The Company is committed to fulfilling the rights of creditors through timely repayment of loan both principal and interest. This commitment can be seen from a number of indicators, such as short-term financial condition, long-term financial condition, activity ratio, and operating results ratio.

The Company's ability to pay short-term liabilities is reflected in the liquidity ratio consisting of current ratio and cash ratio. The Company recorded a current ratio of 1.78 times in 2019. In other words, the Company has sufficient current assets to finance its current debt. The Company's cash ratio in 2019 was recorded at 0.21 (the value of assets in the form of cash and cash equivalents).

# KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

## Solvency and Receivables Collectibility Rate

Kemampuan Perseroan dalam membayar utang jangka panjang dapat tercermin dari rasio solvabilitas yang terdiri atas rasio utang terhadap modal (DER) dan rasio utang terhadap aset (DAR). Pada 2019, Perseroan mencatat nilai DER sebesar 119 persen (1,19), di mana nilai maksimum DER adalah 200 persen atau 2. Rasio ini menggambarkan sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak eksternal. Semakin kecil nilai DER akan semakin baik, karena menunjukkan bahwa modal mencukupi untuk menjamin utang.

The Company's ability to pay long-term debt is reflected in the solvency ratio which consists of debt to equity ratio (DER) and debt to asset ratio (DAR). In 2019, the Company recorded a DER of 119 percent (1.19), where the maximum DER value is 200 percent or 2. This ratio illustrates the extent to which owner's capital can cover the debt to external parties. The smaller the DER is the better, because it shows that the capital is sufficient to guarantee the debt.

Sementara itu, nilai DAR Perseroan pada 2019 tercatat 54 persen, yang berarti 54 persen pendanaan Perseroan diperoleh dari kreditor. Semakin tinggi nilai DAR menunjukkan risiko suatu perusahaan juga semakin tinggi.

In the meantime, the Company's DAR in 2019 was recorded at 54 percent, meaning that 54 percent of the Company's funding was obtained from creditors. The higher the DAR figure indicates the higher the risk a company bears.

Hingga akhir tahun buku 2019, rasio solvabilitas Perseroan memang masih belum baik. Namun, Perseroan optimistis struktur permodalan akan membaik seiring perbaikan produksi dan penyelesaian atas berbagai masalah utang di masa lampau.

Until the end of fiscal year 2019, the Company's solvency ratio was still not good. However, the Company is optimistic that the capital structure will improve along with improvements in production and resolution of various past debt problems.

### Rasio Solvabilitas

#### Solvability Ratios

Uraian Description	2019	2018
Total Debt to Equity Ratio (DER)	119%	100%
Total Debt to Asset Ratio (DAR)	54%	50%

### KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Rasio perputaran piutang Perseroan mengalami penurunan dari 138 hari pada 2018 menjadi 126 hari pada 2019. Sebagian besar piutang merupakan piutang jasa angkutan batu bara. Adapun ukuran yang dipakai untuk menghitung waktu rata-rata pengumpulan piutang perusahaan dalam menagih piutang usahanya kepada pengguna jasa menggunakan rumus berikut:

### RECEIVABLES COLLECTIBILITY

The Company's collection period ratio decreased from 138 days in 2018 to 126 days in 2019. Most of the receivables are from coal transportation services. The measurement used to calculate the average time of collection of the Company's receivables from service users uses the following formula:

$$\text{Perputaran Piutang} = \frac{\text{Jumlah piutang usaha}}{\text{Total trade receivables}} \times 365 \text{ hari days}$$
$$\text{Collection Periods} = \frac{\text{Jumlah pendapatan usaha}}{\text{Total operating revenues}}$$

**Kolektibilitas Piutang**  
**Receivables Collectivity**

Uraian	2019	2018	Description
Jumlah piutang usaha	215.223.644	212.817.689	Total trade receivables
Jumlah pendapatan usaha	625.811.875	561.705.974	Total operating revenue
<b>Kolektibilitas Piutang</b>	<b>126 hari days</b>	<b>138 hari days</b>	<b>Receivables Collectivity</b>

## STRUKTUR MODAL

### Capital Structure

Perseroan senantiasa menjaga struktur modal dengan menyeimbangkan tingkat ekuitas dan kewajiban. Rasio liabilitas terhadap ekuitas pada 2019 mencapai 119 persen atau meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 100 persen. Hal ini disebabkan kenaikan signifikan pada liabilitas jangka panjang akibat pembiayaan ulang pembelian kapal, kredit investasi, dan utang bank atas modal kerja. Dengan demikian, tingkat solvabilitas Perseroan dari rasio liabilitas terhadap ekuitas dapat dikatakan belum cukup sehat, namun diharapkan struktur permodalan dapat membaik di masa mendatang seiring perbaikan produksi dan penyelesaian atas masalah utang lama.

The Company always strives to maintain capital structure by balancing the equity with the liability. The liability to equity ratio in 2019 was 116 percent or increased from 98 percent in 2018. This is due to a significant increase in long-term liabilities due to refinancing of ship purchases, investment loans and bank loans for working capital. Thus, the Company's solvency level from the liability to equity ratio can be said to be not sound enough, but it is expected that the capital structure will improve in the future in line with improved production and resolution of old debt problems.

**Struktur Modal per 31 Desember 2019 (dalam ribuan rupiah)**  
**Capital Structure as of December, 2019 (in thousand rupiah)**

Uraian	2019	2018	Description
Liabilitas	619.080.193	465.847.661	Liabilities
Liabilitas Jangka Pendek	196.300.238	171.377.812	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	422.779.955	294.469.849	Non-Current Liabilities
Ekuitas	521.131.659	471.901.464	Equity
<b>Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas</b>	<b>119%</b>	<b>100%</b>	<b>Liability to Equity Ratio</b>

Dalam mengelola struktur modal, Perseroan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Melalui penerapan kebijakan ini, Perseroan memastikan bahwa rasio modal yang sehat dapat dipertahankan untuk mendukung bisnis dan mengoptimalkan nilai bagi para Pemegang Saham.

In managing the capital structure, the Company makes adjustments based on changes in the economic conditions. By implementing this policy, the Company ensures that a sound capital ratio can be maintained to support the business and optimize the value for the shareholders.

# IKATAN MATERIAL INVESTASI BARANG MODAL

## Material Commitments of Capital Goods Investment

Berdasarkan usulan rencana investasi yang tertuang pada Risalah RUPS Perseroan Nomor 04 tanggal 7 Januari 2019, Perusahaan mengusulkan investasi senilai Rp657.100.175.000 yang terdiri atas investasi armada pelayaran sebesar Rp604.480.000.000 dan armada non-pelayaran sebesar Rp52.620.175.000.

Based on the investment plan proposal stated in the minutes of the Company's GMS No. 04 dated January 7, 2019, the Company proposed an investment of Rp657,100,175,000 consisting of investment in shipping fleet of Rp604,480,000,000 and non-shipping fleet of Rp52,620,175,000.

### Rencana Investasi 2019 2019 Investment Plan

No.	Uraian Description	Jumlah Unit Total Units	Nilai (Rupiah) Value (Rupiah)
<b>Armada Pelayaran Shipping Fleet</b>			
1	Supramax 2	1	180.000.000.000
2	Supramax 3	1	180.000.000.000
3	LTTC-Batamax	1	204.480.000.000
4	LTTC-DPS	1	40.000.000.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>4</b>	<b>604.480.000.000</b>
<b>Armada Non-Pelayaran Non-Shipping Fleet</b>			
1	Gedung dan lainnya Building and others	23	50.620.175.000
2	Sistem TI IT system	2	2.000.000.000
<b>Jumlah Total</b>		<b>25</b>	<b>52.620.175.000</b>

Realisasi investasi 2019 sebesar Rp294,47 miliar dibandingkan dengan RKAP 2019 sebesar Rp657,10 miliar adalah 44,81 persen. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan realisasi investasi armada pelayaran (kapal) tahun 2019 hanya dua unit dari empat yang dianggarkan, yakni sebesar Rp246,09 miliar atau tercapai 40,71 persen dari target RKAP.

The investment realization in 2019 reached Rp294.47 billion or 44.81 percent of the Rp657.10 billion target set in the 2019 RKAP. The non-achievement was caused by the realization of investment in the shipping fleet (ships) in 2019 which was only two of the four units budgeted, valuing Rp246.09 billion or 40.71 percent of the RKAP target.

Sementara itu, realisasi investasi armada non-pelayaran tahun 2019 sebesar Rp48,38 miliar atau tercapai 95,57 persen dari target RKAP. Adapun realisasi investasi non-fisik (sistem IT) adalah nihil.

Meanwhile, the realization of non-shipping fleet investment in 2019 at Rp48.38 billion or reached 95.57 percent of the RKAP target. The realization of non-physical investment (IT system) was nil.

Realisasi investasi tahun 2019 sebesar Rp294,47 miliar dibandingkan dengan realisasi 2018 sebesar Rp218,83 miliar adalah 134,56 persen. Kenaikan ini secara umum disebabkan hal-hal berikut.

The Rp294.47 billion realization of investment in 2019 was a 134.56 percent hike compared to the realization of Rp218.83 billion in 2018. This significant increase is generally caused by the following.

1. Penambahan armada kapal berupa satu unit *handymax* (MV Dharma Lautan Ruby) yang diperoleh dari MV Aquakula pada Agustus 2019 sebesar Rp175,9 miliar; satu unit *tug & barge*

1. The addition of ships consisting of one unit *handymax* (MV Dharma Lautan Ruby) purchased from MV Aquakula in August 2019 for Rp175.9 billion, one unit *tug & barge* (TB Daya Lautan II)

(TB Daya Lautan II) yang selesai pada awal Januari 2019 sebesar Rp17,4 miliar, dan aset dalam konstruksi berupa progres pekerjaan fisik sebanyak 48 persen atas pembangunan satu unit kapal tanker Small II 6.500 LTDW oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) untuk kepentingan PT Pertamina (Persero), di mana pada 2019 terjadi penambahan sebesar Rp52,83 miliar dari sebesar Rp40,33 miliar pada 2018 sehingga total aset dalam konstruksi menjadi Rp93,16 miliar.

2. Realisasi gedung dan lainnya sebesar Rp48,38 miliar dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp1,61 miliar adalah 3.005,55 persen yang disebabkan adanya aset lama yang baru diakui kepemilikannya.

Berikut realisasi investasi pada 2019 dibandingkan dengan RKAP 2019 dan realisasi pada 2018 (dalam ribuan Rupiah).

which was completed in early January 2019 worth Rp17.4 billion, and assets in construction in the form of 48 percent physical work progress on the construction of one unit tanker Small II 6,500 LTDW by PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) for serving PT Pertamina (Persero), generating an addition of Rp52.83 billion to Rp40.33 billion assets in construction in 2018 to become Rp93.16 billion in total.

2. The realization of investment in buildings and others reached Rp48.38 billion or jumping 3,005.55 percent compared to the realization in 2018 of Rp1.61 billion, mainly due to the newly recognized old assets.

The investment realization in 2019 compared to the 2019 RKAP target and the 2018 realization (in thousand rupiah) is as follows.

No.	Uraian Description	Realisasi 2019 Realization	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi 2018 Realization	% Realisasi 2018 % 2018 Realization	
					RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi 2019 Realization
<b>A. Investasi Fisik Physical Investment</b>						
1	Armada Pelayaran (Kapal) Shipping Fleet (Ships)	246.092.561	604.480.000	217.223.598	40,71%	113,29%
2	Armada Non-Pelayaran (Gedung dan lainnya) Non-Shipping Fleet (Buildings and others)	48.738.720	50.620.175	1.609.648	95,57%	3.005,55%
<b>B. Investasi Non-Fisik Non-Physical Investment</b>						
1	Sistem TI IT system	-	2.000.000	-	-	-
<b>Jumlah Total</b>		<b>294.471.281</b>	<b>657.100.175</b>	<b>218.833.246</b>	<b>44,81%</b>	<b>134,56%</b>

**Catatan:** Gedung dan lainnya merupakan aset berupa tanah dan bangunan, kendaraan, peralatan, serta inventaris.

**Note:** Buildings and others are assets in the form of land and buildings, vehicles, equipment, and inventory.



# PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET RKAP 2020

## Target Achievement and 2020 RKAP Targets

Pencapaian Perseroan pada 2019 secara umum masih berada di bawah target yang telah ditetapkan dalam RKAP 2019. Pendapatan usaha tercapai 66,8 persen atau sebesar Rp625,81 miliar dari target Rp936,36 miliar, sedangkan laba bersih tahun berjalan tercapai 69,9 persen sebesar Rp 64,67 miliar dari target Rp92,51 miliar.

Namun demikian, pendapatan lain-lain berhasil terealisasi 226,5 persen senilai Rp58,59 miliar dari target RKAP 2019 sebesar Rp25,86 miliar, terdiri atas pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga deposito sebesar Rp966,4 juta, serta pendapatan di luar usaha sebesar Rp57,6 miliar yang berasal dari pengakuan aset yang belum tercatat selama ini karena statusnya belum *clean and clear*. Ke depan, Perseroan akan senantiasa melaksanakan strategi yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

The Company's 2019 achievement is generally still below the target set in the 2019 RKAP. Operating revenue reached 66.8 percent or Rp625.81 billion from the target of Rp936.36 billion, while net profit for the year reached 69.9 percent of Rp64.67 billion of the targeted Rp92.51 billion.

However, the revenue from others was successfully achieved 226.5 percent at Rp58.59 billion from the 2019 RKAP target of Rp25.86 billion, contributed mainly by the revenue from charges of current account services and interests of time deposits amounting to Rp966.4 million, and non-operating income of Rp57.6 billion from the recognition of assets that were not recorded before because the status was not clean and clear. In the future, the Company will always implement the strategies that have been set to improve performance on an ongoing basis.

### Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Laba (Rugi) Perseroan pada 2019 (dalam ribuan rupiah)

The Comparison Between Target and Realization of the Company's Income Statement in 2019 (in thousand rupiah)

Uraian Description	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
<b>Pendapatan Usaha Operating Revenue</b>			
Angkutan Curah Bulk Shipment	674.425.000	491.910.528	72,94%
Jasa Pemanduan Harbor Tug	12.600.000	54.691.848	434,06%
Angkutan Kontainer (Tol Laut) Container Shipment (Sea Toll)	35.156.000	45.632.930	129,80%
Transshipment	15.000.000	337.551	2,25%
Angkutan Curah Lainnya Other Bulk Shipment	126.000.000	-	-
Angkutan Curah Cair Liquid Bulk Shipment	10.730.880	-	-
Usaha Keagenan Agency Business	7.271.520	3.918.267	53,89%
TPS Ex Inggom	3.520.031	1.977.821	56,19%
Bongkar Muat (DLN) & Keagenan Stevedoring (DLN) & Agency Business	51.666.460	27.343.200	52,92%
<b>Jumlah Pendapatan Usaha Total Operating Revenues</b>	<b>936.369.891</b>	<b>625.811.875</b>	<b>66,83%</b>

Uraian Description	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
<b>Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues</b>			
Beban Angkutan Cost of Shipment	527.731.865	403.200.687	76,40%
Beban Jasa Pemanduan Cost of Harbor Tug	4.140.000	28.279.926	683,09%
Beban Angkutan Kontainer (Tol Laut) Cost of Container Shipment (Sea Toll)	31.960.000	40.511.403	126,76%
Beban <i>Transshipment</i> Cost of Transshipment	6.000.000	220.000	3,67%
Beban Angkutan Curah Lainnya Cost of Other Bulk Shipment	107.100.000	-	-
Beban Angkutan Curah Cair Cost of Liquid Bulk Shipment	3.335.000	-	-
Beban Penyusutan Kapal Operasi Cost of Impairment of Operating Ships	32.462.869	16.700.059	51,44%
Beban Sewa Cost of Rental	2.519.667	-	-
Beban <i>Docking</i> Cost of Docking	4.315.385	-	-
Beban Langsung Operasional Lain-Lain Direct Cost of Other Operations	1.178.000	-	-
Beban Bongkar Muat (DLN) Cost of Stevedoring (DLN)	26.462.837	14.573.368	55,07%
<b>Total Beban Pokok Pendapatan Total Cost of Revenue</b>	<b>745.205.623</b>	<b>503.485.444</b>	<b>67,56%</b>
<b>Laba (Rugi) Kotor Gross Income</b>	<b>203.135.681</b>	<b>122.326.432</b>	<b>60,22%</b>
Beban Usaha Operating Expense	70.997.390	72.941.408	102,74%
<b>Laba Usaha Operating Income</b>	<b>132.138.291</b>	<b>49.385.024</b>	<b>37,37%</b>
Pendapatan Lain-Lain Other Revenues	25.866.057	58.597.510	226,54%
Beban Keuangan Finance Costs	50.621.962	21.147.164	41,77%
Beban Lain-Lain Other Expenses	4.380.572	19.818.647	452,42%
<b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak Income Before Tax</b>	<b>103.001.814</b>	<b>67.016.723</b>	<b>65,06%</b>
Beban Pajak Tax Expenses	10.486.943	2.338.081	22,30%
<b>Laba Tahun Berjalan Profit for the Current Year</b>	<b>92.514.871</b>	<b>64.678.641</b>	<b>69,91%</b>

## PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET RKAP 2020

### Target Achievement and 2020 RKAP Targets

#### Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi (dalam ribuan rupiah)

The Comparison Between Target and Realization of the Consolidated Financial Statements (in thousand rupiah)

Uraian Description	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
<b>Aset Lancar Current Assets</b>			
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	168.257.986	41.991.869	24,96%
Piutang Usaha Pihak Berelasi Trade Receivable of Related Parties	100.336.809	80.380.569	80,11%
Piutang Usaha Pihak Ketiga Trade Receivables of Third Parties	121.761.741	134.843.076	110,74%
Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Current Assets	2.767.663	7.885.096	284,90%
Persediaan Inventories	6.776.769	25.904.119	382,25%
Pajak Diterima di Muka Prepaid Taxes	3.455.815	25.211.341	729,53%
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	717.762	20.933.232	2.916,46%
Uang Muka Advances	105.993.003	12.998.583	12,26%
<b>Jumlah Aset Lancar Total Current Assets</b>	<b>510.067.547</b>	<b>350.147.885</b>	<b>68,65%</b>
<b>Aset Tidak Lancar Non-Current Assets</b>			
Aset Tetap Fixed Assets	883.979.609	578.366.461	65,43%
Aset dalam Konstruksi-Shipset Assets in Construction-Shipset	64.115.881	56.958.492	88,84%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	139.595.838	139.679.959	100,06%
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	9.202.691	15.059.055	163,64%
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets</b>	<b>1.096.894.020</b>	<b>790.063.967</b>	<b>72,03%</b>
<b>Jumlah Aset Total Assets</b>	<b>1.606.961.567</b>	<b>1.140.211.852</b>	<b>70,95%</b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities</b>			
Utang Usaha Trade Payables	90.847.199	154.959.774	170,57%
Liabilitas Keuangan Jatuh Tempo dalam 1 Tahun Current Maturities of Long-Term Debt	-	20.249.649	-
Utang Pajak Tax Payables	1.153.060	1.043.066	90,46%
Utang Lain-Lain Other Payables	2.001.649	1.984.963	99,17%

Uraian Description	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
Pendapatan Diterima di Muka Prepaid Income	-	11.675.587	-
Beban Akrua Accrued Expense	1.920.548	6.387.199	332,57%
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities</b>	<b>95.922.456</b>	<b>196.300.238</b>	<b>204,64%</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities</b>			
Utang Bank & Lembaga Keuangan Jangka Panjang Long-Term Loans from Banks and Financial Institutions	236.821.270	252.670.788	106,69%
Surat Utang Debt Securities	600.000.000	-	-
Rekening Dana Investasi Investment Fund Account	167.289.325	168.361.692	100,64%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Post-Employment Benefits Liability	438.360	1.747.474	398,64%
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities</b>	<b>1.004.548.955</b>	<b>422.779.955</b>	<b>42,09%</b>
<b>Jumlah Liabilitas Total Liabilities</b>	<b>1.100.471.411</b>	<b>619.080.193</b>	<b>56,26%</b>
<b>Ekuitas Equity</b>			
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital			
Saham Seri A Series A Shares	1.577.146.091	1.577.147.000	100%
Saham Seri B Series B Shares	390.614.148	422.325.669	108,12%
Tambahan Modal Disetor Additional Paid Capital	1.427.000	1.427.000	100%
Cadangan Umum General Reserve	62.952	62.952	100%
Saldo Laba yang Telah Ditentukan Penggunaannya Appropriated Retained Earnings	(1.555.274.907)	(1.544.520.076)	99,31%
Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated Retained Earnings	92.514.871	64.678.641	69,91%
Ekuitas yang Dapat Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk and Kepentingan Non-Pengendali Equity distributable to parent entity and non- controlling interests	-	10.473	-
<b>Jumlah Ekuitas Total Equity</b>	<b>506.490.155</b>	<b>521.131.659</b>	<b>102,89%</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity</b>	<b>1.606.961.566</b>	<b>1.140.211.852</b>	<b>70,95%</b>

## PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET RKAP 2020

### Target Achievement and 2020 RKAP Targets

#### Perbandingan Target dan Realisasi Laporan Arus Kas (dalam ribuan rupiah)

#### The Comparison Between Target and Realization of Cash Flow Statement (in thousand rupiah)

Uraian Description	RKAP 2019 2019 RKAP	Realisasi Realization	Pencapaian Achievement
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities</b>			
Penerimaan dari Pelanggan Cash Receipts from Customers	901.251.457	623.405.920	69,17%
Penerimaan (Pembayaran) Bunga dan Lain-Lain Receipts (Payments) of Interest and Others	(50.425.162)	(20.180.734)	40,02%
Pembayaran kepada Pemasok dan Beban Usaha Payments to Suppliers and Operating Expenses	(743.593.931)	(579.217.986)	77,89%
Pembayaran Pajak Payment of Taxes	(10.486.943)	(6.174.119)	58,87%
<b>Jumlah Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Operasi Total Net Cash Flow for Operating Activities</b>	<b>96.745.422</b>	<b>17.833.080</b>	<b>18,43%</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment Activities</b>			
Penjualan Aset Tetap Fixed Assets Sales	25.000.000	-	-
Perolehan Aset Tetap Fixed Assets Acquisition	(657.100.175)	(236.817.371)	36,04%
<b>Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Total Net Cash Flow from Investment Activities</b>	<b>(632.100.175)</b>	<b>(236.817.371)</b>	<b>37,47%</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Funding Activities</b>			
Utang Obligasi/MTN Medium-Term Notes (MTN)	90.847.199	154.959.774	170,57%
Pembayaran PKPU PKPU Payments	-	20.249.649	-
Utang Bank Bank Loans	1.153.060	1.043.066	90,46%
Pembayaran RDI RDI Payment			
Pembayaran Pinjaman Debt Repayment			
<b>Total Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Total Net Cash Flow from Funding Activities</b>	<b>654.091.330</b>	<b>115.863.879</b>	<b>17,71%</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Net Increase (Decrease)</b>			
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	118.736.577	(103.120.412)	(86,85%)
Saldo Awal Kas dan Setara Kas Awal Tahun Opening Balance of Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	149.858.218	145.112.280	96,83%
<b>Saldo Akhir Kas dan Setara Kas 31 Desember 2019 Closing Balance of Cash and Cash Equivalents as of December 31, 2019</b>	<b>268.594.795</b>	<b>41.991.868</b>	<b>15,63%</b>



## TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Peninjauan penilaian tingkat kesehatan Perseroan dan entitas anak dimulai dengan melakukan analisis terhadap komponen-komponen dalam laporan laba (rugi) komprehensif yang mempunyai aspek dan berhubungan dengan keuangan, di antaranya penjualan usaha, beban produksi, dan volume produksi. Analisis berisi perbandingan realisasi tahun berjalan dengan RKAP yang telah ditetapkan, serta dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Hasil tinjauan tingkat kesehatan Perusahaan diharapkan dapat menjadi suatu kajian bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja Perseroan dan menentukan kebijakan yang akan diterapkan pada periode mendatang, sehingga kekurangan pada periode lalu dapat dieliminasi pada periode berikutnya dan keberhasilan yang sudah dicapai dapat semakin meningkat.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002, pencapaian tingkat kesehatan Perusahaan pada 2019 tercatat sebagai berikut:

No.	Indikator Indicator	Skor Score		
		RKAP 2019	Realisasi 2019 2019 Realization	Realisasi 2018 2018 Realization
<b>I. Aspek Keuangan Financial Aspects</b>				
1	Imbalan kepada Pemegang Saham (ROE) Return on Equity	15,00	15,00	12,00
2	Imbalan Investasi (ROI) Return of Investment	5,00	5,00	4,00
3	Rasio Kas Cash Ratio	3,00	2,00	3,00
4	Rasio Lancar Current Ratio	3,00	3,00	3,00
5	<i>Collection Periods</i>	4,00	2,50	2,50
6	Perputaran Persediaan Inventory Turnover	4,00	4,00	4,00
7	Perputaran Total Aset Total Asset Turnover	2,00	2,00	1,50
8	Rasio Modal Sendiri terhadap Aktiva Ratio of Own-Capital to Assets	4,50	5,50	5,50
<b>Total</b>		<b>40,50</b>	<b>39,00</b>	<b>35,50</b>

## COMPANY'S SOUNDNESS LEVEL

The process of reviewing the soundness rating of the Company and its subsidiary begins with an analysis of components in the comprehensive income statement with the aspects related to finance, including business sales, production costs and production volumes. The analysis contains a comparison of the realization of the current year with the target set in the Work Plan and Budget (RKAP), and compared to the realization of the previous year.

The results of the review of the Company's health level are expected to become a study for the management to optimize the Company's performance and determine the right policies to be applied in the coming period, so that the deficiencies in the past can be eliminated and the success achieved can be further enhanced.

Based on the Minister of SOEs Decree Number KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002, the Company's soundness ratings in 2019 are listed as follows:

# PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET RKAP 2020

## Target Achievement and 2020 RKAP Targets

No.	Indikator Indicator	Skor Score		
		RKAP 2019	Realisasi 2019 2019 Realization	Realisasi 2018 2018 Realization
<b>II. Aspek Operasi Operating Aspects</b>				
1	Metrik Ton Metric Ton	7,50	6,39	5,04
2	Penambahan Jalur Route Addition	5,00	8,75	1,75
3	Bongkar Muat Stevedoring	4,50	4,71	6,85
4	Keagenan Agency	5,00	8,75	8,75
<b>Total</b>		<b>22,00</b>	<b>28,60</b>	<b>22,39</b>
<b>III. Aspek Administrasi Administrative Aspects</b>				
1	Laporan Perhitungan Tahunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Annual Calculation Report of Corporate Work Plan and Budget (RKAP)	5,00	5,00	5,00
2	RKAP Work Plan and Budget	5,00	5,00	5,00
3	Laporan Periodik Periodic Report	5,00	5,00	5,00
<b>Total</b>		<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Grand Total</b>		<b>77,50</b>	<b>82,60</b>	<b>72,89</b>

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan Perusahaan pada 2019 tergolong "Sehat (AA)" dengan skor sebesar 82,60, Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 72,89, sekaligus melampaui target dalam RKAP 2019 sebesar 77,50.

From the table above, it can be concluded that the Company is classified as "Healthy (AA)" with a score of 82.60 for 2019 performance. This achievement increased from the previous year of 72.89 and exceeded the target of 77.50 set in the 2019 RKAP.

### RKAP 2020

RUPS Perseroan yang digelar tanggal 23 Januari 2020 bertempat di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat memiliki tiga mata acara sebagai berikut.

1. Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2020.
2. Persetujuan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020.
3. Persetujuan Kontrak Manajemen Tahun 2020 antara Kuasa Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris serta *Key Performance Indicators* (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2020.

### 2020 CORPORATE WORK PLAN AND BUDGET

The Company held General Meeting of Shareholders on January 23, 2020, at the Ministry of SOEs Office, Central Jakarta, with three agenda as follows:

1. Approval of the 2020 Corporate Work Plan and Budget (RKAP).
2. Approval of Operational Aspect Indicators for the Assessment of Company's Soundness in 2020.
3. Approval of 2020 Management Contract Agreement between Shareholder Authority and the Board of Directors and Board of Commissioners as well as the 2020 Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI).

RUPS tersebut menghasilkan keputusan sesuai masing-masing mata acara. Setelah dilakukan pembahasan terhadap RKAP Tahun Buku 2020 serta memerhatikan tanggapan Dewan Komisaris, maka RUPS memutuskan sebagai berikut:

The GMS produced resolutions of each agenda item accordingly. After discussing the RKAP for the 2020 Fiscal Year and noting the Board of Commissioners' response, the GMS decided as follows:

**Target Kinerja Keuangan (dalam miliar rupiah)**  
**Financial Performance Targets (in billion rupiah)**

Laporan Laba (Rugi)	Target RKAP 2020 2020 RKAP Target	Statement of Profit (Loss)
Pendapatan usaha	688,83	Operating revenues
Beban pokok pendapatan	522,55	Cost of revenues
Laba kotor	166,28	Gross profit
Beban usaha	71,84	Operating expenses
<b>Laba usaha</b>	<b>94,44</b>	<b>Operating profit</b>
Pendapatan (beban) lain-lain	31,13	Other Income (Expense)
Laba sebelum pajak	73,76	Profit Before Tax
<b>Laba tahun berjalan</b>	<b>66,33</b>	<b>Profit for the Current Year</b>
Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2020		Report on Financial Position as of December 31, 2020
Aset lancar	351,89	Current assets
Aset tidak lancar	1.383,48	Non-current assets
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.735,37</b>	<b>Total Assets</b>
Liabilitas	1.168,54	Liabilities
Ekuitas	566,83	Equity
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>	<b>1.735,37</b>	<b>Total Liabilities and Equity</b>
Investasi		Investment
Investasi induk	515,23	Investment of parent company
Investasi anak perusahaan	36,85	Investment of subsidiary
<b>Total Investasi</b>	<b>552,08</b>	<b>Total Investment</b>

**Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2020**  
**Operational Aspects Indicators for Assessment of the Company's Soundness Level 2020**

Uraian	Bobot Weight	Description
Angkutan batu bara	8,75	Coal transportation
Penambahan jalur	8,75	Route addition
Bongkar muat, jasa pemanduan, dan tol laut	8,75	Stevedoring, harbor tug, and sea toll
Keagenan	8,75	Agency business

# PENCAPAIAN TARGET DAN TARGET RKAP 2020

## Target Achievement and 2020 RKAP Targets

### Kontrak Manajemen tentang Aspirasi Pemegang Saham untuk RKAP 2020

#### Management Contract regarding Shareholder Aspirations for the 2020 Work Plan and Budget

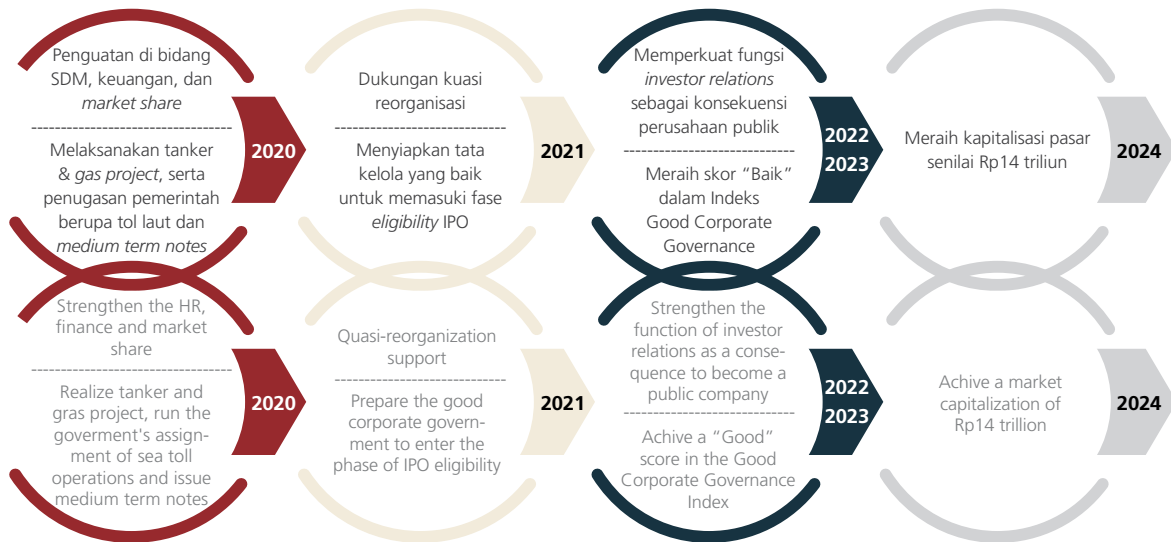
No.	Indikator Indicator	Satuan Unit	Bobot Weight	RKAP 2020
<b>I. Perspektif Keuangan dan Pasar</b> Perspectives on Finance and Market			<b>20</b>	
1	<i>Return on Capital Employed (ROCE)</i>	%	6	25
2	<i>EBITDA Margin</i>	%	6	58
3	<i>Cash Ratio from Operation</i>	%	4	11
4.	PKPU	Termin Period	4	4
<b>II. Perspektif Fokus Pelanggan</b> Perspectives on Customer Focus			<b>20</b>	
1	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	Skala Likert Likert Scale	10	4,15
2	Jumlah Pelanggan Baru Number of New Customers	Pelanggan Customer	5	2
3	<i>Contract Deliverables</i>	Kontrak Contract	5	3
<b>III. Perspektif Efektivitas Produk dan Proses</b> Perspectives on Product and Process Effectivity			<b>15</b>	
1	Efektivitas Produksi ( <i>Out of Commission Day</i> ) Production Effectiveness (Out of Commission Day)	Hari Day	5	30
2	Efisiensi Operasional Kapal (Laba per Kapal) Ship Operational Efficiency (Profit per Ship)	%	5	26
3	Jumlah Kapal yang Dibeli dan Menjadi Milik Perusahaan Number of Ships Purchased and Owned by the Company	Kapal Ship	5	12
<b>IV. Perspektif Fokus Tenaga Kerja</b> Perspectives on Human Resources Focus			<b>15</b>	
1	Indeks Kepuasan Pegawai Employee Satisfaction Index	Skala Likert Likert Scale	8	3,13
2	<i>Employee Profitability</i>	Ribuan Rupiah Thousand Rupiah	7	545
<b>V. Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Masyarakat</b> Perspectives on Leadership, Governance, and Corporate Social Responsibility			<b>15</b>	
1	Skor GCG Score of Good Corporate Governance	Skor Score	8	65
2	Skor Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Score for Excellent Performance Assessment Criteria	Skor Score	7	25
<b>VI. Agent of Development</b>			<b>15</b>	
1	Sinergi BUMN SOEs Synergy	Pelanggan Customer	8	3
2	Penugasan Pemerintah Government Assignment	Tol Laut Sea Toll	7	1
<b>Total</b>			<b>100</b>	

# KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN

## Company's Strategic Policy

Perseroan telah menetapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) periode 2020-2024 dengan target utama menjadi perusahaan publik yang meraih kapitalisasi pasar senilai Rp14 triliun pada 2024. Adapun jejak langkah dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

The Company has established its Long-Term Corporate Plan (RJPP) for the period 2020-2024 with the main target to become a public company with a market capitalization of Rp14 trillion in 2024. The steps in the next five years are as follows:



Untuk mencapai target tersebut, Perseroan sebagai perusahaan pelayaran dan penyedia jasa logistik akan fokus melaksanakan tiga strategi besar (Tahap I), yakni *Business Model Restructuring*, *Financial Restructuring*, dan *Organizational Re-engineering*.

To reach the target, the Company as a shipping company and logistics service provider will focus on implementing three major strategies (Phase I), namely Business Model Restructuring, Financial Restructuring, and Organizational Re-engineering.

Pada 2020, Perseroan akan tetap fokus mengembangkan *existing business* sebagai penyedia layanan pelayaran & logistik berbagai komoditas seperti batu bara, minyak, gas, nikel, dan bauksit. Penguatan sinergi BUMN dan swasta menjadi kunci strategis dalam mengejar kontrak kerja sama jangka panjang untuk meraih pertumbuhan volume pengangkutan sekaligus memperluas pangsa pasar.

In 2020, the Company will continue to focus on developing its existing business as a provider of shipping line & logistics services for various commodities such as coal, oil, gas, nickel, and bauxite. Strengthening the cooperation with SOEs and the private sector is a strategic key in pursuing long-term contracts to achieve growth in shipment volume while expanding market share.



# KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN

## Company's Strategic Policy

### INDONESIAN SHIPPING LINE & LOGISTICS SERVICE PROVIDER



Business Model Restructuring	Financial Restructuring	Organizational Reengineering
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekspansi Bisnis Organik &amp; Anorganik Expansion of organic and inorganic businesses</li> <li>Meningkatkan Sinergi BUMN &amp; BUMS Increase the cooperation with SOEs and private companies</li> <li><i>Wallet Share Incremental</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaian <i>Share Buyback</i> Sesuai PKPU Settlement of Share Buyback in Accordance with PKPU</li> <li><i>Fundraising</i> dari Investor Baru dan Perbankan Funding from New Investors and Banking</li> <li><i>Capital Management</i> untuk Meraih Kapitalisasi Pasar Sebesar Rp14 Triliun Capital Management to Achieve Market Capitalization of Rp14 Trillion</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Human Capital Management (<i>People</i>)</li> <li>Organization Effectiveness (<i>Process</i>)</li> <li>Digital Working &amp; Information System Implementation (IT/IS)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjalankan <i>main driver revenue</i> sebagai "Indonesian Shipping Line &amp; Logistics Service Provider" melalui Sinergi BUMN (PLN, Pertamina, Inalum, PGN, Pelindo, dan Antam) serta BUMS (Adaro, KPC, SMA, Husky, dan KEA). Run the revenue main driver, the "Indonesian Shipping Line &amp; Logistics Service Provider", through the synergized cooperation with SOEs (PLN, Pertamina, Inalum, PGN, Pelindo, and Antam) and private companies (Adaro, KPC, SMA, Husky, and KEA).</li> <li>Meningkatkan kerja sama dan sinergi pengelolaan <i>shipping line &amp; logistics service</i> untuk meningkatkan <i>topline</i> usaha. Increase the cooperation and synergy in managing shipping line &amp; logistics services to improve the business topline.</li> <li>Menganalisis peluang peningkatan <i>wallet share</i> industri jasa perkapalan guna memperkuat <i>value</i> perusahaan dan mengoptimalkan struktur modal untuk menjadi pemain di tingkat regional. Analyze the opportunities to increase the wallet share of the shipping service industry in order to strengthen the Company's value and optimize capital structure to become a player at the regional level.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyelesaikan pembelian <i>share buy</i> secara bertahap selama 13 tahun, namun perlu dilakukan upaya percepatan dengan faktor diskonto (<i>present value</i>) agar efisien. Complete the share buyback in stages over 13 years, but it is necessary to accelerate it by utilizing the present value for efficiency.</li> <li>Melakukan <i>project financing</i> terkait fasilitas pendanaan dengan lembaga perbankan maupun non-perbankan guna mendukung rencana <i>initial public offering</i> (IPO). Finance the projects using funding facilities from banking and non-banking institutions to support the initial public offering (IPO) plan.</li> <li>Memperoleh dukungan pemegang saham dan pemerintah dalam melakukan kuasi organisasi untuk memperbaiki kinerja keuangan (penghapusbukuan akumulasi kerugian masa lalu). Get the support from shareholders and the government in conducting quasi-reorganization to write off past accumulated losses.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meninjau dan memperbaiki tata kelola SDM setelah masa restrukturisasi selesai. Review and improve HR governance after the restructuring period is over</li> <li>Menerapkan <i>values-based culture</i> melalui <i>Balance Scorecard</i> atau <i>Key Performance Indicators</i>. Implement values-based culture through Balance Scorecard or Key Performance Indicators.</li> <li>Mengembangkan organisasi dan proses bisnis dengan dukungan infrastruktur (IT/IS) yang variabel, efektif, dan efisien guna menuju era digitalisasi 4.0 yang berorientasi pada peningkatan layanan kepada pelanggan. Develop the business organization and process with the support of variable, effective and efficient infrastructure (IT/IS) to move towards digitization 4.0 era, oriented to improving customer service.</li> </ul>



Analisis dan Pembahasan Manajemen  
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan  
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  
Corporate Social Responsibility

# KEBIJAKAN STRATEGIS PERUSAHAAN

## Company's Strategic Policy

Di sisi lain, Perseroan juga berupaya meningkatkan daya ungkit bisnis dengan meraih pendanaan dari lembaga perbankan ataupun non-perbankan, salah satunya melalui penerbitan surat utang jangka menengah (MTN). Pendanaan tersebut direncanakan untuk menambah alat produksi berupa kapal dan berekspansi di segmen pengangkutan curah cair. Adapun Perseroan bekerja sama dengan PT Bahana Securities selaku penata laksana penerbitan dan PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrido (Persero) selaku penjamin *letter of credit*.

Terkait ekspansi bisnis, Perseroan memerlukan dukungan dari Pemerintah RI sebagai Pemegang Saham Pengendali sebagai berikut.

1. Kementerian BUMN dalam mengevaluasi pelaksanaan Sinergi BUMN, mengeluarkan kebijakan mengenai penambahan kuota pengangkutan energi dan minerba, memantapkan arah pengembangan usaha Perseroan ke depan, serta memberikan dukungan kuasi reorganisasi untuk memperbaiki kinerja keuangan (akumulasi kerugian masa lalu).
2. Kementerian Keuangan dalam memberikan tambahan modal berupa dana segar melalui fasilitas Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam untuk investasi armada kapal dan penyelesaian kewajiban masa lalu, baik berupa rekening dana investasi (RDI) maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
3. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam memberikan kuota pengangkutan energi dan minerba, serta kemudahan perizinan.

On the other hand, the Company also seeks to increase business leverage by obtaining the funding from banking and non-banking institutions, one of which is through the issuance of medium-term notes (MTN). The funding is planned to be used for adding the production equipment in the form of ships and expand the market in the segment of liquid bulk shipment. The Company cooperates with PT Bahana (Persero) as the arranger and PT Asuransi Credit Indonesia or Askrido (Persero) as the credit guarantor.

Regarding business expansion, the Company needs support from the Indonesian Government as the Controlling Shareholder in the form of:

1. The Ministry of BUMN after evaluating the implementation of SOEs Synergy Program, issues a policy to add the quota of energy and mineral transportation, strengthens the direction of the Company's business development, and supports the quasi-reorganization to improve the financial performance of the Company by writing off the accumulated past losses.
2. The Ministry of Finance provides additional fresh capital funding through the State Capital Participation (PMN) facility as investment in ship fleet and settlement of past obligations, whether in the form of investment fund account (RDI) or postponement of debt payment obligations (PKPU).
3. The Ministry of Energy and Mineral Resources provides energy and mineral transportation quota, along with the ease of permission.

# INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

## Material Information and Facts after Accounting Report Date

Berikut adalah beberapa informasi dan fakta material setelah tanggal laporan posisi keuangan.

### 1. Pengangkatan Dewan Komisaris

- a. Terjadi pengalihan penugasan Sdr. Lambonar O. Silitonga yang semula Komisaris menjadi Komisaris Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-19/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 25 tanggal 20 Januari 2020.
- b. Terjadi pengangkatan Sdr. M. Yusuf Permana sebagai Komisaris PT Djakarta Lloyd (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-19/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 25 tanggal 20 Januari 2020.

### 2. Perkara Litigasi

Pada saat penerbitan laporan keuangan 2019, Perusahaan sedang mengajukan gugatan kepada PT Mentari Sejati Perkasa atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perkara Nomor 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, di mana DJAKARTA LLOYD terdaftar sebagai kreditor konkuren dengan nominal sebesar Rp20.989.649.394.

### 3. Pandemi COVID-19

World Health Organization (WHO) mengumumkan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Selain menjangkiti hampir seluruh negara di dunia, infeksi virus ini turut melumpuhkan sejumlah sektor industri. Imbasnya, proyeksi ekonomi dipangkas secara signifikan disertai antisipasi risiko resesi. IMF memperkirakan ekonomi global akan mengalami kontraksi yang sangat dalam hingga negatif 3 persen sepanjang tahun 2020, terlebih belum ada kepastian durasi mengenai akhir pandemi.

Following are some material information and facts after the date of the statement of financial position.

### 1. Appointment of the Board of Commissioners

- a. There was an assignment transfer for Lambonar O. Silitonga who previously a Commissioner to become President Commissioner of PT Djakarta Lloyd (Persero) based on the Ministry of SOEs Decree Number SK-19/MBU/01/2020 dated January 9, 2020 and Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH, Jakarta, Number 25 dated January 20, 2020.
- b. The appointment of M. Yusuf Permana as Commissioner of PT Djakarta Lloyd (Persero) based on Ministry of SOEs Decree Number SK-19/MBU/01/2020 dated January 9, 2020 and Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Number 25 dated January 20, 2020.

### 2. Litigation Case

At the time of the issuance of the 2019 financial statements, the Company filed a lawsuit against PT Mentari Sejati Perkasa over Postponement of Debt Payment Obligation (PKPU) with case register Number 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, where DJAKARTA LLOYD was registered as concurrent creditor with a nominal credit value of Rp20,989,649,394.

### 3. COVID-19 Pandemic

The World Health Organization (WHO) announced the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) as a pandemic on March 11, 2020. In addition to infecting almost all countries in the world, this virus infection also paralyzed a number of industrial sectors. As a result, economic projections have been significantly cut to anticipate the recession risks. The IMF predicts that the global economy will experience a very deep contraction to negative 3 percent throughout 2020, especially given there is no certainty when the pandemic will last.

## ASPEK PEMASARAN

### Marketing Aspect

Persaingan usaha yang kian kompetitif mendorong Perusahaan untuk melakukan restrukturisasi pemasaran agar dapat memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, sekaligus menciptakan pertumbuhan berkelanjutan. Dengan memperkuat jati diri sebagai penyedia layanan logistik, Perseroan berharap dapat terus memperluas pangsa pasar sehingga dapat menjadi pemain utama di tingkat regional.

Sesuai rencana penambahan armada tahun 2017-2020, Perseroan giat menambah kepemilikan kapal dari tahun ke tahun yang diawali dengan dua kapal pada 2017, lima kapal pada 2018, delapan kapal pada 2019, dan 11 kapal pada 2020. Penambahan armada terus ditingkatkan untuk menunjang kegiatan produksi melalui strategi diversifikasi, sehingga pertumbuhan bisnis dapat lebih optimal.

Perseroan menyoal perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi kargo curah kering, curah cair, serta layanan kepelabuhanan sebagai target pasar. Sebagai contoh, PT PLN (Persero) merupakan pengguna curah kering (batu bara) untuk bahan bakar pembangkit yang terbesar di Indonesia. Pada tahun 2019, PLN membutuhkan sedikitnya 96 juta MT batu bara. Kebutuhan tersebut merupakan peluang bisnis bagi Perseroan sebagai penyedia jasa transportasi, terutama moda *mother vessel* (MV) berkapasitas 45.000-55.000 MT dan tongkang berkapasitas 5.000-7.500 MT. Mengingat keterbatasan armada masih menjadi penghambat kenaikan volume produksi, Perseroan berupaya terus meningkatkan kontrak jangka panjang pengangkutan batu bara.

Pemerintah melalui Kementerian BUMN gencar meningkatkan sinergi BUMN, sehingga biaya operasional di sebuah BUMN dapat menjadi sumber pendapatan bagi BUMN lain. Kerja sama harmonis ini turut memperbesar perputaran kapital di lingkungan internal BUMN, sekaligus menghasilkan biaya terendah yang mendorong peningkatan daya saing BUMN secara profesional. Selain membidik perusahaan milik negara, Perseroan juga gencar menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta melalui serangkaian strategi pemasaran berikut.

1. Optimalisasi potensi pasar di wilayah masing-masing unit kerja sebagai sumber pendapatan.

The increasingly tough business competition encourages the Company to conduct marketing restructuring in order to provide the best service for customers, while creating sustainable growth. By strengthening its identity as a logistics service provider, the Company hopes to continue expanding its market share so that it can become a major player at the regional level.

Following the plan to grow the fleet in 2017-2020, the Company is actively increasing its ship ownership from year to year starting with two vessels in 2017, five vessels in 2018, eight vessels in 2019, and 11 vessels in 2020. The addition of the fleet continues to be increased to support the production activities through the diversification strategy, so that the business growth can be optimized.

The Company targets business entities who have the potentials as a target market for dry and liquid bulk cargo shipment as well as port services. For example, PT PLN (Persero) is the largest user of dry bulk cargo (coal) to fuel its power plants in Indonesia. In 2019, PLN shipped at least 96 million MT of coal. The figure is a business opportunity for the Company as a provider of transportation services, especially for the mother vessel (MV) mode with a capacity of 45,000-55,000 MT and barges with a capacity of 5,000-7,500 MT. Considering that the limitations of fleet are still an obstacle to increase the production volume, the Company seeks to continue to increase the long-term contracts on coal transportation.

The government through the Ministry of SOEs intensively enhances the SOEs Synergy Program, so that the operational cost of one SOE can be a revenue stream for the other. This harmonious cooperation also enlarges the circulation of capital in the internal environment of SOEs and generating cost leadership that encourages the improvement of SOEs competitiveness professionally. In addition to targeting the state-owned companies, the Company also intensively cooperates with private firms through the following set of marketing strategies:

1. Optimization of market potential in the area of each work unit as a source of income.



2. Pengelolaan bisnis yang berorientasi kualitas dan pelayanan prima kepada pelanggan.
3. Diferensiasi dan inovasi produk dalam pemenuhan tuntutan pelanggan dan pasar.
4. Perluasan pasar dan pengembangan bisnis pelayaran yang disesuaikan dengan kompetensi utama induk.
5. Pengembangan bisnis melalui strategi dan sinergi antara induk dan anak perusahaan.

Potensi pemasaran bisnis Perseroan terbilang cukup terbuka lebar dengan berbagai varian muatan yang berpotensi menaikkan pendapatan perusahaan, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Sesuai bisnis inti yang bergerak di bidang pengangkutan curah kering, khususnya batu bara, Perseroan telah menjalin kerja sama dengan BUMN dan swasta di antaranya PT PLN (Persero), PT PLN Batubara, PT Antam Resourcindo, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, PT Surya Mega Adiperkasa, dan PT Kreasi Energi Alam yang bertindak sebagai pengguna maupun pemasok batu bara.

2. Quality-oriented business management and excellent services to customers.
3. Product differentiation and innovation in meeting customer and market demands.
4. Market expansion and shipping business development according to the main competencies of the parent company.
5. Business development through strategy and synergy between the parent entity and subsidiary.

The Company's marketing opportunity is quite wide open with various load variants that have the potential to increase Company's revenue, both short-term and long-term. In line with the core business of dry bulk shipment, especially coal, the Company has cooperated with state-owned and private companies including PT PLN (Persero), PT PLN Batubara, PT Antam Resourcindo, PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, PT Surya Mega Adiperkasa, and PT Kreasi Energi Alam, who act both as users and suppliers of coal.

## KEBIJAKAN DIVIDEN

### Dividend Policy

Hingga akhir tahun buku 2019, Perusahaan belum membagikan dividen kepada para Pemegang Saham karena masih mencatatkan akumulasi kerugian. Berdasarkan hasil RUPS, seluruh laba bersih Perseroan tahun 2019 sebesar Rp64.678.641.056 digunakan sebagai pengurang akumulasi rugi Perseroan.

As of the end of the 2019 fiscal year, the Company did not distribute dividends to the Shareholders because it still recorded accumulated losses. Based on GMS resolution, the Company's net profit in 2019 amounted to Rp64,678,641,056 will be used as a deduction from the accumulated losses.

## REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

### Realization of the Use of Public Offering Proceeds

Hingga akhir tahun 2019, DJAKARTA LLOYD belum melaksanakan penawaran umum perdana. Dengan demikian, tidak ada informasi mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

As of the end of 2019, DJAKARTA LLOYD has not yet conducted an initial public offering. Accordingly, there is no information regarding the realization of the use of proceeds from the public offering.

## PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

### Employee and/or Management Stock Ownership Program

Hingga akhir 2019, Perusahaan belum melaksanakan program kepemilikan saham untuk karyawan dan/atau manajemen melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham. Dengan demikian, tidak ada informasi terkait opsi saham yang dimiliki karyawan dan manajemen dalam hal jumlah saham, harga exercise, jangka waktu, serta persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak.

In 2019, the Company has yet to implement an employee and/or management stock ownership program (ESOP/MSOP) through stock offering or stock option offering. Thus, there is no information about the stock option owned by employees and management in terms of the number of shares, exercise price, period of time, and requirements for eligible employees and/or management.

## PENGUNGKAPAN INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL

### Disclosure of Material Transaction Information

Pada 2019, Perseroan melakukan transaksi material dengan pihak berelasi sebagai berikut.

In 2019, the Company conducted material transactions with these following related parties.

No.	Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Hubungan Nature of Relationship	Transaksi Transaction	
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI Other entity controlled by the Indonesian Government	<ul style="list-style-type: none"><li>Giro</li><li>Pinjaman bank</li><li>Pemegang saham dan kreditor PKPU</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Current account</li><li>Bank loan</li><li>Shareholder and PKPU creditor</li></ul>
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI Other entity controlled by the Indonesian Government	<ul style="list-style-type: none"><li>Giro</li><li>Pinjaman bank</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Current account</li><li>Bank loan</li></ul>
3	PT PLN (Persero)	Entitas lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI Other entity controlled by the Indonesian Government	<ul style="list-style-type: none"><li>Pendapatan angkutan</li><li>Piutang usaha</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Transportation revenue</li><li>Trade receivable</li></ul>
4	PT Antam (Persero) Tbk	Entitas lainnya yang dikendalikan oleh Pemerintah RI Other entity controlled by the Indonesian Government	<ul style="list-style-type: none"><li>Pendapatan angkutan</li><li>Piutang usaha</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Transportation revenue</li><li>Trade receivable</li></ul>
5	Kementerian Perhubungan RI Ministry of Transportation RI	Instansi Pemerintah Government Institution	<ul style="list-style-type: none"><li>Pendapatan angkutan</li><li>Pendapatan Tol Laut</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Transportation revenue</li><li>Sea Toll Revenue</li></ul>

Berikut informasi transaksi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, atau restrukturisasi utang/modal pada 2019

1. Perseroan melakukan investasi berupa pembelian dua unit kapal curah, pembayaran uang muka pembelian satu unit kapal tanker sebesar 30 persen, serta penyelesaian pengadaan sistem logistik terintegrasi (ERP System) guna menunjang digitalisasi pelaporan bisnis. Uraian transaksinya sebagai berikut (dalam ribuan rupiah).

The following are the material transaction information regarding investment, expansion, divestment, acquisition, or debt/capital restructuring in 2019.

1. The company invested in the purchase of two units of bulk vessels, paid a 30 percent down payment of one unit of tanker, and completed the procurement of an integrated logistics system (ERP System) to support the digitalization of business reporting. The transaction description is as follows (in thousand rupiah).

No.	Uraian	Nominal	Description
1	Kapal MV Dharma Lautan Ruby	175.876.416	MV Dharma Lautan Ruby
	Kapal TB Daya Lautan II	17.388.454	TB Daya Lautan II
	Aset dalam Konstruksi (DPS)	39.909.931	Assets in Construction (DPS)
2	Inventaris Kantor dan Peralatan Kapal	291.467	Office and Ship Equipment Inventories
3	Anak Perusahaan	2.837.463	Subsidiary
	<b>Jumlah</b>	<b>236.817.371</b>	<b>Total</b>

2. Perseroan belum melakukan pelepasan aset (divestasi) berikut sebagaimana yang termuat dalam RKAP 2019:
  - a. Penghapusbukuan sepuluh unit *shipset* di enam galangan masih dalam proses pengajuan karena nilai buku setelah dilakukan penurunan nilai masih sebesar Rp66 miliar (tahun 2018).
  - b. Pelepasan 1.500 unit kontainer yang tidak produktif dan tersimpan di beberapa Depo antara lain Surabaya, Pontianak, dan Batam masih dalam proses inventarisasi dan pengajuan penghapusbukuan.
3. Penambahan aset tetap berupa satu unit *handymax* (MV Dharma Lautan Ruby) dibiayai dari dana Penyertaan Modal Negara (PMN), *refinancing*, dan pembiayaan BNI senilai Rp175,9 miliar untuk pengangkutan batu bara.
4. Proses pengadaan *tug & barge* (TB Daya Lautan II) berlangsung sejak November 2018 dan selesai pada Januari 2019 senilai Rp17,4 miliar untuk pengangkutan batu bara.
5. Penambahan aset dalam konstruksi berupa kerja sama novasi dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) sebesar Rp39,9 miliar.

2. The Company has not released the following assets (divestment) as stated in the 2019 RKAP:
  - a. Writing off ten units of ships in six shipyards is still in the process of submission because the book value after an impairment was still in the amount of Rp66 billion (2018).
  - b. Release of 1,500 units of unproductive containers stored in several depots, including Surabaya, Pontianak and Batam, is still in the process of inventorying and submitting the writing off proposa.
3. Addition of fixed assets in the form of one *handymax* unit (MV Dharma Lautan Ruby) funded by the State Capital Participation (PMN), *refinancing*, and BNI financing of Rp175.9 billion, intended for coal transportation.
4. The *tug & barge* procurement process (TB Daya Lautan II) took place in November 2018 and was completed in January 2019 at a price of Rp17.4 billion, intended for coal transportation.
5. Addition of assets in construction in the form of novation cooperation with PT Pertamina (Persero) and PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) amounted to Rp39.9 billion.

## PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Amendments to the Laws and Regulations

Pada 2019, tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Perusahaan.

In 2019, there were no changes in laws and regulations that significantly influenced the Company's management.

## PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

### Changes in Accounting Policy

Pada 2019, pembaruan dan penyesuaian dalam penerapan standar akuntansi keuangan yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2019, namun tidak berdampak signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tahun berjalan. Adapun amandemen dan penyesuaian standar akuntansi tersebut antara lain:

There were some updates and adjustments to the financial accounting standards effective on January 1, 2019, but this did not have a significant impact on the Company's accounting policy nor have a material impact on the amounts reported in the current year's financial statements. The amendments and adjustments to the accounting standards include:

- Amandemen PSAK Nomor 24, "Imbalan Kerja – Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program"
- Penyesuaian tahunan PSAK Nomor 22, "Kombinasi Bisnis"
- Penyesuaian tahunan PSAK Nomor 26, "Biaya Pinjaman"
- Penyesuaian tahunan PSAK Nomor 46, "Pajak Penghasilan"
- Penyesuaian tahunan PSAK Nomor 66, "Pengendalian Bersama"
- ISAK Nomor 33 tentang "Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka"
- ISAK Nomor 34 tentang "Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"
- Amendment to PSAK Number 24, "Employee Benefits – Amendments, Curtailment or Completion of Programs"
- Annual Adjustment of PSAK Number 22, "Business Combination"
- Annual Adjustment of PSAK Number 26, "Borrowing Cost"
- Annual Adjustment of PSAK Number 46, "Income Tax"
- Annual Adjustment of PSAK Number 66, "Joint Control"
- ISAK Number 33 concerning "Foreign Exchange Transactions and Unearned Revenue"
- ISAK Number 34 concerning "Uncertainty in the Treatment of Income Tax"

## INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

### Information on Business Continuity

#### HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Perseroan tidak menghadapi risiko yang signifikan dalam menjaga kelangsungan usaha. Meski harga

#### POTENTIAL MATTERS MAY AFFECT BUSINESS CONTINUITY

The Company does not face significant risks in maintaining business continuity. Although the price

kontrak baru pengangkutan batu bara mengalami penurunan dan berimbas pada ketidaktercapaian pendapatan Perseroan sesuai target RKAP 2019, Perusahaan tetap mencatat kenaikan pendapatan usaha dibanding tahun sebelumnya.

Adapun rata-rata harga batu bara acuan pada 2019 mencapai US\$77,89 per ton, menurun dibandingkan periode yang sama tahun 2018 sebesar US\$98,96 per ton. Di sisi lain, volume pengangkutan batu bara terbesar yang diperoleh Perseroan selama ini berasal dari PT PLN (Persero). Pada 2019, volume tersebut menurun karena perubahan kebijakan internal PLN yang mengutamakan entitas anaknya, sehingga margin Perseroan turut terpengkas dan tidak berhasil memenuhi target RKAP 2019.

Namun demikian, Perseroan dapat mengakomodasi segala perubahan kondisi dalam industri pelayaran dan logistik dengan baik melalui berbagai inisiatif strategis, sehingga pada akhirnya kelangsungan usaha Perseroan tetap terjaga.

### ASESMEN MANAJEMEN

Dari hasil asesmen terhadap kelangsungan usaha Perseroan, manajemen optimistis bahwa Perseroan memiliki sumber daya yang memadai untuk melanjutkan usaha di masa mendatang. Di sisi lain, manajemen memandang tidak terdapat ketidakpastian material yang dapat menghalangi kelangsungan usaha Perseroan.

### ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM ASESMEN KELANGSUNGAN USAHA

1. Keuangan Perusahaan berada dalam kondisi stabil dengan membukukan kenaikan pendapatan usaha dan laba bersih setiap tahun.
2. Tingkat kesehatan Perseroan pada 2019 mencapai kualifikasi "AA" (Sehat) dengan skor 82,60, meningkat dari tahun 2018 sebesar 72,89.
3. Usaha Perseroan memiliki kontribusi terhadap perekonomian negara, terutama dalam menekan biaya logistik.
4. Pembangunan konektivitas laut menunjang pertumbuhan industri pelayaran dan logistik di Indonesia.

of the coal transport in the new contract is lower and has caused the Company's non-achievement of 2019 Work Plan and Budget (RKAP) target, the Company still recorded an increase in operating revenue compared to the previous year.

The average price of coal shipment in 2019 was US\$77.89 per ton, down from US\$98.96 per ton in the same period of 2018. On the other hand, the largest volume of the Company's coal transport so far comes from PT PLN (Persero). In 2019, the volume declined due to changes in PLN's internal policy on prioritizing its subsidiaries, so that the Company lost some margins and failed to meet the 2019 RKAP target.

However, the Company is able to accommodate well all changes in the conditions of shipping and logistics industry through various strategic initiatives, so that in the end the Company's business continuity is maintained.

### MANAGEMENT ASSESSMENT

From the results of assessment on the Company's business continuity, the management is optimistic that the Company has adequate resources to continue in the future. The management also views that there is no material uncertainty that could hinder the Company's business continuity.

### ASSUMPTIONS USED BY THE MANAGEMENT IN THE BUSINESS CONTINUITY ASSESSMENT

1. The Company's finance is in a stable condition by recording an increase in operating income and net profit each year.
2. The Company's health level in 2019 ranked the qualification of "AA" (Healthy) with a score of 82.60, an increase from 72.89 in 2018.
3. The Company's business has a contribution to the country's economy, especially in reducing logistics costs.
4. The maritime connectivity development supports the growth of the shipping and logistics industry in Indonesia.





# **TATA KELOLA PERUSAHAAN**

## Good Corporate Governance

Praktik GCG Perseroan mengalami kenaikan skor dari 67,02 pada 2018 menjadi 68,00 pada 2019. Peningkatan tersebut menunjukkan komitmen Perseroan untuk senantiasa melakukan berbagai upaya perbaikan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

The Company's GCG score increased from 67.02 in 2018 to 68.00 in 2019. This increase shows the Company's commitment to always make various efforts for continuous improvement in line with the GCG principles.



## PENERAPAN GCG

### GCG Implementation

Mengacu pada Pedoman Umum Tata Kelola Perseroan yang Baik yang ditetapkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Perseroan menjalankan praktik GCG dengan memprioritaskan penciptaan nilai tambah dan konsistensi pembenahan melalui penerapan lima prinsip GCG, yakni Keterbukaan, Kemandirian, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran. Kelima prinsip tersebut diwujudkan dalam pengelolaan Perusahaan meliputi penerapan strategi bisnis, pengelolaan produk dan layanan, sistem manajemen risiko, dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Berikut Pedoman Penerapan GCG yang berlaku di Perseroan.

1. Perusahaan secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip GCG dan masalah yang dihadapi.
2. Salah satu Direksi atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk memantau dan menjaga agar penerapan GCG dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
3. Hal-hal yang dinilai antara lain: kepatuhan Perusahaan terhadap Pedoman Tata Kelola Perusahaan, praktik-praktik yang dilakukan, kondisi-kondisi yang tidak dapat dipenuhi dalam penerapan GCG dan perumusan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dan Dewan Komisaris wajib menerapkan profesionalisme, efisiensi, dan lima prinsip GCG.
5. Tim GCG yang dibentuk oleh Direksi memastikan ketaatan terhadap aturan GCG dan melaporkannya secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Secara periodik melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penerapan GCG, baik secara mandiri maupun melibatkan pihak eksternal yang independen, lalu melaporkannya kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
7. Setiap pegawai wajib melaporkan dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip GCG.
8. Identitas pegawai sebagai pelapor harus dijaga, kecuali diperlukan dalam tindak lanjut laporannya.

Referring to the General Guidelines for Good Corporate Governance established by the National Committee for Governance Policy (KNKG), the Company implements the GCG practices by prioritizing the creation of added value and consistency in improvement through the application of five GCG principles, namely Transparency, Independence, Accountability, Responsibility, and Fairness. The five principles are manifested in the management of the Company including the application of business strategies, management of products and services, risk management systems, and management of human resources (HR). The following are the GCG Implementation Guidelines applicable in the Company.

1. The company actively discloses the extent of the implementation of GCG principles and the problems faced.
2. One of the Directors or appointed official is assigned to monitor and maintain the implementation of GCG to its best.
3. The aspects assessed include: the Company's compliance with the Corporate Governance Guidelines, the practices applied, the conditions that cannot be met in implementing GCG, and the formulation of corrective measures needed.
4. In performing their duties, the Board of Directors and Board of Commissioners must apply the professionalism, efficiency, and GCG principles.
5. The GCG Team formed by the Board of Directors ensures the compliance with GCG rules and reports it periodically to the Board of Directors and Board of Commissioners.
6. Periodically evaluate the implementation of GCG, both independently and involving independent external parties, then report the outcomes to the Board of Directors and Board of Commissioners.
7. Every employee is required to report alleged violations of GCG principles.
8. Employee identity as a reporter must be classified, unless required in following up on the report.

9. Tidak ada sanksi/hukuman yang dikenakan bagi pelapor, kecuali apabila di kemudian hari dinyatakan bahwa yang bersangkutan terlibat dan laporannya dinyatakan tidak benar.
10. Tim GCG yang dibentuk Direksi harus menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan batas kewenangannya.

### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 31 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN yang telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012.
5. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.
6. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-2/MBU/07/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Penanganan Benturan Kepentingan, serta Penguatan Pengawasan Intern.
7. Surat Keputusan Direksi PT DJAKARTA LLOYD (Persero) Nomor 032.7/Kep/DIRUT/X/2018 tentang Pedoman Good Corporate Governance PT DJAKARTA LLOYD (Persero) tanggal 30 Oktober 2018.

9. There are no sanctions/penalties imposed on the complainant, except it is proved later that the person concerned is involved and the report is declared false.
10. The GCG Team formed by the Board of Directors must follow up on the report under their authority boundaries.

### LEGAL BASIS

1. Law Number 19 of 2003 about SOEs
2. Republic of Indonesia Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies
3. RI Law Number 14 of 2008 regarding Disclosure of Public Information
4. Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Regulation Number PER-01/MBU/2011 dated August 31, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs, amended by the Regulation Number PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012
5. Ministry of SOEs' Secretary Decree No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 pertaining to Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation for the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs
6. Minister of SOEs Circular Letter Number SE-2/MBU/07/2019 Year 2019 concerning Clean SOE Management through the Implementation of Prevention Measures in Corruption, Collusion and Nepotism, also the Handling Conflicts of Interest, and Strengthening the Internal Control
7. PT DJAKARTA LLOYD (Persero)'s Board of Directors Decree Number 032.7/Kep/DIRUT/X/2018 regarding Guidelines for Good Corporate Governance of PT DJAKARTA LLOYD (Persero) dated October 30, 2018



# PENERAPAN GCG

## GCG Implementation

### PRINSIP-PRINSIP GCG

### GCG PRINCIPLES

Prinsip Principle	Penjelasan Explanation	Implementasi Implementation
<b>Keterbukaan Transparency</b>	<p>Perusahaan memiliki keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi material.</p> <p>The Company shows transparency in performing process, decision making and openness in disclosing the company's material and relevant informations.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Perusahaan menetapkan kebijakan tentang klasifikasi informasi, baik bersifat terbuka maupun tertutup, sebagai panduan pelaksanaan bagi seluruh insan DJAKARTA LLOYD.</li> <li>2 Perusahaan mengungkapkan informasi, baik keuangan maupun non-keuangan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan relevan, antara lain Pemegang Saham dan seluruh pemangku kepentingan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 The Company establishes a policy concerning the classification of information, both open and closed, as the implementation guideline for all DJAKARTA LLOYD personnel.</li> <li>2 The Company discloses its financial and non-financial information to relevant and respective parties, including shareholders and all company stakeholders.</li> </ol>
<b>Kemandirian Independency</b>	<p>Perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak-pihak manapun.</p> <p>The Company is professionally managed under no conflict of interests and influence/pressure from any parties.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Setiap organ dalam Perusahaan saling menghormati hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang organ lainnya.</li> <li>2 Perusahaan menghindari dominasi, tekanan/pengaruh, dan benturan kepentingan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Every organ within the Company respects the rights, obligations, duties, responsibilities, and authority of respective organs.</li> <li>2 The Company avoids domination, influence/pressure, and conflict of interests from any parties that is not in accordance with the laws and regulations of healthy corporate principles.</li> </ol>
<b>Akuntabilitas Accountability</b>	<p>Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan berlangsung secara efektif.</p> <p>The organs' clarity of functions, implementation, and accountability to carry out company management effectively.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan laporan tahunan dan kinerja keuangan kepada RUPS secara berkala.</li> <li>2 Perusahaan menetapkan rincian peran dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan karyawan secara jelas sesuai dengan visi, misi, dan sasaran strategis.</li> <li>3 Perusahaan memastikan seluruh lapisan internal memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pelaksanaan GCG.</li> <li>4 Perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang berjalan efektif.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 The Board of Commissioners and the Board of Directors convey the annual report and financial performance regularly.</li> <li>2 The Company establishes the details of role and responsibility for each Company's organ and employees following vision, mission, and strategic goals.</li> <li>3 The Company ensures that the entire internal understand their respective roles and responsibilities in implementing GCG.</li> <li>4 The Company has an effective internal control system.</li> </ol>



Prinsip Principle	Penjelasan Explanation	Implementasi Implementation
Pertanggungjawaban Responsibility	<p>Kesesuaian antara pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.</p> <p>The conformity between Company management and prevailing regulations and healthy corporate principles.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terkait dengan bidang usaha korporasi antara lain ketentuan ketenagakerjaan, kewajiban perpajakan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta persaingan usaha.</li> <li>Perusahaan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>The Company runs the applicable laws and regulations of the Central Government and Regional Governments related to corporate business fields, including labor provisions, tax obligations, occupational health and safety, and business competitions.</li> <li>The Company carries out the social and environmental responsibility activities.</li> </ol>
Kewajaran Fairness	<p>Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Fairness and equality in fulfilling the stakeholders' rights arising based on agreements and applicable laws and regulations.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perusahaan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberikan masukan, saran, dan pendapat untuk kemajuan Perusahaan.</li> <li>Perusahaan menetapkan pola karier tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.</li> <li>Perusahaan melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>The Company allows interested parties in providing input, suggestions, and opinions for the Company's progress.</li> <li>The Company sets a career path regardless of ethnicity, religion, race, and gender.</li> <li>The Company implements the procurement system of goods and services under the applicable laws and regulations.</li> </ol>

**HUBUNGAN TATA KELOLA**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ utama Perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, serta Direksi. Keberhasilan pelaksanaan GCG ditentukan oleh pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab setiap organ secara independen sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

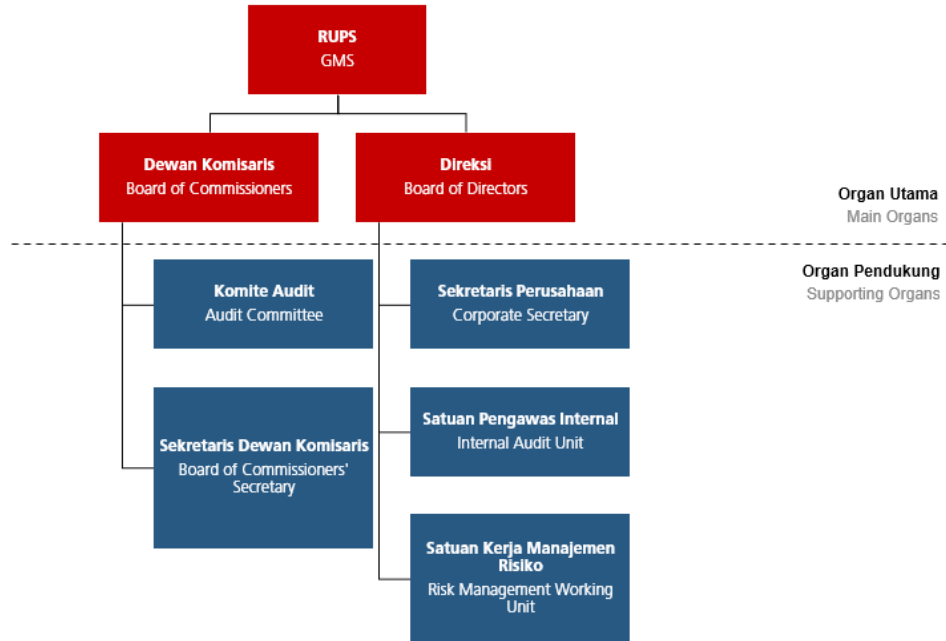
**GOVERNANCE RELATIONS**

Based on the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the main organs of the Company consist of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The successful implementation of GCG is determined by the actualization of duties, functions and responsibilities of each organ independently in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association.

# PENERAPAN GCG

## GCG Implementation

### Hubungan Tata Kelola dalam Perusahaan Governance Relations in the Company



### IMPLEMENTASI GCG 2019

Pada 2019, Perseroan mewujudkan komitmen pelaksanaan GCG dalam bentuk sebagai berikut.

1. Penyampaian Laporan Tahunan 2018.
2. Pelaksanaan *self-assessment* GCG tahun 2019.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi organ Perusahaan sesuai Board Manual DJAKARTA LLOYD.
4. Penerapan kegiatan bisnis sesuai Pedoman Benturan Kepentingan.
5. Penyediaan sarana pelaporan Sistem Pelaporan Pelanggaran.
6. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh pejabat struktural satu tingkat di bawah Direksi dan pejabat setingkat Senior Manager di perusahaan afiliasi dan perusahaan patungan sebagai bentuk dukungan antikorupsi.
7. Penerapan Kebijakan Pengendalian Informasi Perusahaan.
8. Pemutakhiran informasi Perusahaan melalui situs web dan media sosial.

### 2019 GCG IMPLEMENTATION

In 2019, the Company realized its commitment to implement GCG in the following forms.

1. Submission of the 2018 Annual Report.
2. Implementation of GCG self-assessment in 2019.
3. Actuties and functions implementation of the Company's organs under its Board Manual.
4. Implementation of the business activities following the Conflict of Interest Guidelines.
5. Provision of Whistleblowing System reporting facilities.
6. Submission of State Officials' Asset Report (LHKPN) by structural officials one level below the Board of Directors and Senior Manager level at affiliated and joint venture companies as a form of anti-corruption support.
7. Application of Company Information Control Policy.
8. Update the Company information on the corporate website and social media channels.

## EVALUASI DAN PENILAIAN GCG 2019

DJAKARTA LLOYD memantau implementasi GCG melalui penilaian dan evaluasi, baik secara mandiri maupun melalui lembaga independen, kemudian hasilnya dilaporkan kepada regulator. Pada 2017 dan 2018, Perseroan melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Audit Internal melakukan penilaian mandiri GCG atas pencapaian kinerja Perusahaan, sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan guna mencapai hasil yang optimal. Penilaian dilakukan sesuai arahan Pemegang Saham dan Dewan Komisaris.

Berikut tabel capaian skor penerapan GCG di DJAKARTA LLOYD selama tahun 2017-2019.

No.	Aspek Pengujian Assessment Aspect	Bobot Weight	2017		2018		2019	
			Skor Score	%	Skor Score	%	Skor Score	%
1	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,00	4,68	66,83	5,19	74,20	4,96	70,82
2	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,00	8,481	94,23	8,04	89,29	6,44	71,58
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	29,46	84,18	26,05	74,23	26,34	75,25
4	Direksi Board of Directors	35,00	29,18	83,37	22,51	64,32	25,30	72,28
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	6,42	71,32	5,22	58,04	4,97	55,18
<b>Aspek Lainnya Other Aspect</b>		<b>5,00</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Total Total</b>		<b>100,00</b>	<b>78,84</b>	<b>-</b>	<b>67,02</b>	<b>-</b>	<b>68,01</b>	<b>-</b>
<b>Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG Quality Classification of GCG Implementation</b>			<b>Baik Good</b>		<b>Cukup Baik Good Enough</b>		<b>Cukup Baik Good Enough</b>	

Capaian Perusahaan dalam implementasi GCG mengalami penurunan dari 78,844 pada 2017 menjadi 67,02 pada 2018. Upaya perbaikan mulai menunjukkan hasil pada 2019 dengan adanya kenaikan skor GCG menjadi 68,00 yang termasuk dalam klasifikasi kualitas "Cukup Baik". Ke depan, Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan berbagai upaya perbaikan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

## GCG EVALUATION AND ASSESSMENT IN 2019

DJAKARTA LLOYD monitors the implementation of GCG through assessment and evaluation, both independently and by an independent institution, of which outcomes to be reported to the regulator. In 2017 and 2018, the Company through the Internal Audit Unit (SPI) and Internal Audit carried out a GCG self-assessment of the Company's performance achievements, as well as formulating corrective measures to achieve optimal results. The assessment was conducted according to the directions of the Shareholders and the Board of Commissioners.

The following is the achievement score table for GCG implementation in DJAKARTA LLOYD in 2017-2019.

The Company's achievement in implementing GCG decreased from 78.844 in 2017 to 67.02 in 2018. Improvement efforts began to show results in 2019 with an increase in GCG scores to 68.00 which is classified as "Good Enough" quality. The Company is committed to continuously conduct various improvements in implementing the GCG principles in the future.

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan salah satu organ utama Perseroan dan menjadi wadah pengambilan keputusan strategis dan penting terkait pengelolaan Perusahaan. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi, dengan mengacu pada batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Sebagai media utama bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam berhubungan dengan Pemegang Saham, RUPS DJAKARTA LLOYD terdiri atas RUPS Tahunan, RUPS Luar Biasa (diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan), dan Rapat Pemegang Saham di luar RUPS. Penyelenggaraan RUPS menjadi tanggung jawab Direksi dan harus sesuai dengan kepentingan Perusahaan, serta memerhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Bilamana Direksi berhalangan, maka pelaksanaan RUPS ditangani oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
3. Anggaran Dasar Perseroan.

### PELAKSANAAN RUPS

Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS, di antaranya:

1. Panggilan untuk RUPS, meliputi informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usulan Direksi yang hendak diajukan dalam RUPS. Apabila informasi tersebut belum tersedia saat panggilan RUPS dilakukan, maka informasi dan/atau usul tersebut harus tersedia di kantor Perusahaan sebelum RUPS diselenggarakan.
2. Metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi,

The General Meeting of Shareholders (GMS) is one of the main organs of the Company and is a forum for strategic and important decision making related to the management of the Company. The GMS has the authority not granted to the Board of Commissioners or Board of Directors, referring to the boundaries stipulated in the legislation and the Articles of Association.

As the main forum for the Board of Commissioners and Board of Directors in dealing with Shareholders, the DJAKARTA LLOYD GMS consists of an Annual GMS, Extraordinary GMS (held at any time as necessary), and Shareholder Meetings outside the GMS. The implementation of GMS is the responsibility of the Board of Directors and must be held in accordance with the interests of the Company, and pay attention to the laws and regulations and the Articles of Association. If the Board of Directors is unable to perform, the GMS is handled by the Board of Commissioners in accordance with the laws and regulations and the Articles of Association.

### LEGAL BASIS

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
2. Law Number 19 of 2003 regarding SOEs
3. The Company's Articles of Association

### GMS IMPLEMENTATION

Each of the shareholders has the right to obtain a full explanation and accurate information regarding the organization of GMS, including:

1. A GMS invitation, which includes information regarding each agenda item on the GMS, including proposals by the Board of Directors that will be submitted at the GMS. If that such information is not available when a GMS call is made, then the information and/or proposals must be provided in the Company's office before the GMS is held.
2. The method to calculate and determine salaries/honorariums, facilities and/or other benefits for each member of the Board of Commissioners

serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus untuk RUPS mengenai Laporan Tahunan.

3. Informasi mengenai rincian RKAP dan hal-hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perseroan, khusus untuk RUPS mengenai Rencana Jangka Panjang (RJP) dan RKAP.
4. Informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Perusahaan yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. Penjelasan lengkap dan informasi akurat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung. RUPS dalam mata acara lain-lain berhak mengambil keputusan selama semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS serta menyetujui tambahan mata acara RUPS. Keputusan atas mata acara tambahan harus disetujui dengan suara bulat.

#### KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

1. RUPS diselenggarakan sesuai kepentingan Perusahaan dengan memerhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta dipersiapkan secara memadai sehingga dapat mengambil keputusan yang transparan.
2. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau yang mewakili lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.
3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan Rapat kedua tanpa didahului dengan pemberitahuan rapat.
4. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat sepuluh hari dan paling lambat dua puluh satu hari, terhitung sejak rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti pada rapat pertama.
5. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh

and Directors, as well as details regarding salaries/honoraria, facilities and/or other benefits received by incumbent members of the Board of Commissioners and Directors, particularly at the GMS regarding the Annual Report.

3. Detail information regarding the company work and budget plan and other matters planned to be carried out by DJAKARTA LLOYD, specifically for the Company Long-Term Plan (RJP) and Company Work and Budget Plan (RKAP).
4. Financial information and other matters related to the Company which is contained in the Annual Report and Financial Report.
5. Complete explanation and accurate information regarding related matters about GMS agenda which is given before and/or at the time of GMS. During the miscellaneous agenda, the GMS has the right to make any decisions as long as the attended and/or represented Shareholders approve the additional GMS agenda. Decisions on the additional GMS agenda must be approved unanimously.

#### QUORUM, VOTING RIGHTS, AND RESOLUTIONS

1. The GMS is held following the Company's interests and by taking into account the Articles of Association and laws and regulations, and with adequate preparation so that transparent decisions can be made.
2. The GMS can be held if it is attended by the Shareholders or represents more than 1/2 of the total shares with voting rights issued by the Company.
3. If a quorum is not reached, a second meeting can be held without prior meeting notification.
4. The second meeting is held at the latest ten days and no later than twenty-one days from the first meeting with the same terms and conditions as required for the first meeting.
5. The second meeting is legal and has the right to make binding decisions if attended by



# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## General Meeting of Shareholders

Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 50% (lima puluh persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau terwakili.

- Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bila musyawarah tidak tercapai, maka keputusan sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan lain.
- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
- Setiap penyelenggaraan RUPS wajib memiliki risalah RUPS yang sekurang-kurangnya berisi waktu, agenda, peserta, pendapat-pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS. Risalah tersebut wajib ditandatangani oleh Ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Namun, tanda tangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris. Selain itu, setiap Pemegang Saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

Shareholders representing at least 50% (fifty percent) of the total shares with voting rights present or represented.

- GMS decisions are taken based on deliberation to reach consensus. If a decision is not reached by deliberation, then the decision is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the number of votes issued, unless the law and/or Articles of Association determined otherwise.
- All decisions are made based on deliberation to reach consensus. If a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, the decision will be taken by voting based on the vote agrees to more than 1/2 (one-half) of all shares with voting rights present at the meeting.
- In every GMS, minutes of GMS must be made which at least contain the information about time, agenda, participants, opinions conveyed at the GMS, and GMS decisions. That minutes must be signed by the GMS Chairman and at least one of the Shareholder appointed from and by the GMS participants. However, the signature is not required if the GMS minutes are poured in a notarial deed. In addition, each of the Shareholders is entitled to have a copy of the GMS minutes.

### PENYELENGGARAN RUPS 2019

Selama tahun 2019, Perusahaan menyelenggarakan RUPS sebanyak dua kali di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, yakni pada 7 Januari 2019 dan 21 Mei 2019. RUPS dianggap sah karena telah memenuhi kuorum kehadiran, yakni dihadiri lebih dari 51 persen dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Berita acara dari kedua RUPS tersebut disusun oleh Notaris Lenny Janis Ishak, S.H.

### 2019 GMS IMPLEMENTATION

In 2019, the Company held GMS twice at the Ministry of SOEs Office, Jakarta, on January 7, 2019 and May 21, 2019. Both GMS are considered valid as they met the requirement in attendance quorum, attended by more than 51 percent of the total shares issued by Company, so they can make legal and binding resolutions. The minutes of GMS have been legalized in a deed by Notary Lenny Janis Ishak, S.H.

**RUPS I (Akta Nomor 04 tanggal 7 Januari 2019)**

**Mata Acara**

1. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2019
2. Pengesahan Indikator Aspek Operasional untuk Penilaian Tingkat Kesehatan Tahun 2019
3. Penetapan *Key Performance Indicators* (KPI) dalam Kontrak Manajemen Tahun 2019 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham

**Keputusan Hasil RUPS**

1. Mengesahkan RKAP 2019, termasuk di dalamnya RKAP Dewan Komisaris Tahun 2019 dengan pokok-pokok sebagai berikut:
  - a. Laporan Laba (Rugi) ditargetkan memiliki capaian laba bersih senilai Rp92.514.871.000.
  - b. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasi per 31 Desember 2019 diproyeksikan ditutup dengan total aset sebesar Rp1.606.961.567.000.
  - c. Total investasi sebesar Rp657.100.175.000.
  - d. Skor tingkat kesehatan Perusahaan sebesar 77,5 atau Sehat (A).
2. Mengesahkan Indikator Aspek Operasional untuk penilaian tingkat kesehatan tahun 2019 meliputi:

No.	Indikator	Bobot Weight	Nilai Score	Indicator
1	Metrik Ton	8,75	7,50	Metric Tons
2	Penambahan Jalur	8,75	5,00	Route Addition
3	Bongkar Muat	8,75	4,50	Stevedoring
4	Keagenan	8,75	5,00	Agency Business
<b>Jumlah</b>		<b>35,00</b>	<b>22,00</b>	<b>Total</b>

3. Menetapkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2019 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, termasuk di dalamnya KPI Dewan Komisaris.

**GMS I (Deed Number 04 dated January 7, 2019)**

**Agenda**

1. Ratification of the 2019 Corporate Work Plan and Budget (RKAP)
2. Ratification of Operational Aspect Indicators for Soundness Level Assessment in 2019
3. Determination of Key Performance Indicators (KPI) in the 2019 Management Contract between the Board of Directors and Board of Commissioners and the Shareholders

**GMS Resolutions**

1. Approved the 2019 RKAP, including the Board of Commissioners' 2019 RKAP, with the following points:
  - a. Income Statement is targeted to have a net profit achievement of Rp92,514,871,000.
  - b. The Consolidated Statement of Financial Position (Balance Sheet) as of December 31, 2019 was projected to be closed with total assets of Rp1,606,961,567,000.
  - c. Total investment was Rp657,100,175,000.
  - d. Score of the Company's soundness level was 77.5 or Healthy (A).
2. Ratified these Operational Aspect Indicators for the company's soundness assessment in 2019:

3. Establish the Key Performance Indicators (KPI) contained in the 2019 Management Contract between the Board of Directors and Board of Commissioners and the Shareholders, including the Board of Commissioners' KPI.

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## General Meeting of Shareholders

### Realisasi Arahan RUPS Realization of GMS Directives

No.	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut Realization
1	<p>Buku RKAP, RKA-PKBL, dan RKA Dewan Komisaris Tahun 2019 yang telah disetujui dan disahkan RUPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2019, serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris.</p> <p>The Board of Commissioners' 2019 RKAP, RKA-PKBL, and RKA books that have been approved and ratified by the GMS are an inseparable part of the Minutes of GMS Resolutions and serve as a guide for the Board of Directors in implementing work programs and achieving performance targets in 2019, as well as a means of monitoring and supervision for the Board of Commissioners.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan RUPS</p> <p>Has been implemented completely</p>
2	<p>Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris agar mempercepat pelaksanaan restrukturisasi internal Perseroan, antara lain dalam bidang keuangan, operasional, pengelolaan investasi, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan SDM. Khusus untuk bidang teknologi informasi, Dewan Komisaris agar mendorong penerapan teknologi informasi yang lebih baik, sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional Perseroan.</p> <p>In order to improve the efficiency and effectiveness of the management of the Company, the Board of Directors and the Board of Commissioners shall accelerate the implementation of the Company's internal restructuring in finance, operations, investment management, procurement of goods and services, and HR management. In on information technology, the Board of Commissioners shall encourage the application of better information technology system, so that it can support the efficiency and effectiveness of the Company's operational activities.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan RUPS</p> <p>Has been implemented completely</p>
3	<p>Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk melakukan pengawasan secara komprehensif terhadap perolehan alat produksi yang pendanaannya berasal dari dana Penyertaan Modal Negara, sehingga dapat secara optimal menghasilkan keuntungan dan perbaikan kinerja Perseroan di masa mendatang.</p> <p>The Board of Directors and Board of Commissioners are required to conduct comprehensive supervision over the revenue of production equipment whose funding comes from the State Capital Participation, so that it can optimally generate profits and improve the performance of the Company in the future.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan RUPS</p> <p>Has been implemented completely</p>
4	<p>Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk memastikan perolehan dan pelaksanaan secara optimal seluruh kontrak pekerjaan angkutan curah kering, angkutan curah lainnya, angkutan curah cair, jasa pemanduan, angkutan kontainer, serta layanan <i>transshipment</i> dalam rangka mendukung perbaikan dan peningkatan kinerja Perseroan.</p> <p>The Board of Directors and Board of Commissioners are required to ensure the revenue and implementation of the entire contracts of dry bulk, liquid bulk and other bulk shipment, harbor tug, container transportation, and transshipment services to be optimal in order to support the Company's performance improvement.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan RUPS</p> <p>Has been implemented completely</p>

No.	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut Realization
5	<p>Berkaitan dengan pencatatan pendapatan yang berasal dari pendapatan KSO, Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk memastikan bahwa pembentukan KSO tersebut memberikan keuntungan maksimal kepada Perseroan serta sesuai dengan kaidah praktik bisnis yang baik dan GCG.</p> <p>In connection with recording the revenue derived from joint operations (KSO), the Board of Directors and Board of Commissioners are required to ensure that the formation of KSO provides maximum benefits to the Company and is in accordance with the principles of good business practices and GCG.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan RUPS</p> <p>Has been implemented completely</p>
6	<p>Seluruh alat produksi yang digunakan oleh Perseroan harus menghasilkan kinerja positif dan tidak merugikan Perseroan.</p> <p>All the production equipment used by the Company must produce positive performance and do not harm the Company.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan RUPS</p> <p>Has been implemented completely</p>
7	<p>Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk melakukan pengendalian dan efisiensi seluruh beban pokok pendapatan di masing-masing pekerjaan, serta beban usaha, terutama beban pegawai, beban umum administrator kantor, beban jasa profesional, dan beban pemasaran. Setiap pengeluaran beban pokok pendapatan dan beban usaha harus in line dengan perolehan kontrak pekerjaan serta peningkatan produktivitas di masing-masing unit kerja.</p> <p>The Board of Directors and Board of Commissioners are required to conduct control and efficiency on the entire cost of revenue in each work, as well as operating expense, especially employee expense, general cost of the office administrator, professional service fee, and marketing expense. Every expense for the costs of revenue and operation must be in line with the revenue of work contracts and increased productivity in each work unit.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan RUPS</p> <p>Has been implemented completely</p>
8	<p>Dalam setiap kegiatan operasional maupun investasi, agar tetap memprioritaskan optimalisasi sinergi antara Perseroan dengan BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN.</p> <p>Every operational and investment activity shall prioritize the optimization of synergy between the Company and SOEs and/or their subsidiaries.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan RUPS</p> <p>Has been implemented completely</p>
9	<p>Berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penghapusbukuan aset tetap tidak beroperasi pada tahun 2019, agar disampaikan permohonan persetujuan secara terpisah kepada RUPS setelah dilengkapi dengan kajian sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN, pakta integritas, dan mendapatkan rekomendasi Dewan Komisaris dengan memerhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>In connection with the Company's plan to write off non-operating fixed assets in 2019, a separate application for approval must be submitted to the GMS after it is completed with a review as stipulated in the Minister of SOEs Regulation, integrity pact, and has obtained a recommendation from the Board of Commissioners with due regard to the provisions stipulated in the Articles of Association and the provisions of the applicable laws and regulations.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan RUPS</p> <p>Has been implemented completely</p>

# RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

## General Meeting of Shareholders

No.	Arahan RUPS GMS Directives	Tindak Lanjut Realization
10	<p>Berkaitan dengan rencana penerbitan MTN atau surat utang lainnya pada 2019, agar disampaikan permohonan persetujuan secara terpisah kepada RUPS setelah dilengkapi dengan kajian, pakta integritas, dan mendapatkan rekomendasi Dewan Komisaris dengan memerhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>In connection with the plan to issue MTN or other debt securities in 2019, a separate application for approval must be submitted to the GMS after it is completed with a review, integrity pact, and has obtained a recommendation from the Board of Commissioners with due regard to the provisions stipulated in the Articles of Association and the provisions of applicable laws and regulations.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan RUPS</p> <p>Has been implemented completely</p>
11	<p>Dalam setiap rencana penarikan pinjaman, harus mempertimbangkan ketepatan waktu penarikan dana dengan penggunaan dana dan kemampuan <i>disbursement</i> untuk menghindari <i>negative spread</i> yang dapat memberatkan kinerja keuangan Perseroan dan <i>excess cash flow from financing activities</i> yang kurang optimal.</p> <p>Each loan withdrawal plan must consider the timeliness of withdrawal with the use of the fund and the ability of disbursements to avoid negative spreads that could burden the Company's financial performance and excess cash flow from financing activities that becomes less optimal.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan RUPS</p> <p>Has been implemented completely</p>
12	<p>Laporan Keuangan (<i>Audited</i>) Tahun Buku 2019 agar disampaikan kepada Menteri BUMN paling lambat akhir Februari 2020.</p> <p>Audited Financial Statements for Fiscal Year 2019 shall be submitted to the Minister of SOEs no later than the end of February 2020.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan RUPS</p> <p>Has been implemented completely</p>
13	<p>Direksi diminta memerhatikan dan melaksanakan tanggapan Dewan Komisaris PT Djakarta Lloyd (Persero) sebagaimana surat nomor A.001/LB.604.02/DEKOM/XI/2018 tanggal 13 November 2018, serta arahan RUPS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rapat.</p> <p>The Board of Directors is asked to pay attention and implement the responses of the Board of Commissioners of PT Djakarta Lloyd (Persero) as stated in the letter number A.001/LB.604.02/DEKOM/XI/2018 dated November 13, 2018, as well as the direction of the GMS which is an inseparable part of the Meeting Resolutions.</p>	<p>Telah dilaksanakan sesuai arahan RUPS</p> <p>Has been implemented completely</p>



**RUPS II (Akta Nomor 13 tanggal 21 Mei 2019)****Mata Acara**

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan yang menjabat atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama tahun 2018.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018 sebesar Rp61.306.482.282 sebagai pengurang akumulasi rugi Perseroan.
3. Penetapan pemberian tantiem/insentif kinerja kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja tahun 2018 dan penetapan gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris Perseroan serta fasilitas dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2019.
4. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.
5. Pertanggungjawaban dan pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) 2015 untuk periode selama tahun 2018.

**Keputusan Hasil RUPS**

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang menjabat atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan pada 2018.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih atribusi pemilik entitas induk Perseroan untuk Tahun Buku 2018 sebesar Rp61.303.918.896 seluruhnya menjadi dana cadangan.
3. Penetapan KAP yang mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 dilakukan secara tersendiri oleh Menteri BUMN selaku berdasarkan usulan Dewan Komisaris.

**GMS II (Deed Number 13 dated May 21, 2019)****Agenda**

1. Approval and ratification the Financial Statements for Fiscal Year 2018 as well as provision of full release and discharge of responsibility (*acquit et decharge*) to Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors of the Company who are in charge of the Company's supervision and management actions that have been carried out during 2018.
2. Determination of the use of the Net Profit for the Fiscal Year 2018 of Rp61,306,482,282 as a deduction of the Company's accumulated losses.
3. Determination to give performance bonuses/ incentives to the Board of Directors and Board of Commissioners for their performance of 2018 and determination of the Directors' salaries and Commissioners' honorarium as well as facilities and allowances for both of them in 2019.
4. Approval for the appointment of Public Accountant Office (KAP) to audit the Company's Financial Statements for the 2019 Fiscal Year.
5. Accountability and ratification of the Report on Realization of the Use of Additional Fund of 2015 State Capital Participation (PMN) for the period of 2018.

**GMS Resolutions**

1. Approved and ratified the Financial Statements for Fiscal Year 2018 as well as granted full release and discharge of responsibility (*acquit et decharge*) to Members of the Board of Commissioners and Members of the Board of Directors who are in charge of the Company's supervision and management actions in 2018.
2. Approved the use of the net profit attributable to the owners of parent company of the Company for the Financial Year 2018 amounting to Rp61,303,918,896 entirely as a reserve fund.
3. The determination of KAP for auditing the Company's Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2019 would be carried out separately by the Minister of SOEs as a GMS based on the Board of Commissioners' recommendation.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### General Meeting of Shareholders

4. Penetapan besarnya gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya Tahun Buku 2019 serta tantiem Tahun Buku 2018 untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Djakarta Lloyd (Persero) akan ditetapkan secara tersendiri.
4. The amount of salary/honorarium along with other facilities and benefits for Fiscal Year 2019 and bonus for Fiscal Year 2018 for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Djakarta Lloyd (Persero) would be determined separately.
5. Menyetujui pertanggungjawaban Laporan Realisasi Penggunaan Dana PMN untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2018.
5. Approved the responsibility for the Report on Realization of the Use of PMN Additional Fund for the Fiscal Year ending on December 31, 2018.

#### Realisasi Arahan RUPS

Arahan Pemegang Saham disampaikan oleh Kementerian BUMN secara terpisah.

#### Realization of GMS Directives

The GMS directives were delivered separately by the Ministry of SOEs.

## DEWAN KOMISARIS

### Board of Commissioners

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

According to the Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Board of Commissioners is the organ of the Company tasked with conducting general and/or special supervision in accordance with the Articles of Association and providing advice to the Board of Directors.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar PT DJAKARTA LLOYD (Persero), Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi, termasuk mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS, serta perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Pursuant to Article 15 paragraph (1) of the Articles of Association of PT DJAKARTA LLOYD (Persero), the Board of Commissioners is tasked with supervising the management policies, the management process in general, both regarding the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors, as well as providing advice to the Board of Directors, including overseeing the implementation of the Company's Long Term Plan (RJPP), Corporate Work Plan and Budget (RKAP), the provisions of the Articles of Association and GMS resolutions as well as the applicable laws, for the interests of the Company and following the Company's aims and objectives.

Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang dan maksimum sama dengan jumlah anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Perusahaan juga wajib memiliki Komisaris Independen dengan jumlah paling kurang 30 persen dari jumlah jajaran anggota Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners consists of at least two people and maximum equal to the number of the Board of Directors, one of whom is appointed as the President Commissioner. The Company must have an Independent Commissioner in the amount at least of 30 percent of the total number of members of the Board of Commissioners.

## DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.
4. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan & Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
6. Anggaran Dasar Perseroan.

## URAIAN TUGAS, HAK, WEWENANG, DAN ETIKA JABATAN

Untuk mengefektifkan peran Dewan Komisaris, para anggota Dewan Komisaris mengatur pembagian tugas secara mandiri dengan mempertimbangkan pembagian tugas Direksi. Hal ini tertuang dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Komisaris Utama, sehingga terdapat kejelasan tentang peran anggota Dewan Komisaris, baik secara kolektif maupun perorangan, serta pelaksanaan teknis pada setiap aspek yang dibidangi dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris. Uraian terperinci mengenai tugas, hak, wewenang, etika jabatan, dan hubungan dengan Direksi dijelaskan dalam Board Manual.

### Tugas Pengawasan

1. Meminta keterangan kepada Direksi, baik secara lisan maupun tertulis, tentang suatu permasalahan yang terjadi. Berikut prosedur permintaan keterangan secara tertulis.

## LEGAL BASIS

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law Number 19 of 2003 regarding SOEs.
3. Government Regulation Number 45 of 2005 about Establishment, Management, Supervision and Disbanding of SOEs.
4. Minister of SOEs Regulation Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 on the Implementation of Good Corporate Governance.
5. Minister of SOEs Regulation Number PER-02/MBU/02/2015 dated February 17, 2015 regarding the Requirements and Procedures for Appointment & Dismissal of Members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board of SOEs.
6. Company's Articles of Association.

## DESCRIPTION OF JOB, RIGHTS, AUTHORITY, AND POSITION ETHICS

To make the Board of Commissioners' role effective, members of the Board of Commissioners manage their respective divisions independently by considering the duties division among them. This is stated in a Board of Commissioners Decree issued by the President Commissioner, so that there is clarity about the role of members of the Board of Commissioners, both collectively and individually, as well as technical implementation in every aspect of their division so as to run smoothly, effectively and efficiently. For the smooth implementation of duties, the Board of Commissioners can be assisted by a Secretary of the Board of Commissioners. Detailed descriptions of duties, rights, authority, position ethics, and relationships with the Board of Directors are described in the Board Manual.

### Supervisory Duties

1. Requesting verbal or in writing informations to the Board of Directors about problems occurred. In the event of the written explanation, the procedures are described as follows.

## DEWAN KOMISARIS

### Board of Commissioners

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan pertanyaan secara tertulis tentang suatu permasalahan kepada Direksi.</li> <li>b. Meneliti dan menelaah penjelasan tertulis yang disampaikan oleh Direksi, dan jika diperlukan Dewan Komisaris akan meminta penjelasan lebih lanjut dari Direksi, mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut, serta memberikan arahan dan nasihat untuk penyelesaian masalah.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Submit written questions to the Board of Directors regarding problems occurred.</li> <li>b. Examine and review the written explanations submitted by the Board of Directors and if necessary, the Board of Commissioners will be requesting further explanations from the Board of Directors, holding meetings with the Board of Directors to discuss further issues, providing directions and recommendations to resolve the existing problems.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Memberikan saran atau nasihat kepada Direksi dalam rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, atau rapat-rapat lain yang dihadiri oleh Dewan Komisaris dengan prosedur seperti yang tercantum dalam Rapat Dewan Komisaris.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Provide suggestions and recommendations to the Board of Directors in meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors or other meetings attended by the Board of Commissioners with procedures as stated in the Board of Commissioners Meetings.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Bila diperlukan, Dewan Komisaris dapat berkunjung ke Kantor Cabang untuk memastikan pelaksanaan operasional Perusahaan berjalan secara efektif, baik dengan maupun tanpa pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>3. If necessary, the Board of Commissioners may make announced or unannounced official visits to Branch Offices to ensure the Company's operations are carried out effectively.</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>4. Memberikan arahan tentang kebijakan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, meliputi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai SAK yang berlaku di Indonesia.</li> <li>b. Menyusun rencana pengawasan terhadap kebijakan akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta penerapan kebijakan tersebut.</li> <li>c. Melakukan pembahasan mengenai kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.</li> <li>d. Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>4. Provide directions on policies and preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (SAK), including:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Establish policy of the Board of Commissioners regarding supervisory and advisory on accounting policies and preparation of financial statements following generally accepted accounting standards in Indonesia.</li> <li>b. Develop a plan to supervise accounting policies and the preparation of financial statements along with the implementation of these policies.</li> <li>c. Hold a discussion on accounting policies and preparation of financial statements and their application.</li> <li>d. Convey directives to the Board of Directors regarding accounting policies and preparation of financial statements and their application.</li> </ul> </li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan, meliputi:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan, serta pelaksanaan kebijakan tersebut.</li> </ul> </li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Provide directions on quality and service policy and its implementation, including:             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Establish the Board of Commissioners' supervisory and advisory policy on quality and service policy and its implementation.</li> </ul> </li> </ul>   |

- b. Menyusun rencana pembahasan kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya, dan memasukannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.
- c. Melakukan pembahasan mengenai kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.
- d. Menetapkan mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespons saran, permasalahan, atau keluhan dari para pemangku kepentingan dan menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan.

#### Tugas dalam RUPS

1. Komisaris Utama memimpin RUPS.
2. Jika Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.
3. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh Direktur Utama.
4. Jika Komisaris Utama memiliki benturan kepentingan atas hal yang diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.

#### Tugas dalam Penanganan Saran, Masalah, dan Keluhan dari Pemangku Kepentingan

Membuat mekanisme bagi Dewan Komisaris untuk merespons atau menindaklanjuti saran, permasalahan, atau keluhan dari para pemangku kepentingan dan menyampaikannya kepada Direksi tentang saran penyelesaian yang diperlukan.

#### Tugas dalam Sistem Pengendalian Internal

Dalam mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit berkewajiban untuk:

- b. Prepare a plan to discuss quality and service policies and its implementation, and put it in the Board of Commissioners' Annual Work Plan.
- c. Hold a discussion of quality and service policies and its implementations.
- d. Establish a mechanism for the Board of Commissioners to respond to suggestions, problems or complaints from the stakeholders and communicating recommendations on the necessary solutions to the Board of Directors.

#### Duties in the GMS

1. The Board of Commissioners lead the GMS.
2. If the President Commissioner is absent or unavailable due to any reason non-essential to third parties, then the Meeting will be led by one of the Board of Commissioners members.
3. If all members of the Board of Commissioners are absent or unavailable due to any reason non-essential to third parties, then the meeting will be led by the President Director.
4. If the President Commissioner has a conflict of interest over issues resolved in the GMS, then the GMS will be led by other member of the Board of Commissioners who has no conflict of interest.
5. If all members of the Board of Commissioners have conflict of interest, then the GMS will be led by the President Director.

#### Duties in Handling Stakeholders' Suggestions, Problems, and Complaints

Compose a mechanism for the Board of Commissioners to respond or follow up on suggestions, problems or complaints from stakeholders and to communicate them to the Board of Directors regarding necessary solution suggestions.

#### Duties in the Internal Control System

In evaluating the effectiveness of the Internal Control System (SPI), the Board of Commissioners assisted by the Audit Committee has the obligations to:



# DEWAN KOMISARIS

## Board of Commissioners

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan SPI dan pelaksanaannya.</li> <li>2. Menyusun rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan/rancangan SPI dan pelaksanaannya.</li> <li>3. Menelaah kebijakan/rancangan dan pelaksanaan SPI.</li> <li>4. Menelaah evaluasi atas efektivitas pengendalian internal pada tingkat entitas/korporasi.</li> <li>5. Menelaah evaluasi atas efektivitas pengendalian internal pada tingkat operasional/aktivitas.</li> <li>6. Menelaah laporan pengendalian internal.</li> <li>7. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan SPI maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) melalui:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembuatan mekanisme hubungan kerja antara SPI dan Komite Audit.</li> <li>b. Pertemuan berkala antara SPI dan Komite Audit untuk menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI.</li> </ol> </li> <li>8. Mengawasi agar KAP dapat mengakses semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan, sehingga memungkinkan bagi KAP untuk memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatasasan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan SAK Indonesia.</li> <li>9. Mengawasi agar KAP, Auditor Internal, dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan merahasiakannya, kecuali disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>10. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen Perusahaan serta pelaksanaannya.</li> <li>11. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur peninjauan yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan Perusahaan, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast, dan informasi keuangan lain yang disampaikan kepada Pemegang Saham.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establish the Board of Commissioners' policy regarding supervisory and advisory on SPI policy/draft and its implementation.</li> <li>2. Prepare the Board of Commissioners' plan regarding supervisory and advisory on SPI policy/draft and its implementation.</li> <li>3. Review SPI policy/draft and its implementation.</li> <li>4. Review the evaluation results of the effectiveness of entity/corporation level internal control.</li> <li>5. Review the evaluation results of the effectiveness of operational/activity level internal control.</li> <li>6. Review the internal control report.</li> <li>7. Assessing the implementation of activities and audit results performed by the Internal Auditor Unit (SPI) and the Public Accounting Office by:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Establishment of an employment relations mechanisms between SPI and the Audit Committee.</li> <li>b. Periodic meetings between SPI and Audit Committee to assess the SPI's audit implementation and its results.</li> </ol> </li> <li>8. Supervise so that the Public Accounting Office (KAP) have access to all accounting records and supporting datas needed for KAP to present its opinions on the Company Financial Statements fairness, accuracy, and conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.</li> <li>9. Supervise so that KAP, Internal Auditor, and Audit Committee have access to the Company informations needed to perform its duties and keep it confidential unless required by the applicable laws and regulations.</li> <li>10. Provide recommendations regarding the improvement of the Company's management control system and its implementation.</li> <li>11. Ensure that there is a satisfactory review procedure for informations issued by the Company, including brochures, periodic financial statements, projection/forecast, and other financial informations submitted to shareholders.</li> </ol> |
|---|--|

**Tugas dalam Manajemen Risiko**

1. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko Perusahaan dan pelaksanaannya.
2. Menetapkan kriteria mengenai informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha dan kinerja Perusahaan yang perlu mendapatkan perhatian Dewan Komisaris.
3. Menyusun rencana Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan.
4. Melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha, jenis asuransi, serta jumlah asuransi yang ditutup oleh Perusahaan terkait risiko usaha.
5. Memberikan arahan dan evaluasi atas pedoman dan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan Direksi.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko.
7. Memastikan keselarasan visi, misi, dan tujuan Perusahaan dengan mempertimbangkan risiko terkait.
8. Memonitor pengorganisasian manajemen risiko secara keseluruhan.

**Tugas dan Kewajiban dalam Sistem Teknologi Informasi**

1. Menetapkan kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan sistem teknologi informasi Perusahaan dan pelaksanaannya.
2. Menyusun rencana pembahasan kebijakan sistem informasi Perusahaan dan pelaksanaannya serta memasukkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.
3. Menelaah kebijakan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya.
4. Memberikan saran peningkatan sistem teknologi informasi dan pelaksanaannya kepada Direksi.

**Duties in Risk Management**

1. Establish the Board of Commissioners' policy regarding supervisory and advisory on the Company's risk management policy and its implementation.
2. Establish criterias regarding business environment information and problems estimated to have an impact on the Company's business and performance that requires the Board of Commissioners' attention.
3. Prepare the Board of Commissioners plan regarding supervisory and advisory on the Company's risk management policy and implementation.
4. Perform periodic evaluations and providing recommendations on business risks and types of insurance, as well as the number of insurances covered by the Company related to business risks.
5. Provide direction and evaluation of risk management policies and guidelines determined by the Board of Directors.
6. Monitor and evaluate the implementation of risk management.
7. Ensuring the alignment of the Company's vision, mission, and objectives by considering the related risks.
8. Monitor overall risk management organization.

**Duties and Obligations in Information Technology System**

1. Establish policies regarding supervisory and advisory on the Company's information technology system policy and its implementation.
2. Prepare a plan to discuss the Company's information system policy and its implementation and put it in the Board of Commissioners' Annual Work Plan.
3. Review information technology system policy and its implementation.
4. Provide recommendations on improving information technology system and its implementation to the Board of Directors.

# DEWAN KOMISARIS

## Board of Commissioners

### Tugas dalam Pengelolaan SDM

1. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan SDM, khususnya tentang manajemen karier, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi, serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Menyusun rencana pengelolaan SDM, khususnya tentang manajemen karier, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi, pelaksanaan kebijakan tersebut, serta memasukkannya dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.
3. Menelaah kebijakan/rancangan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan SDM, serta rencana promosi dan mutasi satu level jabatan di bawah Direksi.
4. Memberikan saran peningkatan kebijakan pengelolaan SDM, khususnya tentang manajemen karier di Perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi di Perusahaan, serta pelaksanaan kebijakan tersebut kepada Direksi.

### Tugas dalam Kebijakan Akuntansi

1. Menetapkan kebijakan mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK yang berlaku umum di Indonesia.
2. Menyusun rencana untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan tersebut.
3. Melakukan pembahasan mengenai kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan serta penerapan kebijakan tersebut.
4. Menyampaikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan beserta penerapannya.

### Tugas dalam Pengadaan Barang dan Jasa

1. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya.

### Duties in HR Management

1. Establish the Board of Commissioners' policy regarding supervisory and advisory on human resource management policy, particularly related to career management, systems and procedures of promotion, transfer and demotion, and its policy implementations.
2. Prepare a human resources management plan, specifically regarding career management, systems and procedures of promotion, transfer and demotion, and its policy implementations, and ensure that it is put into the Board of Commissioners' Annual Work Plan.
3. Review human resource management policy/draft and its implementation, as well as the promotion and transfer plans of one official level under the Board of Directors.
4. Provide suggestions to the Board of Directors to improve human resource management policies, particularly regarding career management in the Company, systems and procedures of promotion, transfer and demotion in the Company, and its policy implementations.

### Duties in Accounting Policies

1. Establish policies regarding supervisory and advisory on accounting policies and financial statement preparation in accordance with the generally accepted accounting standards in Indonesia.
2. Develop a plan to supervise accounting policies and the financial statements preparation and the implementation of these policies.
3. Hold discussions on accounting policies and financial statements preparation and the implementation of these policies.
4. Convey directives to the Board of Directors regarding accounting policies and financial statements preparation and its implementations.

### Duties in Goods and Services Procurement

1. Establish the Board of Commissioners' policies regarding supervisory and advisory on goods and services procurement and the implementations.

2. Menyusun rencana pembahasan kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya, dan memasukannya dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.
3. Melakukan pembahasan terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa beserta pelaksanaannya.
4. Memberikan arahan kepada Direksi tentang kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya.

#### **Tugas dalam Kebijakan Mutu dan Pelayanan**

1. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
2. Menyusun rencana Dewan Komisaris mengenai tugas pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya.
3. Menelaah kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya.

#### **Tugas Pengawasan terhadap Kepatuhan dalam Perundang-undangan**

1. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat atas kepatuhan Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, serta kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga.
2. Menyusun rencana Dewan Komisaris untuk membahas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
3. Menelaah kepatuhan Perusahaan terhadap Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
4. Melaporkan hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada nomor (3) kepada RUPS dalam laporan pengawasan tahunan.

2. Compose the Board of Commissioners' plan of the procurement of goods and services and its implementation, and put it in the Board of Commissioners' Annual Work Plan.
3. Hold discussions on procurement of goods and services policies and its implementations.
4. Convey directives to the Board of Directors regarding procurement policies and its implementations.

#### **Duties on Quality and Service Policy**

1. Establish the Board of Commissioners' policies regarding supervisory and advisory on quality and service policies and its implementations.
2. Compose the Board of Commissioners' plan regarding supervisory and advisory duties on quality and service policies and its implementations.
3. Review the quality and service policies and its implementations.

#### **Supervisory Duties on Compliance to Legislation**

1. Establish the Board of Commissioners' policies regarding supervisory and advisory on the Company's compliance in implementing applicable laws and regulations and the Company's Articles of Association, and the Company's compliance to all agreements and commitments with third parties.
2. Compose the Board of Commissioners' plan to discuss the Company compliance with laws and regulations and agreements with third parties.
3. Review the Company's compliance with the Articles of Association, legislations, and agreements with third parties.
4. Report the evaluation results as referred to the GMS in the annual Supervision Report.

# DEWAN KOMISARIS

## Board of Commissioners

### Tugas Pengawasan atas Kepatuhan terhadap RKAP dan RJPP

1. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris terkait pengawasan dan pemantauan kepatuhan Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.
2. Menyusun rencana Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RKAP.
3. Melakukan evaluasi pencapaian Perusahaan yang mencakup kesesuaian pelaksanaan program kerja (insentif Perusahaan) dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP.
4. Menandatangani Laporan Tahunan setelah dilakukan pembahasan.

### Tugas dalam Pemberian Otorisasi

1. Menetapkan mekanisme bagi Dewan Komisaris mengenai pemberian persetujuan/otorisasi/rekomendasi Dewan Komisaris terhadap tindakan Direksi yang memerlukan rekomendasi/persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau Anggaran Dasar.
2. Menyusun rencana kerja Dewan Komisaris untuk membahas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.
3. Memberikan otorisasi/rekomendasi atas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.

### Tugas dalam Penetapan KAP

1. Mengajukan calon-calon KAP berdasarkan usulan Komite Audit kepada RUPS yang dilengkapi dengan alasan pencalonan dan besarnya honorarium.
2. Menetapkan kebijakan dan/atau prosedur Dewan Komisaris mengenai proses penunjukan calon, dan/atau penunjukan kembali, dan penyampaian usulan calon Auditor Eksternal kepada RUPS.
3. Menyusun rencana kerja penunjukkan dan anggaran biaya audit eksternal untuk calon Auditor Eksternal, dan memasukkannya dalam Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris.

### Supervisory Duties on Compliance to RKAP and RJPP

1. Establish the Board of Commissioners' policy regarding supervising and monitoring the Board of Directors' compliance in managing the Company towards the RKAP and/or RJPP.
2. Prepare the Board of Commissioners' plan to evaluate the RKAP implementation.
3. Evaluate the Company's achievements, including the conformity implementation of work programs (Company incentives) and the budget determined in the RKAP.
4. Sign the Annual Report subsequent to the discussion.

### Duties in Granting Authorization

1. Establish the Board of Commissioners' mechanism regarding the Board of Commissioners' approval/authorization/recommendation concerning the Board of Directors actions that require the Board of Commissioners' recommendation/approval in accordance with the applicable provisions and/or the Articles of Association.
2. Prepare the Board of Commissioners' plan to discuss transactions or actions within its authority or the GMS.
3. Grant authorization or recommendation for the Board of Directors transactions or actions within its authority or the GMS.

### Duties in KAP Appointment

1. Submit KAP candidates to the GMS based on the Audit Committee which are completed with nomination reasons and the amount of honorarium.
2. Establish the policies and/or procedures of the Board of Commissioners regarding the process of candidate appointment and/or reappointment, and proposal submission of External Auditors to the GMS.
3. Prepare a work plan for the appointment and budget of external audits for prospective Auditors, and put it in the Board of Commissioners' Annual Work Plan.



4. Mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

#### Tugas dalam Sistem Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran

1. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris tentang pengawasan terhadap efektivitas pekerjaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan terkait Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris.
2. Menyusun rencana Dewan Komisaris tentang pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan audit internal, serta pelaksanaan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan yang diterima oleh Dewan Komisaris.
3. Memberikan arahan dan evaluasi atas pedoman dan atau kebijakan pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan/pengaduan pelanggaran yang ditetapkan Direksi.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan/pengaduan pelanggaran.
5. Memonitor kesiapan instrumen yang digunakan sebagai media untuk menampung/menerima pengaduan dan kesiapan unit kerja/personel yang ditunjuk sebagai penerima, pengelola, dan pelaksana tindak lanjut pengaduan pelanggaran.
6. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut pengaduan pelanggaran.

#### Tugas dalam Pengawasan Kinerja Perusahaan

1. Menetapkan kebijakan dan prosedur Dewan Komisaris dalam hal:
  - a. Pelaporan kepada RUPS jika terjadi gejala penurunan kinerja Perusahaan;
  - b. Mekanisme pemberian saran segera kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan yang berdampak pada menurunnya kinerja Perusahaan tersebut; dan
  - c. Mekanisme pembahasan gejala menurunnya kinerja Perusahaan.

4. Evaluate the performance of the External Auditor following applicable provisions and standards.

#### Duties in Whistleblowing System

1. Establish the Board of Commissioners' policy regarding the supervision of the effectiveness of external audit work and internal audit, as well as the implementation review of complaints related to the Company which received by the Board of Commissioners.
2. Prepare the Board of Commissioners' plan regarding supervision of the effectiveness of the external audit and internal audit implementations, as well the implementation review of complaints related to the Company which received by the Board of Commissioners.
3. Provide direction and evaluation of guidelines and/or management policies and follow-up of reports/complaints of violations (whistleblowing) determined by the Board of Directors.
4. Monitor and evaluate the implementation of management policies and follow-up the violation reports/complaints.
5. Monitor the readiness of instruments used as a medium to accommodate/receive complaints and readiness of work units/appointed personnel as recipients, managers, and implementers of violation follow-up complaints.
6. Monitor the implementation of violation follow-up complaints.

#### Duties in Company Performance Supervision

1. Establish the Board of Commissioners' policies and procedures in terms of:
  - a. Reporting to the GMS if there are symptoms of a decline in the Company's performance;
  - b. Mechanism for providing immediate recommendation to the Board of Directors to correct the problems that have an impact on the Company's declining performance; and
  - c. Mechanism for discussing the symptoms of declining Company performance.

# DEWAN KOMISARIS

## Board of Commissioners

2. Melakukan pembahasan tentang gejala menurunnya kinerja Perusahaan secara tepat waktu.

2. Hold discussions concerning the Company's declining performance symptoms in a timely manner.

### Tugas dalam Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi

1. Mengawasi agar Direksi mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham dan instansi pemerintah terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas, dan objektif.
2. Mengawasi agar Direksi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, namun juga hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemilik modal (Pemegang Saham), kreditor, dan pemangku kepentingan, antara lain mengenai:
  - a. Tujuan, sasaran usaha, dan strategi Perusahaan.
  - b. Status Pemegang Saham utama dan Pemegang Saham lainnya serta informasi terkait mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Saham.
  - c. Kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang.
  - d. Penilaian terhadap Perusahaan oleh KAP, lembaga pemeringkat kredit, dan lembaga pemeringkat lainnya.
  - e. Riwayat hidup anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Eksekutif Kunci Perusahaan, serta gaji dan tunjangan mereka.
  - f. Sistem pemberian honorarium untuk KAP.
  - g. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk Auditor Internal, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi.
  - h. Faktor-faktor material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko.
  - i. Informasi material mengenai karyawan Perusahaan dan pemangku kepentingan.

### Duties in Information Openness and Confidentiality

1. Supervise the Board of Directors to reveal important informations in the Company Annual Report and Financial Statements to shareholders and relevant government institutions, in accordance with the laws and regulations that apply in a timely, accurate, clear, and objective manner.
2. Supervise the Board of Directors to take initiatives to reveal not only issues implied by the legislations but also important issues used by the capital owners/shareholders, creditors, and stakeholders to make decisions regarding:
  - a. The Company's objectives, business targets, and strategies.
  - b. Status of the majority Shareholders and other Shareholders and related informations regarding the enforcement of the Shareholder rights.
  - c. Cross-stockholdings and cross-debt guarantees.
  - d. Assessment of the Company by KAP, credit rating agencies, and other rating agencies.
  - e. The Company's Board of Commissioners, Directors, and Key Executives' profiles, as well as their salaries and benefits.
  - f. Honorarium system for the KAP.
  - g. Payroll and allowance systems for Internal Auditor, members of the Board of Commissioners, and Directors.
  - h. Material factors that can be anticipated, including the management's assessment over business climate and risk factors.
  - i. Material informations about Company employees and stakeholders.

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>j. Klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan, dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan Perusahaan.</li> <li>k. Benturan kepentingan yang mungkin akan terjadi dan/atau yang sedang berlangsung.</li> <li>l. Pelaksanaan Pedoman GCG.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mengawasi agar Direksi aktif mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dan masalah material yang dihadapi.</li> <li>4. Bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan Perusahaan dan mengawasi agar informasi yang bersifat rahasia tidak diungkapkan sampai pengumuman mengenai hal tersebut disampaikan kepada masyarakat.</li> <li>5. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>j. Material claims submitted by and/or to the Company, and existing cases in judicial bodies or arbitration bodies involving the Company.</li> <li>k. Conflict of interest that may occur and/or is ongoing.</li> <li>l. GCG Guidelines implementation.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Oversee that the Board of Directors actively discloses the implementation of GCG principles and material problems encountered.</li> <li>4. Responsible for maintaining the Company's confidentiality and monitoring so that confidential informations is not revealed prior to the public announcement of the issues.</li> <li>5. Confidential information obtained while serving as a member of the Board of Commissioners must be kept confidential under the applicable laws and regulations.</li> </ol> |
|---|---|

**Tugas dalam Pengelolaan Perusahaan Anak/Perusahaan Patungan**

1. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan pengelolaan perusahaan anak/perusahaan patungan dan pelaksanaannya.
2. Melakukan pembahasan mengenai kebijakan pengelolaan perusahaan anak/perusahaan patungan, mencakup evaluasi terhadap arah dan visi pengembangan usaha dalam pengelolaan perusahaan anak/perusahaan patungan dan kinerja perusahaan anak/perusahaan patungan; serta evaluasi terhadap kesesuaian mengenai arah pengelolaan perusahaan anak/perusahaan patungan dan kinerja perusahaan anak/perusahaan patungan terkait dengan visi pengembangan usaha Perusahaan.

**Tugas dalam Pemilihan Calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak/Perusahaan Patungan**

1. Menetapkan kebijakan dan prosedur peran Dewan Komisaris dalam pengangkatan Direksi dan Komisaris perusahaan anak/perusahaan patungan.

**Duties in Managing Subsidiary/Joint Venture Company**

1. Establish the Board of Commissioners' policy regarding supervisory and advisory on the subsidiaries/joint venture company's management policies.
2. Hold discussions concerning management policies of subsidiary/joint venture company, including evaluation of directives and business development vision in subsidiary/joint venture company, and evaluation of conformity regarding subsidiary/joint venture company's management directions and subsidiary/joint venture company's performance related to the Company's business development vision.

**Duties in Selecting Candidates for Subsidiary/Joint Venture Company's Board of Directors and Board of Commissioners**

1. Establish the Board of Commissioners' policies and role procedures in appointing subsidiary/joint venture company's Directors and Commissioners.

## DEWAN KOMISARIS

### Board of Commissioners

2. Melakukan penilaian terhadap proses pengangkatan Direksi dan Komisaris perusahaan anak/perusahaan patungan, serta memberikan penetapan tertulis (setuju atau tidak setuju) terhadap proses pengangkatan Direksi dan Komisaris perusahaan anak/perusahaan patungan.
2. Assess the appointment process of subsidiary/joint venture company's Directors and Commissioners, and provide written stipulations (agree or disagree) to the process of subsidiary/joint venture company's Directors and Commissioners appointment.

#### Tugas dalam Penilaian Direksi

1. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu serta menyampaikan hasil penilaian kepada Pemegang Saham.
2. Menyusun rencana mengenai pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemegang Saham.
3. Melakukan penilaian kinerja Direksi berdasarkan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolegal dan individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.
4. Menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu kepada RUPS dalam laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris secara tahunan.

#### Tugas dalam Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

1. Menetapkan kebijakan Dewan Komisaris mengenai pengusulan remunerasi Direksi.
2. Menyusun rencana Komisaris dalam menelaah pengusulan remunerasi Direksi.
3. Dapat mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem pemberian uang jasa dan tunjangan purnajabatan bagi Dewan Komisaris.
4. Memberikan penjelasan lengkap kepada RUPS mengenai sistem untuk pemberian uang jasa dan tunjangan purnabakti bagi Dewan Komisaris serta rincian mengenai uang jasa dan tunjangan purnajabatan yang diterima Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
5. Dapat mengusulkan kepada RUPS mengenai sistem penggajian, fasilitas, dan/atau pemberian tunjangan bagi Direksi.

#### Duties in Assessing the Board of Directors

1. Establish the Board of Commissioners' policy regarding the Board of Directors' collegial and individual performance assessment and submit the assessment results to the Shareholders.
2. Prepare a plan for monitoring Directors' performance and report to Shareholders.
3. Evaluate the performance of the Board of Directors based on key performance indicators covered in the Directors' Management Contract collegially and individually with the realization of their respective achievements.
4. Deliver the Board of Directors' collegial and individual performance assessment results to the GMS in the Board of Commissioners' supervisory annual report.

#### Duties in Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

1. Establish the Board of Commissioners' policy regarding proposing the Board of Directors remuneration.
2. Prepare the Commissioner plan to review the Board of Directors remuneration proposal.
3. Can propose to the GMS regarding the system of providing honorarium and post-retirement benefits for the Board of Commissioners.
4. Provide a full explanation to the GMS regarding the system for providing honorarium and post-retirement benefits for the Board of Commissioners, as well as details on honorarium and post-retirement benefits received by the incumbent Board of Commissioners.
5. Can propose to the GMS regarding the payroll system, facilities, and/or allowances for the Directors.

6. Memberikan penjelasan lengkap kepada RUPS mengenai sistem penggajian, fasilitas dan/atau pemberian tunjangan bagi Direksi serta rincian mengenai gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan yang diterima Direksi yang sedang menjabat.
7. Dapat merekomendasikan kepada RUPS mengenai sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan.

#### Tugas dalam Nominasi dan Seleksi Calon Direksi

1. Menetapkan kebijakan dan kriteria seleksi bagi calon Direksi.
2. Melakukan telaah dan/atau penelitian/pemeriksaan terhadap calon-calon Direksi yang diusulkan Direksi, sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.
3. Mengusulkan calon-calon anggota Direksi yang baru kepada RUPS.

#### Hak Dewan Komisaris

1. Memperoleh akses atas informasi Perusahaan secara tepat waktu, terukur, dan lengkap.
2. Menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas, termasuk santunan purnajabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mendapatkan fasilitas dari Perusahaan sesuai dengan hasil penetapan RUPS.
4. Menerima tantiem yang besarnya ditetapkan oleh RUPS apabila Perusahaan mencapai tingkat keuntungan atau mengalami peningkatan kinerja.

#### Wewenang Dewan Komisaris

1. Melihat buku-buku, surat-surat, dan dokumen lainnya; memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain; serta memeriksa surat berharga dan kekayaan Perusahaan.
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang digunakan oleh Perusahaan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut persoalan Perusahaan.

6. Provide a full explanation to the GMS regarding the payroll system, facilities, and/or allowances for the Board of Directors as well as details regarding salaries, facilities, and/or benefits received by the incumbent Directors.
7. Can recommend to the GMS regarding compensation systems and other benefits to reducing employees.

#### Duties in Nominating and Selecting Prospective Directors

1. Establish policies and criterias for selecting prospective Directors.
2. Review and/or research/examine the prospective candidates proposed by the Board of Directors prior to submission to the Shareholders.
3. Propose new candidates for the Board of Directors to the GMS.

#### Board of Commissioners' Rights

1. Obtain access to Company information in a timely, measurable, and complete manner.
2. Receive honorarium and allowances/facilities, including post-retirement benefits which its types and amounts are determined by the GMS with due observance of the prevailing laws and regulations.
3. Obtain facilities from the company in accordance with the GMS resolutions.
4. Receive a tantiem which amount is determined by the GMS if the Company reaches a profit level or experiences an increase in performance.

#### Board of Commissioners' Authority

1. View the record books, letters, and other documents, as well as examine cash for verification purposes etc., securities, and Company assets.
2. Enter the precinct, building, and office used by the Company.
3. Request an explanation from the Directors and/or other officials regarding all matters related to the Company's issues.



## DEWAN KOMISARIS

### Board of Commissioners

- |  |  |
|--|--|
| <p>4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.</p> <p>5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.</p> <p>6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu.</p> <p>7. Memberhentikan sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.</p> <p>8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan.</p> <p>9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perusahaan jika dianggap perlu.</p> <p>10. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.</p> <p>11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan terhadap topik pembicaraan</p> <p>12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.</p> | <p>4. Know all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors.</p> <p>5. Request the Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend Board of Commissioners meetings.</p> <p>6. Appoint and dismiss the Board of Commissioners' Secretary if deemed necessary.</p> <p>7. Temporarily dismissing one or more members of the Board of Directors, if they act contrary to the Company's Articles of Association or neglect their obligations or there are urgent reasons for the Company. The temporary dismissal must be notified in writing to the person concerned along with the action's reason.</p> <p>8. Establish committees other than the Audit Committee, if necessary, by taking into account the Company's capabilities.</p> <p>9. Assign experts for certain matters and within a certain period of time at the Company's expense if necessary.</p> <p>10. Perform management actions of the Company in certain circumstances under the provisions of the Articles of Association.</p> <p>11. Attend Board of Directors' meetings and provide views on matters discussed.</p> <p>12. Conduct other supervisory authorities as far as not in contravention with the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS resolutions.</p> |
|--|--|

#### Etika Jabatan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap anggota Dewan Komisaris harus selalu melandasi diri dengan etika jabatan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari pengambil keputusan dan/atau pelaksana kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang sah.
2. Wajib melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai kepemilikan saham pada Perusahaan atau perusahaan lain, atas nama pribadi ataupun keluarga, termasuk setiap perubahannya.

#### Position Ethics

In performing their duties and functions, each member of the Board of Commissioners must always bear in mind the ethics of position as follows:

1. Not taking actions that have a conflict of interest and take personal advantage from the decision makers and/or executors of the Company's activities, other than legitimate income.
2. Must report to the Corporate Secretary regarding ownership of shares in the Company or other companies, both in personal and family names, including any changes of it.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Wajib melakukan pengungkapan apabila terjadi benturan kepentingan dan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan hal tersebut.</li> <li>4. Harus mematuhi Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran; beritikad baik, penuh kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan; serta melampirkan Pakta Integritas dalam usulan Direksi yang harus mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham.</li> <li>5. Memperbarui surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan secara berkala atau setiap awal tahun buku.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>3. Must disclose if there is a conflict of interest and may not involve themselves in the decision-making process of the Board of Commissioners relating to this matter.</li> <li>4. Must comply with the Articles of Association, laws and regulations, as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility and fairness; in good faith, prudent, and responsible in carrying out supervisory duties and providing advice to the Board Directors for the interests of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company; and attaching an Integrity Pact to the Board of Directors' proposals that must obtain recommendations from the Board of Commissioners and Shareholder approval.</li> <li>5. Renew the statement of having no conflicts of interest periodically at the beginning of the financial year.</li> </ul> |
|--|--|

**KRITERIA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN**

Untuk diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris DJAKARTA LLOYD, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan formal (bersifat umum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan persyaratan material (bersifat kualitas sesuai kebutuhan dan sifat bisnis perusahaan).

**CRITERIA FOR APPOINTMENT, DISMISSAL, AND TERM OF OFFICE**

To be appointed as a member of the Board of Commissioners of DJAKARTA LLOYD, the candidate must meet a number of formal requirements (in general according to applicable laws and regulations) and material requirements (quality according to the needs and nature of the Company's business).

<p><b>Persyaratan Formal</b> <b>Formal Requirements</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Cakap melaksanakan perbuatan hukum. Capable to carry out legal actions.</li> <li>2. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Never been declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination.</li> <li>3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination.</li> <li>4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Never been sentenced for committing a criminal offense that is detrimental to state finances within 5 (five) years prior to nomination.</li> </ul>
---	--

# DEWAN KOMISARIS

## Board of Commissioners

<p><b>Persyaratan Formal</b> <b>Formal Requirements</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. Does not have familial relationship or marital relationship up to the third degree, either vertically or horizontally or a relationship by marriage (son-in-law or brother-in-law) with other members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners members.</li><li>6. Tidak boleh memangku jabatan rangkap sebagai: May not hold another position as:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan jabatan lain pada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Milik Swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Member of the Board of Directors, the Board of Commissioners in a State-Owned Enterprise, Regionally-Owned Enterprise, Private Owned Business Entity which may cause a conflict of interest.</li><li>b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu kepala daerah, calon anggota legislatif, pengurus partai politik, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Other positions in accordance with the provisions of laws and regulations, namely regional heads, legislative candidates/members, administrators of political parties, and other positions that may cause a conflict of interest.</li></ol></li><li>7. Berkomitmen untuk menyediakan waktu yang memadai dalam menjalankan fungsinya. Committed to provide adequate time in order to carry out their functions.</li></ol>
<p><b>Persyaratan Material</b> <b>Material Requirements</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki akhlak dan moral yang baik. Have good character and morals.</li><li>2. Memiliki integritas, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji, serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja. Have integrity, meaning never directly or indirectly be involved in acts of engineering and deviant practices, branch of trust, and other actions that may harm the company where the individual is employed or has worked in.</li><li>3. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen. Understand company management problems related to any one of the management functions.</li><li>4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan. Have adequate knowledge in the business fields of the Company.</li><li>5. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Provide adequate time to fulfill their duties and functions.</li><li>6. Berkemauan yang kuat (antusias) untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan. Have strong will (enthusiasm) to advance and develop the Company.</li></ol>

### Masa Jabatan

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir jika anggota Dewan Komisaris tersebut memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak terbatas pada:

- Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
- Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar
- Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara
- Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- Mengundurkan diri dengan menyebutkan alasannya

Setelah masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila meninggal dunia, masa jabatan selesai, mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Apabila anggota Dewan Komisaris hendak mengundurkan diri, yang bersangkutan harus menyampaikannya secara tertulis kepada Pemegang Saham dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran diri. Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap diminta pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai tanggal yang bersangkutan mengundurkan diri. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri ditetapkan dalam RUPS.

Terkait pemberhentian berdasarkan keputusan RUPS, seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, atau melalaikan kewajibannya, atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perusahaan. Keputusan

### Term of Office

The Board of Commissioners' term of office is 5 (five) years, without reducing the right for the GMS to terminate at any time prior to when the term of office ends if the member of the Board of Commissioners meets one or more reasons but is not limited to:

- Unable to carry out duties properly
- Unable to implement the provisions of the applicable legislations and/or the Articles of Association
- Engages in detrimental actions to the Company and/or the State
- Is found guilty by a court decision which has permanent legal force
- Resign by stating the reason

After the term of office expires, members of the Board of Commissioners may be reappointed for another 1 (one) tenure. The term of office ends when the member has passed away, the term of office is over, resigns, no longer meets the formal requirements according to the applicable legislation, or dismissed based on the GMS resolution.

If wishes to resign, the Board of Commissioners concerned shall notify in writing about the resignation to the Shareholders with copies to the Company's Board of Commissioners and Board of Directors no later than 30 (thirty) days before the date of resignation. The Board of Commissioners' resigning members are still held responsible for their duties from the period of appointment to the resignation date. The responsibilities release of the Board of Commissioners' resigning members is determined in the GMS.

Regarding termination based on the GMS resolution, one or more members of the Board of Commissioners can be terminated at any time by the GMS if they act contrary to the Articles of Association or neglect their obligations, or there are urgent reasons for the Company. The resolution on termination is taken after

# DEWAN KOMISARIS

## Board of Commissioners

pemberhentian diambil setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri. Terkait pemberhentian di luar forum RUPS, maka pembelaan diri dapat disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Saham dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan menerima pemberitahuan.

### Evaluasi Kinerja

Kinerja Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam RUPS. Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas dan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi pemberian insentif bagi anggota Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja setiap anggota Dewan Komisaris secara individu merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham/RUPS untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

RUPS menetapkan kriteria kinerja Dewan Komisaris, baik secara keseluruhan maupun individu, meliputi:

1. Penyusunan KPI pada awal tahun dan melakukan evaluasi pencapaiannya.
2. Tingkat kehadiran dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada.
3. Kontribusi dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Perusahaan.
4. Keterlibatan dalam penugasan tertentu.
5. Komitmen dalam memajukan kepentingan Perusahaan.

the Board of Commissioners concerned is allowed to defend themselves. If the termination is performed outside of the GMS forum, then the defense shall be submitted in writing to the Shareholders within 14 (fourteen) days as of the Board of Commissioners concerned is notified.

### Performance Evaluation

The performance of the Board of Commissioners and its members will be evaluated annually by the Shareholders at the GMS. In general, the Board of Commissioners' performance is determined based on the duties of obligations stated in the applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the Shareholders mandate. Formal evaluation criterias are submitted openly to the Board of Commissioners since their appointments.

The evaluation results of the Board of Commissioners' overall performance and its each member's performance individually will be an integral part of the incentive compensation scheme for members of the Board of Commissioners. The performance evaluation results of its each member is one of the basic considerations for the Shareholders/GMS to dismiss and/or reappoint members of the Board of Commissioners concerned. The performance evaluation results are a means of evaluating and increasing the effectiveness of the Board of Commissioners.

The GMS stipulates the Board of Commissioners' performance criterias, both entirely and individually, which are:

1. Preparation of KPI at the beginning of the year and evaluate its achievements.
2. Level of attendance at Board of Commissioners' Meetings and meetings with existing committees.
3. Contributions in supervising and providing recommendations to the Directors in managing the Company.
4. Engagement in certain assignments.
5. Commitment in advancing the interests of the Company.



6. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.

6. Compliance with applicable laws and regulations and Company policies.

Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris dilaporkan dalam Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. Untuk meningkatkan efektivitas Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris secara rutin melakukan evaluasi terhadap kebutuhan jumlah dan komposisi anggotanya, yang kemudian dijadikan bahan masukan kepada Pemegang Saham/RUPS. Pencapaian KPI yang ditentukan dalam kontrak manajemen antara Kuasa Pemegang Saham dan Komisaris PT Djakarta Lloyd (Persero) adalah sebagai berikut:

The outcomes of the performance evaluation of the Board of Commissioners and members of the Board of Commissioners are reported in the Board of Commissioners' Oversight Report. To improve the effectiveness of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners routinely evaluates the needs of the number and composition of its members, which is then used as input for Shareholders/GMS. The achievement of KPI determined in the management contract between the Shareholders' Authority and the Board of Commissioners of PT Djakarta Lloyd (Persero) in 2019 is as follows:

No.	Program Kerja Work Program	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Skor Score
<b>I. Aspek Perencanaan Aspect of Planning</b>						
1	Menyusun Rencana Kerja serta KPI Dewan Komisaris Formulate Work Plan and KPI of the Board of Commissioners	Dokumen Document	10	1	1	10,00
<b>Total</b>			<b>10</b>			<b>10,00</b>
<b>II. Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat Aspect of Supervisory and Advisory</b>						
1	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terkait: Provide responses/recommendations to Shareholders regarding:					
	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Work Plan and Corporate Budget	Surat Letter	6	1	1	6,00
	b. Laporan Tahunan Annual Report	Surat Letter	6	1	1	6,00
	c. Analisis Kinerja Triwulan Quarterly Performance Analysis	Surat Letter	6	4	4	6,00
	d. RJPP Tahun 2018-2022 Corporate Long-Term Plan 2018-2022	Surat Letter	6	1	1	6,00
2	Memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan tugas Dewan Komisaris Provide advice to the Board of Directors in accordance with the duties of the Board of Commissioners	Surat/Risalah Letter/ Minutes	12	12	12	12,00

## DEWAN KOMISARIS

### Board of Commissioners

No.	Program Kerja Work Program	Satuan Unit	Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Skor Score
3	Rapat Dewan Komisaris The Board of Commissioners Meetings	Risalah Minutes	6	6	11	3,50
4	Kunjungan kerja Dewan Komisaris Work Visits of the Board of Commissioners	Kunjungan Visit	8	8	4	5,33
<b>Total</b>			<b>50</b>			<b>46,83</b>
<b>III. Aspek Pelaporan Aspect of Reporting</b>						
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Report on the Realization of Implementation of KPI for the Board of Commissioners	Laporan Report	15	4	4	15,00
2	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners	Laporan Report	5	1	1	5,00
<b>Total</b>			<b>20</b>			<b>20,00</b>
<b>II. Aspek Dinamis Aspect of Dynamics</b>						
1	Pengusulan Auditor Eksternal kepada Pemegang Saham Recommendation for External Auditors to Shareholders	Surat Letter	5	1	1	5,00
2	Peningkatan kompetensi melalui seminar, workshop, dan lain-lain The competency improvement through seminars, workshops, and others	Kali Times	5	2	2	5,00
3	Hasil asesmen GCG Dewan Komisaris The Board of Commissioners' GCG Assessment Results	Skor Score	5	30	30	5,00
4	Tanggapan terhadap tindak lanjut temuan auditor/SPI/Assesor GCG Responses to follow-up findings by auditors/ SPI/GCG assessors	Surat Letter	5	5	5	5,00
<b>Total</b>			<b>20</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>
<b>Grand Total</b>			<b>100,00</b>		<b>96,83</b>	<b>20,00</b>

## PERUBAHAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS 2019

Pada tahun buku 2019, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagai berikut:

## CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION IN 2019

In the 2019 fiscal year, there were changes in the composition of the Board of Commissioners based on the Minister of SOEs Decree as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Annotation
Maryono M. Atmadja	Komisaris Utama President Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-27/MBU/2014 tanggal 15 Februari 2014. The Minister of SOEs Decree Number SK-27/MBU/2014 dated February 15, 2014.	Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 1 Januari 2009. Memasuki masa pensiun pada Februari 2019 dan efektif nonaktif pada 29 Mei 2019. Served as President Commissioner since January 1, 2009. Retired in February 2019, and effectively inactive on May 29, 2019.
Syahril Japarin	Komisaris Independen Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-122/MBU/05/2018 tanggal 8 Mei 2018. The Minister of SOEs Decree Number SK-122/MBU/05/2018 dated May 8, 2018.	Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 8 Mei 2018 hingga 29 Mei 2019. Served as Independent Commissioner since May 8, 2018, until May 29, 2019.
Anhar Adel	Komisaris Utama, merangkap Komisaris Independen President Commissioner, also Independent Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-117/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 1 tanggal 17 Juni 2019. The Minister of SOEs Decree Number SK-117/MBU/05/2019 dated May 29, 2019 and Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Number 1 dated June 17, 2019.	Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak 29 Mei 2019 hingga 9 Januari 2020. Served as President Commissioner since May 29, 2019, until January 9, 2020.
Lambonar O. Silitonga	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-117/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 1 tanggal 17 Juni 2019. The Minister of SOEs Decree Number SK-117/MBU/05/2019 dated May 29, 2019 and Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Number 1 dated June 17, 2019.	Diangkat sebagai Komisaris pada 29 Mei 2019. Appointed as Commissioner on May 29, 2019.
	Komisaris Utama President Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-19/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 25 tanggal 20 Januari 2020. The Minister of SOEs Decree Number SK-19/MBU/01/2020 dated January 9, 2020 and Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Number 25 dated January 20, 2020.	Diangkat sebagai Komisaris Utama pada 9 Januari 2020. Appointed as President Commissioner on January 9, 2020.

# DEWAN KOMISARIS

## Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Keterangan Annotation
M. Yusuf Permana	Komisaris Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-19/MBU/01/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 25 tanggal 20 Januari 2020. The Minister of SOEs Decree Number SK-19/MBU/01/2020 dated January 9, 2020 and Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Number 25 dated January 20, 2020.	Diangkat sebagai Komisaris pada 9 Januari 2020. Appointed as Commissioner on January 9, 2020.

### PROGRAM KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2019

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan fungsinya melalui rapat-rapat rutin, baik internal antaranggota maupun melibatkan Direksi; penyampaian surat tanggapan/rekomendasi kepada Direksi; serta kegiatan pengawasan lain dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku. Adapun sasaran kerja Dewan Komisaris pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Terlaksananya fungsi pengawasan Dewan Komisaris dan pemberian arahan/nasihat kepada Direksi terhadap jalannya perseroan, pencapaian visi dan misi, serta pencapaian kinerja Perseroan.
2. Terlaksananya pemberian rekomendasi kepada Direksi atas setiap kegiatan perusahaan sehingga dapat memberikan dukungan yang positif dalam pencapaian sasaran Perusahaan.
3. Mendapatkan auditor eksternal (KAP) yang kapabel untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan (audit) Perseroan tahun buku 2019.
4. Terlaksananya program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris, terutama yang berkaitan dengan bisnis perusahaan dan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
5. Meningkatnya nilai skor pelaksanaan prinsip-prinsip GCG Dewan Komisaris dari tahun sebelumnya.
6. Terlaksananya peran perangkat Dewan Komisaris dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

### THE BOARD OF COMMISSIONERS' WORK PROGRAM IN 2019

The Board of Commissioners performs its duties and functions through regular meetings, both internal between members and involving the Board of Directors; giving response/recommendation letters to the Board Directors; and other supervision activities under the applicable provisions. Its work objectives of in 2019 are as follows:

1. Implement the supervisory function of the Board of Commissioners and the provision of direction/advice to the Board of Directors on the course of the Company, the achievement of the vision and mission, as well as the achievement of the Company's performance.
2. Giving recommendations to the Board Directors for each activity to provide positive support in achieving the Company's goals.
3. Getting a capable external auditor (KAP) for auditing the Company's financial statements for the fiscal year 2019.
4. Implement the Board of Commissioners 'competency improvement program, especially related to the Company's business and the Board of Commissioners' supervisory duties.
5. Increase the score of the Board of Commissioners' GCG principles implementation from the previous year achievement.
6. Perform the role of the Board of Commissioners in supporting the implementation of the Board Commissioners' duties.

7. Terlaksananya keikutsertaan Dewan Komisaris dalam kegiatan sosialisasi Perseroan yang bersifat konstruktif terhadap pelayanan Perusahaan.
8. Mendorong penerapan sistem informasi yang terintegrasi oleh manajemen secara konsisten.
9. Mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses bisnis Perseroan.

Pada 2019, Dewan Komisaris telah melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan tanggapan/persetujuan sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan dengan detail sebagai berikut.

7. Implement the Board of Commissioners' participation in the Company's constructive socialization activities in the Company's services.
8. Encourage the application of integrated information systems by the management consistently.
9. Encourage the use of Information Technology in the Company's business processes.

In 2019, the Board of Commissioners carried out its obligation to provide responses/approvals in accordance with the provisions of Articles of Association and legislation in detail as follows

No.	Tanggal Date	Perihal Subject	Nomor Surat Letter Number	Ditujukan Kepada Addressed To
1	4 Maret 2019 March 4, 2019	Persetujuan Rekrutmen Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Approval of Recruitment of the Head of Internal Supervisory Unit (SPI)	A.003/KP.502.02/DEKOM/III/2019	Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)
2	6 Maret 2019 March 6, 2019	Tanggapan atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi Response to the Proposed Changes in Organizational Structure	A.002/OM.701.01/DEKOM/III/2019	Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)
3	13 Maret 2019 March 13, 2019	Tanggapan atas Pencalonan Direktur Utama dan Direktur Keuangan & administrasi PT PBM Dharma Lautan Nusantara Response to the Nomination of President Director and Director of Finance & Administration of PT PBM Dharma Lautan Nusantara	A.003.1/KP.505.05/DEKOM/III/2019	Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)
4	25 Maret 2019 March 25, 2019	Tanggapan atas Laporan Tahunan PT Djakarta Lloyd (Persero) Tahun Buku 2018 Responses to PT Djakarta Lloyd (Persero) Annual Report 2018	A.003.2/PG.1003.01/DEKOM/III/2019	Menteri BUMN Minister of SOEs
5	15 April 2019 April 15, 2019	Laporan Pengawasan dan Tanggapan Dewan Komisaris PT Djakarta Lloyd (Persero) Triwulan I Tahun 2019 Supervisory Report and Response of the Board of Commissioners of PT Djakarta Lloyd (Persero) for Quarter I of 2019	RT.003.1/PG.1003.02/DEKOM/IV/2019	Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) Minister of SOEs and President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)
6	29 April 2019 April 29, 2019	Tanggapan atas Permohonan Persetujuan Mendapatkan Fasilitas Kredit dari Perbankan Response to the Request for Approval to Get Credit Facilities from Banks	A.003/KE.104.02/DEKOM/VI/2019	Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)



## DEWAN KOMISARIS

### Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Perihal Subject	Nomor Surat Letter Number	Ditujukan Kepada Addressed To
7	7 Mei 2019 May 7, 2019	Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Pertanggungjawaban dan Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN untuk Periode Tahun Buku 2019 Approval to the Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Financial Statements for the 2019 Financial Year as well as Accountability and Ratification of the Report on Realization of the Use of PMN Additional Fund for the 2019 Financial Year Period	A.001/TU.803.04/ DEKOM/VI/2019	Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) Minister of SOEs and President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)
8	17 Juni 2019 June 17, 2019	Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris Remuneration of the Board of Commissioners' Secretary	A.001.2/KP.506.08/ DEKOM/VI/2019	Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)
9	10 Juli 2019 July 10, 2019	Permohonan Tanggapan atas Rencana Pelepasan Aktiva Tetap <i>Shipset</i> Request for Response to the Release Plan of Shipset Fixed Assets	A.001.1/HK.203.02/ DEKOM/VI/2019	Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)
10	23 Juli 2019 July 23, 2019	Permohonan Tanggapan atas Fasilitas Kredit PT BNI (Persero) Request for Response to PT BNI (Persero) about Credit Facilities	A.004/TU.805.04/ DEKOM/VI/2019	Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)
11	23 Juli 2019 July 23, 2019	Tanggapan atas Rencana Agunan Aktiva Tetap Berupa Kapal Tug Boat TMJ Power dan Tongkang TMJ 3001 Response to the Plan of Fixed Asset Collateral in the form of Tug Boat TMJ Power and Barge TMJ 3001	A.003/TU.805.01/ DEKOM/VI/2019	Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)
12	29 Juli 2019 July 29, 2019	Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PT Djakarta Lloyd (Persero) Tahun 2019 Changes in the Work Plan and Budget of PT Djakarta Lloyd (Persero) Year 2019	RT.007.1/TU.803. 04/DEKOM/VI/2019	Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) Minister of SOEs and President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)
13	29 Juli 2019 July 29, 2019	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT Djakarta Lloyd (Persero) Triwulan II Tahun 2019 Supervision Report of the Board of Commissioners of PT Djakarta Lloyd (Persero) for Quarter II of 2019	A.007.2/PG.1003. 02/DEKOM/VI/2019	Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) Minister of SOEs and President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)

No.	Tanggal Date	Perihal Subject	Nomor Surat Letter Number	Ditujukan Kepada Addressed To
14	6 Agustus 2019 August 6, 2019	Permintaan <i>Charter</i> /Piagam Komite Audit Tahun 2019 Request for Audit Committee Charter 2019	A.001/TU.805.01/DEKOM/VIII/2019	Komite Audit PT Djakarta Lloyd (Persero) Audit Committee of PT Djakarta Lloyd (Persero)
15	8 Agustus 2019 August 8, 2019	Permintaan Telaah terhadap Rencana Kerja Sama Sewa Kapal LTTC PT Pertamina (Persero) dari PT Indrabas Purnama Makmur ke PT Djakarta Lloyd (Persero) Request for Review on the Novation of PT Pertamina (Persero)'s LTTC Ship Charter Agreement from PT Indrabas Purnama Makmur to PT Djakarta Lloyd (Persero)	A.003/TU.805.01/DEKOM/VII/2019	Komite Audit PT Djakarta Lloyd (Persero) Audit Committee of PT Djakarta Lloyd (Persero)
16	16 Agustus 2019 August 16, 2019	Tanggapan atas Novasi Perjanjian Sewa Kapal LTTC PT Pertamina (Persero) dari PT Indrabas Purnama Makmur ke PT Djakarta Lloyd (Persero) Response to the Novation of PT Pertamina (Persero)'s LTTC Ship Charter Agreement from PT Indrabas Purnama Makmur to PT Djakarta Lloyd (Persero)	A.004/TU.805.01/DEKOM/VIII/2019	Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)
17	Oktober 2019 October 2019	Permintaan Kelengkapan Data untuk Persetujuan Penghapusan Aset Kendaraan Bermotor Request for Data Completion for Approval concerning the Elimination of Motor Vehicle Assets	A.002/TU.805.01/DEKOM/X/2019	Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)
18	28 Oktober 2019 October 28, 2019	Laporan Pengawasan dan Tanggapan Dewan Komisaris PT Djakarta Lloyd (Persero) Triwulan III Tahun 2019 Monitoring and Response Report of the Board of Commissioners of PT Djakarta Lloyd (Persero) for Quarter III 2019	A.002/TU.805.01/DEKOM/XI/2019	Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) Minister of SOEs and President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)
19	4 November 2019 November 4, 2019	Tanggapan atas Perpanjangan Izin Penjualan Kapal KM Lhokseumawe Caraka Jaya Niaga III-40 Response on the Extension of KM Lhokseumawe Caraka Jaya Niaga III-40 Ship Sales Permit	A.001/TU.805.01/DEKOM/XI/2019	Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)
20	11 November 2019 November 11, 2019	Tanggapan atas Fasilitas Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan Penjaminan Aset Tetap Perusahaan Response on Credit Facilities of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) with the Company's Fixed Assets Guarantee	A.003/TU.805.01/DEKOM/XI/2019	Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)

## DEWAN KOMISARIS

### Board of Commissioners

No.	Tanggal Date	Perihal Subject	Nomor Surat Letter Number	Ditujukan Kepada Addressed To
21	14 November 2019 November 14, 2019	Usulan KAP PT Djakarta Lloyd untuk Audit Laporan Keuangan Tahun 2019 Proposal for Appointment of Public Accounting Firm to Audit PT Djakarta Lloyd's 2019 Financial Statements	A.005/TU.805.01/ DEKOM/XI/2019	Menteri BUMN Minister of SOEs
22	16 Desember 2019 December 16, 2019	Tanggapan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT Djakarta Lloyd (Persero) Tahun 2020 dan Dukungan atas Hal-Hal yang Membutuhkan Persetujuan Pemegang Saham Response to the 2020 Corporate Work Plan and Budget of PT Djakarta Lloyd (Persero) and Support for Matters that Need Shareholder Approval	A.002.1/TU.803.04/ DEKOM/XII/2019	Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Djakarta Lloyd (Persero) Minister of SOEs and President Director of PT Djakarta Lloyd (Persero)

Dewan Komisaris turut melaksanakan kegiatan kunjungan kerja selama tahun 2019 yang meliputi:

The Board of Commissioners also participated in work visit activities during 2019 which included:

No.	Tanggal Date	Tujuan Destination	Agenda
1	17-19 Maret 2019 March 17-19, 2019	Makassar	Pengecekan kondisi Cabang Makassar Checking the condition of the Makassar Branch
2	9 September 2019 September 9, 2019	Benoa	Pengecekan kondisi Cabang Bali bersama dengan Kepala Satgas Bali PT Djakarta Lloyd (Persero) Checking the condition of the Bali Branch together with the Head of the Bali Task Force of PT Djakarta Lloyd (Persero)
3	16 Oktober 2019 October 16, 2019	Banyuwangi	Pengecekan kondisi Cabang Banyuwangi dengan Kepala Satgas terkait pendapatan sub keagenan di Cabang Banyuwangi Checking the condition of the Banyuwangi Branch together with the Task Force Head related to the revenue of the sub agency in the Banyuwangi Branch
4	18 Oktober 2019 October 18, 2019	Surabaya	Progres pembangunan kapal tanker yang dibangun oleh PT DPS The progress of tanker shipbuilding built by PT DPS

#### TARGET KPI DEWAN KOMISARIS TAHUN 2020

Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris berdasarkan Kontrak Manajemen antara Pemegang Saham dengan Dewan Komisaris Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

#### THE BOARD OF COMMISSIONERS' KPI TARGET FOR 2020

The Work Plan and Budget of the Board of Commissioners based on the Management Contract between the Shareholders and the Board of Commissioners for Year 2020 are as follows.

No.	Program Kerja Work Program	Key Performance Indicators (KPI)	Bobot Weight
<b>I. Aspek Perencanaan Aspect of Planning</b>			<b>10</b>
1	Menyusun Rencana Kerja serta KPI Dewan Komisaris Prepare the Work Plans and KPI of the Board of Commissioners	1 Dokumen 1 Document	10
<b>II. Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat Aspects of Supervision and Advisory</b>			<b>50</b>
	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terkait: Provide responses/recommendations to Shareholders regarding:		
1	a. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Corporate Work and Budget Plan	1 Surat 1 Letter	6
	b. Laporan Tahunan Annual Report	1 Surat 1 Letter	6
	c. Analisis Kinerja Triwulan Quarterly Performance Analysis	4 Surat 4 Letters	6
	d. RJPP Tahun 2018-2022 2018-2022 Corporate Long-Term Plan	1 Surat 1 Letter	6
2	Memberikan nasihat kepada Direksi sesuai tugas Dewan Komisaris Giving advice to the Board of Directors in accordance with the duties of the Board of Commissioners	12 Surat/Risalah 12 Letters/Minutes	12
3	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners meetings	12 Risalah 12 Minutes	6
4	Kunjungan kerja Dewan Komisaris Working visit of the Board of Commissioners	6 Kunjungan 6 Visits	8
<b>III. Aspek Pelaporan Aspect of Reporting</b>			<b>20</b>
1	Laporan Realisasi Pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Report on the Realization of KPI Implementation of the Board of Commissioners	4 Laporan 4 Reports	15
2	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan Annual Report of the Board of Commissioners	1 Laporan 1 Report	5
<b>IV. Aspek Dinamis Aspect of Dynamics</b>			<b>20</b>
1	Pengusulan Auditor Eksternal kepada Pemegang Saham Proposal of External Auditor appointment to Shareholders	1 Surat 1 Letter	5
2	Peningkatan kompetensi melalui seminar, <i>workshop</i> , dan lain-lain Competency development through seminars, workshops, and others	2 Kali 2 Times	5
3	Hasil asesmen GCG Dewan Komisaris Results of the Board of Commissioners GCG assessment	Skor 30 Score 30	5
4	Tanggapan terhadap tindak lanjut temuan auditor/SPI/asesor GCG Responses to the follow-up on the findings by auditor/SPI/GCG assessor	5 Surat 5 Letters	5
<b>Jumlah Total</b>			<b>100,00</b>

# DEWAN KOMISARIS

## Board of Commissioners

### INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN, Dewan Komisaris sepatutnya tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Adapun hubungan keluarga dalam hal ini meliputi sedarah sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda.

### BOARD OF COMMISSIONERS' INDEPENDENCE

Based on the Minister of SOEs Regulation Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 regarding the Implementation of GCG in SOEs, the Board of Commissioners duly does not have financial, management, share ownership and/or family affiliations with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Controlling Shareholders who can influence their ability to act independently. The family affiliation in this case includes blood relationship up to the third degree of the straight line as well as the side line or the relationship.

### Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

#### Board of Commissioners Affiliate Relationships

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with				Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Maryono M. Atmadja <sup>1</sup>	Komisaris Utama President Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓
Syahril Japarin <sup>2</sup>	Komisaris Independen Independent Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓
Anhar Adel <sup>3</sup>	Komisaris Utama President Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓
Lambonar O. Silitonga <sup>4</sup>	Komisaris Utama President Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓
M. Yusuf Permana <sup>4</sup>	Komisaris Commissioner		✓		✓		✓		✓		✓

#### Keterangan:

- <sup>1</sup> Menjabat sampai 29 Mei 2019  
<sup>2</sup> Menjabat sampai 29 Mei 2019  
<sup>3</sup> Menjabat sampai 9 Januari 2020  
<sup>4</sup> Menjabat sejak 9 Januari 2020

#### Note:

- <sup>1</sup> Served until May 29, 2019  
<sup>2</sup> Served until May 29, 2019  
<sup>3</sup> Served until January 9, 2020  
<sup>4</sup> Served since January 9, 2020



## KOMISARIS INDEPENDEN

### Independent Commissioner

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perusahaan yang bersangkutan yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.

Komisaris Independen diharapkan dapat menciptakan iklim yang objektif dan independen; menjaga *fairness* untuk kepentingan Perusahaan; serta tidak terikat dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dikarenakan fungsi pengawasannya dapat dilakukan dengan menyuarakan pendapat yang independen dalam rapat.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana calon anggota Komisaris lainnya, calon Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan tambahan berupa kriteria independensi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN, yaitu:

1. Tidak menjabat sebagai Direksi di perusahaan terafiliasi dengan Perseroan
2. Tidak bekerja pada pemerintah, termasuk departemen, lembaga, dan kemiliteran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir
3. Tidak bekerja di Perseroan atau afiliasinya dalam kurun waktu enam bulan
4. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau perusahaan yang menyediakan jasa dan produk kepada Perseroan dan afiliasinya
5. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris Independen yang berasal dari kalangan di luar Perusahaan untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup DJAKARTA LLOYD

Adapun pada perubahan komposisi Dewan Komisaris yang berlaku efektif sejak 9 Januari 2020, RUPS tidak menunjuk Komisaris Independen. Dengan demikian, Dewan Komisaris terdiri atas Lambonar O. Silitonga (Komisaris Utama) dan M. Yusuf Permana (Komisaris).

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership, and/or family affiliations with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Controlling Shareholders, and/or the Company's affiliates which may affect the ability to act independently.

Independent Commissioner is expected to create an objective and independent climate; maintain fairness for the benefit of the Company; and is not bound by the influence of parties, given the oversight function can only be performed by voicing an independent opinion in the meeting.

In addition to fulfilling the general requirements for Commissioners, the Independent Commissioner candidates must meet additional requirement of independence criteria as ruled by the Minister of SOEs Regulation Number PER-01/MBU/2011 regarding GCG Implementation in SOEs, including:

1. Not serving as a Director in a firm affiliated with the Company
2. Does not work for the government, including departments, institutions, and military in the past three years
3. Not working for the Company or its affiliates within a period of six months
4. Has no financial affiliation, either directly or indirectly with the Company or business entities that provide services and products to the Company and its affiliates
5. Free from business interests and activities or other relationships that can hinder or interfere with the ability of Independent Commissioner coming from outside the Company to act or think freely within the environment of DJAKARTA LLOYD

As for the changes in the Board of Commissioners' composition which took effect on January 9, 2020, the GMS did not appoint an Independent Commissioner. As such, the Board of Commissioners consists of Lambonar O. Silitonga (President Commissioner) and M. Yusuf Permana (Commissioner).

# DIREKSI

## Board of Directors

Berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar, Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan. Direksi dapat terdiri lebih dari 1 (satu) anggota dan seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Pengangkatan Direksi juga harus memenuhi persyaratan formal dan persyaratan material sesuai dengan regulasi dan kebutuhan perusahaan.

Based on the Article 10 of the Articles of Association, the Company is managed and led by a Board of Directors whose number of members is adjusted to the Company needs. It can consist of more than 1 (one) member and one of them is appointed as President Director. The appointment must also meet formal requirements and material requirements in accordance with regulations and company needs.

### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
3. Anggaran Dasar Perseroan
4. Surat Keputusan Direksi PT DJAKARTA LLOYD (Persero) Nomor 032.7/Kep/DIRUT/X/2018 tentang Pedoman Good Corporate Governance PT DJAKARTA LLOYD (Persero) tanggal 30 Oktober 2018

### LEGAL BASIS

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies
2. Law Number 19 of 2003 regarding SOEs
3. Articles of Association of the Company
4. Board of Directors of PT DJAKARTA LLOYD (Persero) Decree Number 032.7/Kep/DIRUT/X/2018 on the Good Corporate Governance Guidelines of PT DJAKARTA LLOYD (Persero) dated October 30, 2018

### URAIAN TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, DAN ETIKA JABATAN

Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. Uraian terperinci mengenai tugas, hak wewenang, etika jabatan, dan hubungan dengan Dewan Komisaris dijelaskan dalam Board Manual.

### DESCRIPTION OF DUTIES, AUTHORITIES, OBLIGATIONS, AND POSITION ETHICS

Based on Article 11 of the Company's Articles of Association, the Board of Directors is tasked to perform all actions related to the management of the Company for the benefit of it according to the aims and objectives of the Company, as well as representing the Company, both inside and outside the court of all matters and all events with limitations as stipulated in the legislation, Articles of Association and/or GMS Resolutions. Detailed descriptions of duties, rights, authority, position ethics, and relationships with the Board of Commissioners are described in the Board Manual.

#### Direktur Utama President Director

#### Hak & Wewenang Rights & Authorities

1. Bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan dengan ketentuan tindakannya telah disetujui oleh rapat Direksi.  
Act for and on behalf of the Board of Directors (BoD) and represent the Company with the provisions of his actions approved by the BoD meeting.
2. Menunjuk wakil/kuasa dengan menggunakan surat penunjukan kepada anggota Direksi lainnya, jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun.  
Appoint a representative/proxy by using a letter of appointment to other members of the BoD, if the President Director is absent or unavailable for any reason.

<b>Direktur Utama</b> President Director	<b>Tugas Duties</b>
	1. Mengoordinasikan penyelenggaraan fungsi pengurusan/pengelolaan Perusahaan sesuai tugas pokok Perusahaan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan RUPS. Coordinate the implementation of the Company's management functions by the BoD according to the Company's main duties and carry out other duties under the policies determined by the GMS.
	2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BoD yang dilakukan oleh Direksi dan mengendalikan pelaksanaan tugas, meliputi pengawasan internal, sekretaris perusahaan, perencanaan strategis perusahaan, pengadaan barang/jasa, manajemen risiko dan kepatuhan, serta manajemen proyek. Coordinate the implementation of BoD policies carried out by the Directors and controlling the duty implementations, including internal supervision, corporate secretary, company strategic planning, procurement of goods/services, risk management and compliance, and project management.
	3. Mengoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direksi dalam hal: Coordinate the activities and implementation of all Directors' duties in terms of: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Merencanakan, mengembangkan, dan menetapkan kebijakan umum Perusahaan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan.                      Planning, developing, and establishing the Company's general policies based on the principles of efficiency, effectiveness, and following the Company's vision, mission, and objectives.</li> <li>b. Mengarahkan, mengembangkan, dan menetapkan strategi pengelolaan Perusahaan.                      Directing, developing, and establishing a strategy for managing the Company as a whole.</li> <li>c. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perusahaan.                      Control and evaluate all Company activities.</li> <li>d. Mengoordinasikan penyiapan Rencana Jangka Panjang (RJP).                      Coordinate the preparation of the Long-Term Plan (RJP).</li> <li>e. Menyampaikan RJP yang telah ditandatangani bersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.                      Submitting RJP that has been signed together with the Board of Commissioners to the GMS for approval.</li> <li>f. Menyiapkan RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari RJP                      Prepare the Corporate Work Plan and Budget which is an annual description of RJP.</li> <li>g. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu enam bulan setelah tahun buku Perusahaan ditutup.                      Submitting an Annual Report to the GMS to obtain approval within six months after the Company's book year is closed.</li> <li>h. Mengangkat pejabat Kepala SPI dan Sekretaris Perusahaan dengan persetujuan Komisaris Utama.                      Appoint the Head of the SPI and the Corporate Secretary with the approval of the President Commissioner.</li> <li>i. Menyiapkan kebijakan umum pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI).                      Prepare general supervision policies by the Internal Audit Unit (SPI)</li> <li>j. Menetapkan Piagam Satuan Pengawasan Internal (<i>Internal Audit Charter</i>) dengan lebih dahulu mendapatkan persetujuan Komisaris Utama dan salah satu anggota Komisaris Independen.                      Establish an Internal Audit Charter by obtaining the approval of the President Commissioner and one of the Independent Commissioners.</li> <li>k. Memimpin kegiatan yang bersifat strategis dalam pengembangan Perusahaan.                      Leading strategic activities in the Company's development.</li> </ol>

# DIREKSI

## Board of Directors

<b>Direktur Utama</b> President Director	l. Wajib memerhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI. Must pay attention and immediately take the necessary steps for everything stated in each report on the results of the inspection made by SPI.  m. Melakukan <i>monitoring</i> terhadap perusahaan anak dan perusahaan <i>joint venture</i> . Monitoring the subsidiary and joint venture companies.
	<p><b>Tanggung Jawab Responsibilities</b></p> 1. Bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Take full responsibility of Company's management for the interests and objectives of the Company and represent the Company, both in and outside the court.  2. Bersama anggota Direksi lainnya, bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Together with other members of the Board of Directors are personally responsible if the person concerned is guilty or negligent in carrying out their duties.  3. Menjamin keandalan pengendalian internal Perseroan. Guarantee the reliability of the Company's internal controls.  4. Mengupayakan penerapan pengelolaan perusahaan yang baik. Strive for the implementation of good corporate governance.  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditetapkan RUPS Carry out other duties determined by the GMS.
<b>Direktur Lainnya</b> Other Director	<p><b>Hak, Wewenang, dan Tanggung Jawab Rights, Authorities, and Responsibilities</b></p> 1. Memberikan bahan masukan, pertimbangan, atau saran-saran dalam menetapkan kebijakan atau keputusan Direksi. Provide input, consideration, or suggestions in determining the policies or decisions of the BoD.  2. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dan tata laksana direktorat yang dipimpinnya. Lead and control all activities and governance of the directorate that they lead.  3. Melaksanakan tugas pokok masing-masing direktorat yang dipimpinnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS dan tata cara pelaksanaan tugas BoD. Carry out the main tasks of each directorate that they lead under the policies stipulated by the GMS and the procedure for carrying out BoD duties.
	(Empty cell for content)

## PEMBAGIAN TUGAS

Direksi bertugas secara kolektif, namun agar pelaksanaan tugas lebih efisien dan efektif diperlukan adanya pembagian tugas di antara Anggota Direksi. Sekalipun telah dilakukan pembagian tugas, Direksi sebagai organ Perusahaan secara kolektif mempunyai wewenang pengurusan atas tugas yang secara khusus dipercayakan kepada seorang Anggota Direksi dan karena itu wajib melaksanakannya.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan dalam RUPS. Apabila RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang tersebut dapat ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan dijabarkan secara lebih rinci.

## WEWENANG DIREKSI

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang lain untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
4. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, pengaturan ketentuan ini harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perseroan.

## DIVISION OF DUTIES

Directors work collectively, but in order to be more efficient and effective in carrying out their duties it is necessary to divide tasks among Members of the Board of Directors. Even though the division of tasks has been carried out, the Directors as part of the Company collectively have the authority to manage tasks specifically entrusted to a Board of Directors and therefore is obligated to implement them.

The division of duties and authorities of each member of the Board of Directors is stipulated by the GMS. If the GMS not stipulating the division of tasks and authorities, the division of duties and authorities between Directors is determined based on the Board of Directors' decree.

## BOARD OF DIRECTORS' AUTHORITIES

1. Establish the Company's management policy.
2. Arrange handover of Directors to one or several members of the Board of Directors to take decisions on behalf of the Board of Directors or to represent the Company in and outside of court.
3. Arrange handover of the Board of Directors' authority to one or several employees of the Company, both individually or jointly or to others, to represent the Company in and outside of court.
4. Regulate the provisions regarding the Company's staffing including stipulation of salaries, pensions, or post-employment benefits, and other income for the Company's employees based on applicable laws and regulations. If the workers exceeding specified obligations legislation, their provisions must get prior approval from the GMS.
5. Appoint and dismiss Company's employees based on the Company's staffing regulations and applicable laws and regulations.
6. Appoint and dismiss the Corporate Secretary.



## DIREKSI

### Board of Directors

7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun kepemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau sebaliknya, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.
7. Take all actions and other actions regarding the management and ownership of the Company's assets, bind the Company with other parties and/or vice vers, and represent the Company in and outside of court regarding all matters and events, with restrictions as stipulated in the laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS Resolutions.

#### KEWAJIBAN DIREKSI

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya.
2. Menyiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta perubahannya secara tepat waktu, lalu menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP.
4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah I RUPS, dan Risalah Rapat Direksi.
5. Membuat Laporan Tahunan sebagai wujud pertanggungjawaban pengurusan Perseroan, serta dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
7. Menyampaikan Laporan Tahunan, termasuk Laporan Keuangan, kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan hak-hak Perseroan yang tidak tercatat dalam pembukuan antara lain sebagai akibat penghapusbukuan piutang.
8. Memberikan penjelasan kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan.
9. Menyampaikan Neraca Laporan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BOARD OF DIRECTORS' OBLIGATIONS

1. Try and ensure that the implementation of the Company's business and activities are following the aims and objectives and business activities.
2. Prepare the Company's Long-Term Plan (RJPP), Corporate Work and Budget Plan (RKAP), and its changes promptly, as well as submitting it to the Board of Commissioners and Shareholders to obtain the GMS approval.
3. Provide an explanation to the GMS regarding the RJPP and RKAP.
4. Make a List of Shareholders, Special Lists, GMS Minutes, and Minutes of Directors' Meetings.
5. Make an Annual Report as a form of accountability for the Company's management, as well as the Company's financial documents as referred to in the Law on Corporate Documents.
6. Prepare financial statements based on financial accounting standards and submit them to Public Accountants for auditing.
7. Deliver an Annual Report including the Financial Statements to the GMS for approval and ratification, as well as reports of the Company's rights that were not recorded in the books among other things such as results of write-offs of receivables.
8. Provide an explanation to the GMS regarding the Annual Report.
9. Deliver the Profit and Loss Statement Balance Sheet which has been ratified by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights under the provisions of legislation.

10. Menyampaikan pemberitahuan perubahan susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris kepada Menteri yang membidangi Hukum dan HAM.
11. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dokumen keuangan Perseroan, serta dokumen Perseroan lainnya.
12. Menyimpan seluruh dokumen pada butir (11) di tempat kedudukan Perseroan.
13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan.
14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
15. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan rincian dan tugasnya.
16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta oleh anggota Komisaris atau Pemegang Saham.
17. Menyusun dan menetapkan *blue print* organisasi Perseroan.
18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### ETIKA JABATAN

1. Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan Perusahaan, selain penghasilan yang sah.
2. Direksi wajib melaporkan kepada Pemegang Saham melalui Sekretaris Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan tersebut dan Perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.

10. Deliver notification of changes in the composition of Shareholders, Directors, and Board of Commissioners to the Minister in charge of Law and Human Rights.
11. Maintain the Register of Shareholders, Special Lists, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners' Meetings, and Minutes of Directors' Meetings, Annual Report, corporate financial documents, and other corporate documents.
12. Keep all those documents on point (11) at the corporate domicile:
13. Arrange accounting systems in accordance with Financial Accounting Standards and based on the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage, and supervision.
14. Provide periodic reports in a manner and time under applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and/or Shareholders.
15. Prepare the Company's organizational structure with complete details and duties.
16. Provide an explanation of everything that is asked or requested by members of the Board of Commissioners or Shareholders.
17. Develop and establish a blueprint of the Company's organization.
18. Carry out other obligations following the provisions stipulated in the Articles of Association and those stipulated by the GMS based on legislation.

#### POSITION ETHICS

1. The Board of Directors is prohibited from carrying out actions that have a conflict of interest and take personal advantage, from decision makers and/or the implementation of Company activities, in addition to the legitimate income.
2. The Board of Directors must report to the Shareholders through the Corporate Secretary regarding their share ownership and or their families to the Company and other Companies including any amendments to that.

## DIREKSI

### Board of Directors

3. Direksi wajib melakukan pengungkapan apabila terjadi benturan kepentingan, dan yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan terkait hal tersebut. Apabila salah seorang Direksi tidak melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan, maka Direksi lainnya akan mengambil keputusan dengan tetap memerhatikan independensinya.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, setiap anggota Direksi harus:
  - a. Mematuhi Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran; serta beritikad baik dan penuh kehati-hatian dalam menjalankan tugas.
  - b. Melampirkan pakta integritas dalam usulan Direksi yang harus mendapat rekomendasi dari Dewan Komisaris dan persetujuan Pemegang Saham.
  - c. Memperbarui surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan secara berkala setiap tahun.
3. The Board of Directors must disclose in the event of a conflict of interest, and the Directors concerned may not involve themselves in the decision-making process of the Board of Directors relating to this matter. If there is one of the Directors who does not involve himself in the decision-making process, the other Directors will make decisions while taking into account their independence.
4. In carrying out its duties and functions, each member of the Board of Directors must:
  - a. Comply with the Articles of Association and laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, and fairness, as well as have a good faith, prudence, and responsibility in carrying out the duties
  - b. Attach an integrity pact in the proposal of the Board of Directors who must obtain recommendations from the Board of Commissioners and Shareholder approval
  - c. Update the statement of not having a conflict of interest periodically every year.

#### KRITERIA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN

Untuk diangkat menjadi anggota Direksi DJAKARTA LLOYD, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan formal (bersifat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan persyaratan material (bersifat kualitas sesuai dengan kebutuhan dan sifat bisnis perusahaan). Calon anggota Direksi diwajibkan mengikuti proses penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilaksanakan oleh lembaga profesional dan tim evaluasi calon anggota Direksi. Apabila dinyatakan lulus, yang bersangkutan harus menandatangani pakta integritas sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai Direksi oleh RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut persyaratan formal dan material yang harus dipenuhi oleh calon Direksi Perseroan.

#### CRITERIA FOR APPOINTMENT, DISMISSAL, AND TERM OF OFFICE

To be appointed as a member of the Board of Directors of DJAKARTA LLOYD, the candidate must meet a number of formal requirements (in general according to the applicable laws and regulations) and material requirements (the quality according to the needs and nature of the Company's business). The prospective members of the Board of Directors are required to undergo the process of fit and proper test conducted by professional institutions and an evaluation team. Once declared passed, the candidates must sign an integrity pact before officially being appointed as the Board of Directors' members by the GMS in accordance with statutory regulations.

The following are the formal and material requirements that must be fulfilled by prospective Directors of the Company.

<p><b>Persyaratan Formal</b> <b>Formal Requirements</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakap melaksanakan perbuatan hukum. Capable to carry out legal actions.</li> <li>2. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan. Never been declared bankrupt or became a member of the BoD or a member of the Board of Commissioners who was found guilty of causing a company to be declared bankrupt within five years prior to the appointment.</li> <li>3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, Perusahaan Anak, Perusahaan, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Never been sentenced for committing a criminal offense that is detrimental to state finances, SOEs, Subsidiaries, Companies, and/or related financial sector.</li> <li>4. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, atau hubungan semenda (menantu atau ipar) dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. No familial relationship up to the third degree, either vertically or horizontally or a relationship by marriage (son-in-law or brother-in-law) with other members of the BoD and/or Board of Commissioners Members.</li> <li>5. Tidak boleh memegang jabatan rangkap sebagai:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan jabatan lain pada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Milik Swasta yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.</li> <li>b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu kepala daerah, calon anggota legislatif, pengurus partai politik, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.</li> </ol> <p>May not hold another position as:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Member of the BoD in a SOE, Regionally-Owned Enterprise, and Private Owned Business Entity, or other positions which may cause a conflict of interests.</li> <li>b. Another position as officials in structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions.</li> </ol> </li> <li>6. Tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. May not hold concurrent positions that can cause a conflict of interest directly or indirectly with the Company and/or that is contrary to the applicable legislation provisions.</li> </ol>
---	--

# DIREKSI

## Board of Directors

<p><b>Persyaratan Material</b> <b>Material</b> <b>Requirements</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki akhlak dan moral yang baik, dalam artian tidak melakukan perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, perbuatan cidera janji (tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati), tidak melakukan perbuatan yang dapat memberikan keuntungan pribadi bagi calon anggota Direksi dan pegawai BUMN/Perusahaan/Lembaga tempat yang bersangkutan bekerja; tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan pengurusan perusahaan tempat yang bersangkutan bekerja; dan tidak melanggar ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan Perusahaan yang sehat. Have good character and morals, in the sense of not carrying out acts of fabrication and deviant practices, breach of contract (not fulfilling the agreed commitments), acts that can provide personal benefits to prospective members of the BoD in SOE/Company/Institutions where they work, and not violating the relevant provisions with the principles of managing a healthy company.</li> <li>Memiliki kompetensi teknis/keahlian berupa pengetahuan memadai mengenai bidang usaha Perseroan, pengalaman dan keahlian dalam pengurusan Perseroan/ BUMN/Perusahaan, kemampuan pengelolaan strategis untuk pengembangan Perseroan, pemahaman berbagai masalah manajemen, serta berdedikasi dan bersedia menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas. Have an adequate technical competency/expertise about the Company's business fields, including experience and expertise in managing SOE/Company, ability to carry out strategic management in the framework of developing DJAKARTA LLOYD, comprehension of various company management problems, and dedication in providing the time fully to do their duties.</li> <li>Memiliki tingkat intelegensi dan tingkat emosional yang memadai untuk menjalankan tugas sebagai Direksi Perseroan. Have adequate level of intelligence and emotional level to carry out their duties as a member of the Company's BoD.</li> <li>Berkemampuan kuat dan dedikasi tinggi untuk mengembangkan Perusahaan. Have strong ability and high dedication to advance and develop the company.</li> </ol>
--	---



### Masa Jabatan

Anggota Direksi memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk satu kali masa jabatan. Adapun jabatan anggota Direksi akan berakhir jika masa jabatan berakhir, mengundurkan diri sesuai ketentuan yang berlaku, tidak lagi memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

RUPS dapat memberhentikan jabatan anggota Direksi sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasan pemberhentian. Dewan Komisaris juga berhak memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi untuk sementara waktu apabila ditemukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, melalaikan kewajiban, atau terdapat alasan mendesak bagi Perusahaan. Pemberhentian sementara tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

Dalam waktu 30 hari setelah pemberhentian sementara tersebut atau sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Dewan Komisaris wajib menggelar RUPS untuk memutuskan status pemberhentian anggota Direksi tersebut: apakah diberhentikan seterusnya atau dikembalikan pada kedudukannya dengan sebelumnya memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri. Jika RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu 30 hari, pemberhentian sementara dinyatakan batal dan anggota Direksi yang diberhentikan dapat kembali menjalankan tugas dengan kuasa dan kewenangan yang sama.

Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan disertai tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan anggota Direksi lainnya paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Pengunduran diri berlaku sejak tanggal permohonan disetujui oleh RUPS, dan anggota Direksi tersebut dapat berhenti pada tanggal yang diminta atau maksimum 30 hari sejak tanggal surat pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

### Term of Office

The term of office of members of the Board of Directors is for 5 (five) years without reducing the right of the GMS to terminate at any time. They may be reappointed by the GMS for another one tenure. Their term of office expires if the mandate has ended, resigned according to applicable regulations, no longer meets the requirements of the applicable legislation, passed away, or dismissed based on the GMS resolution.

The GMS can terminate the position of a member of the Board of Directors at any time before their term of office ends by stating the reason for his dismissal. The Board of Commissioners has the right to temporarily dismiss one or more members of the Board of Directors, if they act contrary to the Articles of Association or neglect their obligations or there are urgent reasons for the Company. The temporary dismissal must be reported in writing to the person concerned and the reasons behind the action.

Within 30 days or as stipulated in the Articles of Association, after the temporary dismissal, the Board of Commissioners is obliged to hold a GMS which will decide whether the member of the Board of Directors will be terminated or returned to his position by first allow the Board of Directors to defend themselves. If the GMS is not held within 30 days, the temporary dismissal is declared null and void and the dismissed member of the Board of Directors returns to the task with the same power and authority.

The member of the Board of Directors has the right to resign from his position by notifying in writing about the intention to the Company with copies to the Shareholders, Board of Commissioners, and other members of the Board of Directors no later than 30 days before the resignation date. Resignation is valid from the date the letter is approved by the GMS, and the member of the Board of Directors may quit on the requested date or a maximum of 30 days from the date of the resignation letter is received without requiring the GMS approval.

## DIREKSI

### Board of Directors

Anggota Direksi yang mengundurkan diri wajib menyampaikan pertanggungjawaban secara tertulis atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. Pertanggungjawaban tersebut memuat kegiatan yang telah dilaksanakan hingga tanggal pengunduran diri beserta hasilnya.

The resigned member of the Board of Directors is obliged to submit written responsibility for their actions that have not yet been accepted by the GMS. The responsibility includes activities that have been carried out until the date of resignation and its results.

### EVALUASI KINERJA

Penilaian terhadap kinerja Direksi dilaksanakan melalui mekanisme RUPS yang mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar, pelaksanaan hasil keputusan RUPS, dan pencapaian realisasi dari RKAP. Berikut adalah pencapaian KPI yang ditentukan berdasarkan kontrak manajemen antara Kuasa Pemegang Saham dan Direksi.

### PERFORMANCE EVALUATION

The assessment of the Board of Directors' performance is done through the GMS mechanism which includes the implementation of the duties and responsibilities of each Director under the Articles of Association, the implementation of the GMS resolutions, and the achievements in realizing the RKAP targets. The achievements of KPI set in the management contract between the Shareholders and the Board of Directors are as follows:

No.	Indikator Indicator	Satuan Unit	2018			2019		
			Bobot Weight	Realisasi Realization	Skor Score	Bobot Weight	Realisasi Realization	Skor Score
<b>I. Aspek Keuangan dan Pasar Aspect of Finance and Market</b>								
1	<i>Return on Capital Employed (ROCE)</i>	%	10	11,46	12,00	7	10,31	4,30
2	<i>EBITDA Margin</i>	%	10	16,18	8,99	6	17,07	5,98
3	<i>Cash Ratio from Operation</i>	%	10	82,27	7,62	5	21,41	0,73
<b>Total</b>			<b>30</b>		<b>28,61</b>	<b>18</b>		<b>11,01</b>
<b>II. Aspek Fokus Pelanggan Aspect of Customer Focus</b>								
1	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfactory Index	Skala Likert Likert Scale	10	4,15	10,00	9	4,01	8,70
2	Jumlah Pelanggan Baru Number of New Customers	Pelanggan Customer	10	4	10,00	7	2,00	7,00
3	<i>Contract Deliverables</i>	Kontrak Contract	-	-	-	6	2,00	4,00
<b>Total</b>			<b>20</b>		<b>20,00</b>	<b>22</b>		<b>19,70</b>
<b>III. Aspek Efektivitas Produk dan Proses Aspect of Product and Process Effectiveness</b>								
1	Efektivitas Produksi ( <i>Out of Commission Day</i> ) Production Effectiveness (Out of Commission Day)	Hari Day	10	18	6,00	6	30,00	6,00
2	Efisiensi Operasional Kapal (Laba per Kapal) Ship Operational Efficiency (Profit per Ship)	%	10	17,18	6,98	5	14,65	5,12

No.	Indikator Indicator	Satuan Unit	2018			2019		
			Bobot Weight	Realisasi Realization	Skor Score	Bobot Weight	Realisasi Realization	Skor Score
3	Jumlah Kapal yang Dibeli dan Menjadi Milik Perusahaan Number of Ships Purchased and Owned	Kapal Ship	10	1	2,00	5	17,00	5,25
4.	Keagenan Agency	Kunjungan Visit	10	950	4,61	-	-	-
<b>Total</b>			<b>40</b>		<b>19,59</b>	<b>16</b>		<b>16,37</b>
<b>IV. Aspek Fokus Tenaga Kerja Aspect of Manpower Focus</b>								
1	Indeks Kepuasan Pegawai Employee Satisfaction Index	Skala Likert Likert Scale	2,50	3,13	2,50	9	3,68	9,45
2	<i>Employee Profitability</i>	Ribuan Rupiah Thousand Rupiah	2,50	460,95	2,24	9	423,13	7,41
<b>Total</b>			<b>5</b>		<b>4,74</b>	<b>18</b>		<b>16,86</b>
<b>V. Aspek Tanggung Jawab Kemasyarakatan, Kepemimpinan, Tata Kelola &amp; CSR Aspect of Social Responsibility, Leadership, Governance &amp; CSR</b>								
1	Skor GCG GCG Score	Skor Score	2,50	67,02	2,23	8	68,00	8,40
2	Skor Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) Score	Skor Score	2,50	633,50	2,63	8	25,00	8,00
<b>Total</b>			<b>5</b>		<b>4,86</b>	<b>16</b>		<b>16,40</b>
<b>VI. Aspek Agent of Development Aspect of Agent of Development</b>								
1	Sinergi BUMN SOEs Synergy	Pelanggan Customer	-	-	-	5	3,00	5,25
2	Penugasan Pemerintah Government's Assignment	Tol Laut Sea Toll	-	-	-	5	1,00	5,00
<b>Total</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>		<b>10,25</b>
<b>Grand Total</b>			<b>100,00</b>		<b>77,80</b>	<b>100,00</b>		<b>90,58</b>

**Catatan:**

1. Manajemen tidak melakukan Survei Kepuasan Pelanggan dan Survei Kepuasan Pegawai pada 2018, sehingga data yang digunakan adalah hasil asesmen tahun 2017.
2. Kementerian BUMN tidak menyelenggarakan penilaian KPKU pada 2018, sehingga data yang digunakan adalah hasil asesmen tahun 2017.

**Note:**

1. The management did not conduct a Customer Satisfaction Survey and Employee Satisfaction Survey in 2018, so the data presented are the results of the 2017 assessment.
2. The Ministry of SOEs did not conduct a KPKU assessment in 2018, so the data presented are the results of the 2017 assessment.

## DIREKSI

### Board of Directors

Pencapaian KPI tahun 2019 belum memenuhi target disebabkan hal-hal berikut.

1. Realisasi volume angkutan batu bara mencapai 53 persen dari yang dianggarkan pada RKAP 2019.
2. Belum terealisasinya pengadaan alat produksi berupa armada kapal sesuai dengan RKAP 2019, sehingga pendapatan dari armada kapal belum optimal.
3. Belum tercapainya *employee profitability*. Meski demikian, tingkat kepuasan karyawan berhasil melampaui target, yang sekaligus mencerminkan bahwa Perusahaan memiliki prosedur internal yang jelas, transparan, dan konsisten dalam pelaksanaan bisnisnya.

The achievements of the 2019 KPI have not met the targets due to the following.

1. The realization of coal shipment volume reached 53 percent of the target set in the 2019 Work Plan and Budget (RKAP).
2. The procurement of production equipment in the form of ships did not meet the target set in the RKAP 2019, so that the revenue from the fleet is not optimal.
3. The employee profitability was also below the target. However, the level of employee satisfaction has exceeded the target, reflecting that the Company has clear, transparent and consistent internal procedures in running its business.

### PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI TAHUN 2019

Komposisi Direksi disesuaikan dengan ukuran perusahaan, kompleksitas bisnis, dan struktur organisasi, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Jumlah anggota Dewan Direksi sekurang-kurangnya adalah 2 (dua), terdiri atas seorang Direktur Utama dan anggota Direksi yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

### CHANGES IN BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION IN 2019

The composition of the Board of Directors is adjusted to the Company's size, business complexity, and organizational structure, so as to enable effective, precise and quick decision making to achieve the objectives of the Company. The number of members of the Board of Directors is at least 2 (two), consisting of a President Director and members of the Board of Directors determined at a General Meeting of Shareholders (GMS).

Perubahan komposisi Direksi DJAKARTA LLOYD terjadi pada tahun buku 2019, yakni pada posisi Direktur Keuangan dan SDM yang sebelumnya dijabat oleh Tunggul Pusphita Dani, digantikan oleh Ofan Sofwan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-15/D7.MBU.4/1/2019 tanggal 24 Januari 2019 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 06 tanggal 13 Februari 2019. Adapun nomenklatur jabatan Direktur Keuangan dan SDM kini menjadi Direktur Finance, Human Capital Management (HCM) & General Affair (GA)

Changes in the composition of the Board of Directors of DJAKARTA LLOYD occurred in the fiscal year 2019, of which the position of Director of Finance and HR previously held by Tunggul Pusphita Dani (effective as of January 24, 2019) has been replaced by Ofan Sofwan based on the Ministry of SOEs Decree Number SK-15/D7.MBU.4/1/2019 dated January 24, 2019 and Notarial Deed of Lenny Janis Ishak, SH, Jakarta, Number 06 dated February 13, 2019. The nomenclature for the position of Director of Finance and HR is now Director of Finance, Human Capital Management (HCM) & General Affairs (GA).

**INDEPENDENSI DIREKSI**

Selain organ Perusahaan, pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan Perusahaan atau memengaruhi Direksi dalam menjalankan usaha Perusahaan. Anggota Direksi juga dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus usaha Perusahaan.

**BOARD OF DIRECTORS' INDEPENDENCE**

In addition to the Company's organs, any other party is prohibited from interfering in the management of the Company or influencing the Board of Directors in running the Company's business. The members of the Board of Directors are also prohibited from conducting activities that could interfere with their independence in managing the Company's business.

**Hubungan Afiliasi Direksi**  
**Board of Directors' Affiliate Relationships**

Nama Name	Jabatan Position	Hubungan Keuangan dengan Financial Relationship with				Hubungan Keluarga dengan Family Relationship with					
		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors	
		Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Suyoto	Direktur Utama President Director		✓		✓		✓		✓		✓
Tunggul Pusphita Dani <sup>1</sup>	Direktur Keuangan dan SDM Director of Finance and HR		✓		✓		✓		✓		✓
Ofan Sofwan <sup>2</sup>	Direktur Finance, HCM & GA Director of Finance, HCM & GA		✓		✓		✓		✓		✓

**Keterangan:**

<sup>1</sup> Menjabat sampai 24 Januari 2019

<sup>2</sup> Menjabat sejak 24 Januari 2019

**Note:**

<sup>1</sup> Served until January 24, 2019

<sup>2</sup> Served since January 24, 2019

# DIREKSI

## Board of Directors

### PROGRAM KERJA DIREKSI TAHUN 2019

### BOARD OF DIRECTORS' WORK PROGRAM IN 2019

Program	Detail	Realisasi Realization
Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Business Restructuring and Development	Melaksanakan <i>buyback</i> saham eks PKPU ( <i>debt to equity swap</i> ) sesuai keputusan PKPU, dengan pembayaran triwulan I pada Maret 2019. Buyback of shares acquired under the debt to equity swap in accordance with the agreement of debt obligation payment postponement (PKPU), of which the payment for quarter I of 2019 was done in March.	Terealisasi Realized
	Melaksanakan pembayaran Rekening Dana Investasi sesuai dengan jadwal pembayaran. Pay the obligation to the Investment Fund Account according to the payment schedule.	Terealisasi Realized
	Penghapusbukuan 1.500 unit kontainer yang sudah tidak produktif dan tersebar di beberapa Depo, dengan sebagian berada dalam kondisi rusak dan hilang. Write-off 1,500 units of containers that have been unproductive and scattered in several depots, with some of them are damaged and lost.	Tidak Terealisasi Unrealized
	Penghapusbukuan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Ciniro VI/14 Blok Q Persil 52, Jakarta Selatan, di mana hasilnya akan digunakan untuk investasi 1 unit gedung kantor DJAKARTA LLOYD di Jakarta Pusat. Write-off the land and buildings located on Jl. Ciniro VI/14 Blok Q Lot 52, South Jakarta, where the proceeds will be used to invest in 1 unit of the DJAKARTA LLOYD office building in Central Jakarta.	Terealisasi Realized
	Penghapusbukuan atas 10 unit <i>shipset</i> yang berada di enam galangan, di mana <i>shipset</i> tersebut masih dalam proses <i>appraisal</i> . Write-off the assets of vehicles that are no longer productive, consisting of two units belonging to the parent company and two units belonging to the subsidiary	Tidak Terealisasi Unrealized
	Penghapusbukuan aset kendaraan yang sudah tidak produktif, terdiri dari dua unit milik perusahaan induk dan dua unit milik anak perusahaan. Write-off the assets of vehicles that are no longer productive, consisting of two units belonging to the parent company and two units belonging to the subsidiary	Terealisasi Realized
	Melakukan penerbitan surat utang untuk pengadaan armada kapal Perusahaan, yaitu satu unit kapal kargo curah jenis <i>handymax</i> dan satu unit kapal <i>tug &amp; barge</i> . Issue Debt Securities for the procurement of the Company's fleet of one unit of bulk cargo handymax and one unit of tug & barge	Tidak Terealisasi Unrealized
	Untuk mengelola bisnis secara terintegrasi dan memperlihatkan data secara <i>real-time</i> , Perusahaan melakukan investasi aplikasi manajemen bisnis berupa Enterprise Resource Planning (ERP). To manage the business in an integrated manner and to display the data in real-time, the Company invests in a business management application in the form of Enterprise Resource Planning (ERP).	Terealisasi Realized
	Pembangunan 1 unit kapal tanker LTTC Small II – WO 6.500 LTDW yang merupakan pengalihan kedudukan (novasi) antara PT Indrabas Purnama Makmur dengan Perseroan. The construction of 1 unit of tanker LTTC Small II - WO 6,500 LTDW which is a novation from PT Indrabas Purnama Makmur to the Company.	Terealisasi Realized



Program	Detail	Realisasi Realization
Operasional Operational	Melakukan penambahan alat produksi usaha berupa satu unit kapal <i>tug &amp; barge</i> (KT Daya Lautan II) dan satu unit kapal curah jenis <i>handymax</i> (MV Dharma Lautan Ruby). Add the business production equipment in the form of one unit of tug & barge (KT Daya Lautan II) and one unit of bulk ship handymax (MV Dharma Lautan Ruby).	Terealisasi Realized
	Meningkatkan volume angkutan curah pada jenis kapal kerja sama operasi dan kapal milik. Increase the bulk shipment volume on the joint operation and owned ships.	Tidak Terealisasi Unrealized
	Melaksanakan penugasan dari Kementerian Perhubungan untuk mengoperasikan Tol Laut di empat trayek. Carry out the assignment from the Ministry of Transportation to operate four routes of the Sea Toll.	Terealisasi Realized
Keuangan dan Akuntansi Finance and Accounting	Pemantapan penerapan sistem akuntansi dan keuangan yang sesuai standar PSAK dan International Financial Reporting Standards (IFRS). Strengthen the application of accounting and financial systems in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) and International Financial Reporting Standards (IFRS).	Terealisasi Realized
	Pemanfaatan sistem Enterprise Resource Planning (ERP). Utilization of Enterprise Resource Planning (ERP) system.	Terealisasi Realized
	Mencapai target laporan keuangan tahun buku 2018 “Wajar Tanpa Pengecualian”, bahkan kini termasuk dalam kategori perusahaan sehat. Reach the target of “Fairly in All Material Respects” for the 2018 financial year report and be rated as a healthy company.	Terealisasi Realized
SDM & Umum HR & General Affairs	Perubahan paradigma dalam pengelolaan SDM menjadi <i>human capital</i> . Shift the paradigm in managing HR to become human capital.	Terealisasi Realized
	Penetapan budaya baru Perusahaan berupa “KTKDPT”. Determine the Company’s new culture called in abbreviation “KTKDPT”.	Terealisasi Realized
	Restrukturisasi remunerasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Restructure the remuneration in accordance with the Collective Labor Agreement (PKB).	Terealisasi Realized

## MEKANISME REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Remuneration Mechanism for the Board of Commissioners and Board of Directors

Mekanisme remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi DJAKARTA LLOYD mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor S-483/MBU/D2/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Remunerasi atau honorarium Komisaris Utama adalah 45 persen dari honorarium Direktur Utama, sedangkan fasilitas kendaraan senilai 20 persen dari honorarium Komisaris Utama.
2. Honorarium Komisaris lainnya adalah 90 persen dari honorarium Komisaris Utama, sedangkan fasilitas kendaraan senilai 20 persen dari honorarium Komisaris.
3. Honorarium Sekretaris Dewan Komisaris adalah 15 persen dari honorarium Direktur Utama, sedangkan fasilitas kendaraan senilai 20 persen dari honorarium Sekretaris Dewan Komisaris.
4. Honorarium Direktur Human Capital adalah 90 persen dari honorarium Direktur Utama.

The mechanism of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of Directors of DJAKARTA LLOYD refers to the Minister SOEs Regulation Number S-483/MBU/D2/05/2019 dated May 31, 2019 with the following conditions:

1. Remuneration or honorarium of the President Commissioner is 45 percent of the honorarium of the President Director, while vehicle facility is worth 20 percent of the honorarium of the President Commissioner.
2. The honorarium of other Commissioners is 90 percent of the honorarium of the President Commissioner, while the vehicle facility is worth 20 percent of the honorarium of the Commissioner.
3. The honorarium of the Board of Commissioners' Secretary is 15 percent of the honorarium of the President Director, while the vehicle facility is worth 20 percent of the honorarium of the Secretary of the Board of Commissioners.
4. The honorarium of the Director of Human Capital is 90 percent of the President Director's honorarium.

#### Biaya Dewan Komisaris (dalam ribuan rupiah) Board of Commissioners's Expenses (in thou)

Uraian Description	RKAP 2019	Realisasi 2019 2019 Realization	RKAP 2020
<b>Beban Gaji &amp; Tunjangan Dewan Komisaris</b> Board of Commissioners' Salary & Allowance Expenses			
Beban Gaji & Tunjangan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Salary & Allowance Expenses	1.321.488	1.495.728	1.586.600
Beban Tunjangan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Benefit Expense	600.000	345.598	703.000
Beban Pengobatan, Asuransi & BPJS Healthcare, Insurance and BPJS Expense		42.125	

## FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Meeting Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners and Board of Directors

### RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris memiliki sejumlah agenda rutin seperti evaluasi kinerja bulanan dan triwulanan Perusahaan; *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut permasalahan; serta pembahasan hal-hal khusus yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan permasalahan aktual yang perlu mendapat klarifikasi dari Manajemen. Adapun sepanjang 2019, Dewan Komisaris menyelenggarakan dan mengikuti 21 rapat yang terdiri atas 10 rapat internal dan 11 rapat gabungan bersama Direksi dengan detail berikut.

### BOARD OF COMMISSIONERS' MEETINGS

The Board of Commissioners hold meetings with routine agenda such as the Company's monthly and quarterly performance evaluation; monitoring and evaluating the follow-ups of problems; and discussion of special matters that require the approval of the Board of Commissioners and actual issues that need clarification from the Management. As for 2019, the Board of Commissioners held and participated in 21 meetings consisting of 10 internal meetings and 11 joint meetings with the Board of Directors with the following details

No.	Hari, Tanggal Day, Date	Jenis Rapat Meeting Type	Agenda	Kehadiran Attendance			
				MMA	SJ	AA	LOS
1	Rabu, 30 Januari 2019 Wednesday, January 30, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian kinerja operasional dan keuangan (<i>unaudited</i>) 2018</li> <li>• Rencana dan strategi mencapai produksi 2019</li> <li>• Hal-hal strategis lainnya</li> <li>• Achievement of operational and financial performance (<i>unaudited</i>) in 2018</li> <li>• Plans and strategies for production in 2019</li> <li>• Other strategic matters</li> </ul>	1	1		
2	Rabu, 30 Januari 2019 Wednesday, January 30, 2019	Gabungan dengan Direksi Joint Meeting with the Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian kinerja operasional dan keuangan (<i>unaudited</i>) 2018</li> <li>• Rencana dan strategi mencapai produksi 2019</li> <li>• Hal-hal strategis lainnya</li> <li>• Achievement of operational and financial performance (<i>unaudited</i>) in 2018</li> <li>• Plans and strategies for production in 2019</li> <li>• Other strategic matters</li> </ul>	1	1		
3	Jumat, 15 Maret 2019 Friday, March 15, 2019	Gabungan dengan Direksi Joint Meeting with the Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian kinerja operasional dan keuangan (<i>unaudited</i>) 2018</li> <li>• Capaian kinerja operasional dan keuangan sampai dengan Februari 2019</li> <li>• Hal-hal strategis lainnya</li> <li>• Achievement of operational and financial performance (<i>unaudited</i>) in 2018</li> <li>• Achievement of operational and financial performance until February 2019</li> <li>• Other strategic matters</li> </ul>		1		

## FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Meeting Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners and Board of Directors

No.	Hari, Tanggal Day, Date	Jenis Rapat Meeting Type	Agenda	Kehadiran Attendance			
				MMA	SJ	AA	LOS
4	Selasa, 9 April 2019 Tuesday, April 9, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemaparan hasil kunjungan Komite Audit ke Cabang Makassar</li> <li>Pembahasan laporan manajemen dan keuangan (<i>unaudited</i>) 2018</li> <li>Presentation on the outcomes of the Audit Committee's visit to the Makassar Branch</li> <li>Discussion on the management and financial statements (<i>unaudited</i>) of 2018</li> </ul>		1		
5	Selasa, 9 April 2019 Tuesday, April 9, 2019	Gabungan dengan Direksi Joint Meeting with the Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian laporan manajemen dan keuangan (<i>audited</i>) 2018</li> <li>Tindak lanjut kerja sama proyek dengan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Achievement of the management and financial statements (<i>audited</i>) of 2018</li> <li>Follow-up on project cooperation with PT Dok and Shipping Surabaya (Persero)</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>		1		
6	Rabu, 8 Mei 2019 Wednesday, May 8, 2019	Gabungan dengan Direksi Joint Meeting with the Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi kinerja manajemen dan keuangan sampai dengan triwulan I 2019</li> <li>Pemaparan mengenai rencana pembelian kapal <i>handymax</i> tahun 2019</li> <li>Pemaparan mengenai rencana penerbitan MTN</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Realization of the management and financial performance until the first quarter of 2019</li> <li>Presentation of the planned purchase of the <i>Handymax</i> ship in 2019</li> <li>Presentation regarding the planned MTN issuance</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>		1		
7	Rabu, 8 Mei 2019 Wednesday, May 8, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Audited 2019</li> <li>Hal-hal lain yang dianggap perlu</li> <li>Audited report 2019</li> <li>Other things deemed necessary</li> </ul>		1		
8	Selasa, 18 Juni 2019 Tuesday, June 18, 2019	Gabungan dengan Direksi Joint Meeting with the Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi kinerja manajemen dan keuangan sampai dengan Mei 2019</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Realization of the management and financial performance until May 2019</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>			1	1

No.	Hari, Tanggal Day, Date	Jenis Rapat Meeting Type	Agenda	Kehadiran Attendance			
				MMA	SJ	AA	LOS
9	Selasa, 18 Juni 2019 Tuesday, June 18, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemaparan garis besar kinerja dan operasional Perseroan (<i>audited</i>) tahun 2018 sampai dengan triwulan I 2019</li> <li>Pembahasan rencana kerja Komite Audit 2019</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Presentation of the Company's performance and operations (<i>audited</i>) in 2018 until the Q1 2019</li> <li>Discussion on the Audit Committee's work plan in 2019</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>			1	1
10	Rabu, 24 Juli 2019 Wednesday, July 24, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan rencana kerja Komite Audit 2019</li> <li>Pembahasan surat Direksi terkait permohonan pinjaman kredit BNI</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Discussion on the Audit Committee's work plan for 2019</li> <li>Discussion on the Board of Directors' let-ter regarding BNI credit loan applications</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>			1	1
11	Rabu, 24 Juli 2019 Wednesday, July 24, 2019	Gabungan dengan Direksi Joint Meeting with the Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi kinerja manajemen dan keuangan sampai dengan Juni 2019</li> <li>Pembahasan surat permohonan fasilitas kredit pinjaman BNI</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Realization of management and financial performance until June 2019</li> <li>Discussion on application letter for BNI credit facilities</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>			1	1
12	Selasa, 13 Agustus 2019 Tuesday, August 13, 2019	Internal	<p>Pembahasan surat Direksi terkait novasi perjanjian sewa kapal LTTC PT Pertamina (Persero) dan PT Indrabas Purnama Makmur</p> <p>Discussion on the Board of Directors' letter related to the ship charter novation agreement between PT Pertamina (Persero) and PT Indrabas Purnama Makmur</p>			1	1
13	Selasa, 13 Agustus 2019 Tuesday, August 13, 2019	Gabungan dengan Direksi Joint Meeting with the Board of Directors	<p>Pembahasan surat direksi terkait novasi perjanjian sewa kapal LTTC PT Pertamina (Persero) dan PT Indrabas Purnama Makmur</p> <p>Discussion on the Board of Directors' letter related to the LTTC ship charter novation agreement between PT Pertamina (Persero) and PT Indrabas Purnama Makmur</p>			1	1

## FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Meeting Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners and Board of Directors

No.	Hari, Tanggal Day, Date	Jenis Rapat Meeting Type	Agenda	Kehadiran Attendance			
				MMA	SJ	AA	LOS
14	Kamis, 12 September 2019 Thursday, September 12, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan surat Direksi terkait penerbitan MTN</li> <li>Pembahasan kinerja Perusahaan sampai dengan Agustus 2019</li> <li>Discussion on the Board of Directors' letter regarding MTN issuance</li> <li>Discussion on the Company's performance until August 2019</li> </ul>			1	1
15	Kamis, 12 September 2019 Thursday, September 12, 2019	Gabungan dengan Direksi Joint Meeting with the Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan surat direksi terkait penerbitan MTN</li> <li>Pembahasan kinerja Perusahaan hingga Agustus 2019</li> <li>Discussion on the Board of Directors' letter regarding MTN issuance</li> <li>Discussion on the Company's performance until August 2019</li> </ul>			1	1
16	Rabu, 16 Oktober 2019 Wednesday, October 16, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan surat direksi tentang RJPP 2019-2023</li> <li>Pembahasan kinerja Perusahaan sampai dengan triwulan III 2019</li> <li>Progres penerbitan MTN</li> <li>Discussion on the Board of Directors' letter about Corporate Long-Term Plan of 2019-2023</li> <li>Discussion on the Company's performance until the Q3 2019</li> <li>Progress on MTN issuance</li> </ul>			1	1
17	Rabu, 16 Oktober 2019 Wednesday, October 16, 2019	Gabungan dengan Direksi Joint Meeting with the Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan surat direksi tentang RJPP</li> <li>Pembahasan kinerja Perusahaan sampai dengan triwulan III 2019</li> <li>Progres rencana penerbitan MTN</li> <li>Pemaparan Direksi terkait Satgas Cabang Surabaya</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Discussion on the Board of Directors' letter about Corporate Long-Term Plan</li> <li>Discussion on the Company's performance until the third quarter of 2019</li> <li>Progress on MTN issuance plan</li> <li>Presentation by the Board Directors related to the Surabaya Branch Task Force</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>			1	1
18	Rabu, 6 November 2019 Wednesday, November 6, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan kinerja Perusahaan sampai dengan Oktober 2019</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Discussion on the Company's performance until October 2019</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>			1	1



No.	Hari, Tanggal Day, Date	Jenis Rapat Meeting Type	Agenda	Kehadiran Attendance			
				MMA	SJ	AA	LOS
19	Rabu, 6 November 2019  Wednesday, November 6, 2019	Gabungan dengan Direksi  Joint Meeting with the Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan kinerja Perusahaan sampai dengan Oktober 2019</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Discussion on the Company's performance until October 2019</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>			1	1
20	Rabu, 18 Desember 2019  Wednesday, December 18, 2019	Internal	Pembahasan prognosis kinerja Perusahaan 2019  Discussion on the Company's performance prognosis in 2019			1	1
21	Rabu, 18 Desember 2019  Wednesday, December 18, 2019	Gabungan dengan Direksi  Joint Meeting with the Board of Directors	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan prognosis kinerja Perusahaan 2019</li> <li>Pembahasan RKAP 2020</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Discussion of the Company's performance prognosis in 2019</li> <li>Discussion on the 2020 RKAP</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>			1	1
<b>Jumlah Kehadiran Total Attendance</b>				<b>2</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
<b>Persentase Percentage</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Catatan:**

- MMA: Maryono M. Atmadja pensiun menjabat sebagai Komisaris Utama pada Februari 2019, efektif nonaktif pada 29 Mei 2019.
- SJ: Syahril Japarin efektif menjabat sebagai Komisaris hingga 29 Mei 2019.
- AA: Anhar Adel efektif menjabat sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen pada 29 Mei 2019 hingga 9 Januari 2020
- LOS: Lambonar O. Silitonga efektif menjabat sebagai Komisaris sejak 29 Mei 2019, diangkat menjadi Komisaris Utama pada 9 Januari 2020.
- M. Yusuf Permana efektif menjabat sebagai Komisaris sejak 9 Januari 2020.

**Note:**

- MMA: Maryono M. Atmadja retired as President Commissioner in February 2019, effectively inactive on May 29, 2019.
- SJ: Syahril Japarin effectively served as Independent Commissioner until May 29, 2019.
- AA: Anhar Adel effectively served as President Commissioner and Independent Commissioner from May 29, 2019, to January 9, 2020.
- LOS: Lambonar O. Silitonga effectively served as Commissioner on May 29, 2019, appointed as President Commissioner on January 9, 2020.
- M. Yusuf Permana effectively served as Commissioner since January 9, 2020.

## FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Meeting Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners and Board of Directors

### RAPAT DIREKSI

Sepanjang 2019, Direksi menyelenggarakan dan mengikuti 23 rapat yang terdiri atas 12 rapat internal dan 11 rapat gabungan bersama Dewan Komisaris dengan detail sebagai berikut.

### BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Throughout 2019, the Board of Directors held and participated in 23 meetings consisting of 12 internal meetings and 11 joint meetings with the Board of Commissioners with the following details.

No.	Hari, Tanggal Day, Date	Jenis Rapat Meeting Type	Agenda	Kehadiran Attendance	
				SY	OS
1	Senin, 28 Januari 2019 Monday, January 28, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi SK Menteri mengenai remunerasi</li> <li>Rapat Kerja Perseroan tahun 2019</li> <li>Penanaman <i>new culture</i> Perseroan</li> <li>Evaluation of Minister Decree regarding remuneration</li> <li>2019 Company Work Meeting</li> <li>Embedment of the Company's new culture</li> </ul>	1	1
2	Rabu, 30 Januari 2019 Wednesday, January 30, 2019	Gabungan dengan Dewan Komisaris Joint Meeting with the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian kinerja operasional dan keuangan (<i>unaudited</i>) 2018</li> <li>Rencana dan strategi dalam mencapai produksi tahun 2019</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Achievement of operational and financial performance (<i>unaudited</i>) in 2018</li> <li>Plans and strategies for achieving production in 2019</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>	1	1
3	Senin, 18 Februari 2019 Monday, February 18, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan aspek komersial dan teknis terkait kapal <i>time charter</i> MV Asian Wisdom</li> <li>Percepatan pengadaan <i>time charter</i> jenis <i>tug &amp; barge</i> sebanyak 15 set</li> <li>Solusi percepatan pembongkaran MV Srikandi Indonesia 19 di Pelabuhan Tanjung Intan</li> <li>Discussion on commercial and technical aspects related to MV Asian Wisdom time charter ship</li> <li>The procurement of time charter tug &amp; barge for 15 sets</li> <li>Solution to accelerate the demolition of MV Srikandi Indonesia 19 at the Tanjung Intan Port</li> </ul>	1	1
4	Jumat, 15 Maret 2019 Friday, March 15, 2019	Gabungan dengan Dewan Komisaris Joint Meeting with the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian kinerja operasional dan keuangan (<i>unaudited</i>) 2018</li> <li>Capaian kinerja operasional dan keuangan sampai dengan Februari 2019</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Achievement of operational and financial performance (<i>unaudited</i>) in 2018</li> <li>Achievement of operational and financial performance until February 2019</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>	1	1

No.	Hari, Tanggal Day, Date	Jenis Rapat Meeting Type	Agenda	Kehadiran Attendance	
				SY	OS
5	Rabu, 20 Maret 2019 Wednesday, March 20, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan penanaman kapal <i>tug &amp; barge</i></li> <li>Perubahan Tim Pengadaan Armada Kapal</li> <li>Penjualan aset Perusahaan</li> <li>Perizinan KM MH Thamrin PB 1600</li> <li>Mekanisme pengeluaran anggaran SBU Tol Laut</li> <li>Discussion on investment in of tug &amp; barge vessels</li> <li>Changes in the Ship Procurement Team</li> <li>Sales of the Company's assets</li> <li>Licensing for KM MH MH Thamrin PB 1600</li> <li>Budget disbursement mechanism for the Sea Toll Strategic Business Unit (SBU)</li> </ul>	1	1
6	Selasa, 9 April 2019 Tuesday, April 9, 2019	Gabungan dengan Dewan Komisaris Joint Meeting with the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capaian laporan manajemen dan keuangan (<i>audited</i>) 2018</li> <li>Tindak lanjut kerja sama proyek dengan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Achievement of management and financial statements (<i>audited</i>) of 2018</li> <li>Follow-up on project cooperation with PT Dok and Shipping Surabaya (Persero)</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>	1	1
7	Selasa, 30 April 2019 Tuesday, April 30, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrak Management</li> <li>Kinerja triwulan I</li> <li><i>Monitoring</i> dan pengendalian anggaran</li> <li><i>Monitoring</i> dan pengendalian kinerja SBU, serta mitigasi risiko</li> <li>Contract Management</li> <li>Quarter I Performance</li> <li>Monitoring and budget control</li> <li>Monitoring and controlling SBU performance, and risk mitigation</li> </ul>	1	1
8	Senin, 6 Mei 2019 Monday, May 6, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut Kontrak Management</li> <li>Kinerja triwulan 1</li> <li>Persiapan bahan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris</li> <li>Follow-up on Management Contract</li> <li>The Q1 performance</li> <li>Materials preparation for Joint Meeting with the Board of Commissioners</li> </ul>	1	1

## FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Meeting Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners and Board of Directors

No.	Hari, Tanggal Day, Date	Jenis Rapat Meeting Type	Agenda	Kehadiran Attendance	
				SY	OS
9	Rabu, 8 Mei 2019 Wednesday, May 8, 2019	Gabungan dengan Dewan Komisaris Joint Meeting with the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi kinerja manajemen dan keuangan sampai dengan triwulan I 2019</li> <li>Pemaparan mengenai rencana pembelian <i>handymax</i> tahun 2019</li> <li>Pemaparan mengenai rencana penerbitan MTN</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realization of management and financial performance until the first quarter of 2019</li> <li>Presentation on the <i>handymax</i> purchase plan in 2019</li> <li>Presentation of the planned MTN issuance</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>	1	1
10	Selasa, 18 Juni 2019 Tuesday, June 18, 2019	Gabungan dengan Dewan Komisaris Joint Meeting with the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi kinerja manajemen dan keuangan hingga Mei 2019</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realization of management and financial performance until May 2019</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>	1	1
11	Rabu, 19 Juni 2019 Wednesday, June 19, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perjanjian novasi antara DJAKARTA LLOYD dan PT Indrabas Purnama Makmur dalam LTTC New Building</li> <li>Potensi bisnis <i>shorebase</i> di Sumenep</li> <li>Tindak lanjut pembangunan kapal di DPS</li> <li>Rapar koordinasi dengan Satgas</li> <li>Struktur organisasi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Novation agreement between DJAKARTA LLOYD and PT Indrabas Purnama Makmur in LTTC New Building</li> <li>Shorebase business potential in Sumenep</li> <li>Follow-up on ship building in DPS</li> <li>Coordination meeting with the Task Force</li> <li>Organizational structure</li> </ul>	1	1
12	Rabu, 17 Juli 2019 Wednesday, July 17, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>RUPS untuk penjaminan aset <i>tug &amp; barge</i> (tongkang)</li> <li>Kredit investasi</li> <li>Tindak lanjut MV Dharma Lautan Ruby</li> <li>Tindak lanjut revisi RKAP 2019</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>GMS for guaranteeing of the <i>tug &amp; barge</i> assets</li> <li>Investment credit</li> <li>Follow-up on MV Dharma Lautan Ruby</li> <li>Follow up on the 2019 RKAP revision</li> </ul>	1	1

No.	Hari, Tanggal Day, Date	Jenis Rapat Meeting Type	Agenda	Kehadiran Attendance	
				SY	OS
13	Rabu, 24 Juli 2019 Wednesday, July 24, 2019	Gabungan dengan Dewan Komisaris Joint Meeting with the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realisasi kinerja manajemen dan keuangan hingga Juni 2019</li> <li>Pembahasan surat permohonan fasilitas kredit pinjaman BNI</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Realization of management and financial performance until June 2019</li> <li>Discussion on application letter for BNI credit facility</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>	1	1
14	Selasa, 13 Agustus 2019 Tuesday, August 13, 2019	Gabungan dengan Dewan Komisaris Joint Meeting with the Board of Commissioners	<p>Pembahasan surat direksi terkait novasi perjanjian sewa kapal LTTC PT Pertamina (Persero) dan PT Indrabas Purnama Makmur</p> <p>Discussion on the Board of Directors' letter related to the novation of PT Pertamina (Persero) and PT Indrabas Purnama Makmur's LTTC ship time charter agreement</p>	1	1
15	Selasa, 27 Agustus 2019 Tuesday, August 27, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan kinerja sampai dengan Juli 2019</li> <li>Kandidat KAP 2019</li> <li>Rencana MTN</li> <li>Tindak lanjut ERP</li> <li>Evaluasi kontrak kerja dengan klien</li> <li>Performance report until July 2019</li> <li>Candidates for 2019 Public Accountant Office (KAP)</li> <li>MTN Plan</li> <li>Follow-up on ERP</li> <li>Evaluation of work contracts with clients</li> </ul>	1	1
16	Kamis, 12 September 2019 Thursday, September 12, 2019	Gabungan dengan Dewan Komisaris Joint Meeting with the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan surat Direksi terkait penerbitan MTN</li> <li>Pembahasan kinerja Perusahaan sampai dengan Agustus 2019</li> <li>Discussion of the Board of Directors' letter related to the issuance of MTN</li> <li>Discussion on the Company's performance until August 2019</li> </ul>	1	1
17	Rabu, 18 September 2019 Wednesday, September 18, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progres kredit BRI dan MTN</li> <li>Tindak lanjut ERP</li> <li>Pembahasan struktur organisasi</li> <li>Progress of BRI loan and MTN</li> <li>Follow-up on ERP</li> <li>Discussion on organizational structure</li> </ul>	1	1

## FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Meeting Frequency and Attendance Level of the Board of Commissioners and Board of Directors

No.	Hari, Tanggal Day, Date	Jenis Rapat Meeting Type	Agenda	Kehadiran Attendance	
				SY	OS
18	Rabu, 16 Oktober 2019 Wednesday, October 16, 2019	Gabungan dengan Dewan Komisaris Joint Meeting with the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan surat Direksi tentang RJPP</li> <li>Pembahasan kinerja Perusahaan sampai dengan triwulan III 2019</li> <li>Progres rencana penerbitan MTN</li> <li>Pemaparan Direksi terkait Satgas Cabang Surabaya</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Discussion of the Directors' letter regarding RJPP</li> <li>Discussion of the Company's performance up to the third quarter of 2019</li> <li>Progress on MTN issuance plan</li> <li>Presentation of the Board of Directors related to the Surabaya Branch Task Force</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>	1	1
19	Selasa, 22 Oktober 2019 Tuesday, October 22, 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindak lanjut Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi</li> <li>RKAP 2020</li> <li>RJPP 2020-2024</li> <li>Pembahasan mengenai lahan Inggom</li> <li>Follow-up on the Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors</li> <li>2020 Work Plan and Budget (RKAP)</li> <li>2020-2024 Corporate Long-Term Corporate Plan</li> <li>Discussion on Inggom land</li> </ul>	1	1
19	Rabu, 6 November 2019 Wednesday, November 6, 2019	Gabungan dengan Dewan Komisaris Joint Meeting with the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan kinerja Perusahaan sampai dengan Oktober 2019</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Discussion on the Company's performance until October 2019</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>	1	1
21	Senin, 18 November 2019 Monday, 18 November 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi mengenai armada kapal dan operasional</li> <li>Evaluasi mengenai keuangan Perseroan</li> <li>Evaluation of the fleet and operations</li> <li>Evaluation of the Company's finances</li> </ul>	1	1
22	Senin, 16 Desember 2019 Monday, 16 Desember 2019	Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persiapan Rapat Gabungan dengan Dewan Komisaris</li> <li>Progres pembangunan kapal tanker di DPS</li> <li>RKAP 2020</li> <li>Preparation for Joint Meeting with the Board of Commissioners</li> <li>Progress of tanker construction at DPS</li> <li>2020 RKAP</li> </ul>	1	1



No.	Hari, Tanggal Day, Date	Jenis Rapat Meeting Type	Agenda	Kehadiran Attendance	
				SY	OS
23	Rabu, 18 Desember 2019 Wednesday, Desember 18, 2019	Gabungan dengan Dewan Komisaris Joint Meeting with the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan kinerja Perusahaan prognosis tahun 2019</li> <li>Pembahasan RKAP 2020</li> <li>Hal-hal strategis lainnya</li> <li>Discussion on the Company's performance prognosis in 2019</li> <li>Discussion on 2020 Corporate Work Plan and Budget (RKAP)</li> <li>Other strategic matters</li> </ul>	1	1
<b>Total Kehadiran Total Attendance</b>				<b>23</b>	<b>23</b>
<b>Persentase Percentage</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>

**Catatan Note:** SY: Suyoto OS: Ofan Sofwan

## PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI

### Affiliation Relationship Disclosure

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, baik dalam hubungan keuangan, keluarga, ataupun kepengurusan.</li> <li>Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, baik dalam hubungan keuangan, keluarga, ataupun kepengurusan.</li> <li>Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali, baik dalam hubungan keuangan, keluarga, ataupun kepengurusan.</li> <li>Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris, baik dalam hubungan keuangan, keluarga, ataupun kepengurusan.</li> <li>Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengedali, baik dalam hubungan keuangan, keluarga, ataupun kepengurusan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>All members of the Board of Directors have no affiliation with fellow members of the Board of Directors, whether in financial, family, or management relations.</li> <li>All members of the Board of Directors have no affiliation with fellow members of the Board of Commissioners, whether in financial, family or management relations.</li> <li>All members of the Board of Directors have no affiliation with the Major and/or Controlling Shareholders, whether in financial, family or management relations.</li> <li>All members of the Board of Commissioners have no affiliation with fellow members of the Board of Commissioners, whether in financial, family or management relations.</li> <li>All members of the Board of Commissioners have no affiliation with the Major and/or Controlling Shareholders, whether in financial, family or management relations.</li> </ol> |
|--|---|

## PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

### Conflict of Interest Management

Benturan kepentingan merupakan suatu kondisi tertentu di mana kepentingan individu berpotensi memiliki pertentangan dengan kepentingan Perusahaan untuk meraih laba, meningkatkan nilai, mencapai visi, menjalankan misi, dan melaksanakan keputusan RUPS.

Sesuai etika jabatan, Dewan Komisaris dan Direksi DJAKARTA LLOYD wajib melakukan pengungkapan apabila terjadi benturan kepentingan dan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal tersebut, serta memperbarui surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan secara berkala atau setiap awal tahun buku.

Pada tahun 2019, Dewan Komisaris dan Direksi tidak melakukan pengambilan keputusan ataupun tindakan transaksional yang memuat benturan kepentingan.

Conflict of interest is a certain condition where the interests of individuals have the potential to conflict with the interests of the Company to gain profits, increase value, achieve vision, carry out missions, and implement GMS resolutions.

Following the position ethics, the Board of Commissioners and Board of Directors of DJAKARTA LLOYD are required to make disclosures in the event of a conflict of interest and must not involve themselves in the decision-making process related to this matter, as well as periodically renew the statement letter of not having a conflict of interest at the beginning of each financial year.

In 2019, the Board of Commissioners and the Board of Directors did not make any decisions or transactions that contained conflicts of interest.

## ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

### Supporting Organs of the Board of Commissioners

#### KOMITE AUDIT

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan fungsi pemberian nasihat, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dengan masa tugas yang tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Pembentukan Komite Audit ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003/KEP/DEKOM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2018. Selanjutnya, Dewan Komisaris membuat Surat Keputusan Nomor 004/KEP/DEKOM/VII/2019 tanggal 12 Juli 2018 tentang Pengangkatan Ketua Komite Audit PT Djakarta Lloyd (Persero), sehingga susunan keanggotaan Komite Audit terdiri atas:

#### AUDIT COMMITTEE

In performing its supervisory duties and advisory functions, the Board of Commissioners must establish an Audit Committee and may form other committees in accordance with the development of applicable laws and/or the needs of the Company. Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners, with a term of office that may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners and can be reappointed for only one subsequent period.

The Audit Committee was established under the issuance of the Board of Commissioners Decree No. 003/KEP/DEKOM/VII/2019 dated July 12, 2018. Furthermore, the Board of Commissioners also issued the Decree Number 004/KEP/DEKOM/VII/2019 dated July 12, 2018 concerning the Appointment of the Chairman of Audit Committee of PT Djakarta Lloyd (Persero), so the Audit Committee membership consists of:

1. Syahril Japarin (Ketua Komite Audit)
2. Heru Sakti Wibowo (Anggota Komite Audit)

Karena masa jabatan Sdr. Syahril Japarin sebagai Komisaris Independen PT Djakarta Lloyd (Persero) berakhir, maka dilakukan pergantian Ketua Komite Audit melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 003/KEP/DEKOM/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019 tentang Pengangkatan Ketua Komite Audit PT Djakarta Lloyd (Persero) dan melakukan pergantian Anggota Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 004/KEP/DEKOM/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Djakarta Lloyd (Persero). Dengan demikian, susunan keanggotaan Komite Audit sebagai berikut:

1. Lambonar O. Silitonga (Ketua Komite Audit)
2. Helmi (Anggota Komite Audit)
3. Suwandhi Sasmita (Anggota Komite Audit)

### PIAGAM KOMITE AUDIT

Perusahaan wajib memiliki Piagam Komite Audit yang memuat hal-hal mengenai:

1. Tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya, yang terdiri atas:
  - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya yang terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.
  - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
  - c. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikan.
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.

1. Syahril Japarin (Audit Committee Chairman)
2. Heru Sakti Wibowo (Audit Committee Member)

Given the tenure of Mr. Syahril Japarin as Independent Commissioner of PT Djakarta Lloyd (Persero) ended, the replacement of Audit Committee Chairman was made under the issuance of the Board of Commissioners Decree No. 003/KEP/DEKOM/VII/2019 dated July 4, 2019 regarding the Appointment of the Chairman of Audit Committee of PT Djakarta Lloyd (Persero) and changed the Audit Committee Members based on Board of Commissioners Decree Number 004/KEP/DEKOM/VIII/2019 dated August 15, 2019 concerning Dismissal and Appointment of Audit Committee Members of PT Djakarta Lloyd (Persero). Accordingly, the composition of Audit Committee members is as follows:

1. Lambonar O. Silitonga (Audit Committee Chairman)
2. Helmi (Audit Committee Member)
3. Suwandhi Sasmita (Audit Committee Member)

### AUDIT COMMITTEE CHARTER

The Company is obliged to own an Audit Committee Charter which at the very least includes:

1. Duties and responsibilities in carrying out its functions, which are as follows:
  - a. Review financial informations that will be issued by the Company to the public and/ or the authorities, including statements of financial, projection, and other statements related to the Company's financial.
  - b. Review compliance with laws and regulations relating to the Company's activities.
  - c. Providing independent opinions in the event of disagreements between the management and the Accountant for the services they provide.
  - d. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an accountant based on independence, scope of assignment, and fees.

## ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

### Supporting Organs of the Board of Commissioners

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.</li><li>f. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris</li><li>g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.</li><li>h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.</li><li>i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan</li><li>3. Tata cara dan prosedur kerja</li><li>4. Kebijakan penyelenggaraan rapat</li><li>5. Sistem pelaporan kegiatan</li><li>6. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan</li><li>7. Masa tugas Komite Audit</li></ol> | <ul style="list-style-type: none"><li>e. Review the audit implementation performed by the internal auditors and supervising the implementation of the Directors follow-up actions on internal auditors' findings.</li><li>f. Review risk management implementation performed by the Directors, if the Company has function of risk oversight under the Board of Commissioners.</li><li>g. Review complaints relating to the Company's accounting process and financial reporting.</li><li>h. Review and provide suggestions to the Board of Commissioners regarding Company's potential conflict of interest.</li><li>i. Maintain the confidentiality of Company's documents, data, and information.</li></ul> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Membership composition, structure, and requirements</li><li>3. Work procedure and etiquette</li><li>4. Policy for conducting meetings</li><li>5. Activity reporting system</li><li>6. Provisions regarding complaints handling or complaints reporting relating to suspected violations in financial reporting</li><li>7. Audit Committee's term of office</li></ol> |
|---|--|

**PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT**

**AUDIT COMMITTEE MEMBERS' PROFILE**



**HELMI**

Anggota Komite Audit  
Audit Committee Member

**Kewarganegaraan Citizenship**

Indonesia Indonesian

**Umur Age**

69 tahun years old

**Domisili Residency**

Kabupaten Tangerang, Banten  
Tangerang Regency, Banten

<b>Pendidikan Education</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diploma IV, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1988-1991)</li> <li>Diploma III, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1980-1983)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diploma IV, State College of Accountancy (1988-1991)</li> <li>Diploma III, State College of Accountancy (1980-1983)</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan Work Experience</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anggota Komite Audit Djakarta Lloyd (2019)</li> <li>Deputi Perekonomian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1995-2019)</li> <li>Deputi Akuntabilitas, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (1991-1995)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Djakarta Lloyd's Audit Committee Member (2019)</li> <li>Deputy for Economy, Financial and Development Supervisory Agency (1995-2019)</li> <li>Deputy for Accountability, Financial and Development Supervisory Agency (1991-1995)</li> </ul>



**SUWANDHI SASMITA**

Anggota Komite Audit  
Audit Committee Member

**Kewarganegaraan Citizenship**

Indonesia Indonesian

**Umur Age**

69 tahun years old

**Domisili Residency**

Depok, Jawa Barat  
Depok, West Java

<b>Pendidikan Education</b>	Sarjana Ekonomi, Jakarta	Bachelor of Economics, Jakarta
<b>Riwayat Pekerjaan Work Experience</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anggota Komite Audit Djakarta Lloyd (2019)</li> <li>Direktur PT Andalas Sarana Abadi (2019)</li> <li>Tenaga Ahli Keuangan/Pengendali Teknis Inspektorat, Badan Koordinasi Penanaman Modal (2008-2018)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Djakarta Lloyd's Audit Committee Member (2019)</li> <li>Director of PT Andalas Sarana Abadi (2019)</li> <li>Financial Expert/Technical Controller of Inspectorate, Investment Coordinating Board (2008-2018)</li> </ul>

# ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

## Supporting Organs of the Board of Commissioners

### INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

### INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

Aspek Independensi Independence Aspect	Helmi	Suwandhi Sasmita
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Having no financial relationship with the Board of Commissioners and the Board of Directors	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi Having no management relationship in the Company, subsidiaries, or affiliated companies	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Having no ownership relationship in the Company	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit Having no family relationship with the Board of Commissioners, the Board of Directors, and/or any other member of the Audit Committee	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat, dan pemerintah Not serving as a political party administrator, official, and government	✓	✓

### LAPORAN KEGIATAN KOMITE AUDIT

### AUDIT COMMITTEE ACTIVITIES REPORT

No.	Waktu Date	Perihal Subject	Hal-hal yang Perlu Ditindaklanjuti Matters Need to Be Followed Up
1	Juni 2019 June 2019	Telaahan Dewan Komisaris atas Kinerja Perusahaan sampai dengan Mei 2019 dan Laporan Hasil Audit Auditor Eksternal Tahun Buku 2017-2018 The Board of Commissioners' Review on the Company's Performance up to May 2019 and Audit Report of External Auditor for Fiscal Year 2017-2018	<p><b>1. Masalah dalam Laporan Keuangan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Manajemen diharapkan mencantumkan pos "Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya" dan pos "Bagian Lancar Utang PKPU" pada Laporan Manajemen dan Keuangan Triwulan I 2019.</li> <li>Manajemen diharapkan segera melaksanakan penyusunan kebijakan <i>inventory</i> Perusahaan, terkait administrasi pergudangan di kapal.</li> <li>Manajemen diharapkan segera melaksanakan inventarisasi kontainer dan pemanfaatan kontainer.</li> </ol> <p><b>1. Issues in the Financial Statements</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>The management is expected to include the post "Cash and Cash Equivalents with the Use Restriction" and the post "PKPU Current Debt Portion" in the Management and Financial Statements of Q1 2019.</li> <li>The management is expected to immediately prepare the Company's inventory policy, related to the administration of warehousing on the ship.</li> <li>The management is expected to immediately conduct the inventory of containers and container utilization.</li> </ol>



No.	Waktu Date	Perihal Subject	Hal-hal yang Perlu Ditindaklanjuti Matters Need to Be Followed Up
1	Juni 2019 June 2019	<p>Telaahan Dewan Komisaris atas Kinerja Perusahaan sampai dengan Mei 2019 dan Laporan Hasil Audit Auditor Eksternal Tahun Buku 2017-2018</p> <p>The Board of Commissioners' Review on the Company's Performance up to May 2019 and Audit Report of External Auditor for Fiscal Year 2017-2018</p>	<p><b>2. Masalah Kinerja berdasarkan Key Performance Indicator (KPI)</b> Berdasarkan simpulan Laporan Akuntan Independen Key Performance, diketahui capaian KPI PT DL adalah 78,19 yang diukur menggunakan data tahun 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pada 2018, tidak dilakukan survei untuk mengukur Indeks Kepuasan Pelanggan, Indeks Kepuasan Pegawai, Capaian Good Corporate Government, dan Capaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul.</li> <li>b. Hendaknya dalam tahun 2019, Manajemen melaksanakan survei-survei di atas agar capaian KPI 2019 dapat menjadi pedoman yang dapat dipercaya untuk <i>self-improvement</i>.</li> </ul> <p><b>2. Issues in the performance based on Key Performance Indicator (KPI)</b> Based on the conclusion of the Independent Accountant Report on KPI, it is known that the achievement of PT DL's KPI is 78.19, measured using the 2017 data.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. In 2018, no survey was conducted to measure the Customer Satisfaction Index, Employee Satisfaction Index, Good Corporate Government Achievements, and Criteria for Excellence Performance Assessment Achievements.</li> <li>b. In 2019, the management should hold such surveys mentioned above so that the achievements of the 2019 KPI can become a reliable guideline for self-improvement.</li> </ul> <hr/> <p><b>3. Masalah dalam Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak teridentifikasi masalah oleh Auditor Eksternal.</li> <li>b. Diharapkan penegasan tertulis dari SPI terkait Kegiatan SPI untuk meningkatkan Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan yang telah dilakukan dan akan dilakukan.</li> </ul> <p><b>3. Issues in Internal Control and Compliance with Regulations</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. No problems identified by the External Auditor.</li> <li>b. SPI is expected to issue written confirmation regarding SPI's activities that have been and will be carried out to improve Internal Control and Compliance with Regulations.</li> </ul> <hr/> <p><b>4. Masalah Kesehatan Perusahaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak teridentifikasi masalah oleh Auditor Eksternal.</li> <li>b. Diharapkan penegasan tertulis dari SPI terkait Kegiatan SPI untuk meningkatkan Pengendalian Intern dan Kepatuhan pada Peraturan yang telah dilakukan dan akan dilakukan.</li> </ul> <p><b>4. Issues in the Company's Soundness</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. No problems identified by the External Auditor.</li> <li>b. SPI is expected to issue written confirmation regarding SPI's activities that have been and will be carried out to improve Company's Soundness.</li> </ul>

# ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

## Supporting Organs of the Board of Commissioners

No.	Waktu Date	Perihal Subject	Hal-hal yang Perlu Ditindaklanjuti Matters Need to Be Followed Up
2	Juli 2019 July 2019	Surat Direksi Nomor A.011.1/TU.805.01/DIRUT/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 perihal Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PT Djakarta Lloyd (Persero) The Board of Directors Letter Number A.011.1/TU.805.01/DIRUT/VII/2019 dated July 24, 2019 regarding Changes in Work Plan and Budget of PT Djakarta Lloyd (Persero)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris menyetujui usulan Direktur Utama kepada Menteri BUMN untuk melakukan revisi RKAP 2019 PT Djakarta Lloyd (Persero). Persetujuan Komisaris diberikan dengan pertimbangan adanya penurunan harga komoditas yang berdampak pada berkurangnya muatan produksi dan adanya perubahan kebijakan dari PT PLN (Persero). Keduanya dapat berpengaruh terhadap capaian pendapatan dan laba. Selain itu, adanya komitmen Direksi untuk meningkatkan efisiensi dengan menekan Beban Pokok Pendapatan dan Laba Usaha.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Board of Commissioners approved the President Director's proposal to the Minister of SOEs to revise PT Djakarta Lloyd (Persero) 2019 RKAP. The Board of Commissioners' approval was given with consideration of the decline in commodity prices which resulted in reduced production loads and a change in policy from PT PLN (Persero). Both can affect the achievement of revenue and profit. In addition, the Board of Directors is committed to improve the efficiency by reducing the Cost of Revenue and Operating Income.</li> </ol> </li> <li>2. Guna memberi masukan dalam proses pembahasan persetujuan Menteri BUMN, Komite Audit menyampaikan tanggapan dan saran sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rekomendasi sebagaimana butir 1 tersebut di atas diberikan dengan pertimbangan agar RKAP PT Djakarta Lloyd (Persero) Tahun 2019 menjadi lebih realistis, sehingga dapat digunakan sebagai alat <i>monitoring</i> dan evaluasi yang baik.</li> <li>b. Direksi agar mengupayakan penambahan alat produksi dan melakukan penambahan kontrak dan ekstensifikasi kontrak yang <i>existing</i> guna meningkatkan volume produksi dan pendapatan Perusahaan.</li> <li>c. Direksi agar menekan beban usaha untuk mempertahankan <i>operating margin</i> tetap 14 persen guna memberi sinyal kuat kepada pemegang saham, investor, dan kreditor bahwa Perusahaan tetap menjaga efisiensi usaha</li> <li>d. Mengingat jangka waktu periode perubahan revisi RKAP Tahun 2019 sudah memasuki triwulan III 2019, Direksi agar dapat melakukan <i>time planning</i> yang baik sehingga target yang disusun dapat tercapai dengan optimal.</li> </ol> </li> <li>2. To provide input in the discussion on the Minister of SOEs' approval, the Audit Committee submits the following responses and suggestions:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. The recommendations as referred to in item 1 above are given with consideration that the 2019 PT Djakarta Lloyd (Persero) RKAP to be more realistic, so that it can be used as a good monitoring and evaluation tool.</li> <li>b. The Board of Directors shall seek to increase production equipment and add contracts and extending existing contracts to increase the Company's production volume and revenue.</li> <li>c. The Board of Directors shall reduce operating expenses to maintain a fixed operating margin of 14 percent to provide strong signals to shareholders, investors and creditors that the Company continues to maintain business efficiency.</li> <li>d. Considering the time period for the revision of the 2019 RKAP has entered the third quarter of 2019, the Board of Directors should be able to prepare a good time planning so that the targets set can be achieved optimally.</li> </ol> </li> </ol>

No.	Waktu Date	Perihal Subject	Hal-hal yang Perlu Ditindaklanjuti Matters Need to Be Followed Up
3	September 2019 September 2019	Pendapat dan Masukan Komite Audit tentang Permintaan Tanggapan Tertulis dari Direksi kepada Dewan Komisaris atas Rencana Penerbitan Medium Term Notes (MTN) Opinion and Input of the Audit Committee on the Request for Written Response from the Board of Directors to the Board of Commissioners about the Plan to Issue Medium Term Notes (MTN)	<p><b>Komite Audit berpendapat:</b> <b>The Audit Committee opines:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya untuk mendapatkan dana melalui MTN harus melalui proses dan prosedur yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku, dengan memprioritaskan sinergi BUMN.</li> <li>1. The efforts to get funds from MTN issuance must go through the processes and procedures in accordance with applicable laws and regulations, prioritizing the synergy of SOEs.</li> </ol> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Permohonan Tanggapan Tertulis oleh Direksi kepada Dewan Komisaris masih harus dilengkapi dokumen berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Resmi yang menyatakan telah diperolehnya Rating AA+ (Double A Plus) Pefindo.</li> <li>b. <i>Cash Flow</i> Proyeksi 2019-2023 (spesifik LTTC dan MTN)                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Cash Inflow</i> Seluruh Revenue dari kontrak (LTTC) dengan Pertamina.</li> <li>ii. <i>Cash Outflow</i> Seluruh <i>Expenditure</i> untuk MTN untuk memprediksi ketepatan realisasi Target Emisi.</li> </ol> </li> <li>c. Perjanjian Perikatan dan atau Nota Kesepahaman yang memuat Hak dan Tanggung Jawab PT Djakarta Lloyd dengan:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Askrindo sebagai <i>Credit Guarantor</i></li> <li>ii. Bahana Securities sebagai <i>General Arranger</i></li> <li>iii. PT KSEI sebagai Agen Pembayaran</li> <li>iv. PT TASPEN sebagai Investor Potensial Utama (100%)</li> </ol> </li> <li>d. Kajian Komprehensif yang menilai kelayakan indikator-indikator dalam Struktur MTN (antara lain Tenor, Rate Coupon, Risiko Legal &amp; Finansial, Investor Potensial)</li> </ol> </li> <li>2. Request for Written Response by the Board of Directors to the Board of Commissioners must still be accompanied by the following documents:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Official Document stating that Pefindo's AA+ (Double A Plus) Rating has been obtained.</li> <li>b. Cash Flow Projection of 2019-2023 (specifically LTTC and MTN)                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Cash Inflow All Revenue from the contract (LTTC) with Pertamina.</li> <li>ii. Cash Outflow All Expenditure for MTN to predict the accuracy of realization of the Issuance Target.</li> </ol> </li> <li>c. Agreement and MoU which contains the Rights and Responsibilities of PT Djakarta Lloyd with:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Askrindo, as Guarantor</li> <li>ii. Bahana Securities as General Arranger</li> <li>iii. PT KSEI as Payment Agent</li> <li>iv. PT TASPEN as a Major Potential Investor (100%)</li> </ol> </li> <li>d. Comprehensive Study that assesses the feasibility of the indicators in the MTN Structure (including Tenor, Rate Coupon, Legal &amp; Financial Risks, Potential Investors)</li> </ol> </li> </ol>

# ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

## Supporting Organs of the Board of Commissioners

No.	Waktu Date	Perihal Subject	Hal-hal yang Perlu Ditindaklanjuti Matters Need to Be Followed Up
3	September 2019 September 2019	Pendapat dan Masukan Komite Audit tentang Permintaan Tanggapan Tertulis dari Direksi kepada Dewan Komisaris atas Rencana Penerbitan Medium Term Notes (MTN)  Opinion and Input of the Audit Committee on the Request for Written Response from the Board of Directors to the Board of Commissioners about the Plan to Issue Medium Term Notes (MTN)	<p>3. Dewan Komisaris belum bisa memberi pertimbangan untuk memberi Tanggapan Tertulis, sepanjang Dokumen-dokumen diatas belum diterima Dewan Komisaris dan belum ditelaah Komite Audit.</p> <p>Persetujuan dan atau jawaban atas Permohonan Tanggapan Tertulis dapat diberikan Dewan Komisaris setelah dilakukan rapat lengkap yang melibatkan organ di bawah Dewan Komisaris, serta membahas pertimbangan Komisaris, Sekdekom, dan Komite Audit. Proses pertimbangan akan meliputi dan tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi dari penjelasan langsung Direksi kepada Dewan Komisaris.</li> <li>Telaahan, <i>review</i>, evaluasi atas informasi terkait oleh organ di bawah Dewan Komisaris.</li> </ol> <p>3. As long as the above documents have not been received by the Board of Commissioners and have not been reviewed by the Audit Committee, the Board of Commissioners cannot consider to give the Written Response.</p> <p>Approval and or response to the Written Response Request can be given by the Board of Commissioners after a full meeting involving organs under the Board of Commissioners, and discussing the considerations of the Commissioner, the Secretary, and the Audit Committee. The consideration process will include but is not limited to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Information from the Board of Directors' explanation directly to the Board of Commissioners.</li> <li>Study, review, and evaluation of related information by the organ under the Board of Commissioners.</li> </ol>
4	September 2019	Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi  Minutes of Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors	<p><b>Arahan Dewan Komisaris</b> <b>The Board of Commissioners' Directive</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Direksi agar menyelesaikan aset serta fokus pada aset yang berada di Cipinang, Cimpedak, dan Medan.</li> <li>The Board of Directors shall complete the assets and focus on the assets located in Cipinang, Cimpedak, and Medan.</li> </ol> <hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris dapat menyetujui rencana penerbitan MTN jika administrasi yang disampaikan lengkap, yakni:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Kajian dari PT Bahana Securities selaku <i>arranger</i>.</li> <li>Hasil <i>rating</i> dari Pefindo yang telah disesuaikan dengan <i>guarantor</i> MTN, yakni PT Askrindo.</li> <li>Persetujuan diberikan dengan catatan mendapatkan persetujuan dari RUPS.</li> </ol> </li> <li>The Board of Commissioners can approve the MTN issuance plan if the administrative requirements submitted are complete, namely:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Study from PT Bahana Securities as <i>arranger</i>.</li> <li>The rating by Pefindo has been adjusted to MTN guarantor PT Askrindo.</li> <li>Approval is given with a condition of getting approval from the GMS.</li> </ol> </li> </ol>

No.	Waktu Date	Perihal Subject	Hal-hal yang Perlu Ditindaklanjuti Matters Need to Be Followed Up
5	Oktober 2019 October 2019	Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi Minutes of Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors	<p><b>Arahan Dewan Komisaris dan Komite Audit</b> <b>Directives from the Board of Commissioners and Audit Committee</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dewan Komisaris mengajukan permintaan <i>list</i> aset Perseroan. 1. The Board of Commissioners submits a request for the Company's assets list</li> <hr/> <li>2. Dewan Komisaris menyarankan agar Manajemen PT Djakarta Lloyd (Persero) meninjau kembali proses pengadaan KAP 2019. 2. The Board of Commissioners recommends that the Management of PT Djakarta Lloyd (Persero) reviews the 2019 KAP procurement process.</li> <hr/> <li>3. Dewan Komisaris menyetujui perubahan struktur organisasi berupa penggabungan Divisi Operasional dengan Chartering, sehingga pada intinya Sumber Daya Manusia akan di-<i>split</i>. 3. The Board of Commissioners approves changes in the organizational structure in the form of merging the Operational Division with Chartering, so that in essence Human Resources will be split.</li> <hr/> <li>4. Dewan Komisaris menyetujui pembelian aset gedung kantor tahun 2020. 4. The Board of Commissioners approves the purchase of office building assets in 2020.</li> <hr/> <li>5. Dewan Komisaris menyarankan agar progres MTN segera ditindaklanjuti. 5. The Board of Commissioners recommends that MTN progress can be followed up immediately</li> <hr/> <li>6. Komite Audit memberi masukan tentang RJPP antara lain:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konsistensi narasi dan Gambar Tonggak Sejarah Kinerja Perseroan</li> <li>b. Rencana perluasan layanan bidang properti tidak disetarakan dengan industri layanan sektor transportasi</li> <li>c. Seharusnya dalam restrukturisasi keuangan juga dimasukkan narasi pertimbangan masih perlunya diterbitkan MTN</li> <li>d. Konsistensi Narasi dan Tabel Kinerja Operasi</li> <li>e. Sasaran Kuantitatif dalam RJPP 2019-2024</li> <li>f. Penyusunan memerhatikan pedoman penyusunan RJPP</li> </ol>                         Penyiapan/pemberkasan dokumentasi penyusunan RJPP yang dapat menunjukkan keterlibatan seluruh lapisan manajemen.                     </li> <hr/> <li>6. The Audit Committee provides input on Corporate Long-Term Plan (RJPP), including:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. The consistency between the narratives and the pictures of the Company's Major Historic Performances</li> <li>b. The plan to expand the services in the property sector is not equalized to those in the transportation services sector.</li> <li>c. During the financial restructuring, the narrative of the consideration that MTN is still needed should also be included.</li> <li>d. The consistency between the Narrative and the Operational Performance Table</li> <li>e. Quantitative Targets in RJPP 2019-2024</li> <li>f. The RJPP is prepared by noticing its guidelines</li> </ol>                         The RJPP documentation shall be prepared/filed in a way that it can show the involvement of all layers of management in its preparation.                     </li> </ol>

# ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

## Supporting Organs of the Board of Commissioners

No.	Waktu Date	Perihal Subject	Hal-hal yang Perlu Ditindaklanjuti Matters Need to Be Followed Up
6	November 2019	<p>Telaahan atas Surat Direksi Nomor A.001/TU-805-01/Dir-Keu/XI/2019 tanggal 06 November 2019 Perihal Tanggapan Direksi PT Djakarta Lloyd (Persero) atas Rapat Gabungan tanggal 06 November 2019</p> <p>Review on the Board of Directors' Letter Number A.001/TU-805-01/Dir-Keu/XI/2019 dated November 6, 2019 Regarding the Response of the Board of Directors of PT Djakarta Lloyd (Persero) over the Joint Meeting on November 6, 2019</p>	<p>1. Secara umum, Komite Audit berpendapat surat tanggapan Direksi telah cukup menjawab permintaan penjelasan dari Dewan Komisaris.</p> <p>1. In general, the Audit Committee opines that the Board of Directors' response letter has been sufficient to answer the request for clarification from the Board of Commissioners.</p> <p>2. Masih perlu ditambahkan penjelasan tertulis terkait:</p> <p>a. Penjelasan lisan dalam rapat gabungan tanggal 6 November 2019 oleh Direktur Utama dalam menjawab pertanyaan Dewan Komisaris poin B.2: Dewan Komisaris meminta manajemen memperbaiki kinerja dengan melakukan usaha ekstra keras, karena dalam <i>expose</i> pada Rapat Gabungan 16 Oktober 2019 dan dalam <i>executive summary</i> Laporan Manajemen dan Keuangan Triwulan III 2019 belum terdapat rencana tindakan nyata untuk menaikkan pendapatan 2019. Sebaliknya, dalam <i>executive summary</i> tersebut manajemen mengandalkan keberhasilan rencana restrukturisasi. Direktur Utama menjawab lisan bahwa "Kepastian tinggi mencapai <i>Top Line</i> dari Valuasi Aset, meski dengan menanggung beban pajak".</p> <p>b. Penjelasan lisan dalam Rapat Gabungan tanggal 6 November 2019 oleh Direktur Finance, HCM &amp; GA dalam menjawab pertanyaan Dewan Komisaris poin B.3: Dewan Komisaris meminta Manajemen memperbaiki kinerja dengan mengoptimalkan SPI dalam melanjutkan upaya-upaya menekan Beban Usaha dan Beban Keuangan dalam triwulan IV 2019, untuk lebih memastikan Laba Berjalan tahun 2019 masih tetap lebih besar dibanding 2018. Direktur Keuangan menjawab lisan bahwa "Adanya pergeseran pihak kontrak dari Perusahaan induk ke Perusahaan Anak".</p> <p>c. Kesiapan Manajemen melaksanakan arahan Dewan Komisaris dalam Poin C terkait hal-hal strategis lainnya.</p> <p>2. It still needs to add a written explanation related to:</p> <p>a. Verbal statement in the joint meeting on November 6, 2019 by the President Director in answering the Board of Commissioners' question point B.2: The Board of Commissioners asked the management to improve performance by making extra hard efforts, because it was revealed at the Joint Meeting on October 16, 2019 and in the executive summary of Management and Finance Report for Quarter III 2019 there was no real action plan to increase the revenue in 2019. Instead, the executive summary showed that the management relied on the success of restructuring plan. The President Director answered verbally that "High certainty reaches the Top Line of the Asset Valuation, even though it bears the tax burden".</p> <p>b. Verbal explanation in the Joint Meeting on November 6, 2019 by the Director of Finance, HCM &amp; GA in answering the Board of Commissioners' question point B.3: The Board of Commissioners asked the management to improve performance by optimizing SPI in continuing efforts to reduce Operating Expenses and Financial Expenses in the quarter IV of 2019, to further ensure that the Current Profit in 2019 would still be bigger than 2018. The Director of Finance answered verbally that "There was a shift in the contracting party from the parent company to subsidiary".</p> <p>c. The management's readiness to implement the Board of Commissioners directives in Point C related to other strategic matters.</p>



**SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris dapat mengangkat seorang Sekretaris atas beban Perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Adapun tugas pokok dan fungsi kesekretariatannya mencakup hal-hal berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatannya di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan rapat/pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya.
3. Menyediakan data/informasi yang diperlukan oleh Dewan Komisaris dan Komite-Komite di lingkungan Dewan Komisaris.
4. Merencanakan bersama Sekretaris Perusahaan mengenai teknis program pengenalan dan pelatihan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat.
5. Mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk Dewan Komisaris serta dokumen lainnya.

Dewan Komisaris telah mengangkat Sdri. Gempita Pratiwi sebagai Sekretaris Dewan Komisaris sejak tanggal 2 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Djakarta Lloyd (Persero) Nomor 002/KEP/DEKOM/VII/2018.

**BOARD OF COMMISSIONERS' SECRETARY**

The Board of Commissioners may appoint a Secretary at the expense of the Company to assist in carrying out its duties. The main secretarial tasks and functions include the following:

1. Organizing secretarial administrative activities within the Board of Commissioners.
2. Organizing the Board of Commissioners internal meetings and joint meetings with the Board of Directors and other meetings with related parties.
3. Providing data/information needed by the Board of Commissioners and the Committees in its environment.
4. Making plans together with the Corporate Secretary about the technical introduction and training programs for newly appointed members of the Board of Commissioners.
5. Administer the outgoing and incoming letters of the Board of Commissioners and other documents.

The Board of Commissioners has appointed Ms. Gempita Pratiwi as the Secretary of the Board of Commissioners since July 2, 2018 based on the Board of Commissioners Decree of PT Djakarta Lloyd (Persero) Number 002/KEP/DEKOM/VII/2018.

**KOMITE LAIN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS**

## Other Committees Under the Board of Commissioners

Hingga akhir tahun buku 2019, Perusahaan tidak membentuk komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris, termasuk Komite Nominasi dan Komite Remunerasi. Dengan demikian, tidak ada informasi terkait komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris, termasuk fungsi nominasi dan remunerasi.

Until the end of the 2019 fiscal year, the Company did not form other committees under the Board of Commissioners, including the Nomination Committee and Remuneration Committee. Therefore, there is no information available related to other committees under the Board of Commissioners, including nomination and remuneration functions.

## SEKRETARIS PERUSAHAAN Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan berperan penting sebagai penghubung antara pemangku kepentingan dan organ utama Perusahaan, sekaligus bertindak menjadi koordinator atas kepatuhan di bidang hukum, administrator aset dan dokumen penting Perusahaan, serta narahubung komunikasi internal dan eksternal yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Secara struktural, Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direksi, sehingga bertanggung jawab langsung kepada Direksi. Pengangkatan dan pemberhentiannya pun berada di tangan Direksi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretaris Perusahaan memiliki dua divisi, yakni Bagian Tata Usaha dan Hubungan Masyarakat (Humas); serta Bagian Hukum dan Aset.

Corporate Secretary has an important role as a liaison between the stakeholders and the main organs of the Company, as well as acting as a coordinator of compliance with the laws, an administrator of important assets and documents of the Company, and liaison with internal and external communications related to the Company's business activities.

Structurally, the Corporate Secretary is under the Board of Directors, so that he/she reports directly to the Board of Directors. The appointment and dismissal are in the hands of the Board of Directors. In performing the duties and functions, the Corporate Secretary has two divisions, namely Administration and Public Relations (PR) Division; and Legal and Asset Division.

### Tugas Pokok Main Duties

- 1 Menjadi narahubung antara Perseroan, Pemegang Saham, dan masyarakat, serta mengelola komunikasi eksternal dan internal Perusahaan.
  - 2 Menyelenggarakan administrasi dokumen Perseroan.
  - 3 Membuat, memelihara, dan menyimpan daftar Pemegang Saham dan daftar khusus.
  - 4 Melaksanakan hubungan antarlembaga.
  - 5 Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum korporasi.
  - 6 Menjamin ketersediaan informasi kepada pemangku kepentingan.
  - 7 Mendukung pencapaian kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction Index/CSI).
  - 8 Bersama-sama fungsi Human Capital, memfasilitasi dan memonitor terselenggaranya program peningkatan pengetahuan Direksi yang telah ditetapkan.
  - 9 Menyelenggarakan program pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris baru atau anggota Direksi baru.
  - 10 Menyimpan daftar kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarganya.
- 1 Act as a liaison or contact person between the Company, Shareholders, and society, and manage corporate communication with external and internal parties.
  - 2 Organize the Company's administration documents.
  - 3 Create, maintain, and storing Shareholders list and specific list.
  - 4 Conduct relations between institutions.
  - 5 Resolve problems related to corporate law.
  - 6 Confirming the information availability to stakeholders.
  - 7 Support the achievement of customer satisfaction (Customer Satisfaction Index/CSI).
  - 8 Together with Human Capital function, facilitate and monitor the implementation of the set programs to increase knowledge for the Board of Directors.
  - 9 Organize introduction programs for new members of the Board of Commissioners or new members of the Board of Directors.
  - 10 Keeping list of share ownership by members of the Board of Commissioners and the Board of Directors and their families.

<p><b>Tanggung Jawab Responsibilities</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Sebagai narahubung antara Perseroan, Pemegang Saham, dan masyarakat.</li> <li>2 Memastikan tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).</li> <li>3 Mendistribusikan informasi untuk mendukung tercapainya kontrak manajemen.</li> <li>4 Memastikan peran sebagai <i>people manager</i> pada unit kerjanya.</li> <li>5 Memastikan kegiatan unit kerjanya berjalan sesuai dengan RKAP yang telah ditetapkan.</li> <li>6 Memastikan pelaksanaan kegiatan unit kerjanya sesuai dan relevan dengan sistem manajemen yang diterapkan Perusahaan.</li> <li>7 Memastikan Perusahaan menerapkan dan mengelola prinsip-prinsip GCG dengan baik.</li> <li>8 Memastikan terselenggaranya kegiatan yang mendukung citra Perusahaan semakin baik.</li> <li>9 Memastikan sosialisasi terhadap kebijakan dan strategi Perusahaan kepada internal.</li> <li>10 Memastikan permasalahan perusahaan yang berhubungan dengan hukum diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Act as a contact person between the company, Shareholders, and the society.</li> <li>2 Confirming the availability of the Company Work and Budget Plan (RKAP).</li> <li>3 Distribute information to support the achievement of management contracts.</li> <li>4 Ensuring the people manager's role in their respective work unit.</li> <li>5 Ensuring the activities of work units are carried out following the established RKAP.</li> <li>6 Ensuring work unit activities implementations are in line and relevant to the management system applied by the company.</li> <li>7 Ensuring the Company implements and manages the GCG principles properly.</li> <li>8 Ensuring the implementation of activities that support better image of the Company.</li> <li>9 Ensuring socialization of Company policies and strategies to the company's internal.</li> <li>10 Ensuring corporate problems related to the law are settled in accordance with the prevailing regulations.</li> </ol>
<p><b>Kewenangan Authorities</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan kewajiban penyampaian keterbukaan informasi Perusahaan kepada publik.</li> <li>2 Mendapatkan akses data yang dibutuhkan.</li> <li>3 Menetapkan rencana program kerja dan inisiatif baru serta anggaran di ruang lingkup unit kerjanya yang dapat mendukung pencapaian kinerja Perusahaan.</li> <li>4 Menetapkan kebijakan/pedoman operasional di ruang lingkup unit kerjanya.</li> <li>5 Mengambil keputusan dan langkah-langkah korektif di ruang lingkup unit kerjanya berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berlaku.</li> <li>6 Menyetujui Distinct Job Profile (DJP) di ruang lingkup unit kerjanya.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Have access to material and relevant informations relating to the obligation in delivering the Company's information openness to the public.</li> <li>2 Have access to the data needed.</li> <li>3 Establish new work program plan and initiatives as well as budgets of their scope of work units that can support the Company's performance achievements.</li> <li>4 Establish operational policies/guidelines within the scope of work unit.</li> <li>5 Make decisions and corrective steps within the scope of work units based on the applicable policies and procedures.</li> <li>6 Approve the Distinct Job Profile (DJP) of the scope of work units.</li> </ol>

## SEKRETARIS PERUSAHAAN

### Corporate Secretary

<b>Kewenangan Authorities</b>	<p>7 Menyetujui usulan perencanaan dan pengembangan SDM di unit kerjanya.</p> <p>8 Menyetujui pengenaan sanksi kepada personel di unit kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.</p> <p>9 Menyetujui pelaksanaan rencana kerja di ruang lingkup unit kerjanya</p> <p>10 Menetapkan dan/atau menandatangani dokumen sistem manajemen yang menjadi ruang lingkup unit kerjanya.</p> <p>11 Melakukan <i>monitoring</i> pelaksanaan GCG dan tindak lanjut.</p> <p>12 Menetapkan kebijakan dan strategi pencitraan Perusahaan.</p> <p>13 Menentukan metode dalam menjalin hubungan baik (melalui <i>visit</i>, <i>gathering</i>, dan lain-lain) dengan pihak eksternal dan media serta mendapatkan akses terhadap data yang dapat disampaikan kepada pihak eksternal.</p> <p>7 Approve the planning proposal and human resources development in the work unit.</p> <p>8 Approve the imposed sanctions to personnel in the work unit in accordance with the applicable provisions in the Company.</p> <p>9 Approve the work plan implementation in the work unit.</p> <p>10 Establish and/or sign management system document that are the scope of the work unit.</p> <p>11 Monitor and follow up on GCG implementation.</p> <p>12 Establish the Company's image policies and strategies.</p> <p>13 Determine methods in establishing good relationships (visit, gathering, etc.) with external parties and the media, as well as obtain data access to be delivered to external parties.</p>
-------------------------------	--

### PROFIL PEJABAT SEKRETARIS PERUSAHAAN

### CORPORATE SECRETARY PROFILE



#### SETIA BUDIMAN

Sekretaris Perusahaan  
Corporate Secretary

#### Kewarganegaraan Citizenship

Indonesia Indonesian

#### Umur Age

44 tahun years old

#### Domisili Residency

DKI Jakarta

<b>Pendidikan Education</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarjana Administrasi Niaga, Universitas Jakarta (1999)</li> <li>Magister Ekonomi, Universitas Brawijaya (2019)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bachelor of Business Administration, University of Jakarta (1999)</li> <li>Master of Economics, Brawijaya University (2019)</li> </ul>
<b>Riwayat Pekerjaan Work Experience</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekretaris Perusahaan Djakarta Lloyd (2015-Saat ini)</li> <li>Manager SDM Djakarta Lloyd (2014-2015)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corporate Secretary of Djakarta Lloyd (2015-Present)</li> <li>HR Manager of Djakarta Lloyd (2014-2015)</li> </ul>
<b>Dasar Penunjukan Basis of Appointment</b>	Surat Keputusan Direktur Utama Nomor 095E/SK/DIRUT/IV/2015	President Director Decree Number 095E/SK/DIRUT/IV/2015

**LAPORAN KEGIATAN SEKRETARIS  
PERUSAHAAN 2019**

**CORPORATE SECRETARY ACTIVITIES REPORT IN  
2019**

<p><b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Perusahaan</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalan Direksi Finance, HCM &amp; GA</li> <li>• Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Semester I Tahun 2019</li> <li>• Penerimaan kunjungan pihak eksternal</li> <li>• Pelaksanaan acara syukuran HUT PT Djakarta Lloyd (Persero)</li> <li>• Pengelolaan email Corporate Secretary</li> <li>• Pengelolaan media sosial Perusahaan</li> <li>• Publikasi informasi secara berkelanjutan melalui situs web Perusahaan</li> <li>• <i>Sponsorship</i> kegiatan masyarakat sekitar</li> <li>• Partisipasi dalam kegiatan CSR</li> <li>• Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik</li> </ul>	<p><b>Activities in Corporate Information and Communication Management</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduction of the Director of Finance, HCM &amp; GA</li> <li>• Implementation of the National Work Meeting for First Semester of 2019</li> <li>• Welcoming the visits of external parties</li> <li>• Organizing the PT Djakarta Lloyd (Persero)'s anniversary celebration event</li> <li>• Corporate Secretary email management</li> <li>• Company's social media management</li> <li>• Publication of information on an ongoing basis through the Company's website</li> <li>• Sponsored activities for the communities in surrounding area</li> <li>• Participate in CSR activities</li> <li>• Dissemination of Public Information Disclosure</li> </ul>
<p><b>Kegiatan Penerapan GCG</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi penerapan GCG PT Djakarta Lloyd (Persero)</li> <li>• Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh pejabat struktural satu tingkat di bawah Direksi dan pejabat setingkat Senior Manager di perusahaan afiliasi dan perusahaan patungan sebagai bentuk dukungan antikorupsi</li> <li>• Pemutakhiran informasi perusahaan terkini melalui situs web dan media sosial perusahaan</li> </ul>	<p><b>Activities in GCG Implementation</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socialization of the GCG implementation in PT Djakarta Lloyd (Persero)</li> <li>• Submission of State Officials' Assets Report (LHKPN) by structural officials one level below the Board of Directors and Senior Manager level in affiliated and joint venture companies as a form of anti-corruption support</li> <li>• Update the latest company information on the Company's website and social media</li> </ul>
<p><b>Kegiatan Hukum</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjanjian kerja sama antara Perseroan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI terkait empat trayek pengangkutan kontainer (Tol Laut) pada 31 Januari 2019</li> <li>• Penandatanganan MoU antara Perseroan dan PT Pelindo Marine Service perihal kerja sama pemanfaatan potensi masing-masing pihak pada 15 Februari 2019</li> <li>• Penandatanganan MoU antara Perseroan dan PT Bahana Securities &amp; Bahana TCW perihal kerja sama pendanaan investasi kapal laut pada 15 Februari 2019</li> </ul>	<p><b>Activities in Legal Affairs</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooperation agreement between the Company and the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia regarding the four routes of container transport (Sea Toll) on January 31, 2019</li> <li>• Signing of MoU between the Company and PT Pelindo Marine Service concerning the cooperation in utilizing the potential of each party on February 15, 2019</li> <li>• Signing of MoU between the Company and PT Bahana Securities &amp; Bahana TCW on the cooperation in funding the investment in ships on February 15, 2019</li> </ul>

# SEKRETARIS PERUSAHAAN

## Corporate Secretary

Kegiatan Hukum		Activities in Legal Affairs
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perjanjian kerja sama antara Perseroan dan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) terkait pembangunan satu unit tanker 6.500 LTDW untuk kepentingan PT Pertamina (Persero) pada 4 Maret 2019</li> <li>Perjanjian Novasi antara Perseoran serta PT Pertamina (Persero) dan PT Indrabas Purnama Makmur perihal <i>Long-Term Charter Party</i> (perjanjian sewa berdasarkan waktu jangka panjang <i>new building</i>) pada 20 Maret 2019</li> <li>Perjanjian antara Perseroan dan PT BNI (Persero) Tbk perihal fasilitas kredit investasi untuk <i>refinancing</i> kapal TB. TMJ Power dan BG TMJ 2001 Nomor 002/BIN/PK-KI/2019 pada 29 April 2019</li> <li>Penandatanganan MoU antara Perseroan dan PT Pertamina Patra Niaga perihal kerja sama pengadaan bahan bakar kapal untuk kebutuhan PT Djakarta Lloyd (Persero) dan pengadaan angkutan kapal untuk kebutuhan PT Pertamina Patra Niaga pada 8 Mei 2019</li> <li>Pembuatan Akta Pengangkatan Direksi Finance, HCM &amp; GA Sdr. Ofan Sofwan, Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 06 tanggal 13 Februari 2019</li> <li>Pembuatan Akta Pengangkatan Komisaris Utama Sdr. Anhar Adel, Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 01 tanggal 17 Juni 2019</li> <li>Pembuatan Akta Pengangkatan Komisaris Sdr. Lambonar O Silitonga, Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 01 tanggal 17 Juni 2019</li> <li>Pembuatan Akta RKAP 2019 PT Djakarta Lloyd (Persero), Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Nomor 13 tanggal 21 Mei 2019</li> <li>Pembuatan perjanjian tentang Layanan Jasa Hukum Non-Litigasi Perusahaan (<i>Corporate Lawyer</i>) antara Perseroan dan Kantor Advokat Sirjon Pinem &amp; Rekan</li> <li>Perjanjian antara Perseroan dan PT BNI (Persero) Tbk perihal fasilitas kredit satu unit kapal <i>handymax</i> Nomor 004/BIN/PK/2019 pada tanggal 24 Juli 2019</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cooperation agreement between the Company and PT Dok and Shipping Surabaya (Persero) on the construction of one unit of 6,500 LTDW tanker for serving PT Pertamina (Persero) on March 4, 2019</li> <li>Novation agreement between the Company and PT Pertamina (Persero) and PT Indrabas Purnama Makmur regarding the Long-Term Charter Party on March 20, 2019</li> <li>Agreement between the Company and PT BNI (Persero) Tbk concerning credit facilities for refinancing TB. TMJ Power and BG TMJ 2001 vessels Number 002/BIN/PK-KI/2019 on April 29, 2019</li> <li>Signing of MoU between the Company and PT Pertamina Patra Niaga regarding cooperation in the procurement of ship fuel by PT Djakarta Lloyd (Persero) and the procurement of transportation ship for serving PT Pertamina Patra Niaga on May 8, 2019</li> <li>Deed of Appointment of Director of Finance, HCM &amp; GA Mr. Ofan Sofwan, by Notary Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Number 06 dated February 13, 2019</li> <li>Deed of Appointment of President Commissioner Mr. Anhar Adel, by Notary Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Number 01 dated June 17, 2019</li> <li>Deed of Appointment of Commissioner Mr. Lambonar O Silitonga, by Notary Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Number 01 dated June 17, 2019</li> <li>Deed of the 2019 Work Plan and Budget (RKAP) of PT Djakarta Lloyd (Persero), by Notary Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta, Number 13 dated May 21, 2019</li> <li>Agreement on Corporate Non-Litigation Legal Services between the Company and the Advocate Office of Sirjon Pinem &amp; Partners</li> <li>Agreement between the Company and PT BNI (Persero) Tbk regarding the credit facility for purchasing one unit of handymax ship number 004/BIN/PK/2019 dated July 24, 2019</li> </ul>



<b>Kegiatan Hukum</b> Activities in Legal Affairs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembayaran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tahun 2019 (triwulan I-IV)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Debt repayment based on the agreement of Debt Obligation Payment Postponement (PKPU) for Year 2019 (quarter I-IV)</li> </ul>
<b>Tata Usaha Direksi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyelenggaraan rapat dan dokumentasi bahan rapat, undangan dan notulensi Rapat Manajemen, Rapat Gabungan Direksi dengan Komisaris, dan Rapat Skoring GCG selama tahun 2019</li> <li>Kegiatan keprotokolan: Mendampingi kegiatan Direksi dan Komisaris</li> </ul>	<b>Board of Directors' Administration</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizing meetings and documentation of meeting materials, invitations and minutes of Management Meetings, Joint Meetings of Directors and Commissioners, and GCG Scoring Meetings during 2019</li> <li>Protocol activities: Accompanying the activities of the Directors and Commissioners</li> </ul>

## PUBLIKASI INFORMASI PERUSAHAAN

Informasi mengenai perkembangan Perusahaan disebarluaskan dalam bentuk rilis pers, wawancara, ataupun *talk show* di berbagai media massa yang meliputi media cetak, elektronik, dan daring.

## COMPANY INFORMATION PUBLICATION

Information regarding the Company's development is disseminated in the form of press releases, interviews, and talk shows in various mass media which include print, electronic, and online.

No.	Judul Siaran Pers Title of Press Release	Media	Waktu Rilis Time of Release
1	PT Djakarta Lloyd Reborn, Strategi Jitu pun Sudah Kami Siapkan PT Djakarta Lloyd Reborn, We Even Have Prepared Apt Strategy	Intra Magazine	9 Maret 2019 March 9, 2019
2	Dukung Kementerian BUMN, Djakarta Lloyd Berangkatkan 600 Pemudik Gratis Supporting the Ministry of SOEs, Djakarta Lloyd Sends Off 600 Homecoming Travelers for Free	Intra Magazine	1 Juni 2019 June 1, 2019
3	Talk Show Business and Investment Forum: "Develop Indonesian's Sustainable Economic Sector"	El John TV	4 Juli 2019 July 4, 2019
4	Peran Djakarta Lloyd dalam Industri Pelayaran dan Bisnis Transportasi Batu Bara The Role of Djakarta Lloyd in the Shipping Industry and Coal Transportation Business	Ngopi Pagi Seputar BUMN Morning Coffee Talking SOEs	29 Agustus 2019 August 29, 2019
5	Djakarta Lloyd Tingkatkan Bisnis Angkutan Curah Kering dan Cair Djakarta Lloyd Increases Dry and Liquid Bulk Shipment Business	www.bumn.info	17 Oktober 2019 October 17, 2019
6	Strategi Djakarta Lloyd Capai Target Pendapatan Rp71 M Djakarta Lloyd's Strategy in Reaching the Revenue Target of Rp71 billion	CNBC Indonesia TV	15 Desember 2019 December 15, 2019

## SATUAN PENGAWAS INTERNAL

### Internal Audit Unit

Untuk melaksanakan pengendalian internal yang mengacu pada Pasal 67 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Perusahaan telah mengesahkan Piagam Satuan Pengawas Internal (SPI), pada Oktober 2015. Piagam ini menggambarkan visi dan misi, kedudukan, peran, independensi, tanggung jawab, wewenang pelaporan Pengawas Internal; serta hubungan dengan auditan, hubungan dengan auditor eksternal, hubungan dengan Komite Audit, tanggung jawab manajemen terkait dengan pekerjaan SPI, wewenang manajemen, kode etik audit, serta jaminan mutu.

SPI memiliki kedudukan langsung di bawah Direktur Utama serta dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. Adapun tugas pokok dan fungsi SPI adalah:

- a. Melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja di semua bagian di Kantor Pusat maupun Kantor Cabang DJAKARTA LLOYD dan anak perusahaan.
- b. Melakukan audit khusus dan audit untuk tujuan tertentu yang ditugaskan Direktur Utama.
- c. Menyusun dan menyiapkan rencana program kerja pengawasan dan pemeriksaan bidang umum, operasional, dan keuangan.
- d. Melaksanakan pengawasan secara teratur dan berlanjut sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) atas pelaksanaan semua kebijakan perusahaan.
- e. Melaksanakan penilaian mengenai penyelenggaraan administrasi organisasi dan tata kerja, personel, materiil, keuangan, peraturan, humas, pengamanan dan pengolahan data.
- f. Melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan operasional dan pengembangan usaha.
- g. Melaksanakan penilaian terhadap sistem pengendalian dan pengamanan kekayaan, pendapatan dan biaya perusahaan serta pelaksanaannya.
- h. Berkoordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait.
- i. Melakukan penilaian, evaluasi, dan konsultasi secara independen kepada Direksi dan manajemen atas sistem pengendalian internal,

To implement the internal control referred to in the Article 67 of the Republic of Indonesia Law No. 19 of 2003 concerning SOEs, the Company has ratified the Charter of Internal Audit Unit (SPI) in October 2015. This Charter describes the vision and mission, position, role, independence, responsibility, authority, and reporting of the unit; as well as its relationship with audits, external auditor, the Audit Committee, management responsibilities related to the work of SPI, management authority, code of ethics in auditing, and quality assurance.

SPI's position is directly under the President Director and is led by an SPI Head who is appointed and dismissed by the President Director. The main tasks and functions of the SPI are:

- a. Conduct financial and performance audits in all departments at the Head Office and Branch Offices of DJAKARTA LLOYD and its subsidiary.
- b. Conduct special audits and audits for specific purposes assigned by the President Director.
- c. Arrange and prepare a work plan for general, operational and financial audits.
- d. Perform regular and continuous supervisions in accordance with the Annual Oversight Work Program (PKPT) for the implementation of all the Company's policies.
- e. Conduct the assessment of the organization administration and work procedures, personnel, material, financial, regulatory, public relations, security, and data processing.
- f. Evaluate the implementation of operational and business development.
- g. Making assessment of the control and security systems of the Company's wealth, income and costs and their implementation.
- h. Coordinate the work units and related agencies.
- i. Independently assess and evaluate, in consulting with the Board of Directors and management, the internal control system, risk management,

manajemen risiko, dan pelaksanaan GCG untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

- j. Ikut mewujudkan tata kelola perusahaan di DJAKARTA LLOYD.

Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan SPI tergantung pada situasi dan kondisi tertentu, seperti hasil audit sebelumnya, materialistic tingkat risiko yang melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan sumber daya SPI. Adapun ruang lingkup kegiatan SPI meliputi:

1. Memastikan bahwa sistem pengendalian perusahaan telah memadai, bekerja secara efisien dan ekonomis, serta berfungsi secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
2. Menguji dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur (*standard operating procedure*), dan sistem-sistem yang ada untuk memberikan keyakinan bahwa informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan telah sesuai dengan peraturan.
3. Meninjau ulang dan menilai efektivitas dan kecukupan pengendalian keuangan dan administrasi.
4. Mengevaluasi keandalan informasi keuangan dan informasi operasional.
5. Menilai kecukupan sarana-sarana untuk menjaga dan melindungi kekayaan perusahaan.
6. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut di atas, seperti penyelidikan dan pengungkapan atas penyimpangan, kecurangan, dan pemborosan.

### KEMANDIRIAN

Sebagai bagian dari unit resmi yang ditunjuk mewakili Direktur Utama dalam bidang audit dan pengendalian internal, Auditor Internal harus menjunjung prinsip kemandirian berikut.

1. Dalam melakukan pekerjaannya, Auditor Internal harus independen terhadap aktivitas yang sedang diaudit.

and GCG implementation, aiming to provide added value and improve the Company's overall performance.

- j. Participate in realizing the good corporate governance in DJAKARTA LLOYD.

The scope and frequency of auditing conducted by SPI depends on certain situation and condition, such as: previous auditing result, the materialistic of the risk level of an activity, adequacy of internal control, and availability of SPI resources. The scope of activities of SPI include the following:

1. Ensuring that the company controlling system is adequate, works efficiently and economically, and also effectively function in achieving the intended objectives and targets.
2. Examine and evaluate the policies, procedures (Standard Operating Procedure), and available system to provide confidence that the outcome information is reliable and following the regulations.
3. Review and asses the effectivity and adequacy of financial and administration control.
4. Evaluate the reliability of financial and operational information.
5. Assess the adequacy of available means in guarding and protecting company assets.
6. Conducting special assignment which is relevant with the scope of work mentioned above, such as: investigation and disclosure of deviation, fraud, and profligacy.

### INDEPENDENCY

As an official unit appointed by the President Director in the field of auditing and internal controls, the following are the principles of independence that must be upheld by the Internal Auditor.

1. In carrying out their work, the Internal Auditor have to be independent toward the auditing activity.

# SATUAN PENGAWAS INTERNAL

## Internal Audit Unit

2. Auditor Internal dilarang mempunyai rasa keberpihakan, ketakutan, serta ambisi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan dan tanggung jawab penugasannya.
3. Auditor Internal mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi, agar dapat bekerja sama dengan Auditan dan melakukan audit tanpa campur tangan pihak manapun.
4. Auditor Internal harus objektif dalam melakukan kegiatan audit, dan dilarang menyerahkan pendapatnya kepada pihak lain, selain Direksi.
5. Auditor Internal harus jujur dalam melaksanakan pekerjaannya agar kualitas pekerjaannya terbebas dari unsur kompromi.
6. Auditor Internal dilarang ditempatkan pada situasi dimana mereka tidak dapat membuat keputusan yang objektif. Oleh karena itu, jika memungkinkan penugasan staf untuk melakukan audit di suatu bagian harus dilakukan rotasi secara periodik.
7. Tidak mempunyai kepentingan pribadi pada bagian yang diaudit atau dengan auditan.
8. Auditor Internal tidak boleh terlibat dalam suatu tim operasional yang akan memengaruhi independensi Auditor, baik secara personal maupun lembaga dalam melakukan pemeriksaan.
9. Keterlibatan Auditor Internal dalam penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan suatu kegiatan operasional terbatas sebagai narasumber di bidang sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.
10. Apabila manajemen lini menghendaki Auditor Internal melakukan pekerjaan di luar kegiatan audit, maka manajemen lini harus menyadari bahwa dalam hal ini Auditor Internal tidak bertindak dalam kapasitas sebagai seorang Auditor Internal.
11. Auditor Internal dilarang menilai operasional, di mana Auditor tersebut memiliki keterlibatan operasional dalam dua tahun terakhir.
12. Auditor Internal yang terlibat aktif dalam siklus pengembangan sistem dilarang mengaudit aplikasi yang dikembangkan dalam dua tahun terakhir.
2. The Internal Auditor are forbidden to have the sense of siding, fear, and ambition which can influence the ongoing activity, and affecting their responsibilities in fulfilling the assignment.
3. The Internal Auditor received full support from the Directors, in order to fully cooperate with the auditee and conduct auditing without interference from any parties.
4. The Internal Auditor have to be objective in conducting audit, also forbidden to give out their opinion to other party, aside from the Directors.
5. The Internal Auditor have to be honest in carrying out their work, so the work quality is free from the compromising elements.
6. The Internal Auditor are not allowed to be placed in the situation in which they cannot make an objective decision. In regard to that, it is advisable to periodically rotate the auditing staff in certain unit.
7. The Internal Auditor are not allowed to have personal interest on the division which is being audited or auditee.
8. The Internal Auditor are not allowed to get involved in an operational team, since it will affect the Auditor's independence, both in personal and institutional in conducting inspection.
9. The involvement of Internal Auditor in composing the policies or implementation of operational activities are limited as resource person in the field of internal control, risk management and corporate governance.
10. If the line management wants the Internal Auditor to conduct assignment outside the auditing activities, then the line management have to be aware that the Internal Auditor is not acting within their capacity as Internal Auditor.
11. The Internal Auditor are not allowed to assess operational activities in which they have operational involvement in the last two years.
12. The Internal Auditor who actively involved in system development life-cycle is forbidden to audit the application that they have developed in the last two years.

13. Auditor Internal tidak boleh memiliki pertentangan kepentingan dengan auditan.
14. Auditor Internal tidak boleh memiliki kepentingan tertentu dengan bagian yang diaudit atau auditan.
15. Auditor Internal perlu dirotasi untuk mengaudit unit kerja lain setelah yang bersangkutan melakukan audit pada unit kerja yang selama tiga tahun berturut-turut
16. Untuk menjaga independensi, anggaran SPI perwakilan dibebankan ke SPI Kantor Pusat.

### TANGGUNG JAWAB

1. Menyusun rencana kerja audit tahunan, termasuk anggarannya dengan berkonsultasi kepada Komite Audit.
2. Melaksanakan rencana kerja audit tahunan yang telah disepakati, termasuk penugasan khusus dari Direktur Utama dan Komite Audit.
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
4. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan.
5. Menjaga integritas dan objektivitas serta bertindak profesional.

### AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Kepala SPI yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya antara lain:

1. Mempresentasikan atau melaporkan rencana kerja audit tahunan, termasuk anggarannya kepada Direktur Utama dan Komite Audit untuk mendapat persetujuan.
2. Melaporkan atau menyajikan informasi tentang status dan hasil pelaksanaan rencana kerja audit tahunan secara periodik (bulanan, triwulanan, atau kuartalan) kepada Direktur Utama.
3. Melaporkan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses-proses pengendalian internal.

13. The Internal Auditor are not allowed to have conflicted interest with the Auditee
14. The Internal Auditor are not allowed to have certain interest with the audited division or auditee.
15. The Internal Auditor have to be rotated to other working unit, after the person conducted auditing on the same working unit for three consecutive years.
16. To ensure independency, the SPI representative's budget will be borne by the Head Office's SPI.

### RESPONSIBILITIES

1. Composing the annual audit working plan, including its budget, in consultation with the Audit Committee.
2. Conducting the annual audit plan which have been agreed upon, including special assignment from the President Director and Audit Committee.
3. Providing improvement advice and objective information regarding with the assessed activity on every level of management.
4. Conduct monitoring, analyzing, and reporting of implementation of the follow up activity which have been recommended.
5. Maintaining integrity and objectivity, as well as professionalism.

### ACCOUNTABILITY

The Head of Internal Audit Unit's accountability that related to their assignment, are as follow:

1. Give presentation or reporting of annual audit working plan, including its budget to the President Director and Auditing Committee, for approval.
2. Give reporting or periodically (monthly or quarterly) providing information on status and result of the implementation of annual audit plan to President Director.
3. Give assessment reporting on adequacy and effectivity of internal control processes.

# SATUAN PENGAWAS INTERNAL

## Internal Audit Unit

### WEWENANG

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diembannya, wewenang SPI hal-hal berikut ini.

1. Dapat memperoleh informasi dari seluruh karyawan DJAKARTA LLOYD. SPI berhak melihat dan menerima semua dokumen, meminta keterangan dari setiap karyawan dan pihak ketiga yang terkait, serta meninjau seluruh gedung, fasilitas, serta aktiva Perseroan yang berkaitan dengan penugasan audit internal. Setiap karyawan berkewajiban memberikan informasi yang diperlukan oleh SPI untuk bekerja secara efektif.
2. Menguji, memeriksa, dan menilai kelengkapan, keakuratan, keabsahan, keberadaan, kepemilikan, serta kewenangan akses terhadap seluruh transaksi dan dokumen DJAKARTA LLOYD, misalnya transaksi harian, catatan akuntansi (aset, kewajiban, modal, dan perhitungan laba/rugi), serta sumber daya manusia.
3. Mengalokasikan sumber daya pemeriksa, seleksi auditan, ruang lingkup, dan jadwal pemeriksaan, serta menerapkan teknik yang dipandang perlu. SPI berwenang untuk mendapatkan saran dan nasihat dari tenaga ahli untuk menghasilkan pemeriksaan yang berhasil guna.
4. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Direktur Utama, dan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas melalui Komite Audit.
5. Memonitor, menindaklanjuti, dan mengevaluasi langkah perbaikan atas temuan audit dari SPI dan Auditor Eksternal yang dilaksanakan oleh Auditan.
6. Memberikan masukan pada *System Development Life Cycle* (SDLC) tentang sistem pengendalian internal dan manajemen risiko. Keterlibatan auditor dalam SDLC harus mendapat supervisi dari fungsi Pengembangan Sistem Aplikasi Audit Internal Bidang TSI. Keterlibatan audit internal dalam SDLC tidak diartikan bahwa Audit Internal telah menerima secara mutlak sistem tersebut. Perkembangan bisnis perusahaan dan teknik kontrol yang memungkinkan audit internal untuk mengaudit sistem tersebut.

### AUTHORITY

In conducting its tasks and functions, the following are the SPI's authority.

1. Receiving information from all employees of DJAKARTA LLOYD. SPI have the right to see and accept all document, ask for information or explanation from each employee and related third party, as well as inspecting all buildings, facilities, and assets belong to DJAKARTA LLOYD, which related to the internal auditing assignment. Each employee of DJAKARTA LLOYD is obliged to provide information required by SPI to make their work effectively.
2. Examine, inspect, and assess the comprehensiveness, accuracy, validity, legality, existence, ownership, and authority of access on all transaction and document of DJAKARTA LLOYD, such as daily transaction, accounting record (assets, liability, capital, and profit/loss calculation), and human resources.
3. Allocating auditor resources, selecting auditee, scope, and schedule of examination, as well as implementing technique which is considered necessary. SPI have the authority to receive recommendation and advice from experts to generate effective examination result.
4. Delivering report and conduct consultation with President Director, and coordinate with Supervising Board through Audit Committee.
5. Implementing monitoring, follow up, and evaluation of improvement steps on SPI and External Auditor auditing findings which is conducted by the auditee.
6. Providing input to *System Development Life Cycle* (SDLC) on internal control system and risk management. The involvement of auditor in SDLC have to be under supervision from the development of application system of the Internal Audit function of the TSI Division. The involvement of internal audit within the SDLC is not supposed to be interpreted as absolute acceptance of the system's internal auditing. On the other hand, the company's business development has to allow the internal audit to create possible control technique to audit the system.



7. Menyusun dan mengubah Kebijakan dan Prosedur Audit Internal serta ruang lingkup pekerjaan audit sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal/internal dan kebutuhan audit internal Perseroan.
8. Menetapkan profil kompetensi dan indikator-indik audit internal dalam rekrutmen/seleksi, promosi, rotasi, dan pendidikan profesional yang dilakukan secara terus menerus (*continuous improvement*).
9. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Direktur Utama, dan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas melalui Komite Audit.

## PELAPORAN

Pelaporan hasil pengawasan internal, penilaian, evaluasi, dan kegiatan pemberian jasa konsultasi disampaikan kepada manajemen dalam bentuk tertulis atau lisan di dalam rapat formal ataupun melalui mekanisme lainnya. Laporan yang dikeluarkan SPI harus mencantumkan tanggapan obyek audit apabila terjadi perbedaan pandangan antara auditor SPI dengan auditan. Laporan hasil pengawasan internal disampaikan kepada Direktur Utama dan tembusan laporan disampaikan kepada Komite Audit dan pihak lain yang dianggap tepat.

## KODE ETIK AUDIT

1. Pemeriksa harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Pemeriksa harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau pada pihak yang dilayani. Namun, Pemeriksa tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
3. Pemeriksa tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi Pemeriksa atau mendiskreditkan Perusahaannya.
4. Pemeriksa harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan Perusahaannya atau

7. Composing and changing the Internal Audit Policies and Procedures, and the auditing scope of work following the external/internal environment changes and the Company's internal audit.
8. Establishing the competency profile and key performance indicators of internal audit in recruitment/selection, promotion, rotation, and professional education for continuous improvement.
9. Delivering report and conducting consultation with the President Director and coordinate with the Supervisory Board through Audit Committee.

## REPORTING

The reporting of result on internal supervision, assessment, evaluation and consultation service activities delivered to the management, either in writing or verbally through formal meeting or other mechanism. The report issued by SPI have to include the response from the auditing object, if there is difference perspective between SPI Auditor and Auditee. The report on result of internal supervision is submitted to the President Director and the report copy is submitted to the Auditing Committee and other appropriate party.

## AUDIT CODE OF ETHICS

1. The auditors must show honesty, objectivity, and sincerity in performing their duties and fulfilling the responsibilities of their profession.
2. The auditors must show loyalty to the organization or the party being served. However, the auditors must not be consciously involved in activities that deviate or violate the law.
3. The auditors must not be consciously involved in actions or activities that can discredit their profession or discredit the Company.
4. The auditors must refrain from activities that may generate conflict with the interests of their company or activities that may cause prejudice, which cast doubt on their ability to carry out

# SATUAN PENGAWAS INTERNAL

## Internal Audit Unit

kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif.

5. Pemeriksa tidak boleh menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis Perusahaannya, yang dapat atau patut diduga dapat memengaruhi pertimbangan profesional.
6. Pemeriksa hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
7. Pemeriksa harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi standar profesional Auditor Internal.
8. Pemeriksa harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh untuk pelaksanaan tugasnya. Pemeriksa tidak boleh menggunakan informasi rahasia untuk mendapatkan keuntungan pribadi, melanggar hukum, atau yang dapat menimbulkan kerugian terhadap Perusahaannya.
9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, Pemeriksa harus mengungkapkan semua fakta-fakta penting yang diketahuinya, yaitu fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat: mendistorsi laporan atas kegiatan yang ditinjau, atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.
10. Pemeriksa senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Pemeriksa wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.
11. Pemeriksa tidak diperbolehkan ikut sebagai Pengurus Serikat Pekerja.

their duties and fulfill the responsibilities of their profession objectively.

5. The auditors must not accept anything in any form from employees, clients, customers, suppliers or business partners of the Company, which can or reasonably be expected to influence their professional judgment.
6. The auditors only perform services that can be completed using the professional competencies they have.
7. The auditors must make every effort to always meet the professional standards of the Internal Auditor.
8. The auditors must be careful and wise in using the information obtained during the implementation of their duties. The auditors must not use confidential information for personal gain, violate the law, or that could cause harm to the Company.
9. In reporting the outcomes of their work, the auditors must disclose all the important facts they know, the facts that if not disclosed can: distort the report on the audited activity, or cover up unlawful practices.
10. The auditors must always improve their competency as well as the effectiveness and quality of their auditing duties. The auditors are required to get continuing professional education.
11. The auditors are not allowed to become management member of Labor Union.

### HUBUNGAN SPI DENGAN SEJUMLAH PIHAK

### SPI RELATIONSHIP WITH VARIOUS PARTIES

#### Hubungan dengan Auditan Relationship with Audits

Untuk menjaga objektivitas dan independensi SPI, setiap kegiatan audit pihak yang bertanggung jawab terhadap aktivitas atau unit kerja yang diaudit harus diberi kesempatan untuk membahas tujuan dan ruang lingkup audit sebelum pelaksanaan audit dimulai, dan membahas serta mengklarifikasi temuan dan usulan rekomendasi yang diajukan.

To maintain the objectivity and independence of the Internal Audit Unit, in each audit activity those who is responsible for the activities or work unit being audited must be given the opportunity to discuss the objectives and scope of the audit before the audit is conducted, as well as discuss and clarify the findings and the recommendations given.

<p><b>Hubungan dengan Auditor Eksternal</b> <b>Relationship with External Auditor</b></p>	<p>Menjalin kerja sama untuk mencapai hasil kerja yang optimal misalnya mengurangi kemungkinan duplikasi/tumpang tindih audit dan menjamin koordinasi yang baik. Pembahasan hasil temuan Auditor Eksternal dengan manajemen harus didampingi oleh SPI.</p> <p>Establish cooperation in order to achieve optimal work outcomes, for example, reducing the possibility of duplicating/overlapping audits and ensuring good coordination. SPI must accompany the management in the discussion on the findings by External Auditor.</p>
<p><b>Hubungan dengan Anak Perusahaan</b> <b>Relationship with Subsidiary</b></p>	<p>SPI bertugas melakukan pembinaan SPI Anak Perusahaan, baik dalam peningkatan mutu kompetensi sumber daya manusia (SDM) maupun peningkatan hasil mutu audit. SPI berkewajiban melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan pengawasan dan tindak lanjut temuan hasil audit dari SPI Anak Perusahaan. SPI juga berwenang untuk melakukan penilaian efektivitas kinerja SPI Anak Perusahaan dan melaporkannya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit</p> <p>SPI has the duty to foster the subsidiary's SPI, both in improving the quality of human resource (HR) as well as the audit quality. SPI is obliged to coordinate and synchronize in the planning of supervision and follow-up on audit findings from the subsidiary's SPI. SPI is also authorized to conduct an evaluation of the effectiveness of subsidiary's SPI performance and report it to the President Director with a copy to the Audit Committee</p>
<p><b>Hubungan dengan Komite Audit</b> <b>Relationship with Audit Committee</b></p>	<p>SPI harus membina hubungan dengan Komite Audit sebagai lembaga yang memfasilitasi saluran komunikasi di antara para auditor, khususnya antara auditor internal dengan auditor eksternal. SPI menyampaikan tembusan laporan-laporan hasil pekerjaan SPI seperti laporan hasil pengawasan internal, laporan realisasi rencana kerja audit tahunan, dan laporan-laporan lainnya kepada Komite Audit agar dapat dimonitor tindak lanjutnya.</p> <p>SPI must foster relationships with the Audit Committee as an institution that facilitates communication between auditors, especially between internal auditors and external auditors. SPI submits copies of reports on SPI's work outcomes such as report on internal audit results, report on realization of annual audit work plan, and other reports to the Audit Committee so that the follow-ups can be monitored.</p>
<p><b>Hubungan dengan Manajemen</b> <b>Relationship with Management</b></p>	<p>Manajemen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan SPI serta pengendalian risiko dan pencegahan kecurangan, sedangkan SPI bertugas meninjau manajemen risiko dan melakukan audit.</p> <p>The management is responsible to follow up on the SPI's findings as well as risk control and fraud prevention, while SPI is tasked with reviewing the risk management and conducting audits.</p>

## AKUNTAN PUBLIK

### Public Accountants

Berdasarkan usulan Komite Audit, Dewan Komisaris mengajukan sejumlah calon Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Auditor Eksternal kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilengkapi dengan alasan pencalonan dan jumlah honorarium. Selain menetapkan kebijakan dan/atau prosedur penunjukan Auditor Eksternal kepada RUPS, Dewan Komisaris juga bertugas menyusun rencana kerja penunjukan dan anggaran biaya, serta mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Berdasarkan Surat Dewan Komisaris Nomor A.005/TU.805.01/DEKOM/XI/2019 tanggal 14 November 2019 kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Pengendali dalam RUPS mengenai usulan penunjukan KAP untuk Laporan Keuangan PT DJAKARTA LLOYD (Persero) dan entitas anak tahun buku 2019, Dewan Komisaris mengusulkan penggunaan KAP Heliantono & Rekan.

KAP Heliantono & Rekan telah melaksanakan audit laporan keuangan tahunan DJAKARTA LLOYD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berlaku sejak tanggal Surat Perintah Kerja (SPK) hingga seluruh ruang lingkup pekerjaan dinyatakan selesai. Biaya pekerjaan audit laporan keuangan tahun 2019 telah disepakati sebesar Rp296.000.000 termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut.

1. Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian
2. Laporan Audit atas Laporan Keuangan PT Dharma Lautan Nusantara
3. Laporan Kepatuhan terhadap Peraturan dan Pengendalian Internal
4. Laporan Key Performance Indicators
5. Laporan Reviu Penilaian Tingkat Kesehatan
6. Peninjauan kembali perhitungan kewajiban perpajakan serta perhitungan pajak tangguhan Perusahaan dan anak perusahaan

Based on the Audit Committee's proposal, the Board of Commissioners proposes a number of candidates for the Public Accountant Firm (KAP) as External Auditor to the General Meeting of Shareholders (GMS) complete with reasons for nomination and the amount of honorarium. In addition to establishing policies and/or procedures for appointing external auditor at the GMS, the Board of Commissioners is also tasked with drafting a work plan and budget for the appointment, as well as evaluating the performance of the external auditor in accordance with applicable provisions and standards.

Based on the Board of Commissioners Letter Number A.005/TU.805.01/DEKOM/XI/2019 dated November 14, 2019 to the Minister of SOEs as the Controlling Shareholder regarding the proposal of KAP appointment for auditing the Financial Statements of PT DJAKARTA LLOYD (Persero) and its subsidiary for fiscal year 2019, the Board of Commissioners proposed Heliantono & Partners Public Accounting Firm.

KAP Heliantono & Partners have audited the annual financial statements of DJAKARTA LLOYD for the year ended December 31, 2019. The time period for the implementation of the work is valid from the date of the Work Order until the entire scope of work is declared complete. The cost of auditing the financial statements of 2019 has been agreed at Rp296,000,000 which includes Value Added Tax (VAT) with the scope of work as follows.

1. Audit Report of the Consolidated Financial Statements
2. Audit Report of PT Dharma Lautan Nusantara's Financial Statements
3. Report of Compliance on Regulations and Internal Control
4. Key Performance Indicators Report
5. Report of Corporate Health Review
6. Review both calculation of tax obligations and deferred tax for the Company and subsidiary

**DAFTAR KANTOR AKUNTAN PUBLIK (2017-2019)**

**LIST OF PUBLIC ACCOUNTING OFFICE (2017-2019)**

Tahun Year	Nama Akuntan Publik Name of Public Accountant	Nama Akuntan Name of Accountant	Biaya Pekerjaan Work Fee
2015	Drs. Wirawan & Rekan	Drs. Wirawan, Ak., M.Si., CPA	Rp225.000.000
2016	Drs. Wirawan & Rekan	Drs. Wirawan, Ak., M.Si., CPA	Rp240.000.000
2017	Drs. Wirawan & Rekan	Drs. Wirawan, Ak., M.Si., CPA	Rp250.000.000
2018	Djoko, Sidik & Indra	Drs. Djoko Sutardjo, Ak., CA., CPA	Rp276.100.000
2019	Heliantono & Rekan	Yansyafrin, CPA	Rp296.000.000

**Opini atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan (2017-2019)**

**Opinions on the Auditing Results of Financial Statements (2017-2019)**

2015	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian. The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, financial position, financial performance and cash flow in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, except for the matter described in Basis for Qualification paragraph.
2016	Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf Basis untuk Opini Wajar dengan Pengecualian. The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, financial position, financial performance and cash flow in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, except for the matter described in Basis for Qualification paragraph.
2017	Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, financial position, financial performance and cash flow in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
2018	Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, financial position, financial performance and cash flow in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
2019	Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. The Consolidated Financial Statements present fairly, in all material respects, financial position, financial performance and cash flow in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

# SISTEM MANAJEMEN RISIKO

## Risk Management System

Untuk menunjang tercapainya GCG, Perseroan melaksanakan pengelolaan sistem manajemen risiko secara efektif dan efisien, baik pada aktivitas bisnis yang sedang berlangsung maupun yang tengah dikembangkan. Pengelolaan risiko dapat meminimalkan potensi kegagalan/kerugian (*value protection*), sekaligus mengoptimalkan nilai pendapatan dan laba (*value creation*).

Dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan risiko, Direksi DJAKARTA LLOYD mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 033/KEP/DIRUT/XII/2018 pada 13 Desember 2018 untuk mengadopsi penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan mengacu pada standar ISO 31000:2018. Keputusan tersebut kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 007/KEP/DIRUT/11/2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko.

Berdasarkan aturan tersebut, Komite Manajemen Risiko merupakan komite yang dibentuk oleh Direksi dengan pendampingan konsultan independen, dan dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk. Komite ini bekerja lintas fungsi yang bertugas sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan penerapan manajemen risiko di korporat.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direksi. Ketua komite berwenang untuk mengganti dan/atau menambah anggota komite, serta melakukan pekerjaan secara konsinyering jika dianggap perlu dengan mempertimbangkan urgensi dan waktu penyelesaian pekerjaan. Segala biaya yang timbul selama pelaksanaan kegiatan komite dibebankan kepada Perusahaan. Adapun tugasnya meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Menyusun *Roadmap* Penerapan Manajemen Risiko.
2. Membuat Manual Pengolahan Risiko.
3. Melakukan identifikasi, pemetaan, pembuatan profil risiko, dan penelaahan indikator risiko kunci.
4. Menyusun program percepatan dan penilaian tingkat maturitas.
5. Melakukan evaluasi hasil penilaian.
6. Melakukan hal-hal lain sepanjang dibutuhkan dalam hal-hal terkait manajemen risiko.

To support the achievement in GCG, the Company implements an effective and efficient risk management system, both in the ongoing and under development business activities. The risk management system can minimize the potential for failure/loss (*value protection*), while optimizing the value of revenue and profit (*value creation*).

In conducting supervision and risk management, the Board of Director of DJAKARTA LLOYD issued the Decree Number 033/KEP/DIRUT/XII/2018 on December 13, 2018 to adopt the application of integrated risk management and refers to ISO 31000: 2018 standards. The decree was then renewed by the Board of Directors Decree Number 007/KEP/DIRUT/11/2019 regarding the Establishment of the Risk Management Committee.

Based on the decree, the Risk Management Committee is a committee formed by the Board of Directors with the assistance of an independent consultant, and is led by one of the Directors appointed. This committee works across functions which is responsible for implementing the risk management in the Company.

In performing its duties, the Risk Management Committee is responsible to the Board of Directors. The committee chairperson is authorized to replace and/or add the committee members, as well as to conduct work on a consignment basis if deemed necessary by considering the urgency and time of work completion. All costs incurred during the implementation of committee activities are borne by the Company. The tasks include the following matters.

1. Arrange the Risk Management Implementation Roadmap.
2. Creating the Risk Management Manual.
3. Perform identification, mapping, profiling, and assessment of key risk indicators.
4. Compile a quick win program and maturity assessment level.
5. Evaluate the assessment results.
6. Do other things as long as necessary in matters related to risk management.



## KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO

Perseroan mengadopsi ISO 31000:2018 sebagai *framework* manajemen risiko dilandasi hal berikut.

1. Kesesuaian antara karakteristik bisnis dan operasi Perusahaan dengan dinamika perubahan lingkungan yang semakin cepat.
2. Manajemen memandang metode yang disajikan ISO lebih rinci dibanding metode lainnya. Hal ini menciptakan peluang agar manajemen dapat mengadopsi tata kelola dan tata langkah secara runut.
3. Manajemen memandang upaya ini sebagai satu langkah ke depan untuk memperoleh sertifikasi ISO 31000 yang secara khusus membahas manajemen risiko.
4. Meski metode ini cukup kaku dan terperinci dengan baik, namun unsur fleksibilitasnya masih terbuka luas, terutama dari sisi penyempurnaan metode.

Merujuk pada ISO 31000:2018, kerangka kerja manajemen risiko diawali dengan mendayagunakan tiga komponen utama dari sistem manajemen, yakni konteks, dukungan, dan kepemimpinan.

Pada sisi konteks, manajemen risiko diharapkan mampu menegaskan penerapan misi organisasi dan mengidentifikasi setiap harapan dan keinginan dari segenap pemangku kepentingan. Dimensi ini diperkuat oleh sisi kepemimpinan yang meliputi komitmen, kebijakan, peran organisasi, dan pertanggungjawaban pengelola.

Kemudian, dimensi konteks akan diperkuat oleh sisi pendukung yang berkontribusi bagi sisi konteks. Pada sisi ini, kehadiran manajemen risiko diharapkan dapat memperoleh dukungan dalam hal sumber daya, kompetensi, kesadaran, komunikasi, dan dokumentasi.

Mekanisme pengendalian dalam sistem manajemen terdiri dari empat komponen sebagai berikut.

1. Komponen perencanaan, termasuk tujuan sistem manajemen dan rencana untuk menggapai tujuan tersebut.

## RISK MANAGEMENT FRAMEWORK

The Company adopts ISO 31000:2018 as its risk management framework based on these matters:

1. Conformity between the characteristics of the Company's business and operations with the dynamics of increasingly rapid environmental changes.
2. The management views that the methods presented by the ISO are more detailed than the others. This creates opportunities so that the management can adopt the corporate and strategy governance subsequently.
3. The management views this effort as one step forward to obtain ISO 31000 certification which specifically addresses risk management.
4. Although this method is quite rigid and well detailed, the element of flexibility is still wide open, especially in terms of improving the methods.

Referring to ISO 31000:2018, the risk management framework starts with utilizing three main components of the management system, namely context, support, and leadership.

On the context side, the risk management is expected to be able to emphasize the implementation of the organization's mission and at the same time be able to identify the hopes and desires of all stakeholders. This dimension is strengthened by the leadership which includes commitment, policy, organizational role, and accountability of managers.

Then, this context dimension will be strengthened by the support side in contributing to the context side. On this side, the presence of risk management is expected to get support in terms of resources, competence, awareness, communication, and documentation.

The control mechanism in the management system consists of these following components.

1. Planning, including the management system objectives and plans to achieve the objectives.

# SISTEM MANAJEMEN RISIKO

## Risk Management System

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Komponen implementasi, terdiri dari rencana operasi, penerapan, dan pengendalian.</li> <li>3. Proses pengukuran termasuk langkah <i>monitoring</i>, pengukuran, analisis, evaluasi, proses audit, dan kajian ulang untuk menentukan titik-titik upaya perbaikan.</li> <li>4. Komponen pembelajaran yang terdiri dari upaya korektif dan perbaikan berkesinambungan.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Implementation, consisting of operations, application and control plans.</li> <li>3. Measurement process, including the steps of monitoring, measuring, analyzing, evaluating, auditing, and reviewing to determine the points of effort for improvement.</li> <li>4. Learning, consisting of corrective efforts and continuous improvement.</li> </ol> |
|--|---|

Pendekatan ISO 31000:2018 merupakan mekanisme terintegrasi yang efektif di antara semua metode pengelolaan organisasi formal dengan kebutuhan manajemen risiko. Melalui pemahaman ini, manajemen risiko dapat dilihat sebagai bagian vital dalam kerangka besar pengelolaan organisasi. Pada kerangka konseptual, komponen manajemen risiko diperluas pada kategori kepemimpinan dan komitmen yang terdiri dari proses integrasi antarelemen dalam perusahaan, desain sistem, penerapan sistem, evaluasi pelaksanaan, dan upaya perbaikan berkesinambungan.

The ISO 31000:2018 approach is an effective integrated mechanism between all formal organizational management methods and risk management needs. Through this understanding, the risk management can be seen as a vital part of a large organizational management framework. In the conceptual framework, the risk management component is extended in the leadership and commitment category which consists of the integration process between elements within the Company, system design, system implementation, implementation evaluation, and continuous improvement efforts.

### FASE PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Manajemen DJAKARTA LLOYD membagi penerapan manajemen risiko ke dalam tiga fase utama, yaitu:

1. Fase Persiapan, meliputi valuasi Perusahaan sebelum penerapan sistem manajemen risiko, aktivasi tim Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), penentuan tingkat maturitas kesadaran manajemen risiko, dan peluncuran gerakan sadar risiko.
2. Fase Perancangan Infrastruktur Manajemen Risiko, meliputi sosialisasi sistem manajemen risiko dan adopsi manajemen risiko di setiap kebijakan Perusahaan.
3. Fase Penerapan Manajemen Risiko Secara Penuh, meliputi kegiatan aktivasi tim SKMR dan sistem manajemen *go live*.

### IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT PHASES

The management of DJAKARTA LLOYD divides the implementation of risk management into three major phases, namely:

1. Preparation Phase, including the Company's valuation prior to the implementation of the risk management system, activation of the team of Risk Management Work Unit (SKMR), determination of maturity level of risk management awareness, and kick-off of risk conscious movements.
2. The Risk Management Infrastructure Design Phase, including the socialization of risk management system and the adoption of risk management in every Company policy.
3. The Full Implementation Phase of Risk Management, including the activation of the SKMR team and the management system goes live.

**Fase Penerapan Manajemen Risiko**  
Implementation of Risk Management Phases

Fase Phase	Aktivitas Activities	Langkah Kerja Work Step	Target Outcome Outcome Target
Persiapan Preparation	Valuasi perusahaan sebelum penerapan manajemen risiko Company valuation prior to the application of risk management	Pengumpulan data laporan keuangan Collect financial statement data	Valuasi perusahaan Company's valuation
		Perhitungan valuasi Valuation calculation	
		Analisis hasil valuasi Analysis of valuation results	
	Aktivasi tim SKMR SKMR team activation	Sosialisasi konsep manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 Socialization of the risk management concept based on ISO 31000:2018	Evaluasi <i>pre &amp; post-test</i> manajemen risiko Evaluation of pre- & post-test risk management
		Penentuan tingkat <i>maturity</i> manajemen risiko Determination of the risk management maturity level	Analisis hasil <i>post-test</i> Analysis of post-test outcomes
	<i>Kick-off</i> gerakan sadar risiko Risk-conscious movement kick-off	Diskusi penentuan langkah sela bagi skema penerapan manajemen risiko Discussion on the next step for the implementation of risk management schemes	Keseragaman pemahaman di antara anggota mengenai manajemen risiko Uniformity of understanding among members regarding risk management
Survei risiko operasi di setiap unit kerja oleh tim SKMR Operational risk survey in each work unit by the SKMR team		Identifikasi risiko operasi di Perusahaan Identification of operating risks in the Company	
Perancangan infrastruktur manajemen risiko Design of risk management infrastructure	Sosialisasi sistem manajemen risiko Dissemination of risk management system	Pelatihan prosedur manajemen risiko Training in the risk management procedures	Pembekalan manajemen risiko kepada anggota di setiap unit Briefing the members in each unit about the risk management
		Pelatihan proses pengukuran, pemetaan, dan mitigasi risiko kepada tim SKMR Training in the process of measuring, mapping and risk mitigation for the SKMR team	Keseragaman kapasitas yang dimiliki tim SKMR sehingga tercapai sinergi Equalize the capacity of the SKMR team to achieve synergy
	Adopsi manajemen risiko di setiap kebijakan perusahaan Adoption of risk management in every company policy	Analisis dan diskusi untuk proses adopsi manajemen risiko ke dalam setiap kebijakan perusahaan Analysis and discussion on the process of adopting the risk management into each policy of the Company	Setiap kebijakan perusahaan disertai pertimbangan manajemen risiko Every policy of the Company includes the risk management considerations

# SISTEM MANAJEMEN RISIKO

## Risk Management System

Fase Phase	Aktivitas Activities	Langkah Kerja Work Step	Target Outcome Outcome Target
<b>Penerapan manajemen risiko secara penuh di perusahaan</b> <b>Implementation of full risk management in the Company</b>	Aktivasi tim SKMR SKMR team activation	Laporan manajemen risiko semester I 2019 Risk management report for the first semester of 2019	Laporan manajemen risiko Risk management report
		Pelatihan CRMO bagi tim SKMR CRMO training for the SKMR team	Sertifikasi CRMO untuk tim SKMR CRMO certification for the SKMR team
	Sistem manajemen risiko <i>go life</i> The risk management system goes live	Publikasi penerapan manajemen risiko di perusahaan Publication of the risk management application in the Company	Persiapan langkah kerja untuk semester II 2019 Preparation of work steps for semester II 2019
		Evaluasi dan penyempurnaan berkala Periodic evaluations and improvements	Hasil evaluasi dan rencana tindak lanjut penyempurnaan sistem Results of evaluations and further plans for system improvement

Selanjutnya pada tataran pelaksanaan, kebijakan manajemen risiko diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Kebijakan disusun dengan menggunakan pendekatan *Enterprise Risk Management* (ERM) yang diharapkan dapat menjadi titik awal Perseroan dalam membangun persyaratan terkait dengan aktivitas manajemen risiko. ERM memberikan gambaran risiko perusahaan dengan pendekatan *top-down*, di mana peran komitmen dan kepemimpinan manajemen puncak menjadi motor utama bagi pelaksanaan sistem. Pendekatan kedua adalah menyinergikan praktik manajemen risiko fungsional dengan pendekatan *bottom-up*, di mana pada praktik di lapangan, penerapan manajemen risiko juga melibatkan aktivitas dari Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang dibangun mulai dari tingkat operasional hingga manajerial.
2. Kebijakan manajemen risiko akan ditelaah secara berkala dan disesuaikan dengan perubahan yang mempengaruhi kondisi bisnis dan operasi Perseroan, baik yang dipicu oleh faktor internal maupun eksternal.
3. Prosedur Operasional Baku (SOP) dan hal lain yang berhubungan dengan manajemen risiko wajib mengikuti kebijakan manajemen risiko.

In the further implementation level, the risk management policy is directed at these matters:

1. The policy is prepared using the Enterprise Risk Management (ERM) approach which is expected to be the Company's starting point in establishing requirements related to risk management activities. ERM provides a picture of the Company's risks with a top-down approach, where the role of commitment and leadership of top management becomes the main motor for system implementation. The second approach is to synergize the functional risk management practices with a bottom-up approach, where in practice in the field, the application of risk management also involves the activities of the Risk Management Work Unit and the Risk Management Committee which are set up from the operational to the managerial level.
2. The risk management policy will be reviewed periodically and adjusted to changes that affect the Company's business and operating conditions, both triggered by internal and external factors.
3. The Standard Operating Procedure (SOP) and other matters relating to the risk management are required to follow the risk management policy.

Pada Juni 2019, Dewan Komisaris dan Direksi mengeluarkan Kebijakan Manajemen Risiko PT Djakarta LLOYD (Persero) yang memuat komitmen Perseroan untuk menerapkan sistem manajemen risiko dengan tujuan menjamin (1) pelaksanaan misi perusahaan, (2) pencapaian sasaran jangka pendek, menengah dan panjang, serta (3) menggapai visi menjadi perusahaan publik pada 2021.

Penerapan sistem manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi, Komisaris, dan seluruh karyawan sesuai bidang tugas masing-masing. Rincian peran dan tanggung jawab setiap pihak akan ditetapkan melalui panduan manajemen risiko. Direksi akan menjamin ketersediaan sumber daya bagi penerapan sistem secara efektif dan produktif. Atas hal tersebut, Direksi berkonsultasi dengan Komisaris untuk menentukan arah, strategi, dan rencana penerapan sistem manajemen risiko sebagai bagian dari rumusan strategi jangka panjang Perusahaan. Selanjutnya, Komisaris melakukan pantauan atas penerapan sistem secara berkala demi memastikan sistem telah terlaksana secara efektif.

Direksi juga mengeluarkan Kebijakan Sistem Manajemen Terintegrasi yang wajib dipahami, dilaksanakan, dan dibudayakan oleh semua pihak yang terkait dengan proses bisnis. Kebijakan tersebut memuat langkah-langkah strategis untuk menggapai pertumbuhan usaha sebagai berikut.

1. Menerapkan sistem tata kelola yang baik, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sistem manajemen risiko.
2. Mematuhi tata aturan dan perundang-undangan yang berlaku, terkait sistem tata kelola, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, serta sistem manajemen risiko.
3. Membangun lingkungan kerja yang sehat, aman, dan kondusif; mencegah dan meminimalkan kecelakaan kerja; mencegah dan meminimalkan timbulnya penyakit karena proses kerja; serta mencegah aktivitas pencemaran lingkungan.

In June 2019, the Board of Commissioners and Board of Directors issued a Risk Management Policy of PT Djakarta LLOYD (Persero) on the Company's commitment to implementing a risk management system with the aim of guaranteeing (1) the implementation of the Company's mission, (2) achievement of the short, medium and long term targets, and (3) realization the vision of going public in 2021.

The risk management system implementation is the responsibility of the Directors, Commissioners and all employees under their respective areas of duty. Details of the roles and responsibilities of each party will be determined through a risk management manual. The Board of Directors will guarantee the availability of resources for implementing the system effectively and productively. For this reason, the Board of Directors consulted with the Board of Commissioners to determine the direction, strategy and plans for the implementation of the risk management system as part of the Company's long-term strategy formulation. Furthermore, the Commissioners monitor the implementation of the system regularly to ensure that the system has been run effectively.

The Board of Directors also issues an Integrated Management System Policy that must be understood, implemented and cultivated by all parties related to the Company's business processes. The policy contains these following strategic steps to achieve business growth.

1. Implement a good governance system, occupational health and safety management system, risk management system.
2. Comply with the applicable rules and regulations related to governance systems, occupational health and safety management, and risk management systems.
3. Build a healthy, safe and conducive work environment; prevent and minimize workplace accidents; prevent and minimize the onset of disease due to work processes; and prevent activities from polluting environment.

# SISTEM MANAJEMEN RISIKO

## Risk Management System

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mengembangkan kompetensi modal insani berbasis minat, bakat, dan kebutuhan organisasi.</li> <li>5. Mengembangkan semangat perbaikan secara berkesinambungan sebagai jawaban atas tantangan perubahan lingkungan dengan berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Develop human capital competencies based on organizational interests, talents, and needs.</li> <li>5. Develop a spirit of continuous improvement in response to the challenges of environmental change based on the principles of good organizational governance.</li> </ol> |
|--|--|

Adapun pembagian tanggung jawab dalam penerapan Kebijakan Manajemen Risiko adalah:

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Utama bertanggung jawab untuk memastikan Kebijakan Manajemen Risiko berjalan dengan baik dan produktif.</li> <li>2. Kepala Divisi wajib memastikan berjalannya Kebijakan Manajemen Risiko di Divisi masing-masing.</li> <li>3. Sebagai <i>Second Line of Defense</i>, Unit Komite Manajemen Risiko Perusahaan (KMRP) bertanggung jawab atas pengembangan, sosialisasi, pemuktahiran, serta distribusi Kebijakan Manajemen Risiko kepada seluruh karyawan.</li> <li>4. Sebagai <i>First Line of Defense</i>, <i>Risk Owner</i> dan <i>Risk Officer</i> di setiap Divisi/Unit bertanggung jawab untuk membantu Unit KMRP dalam menyosialisasikan Kebijakan Manajemen Risiko kepada seluruh karyawan di area kerja masing-masing dan memastikan penerapannya dengan benar.</li> <li>5. Sebagai <i>Third Line of Defense</i>, Audit Internal bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan Kebijakan Manajemen Risiko serta memastikan keselarasan antara SOP dan Kebijakan yang ada.</li> </ol> | <p>The division of responsibilities in implementing the Risk Management Policy is as following:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The President Director is responsible for ensuring the Risk Management Policy runs well and productively.</li> <li>2. The Head of Division must ensure the implementation of Risk Management Policy in their Division.</li> <li>3. As Second Line of Defense, the Risk Management Unit is responsible for developing, promoting, updating and distributing the Risk Management Policy materials to all employees.</li> <li>4. As First Line of Defense, the Risk Owners and Risk Officers in each Division/Unit are responsible for assisting the KMRP Unit in disseminating the Risk Management Policy to all employees in their respective work areas and ensuring their proper implementation.</li> <li>5. As Third Line of Defense, the Internal Audit Unit is responsible for monitoring the compliance with the Risk Management Policy and ensuring the harmony between SOP and the Policy.</li> </ol> |
|---|--|

### PEMETAAN JENIS RISIKO

Penentuan kriteria risiko dilakukan pada dua dimensi, yakni kriteria kemungkinan terjadinya risiko dan kriteria dampak ketika risiko terjadi. Merujuk pada rancangan sistem, penyusunan kriteria ini dilakukan bersama antara desainer sistem dengan manajemen puncak, satuan pengendalian internal, serta komite manajemen risiko. Secara rinci, kategori risiko yang dipetakan untuk Perseroan meliputi:

### MAPPING OF THE RISK TYPES

The risk criteria are determined by two dimensions, namely the likelihood of the risk to occur and the impact when the risk does occur. Referring to the system design, these criteria are formulated jointly by the system designer and top management, the internal audit unit, and the risk management committee. Specifically, the risk categories mapped by the Company include:



**Pemetaan Risiko**  
**Risk Mapping**

No	Kategori Risiko Risk Category	Meliputi Covering
1	Risiko Tata Kelola Governance Risk	Tata kelola dan etika bisnis Governance and business ethics
2	Risiko Perencanaan Strategis Strategic Planning Risk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanggung jawab dan keberlanjutan perusahaan</li> <li>2. Faktor eksternal</li> <li>3. Perencanaan, proyek, dan manajemen strategi</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corporate responsibility and sustainability</li> <li>2. External factors</li> <li>3. Planning, project and strategy management</li> </ol>
3	Risiko Keuangan Financial Risk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses operasi sistem akuntansi</li> <li>2. Pinjaman perusahaan, likuiditas permodalan, dan pendanaan jangka panjang</li> <li>3. Pengelolaan rencana kerja dan anggaran perusahaan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The process of accounting system operation</li> <li>2. Corporate loans, capital liquidity, and long-term funding</li> <li>3. The management of corporate work plan and budget</li> </ol>
4	Risiko Infrastruktur Operasi Operating Infrastructure Risk	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aset-aset korporasi</li> <li>2. Sumber daya manusia</li> <li>3. Teknologi informasi</li> <li>4. Kejadian yang dipicu oleh pihak eksternal</li> <li>5. Hukum</li> <li>6. Proses manajemen</li> <li>7. Ekspansi jasa</li> <li>8. Penjualan dan komunikasi pemasaran</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corporate assets</li> <li>2. Human resources</li> <li>3. Information technology</li> <li>4. Events triggered by external parties</li> <li>5. Law</li> <li>6. Management process</li> <li>7. Service expansion</li> <li>8. Sales and marketing communication</li> </ol>
5	Risiko Kepatuhan pada kesesuaian dengan SOP yang ditentukan oleh institusi yang berwenang Compliance Risk on the conformity with SOP determined by authorized institution	
6	Risiko Pelaporan Reporting Risk	

# SISTEM MANAJEMEN RISIKO

## Risk Management System

Adapun kriteria dampak bagi penentuan skor risiko perusahaan disusun menggunakan panduan seperti terlihat pada tabel Kriteria Dampak. Penentuan dampak tersebut dilakukan melalui *focus group discussion* antara desainer sistem dengan Direksi dan Dewan Komisaris, menggunakan *benchmark* penentuan kriteria dampak yang diberikan oleh Kementerian BUMN. Namun, mengingat kriteria ini bersifat umum (tidak terfokus pada sektor tertentu), dilakukan upaya penyesuaian dengan karakteristik Perseroan.

The impact criteria for determining the Company's risk score are prepared using guidelines as shown in the Impact Criteria table. The impact criteria are determined through a focus group discussion between the system designer with the Directors and Commissioners, using the benchmark for determining the impact criteria provided by the Ministry of SOEs. However, given these criteria are general (not focused on certain sectors), the Company made adjustment to its characteristics.

### Kriteria Dampak Impact Criteria

Tingkat Level	Dampak Impact	Deskripsi Description
1	Tidak Signifikan Negligible	Dampak yang sangat kecil atau tidak penting atau sangat sedikit perlu perhatian atau bahkan tidak butuh perhatian The impact is so small or insignificant or requires very little attention or even no attention at all
2	Kecil Minor	Tidak terlalu penting atau bernilai, tidak terlalu serius, tidak menyebabkan banyak masalah atau kerusakan Not too important or valuable, not too serious, not causing many problems or a damage
3	Sedang Moderate	Cukup besar atau punya pengaruh untuk mendapat perhatian Big enough or influential to get attention
4	Besar Significant	Sangat buruk, serius, atau kerusakan yang tidak dikehendaki Very bad, serious, or causing unwanted damage
5	Bencana Severe	Dampak yang menggagalkan pencapaian sasaran Impacts that thwart the achievement of goals

Dari kriteria dampak kualitatif di atas, SKMR mengembangkan kriteria dampak dari sisi kuantitatif. Hasil diskusi dengan tim manajemen puncak memutuskan bahwa pada fase pertama penerapan sistem akan menggunakan kriteria dampak kuantitatif keuangan. Atas pemikiran tersebut, dua kriteria dipilih untuk menentukan dampak, yakni pengaruh risiko pada pendapatan usaha dan laba perusahaan. Secara rinci, kriteria dampak kualitatif dapat dilihat pada tabel berikut.

From the qualitative impact criteria above, the SKMR team developed the impact criteria on the quantitative side. After discussing with the top management, the team decided that the first phase of the system implemented would use the quantitative financial impact criteria. Based on this idea, two criteria were chosen to determine the impact, namely the risk effect on the operating revenue and the Company's net profit. In detail, the qualitative impact criteria can be seen in the following table.

Kriteria Dampak Impact Criteria					
Jenis Dampak Impact Type	1	2	3	4	5
	Tidak Signifikan Negligible	Kecil Minor	Sedang Moderate	Besar Significant	Katastropik Catastrophic
Keuangan Finance					
<b>Pendapatan Usaha Operating Revenue</b>	Deviasi ≤ 2% dari target pendapatan Deviation ≤ 2% of revenue target	Deviasi > 2-4% dari target pendapatan Deviation > 2-4% of revenue target	Deviasi > 4-6% dari target pendapatan Deviation > 4-6% of revenue target	Deviasi > 6-8% dari target pendapatan Deviation > 6-8% of revenue target	Deviasi > 8% dari target pendapatan Deviation > 8% of revenue target
<b>Laba Bersih Net Profit</b>	Deviasi ≤ 1% dari target laba bersih Deviation ≤ 1% of net profit target	Deviasi > 1-3% dari target laba bersih Deviation > 1-3% of net profit target	Deviasi > 3-5% dari target laba bersih Deviation > 3-5% of net profit target	Deviasi > 5-9% dari target laba bersih Deviation > 5-9% of net profit target	Deviasi > 9% dari target laba bersih Deviation > 9% of net profit target

Untuk kriteria kemungkinan, kriteria kualitatif dibangun senada dengan kriteria dampak. Terdapat lima tingkat kemungkinan, mulai dari yang berarti sangat kecil (1) sampai sangat besar (5).

For likelihood criteria, the qualitative criteria are formulated in line with the impact criteria. There are five levels of possibilities, ranging from very small (1) to very large (5).

**Kriteria Kemungkinan (Kualitatif)**  
**Likelihood Criteria (Qualitative)**

Tingkat Level	Kemungkinan Possibility	Deskripsi Description
1	Sangat Kecil Rare	Hampir tidak mungkin terjadi Almost unlikely to happen
2	Kecil Unlikely	Kemungkinan kecil terjadi Small chance to happen
3	Sedang Moderate	Kemungkinan terjadi dan tidak terjadi sama The possibility to happen and not to happen is the same
4	Besar Likely	Kemungkinan besar terjadi Big chance to happen
5	Sangat Besar Almost Certain	Hampir pasti terjadi Most likely to happen

Adapun untuk kriteria kemungkinan secara kuantitatif, pihak manajemen menyepakati benchmark yang terdapat di sejumlah literatur, yakni memberikan penilaian 1 (satu) untuk tingkat kejadian sangat kecil dan 5 (lima) untuk kejadian dengan kemungkinan sangat besar. memberikan penilaian 1 (satu) untuk tingkat kejadian sangat kecil dan 5 (lima) untuk kejadian dengan kemungkinan sangat besar.

As for the likelihood quantitative criteria, the management referred to the benchmarks published in a number of literatures, which generally score 1 (one) for a very small event level and 5 (five) for events with a very large likelihood.

# SISTEM MANAJEMEN RISIKO

## Risk Management System

### Kriteria Kemungkinan (Kuantitatif) Possibility Criteria (Quantitative)

Kemungkinan Possibility	Kriteria Criteria	Kode Rating Rating Code	Nilai Rating Rating Score
Rare	0% < P ≤ 20%	SK (sangat kecil)	1
Unlikely	20% < P ≤ 40%	K (kecil)	2
Moderate	40% < P ≤ 60%	S (sedang)	3
Likely	60% < P ≤ 80%	B (besar)	4
Almost Certain	80% < P ≤ 100%	SB (sangat besar)	5

### UPAYA PENGELOLAAN RISIKO

Untuk mendukung pelaksanaan strategi manajemen risiko, Perseroan melakukan langkah taktis berikut:

#### 1. Tahun 2019

- Menyusun dan menyempurnakan kebijakan manajemen risiko terkait tugas Komite Audit, frekuensi dilakukannya kajian evaluasi, frekuensi program *risk awareness*, pertemuan berkala bagi para pemilik risiko dengan Direksi, dan pelaporan kejadian.
- Menyusun kajian berkala terhadap kebijakan manajemen risiko.
- Meningkatkan peran *First Line of Defense* dalam pelaporan tingkat risiko signifikan dan meningkatkan koordinasi antarunit kerja.
- Meningkatkan peran *Second Line of Defense* dalam analisis kebutuhan personel dan penyampaian laporan kejadian.
- Meningkatkan pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris dalam penyampaian secara berkala dari Direksi kepada Dewan Komisaris terkait proses manajemen risiko perusahaan.
- Meningkatkan *awareness* manajemen risiko kepada seluruh karyawan.
- Melakukan *review* terhadap aplikasi pendukung proses manajemen risiko.

#### 2. Tahun 2020

- Meningkatkan peran *First Line of Defense* dalam pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan manajemen risiko.

### RISK MANAGEMENT EFFORTS

The Company implements the risk management strategy in the following tactical steps:

#### 1. In 2019

- Developing and refining the risk management policy related to the Audit Committee's duties, the frequency of evaluation studies, the frequency of risk awareness programs, regular meetings for risk owners with the Board of Directors, and incident reporting.
- Arranging periodic reviews on the risk management policy.
- Increasing the role of the First Line of Defense in reporting significant risk levels and improving the coordination between work units.
- Enhancing the role of the Second Line of Defense in the analysis of personnel needs and the delivery of incident reports.
- Increasing the active supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners in the regular reporting of the Directors to the Commissioners regarding the Company's risk management process.
- Improving the risk management awareness to all employees.
- Reviewing the supporting applications for the risk management process.

#### 2. In 2020

- Enhancing the role of the First Line of Defense in decision making based on risk management considerations.

- b. Meningkatkan peran *Second Line of Defense* dalam pelaporan dan pemantauan *Key Risk Indicators* (jika ada).
- c. Meningkatkan peran *Third Line of Defense* dalam melaksanakan *Risk-Based Internal Audit* dan komunikasi dengan Komite Manajemen Risiko secara berkala.
- d. Mengungkapkan risiko perusahaan di dalam laporan tahunan.
- e. Meningkatkan fungsi manajemen risiko.
- f. Menyertakan keahlian manajemen risiko dalam persyaratan jabatan.
- g. Menyempurnakan *Risk Maturity* berdasarkan ISO 31000-2018.

### 3. Tahun 2021

- a. Mempertimbangkan risiko dalam penyusunan anggaran (*risk-based budgeting*).
- b. Mengembangkan *Stress Test*, termasuk penyusunan *Key Risk Factors*.
- c. Menambahkan modul manajemen risiko proyek di dalam aplikasi manajemen risiko.
- d. Memantau tugas dan tanggung jawab ERM dilakukan secara berkala.
- e. Menetapkan kebijakan penilaian kinerja dalam hal *reward and punishment* terkait manajemen risiko.
- f. Mendukung rencana *initial public offering* Perusahaan.
- g. Mengembangkan *Risk and Control Self Assesment*.

### 4. Tahun 2022

- a. Memfasilitasi peran manajemen risiko untuk pengembangan bisnis.
- b. Menentukan peningkatan tingkat kedewasaan risiko pada siklus yang kedua.
- c. Mengangkat peran manajemen risiko pada tingkat manajemen puncak.

- b. Increasing the role of the Second Line of Defense in reporting and monitoring the Key Risk Indicators (if any).
- c. Enhancing the role of the Third Line of Defense in performing Risk-Based Internal Audit and communication with the Risk Management Committee on a regular basis.
- d. Disclosing the Company's risks in the annual report.
- e. Improving the risk management function.
- f. Including the risk management expertise in job requirements.
- g. Improving the Risk Maturity based on ISO 31000-2018.

### 3. In 2021

- a. Considering the risks in preparing the budget (*risk-based budgeting*).
- b. Developing Stress Tests, including the preparation of Key Risk Factors.
- c. Adding a project risk management module in the risk management application.
- d. Monitoring the duties and responsibilities of ERM regularly.
- e. Issuing a performance appraisal policy in terms of reward and punishment related to the risk management.
- f. Supporting the Company's initial public offering plan.
- g. Developing a Risk and Control Self Assessment.

### 4. In 2022

- a. Facilitating the role of risk management in the business development.
- b. Determining the increase of risk maturity level in the second cycle.
- c. Lifting the role of risk management to the top management level.

# SISTEM MANAJEMEN RISIKO

## Risk Management System

### TINJAUAN EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Proses evaluasi atas produktivitas sistem manajemen risiko akan dijalankan dengan mekanisme berikut:

1. Maturitas praktik manajemen risiko akan dievaluasi secara berkala setiap dua tahun sekali untuk mengetahui efektivitas penerapannya dan peningkatan yang diperlukan agar efektivitasnya semakin meningkat. Beberapa kriteria yang dipertimbangkan untuk menilai efektivitas praktik manajemen risiko antara lain:
  - a. Tata kelola dan organisasi manajemen risiko
  - b. Strategi manajemen risiko
  - c. Aktivitas manajemen risiko
  - d. Pelaporan dan penyampaian dari manajemen risiko
  - e. Sarana dan teknologi terkait manajemen risiko
  - f. Budaya dan kapabilitas manajemen risiko

Evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara berikut:

- a. Internal
  - i. Dilakukan oleh Unit MRP sendiri dengan secara berkala memeriksa proses identifikasi, pengukuran, dan penanganan risiko serta pemantauan dan pelaporan risiko untuk memastikan bahwa proses ERM telah diimplementasikan dengan baik dan tepat waktu.
  - ii. Audit internal dan/atau unit independen lainnya yang ditunjuk oleh Direksi untuk melaksanakan pemantauan terpisah untuk mengevaluasi efektivitas proses ERM dan melaporkan hasil evaluasi bersama dengan masukan dan rekomendasi kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.
- b. Eksternal
  - i. Manajemen memiliki opsi untuk mengikutsertakan pihak independen untuk melakukan penilaian dari implementasi manajemen risiko Perseroan. Penilaian dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan yang ada dalam praktik ERM, sehingga Perseroan dapat melakukan perbaikan dan meningkatkan maturitas praktik ERM.

### REVIEW ON THE RISK MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS

The productivity of the risk management system will be evaluated in a process with these mechanism:

1. The maturity of risk management practices will be evaluated regularly every two years to find out the effectiveness of its application and the improvements needed to increase its effectiveness. The criteria that are considered to be used to assess the effectiveness of risk management practices include:
  - a. Risk management governance and organization
  - b. Risk management strategy
  - c. Risk management activity
  - d. Risk management reporting and communication
  - e. Risk management tools and technology
  - f. Risk management culture and capability

The effectiveness of the risk management application will be evaluated in the following ways:

- a. Internal
  - i. Done by the MRP Unit itself periodically by checking the process of identifying, measuring and handling the risks as well as monitoring and reporting the risks to ensure that the ERM process has been implemented properly and timely.
  - ii. The Internal Audit and/or other independent unit appointed by the Directors monitors separately to evaluate the ERM effectiveness and report the evaluation results together with input and recommendations to the Board of Directors and Risk Management Committee.
- b. External
  - i. The management may opt to include an independent party to assess the implementation of the Company's risk management. The assessment is done to identify the shortcomings in the ERM practices, so that the Company can make improvements and increase the maturity of ERM practices.



- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. Auditor eksternal dapat menyediakan pendapat terhadap kewajaran dari semua jenis risiko. Dengan melaksanakan hal ini, mereka dapat mengkaji manajemen terhadap risiko dan sistem kontrol dan sistem kontrol internal sebagai dasar untuk mempercayai sistem Perseroan dalam menyediakan informasi perusahaan secara akurat.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Setiap proses manajemen risiko sebaiknya didokumentasikan untuk memastikan setiap aktivitas manajemen risiko dapat ditelusuri serta memberikan basis apabila diperlukannya perbaikan dalam metode, sarana, serta proses ERM yang ada.</li> <li>3. Kekurangan-kekurangan utama yang telah teridentifikasi perlu dilaporkan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko. Pelaporan Risiko harus mengikuti prosedur eskalasi yang telah ditetapkan.</li> <li>4. Dalam hal yang berhubungan dengan risiko yang berkaitan dengan strategi Perseroan, proses pemantauan rencana mitigasi dari risiko strategis tersebut dilakukan secara <i>ad-hoc</i>, bergantung kepada urgensi dari inisiatif program strategis yang berkaitan dengan risiko strategis tersebut.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ii. An external auditor can provide an opinion on the reasonableness of all types of risk. Their auditing will review the risk management and control system as well as the internal control system as a basis for trusting the Company's system to provide accurate company information.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Every risk management process should be documented to ensure that each risk management activity can be tracked and provide a basis for improvements when necessary in the existing ERM methods, tools and processes.</li> <li>3. The main identified deficiencies need to be reported to the Board of Directors and the Risk Management Committee. Risk Reporting must follow the established escalation procedures.</li> <li>4. Regarding the risks related to the Company's strategy, the process of monitoring the mitigation plan of the strategic risk is carried out on an ad hoc basis, depending on the urgency of the strategic program initiatives related to the strategic risks.</li> </ul> |
|---|---|

**PENANGANAN RISIKO**

Proses penanganan risiko di Perseroan diawali dengan mengidentifikasi pilihan aktivitas penanganan risiko yang dapat dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat dampak dan/atau kemungkinan terjadinya risiko tersebut, dilanjutkan dengan menentukan *person-in-charge* (PIC) sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan rencana mitigasi. Berikut mekanisme selengkapnya:

- 1. *Risk Owner* bertanggung jawab untuk membuat rencana mitigasi beserta pilihan penanganan risiko-risiko yang akan dipindahkan (*transfer*) dan dikurangi (*reduce*). Rencana mitigasi yang telah dirumuskan bersama dengan proses ERA perlu dilaporkan kepada Unit KMRP untuk dikaji dan ditinjau.

**RISK MITIGATION**

The risk management process in the Company begins by identifying the choice of risk management activities that can reduce the level of impact and/or the likelihood of the risks, followed by determining the person-in-charge (PIC) as the one who is responsible for implementing the mitigation plan. The more complete mechanism is as follows:

- 1. The Risk Owner is responsible for making mitigation plan along with options for handling risks that will be transferred and reduced. The mitigation plan that has been formulated along with the ERA process needs to be reported to the KMRP Unit to be reviewed and studied.

# SISTEM MANAJEMEN RISIKO

## Risk Management System

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Untuk risiko yang memiliki <i>exposure</i> signifikan maka akan dipantau setiap triwulan, sedangkan risiko yang memiliki <i>exposure</i> tinggi akan dipantau perkembangannya setiap semester.</li> <li>3. Unit KMRP mengkaji dan meninjau rencana mitigasi yang dilaporkan oleh <i>Risk Owner</i>. Rencana mitigasi yang telah dikaji kemudian dilaporkan kepada Direksi untuk ditinjau kembali.</li> <li>4. <i>Risk Owner</i> bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana mitigasi dan melaporkannya kepada Unit KMRP.</li> <li>5. Setiap <i>Risk Owner</i> dibantu oleh <i>Risk Officer</i> bertanggung jawab untuk memastikan eksekusi rencana mitigasi (menangani dan mengelola risiko) serta melaporkannya kepada Unit KMRP.</li> <li>6. Jika Implementasi tidak sejalan dengan rencana mitigasi, <i>Risk Owner</i> dan <i>Risk Officer</i> sebaiknya berdiskusi, mengembangkan, dan/atau memperbarui rencana mitigasi untuk memastikan tingkat <i>exposure</i> risiko masih berada pada tingkat <i>appetite</i> dan <i>risk tolerance</i> Perseroan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>2. For the risks with significant exposure, they will be monitored quarterly, while the risks with high exposure will be monitored every semester.</li> <li>3. The KMRP Unit reviews and studies the mitigation plan reported by the Risk Owner. Then the studied mitigation plan is forwarded to the Board of Directors for further review.</li> <li>4. The Risk Owner is responsible for implementing the mitigation plan and reporting it to the KMRP Unit.</li> <li>5. Each Risk Owner is assisted by a Risk Officer responsible for ensuring the implementation of mitigation plan (handling and managing the risks) and reporting it to the KMRP Unit.</li> <li>6. If the implementation is not in line with the mitigation plan, the Risk Owner and Risk Officer should discuss, develop, and/or update the mitigation plan to ensure the level of risk exposure is still at the level of appetite and risk tolerance of the Company.</li> </ul> |
|---|--|

Adapun opsi penanganan risiko yang dapat diterapkan oleh Perseroan sebagai berikut:

The risk mitigation options that can be implemented by the Company are as follows:

Opsi Penanganan Risiko Risk Mitigation Options	Penjelasan Description
<b>Menerima Risiko</b> <b>Accept</b>	Menjaga tingkat risiko yang ada saat ini dengan tidak mengambil tindakan apapun. Pilihan ini sebaiknya dipilih apabila risiko dinilai tidak signifikan bagi Perseroan dan disebabkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Maintain the current level of risk by not taking any action. This choice should be chosen if the risk is considered insignificant for the Company and is caused by a higher authority.
<b>Transfer Risiko</b> <b>Transfer</b>	Memindahkan risiko kepada pihak ketiga yang independen (contoh: asuransi) dengan biaya ekonomis yang wajar di bawah perjanjian hukum. Transfer a risk to an independent third party (for example: insurance) at a reasonable economic cost under a legal agreement.
<b>Menghindari Risiko</b> <b>Avoid</b>	Menghindari eksposur terhadap kemungkinan terjadinya risiko di masa depan (contoh: berhenti terlibat dalam aktivitas yang berpotensi terpapar akan risiko tersebut). Opsi ini dapat dipilih untuk risiko yang dampaknya sangat signifikan, tidak dapat ditoleransi, dan tidak dapat diterima oleh Perseroan. Avoiding exposure to possible risks in the future (for example: stopping engaging in activities that are potentially exposed to those risks). This option can be chosen for the risks whose impacts are very significant, cannot be tolerated, and cannot be accepted by the Company.

<p><b>Mengurangi Risiko</b> <b>Reduce</b></p>	<p>Mengimplementasikan strategi yang dapat mengurangi risiko sampai tingkat yang dapat diterima dengan fokus kepada mengurangi tingkat dan dampak kemungkinan terjadi (contoh: membuat rencana mitigasi yang dapat memperbaiki kontrol atau proses yang sudah ada).</p> <p>Implement a strategy that can reduce a risk to an acceptable level with a focus on reducing the level of impacts and likelihood to occur (for example: making a mitigation plan that can improve the existing controls or processes).</p>
---	--

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

### Internal Control System

Pengawasan internal dirancang dan dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan anggota manajemen lainnya, serta seluruh insan Perusahaan yang ditujukan untuk memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan atas tercapainya efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan/peraturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) pada BUMN Pasal 26.

Dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit berkewajiban untuk:

1. Menetapkan dan menyusun rencana serta pengawasan untuk rancangan SPI.
2. Menelaah hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian internal pada tingkat entitas/korporasi.
3. Menelaah hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian internal pada tingkat operasional/aktivitas.
4. Menelaah *internal control report*.
5. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan SPI maupun KAP.
6. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur reuiu yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan Perusahaan, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast*, dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada pemegang saham.

Internal Audit is a process designed and run by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other members of the management, as well as the Company's personnel, aiming in providing confidence to stakeholders in achieving operational effectiveness and efficiency, financial reporting reliability, and compliance with laws and regulations. This explanation is in line with the Ministry of State-Owned Enterprise Regulation Number: PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance/GCG in State-Owned Enterprises Article 26.

In evaluating the effectiveness of the Internal control system, the Board of Commissioners assisted by the Audit Committee has the obligations to:

1. Determine and prepare plans and supervision for SPI plan.
2. Reviewing the evaluation result of the effectiveness of internal control at the entity/corporate level.
3. Reviewing the evaluation result of the effectiveness of internal control at operational/activity level.
4. Reviewing the internal control report.
5. Assessing the implementation of activities and the audit result performed by the SPI and KAP.
6. Ensuring the satisfactory of review procedures for information issued by the Company, including brochures, periodic financial statements, projections/*forecast*, and other financial information submitted to the shareholders.

# SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

## Internal Control System

Sementara itu, Dewan Direksi bertugas menetapkan kebijakan SPI yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Kebijakan SPI harus diimplementasikan secara efektif untuk mencapai tujuan Perusahaan. Dalam memastikan fungsi SPI berjalan efektif, Direksi dibantu oleh Internal Audit untuk memberikan pernyataan tentang tingkat kecukupan pengendalian internal perusahaan pada level operasional dan entitas.

Direksi juga bertugas menerbitkan laporan tentang tingkat kecukupan pengendalian internal pada akhir tahun yang berisikan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai, serta efektivitas struktur pengendalian internal. Direksi menetapkan mekanisme untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga yang menjalankannya.

Adapun Satuan Pengawas Internal (SPI) bertugas memastikan bahwa sistem pengendalian Perusahaan telah memadai, bekerja secara efisien dan ekonomis, serta berfungsi mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Pengendalian internal itu sendiri dirancang untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan Perseroan yang meliputi efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum, peraturan perundangan, dan ketentuan yang berlaku.

### KESESUAIAN DENGAN COSO

Sesuai kerangka sistem pengendalian internal yang diakui secara internasional menurut Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO), terdapat lima komponen penunjang efektivitas pengendalian internal, yakni:

1. Lingkungan pengendalian internal: Fondasi di antara seluruh komponen pengendalian yang merefleksikan komitmen dan tanggung jawab manajemen puncak.
2. Penilaian risiko: Perusahaan harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko, baik dari eksternal maupun internal, yang relevan dalam pencapaian tujuannya.

Meanwhile, the Board of Directors has the duty of determining an effective company SPI policy to secure company investment and assets. Company SPI's policy must be implemented effectively to achieve company objectives. In confirming SPI functions effectively, the Board of Directors is assisted by the Internal Auditor in providing statements about the company internal control adequacy at operational and entity level.

The Board of Directors has the duty to issue an internal control report about the adequacy of internal control at the end of the year, which also consists of statements that the management is responsible for preparing and maintaining internal control structure and adequate financial statement procedures and internal control structure effectiveness. The Board of Directors also prepares the mechanism to maintain compliance with applicable laws and regulations and agreements with third parties running the operations.

The Internal Audit Unit (SPI) has to ensure that the Company's control system is adequate, works efficiently and economically, and functions to achieve the desired goals and objectives. The internal control itself is designed to provide sufficient confidence in making the Company's objectives, including the operational effectiveness and efficiency, the reliability of financial reporting, and compliance with laws, regulations, and applicable regulations.

### COMPLIANCE WITH COSO

Following the framework of an internationally recognized internal control system by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), five components are supporting the effectiveness of internal control, namely:

1. Internal control environment: The foundation among all control components that reflect the commitment and responsibility of top management.
2. Risk assessment: The company must identify and analyze risks, both external and internal, relevant in achieving its objectives.

3. Aktivitas pengendalian: Kebijakan dan prosedur yang dapat memberikan keyakinan kepada manajemen dalam mengambil tindakan sesuai risiko yang dihadapi.
  4. Informasi dan komunikasi: Informasi terkait pemilihan sistem informasi yang relevan dan kualitas informasi, sedangkan komunikasi meliputi pemahaman setiap personel atas tanggung jawabnya dalam sistem pengendalian internal.
  5. Pemantauan: Kegiatan pengawasan secara berkesinambungan untuk menentukan kualitas kinerja sistem yang meliputi pengawasan yang terus berlangsung, evaluasi terpisah, dan pelaporan atas berbagai kekurangan yang terjadi.
3. Control activities: Policies and procedures that can reassure the management in taking action according to the risks encountered.
  4. Information and communication: Information related to the selection of relevant information systems and the quality of information, while communication includes understanding each personnel for their responsibilities in the internal control system.
  5. Monitoring: Monitoring activities on an ongoing basis to determine the quality of system performance which includes continuous monitoring, separate evaluations, and reporting of various deficiencies.

#### EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA 2019

Efektivitas pengendalian internal Perseroan pada 2019 tercermin dari hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan kode etik dan penerapan nilai-nilai budaya "KTKDPT".
  2. Restrukturisasi organisasi sesuai dengan kebutuhan Perseroan.
  3. Pembagian tugas dan wewenang pekerjaan di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, unit kerja, dan strategic business unit.
  4. Penetapan sistem manajemen kinerja melalui *key performance indicators* yang terukur dan terarah, baik di tingkat korporat, unit kerja, dan individu.
  5. Penyempurnaan kebijakan manajemen risiko dan peningkatan *awareness* mengenai manajemen risiko kepada seluruh karyawan.
  6. Implementasi sistem pelaporan pelanggaran dan pelaporan gratifikasi.
  7. Penggunaan sistem teknologi informasi untuk menunjang proses bisnis Perseroan.
  8. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
  9. Penyampaian komunikasi kebijakan Perseroan secara tertulis ataupun langsung.
  10. Pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian internal.
1. The implementation of the code of ethics and the application of cultural values "KTKDPT".
  2. Organizational restructuring following the needs of the Company.
  3. The division of duties and authority of work at the Board of Commissioners, Directors, work units, and strategic business units.
  4. Determination of performance management systems through measurable and targeted key performance indicators, both at the corporate level, work units, and individuals.
  5. Improving risk management policies and increasing awareness regarding risk management to all employees.
  6. Implementation of the whistleblowing system and reporting gratuities.
  7. Use of information technology systems to support the Company's business processes.
  8. Implementation of Collective Labor Agreements.
  9. Submission of Company policy communications in writing or direct.
  10. Monitoring and evaluation of the effectiveness of internal control.

#### EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN 2019

The effectiveness of the Company's internal control in 2019 is reflected in these following matters:

## SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

### Internal Control System

Pada 2019, Perseroan telah mengimplementasikan sistem pengendalian internal secara memadai, efektif, dan efisien. Berikut ini adalah hasil evaluasi dan monitoring tindak lanjut rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk perbaikan dan penyempurnaan atas sistem dan kebijakan.

#### 1. Hasil Audit BPK

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) belum selesai, namun temuan pemeriksaan telah disampaikan kepada Perusahaan dan telah ditanggapi melalui surat Nomor A.002/PG.1003.03/DIRUT/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019.

#### 2. Rekomendasi Auditor Eksternal (KAP Djoko, Sidik & Indra)

Tidak ada kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas hasil audit KAP tahun buku 2019.

In 2019, the Company implemented an adequate, effective, and efficient internal control system. The following are the evaluation results and the follow-up recommendations' monitoring from the Internal Audit Unit (SPI) for the improvement and completion of the system and policies.

#### 1. BPK Audit Results

The audit results of the Audit Board of Indonesia (BPK) regarding State Capital Participation (PMN) have not yet been completed, but the audit findings have been submitted to the Company and have been responded to through the letter No. A.002/PG.1003.03/DIRUT/XII/ 2019 dated December 9, 2019.

#### 2. External Auditor Recommendations (KAP Djoko, Sidik & Indra)

There were no follow-up monitoring activities on the recommendations of the KAP (Public Accountant Office) audit for the fiscal year 2019.

## TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

### Information Technology Governance

Penerapan teknologi informasi dalam suatu perusahaan kini menjadi salah satu cara untuk memenangkan persaingan. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, perusahaan dapat mengambil keputusan lebih cepat dan akurat, sekaligus mendorong proses bisnis lebih efektif dan efisien. Sejauh ini, Perusahaan telah mengembangkan sejumlah sistem IT untuk mendukung kinerja bisnis, meliputi:

The application of information technology in a company nowadays has become a way to win the competition. With integrated information systems, company can make decisions more quickly and accurately, while encouraging business processes more effectively and efficiently. So far, the Company has developed several IT systems to support business performance, including:





1. *Helpdesk*, terkait dengan *review* dan *update* beberapa piranti lunak penting, seperti Windows, Antivirus, dan pengembangan Office Support.
2. Situs web, menyajikan portal media yang berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara Perusahaan dan para pemangku kepentingan, termasuk menghadirkan keterbukaan informasi kepada publik di alamat [www.djakartalloyd.co.id](http://www.djakartalloyd.co.id).
3. *Software Development*, terdiri atas sistem logistik *online* yang menunjang sinergi multimoda dan memberikan kepastian dalam pola distribusi, serta sistem absensi karyawan yang terintegrasi dengan *payroll*.
4. Jaringan dan infrastruktur, dilakukan untuk peremajaan mikrotik, *server*, *switch*, telepon, dan WiFi *checking*.
5. Enterprise Resource Planning (ERP) dalam program kerja keuangan dan akuntansi

1. Helpdesk, related to the review and update of several essential software, such as Windows, Antivirus, and Office Support development.
2. Website, presents a media portal as a communication bridge between the Company and its stakeholders, including performing information disclosure to the public at [www.djakartalloyd.co.id](http://www.djakartalloyd.co.id).
3. Software Development, which consists of an online logistics system that supports multimodal synergy and provides certainty in distribution patterns, as well as employee attendance systems that are integrated with payroll.
4. Networking and Infrastructure, which carried out for micro rejuvenation, servers, switches, telephones, and WiFi checking.
5. Enterprise Resource Planning (ERP) in finance and accounting work program.

## PERKARA PENTING

### Legal Issues

Sampai akhir tahun buku 2019, Perseroan menghadapi sejumlah perkara penting berupa gugatan perdata sebagai berikut:

Until the end of the 2019 fiscal year, the Company faced several legal issues in the form of civil lawsuits as follows:

No.	Perkara Penting Legal Issues	Jumlah Total		
		Perdata Civil	Pidana Criminal	Hubungan Industrial Industrial Relations
1	Telah selesai (telah memiliki kekuatan hukum yang tetap) Completed (has fixed legal force)	1	0	0
2	Dalam proses penyelesaian In the process of completion	2	0	0
<b>Jumlah Total</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Detail Perkara Case Detail

No.	Pokok Perkara	Principal Case	Nilai Nominal Tuntutan dan Status Penyelesaian Nominal of Demands and Status Settlement	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan dan Sanksi Administrasi Impact on the Company and Administrative Sanctions
1	<b>Kantor Pusat</b> <b>Gugatan Perdata Wanprestasi oleh PT Mentari Sejati Perkasa</b> Perseroan sebagai Tergugat dan PT Mentari Sejati Perkasa sebagai Penggugat dengan nomor register 1002/Pdt.G/2018/PN Sby tanggal 19 Oktober 2018. Penggugat mengklaim bahwa Tergugat melakukan wanprestasi terkait perjanjian sewa-menyewa kontainer, di mana tempat penyewaan kontainer tersebar di daerah Jakarta, Luwuk, Ternate, Lembar, Gorontalo, Baubau, Tobelo, Makassar, dan Badas yang lambat laun jumlahnya semakin banyak, sehingga memakan lahan/tempat.	<b>Head Office</b> <b>Civil Lawsuit for Performance Failure Filed by PT Mentari Sejati Perkasa</b> The Company was the Defendant and PT Mentari Sejati Perkasa was the Plaintiff in the case registered at number 1002/Pdt.G/2018/PN Sby dated October 19, 2018. The Plaintiff sued the Defendant for performance failure in the container rental agreement, of which the rental containers were scattering in Jakarta, Luwuk, Ternate, Lembar, Gorontalo, Baubau, Tobelo, Makassar, and Badas, which were getting bigger and bigger in number, thus consuming more and more land/places.	Penggugat memohon pengadilan mengadili perkara agar ada penyelesaian secara hukum dengan memberikan persetujuan lelang umum kontainer yang hasilnya akan dipotong biaya sewa lahan mulai dari tahun 2009 hingga saat ini sebesar Rp12.500.000.000 atau Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan Tergugat segera mengambil kontainer yang disewakan kepada Penggugat dan membayar sewa lahan sebesar Rp12.500.000.000. Apabila ada sisanya hasil lelang dikembalikan kepada Tergugat, apabila hasil lelang nilainya kurang dari Rp12.500.000.000 akan ditagihkan kembali kepada Tergugat.	Tidak memengaruhi kondisi keuangan Perusahaan. Did not affect the Company's financial condition.  Status penyelesaian: Selesai. Settlement status: Completed.  Tidak ada sanksi administrasi. There were no administrative sanctions.

No.	Pokok Perkara	Principal Case	Nilai Nominal Tuntutan dan Status Penyelesaian Nominal of Demands and Status Settlement	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan dan Sanksi Administrasi Impact on the Company and Administrative Sanctions
	<p>Tergugat tidak kunjung mengambilnya dengan alasan tidak memiliki tempat penampungan kontainer. Pada 2009-2018, terdapat sekitar 639 kontainer di tempat Penggugat yang belum diambil oleh Tergugat dan memakan sewa biaya lahan sebesar Rp12.500.000.000.</p>	<p>The Defendant did not take the containers, reasoning it did not have a container shelter. In the period of 2009-2018, there were 639 containers at the Plaintiff's place that had not been taken by the Defendant and generated a total parking charge of Rp12,500,000,000.</p>	<p>Subsequently, the Plaintiff requested the court to settle the case by giving approval to a public auction of the containers, of which the proceeds would be deducted for parking charge amounting to Rp12,500,000,000 or the Surabaya District Court ordered the Defendant to immediately collect the containers and paid the parking charge of Rp12,500,000,000. The remainder of the proceeds after deduction would be given to the Defendant, but if the auction proceeds were less than Rp12,500,000,000, the difference will be billed to the Defendant.</p>	
2	<p><b>Kantor Pusat</b> <b>Gugatan Perdata Wanprestasi oleh PT ASL Shipyards Indonesia</b> Perseroan sebagai Tergugat dan PT ASL Shipyards Indonesia sebagai Penggugat dengan nomor register 240/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst. tanggal 3 Mei 2017. Penggugat mengklaim bahwa PT Djakarta Lloyd melakukan wanprestasi terkait perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Docking tertanggal 10 Juni 2011. Berdasarkan perjanjian tersebut, Penggugat telah sepakat untuk melakukan pekerjaan <i>docking</i> atau perbaikan atas lima buah kapal dan di sisi lain, Tergugat telah sepakat untuk membayar biaya <i>docking</i> dan perbaikan kapal-kapal tersebut kepada Penggugat.</p>	<p><b>Head Office</b> <b>Default Civil Lawsuit by PT ASL Shipyards Indonesia</b> The Company was the Defendant and PT ASL Shipyards Indonesia was the Plaintiff in the case registered at number 240/Pdt.G/2017/PN Jkt. Pst. dated May 3, 2017. The Plaintiff claimed against PT Djakarta Lloyd for default in the Docking Work Implementation Agreement dated June 10, 2011. Based on the agreement, the Plaintiff agreed to perform docking work or repairs on 5 (five) vessels and on the other hand, the Defendant agreed to pay the docking and repair costs of these vessels to the Plaintiff</p>	<p>Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat mengadili dalam pokok perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat PT ASL Shipyards Indonesia tersebut untuk sebagian. 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi). The Central Jakarta District Court Special Class 1A held the trial with verdicts: 1. Granting the claim of PT ASL Shipyards Indonesia Plaintiff in part. 2. Stating that the Defendant has committed a breach of contract (default).</p>	<p>Status penyelesaian: Dalam proses penyelesaian. Settlement status: In the process of completion.</p>

# PERKARA PENTING

## Legal Issues

No.	Pokok Perkara	Principal Case	Nilai Nominal Tuntutan dan Status Penyelesaian Nominal of Demands and Status Settlement	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan dan Sanksi Administrasi Impact on the Company and Administrative Sanctions
2	<b>Kantor Pusat</b> <b>Gugatan Perdata</b> <b>Wanprestasi oleh PT ASL</b> <b>Shipyards Indonesia</b>	<b>Head Office</b> <b>Default Civil Lawsuit by PT</b> <b>ASL Shipyards Indonesia</b>	<p>3. Menghukum Tergugat untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membayar tagihan pertama yang mencakup biaya pekerjaan dan biaya <i>wharfage</i> periode 23 Juni 2011 hingga 20 Juni 2012 sebesar Rp24.802.007.</li> <li>• Membayar tagihan kedua yang mencakup biaya pemeliharaan periode 1 Juli 2012-31 Desember 2014 dan biaya <i>wharfage</i> periode 21 Juni 2012-31 Desember 2014 sebesar Rp7.532.915.</li> <li>• Membayar tagihan ketiga yang mencakup biaya pemeliharaan dan biaya <i>wharfage</i> periode 1 Januari 2015-31 Oktober 2015 sebesar Rp2.315.426.330.</li> </ul> <p>3. Giving penalty to the Defendant by:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paying the first bill of the work and <i>wharfage</i> costs for the period from June 23, 2011 to June 20, 2012 amounting to Rp24,802,007.</li> <li>• Paying the second bill of the maintenance costs for the period from July 1, 2012 to December 31, 2014 and the <i>wharfage</i> fee for the period from June 21, 2012 to December 31, 2014 amounting to Rp7,532,915.</li> <li>• Paying the third bill of the maintenance and <i>wharfage</i> costs for the period from January 1, 2015 to October 31, 2015 amounting to Rp2,315,426,330.</li> </ul>	

No.	Pokok Perkara	Principal Case	Nilai Nominal Tuntutan dan Status Penyelesaian Nominal of Demands and Status Settlement	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan dan Sanksi Administrasi Impact on the Company and Administrative Sanctions
2	<p><b>Kantor Pusat</b> <b>Gugatan Perdata Wanprestasi oleh PT ASL Shipyards Indonesia</b></p>	<p><b>Head Office</b> <b>Default Civil Lawsuit by PT ASL Shipyards Indonesia</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membayar tagihan keempat: biaya pemeliharaan dan biaya <i>wharfage</i> periode 1 November 2015-31 Desember 2016 sebesar Rp2.567.721.540.</li> <li>• Menghukum Tergugat untuk membayar penggantian biaya <i>wharfage</i> sebesar Rp3.764.200 per hari sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan KM MH Thamrin meninggalkan galangan kapal Penggugat.</li> <li>• Paying the fourth bill of the maintenance and wharfage costs for the period from November 1, 2015 to December 31, 2016 of Rp2,567,721,540.</li> <li>• Paying the wharfage reimbursement of Rp3,764,200 per day from January 1, 2017 until KM MH Thamrin leaves the Plaintiff's shipyard.</li> </ul> <p>4. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran biaya pekerjaan sebesar 0,1 persen (promil) per hari kepada Penggugat hingga Tergugat melunasi secara penuh kepada Penggugat.</p> <p>5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.</p> <p>4. Giving penalty to the Defendant by paying the penalty of late payment in the amount of 0.1 percent (permille) per day to the Plaintiff until the Defendant makes full payment to the Plaintiff.</p> <p>5. Declining the Plaintiffs' suit for the rest and other than.</p>	

# PERKARA PENTING

## Legal Issues

No.	Pokok Perkara	Principal Case	Nilai Nominal Tuntutan dan Status Penyelesaian Nominal of Demands and Status Settlement	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan dan Sanksi Administrasi Impact on the Company and Administrative Sanctions
3	<p><b>Kantor Pusat</b></p> <p><b>Gugatan Perdata Wanprestasi oleh Ny. Najoo Pangemanan, H.M. Toha Tjakra Amidjaja, Theresia Pudjiati, NilaSavitri, Sjambudiarti Amir, Ir. Samuel J Muskitta, dan G.P.H. Hehuwat</b></p> <p>PT Karsindo Utama sebagai Tergugat I, Perseroan sebagai Tergugat II, Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Tergugat III, Marion Silitonga selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Tergugat IV, Dewi Tenty Septy Artiany selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Turut Tergugat I, Kementerian BUMN RI sebagai Turut Tergugat II, dan Kementerian Keuangan RI sebagai Turut Tergugat III melawan Ny. Najoo Pangemanan, H.M. Toha Tjakra Amidjaja, Theresia Pudjiati, Nila Savitri, Sjambudiarti Amir, Ir. Samuel J. Muskitta, G.P.H. Hehuwat sebagai Para Penggugat.</p>	<p><b>Head Office</b></p> <p><b>Default Civil Lawsuit Filed by Mrs. Najoo Pangemanan, H.M. Toha Tjakra Amidjaja, Theresia Pudjiati, NilaSavitri, Sjambudiarti Amir, Ir. Samuel J Muskitta, and G.P.H. Hehuwat</b></p> <p>PT Karsindo Utama as Defendant I, the Company as Defendant II, Head of the National Land Agency as Defendant III, Notary and Land Deed Making Official Marion Silitonga as Defendant IV, Notary and Land Deed Making Official Dewi Tenty Septy Artiany as Co-Defendant I, Ministry of State Owned Enterprises as Co-Defendant II, and Ministry of Finance of the Republic of Indonesia as Co-Defendant III were sued by Mrs. Najoo Pangemanan, H.M. Toha Tjakra Amidjaja, Theresia Pudjiati, Nila Savitri, Sjambudiarti Amir, Ir. Samuel J. Muskitta, G.P.H. Hehuwat, hereinafter referred to as Plaintiffs.</p>	<p>Gugatan ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor register: 385/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brnt tanggal 16 Juni 2017. Para Penggugat mengklaim bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp14.120.000.000 secara tanggung renteng dan kerugian immateriil sebesar Rp7.000.000.000 secara tanggung renteng.</p> <p>This lawsuit was registered at the Registrar of West Jakarta District Court Number: 385/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Brnt on June 16, 2017. The Plaintiffs claimed that the Defendants committed acts against the law and demanded the Defendants I, II, III, IV to jointly pay material loss of Rp14,120,000,000 and immaterial loss of Rp7,000,000,000.</p>	<p>Status penyelesaian: Dalam proses penyelesaian.</p> <p>Settlement status: In the process of completion.</p>

### Permasalahan Hukum yang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Pada 2019, tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

### Permasalahan Hukum yang Dihadapi Anak Perusahaan

Pada 2019, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi anak perusahaan.

### Legal Issues Faced by The Serving Board of Commissioners and Board of Directors

In 2019, no legal issues were being faced by the serving Board of Commissioners and Board of Directors.

### Legal Issues Faced by The Subsidiary

In 2019, no legal issues are being faced by subsidiary.



# AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

## Access to the Company Data and Information

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, DJAKARTA LLOYD menyediakan dua saluran pengungkapan informasi berupa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan situs perusahaan. Kedua kanal tersebut menyajikan berbagai informasi terkait aktivitas dan kinerja Perusahaan secara jelas dan transparan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat.

RUPS merupakan sarana penyampaian informasi mengenai kondisi Perusahaan kepada para pemegang saham yang dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun. Pelaksanaan RUPS memungkinkan pemegang saham untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memerlukan persetujuan pemegang saham.

Di samping itu, Perusahaan juga memperbarui informasi pada situs [www.djakartalloyd.co.id](http://www.djakartalloyd.co.id) secara berkala yang terdiri atas:

1. Informasi umum tentang DJAKARTA LLOYD meliputi profil perusahaan; profil Komisaris, Direksi, dan pejabat *vice president*; visi dan misi; struktur organisasi; nilai-nilai perusahaan; serta daftar kontak.
2. Informasi tentang kegiatan usaha Perusahaan meliputi pelayaran, logistik, keagenan kapal, dan bongkar muat.
3. Publikasi berita perkembangan bisnis dan kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan; siaran pers; pengumuman penting; serta undangan pengadaan barang dan jasa.
4. Alur permohonan informasi terkait layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
5. Informasi tentang *Good Corporate Governance* (GCG) antara lain terkait penerapan prinsip-prinsip GCG, penilaian penerapan GCG, dan pedoman sistem pelaporan pelanggaran.
6. Laporan tahunan dan ikhtisar keuangan.

### Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor

In accordance with the mandate of Law Number 14 Year 2008 regarding Disclosure of Public Information, DJAKARTA LLOYD provides two channels of information disclosure in the form of General Meeting of Shareholders (GMS) and the Company's website. The two channels present various information related to the Company's activities and performance clearly and transparently to stakeholders and the public.

GMS is a means of delivering information about the condition of the Company to shareholders which is held at least once a year. The implementation of the GMS enables the shareholders to participate in the making of decisions that require shareholder approval.

In addition, the Company also regularly updates the information on its website [www.djakartalloyd.co.id](http://www.djakartalloyd.co.id) consisting of:

1. General information about DJAKARTA LLOYD, covering the company profile; Board of Commissioners, Board of Directors, and vice president profiles; vision and mission; organizational structure; company values; and contact directory.
2. Information about the Company's business activities which includes shipping, ship agency, logistics, and stevedoring.
3. Publication of corporate news (among others business developments and corporate social responsibility activities); press releases; important announcements; and procurement invitations.
4. The flow of information requests on the Public Information Disclosure (KIP) service.
5. Information about Good Corporate Governance (GCG), including GCG implementation, GCG assessment, and whistleblowing system guidelines.
6. Annual report and financial statement.

### Information and Documentation Management Officer

Pursuant to the Government Regulation Number 61 of 2010 and Information Commission Regulation

# AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

## Access to the Company Data and Information

1 Tahun 2010, DJAKARTA LLOYD membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Fungsi ini dikelola oleh Sekretaris Perusahaan.

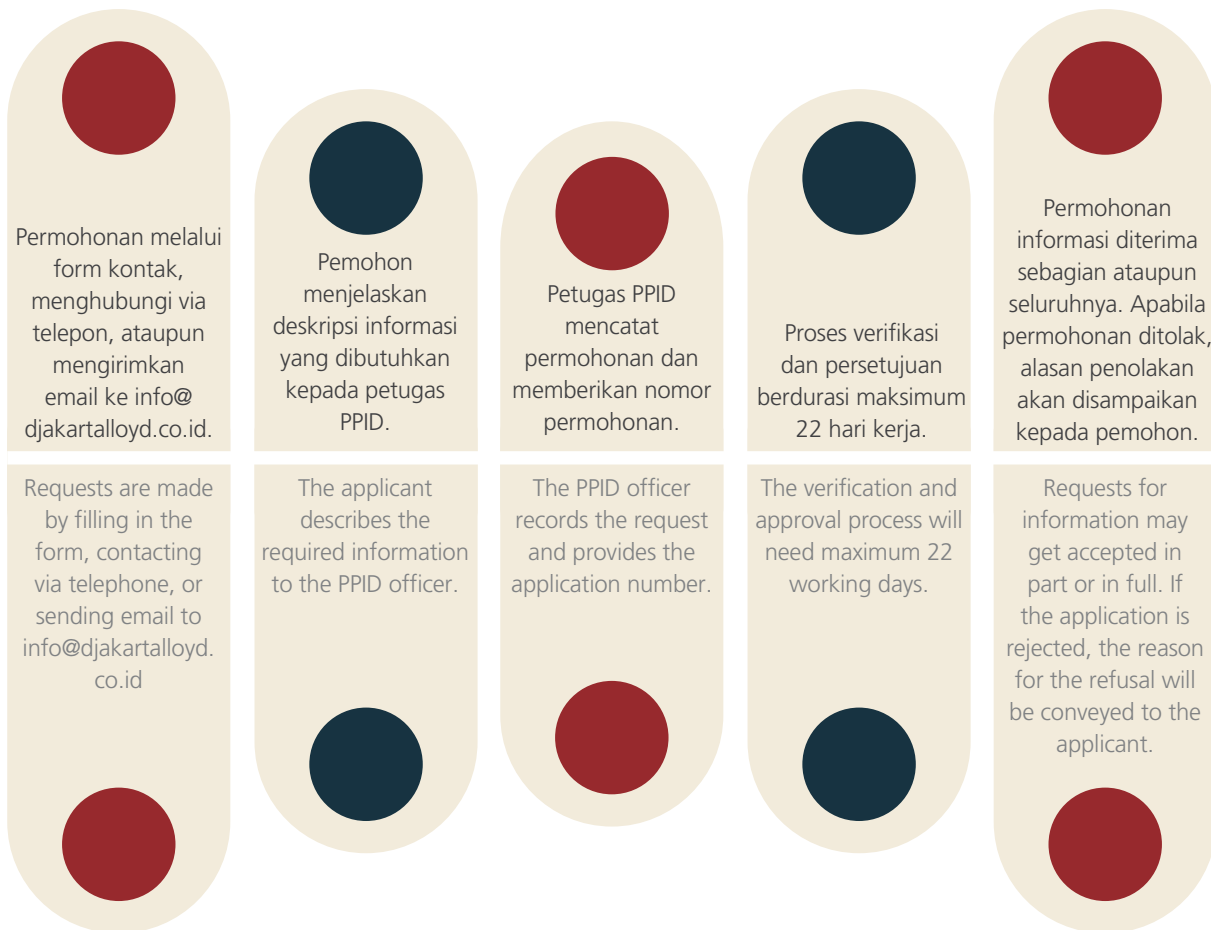
Number 1 Year 2010, DJAKARTA LLOYD established an Information Management and Documentation Officer (PPID) responsible for the storage, documentation, provision, and/or information services in public bodies. This function is managed by the Corporate Secretary.

### Alur Permohonan Informasi

Pengelolaan perusahaan tidak terlepas dari kepatuhan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, disertai dengan menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Hal ini berdampak pada kredibilitas perusahaan dan kepercayaan para pemangku kepentingan, yang turut berkontribusi terhadap implementasi GCG dan keberlanjutan bisnis.

### Information Request Flow

The management of the Company must be done not only by complying with the legislation, but also upholding the norms and ethical values. The impact is on the Company's credibility and the trust of stakeholders, which in turn contributes to the implementation of GCG and the sustainability of the Company's business.



Catatan :  
Perusahaan akan menyampaikan secara tertulis jika terdapat biaya untuk permohonan informasi publik.

Note:  
The Company will notify in writing whenever there is a fee for a public information requested.



Analisis dan Pembahasan Manajemen  
Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan  
Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan  
Corporate Social Responsibility

# KODE ETIK

## Code of Conduct

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 032.7/KEP/DIRUT/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pedoman Good Corporate Governance PT Djakarta Lloyd (Persero), Perseroan telah menetapkan Pedoman Perilaku Perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi GCG, bersama dengan *Code of Corporate Governance*, Pedoman *Whistleblowing System*, dan *Board Manual*.

Adapun Pedoman Perilaku Perusahaan tersebut terdiri atas tiga bagian sebagai berikut.

1. Etika Bisnis Perusahaan, merupakan penjelasan tentang bagaimana Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis bersikap, beretika, dan bertindak dalam upaya menyeimbangkan kepentingan Perusahaan dengan pemangku kepentingan sesuai prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai korporasi yang sehat dan tetap menjaga profitabilitas Perusahaan. Bagian ini meliputi unsur-unsur sebagai berikut.
  - a. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
  - b. Pemberian dan penerimaan hadiah atau gratifikasi, suap, dan lainnya.
  - c. Kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup (K3LH).
  - d. Pemberian kesempatan yang sama kepada pegawai untuk mendapatkan penugasan, promosi, dan pemberhentian kerja
  - e. Etika yang terkait dengan pemangku kepentingan (hubungan dengan pegawai, pelanggan/konsumen, mitra kerja, kreditor, masyarakat dan lingkungan sekitar, pemerintah, pemegang saham, pesaing, serta media massa)
  - f. Standar etika jajaran manajemen dan pegawai (perilaku atasan terhadap bawahan dan sebaliknya, perilaku sebagai rekan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual)
  - g. Integritas laporan keuangan

According to the Board of Directors' Decree Number 032.7/KEP/DIRUT/X/2018 dated October 30, 2018, concerning the Good Corporate Governance Guidelines of PT Djakarta Lloyd (Persero), the Company has established Code of Conduct as an integral part of GCG implementation, along with the Code of Corporate Governance, Whistleblowing System Guidelines, and Board Manual.

The Company's Code of Conduct of comprises three parts as following.

1. Corporate Business Ethics is an explanation of how the Company as a business entity behaves ethically, and acts in an effort to balance the interests of the Company with the interests of Stakeholders in accordance with GCG principles and healthy corporate values while maintaining the Company profitability. This section includes the following components.
  - a. Compliance with laws and regulations.
  - b. Rules in giving and receiving gifts or gratuities, bribes, and others.
  - c. Care for occupational health and safety and the environment (K3LH).
  - d. Provide equal opportunities to employees to get assignments, promotions, and employment termination
  - e. Ethics related to Stakeholders (relationship with DJAKARTA LLOYD employees, customers/ consumers, business partners, creditors, the surrounding community and environment, government, shareholders, competitors, and mass media)
  - f. Ethical Standards for management and employee (superior behavior towards subordinates and vice versa, behavior as coworkers, and intellectual property rights)
  - g. Financial statement integrity



2. Etika Perilaku Insan Perusahaan, meliputi etika yang harus dipatuhi oleh setiap insan Perusahaan di seluruh level organisasi, baik dalam menjalankan tugas-tugas internal dan di luar Perusahaan antara lain terkait:
    - a. komitmen insan Perusahaan;
    - b. menjaga nama baik Perusahaan;
    - c. menjaga hubungan baik antarinsan Perusahaan;
    - d. melindungi informasi Perusahaan;
    - e. pengelolaan data Perusahaan dan penyusunan laporan;
    - f. menjaga dan menggunakan aset Perusahaan
    - g. menjaga K3LH;
    - h. memberi dan/atau menerima hadiah, jamuan, hiburan, dan donasi;
    - i. benturan kepentingan; serta
    - j. aktivitas politik
  3. Penegakan dan Pelaporan, meliputi mekanisme pelaporan pelanggaran dan saksi terkait:
    - a. Komitmen Kode Etik (*Code of Conduct/CoC*)  
 Seluruh pegawai wajib menandatangani "Pernyataan Kepatuhan" sebagai komitmen untuk melaksanakan CoC yang terus diperbarui setiap tahun. Dalam hal ini, seluruh pejabat Perusahaan berperan sebagai teladan bagi subordinatnya dan Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya "Pernyataan Kepatuhan" bagi seluruh pegawai.
    - b. Sosialisasi dan internalisasi  
 Sebagai wujud penyebaran CoC kepada karyawan, Perusahaan melaksanakan sosialisasi dan internalisasi sehingga CoC dapat dipahami dan diimplementasikan dengan penuh tanggung jawab, sekaligus memberikan pengertian bahwa CoC merupakan bagian tidak terpisahkan dari praktik bisnis dan penilaian kinerja pegawai.
    - c. Mekanisme pelaporan pelanggaran
      - Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan, pegawai wajib melaporkannya kepada Tim Pengelola Whistleblowing System (TPWBS) yang ditetapkan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Company's Personnel Behavioral Ethics, including ethics that must be obeyed by every person of the Company, both in carrying out internal and external duties of the Company, including but not limited to:
    - a. commitment as the Company's personnel;
    - b. maintain the good name of the Company;
    - c. maintain the good relationship with the fellow employees;
    - d. protect the Company information;
    - e. company data management and report preparation;
    - f. maintain and use of the Company's assets
    - g. maintain K3LH;
    - h. rules in giving and/or accepting gifts, meals, entertainment and donations;
    - i. conflict of interests; and
    - j. political activities
  3. Enforcement and Reporting includes mechanisms for reporting violations and witnesses related to:
    - a. Commitment to the Code of Conduct (CoC)  
 All employees are required to sign the "Statement of Compliance" as a form of commitment to implement the CoC that is continually updated every year. In this regard, all Company officials act as role models for their subordinates and the Board of Directors is responsible for the implementation of the "Statement of Compliance" for all employees.
    - b. Socialization and internalization  
 As a manifestation of the dissemination of CoC to employees, the Company conducts socialization and internalization so that the CoC can be understood and implemented with full responsibility, while providing understanding that the CoC is an inseparable part of the business practices and performance appraisal of all employees.
    - c. Violation Reporting Mechanism
      - If a violation or deviation occurs, the witness must report it to the Whistleblowing System Management Team (TPWBS) established by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

# KODE ETIK

## Code of Conduct

- Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik, disertai bukti, dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah.
  - Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat, disertai dengan bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.
  - Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- d. Sanksi atas Pelanggaran
- Sanksi pelanggaran diputuskan oleh Direksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, setelah mendapat laporan atas pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.
  - Direksi memberikan arahan atas tindakan pembinaan, sanksi disiplin, dan/atau tindakan lainnya, serta pencegahan yang dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.
  - Sanksi bagi Direksi yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Dewan Komisaris.
  - Sanksi bagi Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham.
  - Bila mitra kerja atau pemangku kepentingan yang melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.
- Reporting must be done in good faith, accompanied by evidence, and is not a personal complaint or based on bad will/slander.
  - The reporter must state his/her identity clearly on the report prepared, along with relevant supporting evidence. The recipient of the report must keep the reporter's identity a secret.
  - The Company is obliged to follow up on every report received in accordance with applicable procedures and mechanisms.
- d. Sanctions for Violations
- Sanctions of the violation are decided by the Board of Directors according to the level of violation, after received the report and proved true the violation to have been committed by the perpetrator.
  - The Board of Directors provides directions for coaching actions, disciplinary sanctions, and/or other actions, as well as prevention carried out by direct superiors in their respective environments.
  - Sanctions for Directors who commit violations are decided by the Board of Commissioners.
  - Sanctions for Commissioners who commit violations are decided by the Shareholders.
  - If work partners or stakeholders commit a violation, this will be subject to the provisions stated in the contract. If it is related to a crime, it can be forwarded to the authorities.

### JUMLAH PELANGGARAN KODE ETIK TAHUN 2019

Sepanjang tahun buku 2019, tidak terjadi pelanggaran kode etik di lingkungan DJAKARTA LLOYD.

### NUMBER OF CODE OF CONDUCT VIOLATION IN 2019

In the 2019 fiscal year, there was no violation of the code of conduct in the DJAKARTA LLOYD's work environment.



# SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

## Whistleblowing System

Salah satu penyebab maraknya perilaku bisnis yang menyimpang dan kecurangan adalah ketiadaan pedoman dan perlindungan bagi pegawai dalam menciptakan iklim kerja yang baik dan terawasi. Untuk mencegah praktik tersebut, diperlukan pengendalian internal berupa sistem pelaporan pelanggaran (WBS) yang juga menjadi upaya penerapan prinsip kewajaran dan kesetaraan bagi seluruh pemangku kepentingan.

One of the causes of rampant deviant business behaviors and violations is the absence of guidelines and protection for employees in creating a good and supervised work climate. To prevent such ill practices from happening, internal control is needed in the form of a whistleblowing system (WBS) which is also an effort to apply the principle of fairness and equality for all stakeholders.

### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012
6. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang Terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan
7. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-13/MBU/10/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian BUMN
8. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S-MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN
9. Akta Pendirian PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor 192 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 Desember 1976

### LEGAL BASIS

1. Law Number 19 of 2003 concerning SOEs
2. Law Number 13 of 2006 regarding Protection of Witnesses and Victims, with the latest amendment on the Law Number 31 of 2014 on the Amendment to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims
3. Law Number 40 of 2007 about Limited Liability Companies
4. Law Number 14 of 2008 pertaining to Disclosure of Public Information
5. The State Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs as amended by State Minister of SOEs Regulation Number PER-09/MBU/2012
6. The Minister of SOEs Regulation No. PER-19/MBU/2012 dated December 27, 2012 regarding Guidelines for Postponing Business Transactions Indicated of Irregularities and/or Fraud
7. The Minister of SOEs Regulation No. PER-13/MBU/10/2015 dated October 8, 2015 about the Guidelines for Management of Reporting System for Alleged Violations in SOEs
8. The Ministry of SOEs Secretary Decree Number SK-16/S-MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs
9. Establishment Deed of PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Number 192 Additional State Gazette of the Republic of Indonesia dated

# SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

## Whistleblowing System

Nomor 99, diubah dengan Akta Notaris H. Zawir Simon, S.H. Nomor 123 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 10 Desember 1988 Nomor 75, diubah dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. Nomor 50 Tambahan Berita Republik Indonesia tanggal 22 Oktober 1999 Nomor 85, diubah dengan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. tanggal 14 Agustus 2008 Nomor 96, diubah dengan Akta Notaris Imas Fatimah S.H. tanggal 7 Mei 2009 Nomor 09.

10. Surat Keputusan Direksi Nomor 035/KEP/DIRUT/VII/2019 tentang Pedoman Whistleblowing System PT Djakarta Lloyd (Persero)

December 10, 1976 Number 99, amended by Notarial Deed H. Zawir Simon, S.H. Number 123 Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia dated December 10, 1988 Number 75, amended by Notarial Deed of Imas Fatimah, S.H. Number 50 Supplement to the Republic of Indonesia News dated October 22, 1999 Number 85, amended by Notarial Deed of Imas Fatimah, S.H. dated August 14, 2008 Number 96, amended by Notarial Deed of Imas Fatimah S.H. dated May 7, 2009 Number 09.

10. The Board of Directors Decree Number 035/KEP/DIRUT/MII/2019 on the Guidelines for Whistleblowing System of PT Djakarta Lloyd (Persero)

### PRINSIP DASAR WBS

Penyampaian laporan WBS yang dilakukan oleh Pelapor harus memberikan informasi, bukti, atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran dan memenuhi unsur-unsur 4W+1H, yakni:

1. Apa dugaan pelanggaran yang diketahui Pelapor
2. Di mana perbuatan pelanggaran itu terjadi?
3. Kapan perbuatan pelanggaran itu dilakukan?
4. Siapa yang diduga melakukan pelanggaran tersebut?
5. Bagaimana perbuatan pelanggaran itu dilakukan?

### ORGANISASI WBS

1. Tim Pengelola WBS (TPWBS), dibentuk dan ditetapkan bersama Direksi dan Dewan Komisaris untuk menyelenggarakan dan mengelola sistem pelaporan dugaan pelanggaran dengan susunan tim yang meliputi unsur berikut:
  - a. Dewan Pengarah: Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
  - b. Tim Pelaksana: Kepala Satuan Pengawas Internal (Ketua) dan Satuan Pengawas Internal (Anggota)
2. Tim Investigasi

### WBS BASIC PRINCIPLES

The submission of a WBS report by a reporter must provide clear information, evidence, or allegations of violations and meet the 4W + 1H elements, namely:

1. What is the alleged violation known by the reporter
2. Where does the violation occur?
3. When does the violation happen?
4. Who is suspected to commit the violation?
5. How is the violation done?

### WBS ORGANIZATION

1. The WBS Management Team (TPWBS) is formed and established by the Board of Directors together with the Board of Commissioners to organize and manage the whistleblowing system with a team structure comprising the following elements:
  - a. Steering Board: Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors
  - b. Implementation Team: Head of the Internal Audit Unit (Chairman) and Internal Audit Unit (Members)
2. Investigation Team

3. Auditor Internal serta pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Direksi untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai
4. Auditor Eksternal yang ditunjuk oleh Pemegang Saham untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai

### LINGKUP PENGADUAN/PELAPORAN

Pengaduan atau pelaporan yang akan ditindaklanjuti oleh TPWBS merupakan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh insan Perseroan dan bersifat merugikan atau berpotensi merugikan Perusahaan, meliputi pelanggaran berikut.

1. Penyalahgunaan dan pemalsuan data dan/atau pembayaran klaim/tagihan.
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan atau kepentingan lain di luar Perusahaan.
3. Pembocoran rahasia Perusahaan.
4. Pemberian gratifikasi kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
5. Penyelewangan uang Perusahaan.
6. Penggelapan aset.
7. Pemerasan.
8. Penipuan.
9. Benturan kepentingan.
10. Pelanggaran etika dan perbuatan asusila.
11. Korupsi.
12. Pencurian.
13. Kecurangan.

### TATA CARA PELAPORAN

1. Setiap Insan DJAKARTA LLOYD atau pihak di luar Perusahaan yang mengetahui terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Insan DJAKARTA LLOYD lainnya wajib melaporkan kepada TPWBS.

3. Internal auditors and other officials appointed by the Board of Directors to investigate the alleged violation committed by employee
4. External Auditor appointed by the Shareholders to investigate the alleged violation committed by employee

### SCOPE OF COMPLAINT/REPORTING

Complaints or reports that will be followed up by TPWBS are acts of violation committed by the Company's personnel and are detrimental or potentially detrimental to the Company, including these violations.

1. Misuse and falsification of data and/or payment of claims/billings.
2. Authority abuse for personal/group interests or other interests outside the Company's.
3. Leaking the Company's secrets.
4. Giving gratuities to other parties that are not in accordance with the Guidelines for Gratification Control.
5. Embezzlement of the Company's money.
6. Asset embezzlement.
7. Blackmail.
8. Fraud.
9. Conflict of interests.
10. Ethical violations and immoral acts.
11. Corruption.
12. Theft.
13. Cheat.

### REPORTING PROCEDURES

1. Every personnel of DJAKARTA LLOYD or outside party who is aware of the alleged violation committed by DJAKARTA LLOYD employee must report to TPWBS.

# SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

## Whistleblowing System

2. Laporan disampaikan secara tertulis dengan menyebutkan identitas Pelapor disertai alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi, serta melampirkan dokumen-dokumen bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dimaksud.
3. Laporan dapat disampaikan langsung kepada Tim Pelaksana TPWBS atau melalui situs Perusahaan, yaitu [www.djakartalloyd.co.id](http://www.djakartalloyd.co.id).
4. Terhadap setiap pelaporan, Perseroan memberikan jaminan kerahasiaan identitas Terlapor selama dugaan pelanggaran ditangani dan belum terbukti.
2. The report shall be submitted in writing stating the identity of the reporter along with the address and telephone number that can be contacted, and attaching evidence documents relating to the alleged violation in question.
3. Report can be submitted directly to the TPWBS Implementation Team or through the Company's website [www.djakartalloyd.co.id](http://www.djakartalloyd.co.id).
4. For each report, the Company guarantees the confidentiality of the reporter's identity during the process of alleged violation handling and has not been proven yet.

### PENANGANAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Sekretariat TPWBS menerima setiap laporan dugaan pelanggaran, memberikan tanda terima laporan kepada Pelapor, serta mencatat laporan tersebut yang memuat nomor urut laporan, tanggal penerimaan, nama Pelapor, nama Terlapor, dan nama Petugas Penerima.
2. Sekretariat TPWBS melakukan verifikasi data terkait identitas Pelapor dan menganalisis pemenuhan unsur 4W+1H dalam laporan sebelum ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana TPWBS. Apabila belum memenuhi, Sekretariat dapat meminta klarifikasi dari Pelapor.
3. Pelaporan dugaan pelanggaran tanpa identitas Pelapor, maka Sekretariat TPWBS melalui Tim Pelaksana TPWBS menyampaikan laporan tersebut kepada Dewan Pengarah untuk mendapat persetujuan tindak lanjut.
4. Setelah melakukan verifikasi dan analisis, Sekretariat TPWBS menyerahkan laporan kepada Tim Pelaksana TPWBS untuk ditindaklanjuti dengan proses penelitian awal dan pembahasan hasil penelitian tersebut dalam rapat Tim Pelaksana TPWBS.
5. Jika hasil penelitian awal memerlukan audit investigasi, maka Tim Pelaksana TPWBS membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Awal kepada Dewan Pengarah, yaitu:
  - a. Pemegang Saham apabila Terlapor adalah Direksi atau Dewan Komisaris; dan

### HANDLING OF ALLEGED VIOLATION REPORTS

1. TPWBS Sekretariat receives every report of alleged violation, gives a report receipt to the reporter, and records the report with serial number, date of receipt, name of the reporter, name of the reported party, and the name of the receiving officer.
2. TPWBS Sekretariat verifies the data of reporter's identity and analyzes the fulfillment of the 4W + 1H elements in the report before being followed up by the TPWBS Implementation Team. If it does not meet, the Sekretariat can request clarification from the reporter.
3. Report of an alleged violation without the identity of reporter will be forwarded by the TPWBS Sekretariat through the TPWBS Implementation Team to the Steering Board for approval to follow up.
4. After conducting verification and analysis, the TPWBS Sekretariat submits a report to the TPWBS Implementation Team to be followed up with the initial research process and discuss the results of the research in the TPWBS Implementation Team meeting.
5. If the initial research results require an investigative audit, the TPWBS Implementation Team prepares and submits the Report on Initial Research Results to the Steering Board of:
  - a. Shareholders if the reported party is a Director or Commissioner; and

- |  |   |
|--|---|
| <p>b. Direksi apabila Terlapor adalah Pegawai.</p> <p>6. Jika hasil penelitian awal tidak memerlukan audit investigasi, maka Tim Pelaksana TPWBS menyerahkan hasil penelitian awal tersebut kepada Sekretariat TPWBS untuk dibuatkan dan disampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti, serta mendokumentasikan surat dimaksud.</p> <p>7. Dalam hal Terlapor adalah Direksi atau Dewan Komisaris, proses investigasi lebih lanjut diserahkan pada Pemegang Saham sesuai mekanisme yang berlaku di Kementerian BUMN, serta dapat menunjuk Auditor Eksternal untuk melakukan investigasi.</p> <p>8. Dalam hal Terlapor adalah Pegawai, proses investigasi dilakukan dengan cara:</p> <p>a. Direksi melakukan pembahasan dan/atau memberikan persetujuan/rekomendasi secara tertulis berupa surat tugas kepada Auditor Internal untuk memulai investigasi.</p> <p>b. Auditor Internal melakukan investigasi dan melaporkan hasil investigasi kepada Direksi</p> <p>c. Direksi melakukan pembahasan laporan hasil investigasi untuk mengambil suatu keputusan.</p> <p>d. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa pelanggaran "Terbukti":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi menyampaikan rekomendasi sanksi kepada Divisi SDM, Umum &amp; IT untuk diproses lebih lanjut.</li> <li>• Divisi SDM, Umum &amp; IT menyampaikan laporan pengenaan sanksi kepada Direksi dan Tim Pelaksana TPWBS.</li> <li>• Tim Pelaksana TPWBS menyampaikan laporan dimaksud kepada Sekretariat untuk didokumentasikan.</li> </ul> <p>e. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa pelanggaran "Tidak Terbukti":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direksi menyampaikan hasil investigasi kepada Tim Pelaksana TPWBS.</li> </ul> | <p>b. The Board of Directors if the reported party is an employee.</p> <p>6. If the results of initial research do not require an investigative audit, the TPWBS Implementation Team shall submit the results to the TPWBS Secretariat to be used in preparing a notice to the reporter to notify that the violation has not been proven, and files the said letter.</p> <p>7. In the case that the reporter is a Director or a Commissioner, the investigation process will be transferred to the Shareholders according to the mechanism prevailing at the Ministry of SOEs, and may appoint an External Auditor to conduct an investigation.</p> <p>8. In the event that the reported party is an employee, the investigation process shall be carried out by:</p> <p>a. The Board of Directors who conducts discussions and/or gives written approval/recommendations in the form of an assignment letter to the Internal Auditor to start the investigation.</p> <p>b. The Internal Auditor who conducts an investigation and reports the investigation outcome to the Board of Directors</p> <p>c. The Board of Directors who discusses the report on the investigation outcome to take a decision.</p> <p>d. If the outcome of the investigation states that the violation is "Proven", then:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The Board of Directors gives sanction recommendations to the HR, General Affairs &amp; IT Division for further processing.</li> <li>• HR, General Affairs &amp; IT Division submit the sanction report to the Board of Directors and TPWBS Implementation Team.</li> <li>• The TPWBS Implementation Team submits the intended report to the Secretariat for documentation.</li> </ul> <p>e. If the outcome of the investigation states that the violation is "Unproven", then:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The Board of Directors submits the investigation outcome to the TPWBS Implementation Team.</li> </ul> |
|--|---|

# SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

## Whistleblowing System

- Tim Pelaksana TPWBS menyampaikan hasil tersebut kepada Sekretariat TPWBS.
  - Sekretariat TPWBS membuat dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pelapor bahwa pelanggaran tidak terbukti dan dianggap selesai, serta mendokumentasikan surat dimaksud.
9. Apabila pelanggaran tidak terbukti dan Pelapor meminta penjelasan terkait hal itu, Tim Pelaksana TPWBS atau Direksi dapat memberikan penjelasan dan/atau tanggapan atas permintaan Pelapor.
- The TPWBS Implementation Team submits the outcome to the TPWBS Secretariat.
  - The TPWBS Secretariat prepares and sends a notification letter to the reporter that the violation has not been proven and is considered to have been completed and files the said letter.
9. If the violation is not proven and the reporter asks for an explanation regarding it, the TPWBS Implementation Team or the Steering Board can provide an explanation and/or response to the reporter's request.

### Pembentukan Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Formation of the WBS Management Team

Terlapor Reported	Anggota Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Member of the WBS Management Team	Ketua Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran Chairman of the WBS Management Team
Karyawan, Department Head Employee, Department Head	Internal Audit dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Direksi Internal Audit and other functionary appointed by the Board of Directors	Internal Audit
Group Head, Division Head Head	Direksi, Internal Audit Board of Directors, Internal Audit	Direktur Utama President Director
Anggota Dewan Komisaris Member of the Board of Commissioners	Direksi, Dewan Komisaris Board of Directors, Board of Commissioners	Direktur Utama President Director
Direksi Board of Directors	Dewan Komisaris, Komite Audit Board of Commissioners, Audit Committee	Komisaris Utama President Commissioner

### PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

1. Perusahaan wajib untuk melindungi Pelapor untuk mendorong keberanian pelapor untuk melaporkan pelanggaran dalam Perusahaan.
2. Perlindungan bagi pelapor mencakup:
  - a. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor dan isi laporan.
  - b. Jaminan keamanan bagi Pelapor terhadap perlakuan yang merugikan, seperti: pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, pemindahan tempat kerja atau mutasi tanpa alasan, pengurangan atau penahanan pembayaran gaji dan

### PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

1. The Company is obliged to protect the whistleblowers to encourage people to report violations within the Company.
2. Protection for reporters includes:
  - a. The confidentiality guarantee of the reporter's identity and the contents of the report.
  - b. Security guarantee for the reporter against adverse treatment, such as: unfair dismissal, demotion, workplace movement or mutations without reason, reduction, or withholding the payment of salary and other benefits,



tunjangan lainnya, intimidasi, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, dan catatan yang merugikan dalam *file* data pribadi.

- c. Jaminan tanpa tekanan dalam memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

intimidation, harassment, or discrimination in all its forms, and adverse records in personal data files.

- c. A guarantee of no pressure in providing information related to alleged violation

### PENGHARGAAN BAGI PELAPOR

Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada Pelapor atas terbuktinya laporan pelanggaran sesuai kebijakan Perusahaan karena dengan adanya laporan tersebut, Perusahaan terhindar dari kerugian, baik secara materi maupun nonmateri. Bentuk penghargaan diserahkan kepada kebijakan Perusahaan, dalam hal ini dapat melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

### REWARD FOR WHISTLEBLOWERS

The Company may give reward to the reporters for proven violation reports according to the Company's policy because with such reports, the Company is protected from losses, both material and non-material. The form of rewards is subject to the Company's policy, in this case involving the Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders.

### SANKSI BAGI PELAPOR YANG MEMBUAT LAPORAN PALSU

Bagi Insan DJAKARTA LLOYD yang mengirimkan laporan palsu atau fitnah atau laporan yang mengandung itikad tidak baik yang justru merugikan Perusahaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan internal Perusahaan, atau dapat dilaporkan kepada penegak hukum.

### SANCTIONS FOR REPORTERS WHO MAKE FALSE REPORTS

For DJAKARTA LLOYD personnel who send false or slanderous reports containing bad intentions which actually harm the Company, may be subject to sanctions in accordance with the Company's internal regulations, or can be reported to the law enforcement.

Bagi pihak di luar Perusahaan yang mengirimkan laporan palsu atau fitnah atau laporan yang mengandung itikad baik yang merugikan Perusahaan, dapat dilaporkan kepada penegak hukum.

For parties outside the Company who send false or defamatory reports containing bad intentions that harm the company, can be reported to the law enforcement.

### PELAKSANAAN WBS TAHUN 2019

Perseroan terus melaksanakan sosialisasi mengenai WBS, baik di situs resmi Perusahaan maupun media internal, disertai evaluasi untuk menilai efektivitas penerapannya diselaraskan dengan kebutuhan Perusahaan dan perubahan peraturan perundang-undangan. Adapun sepanjang tahun 2019, jumlah laporan dugaan pelanggaran yang diterima oleh Sekretariat TPWBS adalah nihil.

### WBS IMPLEMENTATION IN 2019

The Company continues to conduct socialization regarding WBS, both on the Company's official website and internal media, along with evaluations to assess the effectiveness of its implementation in line with the Company's needs and changes in legislation. As for 2019, there were no reports of alleged violations received by the Company.

## KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### Board of Commissioners and Board of Directors Diversity

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi tidak termasuk dalam kebijakan tertulis dalam Perseroan, mengingat pengangkatannya dilakukan oleh Pemegang Saham (Kementerian BUMN RI) sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

Namun demikian, Dewan Komisaris dan Direksi DJAKARTA LLOYD memiliki keanekaragaman usia, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian yang dapat menjadi nilai tambah dalam pengelolaan Perusahaan secara strategis serta pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

The diversity of the Board of Commissioners and the Board of Directors is not included in the written policy of the Company, due to their appointment is carried out by the Shareholders (The Indonesian Ministry of SOEs) following the Minister of SOE Regulation Number PER-02/MBU/02/2015 regarding Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Board of Commissioners Members and Board of Supervisors of SOEs, and the Minister of SOE Regulation Number PER-03/MBU/02/2015 regarding Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of the Board of Directors Members of SOEs.

However, the Board of Commissioners and Directors of DJAKARTA LLOYD have a diversity of ages, educational backgrounds, work experience, and expertise, which can be valuable for managing the Company and conducting their respective duties and functions.

#### Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Diversity

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
<b>Dewan Komisaris Board of Commissioners</b>						
Maryono M. Atmadja <sup>1</sup>	Komisaris Utama President Commissioner	71 tahun years old	Laki-laki Male	Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	Militer Military	Keuangan Finance
Syahril Japarin <sup>1</sup>	Komisaris Independen Independent Commissioner	54 tahun years old	Laki-laki Male	Sarjana Teknik	Industri Infrastruktur Infrastructure Industry	Manajemen Management
Anhar Adel <sup>2</sup>	Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen President Commissioner, also Independent Commissioner	62 tahun years old	Laki-laki Male	Sarjana Administrasi Niaga	Birokrasi Civil Service	Keuangan Finance

Nama Name	Jabatan Position	Usia Age	Jenis Kelamin Gender	Pendidikan Education	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise
<b>Dewan Komisaris Board of Commissioners</b>						
Lambonar O. Silitonga	Komisaris Utama President Commissioner	51 tahun years old	Laki-laki Male	Magister Manajemen Keuangan Magister of Financial Management	Industri Logistik Logistics Industry	Keuangan Finance
M. Yusuf Permana	Komisaris Commissioner	45 tahun years old	Laki-laki Male	Sarjana Ekonomi Bachelor of Economics	Birokrasi Civil Service	Keuangan dan Keprotokolan Finance and Protocol
<b>Direksi Board Of Directors</b>						
Suyoto	Direktur Utama President Director	53 tahun years old	Laki-laki Male	Magister Manajemen Magister of Management	Industri Kepelabuhanan Port Industry	Manajemen Management
Tunggul Pusphita Dani <sup>3</sup>	Direktur Keuangan & SDM Director of Finance & HR	45 tahun years old	Perempuan Female	Sarjana Akuntansi Bachelor of Accounting	Industri Keuangan Financial Industry	Keuangan dan Komunikasi Pemasaran Finance and Marketing Communication
Ofan Sofwan	Direktur Finance, HCM & GA Director of Finance, HCM & GA	54 tahun years old	Laki-laki Male	Magister Manajemen Magister of Management	Industri Telekomunikasi dan Perkebunan Telecommunication and Plantation Industry	Keuangan Finance

**Catatan:**

<sup>1</sup> Menjabat sampai tanggal 29 Mei 2019

<sup>2</sup> Menjabat selama 29 Mei 2019-9 Januari 2020

<sup>3</sup> Menjabat sampai tanggal 24 Januari 2019

**Note:**

<sup>1</sup> Served until May 29, 2019

<sup>2</sup> Served from May 29, 2019 until January 9, 2020

<sup>3</sup> Served until January 24, 2019

## DUKUNGAN ANTIKORUPSI

### Anti-Corruption Support

DJAKARTA LLOYD mendukung sepenuhnya penerapan antikorupsi sesuai dengan instruksi Menteri Negara BUMN Nomor Ins.02/MBU/2007 tentang Pejabat Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan BUMN, seta berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor SE-08/01/10/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan LHKPN setelah diberlakukannya Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan tersebut, Perusahaan memberlakukan aturan bahwa pejabat struktural yang berada satu tingkat di bawah Direksi dan/atau pejabat setingkat Senior Manager yang ditugaskan di perusahaan afiliasi dan/atau perusahaan patungan wajib menyerahkan LHKPN. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 006/KEP/DIRUT/V/2018 tentang Penerapan Wajib LHKPN bagi Pejabat DJAKARTA LLOYD yang berlaku sejak tahun 2018.

Adapun LHKPN disampaikan kepada KPK pada saat pengangkatan sebagai pejabat saat pertama kali menjabat, pengangkatan kembali sebagai pejabat setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, dan berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai pejabat. Selain mengumumkan harta kekayaannya, pejabat terkait juga harus bersedia diperiksa harta kekayaannya pada saat sebelum, selama, dan setelah menjabat.

Penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali (periode 1 Januari-31 Desember), dan paling lambat dilaporkan pada 31 Maret tahun berikutnya atau 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, ataupun berakhirnya jabatan. Apabila tidak melaporkan LHKPN, pejabat terkait dianggap telah menolak untuk menaati perintah Perusahaan dan dapat dikenakan sanksi Pelanggaran Tata Tertib Perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DJAKARTA LLOYD fully supports the implementation of anti-corruption in pursuant to the instruction of the Minister of State Owned Enterprises No. Ins.02/MBU/2007 about State Officials who must submit a statement of their assets of State Officials' Assets Report (LHKPN) within the SOEs environment, also to the Circular Letter of the Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) Number SE-08/01/10/2016 regarding Technical Instructions for Submitting and Management of LHKPN after the enactment of KPK Regulation Number 07 of 2016 on the Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Officials' Assets.

As a form of support for the policies, the Company applies a rule that its structural officials who are one level below the Board of Directors and/or officers at Senior Manager level assigned to affiliated companies and/or joint ventures must submit the LHKPN. This is in accordance with the Board of Directors Decree Number 006/KEP/DIRUT/V/2018 concerning the Implementation of LHKPN Obligations for DJAKARTA LLOYD Officials in force since 2018.

The LHKPN is submitted to the KPK at the time of appointment as an official when he/she first took office, reappointment as an official after the end of his/her previous term of office or retired, and the end of his/her tenure as an official or retired. In addition to announcing their assets, they must also be willing their assets to be inspected before, during and after taking office.

The submission of LHKPN is done periodically once a year (January 1 - December 31 period), and is reported no later than March 31 of the following year or 3 (three) months from the first appointment, re-appointment, or termination of office. If they do not submit the LHKPN, the relevant officials are deemed to have refused to obey the Company's order and may be subject to sanctions in violation of the Company's Code of Conduct in accordance with applicable regulations.



Selain itu, dukungan antikorupsi dalam penerapan GCG juga dituangkan dalam Pedoman Perilaku Perusahaan yang mengatur pola hubungan yang sehat dan beretika di antara seluruh jajaran Perusahaan dan para pemangku kepentingan, salah satunya terkait pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi sebagai berikut.

1. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, kepada pejabat negara atau individu yang mewakili mitra bisnis dan dapat memengaruhi pengambilan keputusan.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan dilarang menerima sesuatu dari mitra bisnis, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk kepentingan apa pun yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

In addition, anti-corruption support in the implementation of GCG is also contained in the Company's Code of Conduct which regulates healthy and ethical patterns of relationships among all levels of the Company's employees and stakeholders, one of which is related to the giving and receiving of gifts and donations as follows.

1. Every member of the Board of Commissioners and the Board of Directors and the Company's employees are prohibited from giving or offering anything, directly or indirectly, to state officials or individuals who represent business partners and can influence decision making.
2. Every member of the Board of Commissioners and the Board of Directors and the Company's employees are prohibited from receiving anything from business partners, directly or indirectly, for any purpose that can influence decision making.







# **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**

## Corporate Social Responsibility

Perseroan memahami bahwa kesuksesan bisnis tidak hanya diukur dari pencapaian keuntungan, tetapi juga ditinjau dari kontribusi Perusahaan dalam membangun keseimbangan antara kepentingan komersial, sosial, dan lingkungan hidup.

The Company understands that business success is not only measured by the achievement of profits, but also in the Company's contribution to building a balance between commercial, social, and environmental interests.



# TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

## Social Responsibility Governance

### LATAR BELAKANG

Kegiatan tanggung jawab sosial (CSR) DJAKARTA LLOYD dirancang dengan tujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, tanpa mengabaikan hak generasi mendatang dalam memperoleh keseimbangan kehidupan sosial (*people*) dan kelestarian lingkungan hidup (*planet*). Kegiatan CSR ini bertumpu pada empat pilar utama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat; peningkatan kepuasan pelanggan; praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; serta pelestarian lingkungan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74 yang mengatur tentang perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan, dan pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran.

### METODE DAN RUANG LINGKUP DUE DILIGENCE TERHADAP DAMPAK SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN DARI AKTIVITAS PERSEROAN

Untuk mendukung keberlanjutan bisnis yang berorientasi pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, DJAKARTA LLOYD terus melaksanakan aktivitas berkelanjutan sebagai tanggung jawab sosial yang memberikan dampak positif dan mengurangi dampak negatif. Perseroan senantiasa memastikan bahwa kegiatan CSR telah memenuhi prinsip berikut.

1. Memenuhi harapan pemangku kepentingan.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan.
3. Konsisten dengan norma perilaku internasional.
4. Terintegrasi ke seluruh kegiatan usaha dan hubungan kerja sama Perseroan.
5. Mendorong perilaku bertanggung jawab pada seluruh bagian organisasi.

### BACKGROUND

The activities in the corporate social responsibility (CSR) program of DJAKARTA LLOYD are designed with the aim of supporting sustainable development, without neglecting the rights of future generations to obtain a balance of social life (*people*) and environmental sustainability (*planet*). This CSR activities are based on four main pillars, namely improving the community welfare; increasing the customer satisfaction; occupational health and safety practices; and environment preservation which refers to the Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, particularly in Article 74 which regulates that companies engaged in the field of natural resources are required to conduct social and environmental responsibility programs that are budgeted and calculated as company costs, and their implementation is carried out with due regard to compliance and fairness.

### METHODS AND SCOPE OF DUE DILIGENCE ON THE SOCIAL, ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

To support the business sustainability that is oriented towards economic, social, and environmental aspects, DJAKARTA LLOYD continues to carry out sustainable activities as a corporate social responsibility that gives positive impacts and minimizes negative impacts. The Company always ensures that its CSR activities meet the following principles.

1. Meet the expectations of the stakeholders.
2. Comply with laws and regulations.
3. Consistent with international norms of behavior.
4. Integrated into all business activities and the Company's cooperative relations.
5. Encourage responsible behavior in all parts of the organization.

Perseroan telah memiliki uji tuntas dari kegiatan tanggung jawab perusahaan yang meliputi:

1. Survei Kepuasan Karyawan
2. Survei Pelanggan
3. Survei Kepuasan Pemasok
4. Focus Group Discussion
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Laporan Manajemen Triwulanan

Perseroan telah menyediakan sarana penyampaian keluhan pelanggan dengan berbagai saluran di Kantor Pusat hingga masing-masing Cabang. Perseroan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan jasa dari perspektif pelanggan dengan survei kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dalam hal ini, survei pelanggan dilakukan oleh pihak ketiga untuk menjaga transparansi, independensi, dan akuntabilitas hasil. Responden yang dipilih adalah pelanggan yang menggunakan layanan jasa kapal, keagenan, dan *customers Tol Laut* yang termasuk dalam kriteria survei.

**PEMANGKU KEPENTINGAN YANG TERDAMPAK ATAU BERPENGARUH PADA DAMPAK DARI KEGIATAN PERSEROAN**

DJAKARTA LLOYD mengidentifikasi pemangku kepentingannya berdasarkan kepentingan dan hubungannya dengan Perseroan, yakni pelanggan, pemegang saham dan investor, karyawan, pemerintah, mitra kerja, media massa, masyarakat, dan asosiasi. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, keterlibatan pemangku kepentingan dapat dilihat pada tabel berikut.

Therefore, the Company applies due diligence to its corporate responsibility activities which include:

1. Employee Satisfaction Survey
2. Customer Satisfaction Survey
3. Supplier Satisfaction Survey
4. Focus Group Discussion
5. Company Work Plan and Budget (RKAP) and Quarterly Management Report

The Company has provided various channels for the customers to file complaints whether at the Head Office and each Branch Office. The Company monitors and evaluates service performance from the perspective of the customers through the customer satisfaction and loyalty survey. The customer survey is conducted by a third party to maintain transparency, independence, and accountability of its outcomes. The selected respondents are customers who use the services of ships, agencies, and customers of Sea Toll program that are included in the survey criteria.

**STAKEHOLDERS AFFECTED OR INFLUENCED BY THE COMPANY'S ACTIVITIES IMPACT**

DJAKARTA LLOYD identifies its stakeholders based on their interests and relationships with the Company, namely customers, shareholders and investors, employees, government, business partners, mass media, the public, and associations. Based on the identification results, the stakeholder involvement can be seen in the following table.

## TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

### Social Responsibility Governance

Pemangku Kepentingan Stakeholder	Metode Pelibatan Involvement Method	Frekuensi Frequency	Topik Topic
Pelanggan Customers	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pertemuan langsung dengan pelanggan</li> <li><i>Morning Coffee</i> di kantor pusat dan masing-masing cabang</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meet with customers face to face</li> <li>Morning Coffee at the head office and each branch</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dua kali dalam seminggu</li> <li>Empat kali dalam satu tahun di kantor pusat dan setiap cabang</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Twice a week</li> <li>Four times a year at the head office and each branch</li> </ol>	Hubungan komersial, <i>customer retention</i> , dan kualitas layanan Commercial relationship, customer retention, and service quality
Pemegang Saham dan Investor Shareholders and Investors	Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	Minimal dua kali pertemuan dalam satu tahun A minimum of two meetings in one year	Dividen, pengembangan usaha, tata kelola, dan manajemen Dividends, business development, governance, and management
Karyawan Employees	Pertemuan dengan Serikat Pekerja Meeting with Employee Union	Minimal empat kali pertemuan dalam satu tahun A minimum of four meetings in one year	Ketenagakerjaan dan kesejahteraan Employment and welfare
Pemerintah Government	Pelaporan kinerja Performance reporting	Dilakukan sepanjang tahun sesuai dengan undangan dari pemerintah terkait Conducted throughout the year following the invitation of relevant institutions	Pengembangan usaha dan investasi Business development and investment
Mitra Kerja Business Partners	Proses operasional Operational process	Sepanjang tahun Year-around	Hubungan komersial Commercial relationship
Media Massa Mass Media	Konferensi pers, siaran pers, dan keterbukaan informasi Press conferences, press releases, and information disclosure	Sepanjang tahun Year-around	Kinerja usaha, tata kelola, dan keterbukaan informasi Business performance, governance, and information disclosure
Masyarakat Public	Penerapan <i>customer service</i> Customer service application	Sepanjang tahun Year-around	Pelaksanaan program Program implementation
Asosiasi Associations	Pertemuan anggota asosiasi Meetings of association members	Minimal empat kali pertemuan dalam satu tahun Minimum of four meetings in one year	Pengembangan industri kepelabuhanan dan peningkatan kerja sama Port industry development and cooperation enhancement

**ISU PENTING SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN TERKAIT DAMPAK KEGIATAN PERSEROAN**

Dalam memaparkan isu-isu, data dan informasi terkini yang relevan dengan hak para pemangku kepentingan, Perseroan melakukan diskusi kelompok terarah kepada para pemangku kepentingan. Adapun isu-isu penting sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terkait dampak kegiatan Perseroan adalah:

**IMPORTANT ISSUES OF SOCIAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL RELATED TO THE COMPANY'S ACTIVITIES IMPACT**

In presenting the latest issues, data and information that are relevant to the rights of stakeholders, the Company conducts focus group discussions with stakeholders. The important social, economic and environmental issues related to the impact of the Company's activities are:

Isu Penting Important Issue	Keterangan Description
Kinerja Ekonomi Economic Performance	Menggambarkan pencapaian dan kinerja Perseroan selama tahun pelaporan. Describe the Company's achievements and performance during the reporting year.
Antikorupsi Anti-Corruption	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan <i>fraud</i> . Describe the Company's commitment to creating a workplace that is clean from fraud.
Kepatuhan Lingkungan Environmental Compliance	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam mewujudkan dalam menjalankan seluruh kegiatan operasi yang berwawasan lingkungan, yaitu menaati peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain terkait dengan lingkungan, pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan, serta perbaikan sistem manajemen lingkungan yang berkelanjutan ( <i>continuous improvement</i> ). Describe the Company's commitment in realizing all operational activities that are environmentally sound, by complying with the laws and regulations and other requirements related to the environment, prevent environmental pollution, and enhance the environmental management system in a sustainable way to make continuous improvement.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Occupational Health and Safety	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam mengendalikan risiko kecelakaan di tempat kerja yang dapat memengaruhi produktivitas. Describe the Company's commitment to controlling the risk of accidents at work that can affect productivity.
Pendidikan dan Pelatihan Education and Training	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam memberikan pelatihan serta peningkatan kompetensi secara merata, aktif, dan berkesinambungan untuk menciptakan sumber daya manusia kompeten, berkualitas, dan berkinerja tinggi. Describe the Company's commitment to provide training as well as increase the competence equally, actively, and continuously to create competent, quality, and high-performing human resources.
Masyarakat Setempat Local Community	Menggambarkan komitmen Perseroan untuk menopang kesejahteraan masyarakat setempat melalui bimbingan ataupun bantuan. Describe the Company's commitment to sustain the welfare of the local community through mentoring or assistance.
Sosial Ekonomi Social Economy	Menggambarkan komitmen Perseroan dalam memberikan kebutuhan pelanggan dan menerapkan program-program yang fokus dan berorientasi pelanggan. Describe the Company's commitment to meet the customers' needs and implement programs that are focused and oriented on the customers.

# TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

## Social Responsibility Governance

### STRATEGI DAN PROGRAM KERJA PERUSAHAAN DALAM MENANGANI ISU-ISU SOSIAL, EKONOMI, DAN LINGKUNGAN

Isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan telah dikelola dengan baik oleh Perseroan dengan dimilikinya rencana kerja dan anggaran yang relevan. Perseroan juga tengah melakukan perencanaan untuk program Kemitraan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di lingkungan Perusahaan dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Upaya tersebut ditujukan untuk menciptakan manfaat bagi Perusahaan dan para pemangku kepentingan. Saat ini, Perseroan menitikberatkan pengelolaan isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Terkait hal ini, Perseroan telah menyalurkan bantuan CSR kepada lima objek bantuan, meliputi:

1. Bantuan kepada Korban Bencana Alam
2. Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan
3. Bantuan Peningkatan Kesehatan
4. Bantuan Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum
5. Bantuan Sarana Ibadah

Sasaran Program CSR adalah masyarakat sekitar Perusahaan dengan sifat bantuan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan tercipta pola hubungan yang harmonis dan bersifat mutualisme yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan usaha dan pengamanan aset Perusahaan.

### TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN YANG MERUPAKAN KEWAJIBAN MAUPUN YANG MELEBIHI KEWAJIBAN

Perseroan juga melakukan *review* terhadap seluruh regulasi terkait isu-isu penting tanggung jawab sosial. Perseroan telah melaksanakan tanggung jawab sosial yang merupakan kewajiban dan yang melebihi kewajiban dengan baik. Peraturan-peraturan yang telah dipatuhi oleh Perseroan sebagai berikut:

### COMPANY'S STRATEGY AND WORK PROGRAM IN DEALING WITH SOCIAL, ECONOMIC, AND ENVIRONMENTAL ISSUES

The social, economic, and environmental issues have been well managed by the Company with relevant work plans and budgets. The Company is also in the midst of planning for the Partnership program and the Partnership and Community Development Program by referring to the Minister of SOEs Regulation Number PER-02/MBU/07/2017 dated 5 July 2017 regarding the Second Amendment to the Minister of SOEs Regulation Number PER-09/MBU/07/2015 on the Partnership Program between SOEs and Small Enterprises and the Community Development Program.

The programs are aimed at creating mutual benefits for the Company and its stakeholders. At present, the Company focuses on managing social, economic, and environmental issues through its Corporate Social Responsibility (CSR) program. In this regard, the Company has distributed CSR assistance to five aid objects, including:

1. Aid for Victims of Natural Disasters
2. Education and/or Training Assistance
3. Aid for Health Improvement
4. Aid for the Development of Public Facilities and Infrastructure
5. Aid for Religious Facilities

The target of the CSR Program is the community around the Company with the nature of assistance for community empowerment, so it is expected to create a harmonious and mutualistic relationship, as well as conducive for business activities continuity and the Company's assets security.

### CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY THAT COVERS THE OBLIGATIONS AND BEYOND OBLIGATIONS

The Company also studies all regulations related to important issues of social responsibility. The social responsibility programs carried out by the Company have well covered the obligations and even exceeding them. The regulations that have been complied with by the Company are as follows:



Kegiatan Activity	Dasar Hukum Legal Basis
Ketenagakerjaan Employment	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Law Number 13 of 2003 about Manpower
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 1. Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Health and Safety 2. Republic of Indonesia Government Regulation Number 50 Year 2012 regarding the Implementation of Occupational Health and Safety Management System
Lingkungan Hidup Environment	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Law Number 19 of 2003 concerning SOEs, Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, and Law Number 32 of 2009 pertaining to Environmental Protection and Management
Program Antikorupsi Anti-Corruption Program	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility for Community Social Development

### IMPLEMENTASI PROGRAM

Sepanjang 2019, Perseroan menyelenggarakan kegiatan CSR pada ranah pengembangan sosial kemasyarakatan sebagai berikut:

### PROGRAM IMPLEMENTATION

Throughout 2019, the Company organized CSR activities in community social development as follows:

No.	Waktu Time	Tempat Venue	Nama Kegiatan Activity Name	Uraian Kegiatan Activity Description	Jumlah Dana Total Fund
1	2 Februari 2019 February 2, 2019	Desa Cikujang, Tanjung Lesung, Banten Cikujang Village, Tanjung Lesung, Banten	Millennials DJAKARTA LLOYD Peduli Banten DJAKARTA LLOYD Millennials Care for Banten	Karyawan muda Perseroan mengadakan <i>sharing moment</i> bersama anak-anak penyintas tsunami Banten, sekaligus menyerahkan bantuan berupa perlengkapan sekolah, <i>snack</i> , serta uang tunai. The Company's young employees held a sharing moment with the children of the Banten tsunami survivors, also giving school supplies, snacks, and cash.	Rp87.950.250

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility for Community Social Development

No.	Waktu Time	Tempat Venue	Nama Kegiatan Activity Name	Uraian Kegiatan Activity Description	Jumlah Dana Total Fund
2	April 2019	Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Bekasi Regency, West Java	Bantuan CSR STIT Nusantara STIT Nusantara's CSR Assistance	Perseroan menunjukkan kepedulian terhadap dunia pendidikan dengan memberikan bantuan penyediaan sarana dan prasarana di STIT Nusantara. The Company showed its concern for education world by providing assistance in the form of facilities and infrastructure at STIT Nusantara.	Rp10.000.000
3	April 2019	Kota Ciamis, Jawa Barat Ciamis City, West Java	Padat Karya Tunai Cash Labor Intensive	Perseroan membagikan 1.000 paket sembako murah dan 500 paket alat kebersihan. The Company distributed 1,000 staple food packages and 500 cleaning equipment packages.	Rp40.000.000
4	Mei 2019 May 2019	Kota Padang, Sumatra Barat Padang City, West Sumatra	Bantuan CSR Surau Al-Quran Rumah Anak Sholeh CSR Aid for Islamic Boarding School Surau Al-Quran Rumah Anak Sholeh	Perseroan memberikan dana bantuan untuk biaya operasional santri dan pengadaan sarana prasarana di Surau Al-Quran Rumah Anak Sholeh. The Company provided funds for operational costs of students and the provision of facilities for Surau Al-Quran Rumah Anak Sholeh.	Rp10.000.000
5	Mei 2019 May 2019	Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah Cilacap Regency, Central Java	Bantuan CSR Kementerian BUMN Ministry of SOEs' CSR Assistance	Perseroan melakukan renovasi dua musala SD dan bedah lima unit rumah di Desa Gombolharjo. The Company renovated two praying houses of elementary schools and reconstructed five housing units in Gombolharjo Village.	Rp75.000.000
6	31 Mei 2019 May 31, 2019	DKI Jakarta - Jawa Tengah DKI Jakarta - Central Java	Mudik Gratis Bareng DJAKARTA LLOYD Free Homecoming Trip with DJAKARTA LLOYD	Perseroan memberangkatkan 600 pemudik menggunakan 11 armada bus dengan tujuan Kota Cilacap, Yogyakarta, dan Solo. The Company sent off 600 homecoming travelers for free using 11 buses to the cities of Cilacap, Yogyakarta and Solo.	Rp370.000.000

No.	Waktu Time	Tempat Venue	Nama Kegiatan Activity Name	Uraian Kegiatan Activity Description	Jumlah Dana Total Fund
7	Juni 2019 June 2019	Lembang, Kabupaten Bandung Barat Lembang, West Bandung Regency	Bantuan CSR SNO Membuat Taman Baca SNO CSR Assistance for Establishing a Friendly Library	Perseroan memberikan dana bantuan untuk pembuatan taman baca bagi masyarakat sekitar di Desa Kayuambon, Jalan Maribaya Nomor 94, Lembang. The Company provided a funding for the construction of a friendly library for the surrounding community in Kayuambon Village, Jalan Maribaya Number 94, Lembang.	Rp25.000.000
8	Agustus 2019 August 2019	Wilayah Timur Indonesia Eastern Region of Indonesia	Donatur Hewan Kurban Donation of Sacrificial Animals	Perseroan menjadi donatur hewan kurban untuk Yayasan Insan Cerdas Sejahtera yang disalurkan ke sejumlah daerah pelosok dan tertinggal, khususnya di wilayah timur Indonesia. The Company donated sacrificial animals to the Insan Cerdas Sejahtera Foundation, which then were distributed to a number of remote and disadvantaged regions, particularly in eastern Indonesia.	Rp25.000.000
9	Agustus 2019 August 2019	PT Dharma Lautan Nusantara, Tanjung Priok	Donatur Hewan Kurban Donation of Sacrificial Animals	Perseroan menjadi donatur hewan kurban melalui anak perusahaan. The Company donated sacrificial animals through its subsidiary.	Rp26.000.000
10	Agustus 2019 August 2019	Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo Gorontalo City, Gorontalo Province	Kegiatan BUMN Hadir untuk Negeri Activity of SOEs Present for the Nation	Perseroan melaksanakan program BUMN Hadir untuk Negeri melalui kegiatan "Siswa Mengenal Nusantara". The Company implemented the SOEs Present for the Nation program through the activity of "Students Getting to Know the Archipelago".	Rp100.000.000

Dari program-program di atas, terdapat dua kegiatan yang merupakan wujud sinergi dengan BUMN lain dan Perusahaan aktif terlibat sejak 2018, yakni:

- **Siswa Mengenal Nusantara**

Kegiatan yang termasuk dalam program "BUMN Hadir untuk Negeri" ini bertujuan mengedukasi pelajar SMA/SMK/SLB mengenai BUMN, sekaligus menanamkan kebanggaan dan cinta Tanah Air. Pada tahun 2019, 47 siswa asal Jawa Timur

Among the above programs, there are two activities held as a synergy with other SOEs and the Company has been actively involved since 2018, namely:

- **Students Getting to Know the Archipelago**

This activity included in the "SOEs are Present for the Nation" program aiming to educate the high school/vocational/special needs students about SOEs, as well as instilling pride and love for the country. In 2019, 47 students from East Java

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

### Corporate Social Responsibility for Community Social Development

dikirim ke Gorontalo dan 27 siswa asal Gorontalo dikirim ke Surabaya, Jawa Timur selama delapan hari untuk saling mempelajari kebudayaan daerah. Dalam pelaksanaan tahun ini, Perseroan menjadi Co-PIC kegiatan di Gorontalo yang bekerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

were sent to Gorontalo and 27 students from Gorontalo were sent to Surabaya, East Java for eight days to learn about each other's local cultures. In this year implementation, the Company became a Co-PIC of the activities in Gorontalo in collaboration with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), and PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

- **Mudik Gratis Bareng DJAKARTA LLOYD**

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Perseroan memberangkatkan 600 pemudik dengan 11 armada bus dari Jakarta menuju Cilacap, Yogyakarta, dan Solo. Kegiatan ini termasuk dalam program "Mudik Gratis Bersama BUMN 2019" yang melibatkan 104 BUMN dan mengakomodasi lebih dari 250 ribu penumpang kembali ke kampung halamannya

- **Free Homecoming Trip with DJAKARTA LLOYD**

Approaching Eid al-Fitr, the Company sent off 600 homecoming travelers for free using 11 buses from Jakarta to Cilacap, Yogyakarta and Solo. This activity is included in the "Free Homecoming Trip with SOEs 2019" program involving 104 SOEs and accommodating more than 250 thousand travelers going to their hometowns.

Pada 2019, Perusahaan tidak melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sehingga tidak ada informasi mengenai mitra usaha binaan Perusahaan dan program pengembangan komunitas.

In 2019, the Company did not carry out the Partnership and Community Development Program (PKBL), so there was no information about the Company's fostered partners and community development program.



# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN

## Corporate Social Responsibility for the Environment

Dalam menjalankan setiap kegiatan operasional, Perseroan berkomitmen untuk melestarikan dan melindungi lingkungan darat, laut, maupun udara dari pencemaran. Sesuai dengan kebijakan laut, Perusahaan juga menerapkan kebijakan tumpahan nol (*zero spills*) untuk menghilangkan kemungkinan pencemaran pada sumber dengan memastikan standar keselamatan yang tinggi. Kebijakan ini pun harus dilakukan oleh setiap karyawan agar komitmen Perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Kebijakan Manajemen Lingkungan yang dikeluarkan oleh Perusahaan pada 20 Juli 2017, DJAKARTA LLOYD mengimbau setiap pelaksana kerja untuk memerhatikan sejumlah hal yang berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan, antara lain:

- Minyak, termasuk minyak dan produk-produk terkait yang dicatat sebagai kargo bahan bakar dan limbah berminyak.
- Bahan kimia, gas, cair, dan zat cair berbahaya dicatat sebagai kargo curah dan limbah kimia.
- Barang berbahaya, termasuk yang diangkut dalam jumlah besar dengan berbagai kemasan yang mungkin berbahaya bagi lingkungan jika tumpah atau hilang.
- Sampah, termasuk limbah bio dan *non-biodegradable*.
- *Air ballast*, termasuk kemungkinan organisme air atau patogen yang terbawa air diangkut dalam *air ballast* kapal.
- Cat *anti-fouling* beserta dampaknya terhadap kulit ikan dan kehidupan air lainnya.
- Emisi uap kargo, termasuk efek toksin terhadap kesehatan, iklim, dan *plantlife*.
- Emisi gas buang, termasuk gas dan partikel hidrokarbon yang tidak terbakar dan berkontribusi terhadap asap, hujan asam, dan efek rumah kaca.
- Bahan perusak lapisan ozon, termasuk CFC dan gas halon yang berdampak pemanasan global.
- Tingkat kebisingan dari mesin dan pengaruhnya terhadap awak kapal serta penduduk lokal.

In running every operational activity, the Company is committed to preserving and protecting the land, sea and air environment from the pollution. For the sea protection, the Company implements policy of zero spills to eliminate the possibility of pollution by ensuring high safety standards. This policy must also be applied by each employee so that the Company's commitment in preserving the environment can run well.

Based on the Environmental Management Policy issued by the Company on July 20, 2017, DJAKARTA LLOYD obliges every work implementer to pay attention to a number of matters that have the potential to cause environmental pollution, including:

- Oil, including oil and related products recorded as fuel and oily waste cargoes
- Chemical, gas, liquid, and hazardous liquid substances recorded as bulk and chemical waste.
- Dangerous items, including those that are transported in large quantities with various packages that may be harmful to the environment if spilled or lost.
- Waste, including bio-waste and non-biodegradable waste.
- Ballast water, including the possibility of aquatic organisms or water-borne pathogens being transported in the ballast water of the ship.
- Anti-fouling paints and their effects on fish skins and other aquatic life.
- Cargo steam emissions, including the effects of toxins on health, climate, and plant life.
- Exhaust gas emissions, including gases and hydrocarbon particles that do not burn and contribute to the smokes, acid rain, and the greenhouse effect.
- Ozone depleting substances, including CFCs and halon gas which have global warming impact.
- The level of noise from the engine and its effect on the crew and the local population.



# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP LINGKUNGAN

## Corporate Social Responsibility for the Environment

- Limbah yang dihasilkan kantor, termasuk kertas, limbah khusus, dan bahan habis pakai lainnya.

- Office-generated waste, including paper waste, special waste, and other disposables.

Untuk mendukung sistem kerja yang memprioritaskan keselamatan lingkungan, Perseroan memfasilitasi penyebaran pengetahuan di antara sesama karyawan, dan secara aktif mempromosikan kesadaran lingkungan melalui pelatihan dan pendidikan bagi karyawan. Perusahaan juga telah terintegrasi dengan semua aspek lingkungan yang relevan pada Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu.

To support work systems that prioritize environmental safety, the Company facilitates the dissemination of knowledge among fellow employees, and actively promotes environmental awareness through training and education for them. The Company has also been integrated with all relevant environmental aspects of the Quality Management System Documentation.

Perseroan berupaya untuk mematuhi segala bentuk peraturan, termasuk peraturan wajib, dengan memerhatikan kode, pedoman, dan standar organisasi maritim, antara lain sebagai berikut:

The Company strives to comply with all forms of regulations, including mandatory regulations, by noticing the codes, guidelines, and standards of maritime organizations, including the following:

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
- Peraturan Internasional Revisi Marpol Annex V & Resolusi MEPC 201 (62) tentang Prosedur Pembuangan Sampah Kapal
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

- The Transportation Minister Regulation No. 29 of 2014 concerning Prevention of Maritime Environmental Pollution
- The Government Regulation (PP) No. 21 of 2010 regarding Maritime Environmental Protection
- The International Regulations of Revised MARPOL Annex V & Resolution MEPC 201 (62) on the Procedures for Disposal of Waste from Ships
- Law Number 32 of 2009 regarding Environmental Protection and Management
- Law Number 17 of 2008 about Shipping

Dalam mengoperasikan kantor dan armada kapal, Perseroan turut mempertimbangkan penggunaan bahan serta energi yang ramah lingkungan dan efisien. Selain itu, pembuangan sampah dan limbah juga dilakukan secara aman dan bertanggung jawab, serta tidak dibuang ke laut agar tidak mencemari dan membahayakan ekosistem di dalamnya.

In operating its offices and fleet, the Company also considers the use of materials and energy that are environmentally friendly in an efficient way. In addition, the disposal of garbage and waste is also carried out safely and responsibly, and is not disposed of into the sea so as not to pollute and endanger the ecosystems in the sea.

Di sisi lain, Perseroan mewajibkan para pemasok dan kontraktor yang bekerja di bawah kontrol langsung Perusahaan serta perusahaan afiliasi untuk menerapkan standar lingkungan secara mandiri dan konsisten. Verifikasi kepatuhan melalui pemeriksaan fisik dan analisis dokumen menjadi salah satu cara untuk mendukung komitmen kebijakan Perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan.

On the other hand, the Company requires the suppliers and contractors who work under direct control of the Company and affiliated companies to apply environmental standards independently and consistently. Verification of compliance through physical inspection and document analysis is one way to support the Company's commitment in applying the environmental protection policy.



Perusahaan juga mengakui nilai keterbukaan komunikasi dengan para kru di lapangan secara berkelanjutan, sekaligus berpartisipasi dalam diskusi dengan otoritas yang relevan dengan tujuan menyadari masalah lingkungan teraktual dan langkah-langkah untuk meminimalkan risiko lingkungan

The Company also values open communication with the crew in the field on an ongoing basis, as well as participating in discussions with relevant authorities with the aim of being aware of actual environmental problems and measures to minimize environmental risks.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Corporate Social Responsibility for the Employment,  
Occupational Health and Safety

DJAKARTA LLOYD melaksanakan tanggung jawab terhadap tenaga kerja dalam berbagai aspek, seperti kesejahteraan karyawan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, perlindungan di tempat kerja, penyiapan masa pensiun, serta kebebasan berserikat. Berikut detail mengenai praktik tersebut sepanjang tahun 2019.

DJAKARTA LLOYD carries out its responsibility for the workforce in various aspects, such as employee welfare, training and competency development, protection at work, preparation for retirement, and freedom of association. The following details the practices throughout 2019.

### KESEJAHTERAAN KARYAWAN & REMUNERASI

Sejak 15 Maret 2019, Perusahaan telah melakukan restrukturisasi remunerasi yang lebih baik dan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Remunerasi pegawai terdiri atas gaji pokok, tunjangan, insentif, dan bonus yang mengacu pada kinerja dan pencapaian target, tanpa membedakan ras, golongan, jenis kelamin, ataupun agama.

### EMPLOYEE WELFARE & REMUNERATION

Since March 15, 2019, the Company has restructured for better remuneration and is in accordance with the Collective Labor Agreement (PKB). Employee remuneration consists of basic salary, benefits, incentives, and bonuses that refer to performance and achievement of targets, regardless of race, class, gender, or religion.

Sistem remunerasi yang diterapkan Perusahaan mengacu kepada dua hal, yakni level jabatan dan kelompok unit. Level jabatan terdiri atas jabatan Staf, BOD-3 (*Supervisor*), BOD-2 (*Manager*), dan BOD-1 (*Kepala/Vice President/General Manager*), sedangkan kelompok unit terdiri atas:

The remuneration system implemented by the Company refers to two things, namely the position level and groups of units. Position levels consist of Staff, BOD-3 (*Supervisor*), BOD-2 (*Manager*), and BOD-1 (*Head/Vice President/General Manager*), while groups of units comprises:

1. *Strategic Functional Staff (SFS)*: Unit Human Capital Management, Finance & Accounting, dan Designated Person Ashore (DPA).
2. *Strategic Executive Staff (SES)*: Unit General Affair & Procurement, Pemasaran, dan Armada.

1. *Strategic Functional Staff (SFS)*: Human Capital Management, Finance & Accounting, and Designated Person Ashore (DPA) Units.
2. *Strategic Executive Staff (SES)*: General Affairs & Procurement, Marketing, and Fleet Units.

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Corporate Social Responsibility for the Employment,  
Occupational Health and Safety

3. *Strategic Executive Management (SEM)*: Unit Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawas Internal (SPI), dan Pengembangan Usaha (Bangus).

Perusahaan juga memberikan fasilitas asuransi dan jaminan kesehatan berupa:

1. Asuransi Jaminan Hari Tua (JHT) bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Asuransi kesehatan bekerja sama dengan BNI Life dalam hal rawat inap.
3. Jaminan kesehatan lainnya oleh Perusahaan antara lain berupa bantuan biayaacamata, alat bantu dengar, persalinan, dan pemeriksaan kesehatan.

### MANAJEMEN KARIER

Setiap karyawan memiliki kesempatan yang sama dan setara dalam mengembangkan kariernya dengan mengacu pada penilaian kinerja, *assessment*, dan kompetensi. Adapun pengembangan karier diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

### INDEKS KEPUASAN KARYAWAN

Perseroan mengadakan survei berkala untuk menilai indeks kepuasan karyawan. Hasil survei dianalisis menggunakan metodologi Importance Performance Analysis (IPA) yang dapat menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan/ekspektasi dengan persepsi realita pada sembilan dimensi, yaitu:

1. Peran – Kontribusi pegawai melalui pekerjaan, pemahaman terhadap kebijakan dan prosedur, wewenang untuk mengambil keputusan, serta kesesuaian antara penghasilan dan beban kerja.
2. Budaya Kerja – Pemahaman terhadap budaya kerja, keutamaan kualitas kerja, perhatian terhadap kepentingan pelanggan, serta pemberdayaan prakarsa individu.
3. Penghasilan – Adanya insentif atas hasil kerja yang baik, kesesuaian antara gaji dan beban

3. *Strategic Executive Management (SEM)*: Corporate Secretary, Internal Audit (SPI), and Business Development (Bangus) Units.

The Company also provides health and other insurance facilities in the form of:

1. Old Age Security (JHT) in cooperation with BPJS Employment.
2. Health insurance in cooperation with BNI Life in terms of hospitalization.
3. Other health security by the Company, including reimbursements for glasses, hearing aids, childbirth, and medical examinations.

### CAREER MANAGEMENT

Every employee has equal opportunity in developing his/her career by referring to the outcomes of his/her performance and competency assessment. The career development is given by considering the organization's needs.

### EMPLOYEE SATISFACTORY INDEX

The Company conducts periodic surveys to assess the employee satisfaction index. The results of the survey were analyzed using the Importance Performance Analysis (IPA) methodology which can show the gap between expectations and realizations in nine dimensions, namely:

1. Role – Employee contribution through work, understanding of policies and procedures, authority to make decisions, and suitability between income and workload.
2. Work Culture – An understanding of culture at work, the importance of work quality, attention to customer interests, and empowering individual initiatives.
3. Earnings – There are incentives for good work outcomes, compatibility between salary and

- |   |  |
|---|--|
| <p>kerja, kepuasan atas tunjangan kesehatan, serta kepuasan atas tunjangan lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kondisi Kerja – Ketersediaan peralatan kerja yang memadai, keamanan dan kenyamanan bekerja, serta kondisi fisik lingkungan kerja.</li> <li>5. Karier – Kebijakan dan pelaksanaan mutasi, promosi dan demosi, kejelasan kebijakan dan pelaksanaan pola karier, kesempatan pengembangan karier, serta kesesuaian penugasan dan keahlian.</li> <li>6. Supervisi dan Hubungan Antarpegawai – Penghargaan atas kreativitas, kemampuan rekan kerja, motivasi dan tantangan, supervisi yang konsisten, serta bimbingan atasan.</li> <li>7. Pelatihan – Kesesuaian pengetahuan/keahlian dengan penugasan, rekrutmen yang transparan, tujuan program pelatihan yang jelas dan efektif, serta kesempatan mengikuti pelatihan.</li> <li>8. Kepemimpinan – Memiliki visi yang jelas, terdapat kesesuaian antara RKAP dan tujuan Perusahaan, serta kepercayaan pegawai terhadap pemimpin.</li> <li>9. Komunikasi dan Koordinasi – Komunikasi sistematis oleh pemimpin, kecukupan dan efektivitas media komunikasi antara manajemen dan pegawai, serta pemanfaatan sistem informasi kepegawaian sebagai media komunikasi.</li> </ol> | <p>workload, satisfaction with health benefits, and satisfaction with other benefits.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Working Conditions – Availability of adequate work equipment, safety and comfort at work, and the physical condition of the work environment.</li> <li>5. Career – The policy and its implementation in mutation, promotion and demotion, clarity and implementation of policy in career patterns, career development opportunities, and suitability between assignment and expertise.</li> <li>6. Supervision and Relationships among Employees – Appreciation for creativity and ability of colleagues, motivation and challenges, consistent supervision, and guidance from superiors.</li> <li>7. Training – The suitability of knowledge/expertise with assignment, transparent recruitment, clear and effective training program objectives, and opportunities for training.</li> <li>8. Leadership – Having a clear vision, a match between RKAP with the Company's goals, as well as employee confidence in the leader.</li> <li>9. Communication and Coordination – Systematic communication by the leader, communication adequacy and effectiveness between employees and management, and utilization of staffing information system as a communication medium.</li> </ol> |
|---|--|

Kuesioner terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian pertama (32 pertanyaan tertutup) dan bagian kedua (pertanyaan terbuka). Responden merupakan pegawai di kantor pusat dan kantor cabang yang ditentukan dari hasil diskusi dan kesepakatan tim Satuan Pengawas Internal (SPI).

The questionnaire is divided into two parts, namely the first part (32 closed questions) and the second part (open questions). Respondents are employees at the head office and branch offices determined from the results of discussions and agreements of the Internal Audit Unit (SPI) team.

Hasil indeks kepuasan pegawai yang dilakukan oleh Perseroan pada 2019 menunjukkan nilai 3,68 atau meningkat dari tahun 2017 sebesar 3,13 (tidak ada survei pengukuran indeks kepuasan pegawai pada 2018). Kenaikan ini mencerminkan bahwa perubahan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dengan pendekatan paradigma *human capital* diterima secara positif oleh pegawai. Di sisi lain, pegawai juga menilai bahwa Perseroan berada dalam kondisi stabil yang didukung dengan prosedur internal yang jelas, transparan, dan konsisten, sehingga pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan profitabilitas Perseroan.

The score for the employee satisfaction index based on the survey conducted by the Company in 2019 showed 3.68 or an increase from 2017 of 3.13 (there was no survey of employee satisfaction index measurement in 2018). This increase reflects that the change in human resource management (HR) with the approach of human capital paradigm is positively received by employees. On the other hand, the employees also view that the Company is in a stable condition supported by clear, transparent, and consistent internal procedures, which in turn has an impact on the Company's productivity and profitability.

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Corporate Social Responsibility for the Employment,  
Occupational Health and Safety

## KEBEBASAN BERSERIKAT

Sesuai Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Karena itu, Perseroan berkomitmen memelihara hubungan industrial yang harmonis antara pegawai dan manajemen, serta menghormati hak dan kewajiban pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebebasan berorganisasi diwujudkan melalui penyaluran aspirasi pegawai sesuai dengan etika dan dilandasi sikap saling menghargai. Perusahaan mendukung hak para pegawai untuk berserikat dan menyampaikan pendapat melalui pembentukan serikat pegawai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, definisi serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.

Kelompok pekerja berjumlah minimal sepuluh orang dapat membentuk serikat. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-16/MEN/2001 memerintahkan pemberitahuan dan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 memberikan hukuman pidana kepada siapapun yang melakukan tindakan anti terhadap serikat pekerja.

Serikat Pekerja DJAKARTA LLOYD (SPDL) telah aktif kembali setelah Perusahaan melewati masa stagnasi, dengan sebagian besar pegawai sebagai anggotanya. Sejak Perusahaan beroperasi, tidak pernah terjadi pemogokan kerja, demonstrasi, atau gangguan lain yang menghentikan kegiatan operasional. Hal ini disebabkan terjalinnya kerja sama sinergis dan saling pengertian yang baik antara pihak Manajemen dan SPDL.

## FREEDOM OF ASSOCIATION

In accordance with Article 28E Paragraph (3) of the 1945 Constitution, every person has the right to freedom of association, assembly and expression. Therefore, the Company is committed to maintaining harmonious industrial relations between employees and management, and respecting the rights and obligations of employees under applicable laws and regulations.

Freedom to associate is realized through channeling the employee aspirations according to ethics and based on mutual respect. The Company supports the right of employee to associate and express opinions through the formation of employee union. Based on Law Number 21 of 2000 concerning Trade/Labor Unions, the definition of trade/labor union is an organization formed from, by, and for the workers, both inside companies and outside companies, which are free, open, independent, democratic, and responsible for fighting for, defending, and protecting the rights and interests of the workers, while improving the welfare of workers and their families.

A group of workers of at least ten people can form a union. The Minister of Manpower Decree Number KEP-16/MEN/2001 orders notification and registration of trade/labor unions, while Law Number 21 of 2000 provides criminal penalties for anyone who commits actions of anti-labor unions.

The DJAKARTA LLOYD Trade Union (SPDL) has been active again after a period of stagnation, with most employees as members. Since the beginning of the Company's operations, there have never been any strikes, demonstrations, or other disturbances that have disturbed the operations. This is due to the establishment of synergistic cooperation and good understanding between the Management and the SPDL.

Sebagai mitra strategis Perusahaan, serikat pekerja memiliki sejumlah fungsi antara lain menjaga stabilitas pekerjaan agar tetap produktif; meningkatkan kualitas kerja melalui optimalisasi potensi pegawai; berinovasi dan mencetuskan gagasan kreatif untuk kemajuan Perusahaan; menjalin komunikasi dan relasi yang baik dengan pihak internal dan eksternal; serta menjaga nama baik Perusahaan.

As a strategic partner of the Company, the union has a number of functions including maintain the job stability in order to remain productive; improve the work quality through optimizing employee potential; innovate and spark creative ideas for the progress of the Company; establish good communication and relations with internal and external parties; and maintain the good name of the Company.

**PRAKTIK KESETARAAN**

Dalam menjalankan bisnisnya, DJAKARTA LLOYD menjamin kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama bagi seluruh karyawan, mulai dari tahap perekrutan, pengembangan karier, hingga evaluasi kinerja tanpa memandang gender, ras, suku, dan agama. Setiap kebijakan dan keputusan terkait aspek ketenagakerjaan sepenuhnya hanya mempertimbangkan hasil kinerja karyawan yang bersangkutan.

**EQUALITY PRACTICES**

In running its business, DJAKARTA LLOYD guarantees equality and equal employment opportunities for all employees, starting from the recruitment stage, career development, to performance evaluation regardless of gender, race, ethnicity, and religion. Every policy and decision related to employment aspects fully only considers the performance results of the employees concerned.

**TINGKAT TURNOVER KARYAWAN**

Jumlah karyawan Perseroan (konsolidasian) sebanyak 153 orang pada 2019, terdiri atas 102 karyawan DJAKARTA LLOYD dan 51 karyawan PT Dharma Lautan Nusantara (entitas anak). Sementara itu, jumlah karyawan Perseroan meningkat dari tahun 2018 sebesar 46 orang.

**EMPLOYEE TURNOVER RATE**

Total employees of the Company (consolidated) is 153 people as of 2019, comprising 102 employees of DJAKARTA LLOYD and 51 employees of PT Dharma Lautan Nusantara (subsidiary). Meanwhile, the total number of employees of the Company increased by 46 people from 2018.

Penghitungan *labor turnover* menggunakan rumus berikut:

The calculation of labor turnover uses the following formula:

$$\text{Labor Turnover} = \frac{\text{Jumlah karyawan yang keluar} / \text{Total employees leaving}}{(\text{Jumlah karyawan awal tahun} + \text{Jumlah karyawan akhir tahun}) / 2}$$

$$= \frac{\text{Total employees at beginning of the year} + \text{Total employees at the end of the year}}{2}$$

Tahun Year	Djakarta Lloyd	Dharma Lautan Nusantara	Konsolidasian Consolidated	Rekrut Recruitment	Resign
2018	87	46	133	32	
2019	102	51	153	30	10
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>97</b>	<b>286</b>	<b>62</b>	<b>10</b>



# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Corporate Social Responsibility for the Employment,  
Occupational Health and Safety

## SISTEM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Sistem kesehatan dan keselamatan kerja (K3) ditujukan sebagai upaya preventif terhadap timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja di lingkungan kerja, sehingga Perusahaan tidak mengalami kerugian terkait hal tersebut. Pelaksanaan K3 diawali dengan mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, sekaligus tindakan antisipatifnya.

Sistem K3 harus dikelola secara baik dan terstruktur, disertai intervensi dari manajemen berupa upaya terencana, antara lain dengan membentuk Satuan K3 sehingga pengukuran dan pemantauan K3 dapat berjalan secara efektif.

## KEBIJAKAN MANAJEMEN KESELAMATAN

Faktor manusia berperan penting dalam peningkatan manajemen operasional kapal dan pencegahan pencemaran lingkungan laut. Karena itu, International Maritime Organization (IMO) merilis peraturan International Safety Management (ISM) Code mengenai pengelolaan keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan laut, yang juga dikonsolidasikan dalam Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang pelayaran niaga, DJAKARTA LLOYD telah memiliki Kebijakan Manajemen Keselamatan sesuai standar ISM Code yang bertujuan:

- Mematuhi undang-undang yang berlaku, persyaratan masyarakat legislatif, dan badan klasifikasi.
- Menghindari insiden yang dapat menyebabkan cedera manusia, kehilangan nyawa, ataupun kerusakan lingkungan, properti, dan aset.
- Melindungi lingkungan dengan menerapkan operasi bebas yang aman dan polusi.

## OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY SYSTEM

The occupational health and safety (OHS) system is intended as a preventive measure against the occurrence of accidents and illnesses caused by work relationships in the work environment, so that the Company does not experience losses related to this matter. OHS implementation begins with recognizing matters that have the potential to cause accidents and illnesses due to work relationships, as well as anticipatory actions.

The OSH system must be well managed and structured, accompanied by management intervention with planned efforts, among others, by establishing an OHS unit so that the OHS measurement and monitoring can be carried out effectively.

## SAFETY MANAGEMENT POLICY

The human factors play an important role in improving the operational management of ships and preventing pollution of the marine environment. Therefore, the International Maritime Organization (IMO) released the International Safety Management (ISM) Code regarding ship safety management and protection of the marine environment, which was also consolidated in the Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention. As a state-owned enterprise engaged in the commercial shipping, DJAKARTA LLOYD has a Safety Management Policy in accordance with the ISM Code standards aimed to:

- Comply with applicable laws, legislative community requirements, and classification boards.
- Avoid incidents that can cause human injury, loss of life or damage to the environment, property, and assets.
- Protect the environment by implementing safe and pollution free operations.



- Membentuk perlindungan terhadap risiko yang teridentifikasi.
- Menyiapkan dan melatih personel darat dan laut untuk menangani situasi darurat.
- Menyediakan operasi kapal dan lingkungan kerja yang aman.
- Meningkatkan keterampilan manajemen keselamatan pada personel darat dan kapal.

Agar implementasi Kebijakan Manajemen Keselamatan berjalan efektif, Perusahaan:

- Memastikan kepatuhan terhadap semua peraturan nasional, internasional, dan bendera Negara.
- Memperhitungkan semua panduan terkait, standar, kode, dan publikasi yang berlaku.
- Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System/SMS*) yang memberikan tanggung jawab dan petunjuk sesuai ketentuan dalam ISM Code.
- Menerapkan prosedur untuk mempersiapkan dan menanggapi situasi darurat.
- Menjalankan prosedur setiap waktu untuk pelaporan serta menindaklanjuti ketidaksesuaian dan kecelakaan.
- Memantau seluruh aspek keselamatan, operasional, dan teknis armada yang dikelola.
- Menetapkan sasaran, tujuan, dan indikator kinerja utama untuk proses kunci yang memengaruhi keselamatan.
- Menyediakan sumber daya yang memadai untuk pelaksanaan efektif SMS.
- Memeriksa armada yang dikelola dan melaksanakan pemeliharaan serta perbaikan yang diperlukan.
- Memperbaiki SMS secara berkesinambungan dengan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengidentifikasi masalah melalui audit internal dan tinjauan sistem manajemen.

Pada 2019, Perseroan telah melaksanakan sejumlah aktivitas audit untuk menjamin keberlangsungan manajemen keselamatan dengan detail berikut:

- Establish protection against identified risks.
- Prepare and train land and sea personnel to handle emergency situations.
- Provides safe ship operations and work environment.
- Improve safety management skills of land and ship personnel.

In order to implement the Safety Management Policy effectively, the Company:

- Ensure the compliance with all national, international, and state flag regulations.
- Consider all relevant guidelines, standards, codes, and publications that apply.
- Implement the Safety Management System (SMS) that provides responsibilities and instructions according to the provisions in the ISM Code.
- Implement the procedures for preparing and responding to emergency situations.
- Run the procedures at all times for reporting and following up on non-conformities and accidents.
- Monitor all aspects of safety, operational, and technical of the fleet managed.
- Set the goals, objectives, and key performance indicators for key processes that affect safety.
- Provide adequate resources for the effective implementation of SMS.
- Check the fleet being managed and carry out the necessary maintenance and repairs.
- Improve the SMS on an ongoing basis by taking the actions needed to identify problems by conducting internal audits and management system reviews.

In 2019, the Company has carried out a number of audit activities to ensure the sustainability of safety management in the following details:

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Corporate Social Responsibility for the Employment,  
Occupational Health and Safety

No.	Jenis Scope	Aktivitas Activity	Peraturan Reference	Sertifikat Certificate	Waktu Pelaksanaan Activity Description	Penerbit Issuer
1	Perusahaan Company (Annual Inspection)	Audit Tahunan Sistem Manajemen Keselamatan Annual Inspection of the Safety Management System	SOLAS 1974 & ISM Code	Document of Compliance (DOC)	28 Agustus 2019 August 28, 2019	Dirjen Perhubungan Laut Director General of Sea Transportation
2	Perusahaan Company (Annual Inspection)	Audit Penilikan ke-2 Surveillance 2 Audit	ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007	Integrated ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007	10 Oktober 2019 October 10, 2019	Bureau Veritas Indonesia
3	KT Daya Lautan I (Initial Survey)	Sistem Manajemen Keselamatan Kapal Ship Safety Management System	SOLAS 1974 & ISM Code	Safety Management Certificate	14 Juli 2019 July 14, 2019	Dirjen Perhubungan Laut Director General of Sea Transportation
4	KT Daya Lautan I (Permanent Survey)	Sistem Keamanan Kapal dan Pelabuhan Ship and Port Security System	ISPS Code	International Ship Security Certificate	29 Juli 2019 July 29, 2019	Dirjen Perhubungan Laut Director General of Sea Transportation
5	MV Dharma Lautan Ruby (Initial Survey)	Sistem Manajemen Keselamatan Kapal Ship Safety Management System	SOLAS 1974 & ISM Code	Safety Management Certificate	14 Agustus 2019 August 14, 2019	Dirjen Perhubungan Laut Director General of Sea Transportation
6	MV Dharma Lautan Ruby (Initial Survey)	Sistem Keamanan Kapal dan Pelabuhan Ship and Port Security System	ISPS Code	International Ship Security Certificate	22 Agustus 2019 August 22, 2019	Dirjen Perhubungan Laut Director General of Sea Transportation



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Corporate Social Responsibility for the Employment,  
Occupational Health and Safety

No.	Jenis Scope	Aktivitas Activity	Peraturan Reference	Sertifikat Certificate	Waktu Pelaksanaan Implementation Date	Penerbit Issuer
7	MV Dharma Lautan Intan (Intermediate Survey)	Sistem Manajemen Keselamatan Kapal Ship Safety Management System	SOLAS 1974 & ISM Code	Safety Management Certificate	10 Agustus 2020 August 10, 2020	Dirjen Perhubungan Laut Director General of Sea Transportation
8	MV Dharma Lautan Intan (Intermediate Survey)	Sistem Keamanan Kapal dan Pelabuhan Ship and Port Security System	ISPS Code	International Ship Security Certificate	12 Januari 2021 January 12, 2021	Dirjen Perhubungan Laut Director General of Sea Transportation

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL

Corporate Social Responsibility Related to Fair Operations

Sebagai badan usaha, Perseroan memerlukan mekanisme pengadaan barang dan jasa secara cepat, fleksibel, efisien, dan efektif sehingga tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian.

As a business entity, the Company requires a mechanism for the procurement of goods and services that is fast, flexible, efficient, and effective so as not to lose business momentum that can cause losses.

Karena itu, Perseroan menerbitkan Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa BUMN, dan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Therefore, the Company issued Guidelines for Goods/Services Procurement following the Minister of SOEs Regulation Number PER-05/MBU/2008 dated September 3, 2008 about General Guidelines for SOEs' Goods/Services Procurement, as amended by the State Minister of SOEs Regulation Number PER-15/MBU/2012 dated September 25, 2012 regarding Amendments to the Minister of SOEs Regulation Number PER-05/MBU/2008 about General Guidelines for Goods/Services Procurement in SOEs, and Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 54 Year 2010 dated August 6, 2010 on the Government's Goods/Services Procurement, as well as Republic of Indonesia Presidential Regulation Number 16 Year 2018 regarding the Government's Goods/Services Procurement.

**KEBIJAKAN UMUM**

1. Memastikan perencanaan kebutuhan disiapkan secara matang oleh setiap fungsi/unit operasi dengan cara mengelola RKAP yang disusun dalam bentuk rencana pengadaan barang/jasa (Kerangka Acuan Kerja/KAK).
2. Memastikan proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan mengikuti prinsip dasar dan etika pengadaan barang/jasa, pedoman/prosedur pengadaan barang/jasa, serta tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya yang lebih tinggi.
3. Tidak diperkenankan memecah paket pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari batas kewenangan.
4. Memastikan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh penyedia/vendor barang/jasa yang telah dievaluasi secara administratif, teknis, dan finansial, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam hal biaya dan kualitas.
5. Memastikan proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara kompetitif dengan memerhatikan aspek keekonomian dan efisiensi pelaksanaan.
6. Sedapat mungkin menggunakan model kontrak (*terms and condition*) yang telah ditetapkan Perusahaan.
7. Memastikan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan kontrak atau perjanjian yang disetujui antara Perusahaan dengan penyedia/vendor barang/jasa.
8. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
9. Mengutamakan sinergi BUMN sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
10. Pengadaan barang yang termasuk dalam kategori belanja aset agar memerhatikan ketentuan yang berlaku.

**GENERAL POLICY**

1. Ensure that the needs planning is carefully prepared by each function/unit of operations by deriving the RKAP into the goods/services procurement plan (Terms of Reference/KAK).
2. Ensure the goods/services procurement is conducted by following its basic principles, ethics, and guidelines/procedures, also not in conflict with other higher provisions.
3. It is not permissible to break the package of goods/services procurement into several packages with an intention to avoiding the limits set by the authority.
4. Ensure the goods/services procurement done by providers/vendors of goods/services has been evaluated administratively, technically, financially, and can be accounted for in terms of cost and quality.
5. Ensure the goods/services procurement is carried out competitively by noticing economic aspects and efficiency of implementation.
6. As could as possible use the terms and conditions set by the Company.
7. Ensure that the goods/services procurement is done under a contract or agreement between the Company and the supplier/vendor of goods/services.
8. Prioritize domestic production, national design and engineering, and the expansion of opportunities for small business entities as long as the quality, price, and objectives can be accounted for.
9. Prioritize the SOEs synergy as long as the quality, price, and objectives can be accounted for.
10. The goods procurement included in the category of asset expenditure shall pay attention to the applicable regulations.



# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL

## Corporate Social Responsibility Related to Fair Operations

- |   |   |
|---|---|
| <p>11. Pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa (Biro Pengadaan/Tim Pengadaan) menandatangani pakta integritas sesuai format yang ditentukan untuk setiap proses pengadaan barang/jasa.</p>  | <p>11. The parties involved in the process of the goods/services procurement (Procurement Bureau/ Procurement Team) sign an integrity pact in accordance with the format specified for each process of the goods/services procurement.</p>  |
| <p>12. Memastikan implementasi penilaian kinerja penyedia/vendor barang/jasa untuk mendapatkan penyedia/vendor barang/jasa yang beritikad baik, mampu, dan jujur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan.</p> | <p>12. Ensure the performance of suppliers/vendors of goods/services is appraised to get providers with good faith, capable, and honest in performing their duties and obligations for which they are responsible under the provisions.</p> |

### PRINSIP UMUM

### GENERAL PRINCIPLES

Prinsip Principle	Keterangan Description
Efisien Efficient	Pengadaan barang/jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat, dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah. The goods/services procurement must be done to obtain optimal and best results quickly, using funds and resources at the possible minimum in a reasonable manner and not only based on the lowest price.
Efektif Effective	Pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. The goods/services procurement must be done under the specified requirements and to provide maximum benefits according to the specified targets.
Kompetitif Competitive	Pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. The goods/services procurement must be done openly to the goods/services providers that meet the requirements and in fair competition among the goods/services providers that are equal and meet certain requirements/criteria based on the clear and transparent terms and procedures.
Transparan Transparent	Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat. All provisions and information regarding the goods/services procurement, including technical requirements for procurement administration, evaluation procedures, evaluation results, and determination of goods/services prospective providers are open to the interested goods/services providers who want to participate.
Adil dan Wajar Fair and Reasonable	Memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat. Provide equal treatment for all prospective providers of goods/services that meet the requirements.
Akuntabel Accountable	Harus mencapai sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terhindar dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan. Must achieve the targets that can be accounted for, in order to avoid the potential for misuse and irregularities.



Untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Perusahaan dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi usaha, pengadaan barang/jasa diupayakan mengutamakan sinergi BUMN dan/atau anak perusahaan BUMN dan/atau perusahaan afiliasi BUMN sepanjang barang/jasa tersebut merupakan produksi perusahaan yang bersangkutan, serta kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

To encourage domestic industries' growth, the Company can give preference to use domestic production while still due regard to the applicable laws and regulations. In addition, to improve the business efficiency, the goods/services procurement shall prioritize the synergy with other SOEs and/or their subsidiaries and/or their affiliated companies as long as the goods/services are their own production, while the quality, price, and objectives can be accounted for.

**PEMBAGIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**DIVISION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES**

No.	Tahapan Phase	Penanggung Jawab Person in Charge	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
1	Perencanaan kebutuhan barang/jasa Planning of the goods/services needs	Divisi Pengusul Proposer Division	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membuat rencana tahunan pengadaan barang/jasa yang berisi informasi nama kebutuhan, jadwal pelaksanaan kebutuhan, dan nilai pengadaan.</li> <li>Membuat KAK untuk setiap kebutuhan pengadaan barang/jasa yang meliputi ruang lingkup pekerjaan, kualifikasi tenaga jasa, spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan, serta menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE).</li> <li>Membuat permintaan barang/jasa dan menyerahkan semua dokumen pada butir (2) kepada Biro Pengadaan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Prepare an annual plan for the goods/services procurement containing information on the names of the needs, schedule for getting the needs, and procurement value.</li> <li>Formulate KAK for every need for goods/services procurement which includes the scope of work, service personnel qualifications, technical specifications, and implementation schedules, as well as determining Self Estimated Prices (HPS) or Owner Estimate (OE).</li> <li>Make requests for goods/services and submit all documents in item (2) to the Procurement Bureau.</li> </ol>
2	Persiapan Preparation	Biro Pengadaan Procurement Bureau	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan jadwal pelaksanaan sesuai dengan metode pengadaan yang dilakukan.</li> <li>Menetapkan HPS/OE dan dokumen pengadaan dari Divisi Pengusul.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Define the implementation schedule according to the procurement method to be carried out.</li> <li>Establish HPS/OE and procurement documents from the Proposer Division.</li> </ol>

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL

## Corporate Social Responsibility Related to Fair Operations

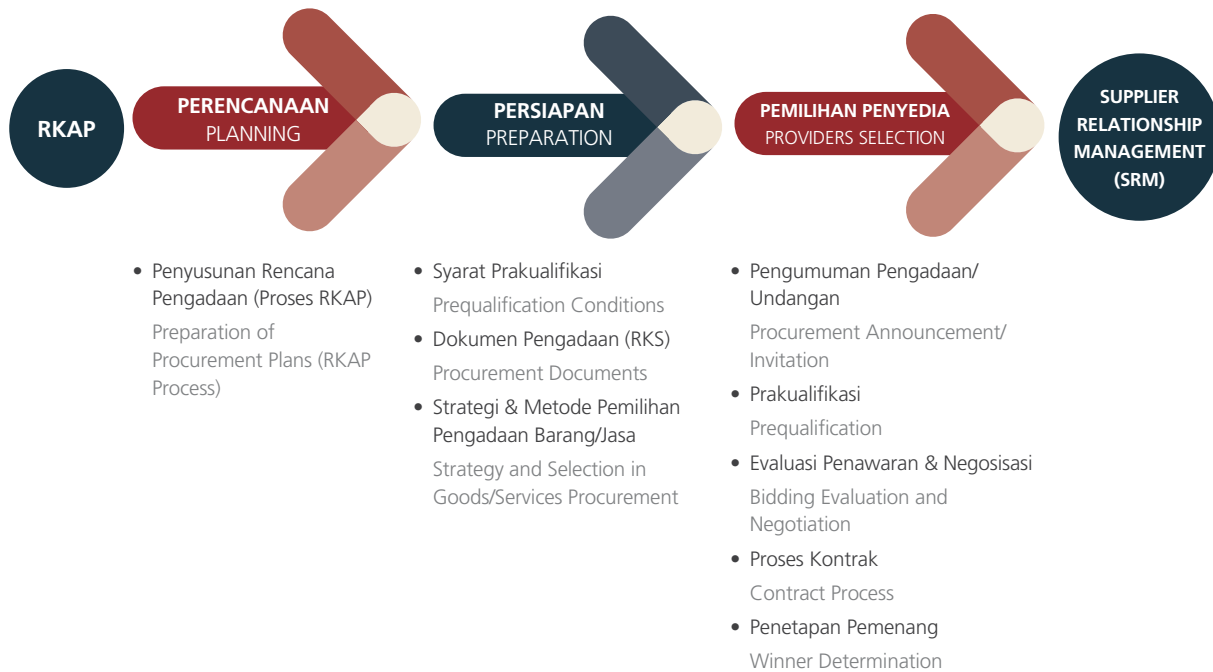
No.	Tahapan Phase	Penanggung Jawab Person in Charge	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
2	Persiapan Preparation	Biro Pengadaan Procurement Bureau	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Bila diperlukan, memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan, termasuk syarat penawaran dan tata cara evaluasinya, serta dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan.</li> <li>3. If necessary, provide an explanation of the procurement documents, including the terms of the offer and the procedures for its evaluation, and be included in the minutes of the explanation.</li> </ol>
		Bidang Hukum dan Aset Assets and Legal Affairs Division	<p>Menyiapkan <i>template</i> syarat dan ketentuan yang merupakan bagian dari draf kontrak yang akan dilampirkan pada dokumen pengadaan.</p> <p>Prepare a template of terms and conditions which is part of the draft contract that will be attached to the procurement document.</p>
3	Pemilihan penyedia/ <i>vendor</i> barang/ jasa Selection of the supplier/vendor of goods/ services	Biro Pengadaan Procurement Bureau	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa melalui metode pelelangan terbuka, pengadaan langsung, pemilihan langsung, ataupun penunjukan langsung.</li> <li>2. Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran yang ditandatangani oleh Biro Pengadaan dan peserta yang hadir.</li> <li>3. Mengevaluasi penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi dan negosiasi, serta menyusun berita acara.</li> <li>4. Mengumumkan pemenang yang telah ditetapkan Direksi.</li> <li>5. Melakukan pembinaan kepada penyedia/<i>vendor</i> barang/jasa dan menjembatani permasalahan yang timbul antara Divisi Pengusul dan penyedia/<i>vendor</i> barang/jasa terkait pelaksanaan pekerjaan.</li> <li>6. Melakukan renegotiasi atas permintaan pengusul/inisiatif sendiri.</li> <li>7. Membuat laporan proses dan hasil pelelangan.</li> <li>8. Membangun <i>database</i> proses pengadaan yang pernah dilakukan.</li> <li>9. Menjalin koordinasi internal Biro Pengadaan untuk membangun <i>knowledge management</i> pengadaan barang/jasa.</li> <li>1. Carry out the process of goods/services procurement through the open auction method, direct procurement, direct selection, or direct appointment.</li> <li>2. Opening bid documents and making minutes of opening bid signed by the Procurement Bureau and the participants present.</li> <li>3. Evaluate incoming bids, conduct clarification and negotiations, and prepare minutes.</li> <li>4. Announce the winners determined by the Directors.</li> <li>5. Conduct training to the supplier/vendor of goods/services and bridge the problems that arise between them and Proposer Division related to the work implementation.</li> <li>6. Conduct a renegotiation at the proposer's request or own initiative.</li> <li>7. Make a report on the process and results of the auction.</li> <li>8. Build a conducted procurement processes database.</li> <li>9. Establish internal coordination of the Procurement Bureau to build knowledge management of goods/services procurement.</li> </ol>

No.	Tahapan Phase	Penanggung Jawab Person in Charge	Tugas dan Tanggung Jawab Duties and Responsibilities
3	Pemilihan penyedia/vendor barang/jasa Selection of the supplier/vendor of goods/ services	Bidang Hukum dan Aset Assets and Legal Affairs Division	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meninjau isi draf kontrak setelah proses penunjukan pemenang apabila terdapat perubahan klausul dalam <i>template</i> syarat dan ketentuan umum.</li> <li>2. Memeriksa dokumen sertifikasi dan prakualifikasi yang terkait dengan aspek hukum.</li> <li>3. Memberikan masukan lainnya yang terkait dengan aspek hukum.</li> </ol>
		Divisi Keuangan dan Akuntansi Finance and Accounting Division	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review the draft contract after appointing a winner if there are changes to the clauses in general terms and conditions template.</li> <li>2. Check the certification and prequalification documents related to the legal aspects.</li> <li>3. Provide other input related to the legal aspects.</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meninjau dan mempertimbangkan usulan perubahan terhadap syarat dan ketentuan draf kontrak, khususnya yang diajukan oleh calon pemenang terkait aspek keuangan, antara lain cara dan persyaratan pembayaran, jangka waktu pembayaran, aspek perpajakan, dan aspek asuransi.</li> <li>2. Memeriksa dokumen sertifikasi dan prakualifikasi yang terkait dengan aspek keuangan.</li> <li>3. Memberikan masukan lainnya yang terkait dengan aspek keuangan.</li> </ol>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review and consider the proposed changes to the terms and conditions of the draft contract, especially those submitted by the appointed winner related to financial aspects, including the method and terms of payment, payment terms, taxation aspects, and insurance aspects.</li> <li>2. Check the certification and prequalification documents related to financial aspects.</li> <li>3. Provide other input related to financial aspects.</li> </ol>

# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT DENGAN OPERASI YANG ADIL

## Corporate Social Responsibility Related to Fair Operations

### Alur Tahapan Pengadaan Barang/Jasa Flow Steps of Goods/Services Procurement



### Metode Pengadaan Procurement Methods

No.	Metode Pengadaan Procurement Methode	Batasan Nilai Pengadaan Limit of Procurement Value	Realisasi Pengadaan Procurement Realization
1	Tender atau Seleksi Umum Tender and General Selection	Di atas Rp10.000.000 Over Rp10.000.000	Tim Pengadaan Procurement Team
2	Pengadaan Langsung Direct Procurement	s.d Rp50.000.000 up to Rp50.000.000	Unit Pengadaan Procurement Team
3	Penunjukan Langsung Direct Appointment	s.d Rp200.000.000 up to Rp200.000.000	Tim Pengadaan atau Unit Pengadaan Procurement Team of Procurement Unit
4	Tender Terbatas atau Seleksi Terbatas Limited Tender and Selection	s.d Rp5.000.000.000 up to Rp5.000.000.000 (Catatan: Nilai ini berlaku untuk pengadaan yang tidak melalui proses tender/seleksi umum) (Note: This value applies to procurement that does not go through a tender/general selection)	Tim Pengadaan atau Unit Pengadaan Procurement Team of Procurement Unit

**Persetujuan Pengadaan**  
**Procurement Approval**

No.	Nilai Pengadaan Procurement Value	Kewenangan Authority
1	Sampai dengan Rp10.000.000 Up to Rp10,000,000	Disetujui Kepala Biro Pengadaan; diketahui dan disetujui oleh Senior Manager Keuangan dan Akuntansi Approved by Head of Procurement Bureau; known and approved by Finance and Accounting Manager
2	Rp10.000.001 – Rp200.000.000 Rp10,000,001 – Rp200,000,000	Disetujui Kepala Biro Pengadaan; diketahui dan disetujui oleh Direktur Keuangan Approved by Head of Procurement Bureau; known and approved by Director of Finance
3	Rp200.000.001 – Rp5.000.000.000 Rp200,000,001 – Rp5,000,000,000	Disetujui oleh Direktur Keuangan; diketahui oleh Direktur Utama Approved by the Director of Finance; known by the President Director
4	Di atas Rp5.000.000.000 Above Rp5,000,000,000	Disetujui oleh seluruh Direksi Approved by all Board of Directors

## PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

### Stakeholders Relationship Management

Perusahaan menghormati hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian yang dibuat oleh perusahaan dengan karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, dan masyarakat sekitar tempat usaha Perusahaan.

The Company respects the rights of stakeholders based on the laws and/or agreements made by the Company with employees, customers, suppliers, creditors, and the communities surrounding the Company's operating areas.

#### A. Hubungan dengan Pekerja

1. Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan karyawan, Perusahaan menghormati hak asasi serta hak dan kewajiban karyawan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemberhentian, kedudukan, kepangkatan, jabatan, gaji/upah, kesejahteraan, penghargaan, dan sanksi kepada karyawan diatur dan ditetapkan Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

#### A. Relationship with Employees

1. In the relationship with employees, the Company respects the human rights and employees' rights and obligations under applicable laws and regulations.
2. The recruitment, appointment, placement, dismissal, position, rank, position, salary/wages, welfare, awards, and sanctions to employees are regulated and determined by the Board of Directors in accordance with applicable laws and regulations in the field of employment.

## PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

### Stakeholders Relationship Management



3. Sistem penilaian kinerja karyawan ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan standar prestasi kerja setiap jabatan/pekerjaan, yang dibuat secara adil dan transparan.
  4. Untuk memastikan terlaksananya pengelolaan SDM, maka Direksi menerapkan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (*competency-based HR Management System*).
  5. Peraturan kepegawaian diatur dalam Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
  6. Perusahaan harus mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen sumber daya manusia berdasar prinsip-prinsip yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
  7. Setiap karyawan berhak/dapat membentuk dan menjadi anggota Serikat Karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. The employee performance appraisal system is established and implemented based on work performance standards for each position/job, which is fairly and transparently.
  4. To ensure the good HR management, the Board of Directors implements a competency-based HR Management System.
  5. Staffing rules are stipulated in the Company Regulations/Collective Labor Agreement, which are formulated under applicable regulations.
  6. The Company must develop policy and procedure for human resource management based on the principles agreed in the Collective Labor Agreement and the principles of Good Corporate Governance.
  7. Every employee has the right/can form and become a member of an Employee Union in accordance with applicable laws and regulations.



**B. Hubungan dengan Pengguna Jasa**

1. Dalam pelayanan kepada pelanggan, Perusahaan memenuhi komitmennya dari segi perhatian, harga, kualitas, waktu, dan keamanan yang setara sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
2. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak-hak konsumen/pelanggan serta keamanan, keselamatan, dan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penanganan keluhan pelanggan dilakukan secara profesional melalui mekanisme yang baku dan transparan.
4. Perusahaan memelihara hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggan.
5. Perusahaan memiliki metode untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan.
6. Manajemen memastikan bahwa Perusahaan memperlakukan/melayani pelanggan secara benar dan jujur sesuai haknya.

**C. Hubungan dengan Mitra Kerja/Pemasok/Rekanan**

1. Manajemen bersama-sama mitra usaha secara sinergi membangun usaha bersama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.
2. Manajemen menuangkan semua kesepakatan dengan mitra usaha dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan.
3. Manajemen memastikan bahwa Perusahaan menjalankan sistem Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan, jelas, dan obyektif guna menjamin baik kualitas kerja maupun barang dan jasa yang diperoleh dari pemasok/rekanan.
4. Manajemen juga memastikan pelaksanaan tanggung jawab Perusahaan terhadap pemasok/rekanan sesuai dengan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku.

**B. Relationship with Customers**

1. In servicing the customers, the Company fulfills its commitments in terms of attention, price, quality, time, and safety in accordance with applicable service standards.
2. The Company has a policy regarding consumer/customer rights and security, safety, and health under applicable laws and regulations.
3. Handling the customer complaints is done professionally through standardized and transparent mechanisms.
4. The Company maintains an ongoing relationship with the customers.
5. The Company has a method for measuring the level of customer satisfaction.
6. The management ensures that the Company treats/serves the customers properly and honestly according to their rights.

**C. Relationship with Work Partners/Suppliers/Partners**

1. The management and business partners are in synergy to build a joint business to provide the best service to customers.
2. The management concludes all agreements with business partners in a written document prepared in good faith and mutual benefit.
3. The management ensures that the Company operates a transparent, clear and objective Goods and Services Procurement system to guarantee both the quality of work as well as the goods and services purchased from the suppliers/partners.
4. The management also ensures the implementation of the Company's responsibilities towards the suppliers/partners in accordance with the agreements and applicable laws and regulations.

# PENGELOLAAN HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

## Stakeholders Relationship Management

5. Manajemen membuat perjanjian/kontrak secara tertulis dan menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dan mematuhi setiap kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak kerja bersama.
  6. Pengikatan dalam hubungan kerja dilakukan berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum, terbatas, pemilihan langsung, ataupun penunjukan langsung sesuai prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Perusahaan.
  7. Perusahaan mengembangkan kemitraan dengan pemasok untuk memperoleh barang dan jasa yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
  8. Perusahaan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
  9. Pemilihan penyedia jasa harus mempertimbangkan kesesuaian bidang kerja, keseimbangan antara kemampuan dan beban kerja, serta kinerja penyedia jasa.
5. The management makes agreements/ contracts in writing and explains the rights and obligations of each party and complies with every agreement that has been stated in a joint work contract.
  6. Binding in the work relationship is carried out based on the principles of fair business competition through the selection of service providers through public and limited tenders, direct selections, or direct appointments following the procedures for procurement of goods and services applied in the Company.
  7. The Company develops partnerships with suppliers to obtain goods and services in accordance with the costs incurred.
  8. The Company provides equal treatment for all prospective suppliers of goods/services and does not lead to benefit certain parties, in any way or reason.
  9. The selection of service providers must consider the suitability of work field, the balance between capability and workload, and the performance of service providers.

### D. Hubungan dengan Kreditor

1. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai hak-hak dan kewajiban Perusahaan kepada kreditor antara lain berupa pemenuhan kewajiban kepada kreditor sesuai perjanjian; pengungkapan informasi secara transparan, akurat, dan tepat waktu, baik pada saat permintaan maupun penggunaan pinjaman; serta *covenant*, yaitu jaminan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditor.
2. Tidak terjadi *mismatch* dalam penggunaan dan penyediaan dana dan pendapatan operasional yang digunakan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok utang jangka panjang.
3. Perusahaan memberikan informasi yang akurat kepada kreditor sesuai dengan perjanjian, secara lengkap dan tepat waktu.

### D. Relationship with Creditors

1. The Company has a policy regarding the rights and obligations of the Company to creditors, among others in the form of fulfilling obligations to creditors in accordance with the agreement; disclosure of information in a transparent, accurate and timely manner, both at the time of request and use of loans; and a covenant, which is the Company's guarantee to do or not do something to protect the interests of creditors.
2. There is no mismatch in the use and provision of fund and operating income used to pay long-term interest and principal debt.
3. The Company provides accurate information to creditors following the agreement, in a complete and timely manner.

#### E. Hubungan dengan Lingkungan & Masyarakat

1. Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan, Direksi menjamin berjalannya Program Pemberdayaan Masyarakat yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat.
3. Dalam mengelola kegiatan usaha, Direksi selalu berupaya memedulikan kelestarian lingkungan alam dan lingkungan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab sosial Perusahaan.
4. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan limbah hasil usaha/kegiatan serta pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
5. Setiap kegiatan usaha, Direksi menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, tidak melanggar hukum mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
6. Setiap kegiatan usaha, Direksi wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan.

#### F. Hubungan dengan Instansi Terkait

1. Dalam berhubungan dengan instansi, lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan usaha Perusahaan, diupayakan terjalin hubungan yang harmonis atas dasar kejujuran dan saling menghormati.
2. Perusahaan menjalankan peraturan pemerintah pusat dan daerah yang terkait dengan bidang usaha Perusahaan.
3. Perusahaan harus bertanggung jawab untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perusahaan mendukung penerimaan negara, baik langsung maupun tidak langsung, sesuai peraturan perundang-undangan.

#### E. Relationship with Environment and Community

1. The Company runs its business activities in the field and/or related to natural resources is obliged to carry out social and environmental responsibility.
2. As a form of CSR, the Board of Directors guarantees the implementation of the Community Empowerment Program based on the real needs of the community.
3. In managing its business activities, the Board of Directors always strives to preserve the natural and social environment in accordance with the applicable laws and regulations as a form of CSR.
4. The Board of Directors is responsible for managing waste from operations/activities, also the hazardous and toxic materials.
5. In each business activity, the Board of Directors guarantees the environmental preservation does not violate the laws on environmental quality standards and damage criteria.
6. In each business activity, the Board of Directors must provide true and accurate information regarding environmental management.

#### F. Relationship with Related Institutions

1. In dealing with the government agencies and other institutions related to the Company's business, the Company always tries to establish harmonious relationship based on honesty and mutual respect.
2. The Company implements the central and regional government regulations related to the Company's business field.
3. The Company must be responsible for complying with applicable laws and regulations.
4. The Company contributes to the state revenue, both directly and indirectly, under statutory regulations.





# LAPORAN KEUANGAN

## Financial Reports



**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAK**



**Laporan Keuangan  
Beserta Laporan Auditor Independen  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada  
31 Desember 2019**





# PT DJAKARTA LLOYD (Persero)

## Indonesian Shipping Line & Logistic Service Provider

D'LLOYD BUILDING, Jl. Raden Saleh Raya No. 51, Jakarta Pusat 10330, Indonesia  
Phone: (021) 2961 9724 (Hunting) - Fax: (021) 2961 9725  
Website : www.djakartalloyd.co.id E-mail : mail@djakartalloyd.co.id

### SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO)

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suyoto  
Alamat Kantor : D'Lloyd Building, Jl. Raden Saleh No. 51 Jakarta Pusat  
Jabatan : Direktur Utama

Nama : Ofan Sofwan  
Alamat Kantor : D'Lloyd Building, Jl. Raden Saleh No. 51 Jakarta Pusat  
Jabatan : Direktur Keuangan dan SDM

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Djakarta Lloyd (Persero);
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Djakarta Lloyd (Persero) telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Djakarta Lloyd (Persero) telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Djakarta Lloyd (Persero) tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan PT Djakarta Lloyd (Persero).

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Februari 2020

Atas Nama Direksi



**SUYOTO**  
Direktur Utama

**OFAN SOFWAN**  
Direktur Keuangan & SDM



## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00197/2.0459/AU.1/01/1482-1/1/III/2020

**Kepada Yth,  
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) dan Entitas Anak  
Jakarta**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

### **Tanggung jawab Manajemen atas Laporan Keuangan**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

### **Tanggung jawab Auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.





## Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## Hal Lain

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut disajikan sebagai angka responding terhadap laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang diterbitkan kembali pada tanggal 20 Februari 2020 dengan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian.

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd entitas induk saja terlampir, yang terdiri dari Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan catatan atas informasi tambahan (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan entitas induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi keuangan entitas induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Menurut opini kami, Informasi keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

**Kantor Akuntan Publik  
Heliantono & Rekan**

**Yansyafrin, CPA**  
Izin Akuntan Publik No. 1482

25 Februari 2020

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
31 DESEMBER 2019**

---

**Daftar Isi**

	Halaman
<b>Surat Pernyataan Direksi</b>	
<b>Laporan Auditor Independen</b>	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian .....	1 - 2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian.....	3
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	4
Laporan Arus Kas Konsolidasian .....	5
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian .....	6 - 77
Informasi Tambahan .....	1 - 5

\*\*\*\*\*

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	Catatan	2019	2018
<b><u>ASET</u></b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan setara kas	2e, 4	41.991.868.646	145.112.280.226
Piutang usaha - pihak ketiga <i>(Setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang tak tertagih tanggal 31 Des 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp6.330.357.227 dan Rp6.108.792.637)</i>	2g, 5	134.843.075.792	111.297.162.977
Pihak berelasi		80.380.568.510	101.520.525.841
Aset keuangan lancar lainnya	2g, 6	7.885.096.333	22.326.185.147
Persediaan	2h, 7	25.904.119.450	11.806.205.841
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	2i, 8	33.931.815.599	17.395.673.234
Pajak dibayar dimuka	2s, 9a	25.211.340.602	2.388.398.864
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>350.147.884.932</b>	<b>411.846.432.130</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset tetap <i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Des 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp 331.772.084.924, Rp 313.595.950.877)</i>	2k, 10	578.366.461.449	302.925.314.548
Aset pajak tangguhan	2s, 9c	139.679.958.779	141.324.910.042
Aset tidak lancar lainnya	11	72.017.546.793	81.652.469.170
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>790.063.967.021</b>	<b>525.902.693.760</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.140.211.851.953</b>	<b>937.749.125.890</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u></b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Utang usaha	2g, 12	154.959.774.395	139.071.222.768
Utang pajak	9b	1.043.066.152	1.490.811.984
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	2g, 13	1.984.963.047	1.726.923.165
Pendapatan diterima dimuka	2o, 14	11.675.586.581	2.606.574.596
Beban akrual	15	6.387.198.555	6.379.248.427
Bagian utang jatuh tempo dalam 1 tahun:			
Pinjaman bank	17	20.075.250.612	19.846.980.612
Sewa pembiayaan	2t, 16	174.398.805	256.050.612
<b>Jumlah Liabilitas Jangka pendek</b>		<b><u>196.300.238.147</u></b>	<b><u>171.377.812.164</u></b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>			
Utang sewa pembiayaan	2t, 16	-	90.399.805
Utang bank	17	252.670.788.488	121.526.757.443
Rekening dana investasi	18	168.361.692.008	171.578.794.404
Liabilitas imbalan paska kerja	2q, 19	1.747.474.224	1.273.897.595
<b>Jumlah Liabilitas Jangka panjang</b>		<b><u>422.779.954.720</u></b>	<b><u>294.469.849.247</u></b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b><u>619.080.192.867</u></b>	<b><u>465.847.661.411</u></b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham (Saham Seri A dan B)			
<i>Ditempatkan dan disetor penuh Saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham per 31 Des 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.577.147.000.000, Rp1.197.828.000.000 dan Saham Seri B dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham 31 Des 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 422.325.669.450 dan Rp 437.835.000.000</i>			
	20	1.999.472.669.450	1.635.663.000.000
Tambahan modal disetor	21	1.427.000.000	1.427.000.000
Cadangan umum	22	62.951.989	62.951.989
Penyertaan modal negara	23	-	379.318.091.377
Saldo rugi (defisit)	25	(1.478.939.799.445)	(1.543.617.143.121)
Komponen ekuitas lain	26	(901.636.086)	(961.611.567)
<b>Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan:</b>			
Kepada pemilik entitas induk		521.121.185.908	471.892.288.680
Kepentingan non-pengendali	24	10.473.178	9.175.799
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b><u>521.131.659.086</u></b>	<b><u>471.901.464.479</u></b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b><u>1.140.211.851.953</u></b>	<b><u>937.749.125.890</u></b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*



**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	Catatan	2019	2018
Pendapatan usaha	2p, 27	625.811.875.314	561.705.974.042
Beban pokok pendapatan	2p,28	(503.485.443.664)	(436.186.545.539)
<b>Laba Bruto</b>		<b>122.326.431.650</b>	<b>125.519.428.503</b>
<b>Beban Usaha</b>			
Beban pemasaran	2p,29	(2.315.773.325)	(2.001.074.641)
Beban umum dan administrasi	2p, 30	(70.625.634.821)	(47.990.335.917)
<b>Jumlah Beban Usaha</b>		<b>(72.941.408.146)</b>	<b>(49.991.410.558)</b>
<b>Laba Usaha</b>		<b>49.385.023.504</b>	<b>75.528.017.945</b>
<b>Pendapatan (Beban) Non-Usaha</b>			
Pendapatan non usaha	2p, 31a	58.597.510.196	32.109.767.605
Beban non usaha	2p, 31b	(19.818.647.484)	(28.064.495.577)
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Usaha</b>		<b>38.778.862.712</b>	<b>4.045.272.028</b>
Beban keuangan	2p, 31c	(21.147.163.695)	(18.419.079.582)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>		<b>67.016.722.521</b>	<b>61.154.210.391</b>
<b>(Beban) Manfaat Pajak</b>	2s,9c		
Pajak kini		(713.122.028)	(1.382.652.123)
Pajak tangguhan		(1.624.959.437)	1.534.924.213
<b>Jumlah Beban Pajak</b>		<b>(2.338.081.465)</b>	<b>152.272.090</b>
<b>Laba Tahun Berjalan dari Operasi yang Dilanjutkan</b>		<b>64.678.641.056</b>	<b>62.128.425.804</b>
Kerugian tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	34	-	(821.943.323)
<b>Laba Tahun Berjalan</b>		<b>64.678.641.056</b>	<b>61.306.482.481</b>
<b>Pendapatan Komprehensif Lain</b>			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Keuntungan (kerugian) akturia	26	79.967.308	(776.590.362)
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		(19.991.827)	194.147.591
<b>Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain</b>		<b>59.975.481</b>	<b>(582.442.771)</b>
<b>Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>		<b>64.738.616.537</b>	<b>60.724.039.710</b>
<b>Jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada:</b>			
Pemilik entitas induk		64.677.343.676	61.303.918.895
Kepentingan non-pengendali	24	1.297.380	2.563.586
<b>Jumlah</b>		<b>64.678.641.056</b>	<b>61.306.482.481</b>
<b>Jumlah laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:</b>			
Pemilik entitas induk		64.737.319.157	60.721.476.124
Kepentingan non pengendali		1.297.380	2.563.586
<b>JUMLAH</b>		<b>64.738.616.537</b>	<b>60.724.039.710</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

Catatan	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Penyertaan Modal Negara (PMN)	Tambahan Modal Disetor	Cadangan Umum	Saldo Rugi (Defisit)	Komponen Ekuitas Lainnya	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas
<b>Saldo 31 Desember 2017</b>	<b>1.635.663.000.000</b>	<b>379.318.091.377</b>	<b>1.427.000.000</b>	<b>62.951.989</b>	<b>(1.604.921.062.015)</b>	<b>(379.168.796)</b>	<b>6.612.213</b>	<b>411.177.424.769</b>
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	61.303.918.895	-	2.563.586	61.306.482.481
Keuntungan (kerugian) akturia	-	-	-	-	-	(582.442.771)	-	(582.442.771)
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>1.635.663.000.000</b>	<b>379.318.091.377</b>	<b>1.427.000.000</b>	<b>62.951.989</b>	<b>(1.543.617.143.121)</b>	<b>(961.611.567)</b>	<b>9.175.799</b>	<b>471.901.464.479</b>
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	64.677.343.676	-	1.297.379	64.678.641.056
Perubahan Penyertaan Modal Negara menjadi modal disetor	379.318.091.377	(379.318.091.377)	-	-	-	-	-	-
Pembayaran kepada kreditur konkrueen pemilik saham Seri B	(15.508.421.927)	-	-	-	-	-	-	(15.508.421.927)
Keuntungan (kerugian) akturia	-	-	-	-	-	59.975.481	-	59.975.481
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>1.999.472.669.450</b>	<b>-</b>	<b>1.427.000.000</b>	<b>62.951.989</b>	<b>(1.478.939.799.445)</b>	<b>(901.636.086)</b>	<b>10.473.178</b>	<b>521.131.659.086</b>

*Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD DAN ENTITAS ANAK**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan kas dari pelanggan	623.405.919.830	432.686.578.728
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(579.217.986.226)	(463.973.238.765)
<b>Kas yang dihasilkan dari Operasi</b>	<b><u>44.187.933.604</u></b>	<b><u>(31.286.660.037)</u></b>
Penerimaan dari bunga bank dan lainnya	966.429.509	12.170.982.897
Pembayaran biaya-biaya bank dan lainnya	(21.147.163.695)	(18.551.528.924)
Pembayaran pajak	(6.174.119.072)	(329.356.579)
<b>Arus Kas Bersih (Diperoleh) Digunakan untuk Aktivitas Operasi</b>	<b><u>17.833.080.346</u></b>	<b><u>(37.996.562.643)</u></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penjualan aset tetap	-	27.371.896.250
Perolehan aset tetap	(236.817.371.043)	(177.650.650.354)
<b>Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b><u>(236.817.371.043)</u></b>	<b><u>(150.278.754.104)</u></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan utang bank	157.151.101.045	113.611.957.444
Pembayaran pokok pinjaman	(25.778.800.000)	(162.355.897.959)
Pembayaran kepada kreditur konkruen pemilik saham Seri B	(15.508.421.927)	-
<b>Arus Kas Bersih (Diperoleh) Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b><u>115.863.879.118</u></b>	<b><u>(48.743.940.515)</u></b>
Penurunan bersih kas dan setara kas	(103.120.411.580)	(237.019.257.262)
Kas dan setara kas pada awal tahun	145.112.280.226	382.131.537.488
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b><u>41.991.868.646</u></b>	<b><u>145.112.280.226</u></b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**1. U M U M**

**a. Sejarah PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero)**

PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) ("Perusahaan") didirikan pada tahun 1950 dengan nama NV Djakarta. Pada tahun 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 108 tahun 1961 status Perusahaan berubah menjadi Perusahaan Negara dengan nama PN Djakarta Lloyd dan pada tahun 1974 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1974 mengalami perubahan kembali menjadi Perusahaan Perseroan dengan nama PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero).

Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir berdasarkan Akta Lenny Janish Ishak, S.H., No. 3 tanggal 8 Agustus 2017 mengenai Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan tentang Pengalihan Penugasan dan Pengangkatan Direksi Perusahaan. Pemberitahuan perubahan tersebut telah diketahui oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-AH.01.03-0160985 tanggal 10 Agustus 2017.

Kantor Pusat Perusahaan saat ini berlokasi di D'lloyd Building Jalan Raden Saleh Raya 51 Cikini, Jakarta Pusat. Perusahaan memiliki 10 (sepuluh) kantor cabang yaitu kantor cabang Tanjung Priok, Surabaya, Manado (Bitung), Banyuwangi, Sibolga, Semarang, Panjang (Lampung), Bali (Benoa), Berau dan Pangkalan Susu (Sumatera Utara). Cabang-cabang tersebut pada umumnya membantu kegiatan usaha perusahaan dibidang keagenan.

**b. Maksud dan Tujuan Perusahaan Didirikan**

PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) merupakan Perusahaan Pelayaran Nasional yang bergerak dibidang pengangkutan kontainer dan muatan curah dengan jalur pelayaran internasional dan domestik. Berdasarkan Pasal 3 Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU- 39197.A.H 01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan.

Maksud dan tujuan Perusahaan didirikan adalah melakukan usaha dibidang angkutan laut dan penunjangnya serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan daya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan terbatas. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- 1) Menjalankan usaha usaha dalam bidang pelayaran angkutan laut, baik pelayaran samudera, *feeder* dan kegiatan angkutan yang menunjang usaha pelayaran samudera dan khususnya melayani pengangkutan kontainer.
- 2) Menjalankan kegiatan pemilik kapal.
- 3) Menjalankan keagenan kapal-kapal dan atau perusahaan pelayaran.
- 4) Melakukan kegiatan termilan di beberapa pelabuhan dalam negeri.
- 5) Melakukan kegiatan pergudangan dan ekspedisi untuk keperluan kapal yang diageni.
- 6) Melakukan kegiatan reparasi dan pemeliharaan serta galangan yang dimungkinkan oleh fasilitas yang tersedia.
- 7) Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kegiatan pokok (pelayaran).

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**1. U M U M (lanjutan)**

**b. Maksud dan Tujuan Perusahaan Didirikan (lanjutan)**

Pada tahun buku 2018 kegiatan utama Perusahaan saat ini bergerak di bidang angkutan curah, usaha bongkar muat, keagenan, penyewaan harbour tug. Perusahaan melakukan sinergi dengan BUMN yaitu PT PLN (Persero) untuk mengangkut batubara dari daerah tambang ke PLTU dengan menggunakan kapal sendiri dan kapal pihak lain, sedangkan dibidang pelayaran samudera dan khususnya pengangkutan kontainer dalam keadaan stagnasi.

**c. Dewan Komisaris dan Perangkat Kerjanya, Direksi dan Karyawan**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Susunan Dewan Komisaris PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) per 31 Desember 2019 ditunjuk berdasarkan Akta Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta Nomor 67 tanggal 30 Desember 2019 yang disahkan melalui Surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusi No. AHU-AH.01.03-0380099, Dewan komisaris PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero), sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Komisaris	: Lambonar O. Silitonga	Maryono Maulus Atmadja

**Dewan Direksi**

Susunan Dewan Direktur Utama PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) per 31 Desember 2019 ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kementrian BUMN Nomor: SK-136/MBU/7/2017 tanggal 20 Juli 2017 dan Akta Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta Nomor 03 tanggal 08 Agustus 2017. Sedangkan Direktur Finance, HCM dan GA PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kementrian BUMN Nomor: SK-15/D7.MBU.4/1/2019 tertanggal 24 januari 2019 dan Akta Lenny Janis Ishak, S.H., Jakarta Nomor 06 tanggal 13 Februari 2019 sehingga susunan Dewan Direksi sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Direktur Utama	: Suyoto	Suyoto
Direktur Keuangan	: Ofan Sofwan	Tunggal Pusphitadani

Jumlah karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 sebanyak 153 dan 87 karyawan.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**1. U M U M (lanjutan)**

**d. Unit Usaha yang Dimiliki**

PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) dalam menjalankan kegiatan operasinya memiliki unit-unit usaha yang terdiri dari:

	<u>Jumlah Unit 2019</u>	<u>Jumlah Unit 2018</u>
Kantor Pusat	1	1
Kantor Cabang	10	11
SBU ( <i>Strategic Business Unit</i> )	1	1
Kantor SatGas	1	-
<b>Jumlah</b>	<u>13</u>	<u>13</u>

- Kantor Pusat terdiri dari 5 (lima) Divisi, 1 (satu) Biro, Satuan Pengawasan Intern dan Sekretaris Perusahaan.
- Kantor Cabang: Tanjung Priok, Semarang, Surabaya, Banyuwangi, Benoa-Bali, Sibolga-Medan, Panjang-Lampung, Bitung-Manado, Berau dan Pangkalan Susu dan Teluk Sirih (2018). Pada 2019, Kantor Cabang Teluk Sirih berubah status menjadi Kantor SatGas
- SBU (*Strategic Business Unit*): Makasar.

**e. Entitas Anak**

Perseroan memiliki secara langsung, 50% saham atau lebih pada entitas anak berikut:

<u>Entitas Anak</u>	<u>Lokasi</u>	<u>Kegiatan Usaha</u>	<u>% Kepemilikan</u>	<u>Tahun Operasi Komersial</u>
PT Dharma Lautan Nusantara	Jakarta	Bongkar Muat	99,92%	1986
PT Daya Laut Utama	Jakarta	Perbaikan Kapal	99,95%	1997

**PT Dharma Lautan Nusantara**

PT Dharma Lautan Nusantara (PT DLN), didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Soelaiman Arjasasmita, S.H., No.57 pada tanggal 31 Maret 1986. Pendirian Perusahaan tersebut dalam rangka menindaklanjuti Inpres IV tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi dan SK Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.KM.88/AL.305/Phb.85 tentang Perusahaan bongkar muat serta Keputusan Menteri Keuangan No.S-333/MK.011/1986 tanggal 31 Maret 1986 tentang izin usaha Perusahaan bongkar muat. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta No. 2 tanggal 10 Agustus 2009 dari Ny. Rosita Rianauli Sianipar, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai Perubahan Susunan Direksi. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 6.015.000.000,- Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan Kantor Pusat terletak di Jl. Swasembada Timur XI No. 48, Kebon Bawang, Tj. Priok, Jakarta Utara 14320 dan mempunyai 6 kantor cabang.



**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**1. U M U M (lanjutan)**

**e. Entitas Anak (lanjutan)**

Berikut ini ikhtisar laporan keuangan PT Dharma Lautan Nusantara Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aset	27.848.169.063	28.534.231.043
Liabilitas	14.463.355.499	17.828.856.108
Ekuitas	<u>13.384.813.563</u>	<u>10.705.374.935</u>
Pendapatan usaha	27.343.200.345	39.471.347.828
Beban pokok pendapatan	<u>(13.197.803.810)</u>	<u>(23.385.468.488)</u>
<b>Laba Kotor</b>	<b><u>14.145.396.535</u></b>	<b><u>16.085.879.340</u></b>
Beban usaha	<u>(11.506.774.706)</u>	<u>(9.387.584.185)</u>
<b>Laba usaha</b>	<b><u>2.638.621.829</u></b>	<b><u>6.698.295.155</u></b>
<b>Pendapatan (Beban) Lain-Lain</b>		
Pendapatan non-usaha	2.373.053.082	1.293.668.806
Beban non usaha	<u>(415.827.125)</u>	<u>(3.082.858.914)</u>
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b>	<b><u>4.595.847.786</u></b>	<b><u>4.909.105.047</u></b>
Manfaat (beban) pajak	<u>(1.918.523.143)</u>	<u>(1.330.464.787)</u>
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b><u>2.677.324.643</u></b>	<b><u>3.578.640.260</u></b>

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

**a. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian**

**1) Pernyataan Kepatuhan**

Laporan keuangan konsolidasi disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia yang telah konvergen dengan IFRS; dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Penyajian laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**a. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian**

**2) Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- Nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan Liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian;
- Jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

**b. Penjabaran Mata Uang Asing**

**Mata Uang Fungsional dan Pelaporan**

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan pada perseroan dan entitas anaknya diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perseroan.

Seluruh angka keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali apabila dinyatakan lain.

**Transaksi dan Saldo**

Sesuai PSAK 10 (Penyesuaian 2014): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing, pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional (yaitu, Rupiah). Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi.

Pada akhir setiap periode pelaporan:

- Pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup;
- Pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
- Pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**b. Penjabaran Mata Uang Asing (lanjutan)**

Kurs penutup yang digunakan pada akhir periode pelaporan adalah kurs tengah Bank Indonesia sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
1 USD	13.901	14.481
1 SGD	10.320	10.603

Selanjutnya, untuk pungutan dan penyetoran pajak-pajak (PPN dan PPh) berkenaan dengan tagihan dan Liabilitas dalam mata uang asing dibayarkan dengan Rupiah, dan dicatat sesuai dengan 'kurs pajak mingguan' yang berlaku pada tanggal diterbitkannya faktur pajak yang bersangkutan.

**c. Dasar Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai dimana Perusahaan memiliki kekuasaan atas investee; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan diatas.

Ketika Perusahaan memiliki kurang dari hak suara mayoritas di-investee, ia memiliki kekuasaan atas investee ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak.

Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan, yang relevan dalam menilai apakah hak suara atas investee tersebut mencukupi untuk memberinya kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relative terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) fakta dan keadaan tambahan apapun yang mengindikasikan bahwa investor memiliki atau tidak memiliki kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola pemilihan suara dalam RUPS sebelumnya.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak tersebut dan tidak mengkonsolidasikan entitas anak ketika kehilangan pengendaliannya. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak yang diakuisi atau dilepas selama tahun berjalan diakuisi dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**c. Dasar Konsolidasian (lanjutan)**

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada Perusahaan dan kepentingan non pengendali. Perusahaan juga mengatribusikan jumlah laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non pengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Grup.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra kelompok usaha, ekuitas, pendapatan, biaya dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasi.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Nilai tercatat kepentingan entitas anak dan kepentingan non pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Selisih antara jumlah kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, keuntungan dan kerugian diakui didalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) keseluruhan nilai wajar yang diterima dan nilai wajar dari setiap sisa investasi dan (ii) nilai tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill) dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non pengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan/diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

Kepentingan non-pengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan non-pengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan non-pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi.

Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan non-pengendali adalah jumlah kepentingan non-pengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan non-pengendali atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas. Jumlah penghasilan komprehensif diatribusikan pada kepentingan non-pengendali, bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**c. Dasar Konsolidasian (lanjutan)**

Bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas aset neto entitas anak disajikan sebagai kepentingan non-pengendali pada Laporan Posisi Keuangan konsolidasian. Hak non-pengendali atas laba (rugi) neto entitas anak pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian disajikan sebagai Laba/Rugi Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Non-pengendali”.

**d. Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi, didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 (Penyesuaian 2015), tentang Pengungkapan Pihak-pihak berelasi, bahwa pihak-pihak berelasi adalah orang atau Perseroan yang terkait dengan Perseroan yang menyiapkan laporan keuangannya (“perseroan pelapor”):

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perseroan pelapor, jika orang tersebut:
  - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perseroan pelapor,
  - b) Memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan pelapor, atau;
  - c) Personal manajemen kunci Perseroan pelapor atau Perseroan induk Perseroan pelapor.
- 2) Suatu Perseroan berelasi dengan Perseroan pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - a) Perseroan dan perseroan pelapor adalah anggota dari perseroan dan entitas anaknya yang sama (artinya Perseroan induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan Perseroan lain).
  - b) Satu Perseroan adalah Perseroan asosiasi atau ventura bersama dari Perseroan lain (atau Perseroan asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perseroan dan Entitas Anak, dimana Perseroan lain tersebut adalah anggotanya).
  - c) Kedua Perseroan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - d) Satu Perseroan adalah ventura bersama dari Perseroan ketiga dan Perseroan yang lain adalah Perseroan asosiasi dari Perseroan ketiga.
  - e) Perseroan tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perseroan pelapor atau Perseroan yang terkait dengan Perseroan pelapor. Jika Perseroan pelapor adalah Perseroan yang menyelenggarakan program tersebut, Perseroan sponsor juga berelasi dengan Perseroan pelapor.
  - f) Perseroan yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir - a.
  - g) Orang yang diidentifikasi dalam butir - a, angka 1) memiliki pengaruh signifikan terhadap Perseroan atau personil manajemen kunci Perseroan (atau Perseroan induk dari Perseroan).

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**e. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai setara kas, antara lain:

- a. Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya (termasuk *deposit on call*); dan
- b. Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan untuk bank garansi tidak diklasifikasikan sebagai dari "Kas dan Setara Kas". Kas dan deposito berjangka ini disajikan sebagai bagian dari "Aset Keuangan Lancar Lainnya" atau "Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya".

**f. Investasi Pada Entitas Asosiasi**

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan tersebut. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan tentang aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Penghasilan operasi dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58, Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Investasi pada entitas asosiasi dicatat di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas aset bersih entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan, dikurangi dengan penurunan nilai yang ditentukan untuk setiap investasi secara individu.

Bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi yang melebihi nilai tercatat dari investasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, secara substansi, merupakan bagian dari Grup dan nilai investasi bersih entitas anak dalam entitas asosiasi) diakui hanya sebatas bahwa Grup telah mempunyai Liabilitas hukum atau Liabilitas konstruktif atau melakukan pembayaran atas Liabilitas entitas asosiasi atau ventura bersama.

Investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari tanggal pada saat investee menjadi entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen dari entitas asosiasi atau ventura bersama yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilai sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali segera diakui di dalam laba rugi pada periode di mana investasinya diperoleh.



**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**f. Investasi Pada Entitas Asosiasi (lanjutan)**

Persyaratan dalam PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama Grup. Jika perlu, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas dari tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual.

Ketika Grup mempertahankan kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama terdahulu dan sisa kepentingan adalah aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa kepentingan pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar dianggap sebagai nilai wajarnya pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 55. Selisih antara jumlah tercatat entitas asosiasi atau ventura bersama pada tanggal metode ekuitas dihentikan penggunaannya, dan nilai wajar setiap investasi yang tersisa dan setiap hasil dari pelepasan bagian kepentingan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pelepasan dari entitas asosiasi atau ventura bersama.

Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi atau ventura bersama telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi atau ventura bersama akan direklasifikasi ke laba rugi pada saat pelepasan dari aset atau liabilitas terkait, Grup mereklasifikasi laba rugi dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) entitas asosiasi atau ventura bersama ketika metode ekuitas dihentikan penggunaannya

Grup melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

Ketika Grup mengurangi kepemilikannya di entitas asosiasi atau ventura bersama tetapi Grup terus menggunakan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke dalam laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang berkaitan dengan penurunan kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas terkait). Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi atau ventura bersama keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sepanjang kepemilikan dalam entitas asosiasi atau ventura bersama yang tidak terkait dengan Grup.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan**

Efektif tanggal 1 Januari 2018, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 50 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Penyajian, PSAK 55 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran dan PSAK 60 (Revisi 2014): Instrumen Keuangan: Pengungkapan". Sebagai dampak penerapan PSAK tersebut adalah tambahan pengungkapan pada kebijakan akuntansi dan pengungkapan pada catatan 37 mengenai Instrumen Keuangan: Informasi Risiko Keuangan.

Perseroan dan entitas anaknya mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Perseroan dan entitas anaknya menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal transaksi.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan dan Entitas Anak mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, perseroan dan entitas anak mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas lain-lain.

**1) Aset Keuangan**

**Penentuan Nilai Wajar**

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (bid price untuk posisi beli dan ask price untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila bid price dan ask price yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi.

Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

Dalam hal nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal menggunakan teknik penilaian, maka investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga dinyatakan pada biaya perolehan setelah dikurangi penurunan nilai.

Perseroan dan entitas anaknya mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- a. Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- b. Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan
- c. Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**1) Aset Keuangan (lanjutan)**

**Pengakuan Awal**

Aset keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang, (iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo, serta (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya, jika diperbolehkan dan diperlukan, mengevaluasi kembali pengklasifikasian aset tersebut pada setiap akhir periode keuangan.

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah (dalam hal investasi yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan pengiriman aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (perdagangan yang lazim) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perseroan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Perseroan dan entitas anaknya memiliki aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan aset keuangan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo tidak diungkapkan.

**Pengukuran setelah Pengakuan Awal**

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

**a) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual. Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan di amortisasi tersebut memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Pengukuran setelah Pengakuan Awal (lanjutan)**

**a) Pinjaman yang Diberikan dan Piutang (lanjutan)**

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kategori ini meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, dan aset keuangan lancar lainnya yang dimiliki oleh perseroan dan entitas anak.

**Piutang**

Piutang usaha merupakan hak yang muncul dari penyerahan barang atau jasa dalam kegiatan usaha perseroan dan entitas anak pada umumnya dan diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang dikelompokkan sebagai aset lancar.

Piutang usaha merupakan hak yang muncul dari penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan usaha Perseroan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perseroan dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain tersebut melunasi pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterimanya atau utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Pada saat pengakuan awal, piutang usaha yang mempunyai masa angsuran lebih dari 1 (satu) tahun diukur sesuai dengan nilai wajarnya. Setelah pengakuan awal piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Perseroan dan entitas anak menetapkan cadangan penurunan nilai piutang secara kolektif dengan menggunakan metode roll rate method atau dikenal sebagai *Migration Analysis* atau *Flow Model*. Model ini menggunakan pengalaman masa lalu untuk menghitung rata-rata persentase perpindahan (*roll rate average*) dan disesuaikan secara statistik untuk persentase-persentase yang berubah secara signifikan.

Penghapusbukuan piutang harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar. Piutang yang telah dihapusbukukan, dicatat secara ekstra-komtabel dan tidak menghilangkan Liabilitas penagihan. Apabila ternyata piutang tersebut dapat dibayar/dilunasi oleh debitur, dicatat dan diklasifikasikan dalam akun "pendapatan non- usaha". Penyisihan penurunan nilai (yaitu cadangan kerugian penurunan piutang tak tertagih yang sudah 100% dari jumlah piutang), tetap disajikan sebagai bagian piutang.

**b) Aset Keuangan - Tersedia Untuk Dijual**

Investasi jangka panjang dalam bentuk saham, kecuali investasi pada perusahaan asosiasi, diklasifikasikan dalam kategori ini dan dinyatakan pada nilai wajar. Bila tidak ada pasar aktif untuk investasi tersebut dan nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal, investasi ini diukur sebesar biaya perolehan, dikurangi penurunan nilai.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Pengukuran setelah Pengakuan Awal (lanjutan)**

Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur dengan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas akan direklas ke laporan laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi. Jika Perseroan memiliki investasi berikut yang diklasifikasikan sebagai AFS, maka:

- Investasi saham yang nilai wajarnya tidak tersedia dengan kepemilikan modal kurang dari 20%, dan investasi jangka panjang lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Penerapan nilai wajar bilamana memungkinkan menggunakan mark to model, dengan mendapatkan rencana jangka panjang investasi, dan diperhitungkan dengan metode tingkat rata-rata arus kas masuk bersih selama 3-5 tahun kedepan yang didiskonto dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- Investasi saham ekuitas yang nilai wajarnya tersedia dengan kepemilikan modal kurang dari 20% dan yang diklasifikasikan dalam kelompok AFS, dicatat sebesar nilai wajarnya.

**2) Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan hutang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai.

**Pengakuan awal**

Perseroan dan entitas anak menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal. Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan hutang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Perseroan dan entitas anak memiliki liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif tidak diungkapkan.

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.



**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**2) Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan perseroan dan entitas anaknya untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan ini pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, kategori ini meliputi utang usaha, beban akrual, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, utang jangka panjang dan liabilitas keuangan jangka panjang lainnya yang dimiliki oleh perseroan dan entitas anak.

**Pinjaman dan Utang**

Setelah pengakuan awal, pinjaman dan utang yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba-rugi pada saat Liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

**3) Saling Hapus dari Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling-hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling-hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan Liabilitasnya secara simultan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca) adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (bid price untuk posisi beli dan ask price untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila bid price dan ask price yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*nett present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*), dan model penilaian lainnya.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**4) Penentuan Nilai Wajar**

Dalam hal nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal menggunakan teknik penilaian, maka investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga dinyatakan pada biaya perolehan setelah dikurangi penurunan nilai.

**Penyesuaian Risiko Kredit**

Perseroan menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan.

Dalam menentukan nilai wajar posisi Liabilitas keuangan, risiko kredit Perseroan terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

**5) Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan**

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

**6) Penurunan Nilai dari Aset Keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

**- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi**

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual.

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan melakukan penurunan nilai untuk kelompok tersebut dengan metode 'kolektif'. Aset yang penurunan nilainya menggunakan metode 'individual', penyisihan atas kerugian penurunan nilainya dikeluarkan dari perhitungan secara 'kolektif'.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**6) Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)**

**- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)**

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada setiap tanggal pelaporan, Perseroan dan entitas anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa, aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam atau penerbit instrumen keuangan;
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
  - i. Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
  - ii. Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**6) Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)**

**- Aset keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)**

Jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak. Sebagai panduan praktis, Perseroan dapat mengukur penurunan terhadap nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitor), maka pembalikan atas kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Uji penurunan nilai dilakukan secara individual untuk aset keuangan yang signifikan yang terdapat indikasi penurunan nilai (piutang yang bukan berasal dari transaksi jasa kepelabuhanan). Uji penurunan nilai dilakukan secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan dan aset keuangan yang signifikan tetapi tidak memiliki indikasi penurunan nilai berdasarkan data historis.

Perseroan dan entitas anak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha berdasarkan pendekatan kolektif dengan menggunakan *'roll rate method'*. Nilai kini estimasi arus kas masa datang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan dan piutang yang memiliki suku bunga variabel, tingkat diskonto untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif terkini. Nilai tercatat aset keuangan diturunkan secara langsung melalui kerugian penurunan nilai untuk seluruh aset keuangan, kecuali untuk piutang usaha dan piutang non-usaha dimana nilai tercatat diturunkan melalui akun penyisihan penurunan nilai piutang. Bila piutang usaha atau piutang non-usaha tidak tertagih, piutang dihapuskan terhadap akun penyisihan penurunan nilai piutang.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang (terpulihkan) karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**6) Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)**

**- Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual**

Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, bukti obyektif akan meliputi penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi dibawah biaya perolehannya.

Jika terdapat bukti bahwa, kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi - di-reklas dari ekuitas ke laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi, kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.

Dalam hal instrumen utang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Bunga tetap diakui berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen hutang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

Akrual tersebut dicatat sebagai bagian dari akun "pendapatan bunga" dalam laporan laba rugi. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

**7) Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan**

**Aset Keuangan**

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya, pada saat:

- Hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau
- Perseroan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung Liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**7) Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

- Perseroan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perseroan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Perseroan.

**Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi.

**8) Klasifikasi Atas Instrumen Keuangan**

Perseroan dan entitas anak mengklasifikasi-instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.

<b>Instrumen Keuangan</b>	<b>Kategori</b>	<b>Golongan</b>	<b>Sub Golongan</b>
Aset Keuangan	Pinjaman yang Diberikan dan Piutang	Kas dan Setara kas	Kas Tunai dan Deposito
		Piutang Usaha	Piutang Angkutan, Piutang Sewa, Piutang Charter Out, Piutang Harbour Tug, Piutang EMKL, Piutang Titipan Sementara, Piutang Tol Laut.
		Aset Keuangan Lancar Lainnya	

Perseroan dan entitas anak mengklasifikasi-instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut.



**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**g. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**8) Klasifikasi Atas Instrumen Keuangan (lanjutan)**

<b>Instrument Keuangan</b>	<b>Kategori</b>	<b>Golongan</b>	<b>Sub Golongan</b>
Liabilitas Keuangan	Liabilitas Keuangan yang Diukur dengan Biaya Perolehan Diamortisasi	Utang usaha	Utang Dalam Negeri, Utang Rekanan Dalam Negeri, Utang Perumpel, Titipan sementara
		Beban Akrual	Gaji dan tunjangan karyawan.
			Beban Pemeliharaan
			Beban Umum dan Administrasi
			Beban yang masih harus dibayar lain-lain
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	Utang Pesangon dan Pensiun Pendapatan diterima dimuka
		Utang Jangka Panjang	Utang Bank
			Sewa Pembiayaan
			Rekening Dana Investasi (RDI)

**h. Persediaan**

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi bersih. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk menjual.

Penyisihan atas persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca). Penurunan nilai persediaan akibat nilai realisasi bersih lebih rendah daripada biaya perolehan diakui sebagai kerugian pada periode berjalan. Persediaan rusak, alat induknya sudah tidak ada atau secara ekonomis tidak dapat digunakan dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok "aset tidak lancar lainnya".

**i. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka**

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih.

Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya menggunakan metode garis lurus. Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka disajikan sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui pada periode berjalan. Biaya dibayar dimuka jangka panjang disajikan sebagai "Aset Tidak Lancar Lainnya" dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca).

Uang muka merupakan sejumlah kas keluar atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapat pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**j. Properti Investasi**

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Pada awalnya, properti investasi diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Selanjutnya setelah penilaian awal, properti investasi dinilai dengan menggunakan nilai wajar, yaitu setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui dalam jumlah tercatat properti investasi jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan properti investasi tersebut akan mengalir ke perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi.

Properti investasi disusutkan dengan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya.

Properti investasi dihentikan pengakuannya (dikeluarkan dari laporan posisi keuangan konsolidasi) pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Transfer ke, atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain, berakhirnya konstruksi atau pengembangan, dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

**k. Aset Tetap**

Perusahaan dan entitas anak telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap, kecuali tanah dan hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**k. Aset Tetap (lanjutan)**

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (*derecognized*) pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan rugi komprehensif konsolidasian pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

**Biaya kemudian setelah biaya perolehan pertama kali**

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis berupa peningkatan kapasitas atau mutu produksi dari aset, dikapitalisasi dan disusutkan sesuai dengan tarif penyusutan yang berlaku.

**Penyusutan**

Penyusutan dimulai sejak aset mulai atau siap digunakan, dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis dengan persentase penyusutan tahunan dari biaya perolehan sebagai berikut:

<b>Golongan</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>	<b>Tarif Penyusutan %</b>
<b>Aset Tetap Non Pelayaran</b>		
Bangunan	20	5%
Kendaraan	5	20%
Inventaris	5	20%
<b>Aset Tetap Pelayaran</b>		
Armada Kapal	30	3,33%
Kontainer	10	10%

Penyusutan aset tetap dihitung secara bulanan, dan pembebanannya dimulai pada bulan berikutnya setelah aset tersebut digunakan.

Biaya pemeliharaan/perbaikan barang inventaris, kendaraan, dan kontainer diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**l. Aset Tetap dalam Konstruksi**

Aset tetap dalam konstruksi adalah aset tetap yang dibangun oleh pihak ketiga dengan syarat pembayaran bertahap, dinilai berdasarkan prosentase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan berita acara kemajuan fisik pekerjaan dan dicatat sebagai pekerjaan dalam konstruksi.

**m. Aset Tidak Berwujud**

Beban perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud. Beban tersebut diamortisasi selama, mana yang lebih pendek antara umur legal atau umur ekonomi tanah. Jika beban pengurusan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah tidak material, maka dibebankan pada periode berjalan.

Aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset tak berwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Kelompok Usaha mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud.

Umur manfaat aset tak berwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas. Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi sesuai umur manfaat ekonomis dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mengalami penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah sekurang-kurangnya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengubah periode atau metode amortisasi dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dicatat sebagai beban pada laba rugi sesuai dengan fungsi aset tak berwujud tersebut.

Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji setiap tahun untuk penurunan nilai, secara individual atau pada tingkat unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat aset tak berwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali. Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, maka perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud selama 7 (tujuh) hingga 10 (sepuluh) tahun.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Biaya-biaya yang tidak mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode tidak dapat ditangguhkan, termasuk kerugian yang timbul dari kegiatan awal operasi dan biaya pra-operasi / perintisan usaha.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**n. Aset Lain-Lain**

Aset Tetap yang rusak dan usang adalah Aset Tetap yang tidak dipergunakan lagi untuk melaksanakan operasi perusahaan. Aset Tetap ini akan dihapuskan dan dimasukkan ke dalam daftar laba-rugi tahun berjalan, setelah ada keputusan direksi.

**o. Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan uang dari pihak lain sehubungan dengan jasa yang akan dilakukan oleh entitas dimasa depan, tetapi jasa tersebut belum diserahkan kepada pihak tersebut.

**p. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan dicatat sebesar nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima secara bruto, tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Jumlah yang menjadi bagian pihak ketiga seperti pajak pertambahan nilai dikeluarkan dari pendapatan. Jika terjadi pembayaran tangguh, maka Perusahaan mengakui pendapatan sebesar nilai wajar yaitu sebagai nilai kini dari seluruh penerimaan masa depan yang ditentukan berdasarkan tingkat bunga terkait (*imputed interest rate*).

Pendapatan sewa, bunga dan lainnya diakui dengan metode akrual.

Penghasilan dividen dari investasi saham diakui pada saat hak menerima dividen telah ditetapkan.

Beban diakui dengan menggunakan metode akrual dengan penegasan sebagai berikut: beban dikeluarkan dalam usaha untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan, beban yang tidak dapat dimanfaatkan untuk periode akuntansi berikutnya, beban penurunan aset yang tidak mungkin dihindarkan.

**q. Imbalan Kerja**

**Imbalan Kerja Jangka Pendek**

Imbalan kerja - jangka pendek merupakan imbalan kerja yang dibayarkan dalam waktu kurang dari satu tahun, meliputi antara lain gaji, upah dan iuran jaminan sosial. Liabilitas pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto dan dibebankan pada laporan rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan serta dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar/beban akrual.

**Imbalan Kerja Jangka Panjang**

Imbalan kerja - jangka panjang merupakan imbalan kerja yang akan dibayarkan/terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Liabilitas pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah yang didiskontokan dan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi dan liabilitas.

Bagian Liabilitas yang akan jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi akan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dan bagian Liabilitas yang akan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dicatat sebagai liabilitas jangka panjang.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**q. Imbalan Kerja (lanjutan)**

**1) Pensiun**

**Program Pensiun Manfaat Pasti**

Perseroan menyelenggarakan program pensiun mafaat pasti (*defined benefit*) untuk seluruh karyawan tetap. Program Dana Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah manfaat pensiun, yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, setelah memperhitungkan faktor usia, masa kerja dan jenjang kepangkatan (golongan) dan nilai kompensasi.

Untuk tujuan pelaporan keuangan, imbalan pensiun manfaat pasti dihitung dengan menggunakan asumsi aktuarial berdasarkan metode *Projected Unit Credit (PUC)* seperti yang diharuskan oleh PSAK 24 (Revisi 2013): Imbalan Kerja. Untuk tujuan pendanaannya, metode aktuarial yang digunakan adalah *Projected Benefit Cost Method*, dengan capaian usia normal.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau Liabilitas pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangankonsolidasian interim untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak mengreklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

Beban bunga dan pengambilan aset dana pensiun yang diharapkan sebagaimana digunakan dalam PSAK 24 (Revisi 2013) versi sebelumnya digantikan dengan beban bunga – neto, yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur Liabilitas manfaat pasti – neto atau aset pada saat awal dari tiap periode pelaporan tahunan.

**2) Program Manfaat Karyawan Lainnya**

Perseroan juga memberikan imbalan pasca-kerja lain tanpa pendanaan berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan penghargaan/tabungan purna jabatan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perseroan

Imbalan program ini ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja karyawan. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perseroan sehubungan dengan imbalan kerja ini.

**r. Provisi**

Provisi diakui bila Perseroan dan entitas anak memiliki Liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Perseroan dan entitas anak diharuskan menyelesaikan liabilitas serta jumlah liabilitas tersebut dapat diestimasi secara andal.



**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**r. Provisi (lanjutan)**

Jumlah diakui sebagai provisi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan menyelesaikan Liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada liabilitas tersebut. Provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan liabilitas kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan Liabilitas kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

**s. Pajak Penghasilan**

Beban (penghasilan) pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas dan penghasilan komprehensif lain.

**Pajak kini**

Aset dan liabilitas pajak kini diakui, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset, dan jika jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantive telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**t. Transaksi Sewa**

Penentuan apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut. Evaluasi ulang atas perjanjian sewa dilakukan setelah tanggal awal sewa hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. Terdapat perubahan dalam persyaratan perjanjian kontraktual, kecuali jika perubahan tersebut hanya memperbarui atau memperpanjang perjanjian yang ada;

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**t. Transaksi Sewa (lanjutan)**

- b. Opsi pembaruan dilakukan atau perpanjangan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, kecuali ketentuan pembaruan atau perpanjangan pada awalnya telah termasuk dalam masa sewa;
- c. Terdapat perubahan dalam penentuan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada suatu aset tertentu; atau
- d. Terdapat perubahan substansial atas aset yang disewa.

Apabila evaluasi ulang telah dilakukan, maka akuntansi sewa harus diterapkan atau dihentikan penerapannya pada tanggal dimana terjadi perubahan kondisi pada skenario a, c atau d dan pada tanggal pembaharuan atau perpanjangan sewa pada skenario b.

**Perlakuan Akuntansi untuk Lessee**

**Sewa Pembiayaan**

Sewa pembiayaan, yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset kepada Perseroan, dikapitalisasi pada awal sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan sebagai kerugian pada laporan laba-rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Aset sewaan disusutkan selama masa manfaat aset tersebut, kecuali apabila terdapat ketidakpastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa atau masa manfaat.

**Sewa Operasi**

Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset tersebut tidak ditransfer kepada grup diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba-rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan secara garis lurus selama masa sewa.

**Perlakuan Akuntansi sebagai Lessor**

Sewa dimana Perseroan dan entitas anak tetap mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Biaya langsung awal yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui ke laporan laba-rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan selama masa sewa sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan sewa.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)**

**u. Penggunaan Saldo Laba Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham**

Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar Keputusan / Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) direalisasikan sesuai dengan isi keputusan tersebut. Penggunaan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada pembagian dividen, biaya pegawai dan penyisihan saldo laba ke cadangan umum. Pembagian laba tersebut tidak diperlakukan sebagai beban (expense) melainkan sebagai distribusi / pengurang saldo laba. (lihat catatan 25)

**v. Informasi Segmen**

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban;
- b. Yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya;
- c. Dan tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Untuk tujuan manajemen, Perseroan dan Entitas Anak dibagi menjadi beberapa segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji hasil operasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen. Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam catatan 32, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen

Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Perseroan dan entitas anak dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

**w. Kejadian Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode tahun pelaporan berjalan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Perseroan dan entitas anak pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi. Kejadian-kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan (neraca) akhir tahun yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasi.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**3. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

PKPU merupakan proses yang ditempuh PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) sebagai upaya Perusahaan untuk menyelesaikan Liabilitas utangnya baik internal maupun kepada pihak ketiga.

Hal ini dilatar belakangi oleh kondisi Perusahaan yang memburuk. Sejak tahun 2008 Perusahaan mengalami stagnasi sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya, alat produksi yang dimiliki tidak berfungsi, rusak berat, dilelang, dan atau dikuasai oleh pihak ketiga sebagai jaminan utangnya. Selain itu Perusahaan mencatatkan akumulasi kerugian mencapai Rp. 1,5 Triliun dari tahun 2007 sampai Desember 2012 yang menyebabkan modal menjadi negatif karena melampaui modal disetor.

Perusahaan juga tidak mampu membayar Liabilitas-Liabilitasnya, seperti gaji karyawan, utang usaha terhadap kreditur dalam dan luar negeri, utang pada bank, utang kepada negara yang total keseluruhannya mencapai Rp. 1,3 Triliun. Disisi lain Perusahaan tidak memiliki aset yang nilainya material. Aset Tetap Perusahaan yang terbesar adalah aset pelayaran berupa 14 (empat belas) kapal yang nilai perolehannya sebesar 931 Milyar, saat ini hanya tersisa 1 (satu) kapal KM Lhokseumawe. Disamping itu, aset pelayaran lainnya berupa kontainer sebanyak 3000 buah sebagian berada dalam kondisi rusak. Sedangkan aset tanah dan bangunan umumnya telah dikuasai bank sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman. Untuk aset bergerak berupa piutang, sebagian besar tidak dapat ditagih karena telah berumur lebih dari 5 tahun dan Perusahaan tidak melakukan kontak bisnis lagi dengan para debitur.

Kondisi anak Perusahaan yaitu PT Dharma Laut Nusantara (DLN) dan PT Daya Laut Utama (DLU) juga dalam keadaan merugi dan tidak dapat membagi dividen. Sebagai itikad baik Perusahaan dalam rangka menyelesaikan Liabilitas utangnya, maka disusunlah PKPU dengan putusan-putusan sebagai berikut:

- a. Mengkonversi sisa utang kreditur konkuren menjadi saham tanpa hak suara (*debt to equity swap*) sebagai bukti kesungguhan Perusahaan dalam upaya membayar Liabilitas kepada kreditur dan akan berkurang secara proporsional sesuai dengan pembayaran utang.
- b. Sebelum utang dikonversi menjadi saham Perusahaan memohon pemotongan utang dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Utang kepada negara, Perusahaan tidak memohon untuk pemotongan (*hair cut*) utang, karena sesuai dengan peraturan perundangan, utang kepada negara tidak dapat di *hair cut* kecuali persetujuan DPR, oleh karenanya akan dicicil 2,5% setiap tahun selama 13 tahun setelah masa tenggang (*grace period*) 5 (lima) tahun dan sisanya akan dijadwalkan ulang sesuai peraturan PMK No. 17 tahun 2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara.
  - 2) Kreditur Separatis yaitu kreditur yang telah menguasai jaminan yaitu utang PPA tidak di *hair cut*, tetapi dipersilahkan untuk mengeksekusi jaminan sehingga tidak diperhitungkan lagi sebagai utang yang akan direstrukturisasi, namun apabila terdapat sisa penjualan akan dikembalikan ke Perusahaan.
  - 3) Utang kreditur konkuren, 94 kreditur diantaranya utangnya kurang dari Rp 150 juta akan dibayar setelah proses PKPU (tahun 2014) sedangkan jumlah utang diatas Rp 150 juta utang tersebut akan dikurangi terlebih dahulu sebesar Rp 150 juta (tidak di *hair cut*) dan sisanya akan di *hair cut* sebanyak 32,5%. Atas sisa utang yang di *hair cut* maupun yang tidak di *hair cut* akan dicicil selama 13 tahun.
  - 4) Utang MTN Perusahaan memohon pemotongan utang sebesar 90% dan tidak ada bagian yang di *hair cut*. Utang tersebut akan dicicil selama 13 tahun.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**3. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (lanjutan)**

- c. Masa tenggang (*grace period*) pembayaran utang 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2019 dan utang akan dicicil selama 13 (tiga belas) tahun.
- d. Pembayaran utang akan dilaksanakan setiap triwulan dan dimulai pada triwulan pertama tahun 2019.
- e. Perusahaan menganggarkan Rp 41,6 Miliar per tahun yang diperuntukkan untuk pembayaran utang.

Jumlah utang didasarkan registrasi ulang kreditur pada Pengadilan Niaga per 9 Juli 2013, berdasarkan hasil registrasi ulang tersebut saldo utang Perusahaan adalah sebesar Rp 1,3 Triliun dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Utang					Masa Tenggang	Cicilan Utang		
	Awal	Direstrukturalisasi	%	Hair Cut	Sesudah		Mulai	Waktu	Jumlah
<b>Kreditur Preferen</b>									
Pajak	137.510	137.510	0,00%	-	137.510	5 Tahun	2019	13 Tahun	3.438
<b>Subjumlah</b>	<b>137.510</b>	<b>137.510</b>			<b>137.510</b>				
<b>Kreditur Preferen</b>									
Dana Talangan PT PPA	1.403	-	0,00%	-	-	5 Tahun	2019	13 Tahun	-
Bank Commonwealth (Belum Mendaftar)	1.700	-	0,00%	-	-	5 Tahun	2019	13 Tahun	-
<b>Subjumlah</b>	<b>3.103</b>	<b>-</b>			<b>-</b>				<b>-</b>
<b>Kreditur Konkuren</b>									
Utang Usaha									
- Yang Mendaftar	250.563	241.863	32,50%	78.248	171.216	5 Tahun	2019	13 Tahun	13.170
- Yang Tidak Mendaftar	234.029	224.579	32,50%	72.206	159.418	5 Tahun	2019	13 Tahun	12.263
- BUMN	35.208	34.608	32,50%	11.247	23.960	5 Tahun	2019	13 Tahun	1.843
- Perusahaan Anak	16.399	16.099	32,50%	5.232	11.167	5 Tahun	2019	13 Tahun	859
Utang Bank Indover	5.552	5.402	32,50%	1.755	3.796	5 Tahun	2019	13 Tahun	292
Utang Bank Mandiri	57.378	57.228	32,50%	18.599	38.779	5 Tahun	2019	13 Tahun	2.983
MTN	295.608	295.608	90,00%	266.046	29.561	5 Tahun	2019	13 Tahun	2.274
<b>Subjumlah</b>	<b>894.737</b>	<b>875.387</b>		<b>453.331</b>	<b>437.897</b>				<b>33.685</b>
RDI	171.579	171.579		-	171.579	5 Tahun	2019	13 Tahun	4.289
Perhitungan Rp 150 juta yang tidak di <i>hair cut</i>	-	19.500	0,00%	-	19.500	5 Tahun	2019	13 Tahun	1.500
<b>Utang (tanpa Pesangon &amp; Pensiun Paket)</b>	<b>1.066.316</b>	<b>1.066.466</b>		<b>453.331</b>	<b>766.486</b>				<b>41.597</b>
<b>Pesangon dan Pensiun Paket</b>	<b>64.625</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>-</b>	<b>64.625</b>		<b>2014</b>	<b>13 Tahun</b>	<b>21.524</b>
<b>Jumlah Utang</b>	<b>1.130.941</b>	<b>1.066.466</b>		<b>453.331</b>	<b>831.111</b>				<b>63.139</b>

**4. KAS DAN SETARA KAS**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Kas</b>		
Rupiah	503.471.849	1.562.274.189
Dollar Amerika Serikat (USD)	300.311.432	656.296.523
<b>Sub Jumlah</b>	<b>803.783.281</b>	<b>2.218.570.712</b>
<b>Bank</b>		
<b>Pihak Berelasi</b>		
<b>Rupiah</b>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.738.056.847	2.925.819.658
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21.078.347.555	133.618.340.992
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	628.690.936	39.123.159
<b>Sub Jumlah</b>	<b>23.445.095.338</b>	<b>136.583.283.809</b>
<b>Valuta Asing</b>		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2019: USD 121.202, dan 2018: USD 262.223)	1.684.825.919	3.797.257.177
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019: USD 1.523, dan 2018: USD 5.296)	21.173.189	76.689.644
<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.705.999.108</b>	<b>3.873.946.821</b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b><u>Pihak Ketiga</u></b>		
<b>Rupiah</b>		
PT Bank Central Asia Tbk	570.460.657	464.212.438
PT Bank CIMB Niaga	48.764.348	48.764.348
PT Bank OCBC NISP	29.844.483	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	26.307.046	51.564.206
PT Bank Mega Tbk	12.638.599	205.948.757
Bank Jatim	4.261.835	4.693.835
<b>Sub Jumlah</b>	<b>692.276.968</b>	<b>775.183.584</b>
<b><u>Valuta Asing</u></b>		
<b>Dollar</b>		
PT Bank Central Asia Tbk (2019: USD 14.041, dan 2018: USD 14.369)	195.191.449	208.076.620
PT Bank Mega Tbk (2019: USD 243,59 , dan 2018: USD 347)	3.386.255	5.018.680
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2019: USD 10.513)	146.136.247	-
<b>Sub jumlah</b>	<b>344.713.951</b>	<b>213.095.300</b>
<b>Deposito</b>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.000.000.000	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No: Rek 768-065-056	-	1.448.200.000
<b>Jumlah Deposito</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.448.200.000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>41.991.868.646</b>	<b>145.112.280.226</b>

Berdasarkan Surat No: Krm/1.3/28/2018 PT Perusahaan Bongkar Muat Dharma Lautan Nusantara, menempatkan Deposito di Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nominal USD 100.000 (Seratus ribu dollar), jangka waktu 7 (hari) dari tanggal 26/12/2018 s/d 02/01/2018 dan tingkatan suku bunga sebesar 1,7%.

Manajemen telah menganggarkan saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp8.419.093.846 untuk tujuan pembayaran PKPU pada triwulan pertama tahun 2019.

Seluruh kas dan setara kas adalah milik Perseroan dan entitas anak tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi penggunaan. Penjelasan pihak-pihak berelasi lihat catatan 33.



**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**5. PIUTANG USAHA**

Akun ini seluruhnya merupakan piutang usaha kepada pihak ketiga dan pihak berelasi yang berasal dari layanan jasa angkutan dan optimalisasi aset, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>Pihak Berelasi</u></b>		
PT PLN (Persero)	80.380.568.510	91.242.496.730
Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut)	-	10.278.029.111
<b>Sub jumlah</b>	<b>80.380.568.510</b>	<b>101.520.525.841</b>
<b><u>Pihak Ketiga</u></b>		
PT PLN Batubara	11.225.998.000	36.615.967.088
PT Melco Jaya Bahari	67.171.877.008	45.147.418.500
PT Bahtera Adhiguna	8.751.965.117	
PT Buana Amanah Karya- Tanah Inggom	4.543.267.015	2.244.067.815
PT Mentari Sejati Perkasa	2.529.390.707	2.485.258.736
PT KEA Batubara	11.597.888.636	10.141.758.000
PT Kaltim Prima Coal	8.190.000.000	-
Lainnya rata-rata Rp1.000.000.000	27.163.046.536	20.771.485.476
<b>Sub Jumlah</b>	<b>141.173.433.019</b>	<b>117.405.955.614</b>
Dikurangi – Kerugian penurunan nilai	(6.330.357.227)	(6.108.792.637)
<b>Jumlah Piutang Pihak Ketiga - Bersih</b>	<b>134.843.075.792</b>	<b>111.297.162.977</b>

Mutasi provisi kerugian penurunan nilai piutang usaha tak tertagih sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Saldo Awal</b>	<b>6.108.792.637</b>	<b>4.885.950.585</b>
Provisi tahun berjalan	221.564.590	1.222.842.052
Pemulihan	-	-
<b>Saldo Akhir</b>	<b>6.330.357.227</b>	<b>6.108.792.637</b>

Manajemen berkeyakinan bahwa, provisi penurunan nilai piutang usaha tak tertagih cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang usaha di kemudian hari dan tidak ada pemulihan atas provisi penurunan nilai piutang usaha tak tertagih pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca).

**6. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Piutang lain-lain bersih	7.328.799.868	20.263.420.598
Pendapatan yang masih harus diterima	556.296.465	2.062.764.549
<b>Saldo Akhir</b>	<b>7.885.096.333</b>	<b>22.326.185.147</b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**6. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)**

Adapun uraian dari tiap aset keuangan lancar lainnya, sebagai berikut:

**a. Piutang Lain-Lain**

Akun ini merupakan piutang non usaha yang terdiri dari piutang karyawan, piutang pihak ketiga dan pendapatan yang harus diterima rincian sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Piutang kepada pihak ketiga	10.747.974.539	23.051.563.667
Piutang pihak afiliasi	22.885.900	-
Piutang Pegawai	376.401.006	1.015.201.007
Lain-lain	-	15.117.500
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>11.147.261.445</u></b>	<b><u>24.081.882.174</u></b>
<i>Dikurangi – Provisi kerugian penurunan nilai</i>	<u>(3.818.461.577)</u>	<u>(3.818.461.577)</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>7.328.799.868</u></b>	<b><u>20.263.420.598</u></b>

Piutang kepada pihak ketiga sebesar Rp 10.747.974.539 (2019) merupakan piutang kepada Pelindo III Banyuwangi, PT Pendawa Lima Jayantara dan K.S.M.

Piutang kepada pihak ketiga Rp 23.051.563.667 (2018) terdiri dari piutang atas penjualan armada kapal dengan PT SIER Puspa Utama dan Balai Lelang Tri Agung Lumintu dengan nilai piutang masing-masing sebesar Rp15.840.000.000 dan Rp350.000.000.

Mutasi provisi kerugian penurunan nilai piutang lain-lain sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Saldo Awal</b>	<b>3.818.461.577</b>	<b>3.818.461.577</b>
Provisi kerugian penurunan nilai	-	-
Pemulihan	-	-
<b>Saldo Akhir</b>	<b><u>3.818.461.577</u></b>	<b><u>3.818.461.577</u></b>

**b. Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

Akun ini merupakan pendapatan yang masih harus diterima dari aktivitas bongkar muat pada entitas anak per 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp556.296.465 untuk tahun 2019 dan Rp2.062.764.549 untuk tahun 2018.

**7. PERSEDIAAN**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Persediaan bunker	25.893.514.650	11.665.115.168
Alat bongkar mekanik	10.604.800	141.090.673
<b>Jumlah</b>	<b><u>25.904.119.450</u></b>	<b><u>11.806.205.841</u></b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**7. PERSEDIAAN (lanjutan)**

Tidak terdapat persediaan yang digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya.

Persediaan tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, burglary dan resiko lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa persediaan Perseroan terletak pada beberapa lokasi, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian dalam waktu yang bersamaan untuk beberapa lokasi adalah sangat kecil.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat dari persediaan tidak melebihi nilai pengganti atau nilai pemulihan aset dan tidak terdapat persediaan usang pada komponen aset lancar.

**8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
a. Biaya dibayar dimuka	20.933.232.149	5.723.263.978
b. Uang muka	<u>12.998.583.450</u>	<u>11.672.409.256</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>33.931.815.599</u></b>	<b><u>17.395.673.234</u></b>

a. Akun ini merupakan biaya yang telah dibayar terlebih dahulu atas pembayaran asuransi dan sewa, operasional dan biaya lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Asuransi dibayar dimuka	4.150.581.266	3.065.815.908
Sewa dibayar dimuka	2.293.014.301	1.895.101.548
Lain-lain	<u>14.489.636.582</u>	<u>762.346.522</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>20.933.232.149</u></b>	<b><u>5.723.263.978</u></b>

Asuransi dibayar dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp4.150.581.266 dan Rp3.065.815.908 merupakan saldo asuransi KM. Dharma Lautan Intan.

Sewa dibayar dimuka per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 2.293.014.301 dan Rp1.895.101.548 merupakan sewa dibayar dimuka untuk sewa gedung kantor yang belum jatuh tempo pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca).

Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp 14.489.636.582 dan Rp762.346.522, merupakan bank garansi kepada PT Pertamina (Persero).

b. Akun ini merupakan pembayaran uang muka atas kegiatan operasi dan lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Uang muka operasional	11.693.226.340	2.501.812.563
Biaya kepelabuhan	680.719.987	8.874.519.029
Pembelian aset tetap	-	83.605.114
Lain-lain	<u>624.637.123</u>	<u>212.472.550</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>12.998.583.450</u></b>	<b><u>11.672.409.256</u></b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA (lanjutan)**

Uang muka operasional per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp11.693.226.340 dan Rp2.501.812.563 merupakan uang muka kerja dan uang muka usaha.

Uang muka biaya kepelabuhanan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 680.719.987 dan Rp8.874.519.029 merupakan uang muka biaya kepelabuhanan kepada PT Pelabuhan Indonesia I, III, dan IV (Persero).

**9. PERPAJAKAN**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>a. Pajak Dibayar Dimuka</b>		
PPN Masukan	19.084.473.200	2.388.142.396
PPH Pasal 23	1.077.615.456	-
PPH Pasal 22	36.000.734	-
PPH Pasal 21	-	256.468
Klaim Pajak	5.013.251.212	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>25.211.340.602</u></b>	<b><u>2.388.398.864</u></b>
<b>b. Utang Pajak</b>		
PPH Pasal 21	455.666.261	104.922.411
PPH Pasal 23	89.566.881	74.312.462
PPH Pasal 29	30.024.928	1.058.338.542
Pajak Pertambahan Nilai	460.808.082	237.384.549
Pajak PPh Pasal 4 ayat 2	7.000.000	15.854.020
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.043.066.152</u></b>	<b><u>1.490.811.984</u></b>
<b>c. Manfaat (Beban) Pajak</b>		
<b><u>Pajak Kini</u></b>		
Induk saja	-	-
Entitas anak	713.122.028	1.382.652.123
<b>Jumlah</b>	<b><u>713.122.028</u></b>	<b><u>1.382.652.123</u></b>
<b><u>Pajak Tanggahan</u></b>		
Induk saja	(419.558.322)	1.482.736.877
Entitas anak	(1.205.401.115)	52.187.336
<b>Jumlah</b>	<b><u>(1.624.959.437)</u></b>	<b><u>1.534.924.213</u></b>
<b>Taksiran Pajak Penghasilan</b>		
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan (induk saja)	67.018.948.059	57.067.459.845
Bagian laba entitas anak	2.677.324.643	3.575.665.497
<b>Jumlah</b>	<b><u>69.696.272.702</u></b>	<b><u>60.643.125.342</u></b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>c. Manfaat (Beban) Pajak</b>		
<b>Perbedaan Temporer</b>		
Rugi penjualan aset fiscal	-	(309.975.667.948)
Beban penyisihan aset tidak lancar lainnya dan investasi	9.536.859.720	9.536.859.720
Beban penurunan nilai piutang usaha dan lain-lain	-	1.512.007.613
Penyusutan aset tetap	(17.860.204.917)	14.876.971.344
Beban manfaat karyawan	571.307.906	58.113.679
<b>Perbedaan Permanen</b>		
Pph 21 ditanggung perusahaan	1.804.114.270	1.178.707.968
Beban pajak penghasilan final	5.589.979.942	6.438.930.210
Beban Entertainment dan Representasi	2.367.101.839	2.309.457.648
Sumbangan (lain-lain)	164.593.435	-
Bagian laba entitas anak	-	(3.575.665.497)
Pendapatan Freight dan Charter	(545.833.939.672)	(520.332.081.916)
Beban Freight, Charter, Beban Operasi tidak langsung	520.895.021.278	457.802.428.765
Pendapatan lain-lain (Final)/(Pencatatan Aset)	(44.739.294.644)	-
Pendapatan Sewa	(1.977.821.412)	(3.608.409.517)
Pendapatan jasa giro	(930.919.625)	(6.787.440.514)
<b>Jumlah Koreksi Fiskal</b>	<b><u>(73.090.526.523)</u></b>	<b><u>(350.565.788.445)</u></b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>	<b><u>(6.071.578.465)</u></b>	<b><u>(289.922.663.102)</u></b>
Dikurangi - Akumulasi rugi fiskal (induk saja)	(254.470.269.630)	-
<b>Penghasilan Kena Pajak Bersih</b>	<b><u>(6.071.578.465)</u></b>	<b><u>(289.922.663.102)</u></b>
<b>Beban Pajak kini</b>		
Induk saja	-	-
Entitas Anak		
PT Dharma Lautan Nusantara	713.122.028	1.382.652.123
<b>Jumlah</b>	<b><u>713.122.028</u></b>	<b><u>1.382.652.123</u></b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

	2019			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Dibebankan ke Laporan Laba rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif lain	
<b><u>Induk Saja</u></b>				
Penyisihan piutang usaha dan piutang lain-lain	2.213.052.588	-	-	2.213.052.588
Penyisihan penurunan nilai aset shipset	42.644.613.913	2.384.214.930	-	45.028.828.843
Penyisihan penurunan nilai aset lainnya dan investasi	10.327.381.024	-	-	10.327.381.024
Penyisihan aset tetap	25.489.031.687	-	-	25.489.031.687
Rugi fiscal	63.617.567.408	1.518.451.001	-	65.136.018.409
Penyusutan aset tetap	(4.872.823.211)	(4.465.051.229)	-	(9.337.874.440)
Beban manfaat karyawan	291.917.391	142.826.977	(19.287.165)	415.457.203
<b>Sub Jumlah</b>	<b>139.710.740.800</b>	<b>(419.558.322)</b>	<b>(19.287.165)</b>	<b>139.271.895.313</b>
<b><u>Entitas Anak</u></b>				
PT Dharma Lautan Nusantara	1.614.169.244	(1.205.401.115)	(704.663)	408.063.466
<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.614.169.244</b>	<b>(1.205.401.115)</b>	<b>(704.663)</b>	<b>408.063.466</b>
<b>Jumlah</b>	<b>141.324.910.044</b>	<b>(1.624.959.437)</b>	<b>(19.991.828)</b>	<b>139.679.958.779</b>
<b>2018</b>				
	Saldo Awal	Dibebankan ke Laporan Laba rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif lain	Saldo Akhir
<b><u>Induk Saja</u></b>				
Penyisihan piutang usaha dan piutang lain-lain	1.835.050.684	378.001.903	-	2.213.052.588
Penyisihan penurunan nilai aset shipset	40.260.398.983	2.384.214.930	-	42.644.613.913
Penyisihan penurunan nilai aset lainnya dan investasi	10.327.381.024	-	-	10.327.381.024
Penyisihan aset tetap	102.982.948.674	(77.493.916.987)	-	25.489.031.687
Rugi fiscal	-	72.480.665.776	-	72.480.665.776
Penyusutan aset tetap	(17.455.164.415)	3.719.242.835	-	(13.735.921.580)
Beban manfaat karyawan	109.590.008	14.528.420	167.798.964	291.917.391
<b>Sub Jumlah</b>	<b>138.060.204.958</b>	<b>1.482.736.877</b>	<b>167.798.964</b>	<b>139.710.740.799</b>
<b><u>Entitas Anak</u></b>				
PT Dharma Lautan Nusantara	1.535.633.280	52.187.336	26.348.627	1.614.169.243
<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.535.633.280</b>	<b>52.187.336</b>	<b>26.348.627</b>	<b>1.614.169.243</b>
<b>Jumlah</b>	<b>139.595.838.238</b>	<b>1.534.924.213</b>	<b>194.147.591</b>	<b>141.324.910.042</b>



**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**10. ASET TETAP**

	2019				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b><u>Biaya Perolehan</u></b>					
<b>Aset tetap pelayaran</b>					
Armada kapal	481.850.683.686	193.264.870.255	-	-	675.115.553.941
Kontainer	60.532.243.576		-	-	60.532.243.576
<b>Aset tetap non-pelayaran</b>					
Tanah	5.277.770.688	-	-	43.394.159.999	48.671.930.687
Bangunan	11.239.610.699	-	-	1.295.454.393	12.535.065.092
Kendaraan	5.771.469.861	1.799.951.360	-		7.571.421.221
Peralatan	4.691.445.965	1.468.587.390	-		6.160.033.355
Inventaris	5.975.444.950	420.567.040	-		6.396.011.990
<b>Aset tetap sewa pembiayaan</b>					
Kendaraan	854.000.000	-	-	(854.000.000)	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>576.192.669.425</u></b>	<b><u>196.953.976.045</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>43.835.614.392</u></b>	<b><u>816.982.259.864</u></b>
<b>Aset tetap dalam konstruksi</b>					
Armada kapal	40.328.596.000	39.863.395.000	-	12.964.295.509	93.156.286.509
<b>Jumlah</b>	<b><u>616.521.265.425</u></b>	<b><u>236.817.371.045</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>56.799.909.901</u></b>	<b><u>910.138.546.373</u></b>
<b><u>Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai</u></b>					
<b>Aset tetap pelayaran</b>					
Armada kapal	130.859.190.324	16.700.059.294	-	-	147.559.249.621
Kontainer	60.532.243.576	-	-	-	60.532.243.576
<b>Aset tetap non-pelayaran</b>					
Bangunan	5.968.245.088	680.436.516	-	-	6.648.681.604
Kendaraan	5.306.642.734	248.077.798	-	-	5.554.720.532
Peralatan	3.670.693.968	101.667.525	-	-	3.772.361.493
Inventaris	5.160.462.215	232.392.908	-	-	5.392.855.122
<b>Aset tetap sewa pembiayaan</b>					
Kendaraan	142.346.227	213.500.000	-	-	355.846.227
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>211.639.824.132</u></b>	<b><u>18.176.134.047</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>229.815.958.178</u></b>
Dikurangi – Penurunan nilai	101.956.126.746	-	-	-	101.956.126.746
<b>Nilai Buku</b>	<b><u>302.925.314.547</u></b>	<b><u>218.641.237.004</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>56.799.909.901</u></b>	<b><u>578.366.461.449</u></b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

	2018				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
<b><u>Biaya Perolehan</u></b>					
<b>Aset tetap pelayaran</b>					
Armada kapal	910.393.217.796	176.895.002.433	605.437.536.542	-	481.850.683.686
Kontainer	60.532.243.576	-	-	-	60.532.243.576
<b>Aset tetap non-pelayaran</b>					
Tanah	5.277.770.688	-	-	-	5.277.770.688
Bangunan	11.239.610.699	-	-	-	11.239.610.699
Kendaraan	5.756.039.861	15.430.000	-	-	5.771.469.861
Peralatan	6.308.695.457	156.107.230	1.773.356.722	-	4.691.445.965
Inventaris	5.442.334.259	584.110.691	-	51.000.000	5.975.444.950
<b>Aset tetap sewa pembiayaan</b>					
Kendaraan	-	854.000.000	-	-	854.000.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>1.004.949.912.336</u></b>	<b><u>178.504.650.354</u></b>	<b><u>607.210.893.264</u></b>	<b><u>51.000.000</u></b>	<b><u>576.192.669.425</u></b>
<b>Aset tetap dalam konstruksi</b>					
Armada kapal	-	40.328.596.000	-	-	40.328.596.000
<b>Jumlah</b>	<b><u>1.004.949.912.336</u></b>	<b><u>218.833.246.354</u></b>	<b><u>607.210.893.264</u></b>	<b><u>51.000.000</u></b>	<b><u>616.521.265.425</u></b>
<b><u>Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai</u></b>					
<b>Aset tetap pelayaran</b>					
Armada kapal	390.190.908.039	10.612.107.821	269.943.825.536	-	130.859.190.324
Kontainer	60.532.243.576	-	-	-	60.532.243.576
<b>Aset tetap non-pelayaran</b>					
Bangunan	5.640.106.887	360.935.606	32.797.405	-	5.968.245.088
Kendaraan	5.498.214.816	166.506.756	358.078.838	-	5.306.642.734
Peralatan	5.291.424.369	229.435.260	1.850.165.661	-	3.670.693.968
Inventaris	4.643.942.525	516.519.689	-	-	5.160.462.215
<b>Aset tetap sewa pembiayaan</b>					
Kendaraan	-	142.346.227	-	-	142.346.227
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>471.796.840.212</u></b>	<b><u>12.027.851.359</u></b>	<b><u>272.184.867.440</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>211.639.824.132</u></b>
Dikurangi – Penurunan nilai	411.931.794.694	-	309.975.667.948	-	101.956.126.745
<b>Nilai Buku</b>	<b><u>121.221.277.429</u></b>	<b><u>206.805.394.995</u></b>	<b><u>25.050.357.876</u></b>	<b><u>51.000.000</u></b>	<b><u>302.925.314.548</u></b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

**Penambahan Aset Tetap**

Penambahan biaya perolehan aset tetap dalam tahun 2019 sebesar Rp294.471.280.944 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2019</b>
a. Penambahan Aset Tetap dari Dana Penyertaan Modal Negara:	
- Penambahan aset tetap berupa 1 (satu) unit handymax MV.Dharma lautan Ruby. DWT 45.000-60.000 MT tahun pembuatan 2004-2007 (Non – Chiba Shipyard). MV Dharma Lautan Ruby dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara, Refinancing dan Pembiayaan Bank BNI.	175.876.415.855
- Penambahan aset tetap berupa 1 (satu) unit TB Daya Lautan II	17.388.454.400
b. Penambahan Aset Tetap dari Dana Internal	3.689.105.790
<b>Total penambahan aset tetap dengan pembelian langsung</b>	<b>196.953.976.045</b>
c. Penambahan Aset Tetap atas Aset yang Belum Tercatat	
- Penambahan aset tetap berupa tanah di Jalan Ciniru VI RT 02/03 No 14 Kel Rawa Barat Kec Kebayoran Baru Jakarta Pusat / 207 m <sup>2</sup>	13.853.000.000
- Penambahan aset tetap berupa Tanah dan bangunan di Ciloto Puncak Villa Kayu DL, Kec Cipanas, Kab Cianjur, Jawa Barat / 5506 m <sup>2</sup>	13.767.000.000
- Penambahan aset tetap di Jendral Sudirman - Tarakan , Kel Karang Anyar, Kec Tarakan Barat, Kalimantan Utara / 1795 m <sup>2</sup>	3.420.000.000
- Penambahan aset tetap bangunan di Pangkal Pinang Jl Sanggung Dewa No 5, Kel Batin Tikal, Kec Taman Sari, Pangkal Pinang / 900 m <sup>2</sup>	1.587.464.392
- Penambahan aset tetap bangunan Jalan Ciniru VI RT 02/03 No 14 Kel Rawa Barat Kec Kebayoran Baru Jakarta Pusat / 201 m <sup>2</sup>	268.000.000
- Penambahan aset tetap berupa tanah di jalan Bendungan Asahan II, No 3 Blok G, RT, 06/RW 02, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta / 232 m <sup>2</sup>	7.000.600.000
- Penambahan aset tetap berupa tanah dan bangunan di Jalan Letjen R Suprpto No 3, RT 014 Rw 06, Kelurahan Ramunuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Propinsi Banten (d/h Jalan Raya Anyer, Kelurahan Ramunuju, Kecamatan Pulo Merak, Kabupaten Cilegon, Propinsi Banten)	4.793.550.000
<b>Total pengakuan tanah dan bangunan yang telah memiliki legalitas lengkap</b>	<b>44.689.614.392</b>
d. Penambahan aset tetap dalam konstruksi	
- Penambahan Aset tetap dalam konstruksi tahun 2019, didasarkan pengakuan Progres Pekerjaan Fisik 47,97% atas pekerjaan bangunan satu unit kapal tangker 6.500 LTDW sesuai dengan kontrak Kerjasama nomor : Ktr.182/DS/6/I/2018 tanggal 26 Juni 2018 Pelaksana Pekerjaan PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero), untuk kepentingan PT Pertamina (Persero), dengan pembiayaan sebagai berikut:	
- Penambahan berdasarkan pembayaran tunai aset dalam konstruksi	39.863.395.000
- Penambahan aset dalam konstruksi yang belum dibayar dan telah menjadi utang	12.964.295.509
<b>Jumlah</b>	<b>294.471.280.944</b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

Penambahan biaya perolehan aset tetap dalam tahun 2018 sebesar Rp178.504.650.354 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2018</b>
a. Penambahan Aset Tetap dari Dana Penyerahan Modal Negara:	
- Penambahan aset tetap berupa 1 (satu) unit handymax MV.Dharma Lautan Intan DWT 55.500 MT tahun pembuatan 2006 (Oshima Shipbuilding-Japan).	176.895.002.433
b. Penambahan Aset Tetap dari Dana Internal	755.647.921
c. Penambahan Aset Tetap dari Fasilitas Pembiayaan	
- Penambahan 2 (dua) unit Kendaraan Mobil Toyota - All New Kijang Innova -2.4 V A/T Diesel dan Toyota - All New Kijang - 2.0 A/T Bensin dengan skema pembiayaan dengan nomor perjanjian masing – masin nomor 51001170497 dan nomor 51001170498	854.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>178.504.650.354</b>

Untuk penambahan aset tetap dalam konstruksi tahun 2018 adalah sebesar Rp40.328.596.000 merupakan progres pekerjaan fisik 15% atas pekerjaan pembangunan 1 (Satu) Unit Kapal Tanker 6.500 LTDW.

**a. Induk**

Mendasar kepada Surat No. S-726/MBU/12/2017, tahun 2017, tentang Persetujuan Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero), manajemen melakukan penghapusbukuan dengan cara penjualan. Menindaklanjuti surat tersebut, manajemen membentuk Panitia Lelang Pelapasan Aktiva Tetap milik PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) berupa 5 (lima) buah Kapal Ex BPYBDS dengan Keputusan Direksi. Dalam tahun 2018 sebanyak 4 (empat) unit armada kapal telah terjual yaitu, untuk KM Jatipura dan KM Jatianom kepada PT Sier Puspa Utama, sedangkan KM Jatiwangi dan KM Samratulangi kepada Tri Agung Lumintu.

Dari hasil penjualan armada kapal sebesar Rp44.861.869.250 terdiri dari penerimaan tunai sebesar Rp27.009.396.250 dan sisanya berupa piutang kepada pihak ketiga, yaitu kepada (i) PT Sier Puspa Utama dan (ii) Tri Agung Lumintu masing-masing sebesar Rp15.840.000.000 dan Rp350.000.000. (lihat catatan 6).

Pengurangan biaya perolehan aset tetap diatas pada tahun 2017 berasal dari pelepasan / penjualan aset tetap non pelayaran berupa kendaraan sebesar Rp240.449.050 dengan rincian sebagai berikut:

	<b>2018</b>
<b>Nilai Penjualan</b>	<b>44.861.896.250</b>
Biaya perolehan	605.437.536.542
Akumulasi penyusutan	(269.571.392.303)
Penurunan nilai asset	(309.975.667.948)
<b>Nilai Tercatat</b>	<b>25.890.476.291</b>
<b>Jumlah</b>	<b>18.971.419.959</b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**10. ASET TETAP (lanjutan)**

Seluruh transaksi penjualan aset tetap - kendaraan di tahun 2018 dilakukan secara tunai. Pada tahun 2019 perusahaan tidak ada melakukan penjualan aset tetap.

Manajemen telah mengasuransikan Armada Kapal Dharma Lautan Intan dengan tipe Marine Hull Insurance kepada perusahaan asuransi dengan nilai pertanggungan sebesar USD12.200.000. dengan premi asuransi selama tahun 2019 dan 2018 masing-masing Rp1.970.518.000 dan Rp2.024.834.239. Selanjutnya, manajemen berpendapat bahwa, nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Terdapat aset tetap dari entitas induk berupa armada kapal, tanah, bangunan kantor yang digunakan sebagai jaminan utang bank jangka panjang. (lihat catatan 17).

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara nilai wajar dan nilai tercatat pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca). Selanjutnya, manajemen telah melakukan telaah terhadap nilai residu dan umur manfaat atas aset tetap - armada dan non armada setiap akhir tahun.

**11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Aset Dalam Konstruksi (ADK) – Shipset	237.073.807.110	237.073.807.110
Biaya yang ditangguhkan angkutan batubara	2.397.000.000	-
Aset Tak berwujud – bersih	1.364.702.344	-
Armada Kapal		
KM Semarang	12.152.362.601	12.152.362.601
KM Cirebon	13.546.873.559	13.546.873.559
KM Panjang	13.621.718.163	13.621.718.163
Uang Jaminan	2.529.054.652	2.709.732.107
Joint Account Pangkalan Susu	-	3.007.958.130
Piutang pembelian aset tetap	-	2.900.000.000
Lain-lain	13.645.167.833	11.416.297.248
<b>Dikurangi :</b>		
Provisi penurunan nilai ADK shipset	(180.115.315.372)	(170.578.455.652)
Provisi penurunan nilai armada kapal	(39.320.954.323)	(39.320.954.323)
Provisi penurunan nilai uang jaminan	(1.976.869.774)	(1.976.869.774)
Provisi nilai piutang pembelian aset tetap	(2.900.000.000)	(2.900.000.000)
<b>Jumlah</b>	<b><u>72.017.546.793</u></b>	<b><u>81.652.469.170</u></b>

**Induk Saja:**

**a. Aset Dalam Konstruksi (ADK) – Shipset**

Aset Shipset merupakan pembangunan kapal 24 Caraka Jaya Tahap III sesuai dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman No.SLA-725/DP3/1993 tanggal 27 September 1993 dan SLA-727/DP3/1993 tanggal 6 Oktober 1993. Hingga tanggal 31 Desember 2007 masih terdapat 14 Shipset yang masih dalam konstruksi di sembilan galangan kapal yang berbeda, yaitu pada PT PAL Surabaya, PT DOK dan Perkapalan Surabaya, PT Dumas, PT Kodja Bahari Jakarta, PT Inggom, PT JMI Semarang, PT IKI Makasar, PT Intan Sekunyit Palembang dan PT Noahtu Lampung.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)**

**Induk Saja: (lanjutan)**

**a. Aset Dalam Konstruksi (ADK) – Shipset (lanjutan)**

Pada tahun 2005 terdapat 1 (satu) unit Shipset Caraka yang dialihkan ke Pemda Merauke. Perusahaan membebaskan nilai Shipset yang dialihkan tersebut dalam laporan laba rugi tahun 2005. Berdasarkan Risalah Rapat yang dihadiri oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Kekayaan Negara yang Dipisahkan, Biro Hukum Kementerian Keuangan, PT PANN (Persero) dan PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero), tanggal 21 April 2016 diketahui bahwa pengalihan Shipset ke Pemda Merauke tidak diikuti dengan Penurunan Nilai Utang SLA. Berdasarkan Risalah Rapat tersebut manajemen melakukan penyajian kembali laporan keuangan perusahaan tahun buku 2005.

Pada tahun 2012, berdasarkan observasi lapangan diketahui bahwa, 2 (dua) unit shipset yang berada di lokasi PT Intan Sekunyit telah dilakukan lelang eksekusi, sehingga manajemen membentuk penyisihan penurunan nilai atas 2 (dua) unit shipset tersebut.

Berikut ini nilai buku aset dalam konstruksi (Shipset) per 31 Desember 2019 dan 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Biaya perolehan	237.073.807.110	237.073.807.110
Provisi penurunan nilai ADK Shipset	(180.115.315.372)	(170.578.455.652)
<b>Jumlah</b>	<b><u>56.958.491.738</u></b>	<b><u>66.495.351.458</u></b>

Mulai tahun 2010, manajemen telah membentuk provisi penurunan nilai ADK - shipset sebesar Rp953.685.972 per-shipset setiap tahunnya.

Mutasi provisi kerugian penurunan nilai aset dalam konstruksi (Shipset) sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo Awal	170.578.455.652	161.041.595.932
Provisi tahun berjalan	9.536.859.720	9.536.859.720
<b>Saldo Akhir</b>	<b><u>180.115.315.372</u></b>	<b><u>170.578.455.652</u></b>

**b. Armada Kapal**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
KM Semarang	12.152.362.601	12.152.362.601
KM Cirebon	13.546.873.559	13.546.873.559
KM Panjang	13.621.718.163	13.621.718.163
<b>Sub – Jumlah</b>	<b><u>39.320.954.323</u></b>	<b><u>39.320.954.323</u></b>
<b>Dikurangi:</b>		
Provisi penurunan nilai armada kapal	(39.320.954.323)	(39.320.954.323)
<b>Jumlah</b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>



**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)**

**Induk Saja: (lanjutan)**

**b. Armada Kapal (lanjutan)**

Pada awalnya Armada Kapal merupakan aset sewa guna usaha dengan PT PANN (Persero) yang terdiri dari 3 (tiga) unit kapal sesuai Berdasarkan Akta Notaris Nomor 40, 43 dan 46 yang diaktakan di Notaris Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito tanggal 22 Oktober 2009 dengan nilai perolehan awal sebagai berikut:

<b>No. Akta</b>	<b>Nama Kapal</b>	<b>Nilai Jual (Rp)</b>
40-41	KM Semarang Caraka Jaya Niaga III – 35	15.627.673.128
43-44	KM Cirebon Caraka Jaya Niaga III – 36	17.064.577.000
46-47	KM Panjang Caraka Jaya Niaga III – 41	17.064.577.000
<b>Jumlah</b>		<b>49.756.827.128</b>

Perjanjian tersebut berlaku selama 8 tahun dengan Hak Opsi membeli kapal sebesar Rp1.000.000, dengan terlebih dahulu melunasi Liabilitas kepada PT PANN (Persero).

Berdasarkan Berita Acara Nomor 12/H/HK/2010, Berita Acara Nomor 13/H/HK/2010 dan Berita Acara Nomor 14/H/HK/2010 tanggal 15 Juli 2010 telah dilakukan penyerahan operasi atas 3 (tiga) unit kapal tersebut dari perusahaan ke PT PANN (Persero).

Mendasar kepada berita acara tersebut sejak tanggal 15 Juli 2010, maka Perjanjian Sewa Guna Usaha Kapal dengan Opsi Beli tersebut menjadi berakhir. Perusahaan tetap diwajibkan untuk melunasi Liabilitas terkait dengan perjanjian tersebut. Pengoperasian oleh PT PANN (Persero) adalah sampai dengan hasil operasi kapal-kapal tersebut telah mengkompensir seluruh Liabilitas perusahaan beserta seluruh biaya pemeliharaan dan dockingnya yang timbul sehubungan dengan perjanjian sewa guna usaha.

Berdasarkan Laporan Hasil Lelang pada bulan Mei dan Juni 2014 diketahui bahwa PT PANN (Persero) telah melakukan penjualan terhadap 3 (tiga) unit kapal tersebut yang dilakukan oleh Balai Lelang Lumintu.

Pada tahun 2013, perusahaan mencatat armada kapal tersebut sebagai aset tidak lancar lainnya. Pertimbangan tersebut didasari karena aset tersebut sudah tidak dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pendapatan perusahaan.

Pada tahun 2014, Perusahaan menurunkan nilai atas 3 (unit) kapal tersebut. Beserta Uang Jaminan 2 kali SGU PT PANN (Persero). Kondisi tersebut disebabkan karena pada tahun tersebut 3 (tiga) unit kapal telah terjual.

Sampai dengan laporan ini diterbitkan, perusahaan masih melakukan pembicaraan dengan PT PANN (Persero).

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)**

**Induk Saja (lanjutan)**

**c. Uang Jaminan**

Uang jaminan per 31 Desember 2019 dan 2018 dirinci sebagai berikut :

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Uang Jaminan 2 Kali SGU - PT PANN	1.976.869.774	1.976.869.774
Bank Garansi	353.698.473	540.378.473
Pelindo III Cabang Banyuwangi	69.117.000	69.117.000
Deposit Sewa Kantor	55.000.000	55.000.000
Security Deposit	52.366.860	52.366.860
Telephone Deposit	16.000.000	16.000.000
<b>Sub-Jumlah</b>	<b><u>2.529.115.634</u></b>	<b><u>2.709.732.107</u></b>
<i>Dikurangi - Provisi Penurunan Nilai Uang Jaminan</i>	<i>(1.976.869.774)</i>	<i>(1.976.869.774)</i>
<b>Jumlah</b>	<b><u>552.245.860</u></b>	<b><u>732.862.333</u></b>

**Entitas Anak**

**a. Joint Account – Pangkalan Susu**

Akun ini merupakan joint account antara PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) dengan PT Dharma Lautan Nusantara atas kegiatan operasional di Cabang Pangkalan Susu yang masih akan direkonsiliasikan untuk posisi pada tanggal 31 Desember 2018 sebagai berikut:

	<u>2018</u>
Rekening antar Kantor- <i>Joint Account</i> (PT Dharma Lautan Nusantara)	4.595.539.948
Rekening antar Kantor Pusat : DL - DLN PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero)	<u>(1.587.581.818)</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>3.007.958.130</u></b>

Atas selisih rekening koran - joint account antara entitas induk dengan anak tersebut tidak akan mempengaruhi saldo utang piutang maupun pendapatan dan beban secara konsolidasian. Pada tahun 2019, tidak terdapat penambahan RAK antar *joint account*.

**b. Piutang Pembelian Aset Tetap**

Piutang pembelian aset tetap pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sama sebesar Rp2.900.000.000 untuk tahun 2018 dan Rp 0 (nihil) untuk tahun 2019 merupakan uang muka yang diberikan kepada mantan pegawai Perusahaan untuk pembelian aset tetap, yang masih tetap diupayakan penagihannya kepada yang bersangkutan.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**11. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan)**

**c. Lain-Lain**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Modal sementara entitas anak di induk:		
PT Dharma Lautan Nusantara	4.444.156.382	4.444.156.382
PT Daya Laut Utama	-	6.982.501.528
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>4.444.156.382</u></b>	<b><u>11.426.657.910</u></b>
Rekening antar kantor	-	-
Aset Tender Banyuwangi	22.252.200	22.252.200
Lainnya	9.178.759.251	(32.612.861)
<b>Sub-Jumlah</b>	<b><u>9.201.011.451</u></b>	<b><u>(10.360.661)</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b><u>13.645.167.833</u></b>	<b><u>11.416.297.248</u></b>

Modal sementara entitas anak di induk per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing jumlahnya sebesar Rp4.444.156.382 dan Rp11.426.657.910 terdiri dari:

- a. Piutang PT Dharma Lautan Nusantara kepada entitas induk yang telah dikonversi menjadi Saham B (eks PKPU) sebesar Rp4.444.156.482 yang tidak tereliminasi dengan modal saham Seri B di entitas induk s.d. penyelesaian atas modal tersebut yang berasal dari konversi utang ke modal.
- b. PT Daya Laut Utama per 31 Desember 2019 dilikuidasi, sehingga seluruh piutang PT Daya Laut Utama ke Perusahaan diakui dalam Laba Rugi Perusahaan.

**12. UTANG USAHA**

Merupakan utang kepada rekanan/pemborong yang timbul dari pembelian barang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan, terdiri dari:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>Pihak Berelasi</u></b>		
PT Dok Perkapalan Surabaya	20.228.560.000	20.228.560.000
<b><u>Pihak Ketiga</u></b>		
PT Lumoso Pratama Line	39.632.289.968	23.572.673.796
PT Adhiguna Putera	28.213.865.767	24.271.284.340
PT Asia Mulia Transpasifik	24.830.626.742	20.561.094.410
PT Manalagi	6.224.196.000	-
PT Dimas Putra Pertama	6.019.090.910	2.662.500.000
PT Suma Adi Jaya	3.228.909.090	-
PT Matano Nusantara Line	2.164.330.333	6.674.819.252
PT Ardisal Jasa Utama	2.044.545.455	-
PT Pelindo Marine Service	2.014.913.318	9.526.821.290
Pelindo II Banten	2.014.913.318	-
<b>Jumlah dipindahkan</b>	<b><u>136.616.240.901</u></b>	<b><u>107.497.753.088</u></b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**12. UTANG USAHA (lanjutan)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Jumlah pindahan</b>	<b>136.616.240.901</b>	<b>107.497.753.088</b>
PT Tunas Jang Jayo	1.480.000.000	-
PT Alzano Surya Kencana Nusantara	1.447.272.727	-
PT Bukit Bahari	1.243.440.000	-
PT Samudera Sarana Floresma	1.208.525.258	1.207.227.878
PT Srikandi Armada Shipping	-	2.908.500.000
Titipan sementara	-	4.526.900.702
Pemasok umum	-	3.653.221.234
Lainnya dengan rata-rata Rp1.000.000.000.	12.964.295.509	19.277.619.866
<b>Jumlah</b>	<b>154.959.774.395</b>	<b>139.071.222.768</b>

Sebagian utang usaha tersebut merupakan utang kreditur konkruen sesuai dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Nomor: 36/Pdt.Sus./PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 19 Desember 2013.

**13. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Utang pesangon dan pensiun	195.893.741	1.166.785.587
Lain-lain	1.789.069.306	560.137.578
<b>Jumlah</b>	<b>1.984.963.047</b>	<b>1.726.923.165</b>

**14. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pendapatan batubara	11.675.586.581	-
Pendapatan sewa tanah	-	1.837.015.414
Pendapatan bongkar muat	-	769.559.182
<b>Jumlah</b>	<b>11.675.586.581</b>	<b>2.606.574.596</b>

**15. BEBAN AKRUAL**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Biaya kantor	5.688.782.172	3.155.527.000
Gaji dan upah	698.416.383	3.223.721.427
<b>Jumlah</b>	<b>6.387.198.555</b>	<b>6.379.248.427</b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**16. UTANG SEWA PEMBIAYAAN**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bagian Jatuh Tempo dalam waktu 1 Tahun	174.398.805	256.050.612
Lebih dari 1 Tahun	-	128.079.000
Dikurangi Beban Keuangan Dimasa Depan	-	(37.679.195)
<b>Sub – Jumlah</b>	<b><u>174.398.805</u></b>	<b><u>346.450.417</u></b>
Dikurangi - Bagian Jatuh Tempo dalam waktu 1 Tahun	(174.398.805)	(256.050.612)
<b>Utang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang</b>	<b>-</b>	<b><u>90.399.805</u></b>

Utang Sewa Pembiayaan merupakan sewa pembiayaan 2 (dua) Unit Kendaraan Dinas yaitu Toyota - All New Kijang Innova -2.4 V A/T Diesel dan Toyota - All New Kijang - 2.0 A/T Bensin dengan skema pembiayaan dengan nomor perjanjian masing- masing nomor 51001170497 dan 51001170498 antara PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) dengan PT Maybank Finance.

**17. UTANG BANK**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Pihak Berelasi</b>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	264.949.836.055	37.334.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	104.011.957.443
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	27.780.612
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.796.203.045	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b><u>272.746.039.100</u></b>	<b><u>141.373.738.055</u></b>
<b>Dikurangi pinjaman yang jatuh tempo kurang dari satu tahun:</b>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20.075.250.612	5.419.200.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	14.400.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	27.780.612
<b>Sub – Jumlah</b>	<b><u>20.075.250.612</u></b>	<b><u>19.846.980.612</u></b>
<b>Utang Bank Jangka Panjang</b>	<b><u>252.670.788.488</u></b>	<b><u>121.526.757.443</u></b>

**Kredit Investasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

- Sesuai Akta Perjanjian No. 67 tanggal 29 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Fardian, S.H., Perusahaan menerima persetujuan Fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Ketentuan dan syarat atas Fasilitas Kredit sebagai berikut:

Fasilitas Kredit : Pembiayaan refinancing 1 (satu) unit kapal tunda (harbour tug) "Daya Lautan I" (Eks Korin No.7), DWT 256 tones, tahun pembuatan 2016 (Namyang Shipbuilding Co.Ltd., Korea). Spesifikasi main engine 1800 PS x 2 Yanmar 6EY22AW1, senilai USD. 4.500.000,- equivalent Rp60.714.000.000 (asumsi kurs 1 USD = Rp13.492)

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**17. UTANG BANK (lanjutan)**

**Kredit Investasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)**

Tingkat Bunga : 10,25%

Jangka Waktu : Jangka waktu perjanjian adalah 96 (sembilan puluh enam) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian kredit (PK) dengan jadwal angsuran pokok per bulan sebagai berikut:

- a. Bulan ke - 1 s.d ke - 3 sebesar Rp50.000.000;
- b. Bulan ke - 4 s.d ke - 95 sebesar Rp451.600.000;
- c. Bulan 96 sebesar Rp302.800.000;

2. Sesuai Surat perjanjian Nomor 004/BIN/PK/2019 tanggal 24 Juli 2019, Perusahaan menerima persetujuan Fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Jaminan :

- a. 1 (satu) unit Kapal Handymax Daya lautan 1 (eks Korin no.7) Nilai Pengikatan sebesar Rp61.200.000.000, equivalen USD 4.500.000.
- b. 1 (satu) unit Kapal Handymax Kapal Dharma Lautan Intan tahun pembuatan 2006 dengan nilai pengikatan sebesar Rp163.760.600000.
- c. 3 Unit Ruko di Jl. Cendrawasih Kav.4 No.28 Kel.krembangan selatan Kec.krembangan Kota Surabaya, Jawa Timur luas tanah 232 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 555 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan :
  - SHGB No.954/Krembangan Selatan tgl 31/12/2002 jatuh tempo tanggal 12/04/2028 a.n PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero).
  - SHGB No.957/Krembangan Selatan tgl 31/12/2002 jatuh tempo tanggal 12/04/2028 a.n PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero).
  - SHGB No.958/Krembangan Selatan tgl 31/12/2002 jatuh tempo tanggal 12/04/2028 a.n PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero).
- d. Tanah dan bangunan rumah tinggal di perumahan Wisata Bukit mas (cluster Alexandria-acropolis blok C4-10) Jl. Lidah bukit mas lakarsantri Surabaya Jawa Timur, luas tanah 309m<sup>2</sup> dan luas bangunan 307m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan:
  - SHGB No.963/Lidah Wetan tgl 11/11/2004 jatuh tempo tanggal 12/05/2027 a.n PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero).
  - SHGB No.4283/Lidah Wetan tgl 30/06/2016 jatuh tempo tanggal 19/05/2036 a.n PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero).
- e. Tanah dan Bangunan Rumah tinggal di jalan Letjen R. Suprpto No.3 (Jl. Raya Anyer), Kel. Ramanuju Kec.Pulo merak Kota Banten luas tanah 488 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 323 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan :
  - SHGB No.10 &11/Rawamanuju tgl 10/11/1999 jatuh tempo tanggal 30/10/2028 a.n PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero).



**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**17. UTANG BANK (lanjutan)**

2. Sesuai Surat perjanjian Nomor 004/BIN/PK/2019 tanggal 24 Juli 2019, Perusahaan menerima persetujuan Fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (lanjutan)

Jaminan :

- f. Tanah dan bangunan kantor di jalan swasembada Timur XI No.48 C-D-E-F Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan luas tanah 576 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 579 m<sup>2</sup> bukti kepemilikan :
  - SHGB No. 2902/Kebon Bawang tgl.17/03/2008 jatuh tempo tanggal 08/12/2028 a.n PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero).
  - SHGB No. 2903/Kebon Bawang tgl.17/03/2008 jatuh tempo tanggal 08/12/2028 a.n PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero).
  - SHGB No. 2904/Kebon Bawang tgl.17/03/2008 jatuh tempo tanggal 08/12/2028 a.n PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero).
  - SHGB No. 2905/Kebon Bawang tgl.17/03/2008 jatuh tempo tanggal 08/12/2028 a.n PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero).

g. Kapal Handymax 55.000 DWT dengan nilai pengikatan sebesar Rp174.000.000.

h. Kapal tug boat Kasih Power-3 (d.h Mitra Anugrah 7) tahun pembuatan 2008 dengan nilai pengikatan Rp8.751.600.000.

i. Kapal deck Barge KLN 3003 (d.h Niaga Anjalu II eks m.R.3002) tahun pembuatan 2008 dengan nilai pengikatan Rp.10.210.200.000.

Provisi : Biaya Provisi 0,50%, dibayar sekaligus sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit dilaksanakan.

Pembatasan :

- a. Perusahaan dilarang memindahtangankan usaha/barang yang kredit kepada pihak lain.
- b. Perusahaan dilarang melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT+Depresiasi).
- c. Perusahaan tidak boleh menerima fasilitas kredit baru, baik dai bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- d. Perusahaan dilarang menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau Liabilitas penerima kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen perjanjian kepada pihak lain.

3. Utang Bank merupakan Utang kepada Bank BNI untuk pembelian Ruko di Cabang Banyuwangi dengan pokok pinjaman sebesar Rp 450.000.000. Jangka waktu pembiayaan selama 4 tahun dengan bunga 10% per tahunnya.

4. Utang Bank merupakan Utang kepada Bank BNI untuk pembelian Ruko di Cabang Banyuwangi dengan pokok pinjaman sebesar Rp 450.000.000. Jangka waktu pembiayaan selama 4 tahun dengan bunga 10% per tahunnya.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**18. REKENING DANA INVESTASI**

Rekening Dana Investasi merupakan Perjanjian Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan dengan Nomor. RDI-019/DDI/1981 tanggal 9 Desember 1981 sebesar Rp2.888.989.949.- dan Nomor. RDI-323/DP3/1997 tanggal 9 Mei 1997 sebesar Rp83.584.904.293.- Pada tanggal 6 Agustus 2007 dilakukan rapat yang dihadiri oleh Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman, Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan RI dan PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) mengenai *cut off* dan rekonsiliasi dengan hasil sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pokok	83.156.791.847	86.373.894.242
Bunga	85.204.900.161	85.204.900.161
<b>Jumlah</b>	<b><u>168.361.692.008</u></b>	<b><u>171.578.794.404</u></b>

Berdasarkan perjanjian PKPU, Kementerian Keuangan Republik Indonesia membuat amandemen terhadap perjanjian RDI tersebut dengan Nomor. AMA-172/RDI/019/DSMI/2015 dan AMA-173/RDI/323/DSMI/2015 tanggal 6 Januari 2015. Dalam Amandemen tersebut dinyatakan bahwa pembayaran di jadwalkan ulang sampai dengan 31 Desember 2041 dengan masa tenggang hingga Mei 2019.

**19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA**

Perhitungan Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasti dilakukan untuk perhitungan liabilitas dan beban tahun 2018 dilakukan oleh aktuaris independen dengan laporan No119/PSAK/KKA.AB/MU/III/19 Tanggal 14 Maret 2019 (Entitas Induk) dan No 111/PSAK/KKA.AB/MU/III/19 tanggal 06 Maret 2019 (Entitas Anak).

Rincian liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

Perhitungan Aktuarial untuk biaya imbalan pasti, menganut prinsip nilai sekarang dari jumlah pembayaran atas imbalan karena pensiun, imbalan karena meninggal dunia dan imbalan karena cacat. Perhitungan nilai sekarang diperoleh dari penggunaan berbagai asumsi aktuarial. Tindakan hanya berdasarkan tingkat bunga tetapi juga berdasarkan atas kenaikan upah, tingkat kematian, cacat dan pengunduran diri. Perhitungan atas faktor dimaksud lazim disebut nilai tunai aktuarial.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Jumlah karyawan	47	84
Tingkat kenaikan gaji	5%	10%
Usia pensiun normal	55	55
Tingkat cacat	10% dari TMI III	10% dari TMI III
Tingkat diskonto	8,19%	7%
Tingkat mortalita	TMI III	TMI III
Metode perhitungan aktuarial	PUC	PUC

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**19. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)**

Rincian liabilitas manfaat pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya sebagai berikut:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Nilai Kini Liabilitas	1.661.828.814	1.273.897.595
Nilai Wajar Aset Program	-	-
<b>Sub Jumlah Liabilitas</b>	<b>1.661.828.814</b>	<b>1.273.897.595</b>
Liabilitas (Kekayaan) - Saldo Awal	1.167.669.569	2.207.101.940
Beban/ (Pendapatan)	571.307.906	(1.396.258.707)
Realisasai Pembayaran Manfaat	-	(313.536.000)
Iuran Perusahaan	-	-
Pendapatan Komprehensif Lainnya	(77.148.661)	776.590.362
<b>Jumlah Liabilitas entitas induk</b>	<b>1.661.828.814</b>	<b>1.273.897.595</b>
Liabilitas imbalan kerja entitas anak	85.645.410	-
<b>Jumlah liabilitas gabungan</b>	<b>1.747.474.224</b>	<b>1.273.897.595</b>

**20. MODAL SAHAM**

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar terakhir telah dimuat dalam Akta No. 09 tanggal 7 Mei 2009, dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., Notaris yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 Agustus 2009 Nomor AHU-39197.AH.01.02.

Struktur permodalan perusahaan mengalami perubahan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-193-MBU /03/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang telah diaktakan melalui Akta No. 220, tanggal 23 Maret 2017 oleh Notaris Netty Maria Machdar, S.H., sebagai berikut:
  1. Perubahan jenis saham modal dasar Perusahaan semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham seri A dan saham seri B, yaitu:
    - a) Saham seri A adalah saham biasa yang mempunyai hak-hak mengeluarkan suara untuk pengambilan keputusan dalam RUPS.
    - b) Saham seri B adalah saham yang berasal dari konversi utang dan diambil bagian oleh kreditur konkruen merupakan saham tanpa hak suara dalam RUPS, tidak berhak atas dividen dan dapat ditarik kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 126 tahun 2015 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan pengesahan perdamaian (homologasi) nomor 36/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.NIAGA.JKT.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**20. MODAL SAHAM (lanjutan)**

- c) Perubahan komposisi jenis saham pada modal dasar Perusahaan sebesar Rp. 722.000.000.000 terdiri atas:
- Saham seri A sebanyak 284.103 saham masing-masing dengan nominal Rp1.000.000 per saham; dan
  - Saham seri B sebanyak 437.897 saham masing-masing dengan nominal Rp1.000.000 per saham.
- d) Menyetujui penempatan saham seri A sebanyak 180.640 saham.
- e) Menyetujui penempatan saham seri B sebanyak 38.779 saham yang diambil bagian oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku kreditur konkuren pada Perusahaan.
- b. Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-338-MBU /06/2017, tanggal 6 Juni 2017 yang telah diaktakan melalui Akta No. 13, tanggal 15 Juni 2017 oleh Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., sebagai berikut:
- 1) Peningkatan modal dasar Perusahaan yang semula sebesar 722.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham menjadi sebesar 3.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham, yang terdiri dari (i) 2.562.103 saham Seri A dan (ii) 437.897 saham Seri B masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham.
  - 2) Penempatan saham Seri A sebanyak 1.017.188 saham atau sebesar Rp 1.017.188.000.000 yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) per 1 Januari 2017 / 31 Desember 2016 sebesar Rp1.017.188.771.346. Dengan demikian, selisih lebih dari saldo PMN sebesar Rp771.346 yang menambah cadangan umum. (catatan 22)
  - 3) Penempatan saham Seri B sebanyak 437.897 saham atau sebesar Rp 437.835.000.000 yang berasal dari konversi utang dan diambil bagian oleh kreditur konkuren merupakan saham tanpa hak suara dalam RUPS per 1 Januari 2017 / 31 Desember 2016 sebesar Rp437.897.037.175. Dengan demikian, selisih lebih dari saldo konversi utang menjadi modal tersebut sebesar Rp62.037.175 yang menambah cadangan umum. (catatan 22)
- c. Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-571-MBU/06/2017, tanggal 2 Oktober 2017 yang telah diaktakan melalui Akta No. 01 Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., tanggal 1 November 2017 mengenai penempatan saham seri B sebesar 399.056 saham masing masing dengan nilai nominal Rp. 1.000.000 persaham yang seluruhnya diambil bagian oleh kreditur konkuren Perusahaan berdasarkan putusan pengesahan perdamaian (Homologasi) No. 36/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga. JKT.
- d. Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-84/MBU/02/2018, tanggal 05 Februari 2018 yang telah diaktakan melalui Akta No. 01 Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., tanggal 01 Maret 2018 mengenai penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perseroan sebesar 379.319 saham masing-masing dengan nominal sebesar Rp1.000.000 per saham. Saham senilai Rp.379.319.000.000 terdiri dari Rp.379.318.092.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 melalui konversi piutang negara berupa *Subsidiary Loan Agreement (SLA)* pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) Pinjaman Nomor SLA-1264/Eks-SLA-725/DSMI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan Rp. 908.000 berasal dari kapitalisasi sebagian cadangan PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero). Perubahan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**20. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Dengan adanya perubahan tersebut diatas maka komposisi modal ditempatkan dan disetor per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut:

<b>2019</b>				
<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham (Lembar)</b>	<b>Nominal Per Saham (Rp)</b>	<b>Presentase Kepemilikan(%)</b>	<b>Nilai Modal Saham (Rp)</b>
<b>Modal Dasar</b>				
Saham Seri A	2.562.103	1.000.000	85,40%	2.562.103.000.000
Saham Seri B	437.897	1.000.000	14,60%	437.897.000.000
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>3.000.000</b>		<b>100,00%</b>	<b>3.000.000.000.000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>				
<b>Saham Seri A</b>				
Negara Republik Indonesia	1.577.147	1.000.000	78,88%	1.577.147.000.000
<b>Saham Seri B</b>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	38.779	1.000.000	1,94%	38.779.000.000
Kreditur Konkruen	383.547	1.000.000	19,18%	383.546.669.450
<b>Sub Jumlah</b>	<b>422.326</b>		<b>21,12%</b>	<b>422.325.669.450</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.999.473</b>		<b>100,00%</b>	<b>1.999.472.669.450</b>
<b>2018</b>				
<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham (Lembar)</b>	<b>Nominal Per Saham (Rp)</b>	<b>Presentase Kepemilikan(%)</b>	<b>Nilai Modal Saham (Rp)</b>
<b>Modal Dasar</b>				
Saham Seri A	2.562.103	1.000.000	85,40%	2.562.103.000.000
Saham Seri B	437.897	1.000.000	14,60%	437.897.000.000
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>3.000.000</b>		<b>100,00%</b>	<b>3.000.000.000.000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>				
<b>Saham Seri A</b>				
Negara Republik Indonesia	1.197.828	1.000.000	73,23	1.197.828.000.000
<b>Saham Seri B</b>				
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	38.779	1.000.000	2,37	38.779.000.000
Kreditur Konkruen	399.056	1.000.000	24,40	399.056.000.000
<b>Sub Jumlah</b>	<b>422.326</b>		<b>26,77</b>	<b>437.835.000.000</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.999.473</b>		<b>100,00</b>	<b>1.635.663.000.000</b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**21. TAMBAHAN MODAL DISETOR**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kas - Induk Saja	47.000.000	47.000.000
Tanah - Entitas Anak	1.380.000.000	1.380.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.427.000.000</b>	<b>1.427.000.000</b>

Tambahan modal disetor per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.427.000.000 dan Rp1.427.000.000 merupakan penambahan modal disetor yang berasal dari pengampunan pajak dari entitas induk dan entitas anak, dengan penjelasan sebagai berikut:

**Induk Saja**

Sebesar Rp47.000.000 merupakan penambahan modal yang berasal dari pengampunan pajak sesuai dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Nomor KET-608/PP/WPJ.19/2017, tanggal 17 April 2017 sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, tentang Pengampunan Pajak.

**Entitas Anak**

Sebesar Rp1.380.000.000 merupakan penambahan modal yang berasal dari pengampunan pajak sesuai dengan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Nomor KET-367/PP/WPJ.19/2016, tanggal 6 April 2017 sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2016, tentang Pengampunan Pajak.

**22. CADANGAN UMUM**

Merupakan cadangan umum per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sama sebesar Rp62.951.989. Jumlah tersebut merupakan hasil dari selisih peningkatan modal ditempatkan dan disetor untuk saham Seri A yang berasal dari PMN sebesar Rp771.346 dan untuk saham Seri B yang berasal dari konversi utang menjadi modal sebesar Rp 62.951.989. (lihat catatan 20)

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Cadangan Umum	62.951.989	62.951.989
<b>Jumlah</b>	<b>62.951.989</b>	<b>62.951.989</b>

**23. PENYERTAAN MODAL NEGARA**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
PMN – SLA Shipset	-	379.318.091.377
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>379.318.091.377</b>

Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-338-MBU /06/2017 tanggal 6 Juni 2017 yang telah diaktakan melalui Akta No. 13 Notaris Lenny Janis Ishak, S.H., tanggal 15 Juni 2017, Penyertaan Modal Negara (PMN) telah diubah menjadi Penyertaan Modal Saham Negara Republik Indonesia. (lihat catatan 20)



**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**23. PENYERTAAN MODAL NEGARA (lanjutan)**

Akun ini berasal dari penerusan pinjaman No. SLA-725/DP3/1993, tanggal 27 September 1993 sebesar Rp202.708.470.786 dari Loan Tomen & Mitsui Jepang dan perjanjian No. SLA-727/DP3/1993 tanggal 6 Oktober 1993 sebesar Rp176.609.620.592 dari Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) Jerman, total sejumlah Rp379.318.091.377, yang digunakan untuk pengadaan material impor atas 24 unit kapal Caraka Jaya Tahap III, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai tambahan PMP pada Perusahaan sesuai surat No. S-281/MK 016/1998, tanggal 14 April 1998.

Berdasarkan Risalah Rapat yang dihadiri oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Biro Hukum Kementerian Keuangan, PT PANN (Persero) dan PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero), tanggal 21 April 2016 ditetapkan bahwa, utang SLA senilai Rp379.318.091.377 akan dinovasi dari PT PANN kepada PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero). Rapat juga memutuskan bahwa sebagai tindak lanjut surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-281/MK 016/1998, tanggal 14 April 1998 proses penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai pengalihan utang SLA menjadi tambahan Penyertaan Modal Negara akan dilanjutkan.

Sebagai prasyarat pelaksanaan konversi piutang negara menjadi tambahan Penyertaan Modal Negara, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat No. S-394/MK.05/2016, tanggal 20 Mei 2016 telah menyetujui pengalihan utang SLA - PT PANN (Persero) menjadi utang PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero). Dalam Surat tersebut juga disebutkan bahwa jumlah utang yang dialihkan selanjutnya menjadi tambahan PMN sebesar Rp379.318.091.377.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 2017, atas BPYBDS - SLA Shipset sebesar Rp379.318.091.377 diputuskan menjadi Penambahan Penyertaan Modal Negara.

Pada tanggal 05 Februari 2018 yang telah diaktakan melalui Akta No. 01 Notaris Lenny Janis Ishak, SH tanggal 01 Maret 2018 dengan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No.S-84/MBU/02/2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 penyertaan modal negara ini di konversi menjadi modal saham perseroan sebesar 317.319 saham dengan nominal sebesar Rp1.000.000 per saham, sehingga saldo penyertaan modal negara menjadi nihil pada 31 Desember 2019. (lihat catatan 20).

**a. Informasi Realisasi Penggunaan Dana PMN s.d 31 Desember 2018**

*(Dalam jutaan rupiah)*

URAIAN	Total PMN	Alokasi Dana Tahun 2017	Realisasi Penggunaan PMN Jan s.d. Des 2018	
			Realisasi	Sisa Dana PMN
Penerimaan Dana PMN	350.000	-	-	350.000
Pembelian Harbour Tug (1 Unit)	-	65.231	-	284.769
Pembelian Kapal Curah (1 Unit)	-	-	142.800	141.969
Pembangunan LTTC (1 Unit) - 10%	-	-	20.100	121.869
Pembangunan LTTC (1 Unit) - 20%	-	-	38.754	83.115
Modal kerja perusahaan untuk operasional Kapal	-	-	44.200	38.915
<b>Jumlah</b>	<b>350.000</b>	<b>65.231</b>	<b>245.854</b>	<b>38.915</b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**23. PENYERTAAN MODAL NEGARA (lanjutan)**

Pada tahun 2019, berdasarkan Keputusan dalam surat No. S-359/MBU/06/2017 perihal realokasi penggunaan tambahan dana penyertaan modal negara (PMN) pada PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero), realisasi proyek sampai dengan Agustus tahun 2019 sebesar Rp350 miliar atau persentase penyerapan sebesar 100% terhadap nilai pagu anggaran PMN Rp 350 miliar adalah sebagai berikut:

(dalam Milyar Rupiah)

NO	URAIAN KEGIATAN	NOMINAL	REALISASI	TAHUN	NOMINAL	%
1	Pembelian 1 unit kapal handymax bekas siap operasi	142,8	1 Unit Handymax	2018	142,8	100%
2	Pengadaan minimal 4 unit kapal siap operasi sesuai dengan peluang bisnis	163,0	1 Unit Harbourtug	2017	65,2	40%
			Pembangunan 1 Unit Kapal Tanker (30%)	2018 - 2019	60,0	37%
			1 Unit T&B 300 Feet	2019	17,1	10%
			1 Unit Handymax	2019	20,7	13%
			<b>Subtotal</b>		<b>163,0</b>	<b>100%</b>
3	Modal kerja perusahaan untuk operasional kapal	44,2	Modal Kerja Perusahaan		44,2	100%
<b>Total</b>		<b>350,0</b>	<b>Total Terserap</b>		<b>350,0</b>	<b>100%</b>
<b>Saldo Dana PMN</b>					-	0%

Penyerapan dana PMN yang penggunaannya terdiri dari:

- 1) Pembelian 1 unit kapal Handymax bekas siap operasi (Rp. 142,8 Miliar) yaitu :  
Kapal MV. Dharma Lautan Intan sebesar Rp. 179 Miliar, dimana dana PMN yang terserap atas pembelian kapal tersebut sebesar Rp. 142 Miliar, sedangkan sisanya menggunakan dana perusahaan.
- 2) Pengadaan 4 unit kapal siap operasi sesuai peluang bisnis (Rp. 163 Miliar) yaitu :
  - a. Pembelian 1 unit kapal Harbour Tug bekas siap operasi yaitu HT Daya Lautan 1 sebesar Rp. 65,2 Miliar.
  - b. Pembayaran 30% pembangunan kapal Tanker Small II 6.500 LTDW sebesar Rp. 60 Miliar. Adapun untuk pembayaran sisanya menggunakan fasilitas kredit investasi dari perbankan.
  - c. Pembelian 1 set kapal Tug & Barge 300 feet sebesar Rp. 17,1 Miliar.
  - d. Pembayaran 10% pembelian kapal Handymax MV Dharma Lautan Ruby sebesar Rp. 20,7 Miliar, sedangkan 10% pembayaran kapal tersebut menggunakan dana perusahaan dan sisanya menggunakan fasilitas kredit investasi dari perbankan.
- 3) Modal kerja perusahaan untuk operasional kapal yaitu pembelian bunker (BBM) untuk operasional kapal.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**23. PENYERTAAN MODAL NEGARA (lanjutan)**

Poin-poin di atas dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan pendapatan perusahaan yang semula hanya dengan menggunakan kapal pihak ketiga dengan sistem charter.
- b. Perusahaan dapat meningkatkan layanan kepada pelanggan sehingga kinerja perusahaan juga akan meningkat.
- c. Perusahaan tidak tergantung kepada pihak ketiga untuk menjalankan usahanya.
- d. Perusahaan tidak hanya bekerja sebagai broker.
- e. Menjamin security supply kebutuhan PLTU untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat.
- f. Perusahaan sebagai BUMN dalam bidang usaha jasa pelayaran diharapkan dapat membantu menjaga kestabilan harga transportasi karena dengan menggunakan kapal handymax harga transportasi muatan curah menjadi lebih murah.

**24. KEPENTINGAN NON PENGENDALI**

Kepentingan non pengendali pada entitas anak dapat dirinci sebagai berikut:

	2019			
	% Penyertaan Non Pengendali	Bagian dari Pemilik Saham Non Pengendali (Awal)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Bagian Dari Pemilik Non Pengendali (Akhir)
Koperasi Karyawan Djakarta Lloyd	0,08% di DLN	8.247.641	2.225.538	10.473.178
Koperasi Karyawan Djakarta Lloyd	0,05% di DLU	928.158	(928.158)	-
<b>Jumlah</b>		<b>9.175.799</b>	<b>1.297.380</b>	<b>10.473.178</b>

	2018			
	% Penyertaan Non Pengendali	Bagian dari Pemilik Saham Non Pengendali (Awal)	Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Bagian Dari Pemilik Non Pengendali (Akhir)
Koperasi Karyawan Djakarta Lloyd	0,08% di DLN	5.272.878	2.974.763	8.247.641
Koperasi Karyawan Djakarta Lloyd	0,05% di DLU	1.339.336	(411.177)	928.158
<b>Jumlah</b>		<b>6.612.213</b>	<b>2.563.586</b>	<b>9.175.799</b>

**25. SALDO RUGI (DEFISIT)**

Saldo rugi tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

	2019	2018
Saldo Awal	(1.543.617.143.121)	(1.604.921.062.015)
Laba Tahun Berjalan	64.677.343.676	61.303.918.895
<b>Saldo Akhir</b>	<b>(1.478.939.799.445)</b>	<b>(1.543.617.143.121)</b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**25. SALDO RUGI (DEFISIT) (lanjutan)**

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) nomor 20, tanggal pada 15 Mei 2018, ditetapkan bahwa penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp36.882.670.635 dialokasikan untuk mengurangi akumulasi kerugian perseroan.

**26. KOMPONEN EKUITAS LAIN**

Saldo Komponen Ekuitas Lain tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Keuntungan (Kerugian) Akturia	(961.611.567)	(1.282.148.756)
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos yang Tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi	<u>59.975.481</u>	<u>320.537.189</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>(901.636.086)</u></b>	<b><u>(961.611.567)</u></b>

Saldo dan mutasi dari komponen ekuitas lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dirinci sebagai berikut:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Saldo Awal</b>	<b><u>(961.611.567)</u></b>	<b><u>(379.168.796)</u></b>
Keuntungan (kerugian) aktuarial	79.967.308	(776.590.362)
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos yang Tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi		194.147.591
<b>Keuntungan (Kerugian) Akturia setelah Pajak</b>	<b><u>(19.991.827)</u></b>	<b><u>(582.442.772)</u></b>
<b>Saldo Akhir</b>	<b><u>(901.636.086)</u></b>	<b><u>(961.611.567)</u></b>

**27. PENDAPATAN USAHA**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pendapatan Freight	492.247.808.923	477.908.580.328
Pendapatan Harbour Tug	54.691.848.017	22.756.270.585
Pendapatan Tol Laut	45.632.929.681	13.031.892.473
Pendapatan Bongkar Muat dan Keagenan	31.261.467.281	44.400.821.139
Pendapatan Sewa	<u>1.977.821.412</u>	<u>3.608.409.517</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>625.811.875.314</u></b>	<b><u>561.705.974.042</u></b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**28. BEBAN POKOK PENDAPATAN**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Beban Freight:		
Beban Pengangkutan	398.694.727.301	382.335.784.056
Beban Transshipment dan Bongkar Muat	4.725.959.907	2.985.995.923
Beban Tol Laut	40.511.402.631	9.493.885.778
Beban Harbour Tug	28.279.926.414	11.156.403.127
Beban Penyusutan Langsung	16.700.059.315	10.088.573.159
Beban Bongkar Muat dan Keagenan	14.573.368.096	16.750.130.083
Beban <i>Overhead</i>	-	3.375.773.413
<b>Jumlah</b>	<b>503.485.443.664</b>	<b>436.186.545.539</b>

**29. BEBAN PEMASARAN**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Beban Representasi & Entertainment	2.315.773.325	2.001.074.641
<b>Jumlah</b>	<b>2.315.773.325</b>	<b>2.001.074.641</b>

**30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Beban Pegawai	39.714.408.004	24.106.436.292
Beban Umum Kantor	10.358.131.027	8.336.623.769
Beban Gaji dan Tunjangan Direksi dan Komisaris	5.783.362.000	3.101.150.000
Beban Pajak	5.589.979.942	7.296.244.154
Beban Transportasi	3.582.417.765	1.315.130.685
Beban Profesional	3.250.755.754	2.230.434.819
Beban Penyusutan	1.987.533.563	1.222.570.859
Beban Pemeliharaan	359.046.766	381.745.339
<b>Jumlah</b>	<b>70.625.634.821</b>	<b>47.990.335.917</b>

**31. PENDAPATAN (BEBAN NON-USAHA)**

**a. Pendapatan Non-Usaha**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Jasa giro dan bunga deposito	966.429.509	6.812.816.481
Laba selisih kurs	92.364.899	5.963.031.165
Laba penjualan asset tetap (lihat catatan 10)	-	19.333.919.959
Laba dari pengampunan pajak	-	-
Lainnya	57.538.715.788	-
<b>Jumlah</b>	<b>58.597.510.196</b>	<b>32.109.767.605</b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**31. PENDAPATAN (BEBAN NON-USAHA) (lanjutan)**

**b. Beban Non-Usaha**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban kapal tidak beroperasi	1.022.412.280	3.329.641.814
Beban penurunan nilai	9.536.859.720	11.263.352.882
Beban pengadaan kapal	398.066.260	711.242.711
Lain-lain	8.861.309.224	12.760.258.170
<b>Jumlah</b>	<b><u>19.818.647.484</u></b>	<b><u>28.064.495.577</u></b>

**c. Beban Keuangan**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Beban bunga	21.147.163.695	18.419.079.582
<b>Jumlah</b>	<b><u>21.147.163.695</u></b>	<b><u>18.419.079.582</u></b>

**32. SEGMENT OPERASI**

Perusahaan dan entitas anak melaporkan segmen berdasarkan PSAK 5 (revisi 2009) dengan mengklasifikasikan usahanya menjadi tiga segmen usaha yaitu angkutan laut yang terdiri dari angkutan curah dan tol laut, bongkar muat, dan pemeliharaan / reparasi kapal. Informasi segmen usaha Perusahaan sebagai berikut:

	<u>2019</u>				<u>Jumlah</u>
	<u>Angkutan Laut</u>	<u>Bongkar Muat</u>	<u>Pemeliharaan dan Reparasi Kapal</u>	<u>Eliminasi</u>	
Pendapatan Usaha	598.468.674.969	27.343.200.345	-	-	625.811.875.314
Beban pokok pendapatan	(490.287.639.854)	13.197.803.810)	-	-	(503.485.443.664)
<b>Laba Kotor</b>	<b><u>108.181.035.115</u></b>	<b><u>14.145.396.535</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>122.326.431.650</u></b>
Beban umum dan Administrasi	61.434.633.440	11.506.774.706	-	-	72.941.408.146
Pendapatan non-usaha	(56.224.457.113)	(2.373.053.081)	-	(2.675.099.103)	(61.272.609.297)
Beban non-usaha	40.549.984.055	415.827.124	-	-	40.965.811.179
Beban pajak	420.114.707	1.918.523.143	-	-	2.338.637.849
Laba tahun berjalan	154.361.310.205	25.613.468.426	-	(2.675.099.103)	177.299.679.528
Penghasilan komprehensif	-	-	-	-	-
<b>Laba dan penghasilan Komprehensif lainnya</b>	<b><u>154.361.310.205</u></b>	<b><u>25.535.787.874</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>(2.675.099.103)</u></b>	<b><u>177.299.679.528</u></b>
<b>Aset dan Liabilitas</b>					
Aset segmen	1.120.699.057.639	27.848.169.061	-	7.277.927.558	1.155.825.154.258
Liabilitas segmen	607.799.591.120	14.463.355.499	-	(7.277.927.558)	614.985.019.061



**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**32. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

	2018				
	<u>Angkatan Laut</u>	<u>Bongkar Muat</u>	<u>Pemeliharaan dan Reparasi Kapal</u>	<u>Eliminasi</u>	<u>Jumlah</u>
Pendapatan Usaha	528.869.964.620	39.471.347.828	-	(6.635.338.405)	561.705.974.042
Beban pokok pendapatan	(419.436.415.456)	(23.385.468.488)	-	6.635.338.405	(436.186.545.539)
<b>Laba Kotor</b>	<b>109.433.549.163</b>	<b>16.085.879.340</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>125.519.428.503</b>
Beban umum dan administrasi	(39.781.471.873)	(9.387.584.185)	(822.354.500)		(49.991.410.558)
Pendapatan non-usaha	33.931.949.130	1.293.668.806	-	(3.575.665.497)	31.649.952.439
Beban non-usaha	(42.940.901.079)	(3.082.858.914)	-	-	(46.023.759.993)
Beban pajak	1.482.736.878	(1.330.464.787)	-	-	152.272.091
Laba tahun berjalan	62.125.862.219	3.578.640.260	(822.354.500)	(3.575.665.497)	61.306.482.482
Penghasilan komprehensif	(503.396.891)	(79.045.880)	-	-	(582.442.772)
Laba dan penghasilan komprehensif lainnya	<b>61.622.465.327</b>	<b>3.499.594.380</b>	<b>(822.354.500)</b>	<b>-</b>	<b>60.724.039.711</b>
<b>Aset dan Liabilitas</b>					
Aset segmen	414.988.663.228	14.327.017.892	6.982.501.528	(24.451.750.520)	411.846.432.128
Liabilitas segmen	520.311.395.793	14.207.213.148	-	(3.926.707.962)	530.591.900.979

**33. SALDO TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI**

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>	Persentase (%) Terhadap Jumlah Aset	
			<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Bank</b>				
Rupiah	23.445.095.338	136.583.283.809	2	14
Valuta Asing	1.852.135.355	3.873.946.821	0,1	-
<b>Jumlah Setara Kas</b>	<b>25.297.230.693</b>	<b>140.457.230.630</b>	<b>2,1</b>	<b>14</b>
<b>Deposito</b>				
Rupiah	15.000.000.000	1.448.200.000	1,3	-
<b>Jumlah Deposito</b>	<b>15.000.000.000</b>	<b>1.448.200.000</b>	<b>1,3</b>	<b>-</b>
<b>Piutang Usaha</b>				
Instansi Pemerintah	-	10.278.029.111	-	1
BUMN/BUMD	80.380.568.510	91.242.496.730	9	10
<b>Jumlah</b>	<b>120.581.343.331</b>	<b>101.520.525.841</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**33. SALDO TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pihak-Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Transaksi
1.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas Lainnya Pemerintah R.I. yang dikendalikan oleh	- Giro - Pinjaman Bank - Pemegang Saham Kreditur PKPU
2.	PT Bank Negara Indonesia (Persero)	Entitas Lainnya Pemerintah R.I. yang dikendalikan oleh	- Giro - Pinjaman Bank
3.	PT PLN (Persero)	Entitas Lainnya Pemerintah R.I. yang dikendalikan oleh	- Pendapatan Angkutan - Piutang Usaha
4.	PT Antam (Persero) Tbk	Entitas Lainnya Pemerintah R.I. yang dikendalikan oleh	- Pendapatan Angkutan - Piutang Usaha
5.	Kementerian Perhubungan R.I.	Instansi Pemerintah	- Piutang Usaha - Pendapatan Tol Laut

**34. KERUGIAN TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN**

Berdasarkan Akta nomor 001/0IRUT/RUPS-LBOLU/X/2017 Pada Tanggal 6 Oktober 2017 Bertempat di ruang rapat utama PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) Jalan Raden Saleh Kaveling 13-17, Jakarta Pusat. Telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Daya Laut Utama berkedudukan di Jakarta Selatan, Sebagaimana risalah di dalam Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pembubaran dan Likuidasi PT Daya Laut Utama. Berikut ini laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pendapatan usaha	-	-
Beban usaha	-	-
<b>Laba Kotor</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Pendapatan lainnya	-	-
Beban umum dan Administrasi	-	(822.354.500)
Beban lainnya	-	-
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<u>-</u>	<u>(822.354.500)</u>
Pajak penghasilan		
Pajak kini	-	-
Pajak tangguhan	-	-
<b>Rugi Setelah Pajak</b>	<u>-</u>	<u>(822.354.500)</u>
<b>Penghasilan komprehensif</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Laba dan Penghasilan Komprehensif</b>	<u>-</u>	<u>(822.354.500)</u>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**34. KERUGIAN TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN (lanjutan)**

Berikut ini distribusi kerugian operasi yang dihentikan:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pemilik entitas induk	-	(821.943.323)
Kepentingan non pengendali	-	(411.177)
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>(822.354.500)</b>

**35. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING**

	<u>2019</u>		
	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Ekuivalen Rupiah</u>
<b>Aset :</b>			
Kas dan Setara Kas			
Bank	USD	46.370	644.596.785
<b>Jumlah Aset</b>		<b>46.370</b>	<b>644.596.785</b>

	<u>2018</u>		
	<u>Mata Uang Asing</u>	<u>Reklasifikasi</u>	<u>Ekuivalen Rupiah</u>
<b>Aset :</b>			
Kas dan Setara Kas			
Bank	USD	267.519	3.873.946.821
<b>Jumlah Aset</b>		<b>267.519</b>	<b>3.873.946.821</b>

**36. INSTRUMEN KEUANGAN : INFORMASI RISIKO KEUANGAN**

**a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan**

**Risiko Kredit**

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang timbul jika pelanggan Perseroan gagal memenuhi Liabilitas kontraktual kepada Perseroan.

**Risiko Likuiditas**

Risiko Likuiditas adalah risiko dimana Perseroan tidak bisa memenuhi Liabilitas pada saat jatuh tempo.

Pada saat ini Perseroan dapat membayar semua Liabilitas pada saat jatuh tempo. Perseroan memiliki kas dan bank dan aset keuangan lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi Liabilitas keuangan jangka pendeknya. Untuk memenuhi Liabilitas keuangan jangka panjangnya, Perseroan berharap adanya peningkatan penjualan di masa mendatang.

**Risiko Tingkat Suku Bunga**

Risiko tingkat suku bunga arus kas adalah resiko dimana arus kas masa depan dari satu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**36. INSTRUMEN KEUANGAN : INFORMASI RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**a. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan (lanjutan)**

Perseroan memiliki pinjaman jangka pendek dan jangka panjang dengan bunga mengambang. Perseroan akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Perseroan akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan pemberi pinjaman.

**b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan**

Instrumen Keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar atau pada biaya perolehan diamortisasi. Selain itu, instrumen keuangan disajikan sebesar jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diakruai secara andal.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Aset Keuangan</b>		
Kas dan setara kas	41.991.868.646	145.112.280.226
Piutang usaha	215.223.644.302	212.817.688.818
Piutang lain-lain	7.885.096.333	20.263.420.598
<b>Jumlah Aset Keuangan</b>	<b><u>265.100.609.281</u></b>	<b><u>378.193.389.642</u></b>
<b>Liabilitas pada Biaya</b>		
Perolehan Diamortisasi :		
Utang Usaha	146.060.663.028	139.071.222.768
Biaya Akruai	6.387.198.555	6.379.248.427
Pendapatan Diterima Dimuka	11.675.586.581	2.606.574.596
<b>Jumlah Liabilitas Keuangan</b>	<b><u>164.123.448.164</u></b>	<b><u>148.057.045.791</u></b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

**36. INSTRUMEN KEUANGAN : INFORMASI RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**c. Risiko Kelangsungan Usaha Perusahaan**

Uraian	31-Des-19	31-Des-18	Deviasi
1	2	3	%
Kas dan Setara Kas (KS)	41.991.868.646	145.112.280.226	-71
Piutang Usaha (PU)	215.223.644.302	212.817.688.818	1
Persediaan (SD)	25.904.119.450	11.806.205.841	119
Aset Lancar (AL)	390.011.279.932	411.846.432.130	-5
Penyusutan dan Amortisasi (PA)	18.687.592.878	11.311.144.018	65
<b>Jumlah Aset (JA)</b>	<b>1.127.247.000.062</b>	<b>942.762.377.102</b>	20
Liabilitas Lancar (LP)	183.160.246.453	176.391.063.376	6
Liabilitas Jangka Panjang (KJP)	422.954.353.526	294.469.849.247	44
Jumlah Liabilitas (JK)	606.114.599.979	470.860.912.623	29
Modal Kerja Bersih			
(MKB) = (AL - KL)	206.851.033.479	235.455.368.754	-12
Akumulasi Rugi	(1.478.939.058.451)	(1.543.617.143.120)	-4
Ekuitas (EK)	521.132.400.081	471.901.464.479	10
Laba Bersih (LRB)	64.680.310.209	61.306.482.482	6
Beban Bunga (BB)	21.147.163.695	18.419.079.582	15
Modal Sendiri (MS) (EK-LRB-ATDP)	585.812.710.290	533.207.946.961	10
Pajak Penghasilan (PJ)	(2.338.637.849)	152.272.091	-1636
<b>Jumlah Pendapatan Usaha</b>	<b>625.811.875.314</b>	<b>561.705.974.042</b>	11
Laba Kotor	122.326.431.650	125.519.428.503	-3
EBITDA = (LRB + BB + PJ + PA)	102.176.428.933	91.188.978.173	12

**Rasio Keuangan**

Uraian	Satuan	2019	2018	Deviasi %
<b>I. Rasio Likuiditas</b>				
Rasio Lancar (AL/LP)	%	2,13	2,33	-8,80
Rasio Cepat (KS+PU)/LP	%	1,40	2,03	-30,79
Rasio Kas (KS / LP)	%	0,23	0,82	-72,13
<b>II. Rasio Leverage</b>				
Rasio Liabilitas terhadap Aset (JK/JA)	%	53,77	49,94	7,66
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (JK/EK)	%	116,31	99,78	16,56
Rasio Liabilitas Jk Panjang thd Ekuitas (KJP/EK)	%	81,16	62,40	30,92
<b>III. Rasio Aktivitas</b>				
Rasio Perputaran Aset (PU/JA)	Kali	0,19	0,23	-15,41
Rasio Perputaran Persediaan (SD/JPU)	hari	0,04	0,02	96,94
Rasio Penagihan Rata rata (PU/JPU) x 365		125,53	138,29	-9,23
<b>IV. Rasio Profitabilitas</b>				
Imbalan terhadap Ekuitas (LRB/MS)	%	11	11,50	-4,00
Imbalan terhadap Investasi (EBIT+PA)/JA	%	0,11	0,11	-1,38
Marjin Laba atas Penjualan. (LRB/JPU)	%	10,34	10,91	-5,30
Rasio EBITDA atas Penjualan	%	16	16,23	0,57

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

### **37. PERKARA LITIGASI**

#### Kantor Pusat

- Perseroan (Tergugat) melawan PT Mentari Sejati Perkasa (Penggugat). Nomor register 1002/Pdt.G/2018/PN Sby Tanggal 19 Oktober 2018. Penggugat mengkalim bahwa PT. Djakarta Lloyd (persero) melakukan wanprestasi terkait perjanjian sewa menyewa container. Penggugat mengkalim bahwa sewa container, yang sampai di daerah Jakarta, Luwuk, Ternate, Lembar, Gorontalo, Bau-Bau, Tobelo, Makassar, Badas; lama-lama menumpuk di lokasi itu yang jumlahnya sangat banyak dan memakai lahan/ tempat, dan tergugat pun tidak kunjung mengambilnya dengan alasan tergugat tidak mempunyai tempat untuk menampung container. Dari tahun 2009 hingga tahun 2018 jumlahnya sekitar 639 container ditempat Penggugat yang belum diambil oleh tergugat dan total memakan sewa biaya lahan sebesar Rp12.500.000.000. Selanjutnya Penggugat memohon pengadilan mengadili perkara agar ada penyelesaian secara hukum dengan jalan memberikan persetujuan lelang umum container yang hasilnya akan dipotong biaya sewa lahan mulai dari tahun 2009 hingga saat ini sebesar Rp12.500.000.000 atau Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan tergugat segera mengambil container yang disewakan kepada penggugat dengan segera di tempat sebagaimana tersebut diatas dalam keadaan apa adanya dan membayar sewa lahan sebesar Rp12.500.000.000; Apabila ada sisanya hasil lelang dikembalikan kepada tergugat, apabila hasil lelang nilainya kurang dari Rp12.500.000.000 akan ditagihkan kembali kepada tergugat.
  
- Perseroan (Tergugat) melawan PT ASL Shipyard Indonesia (Penggugat). Nomor register 240/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst. Tanggal 3 Mei 2017. Penggugat mengkalim bahwa PT. Djakarta Lloyd melakukan wanprestrasi terkait perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Docking tertanggal 10 Juni 2011. Berdasarkan perjanjian tersebut, Penggugat telah sepakat untuk melakukan pekerjaan docking atau perbaikan atas 5 (lima) buah kapal dan di sisi lain Tergugat telah sepakat untuk membayar biaya docking dan perbaikan kapal-kapal tersebut kepada Penggugat. Selanjutnya Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Jakarta Pusat mengadili dalam pokok perkara:
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat PT ASL Shipyard Indonesia tersebut, untuk sebagian;
  - 2) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
  - 3) Menghukum Tergugat untuk:
    - i) Membayar Tagihan Pertama yang mencakup Biaya Pekerjaan dan biaya wharfage periode 23 Juni 2011 hingga 20 Juni 2012 sebesar Rp24.802.007.474 (dua puluh empat milyar delapan ratus dua juta tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);
    - ii) Membayar Tagihan Kedua yang mencakup biaya pemeliharaan periode 1 Juli 2012 hingga 31 Desember 2014 dan biaya wharfage periode 21 Juni 2012 hingga 31 Desember 2014 sebesar Rp7.532.915.680 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
    - iii) Membayar Tagihan Ketiga yang mencakup biaya pemeliharaan dan biaya wharfage periode 1 Januari 2015 hingga 31 Oktober 2015 sebesar Rp2.315.426.330 (dua milyar tiga ratus lima belas juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
    - iv) Membayar Tagihan Keempat yang mencakup biaya pemeliharaan dan biaya wharfage periode 1 November 2015 hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp2.567.721.540 (dua milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);
    - v) Menghukum Tergugat untuk membayar penggantian biaya wharfage sebesar Rp3.764.200 (tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah) per hari sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan KM MH Thamrin meninggalkan galangan kapal Penggugat;



**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**37. PERKARA LITIGASI (lanjutan)**

Kantor Pusat

- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan pembayaran Biaya Pekerjaan sebesar 0,1% (promil) per hari kepada Penggugat hingga Tergugat melakukan pelunasan secara penuh kepada Penggugat;
  - 5) Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
- PT Karsindo Utama (Tergugat I). Perseroan (Tergugat II). Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat III). Marion Silitonga, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tergugat IV). Dewi Tenty Septy Artiany, selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Turut Tergugat I). Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Turut Tergugat II). Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Turut Tergugat III). Melawan Ny. Najoo Pangemanan, H.M. Toha Tjakra Amidjaja, Theresia Pudjiati, Nila Savitri, Sjambudiarti Amir, Ir. Samuel J Muskitta, G.P.H. Hehuwat yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT. Surat ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor Register: 385/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Br. Tanggal 16 Juni 2017. Penggugat mengklaim bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar kerugian materil sebesar Rp14.120.000.000,- (Empat belas milyar seratus dua puluh juta rupiah) secara tanggung renteng dan kerugian immateril sebesar Rp7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah) secara tanggung renteng.

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN**

**a. Pengangkatan Dewan Komisaris**

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd Nomor: SK-19/MBU/01/2020 tentang Pengalihan tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota dewan komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd dengan Akta Lenny Janis Ishak,SH Jakarta Nomor 25 tanggal 25 Januari 2020 Tentang Pernyataann Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd menetapkan:

- Kesatu : Mengalihkan penugasan Tuan Lambonar O. Silitonga yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK – 117/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang semula Komisaris menjadi Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut.
- Kedua : Mengangkat Tuan M. Yusuf Permana sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**38. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)**

**a. Pengangkatan Dewan Komisaris (lanjutan)**

- Ketiga : Bagi Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan tersebut yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- Keempat : Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik dihadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

**b. Perkara Litigasi**

Pada saat laporan keuangan diterbitkan, Perusahaan sedang mengajukan gugatan kepada PT Mentari Sejati Perkasa, atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perkara No. 32/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, dimana PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) terdaftar sebagai kreditur konkuren dengan nominal sebesar Rp20.989.649.394.

**39. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BARU DAN DIREVISI (“PSAK”) DAN INTERPRETASI PSAK (“ISAK”)**

Penerapan dari interpretasi baru, amandemen dan penyesuaian tahunan terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2019 tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada tahun berjalan:

- Amandemen PSAK No. 24, “Imbalan Kerja - Amandemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program”
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 22, “Kombinasi Bisnis”
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 26, “Biaya Pinjaman”
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan”
- Penyesuaian tahunan PSAK No. 66, “Pengendalian Bersama”
- ISAK No. 33 tentang “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”
- ISAK No. 34 tentang “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”

Berikut perubahan standar akuntansi yang berlaku efektif diterapkan mulai tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

- PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62, Kontrak Asuransi
- PSAK 71, Instrumen Keuangan
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73, Sewa

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

---

**39. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BARU DAN DIREVISI (“PSAK”) DAN INTERPRETASI PSAK (“ISAK”) (lanjutan)**

Penerapan lebih awal untuk standar diatas diperbolehkan, kecuali PSAK 73, Penerapan lebih awal PSAK 73 adalah pada saat Perusahaan telah menerapkan PSAK 72. Perusahaan tidak memiliki atensi untuk menerapkan PSAK diatas lebih awal dari tanggal efektifnya.

**40. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN PERUSAHAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Manajemen Perusahaan bertanggung-jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui sesuai Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd (Persero) dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut untuk diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2020.

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) - INDUK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	2019	2018
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	40.328.157.095	139.357.140.939
Piutang usaha		
Pihak ketiga	131.524.674.689	111.495.949.731
<i>(Setelah dikurangi provisi penurunan nilai piutang tak tertagih tanggal 31 Des 2019 dan 2018 masing- masing sebesar Rp 6.330.357.227 dan Rp 5.033.748.774).</i>		
Pihak berelasi	80.380.568.510	101.520.525.841
Aset keuangan lancar lainnya	15.543.827.357	31.505.479.606
Persediaan	25.893.514.650	11.665.115.168
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	72.469.830.657	17.139.839.409
Pajak dibayar dimuka	25.211.340.600	2.304.612.534
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>391.351.913.558</b>	<b>414.988.663.228</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Investasi pada entitas asosiasi	6.010.000.000	7.009.500.001
Aset tetap	519.817.649.460	299.361.606.310
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Des 2019 dan 2018, masing- masing sebesar Rp 331.559.337.464 dan Rp306.449.711.797).</i>		
Aset pajak tangguhan	139.271.338.928	139.710.740.800
Aset tidak lancar lainnya	64.248.155.690	65.640.631.973
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>729.347.144.078</b>	<b>511.722.479.084</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.120.699.057.636</b>	<b>926.711.142.312</b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) - INDUK**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b><u>LIABILITAS DAN EKUITAS</u></b>		
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha	146.141.722.916	139.968.095.845
Utang pajak	695.446.779	172.771.356
Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya	654.093.944	789.593.942
Pendapatan diterima dimuka	11.675.586.581	1.837.015.414
Beban akrual	5.688.782.172	3.155.527.000
Bagian utang jatuh tempo dalam 1 tahun:		
Pinjaman bank	20.075.250.612	19.819.200.000
Sewa pembiayaan	-	256.050.612
<b>Jumlah Liabilitas Jangka pendek</b>	<b><u>184.930.883.004</u></b>	<b><u>165.998.254.169</u></b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Utang sewa pembiayaan	174.398.805	90.399.805
Utang bank	252.670.788.488	121.526.757.443
Rekening dana investasi	168.361.692.009	171.578.794.404
Liabilitas imbalan pasca kerja	1.661.828.814	1.167.669.569
<b>Jumlah Liabilitas Jangka panjang</b>	<b><u>422.868.708.116</u></b>	<b><u>294.363.621.221</u></b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b><u>607.799.591.120</u></b>	<b><u>460.361.875.390</u></b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal Saham (Saham Seri A dan B)	1.999.472.669.450	1.635.663.000.000
<i>(Ditempatkan dan disetor penuh Saham Seri A dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham per 31 Des 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.577.147.000.000, Rp1.197.828.000.000 dan Saham Seri B dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham 31 Des 2019 dan 2018 serta 1 Jan 2018/31 Des 2017 masing-masing sebesar Rp 437.835.000.000 dan Rp 437.835.000.000 serta Rp437.835.000.000.</i>		
Tambahan modal disetor	47.000.000	47.000.000
Cadangan umum	62.951.989	62.951.989
Penyertaan modal negara		379.318.091.377
Saldo rugi	(1.486.375.937.983)	(1.548.376.698.009)
Komponen ekuitas lain	(307.216.940)	(365.078.435)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b><u>512.899.466.516</u></b>	<b><u>466.349.266.921</u></b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b><u>1.120.699.057.636</u></b>	<b><u>926.711.142.312</u></b>

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) - INDUK**  
**LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF LAINNYA**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Pendapatan usaha	598.468.674.969	528.869.964.620
Beban pokok pendapatan	(490.287.639.854)	(419.436.415.456)
<b>Laba Bruto</b>	<b><u>108.181.035.115</u></b>	<b><u>109.433.549.164</u></b>
<b>Beban Usaha</b>		
Beban pemasaran	(1.652.363.607)	(1.841.868.463)
Beban umum dan administrasi	(59.782.269.833)	(37.939.603.410)
<b>Jumlah Beban Usaha</b>	<b><u>(61.434.633.440)</u></b>	<b><u>(39.781.471.873)</u></b>
<b>Laba Usaha</b>	<b><u>46.746.401.675</u></b>	<b><u>69.652.077.291</u></b>
<b>Pendapatan (Beban) Non-Usaha</b>		
Pendapatan non usaha	56.224.457.113	31.235.987.120
Beban non usaha	(19.402.820.360)	(25.401.524.983)
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Usaha</b>	<b><u>36.821.636.753</u></b>	<b><u>5.834.462.136</u></b>
Beban keuangan	(21.147.163.695)	(18.419.079.582)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b><u>62.420.874.733</u></b>	<b><u>57.067.459.845</u></b>
<b>Beban (Penghasilan) Pajak</b>		
Pajak kini	-	
Pajak tangguhan	(420.114.707)	1.482.736.877
<b>Jumlah Beban Pajak</b>	<b><u>(420.114.707)</u></b>	<b><u>1.482.736.877</u></b>
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b><u>62.000.760.026</u></b>	<b><u>58.550.196.723</u></b>
<b>Pendapatan Komprehensif Lain</b>		
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:		
Keuntungan (Kerugian) Akturia	77.148.661	(671.195.855)
Pajak Penghasilan Terkait Pos-pos yang Tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi	(19.287.165)	167.798.964
<b>Jumlah Pendapatan Komprehensif Lain</b>	<b><u>57.861.496</u></b>	<b><u>(503.396.891)</u></b>
<b>Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b><u>62.058.621.522</u></b>	<b><u>58.046.799.831</u></b>



**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) - INDUK**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	Modal saham di Tempatkan dan di Setor Penuh	Penyertaan Modal Negara	Tambahan Modal Disetor	Cadangan Umum	Saldo Rugi	Komponen Ekuitas Lain	Jumlah Ekuitas
<b>Saldo 31 Desember 2017</b>	1.635.663.000.000	379.318.091.377	47.000.000	62.951.989	(1.606.926.894.729)	138.318.456	408.302.467.094
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	58.550.196.723	-	58.550.196.723
Keuntungan (Kerugian) Akturia	-	-	-	-	-	(503.396.891)	(503.396.891)
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	1.635.663.000.000	379.318.091.377	47.000.000	62.951.989	(1.548.376.698.006)	(365.078.435)	466.349.266.923
Laba Tahun Berjalan	-	-	-	-	62.000.760.026	-	62.000.760.026
Pembayaran kepada kreditur konkruen pemilik saham Seri B	(15.508.421.927)	-	-	-	-	-	(15.508.421.927)
Perubahan Penyertaan Modal Negara menjadi modal disetor	379.318.091.377	(379.318.091.377)	-	-	-	-	-
Keuntungan (Kerugian) Akturia	-	-	-	-	-	57.861.496	57.861.496
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	1.999.472.669.450	-	47.000.000	62.951.989	(1.486.375.937.983)	(307.216.940)	512.899.466.516

**PT PELAYARAN SAMUDERA DJAKARTA LLOYD (PERSERO) - INDUK**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah)**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan kas dari pelanggan	599.579.907.342	395.045.628.826
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(554.410.298.288)	(423.830.121.870)
<b>Kas yang dihasilkan dari Operasi</b>	<b><u>45.169.609.054</u></b>	<b><u>(28.784.493.044)</u></b>
Penerimaan dari bunga bank dan lainnya	940.368.364	10.877.314.092
Pembayaran bunga bank	(21.147.163.695)	(18.419.079.582)
Pembayaran pajak	(5.186.022.567)	(281.222.125)
<b>Arus Kas Bersih Digunakan Untuk</b>	<b><u>(25.392.817.898)</u></b>	<b><u>(7.822.987.615)</u></b>
<b>Aktivitas Operasi</b>	<b><u>19.776.791.156</u></b>	<b><u>(36.607.480.659)</u></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Perolehan aset tetap	(234.441.384.116)	(177.476.203.124)
Penjualan aset tetap	-	27.009.396.250
Penurunan/(kenaikan) aset lain-lain	-	-
<b>Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b><u>(234.441.384.116)</u></b>	<b><u>(150.466.806.874)</u></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan utang bank	156.922.831.045	113.611.957.444
Pembayaran pokok pinjaman	(25.778.800.000)	(162.216.000.000)
Pembayaran kepada kreditur konkruen pemilik saham Seri B	(15.508.421.927)	-
<b>Arus Kas Bersih Diperoleh Dari / (Digunakan Untuk)</b>		
<b>Aktivitas Pendanaan</b>	<b><u>115.635.609.118</u></b>	<b><u>(48.604.042.556)</u></b>
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	(99.028.983.844)	(235.678.330.089)
Kas dan setara kas pada awal tahun	<u>139.357.140.939</u>	<u>375.035.471.028</u>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b><u>40.328.157.095</u></b>	<b><u>139.357.140.939</u></b>